



NAVIGATING THROUGH
**THE CHALLENGE
OF GROWTH**



Laporan Tahunan

NAVIGATING THROUGH THE CHALLENGE OF GROWTH

Dalam situasi dunia yang menantang, BTPN terus mempertahankan komitmen pada pertumbuhan berkelanjutan dan penciptaan nilai bagi pemangku kepentingan. BTPN terus menyelaraskan dan memperkuat bisnisnya di berbagai segmen, mulai dari kelompok masyarakat prasejahtera produktif, ritel, hingga korporasi. Di tengah pandemi COVID-19, BTPN memberikan prioritas pada kesehatan dan keselamatan karyawan dan nasabah, serta fokus pada upaya-upaya mempertahankan kualitas kredit dan relasi dengan nasabah untuk jangka panjang. Pada saat bersamaan, BTPN mengintensifkan pengembangan *platform* perbankan digital Jenius untuk mendukung pertumbuhan bisnis BTPN ke depan.

Daftar Isi



1 Tema NAVIGATING THROUGH THE CHALLENGE OF GROWTH

10

Ikhtisar Utama



- 12 Kinerja 2020
- 14 Ikhtisar Keuangan
- 18 Ikhtisar Saham
- 19 Aksi Korporasi
- 19 Penerbitan Obligasi/Sukuk
- 20 Ikhtisar Obligasi dan Sukuk
- 22 Peristiwa Penting 2020
- 24 Penghargaan & Sertifikasi

26

Laporan Dewan Komisaris & Direksi



- 28 Laporan Dewan Komisaris
- 36 Laporan Direksi
- 52 Surat Pernyataan Anggota
Dewan Komisaris dan Direksi

54

Profil Perusahaan



- 56 Informasi Umum Perusahaan
- 57 Riwayat Singkat Perusahaan
- 58 Jejak Langkah
- 60 Bidang Usaha
- 61 Produk dan Layanan
- 62 Struktur Organisasi
- 64 Visi, Misi & Nilai-Nilai Utama
- 66 Profil Dewan Komisaris
- 71 Profil Direksi
- 81 Profil Anggota Komite
- 81 Komite Audit
- 83 Komite Pemantau Risiko
- 85 Komite Remunerasi dan Nominasi
- 86 Komite Tata Kelola Terintegrasi
- 88 Profil Pejabat Eksekutif

- 91 Statistik Karyawan
- 97 Struktur Kepemilikan
- 98 Komposisi dan Profil Pemegang Saham
- 98 Informasi Entitas Induk Terakhir
- 99 Informasi Pemegang Saham Utama
- 102 Daftar Entitas Anak
- 102 Kantor Cabang
- 103 Kronologi Pencatatan Saham
- 104 Kronologi Pencatatan Efek Lainnya
- 105 Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Penunjang Pasar Modal
- 106 Informasi pada *Website* Perusahaan

108

Analisa dan Pembahasan Manajemen



- 110 Tinjauan Ekonomi dan Industri Perbankan
- 110 Perkembangan Perekonomian
- 112 Perkembangan Industri
- 114 Tinjauan Bisnis dan Operasional
- 114 Kinerja Bisnis Per Segmen Usaha
- 114 Retail Banking
- 115 Digital Banking – Jenius
- 118 Digital Banking – BTPN Wow!
- 119 Retail Lending Business
- 120 Wealth Management Business
- 122 Micro Business
- 124 Business Banking
- 124 Corporate Banking
- 127 Treasury
- 129 Perbankan Syariah
- 131 Profitabilitas Per Segmen Usaha
- 132 Tinjauan Kinerja Keuangan
- 151 Aspek Pemasaran

152

Manajemen Risiko



- 154 Kebijakan Manajemen Risiko
- 155 Tata Kelola Manajemen Risiko
- 155 Organisasi Manajemen Risiko
- 155 Penerapan Manajemen Risiko
- 156 Fokus Tahun 2020
- 158 Hasil *Review* Penerapan Manajemen Risiko
- 158 Sistem Pengendalian Internal
- 159 Pengungkapan Permodalan
- 173 Pengungkapan Eksposur Risiko

228

Tinjauan Pendukung Bisnis



- 230 Sumber Daya Manusia
- 234 Teknologi Informasi dan Operasional
- 234 Teknologi Informasi
- 240 Operasional

242

TATA KELOLA PERUSAHAAN



- 244 Prinsip-Prinsip dalam Penerapan GCG
- 246 Tujuan Penerapan GCG
- 246 Struktur GCG
- 247 Penerapan dan Komitmen GCG
- 253 Komitmen Penerapan GCG Tahun 2021

340

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan



- 342 Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- 343 Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- 346 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia
- 348 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi yang Adil
- 349 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup
- 351 Tanggung Jawab Sosial di Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 353 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Nasabah
- 354 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

355

Laporan Keuangan 2020



- 361 Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Tahun Buku 2020
- 597 Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 9/SEOJK.03/2020 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional
- 601 Referensi SEOJK Nomor 30-SEOJK.04-2016: Laporan Tahunan Perusahaan Publik

Melanjutkan Inisiatif Strategis Pasca Merger

Setelah tuntasnya tahap ‘stabilisasi’ pasca merger, BTPN melanjutkan dengan tahap ‘*synergize*’ sepanjang tahun 2020, dan kemudian disusul tahap ‘*scale-up*’ untuk tahun-tahun selanjutnya.



Synergize

Menggabungkan aset-aset yang ada untuk meningkatkan penjualan silang, melayani segmen baru, dan mengurangi biaya.



Scale-Up

Menciptakan mesin baru untuk pertumbuhan dan profitabilitas, termasuk peningkatan model bisnis Jenius dan transformasi digital berkelanjutan di semua segmen bisnis



Dana Pihak Ketiga

↑ 15,93%

100,79 Triliun

Kredit

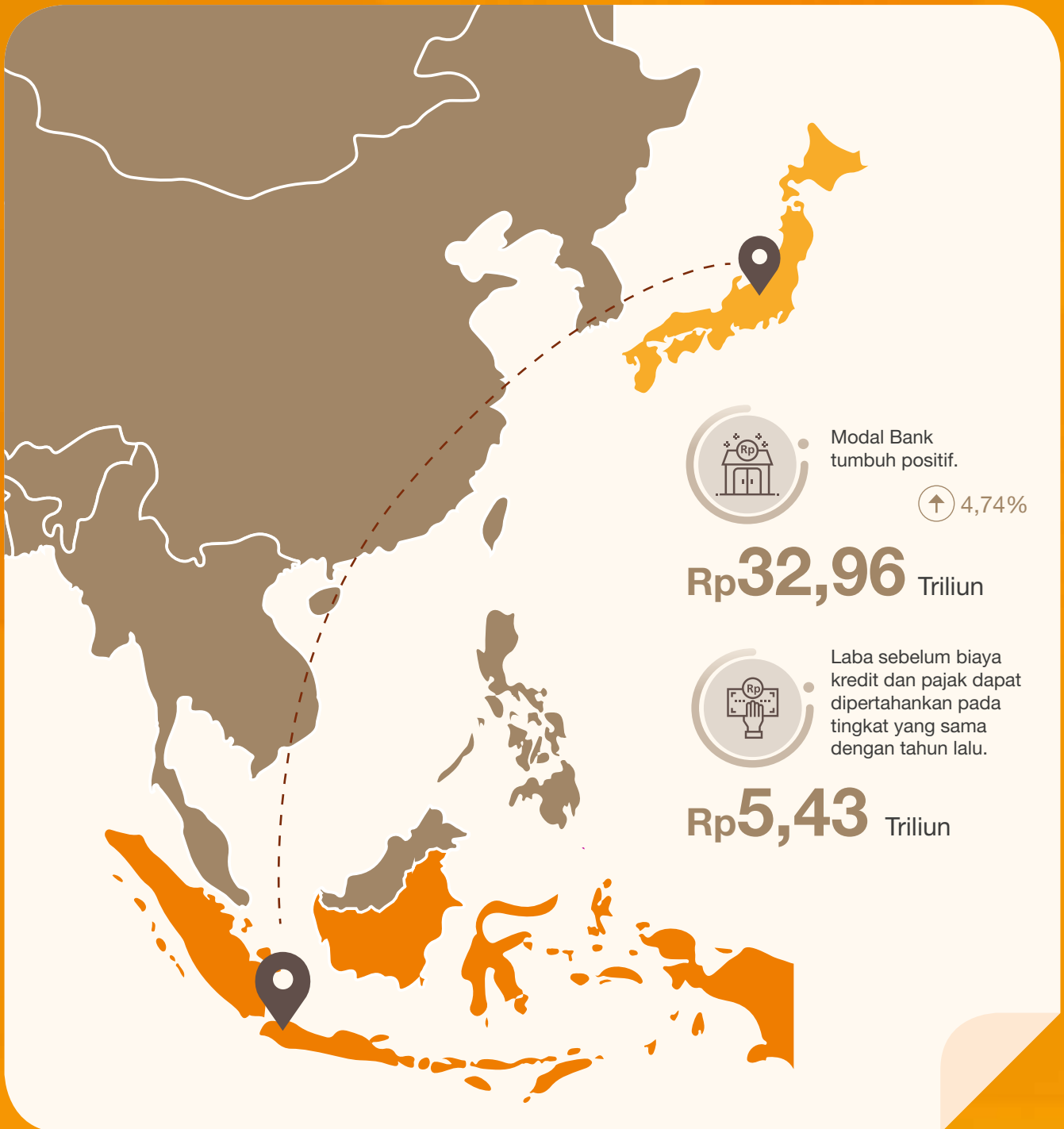
↓ 3,91%

136,21 Triliun

Total Aset

↑ 0,84%

183,17 Triliun



Mengedepankan Adaptasi terhadap Krisis

BTPN sigap merespons dampak pandemi COVID-19 dan realita kondisi ‘*new normal*’ di tahun 2020 dengan berbagai upaya untuk beradaptasi dan sekaligus mempertahankan pertumbuhan.



Peduli Karyawan

Menerapkan berbagai inisiatif untuk melindungi kesehatan karyawan dengan tetap menjaga produktivitas



Peduli Nasabah

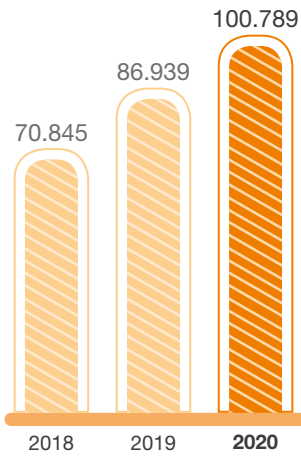
Menerapkan protokol kesehatan di semua cabang dalam pelayanan kepada nasabah untuk melindungi nasabah



Peduli Komunitas

Melaksanakan program restrukturisasi kredit untuk membantu nasabah dalam mempertahankan usahanya

Dana Pihak Ketiga
(Rp Miliar)



Rp100,79 Triliun

Dana Pihak Ketiga tumbuh 15,93%
dibandingkan posisi tahun sebelumnya



Rp1,69 Triliun

Pendapatan operasional lainnya Bank
tumbuh 4,47%



Memperkuat Landasan Pertumbuhan ke Depan

Kondisi pandemi COVID-19 memperlihatkan efektivitas layanan perbankan digital dalam kehidupan sehari-hari, dan memberikan urgensi pada strategi pengembangan *platform* Jenius guna mendukung bisnis BTPN ke depan.



Nasabah Jenius pada tahun 2020 tercatat

3,1 juta nasabah, tumbuh **26,92%** dari tahun sebelumnya.



Pengembangan fitur-fitur baru (Jenius Bisnis dan Biseniskit, personal *financial management*, QRIS, dll)





Jenius for Business merupakan partner dan starter kit bagi para digital-savvy yang ingin memulai dan mengembangkan bisnis.

Jenius for Business



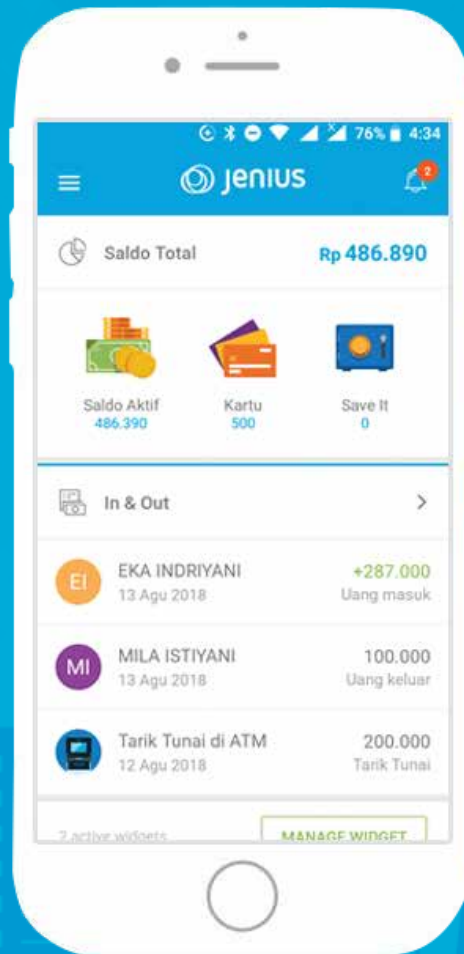
Pendanaan melalui Jenius tumbuh positif. Posisi tahun 2020

Rp 13,28 Triliun



Fitur ini membantu para digital-savvy Indonesia mengelola arus kas dengan lebih mudah melalui pencatatan pengeluaran dan pendapatan secara otomatis melalui aplikasi Jenius.

Moneytory







IKHTISAR UTAMA

- 12 Kinerja 2020
- 14 Ikhtisar Keuangan
- 18 Ikhtisar Saham
- 19 Aksi Korporasi
- 19 Penerbitan Obligasi/Sukuk
- 20 Ikhtisar Obligasi dan Sukuk
- 22 Peristiwa Penting 2020
- 24 Penghargaan & Sertifikasi



Landasan kinerja Bank ke depan semakin kuat, terutama didukung oleh segmen Korporasi dan pengembangan digital di mana saat ini Bank merupakan *leading player* dalam *digital banking*.

Kinerja 2020

Sepanjang tahun 2020, BTPN berhasil mempertahankan kinerja usahanya tetap stabil kendati di tengah tekanan krisis.



Kemampuan Bank menghasilkan laba tetap stabil.

12

Laporan Tahunan 2020 PT Bank BTPN Tbk

Pendapatan Bunga Bersih

Rp 10,62 Triliun

Di dukung oleh penurunan biaya dana seiring penurunan suku bunga acuan.



Beban Operasional Lainnya

Rp 6,88 Triliun

Beban Operasional Lainnya turun 3,46% dibandingkan tahun sebelumnya.



Laba Bersih Tahun Berjalan

Rp 2,01 Triliun

Di tengah tantangan pandemi COVID-19, Bank terus membukukan laba bersih.



KPMM

25,55%

Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum meningkat dari 24,24% di posisi akhir tahun sebelumnya.



LCR

281,70%

Bank berhasil menjaga tingkat LCR di atas ketentuan minimum 100%.



NPL (Gross)

1,21%

Bank berhasil menjaga NPL (Gross) di tingkat yang rendah di tengah situasi COVID-19.



Efisiensi

Bank berhasil menekan beban operasional (di luar CKPN) hingga mengalami penurunan.



536

Bank memiliki 536 kantor cabang untuk melayani nasabah di Indonesia.



Fungsi intermediasi Bank tetap berjalan dengan baik.

Kredit Disalurkan

Rp136,21 Triliun

Penyaluran kredit yang selektif di tengah pandemi. Kualitas kredit terjaga baik.

Dana Dihimpun

Rp100,79 Triliun

Bank berhasil meningkatkan penghimpunan DPK.

**Pertumbuhan
Segmen Usaha**

Pertumbuhan kredit yang berhasil disalurkan untuk segmen Korporasi dan Syariah meningkat masing-masing sebesar 3,87% dan 5,81%.

**Pertumbuhan
Saldo CASA**

Saldo *Current Account* dan *Saving Account* tumbuh 13,32% dibandingkan posisi tahun lalu.

Ikhtisar Keuangan

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	2020	2019 ¹¹⁾	2018	2017
Neraca Keuangan				
Jumlah Aset	183.165.978	181.631.385	101.341.224	95.041.593
Aktiva Produktif ¹⁾	176.915.917	173.854.020	94.345.608	88.263.211
Pinjaman yang Diberikan ²⁾	136.212.619	141.760.183	68.136.780	65.351.837
Simpanan Nasabah ³⁾	100.788.906	86.939.479	70.844.712	67.918.073
Pinjaman yang Diterima	37.176.039	44.086.343	8.442.765	5.208.640
Efek-efek yang Diterbitkan	993.045	3.190.628	1.197.442	2.543.401
Penyertaan Saham	22.522	22.522	22	22
Jumlah Liabilitas ³⁾	150.201.225	150.159.457	82.554.894	78.289.053
Jumlah Ekuitas ⁴⁾	32.964.753	31.471.928	18.786.330	16.752.540
Jumlah Lembar Saham yang Disetor dan Dibayar Penuh (dalam satuan)	8.148.931.869	8.148.928.869	5.851.646.757	5.840.287.257
Informasi Hasil Usaha				
Pendapatan Bunga	16.403.483	18.680.979	14.126.651	14.046.062
Beban Bunga	(5.779.055)	(7.689.284)	(4.526.243)	(4.524.452)
Pendapatan Bunga Bersih	10.624.428	10.991.695	9.600.408	9.521.610
Pendapatan Operasional Lainnya	1.688.837	1.616.578	600.139	469.537
Beban Operasional Lainnya	(6.883.113)	(7.129.872)	(5.877.519)	(6.915.102)
Biaya CKPN	(2.799.638)	(1.445.882)	(1.375.272)	(1.097.619)
Pendapatan Operasional - Bersih	2.630.514	4.032.519	2.947.756	1.978.426
Laba Tahun Berjalan Sebelum Pajak	2.633.076	4.018.922	2.919.428	1.936.845
Laba Bersih Tahun Berjalan	2.005.677	2.992.418	2.128.064	1.421.940
Laba Tahun Berjalan				
- Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	1.749.293	2.572.528	1.838.471	1.220.886
- Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali	256.384	419.890	289.593	201.054
Penghasilan Komprehensif Lain	24.198	(14.596)	238.280	(13.449)
Jumlah Laba Komprehensif	2.029.875	2.977.822	2.366.344	1.408.491
Laba Komprehensif Tahun Berjalan				
- Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	1.776.256	2.555.357	2.065.220	1.211.719
- Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali	253.619	422.465	301.124	196.772
Laba Bersih per Saham (Nilai Penuh)	217	327	320	213

Catatan:

1. Termasuk pinjaman pembiayaan/piutang syariah yang diberikan, giro pada BI dan bank-bank lain, penempatan pada BI dan bank-bank lain, efek-efek, penyertaan saham, tagihan akseptasi, reverse repo dan tagihan derivatif.
2. Termasuk pembiayaan/piutang Syariah
3. Termasuk dana *syirkah* temporer
4. Termasuk kepentingan non-pengendali
5. Termasuk risiko kredit dan operasional
6. RoA sebelum pajak
7. Perhitungan BOPO berdasarkan POJK Baru (Antasena)
8. LDR (tidak termasuk Pinjaman kepada Bank)
9. Termasuk *Payment Points* & Kantor Fungsional
10. Termasuk BTPN Syariah
11. Beberapa akun dalam informasi komparatif telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.



Keterangan	2020	2019 ¹¹⁾	2018	2017
Rasio Keuangan (dalam %)				
Permodalan				
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) ⁵⁾	25,6	24,2	24,6	24,1
Aset Produktif				
Aset produktif bermasalah dan aset nonproduktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset nonproduktif	0,6	0,5	0,9	0,7
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,0	0,7	1,0	0,7
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	2,0	0,9	1,3	1,0
NPL-Bruto	1,2	0,8	1,2	0,9
NPL-Neto	0,5	0,4	0,5	0,4
Profitabilitas				
Imbal Hasil Aset (ROA) ⁶⁾	1,4	2,3	3,0	2,1
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	6,1	9,9	11,6	8,2
Margin Pendapatan Bunga Bersih (NIM)	6,1	6,9	11,3	11,6
Liabilitas terhadap Aktiva	82,0	82,7	81,5	82,4
Liabilitas terhadap Ekuitas	481,2	502,7	468,9	486,8
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ⁷⁾	89,5	83,4	80,1	86,5
Biaya Dana	3,8	5,4	5,9	6,1
Likuiditas				
Loan to Deposit Ratio (LDR) ⁸⁾	134,2	163,0	96,2	96,2
Kepatuhan				
Persentase Pelanggaran BMPK				
Pihak Terkait	-	-	-	-
Pihak Tidak Terkait	-	-	-	-
Persentase Pelampauan BMPK				
Pihak Terkait	-	-	-	-
Pihak Tidak Terkait	-	-	-	-
Giro Wajib Minimum Utama Rupiah	3,2	6,2	6,6	6,6
Giro Wajib Minimum Utama Valuta Asing	4,0	8,0	8,3	8,4
Posisi Devisa Neto	0,4	0,1	0,4	0,4
Lain-lain				
Jumlah Kantor Cabang ⁹⁾	536	579	795	939
Jumlah ATM dan TCR	227	226	227	207
Jumlah Karyawan ¹⁰⁾	19.370	19.235	19.175	20.912

↑ **15,93%**

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga

Rp32,96 triliun

Total Ekuitas

25,55%

Rasio Kecukupan Modal (CAR)

↑ **1,21%**

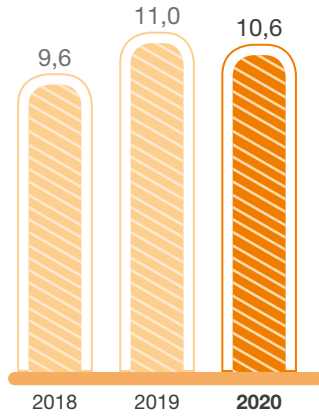
Kualitas Pinjaman (Rasio *NPL-Gross*)

0,84%

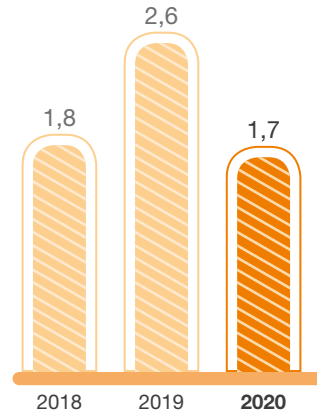
Pertumbuhan Aset



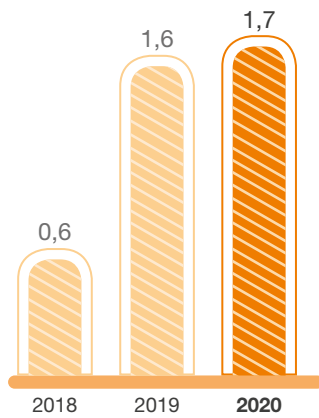
Pendapatan Bunga Bersih
(dalam triliun rupiah)



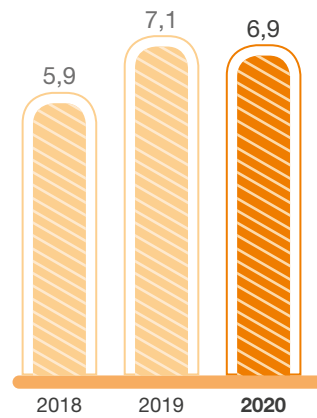
Laba Bersih yang Diatribusikan
kepada Pemilik Entitas Induk
(dalam triliun rupiah)



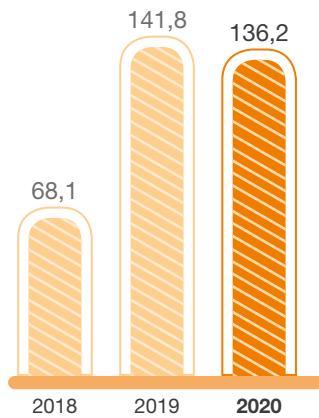
Pendapatan Operasi Lainnya
(dalam triliun rupiah)



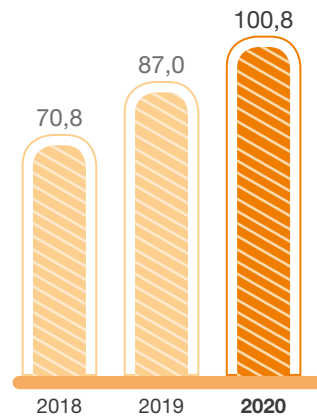
Beban Operasional Lainnya
(dalam triliun rupiah)



Pinjaman yang Diberikan
(dalam triliun rupiah)



Simpanan Nasabah
(dalam triliun rupiah)



Ikhtisar Saham

PENAWARAN UMUM PERDANA

Keputusan terhadap Penawaran Umum Saham Perdana Biasa PT Bank BTPN Tbk kepada masyarakat Indonesia dilakukan sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 8 Juni 2007. Jumlah saham yang ditawarkan adalah 267.960.220 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran setiap saham sebesar Rp2.850 (nilai penuh). Saham-saham tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 12 Maret 2008.

KINERJA SAHAM

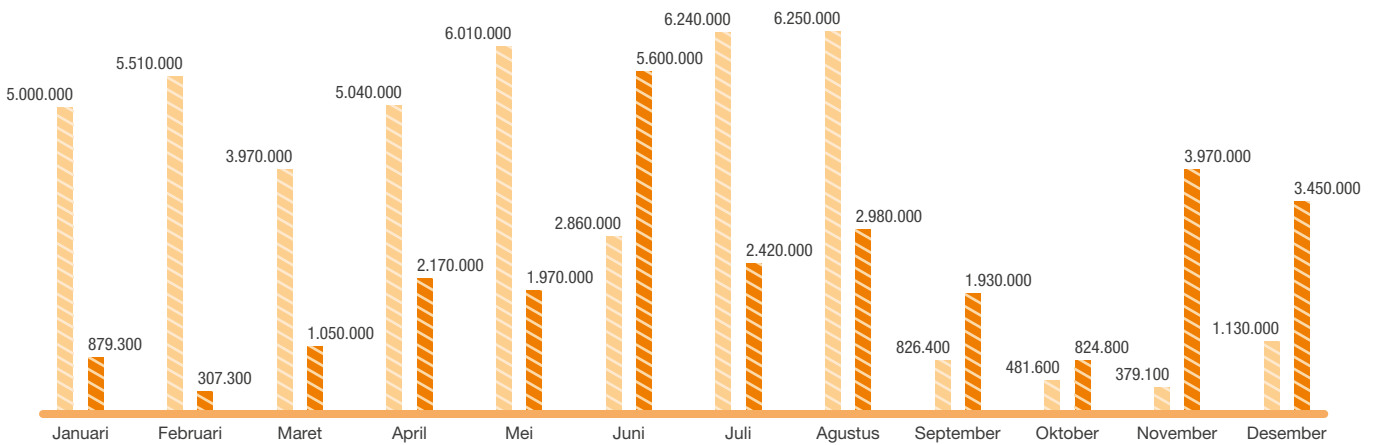
Hingga akhir kuartal IV/2020, saham Bank diperdagangkan sebesar Rp3.110 per lembar saham. Perkembangan kinerja saham Bank disajikan dalam grafik dan tabel di bawah ini.

PERKEMBANGAN SAHAM BULANAN (2019-2020)

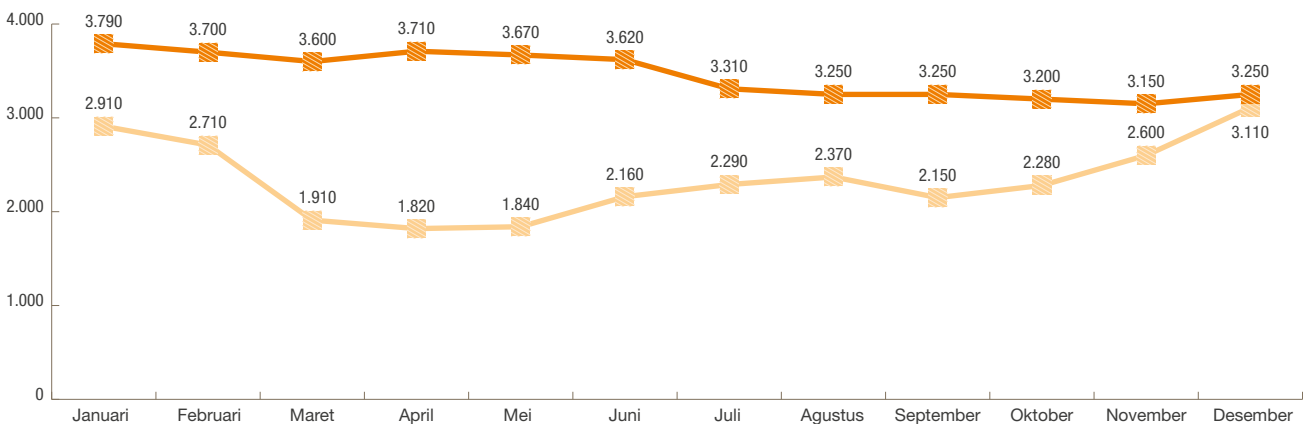
18

Laporan Tahunan 2020 PT Bank BTPN Tbk

Volume  2019  2020



Harga Penutupan (Rp)  2019  2020





PERKEMBANGAN KINERJA SAHAM TRIWULANAN 2020 & 2019

Periode	Tertinggi (Rp)		Terendah (Rp)		Penutupan (Rp)		Volume (Shares)	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Maret	3.300	4.000	1.585	3.460	1.910	3.600	2.240.000	14.490.000
Juni	2.390	3.750	1.750	3.400	2.160	3.620	9.730.000	13.910.000
September	2.650	3.720	1.950	3.080	2.150	3.250	7.340.000	13.310.000
Desember	3.680	3.450	2.150	3.050	3.110	3.250	8.240.000	1.990.000

Periode	Jumlah saham Tercatat		Kapitalisasi Pasar	
	2020	2019	2020	2019
Maret	8.148.946.869	8,148,916,869	15.564.488.572.928	29.330.415.550.464
Juni	8.148.946.869	8,148,916,869	17.601.725.988.864	29.493.362.163.712
September	8.148.946.869	8,148,928,869	17.520.235.905.024	26.484.018.249.728
Desember	8.148.946.869	8,148,928,869	25.343.224.184.832	26.484.018.249.728

Aksi Korporasi

Selama tahun 2020 tidak ada Aksi Korporasi yang dilakukan oleh Perseroan

Penerbitan Obligasi/Sukuk

Selama tahun 2020 Perseroan tidak Menerbitkan Obligasi/ Sukuk

Ikhtisar Obligasi dan Sukuk

Keterangan	Tanggal Pencatatan	Jumlah Obligasi (Rp)	Tingkat Bunga (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Outstanding (Rp)
Penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017					
Series B	18 Oktober 2017	900.000.000.000	7,50%	17 Oktober 2020	Telah dilakukan pelunasan pada tanggal 19 Oktober 2020
Penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2019					
Series A	27 November 2019	799.000.000.000	7,55%	26 November 2022	799.000.000.000
Series B	27 November 2019	201.000.000.000	7,75%	26 November 2024	201.000.000.000
Surat Utang Jangka Menengah II Tahun 2017 PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia					
MTN 11	14 Juni 2017	1.302.000.000.000	8,25%	14 Juni 2020	Telah dilakukan pelunasan pada tanggal 15 Juni 2020

20

PERINGKAT OBLIGASI BANK BTPN

Obligasi	Peringkat 2018	Peringkat 2019	Peringkat 2020
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017	AAA (idn)	AAA (idn)	AAA (idn)
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2019		AAA (idn)	AAA (idn)
Surat Utang Jangka Menengah II Tahun 2017 PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	idAAA	idAAA	idAAA



PEMBAYARAN BUNGA DAN POKOK TAHUN 2020

Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017 seri B

Keterangan	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran (Bersih)
Bunga ke-1	17 Januari 2018	Rp16.875.000.000,-
Bunga ke-2	17 April 2018	Rp16.875.000.000,-
Bunga ke-3	17 Juli 2018	Rp16.875.000.000,-
Bunga ke-4	17 Oktober 2018	Rp16.875.000.000,-
Bunga ke-5	17 Januari 2019	Rp16.875.000.000,-
Bunga ke-6	17 April 2019	Rp16.875.000.000,-
Bunga ke-7	17 Juli 2019	Rp16.875.000.000,-
Bunga ke-8	17 Oktober 2019	Rp16.875.000.000,-
Bunga ke-9	17 Januari 2020	Rp16.875.000.000,-
Bunga ke-10	17 April 2020	Rp16.875.000.000,-
Bunga ke-11	17 Juli 2020	Rp16.875.000.000,-
Bunga ke-12	17 Oktober 2020	Rp916.875.000.000,-

Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2019 seri A

Keterangan	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran (Bersih)
Bunga ke-1	26 Februari 2020	Rp15.081.125.000,-
Bunga ke-2	26 Mei 2020	Rp15.081.125.000,-
Bunga ke-3	26 Agustus 2020	Rp15.081.125.000,-
Bunga ke-4	26 November 2020	Rp15.081.125.000,-
Bunga ke-5	26 Februari 2021	Rp15.081.125.000,-
Bunga ke-6	26 Mei 2021	Rp15.081.125.000,-
Bunga ke-7	26 Agustus 2021	Rp15.081.125.000,-
Bunga ke-8	26 November 2021	Rp15.081.125.000,-
Bunga ke-9	26 Februari 2022	Rp15.081.125.000,-
Bunga ke-10	26 Mei 2022	Rp15.081.125.000,-
Bunga ke-11	26 Agustus 2022	Rp15.081.125.000,-
Bunga ke-12	26 November 2022	Rp814.081.125.000,-

Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2019 seri B

Keterangan	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran (Bersih)
Bunga ke-1	26 Februari 2020	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-2	26 Mei 2020	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-3	26 Agustus 2020	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-4	26 November 2020	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-5	26 Februari 2021	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-6	26 Mei 2021	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-7	26 Agustus 2021	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-8	26 November 2021	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-9	26 Februari 2022	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-10	26 Mei 2022	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-11	26 Agustus 2022	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-12	26 November 2022	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-13	26 Februari 2023	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-14	26 Mei 2023	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-15	26 Agustus 2023	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-16	26 November 2023	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-17	26 Februari 2024	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-18	26 Mei 2024	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-19	26 Agustus 2024	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-20	26 November 2024	Rp204.894.375.000,-

Medium Term Notes (MTN) II Tahun 2017
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

Keterangan	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran (Bersih)
Bunga ke-1	14 September 2017	Rp26.853.750.000,-
Bunga ke-2	14 Desember 2017	Rp26.853.750.000,-
Bunga ke-3	14 Maret 2018	Rp26.853.750.000,-
Bunga ke-4	14 Juni 2018	Rp26.853.750.000,-
Bunga ke-5	14 September 2018	Rp26.853.750.000,-
Bunga ke-6	14 Desember 2018	Rp26.853.750.000,-
Bunga ke-7	14 Maret 2019	Rp26.853.750.000,-
Bunga ke-8	14 Juni 2019	Rp26.853.750.000,-
Bunga ke-9	14 September 2019	Rp26.853.750.000,-
Bunga ke-10	14 Desember 2019	Rp26.853.750.000,-
Bunga ke-11	14 Maret 2020	Rp26.853.750.000,-
Bunga ke-12	14 Juni 2020	Rp1.328.853.750.000,-

Peristiwa Penting 2020

23 April



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank BTPN Tbk memberikan persetujuan atas laporan keuangan tahun buku 2019. RUPST juga menyepakati untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham sebagai refleksi komitmen jangka panjang agar Bank BTPN dapat tumbuh berkelanjutan.

25 Juni



Jenius meluncurkan inovasi fitur terbaru yaitu Moneytory. Fitur ini membantu masyarakat *digital savvy* mengelola *cash flow* dengan lebih simpel melalui pencatatan pengeluaran dan pemasukan secara otomatis melalui aplikasi Jenius. Dengan Moneytory, pengguna Jenius bisa mengetahui ringkasan kondisi finansial secara jelas, mulai dari berapa jumlah pemasukan/pengeluaran, berapa selisih di antara keduanya, dan melihat grafik pengeluaran dengan mudah berdasarkan tanggal dan nominalnya.

2 Juli



Sumitomo Mitsui Banking Corporation Group (SMBC Group) mendonasikan 100 juta yen (setara Rp13,2 miliar) kepada UNICEF Indonesia untuk membantu meringankan beban masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19.

24 Juli



BTPN meluncurkan Sinaya Prioritas, sebuah layanan perbankan untuk segmen nasabah *affluent* yang memiliki total portofolio minimal sebesar Rp500 juta. Berintegrasi dengan aplikasi Jenius, layanan Sinaya Prioritas memungkinkan para nasabah *affluent* untuk memantau dana simpanan dan investasi, serta bertransaksi, di manapun dan kapanpun melalui gawai mereka.

27 Juli



Jenius meluncurkan fitur terbaru, Jenius QR, yang memudahkan *digital savvy* bertransaksi tanpa menggunakan uang tunai atau kartu debit karena langsung memotong Saldo Aktif tanpa perlu pindah aplikasi. Jenius QR juga sekaligus mendukung program Bank Indonesia untuk meningkatkan pembayaran non-tunai.

11 Agustus



Jenius rayakan ulang tahun ke-4. Hingga Juni 2020, tercatat lebih dari 2,7 juta orang telah bergabung menjadi pengguna Jenius, dengan saldo simpanan (Dana Pihak Ketiga/DPK) lebih dari Rp10 triliun. Sepanjang 4 (empat) tahun usianya, Jenius telah meluncurkan 20 inovasi dan fitur revolusioner.



11 September



Sumitomo Mitsui Banking Corporation Group (SMBC Group) mendonasikan Rp1,3 miliar (setara 10 juta yen) kepada Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) sebagai salah satu inisiatif globalnya dalam membantu mengatasi penularan dan dampak COVID-19 di Indonesia. PDUI dipilih sebagai salah satu penerima bantuan dana dari SMBC Group karena organisasi tersebut telah menjalin kerja sama sejak 2010 dengan Bank BTPN, anak perusahaan SMBC Group, melalui program pemberdayaan masyarakat yang dinamakan Daya.

24 September



Jenius berkolaborasi dengan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menghadirkan layanan top up BNI TapCash melalui aplikasi Jenius dengan memanfaatkan fitur NFC (Near-Field Communication). Selain itu, kolaborasi ini juga memperkenalkan Kartu BNI TapCash Edisi Jenius dengan desain dan karakter unik khas Jenius.

16 September



Jenius meluncurkan Jenius untuk Bisnis, *starter kit* bagi masyarakat *digital savvy* yang ingin memulai dan mengembangkan bisnis. Jenius untuk Bisnis memiliki dua layanan yaitu Akun bisnis Jenius dan Bisniskit dari Jenius.

18 November



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank BTPN Tbk menyetujui perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Para para pemegang saham menyetujui pengunduran diri Kazuhisa Miyagawa dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama, dan menyetujui pengangkatan Kaoru Furuya sebagai Wakil Direktur Utama yang baru untuk menggantikan Miyagawa. Rapat juga menyetujui pengangkatan Chow Ying Hoong sebagai Komisaris Utama dan Edmund Tondobala sebagai Komisaris Independen yang baru.

2 November



Jenius menggelar ajang kolaborasi tahunan, Co.Creation Week 2020, pada 2-6 November 2020 secara virtual. Jenius Co.Creation Week 2020 mengusung tema Reshape, dengan tujuan untuk mengajak masyarakat *digital savvy* berteman dengan perubahan besar yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari sebagai dampak pandemi COVID-19. Rangkaian acara Jenius Co.Creation 2020 terdiri dari kompetisi, *conference*, dan *talks* dengan tiga pilar yaitu teknologi, kreativitas, dan finansial.

23 Desember



BTPN berpartisipasi dalam pembiayaan *medium-term working capital* PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan total nilai US\$500 juta yang dijamin oleh MIGA (World Bank Group) dalam suatu konsorsium bersama dengan 7 (tujuh) bank asing.

Penghargaan & Sertifikasi

PENGHARGAAN

Tanggal	Nama Penghargaan	Kategori	Penyelenggara
Maret 2020	Mortgage Awards	Best BUKU 3 Bank	Infobank
Maret 2020	Top SME Lender 2020	Best BUKU 3 Bank	Infobank
April 2020	Public Relations Indonesia Award 2020	<ul style="list-style-type: none"> Gold Winner - Social Media Gold Winner - Digital PR #temanjenius 	PR Indonesia Magazine
Mei 2020	Digital Brand Awards	Savings in Commercial Banks Category	Infobank
Juni 2020	World's Best Banks	Ranking 4 – of all banks in Indonesia Ranking 2 – of all local banks in Indonesia	Forbes
Agustus 2020	Investor Awards	The Best BUKU III Bank	Investor Magazine
September 2020	Indonesian Innovation Award 2020	Sustainability Category	IDX Channel
September 2020	Indonesia Content Marketing Awards 2020	<ul style="list-style-type: none"> Best Content in Owned Channel in Banking Category Best Use of Brand Website Content Marketing The Content Marketing Implementation of The Year 	Kompas Gramedia
September 2020	Infobank Awards 2020	<ul style="list-style-type: none"> Diamond Trophy for "Excellence" for 20 years in a row to achieve "The Best Performance Bank". The Best BUKU III 	Infobank
September 2020	Corporate Social Intrapreneur of the Year 2020	-	Schwab Foundation (affiliated with the World Economic Forum)
Oktober 2020	Best Companies to Work for in Asia	-	HR Asia
Desember 2020	The Best Contact Center Indonesia 2020	<ul style="list-style-type: none"> Top 10 of The Best Contact Center Indonesia 2020 Platinum Medal for The Best Operations Contact Center Gold Medal for The Best Employee Engagement 2 Platinum Medals, 1 Gold Medal, 4 Silver Medals and 1 Bronze Medal (Individual Category) 	Indonesia Contact Center Association
Desember 2020	Bankers of The Year 2020 (Awarded to Ongki Wanadjati Dana, President Director of Bank BTPN Tbk)	-	Infobank
Desember 2020	Best Performing Bank 2020	BUKU III Category	Infobank
Desember 2020	The Asia Sustainability Reporting Rating 2020	Gold	National Center For Sustainability Reporting
Desember 2020	Indonesia Best Digital Marketing Champion 2020	<ul style="list-style-type: none"> Best Digital Marketing Champion in Banking Category 2020 2nd Rank of Overall Winners Digital Marketing Champion 2020 	SWA
Desember 2020	BAZNAS Awards	Best Online Collection of Zakat	BAZNAS



**IDX Channel
Bank BTPN Innovation
Award**



**The Asia Sustainability
Reporting Rating 2020**

Kategori Gold

National Center for Sustainability
Reporting



Bank Terbaik 2020

Kategori Bank Umum dengan Modal
Inti Rp5 Triliun - Rp30 Triliun

Majalah Investor



Infobank Awards

Financial Performance Full Year 2019
Predicate Excellent

Infobank

SERTIFIKASI

No	Nama Sertifikasi	Waktu Pemberian	Masa Berlaku	Pihak Pemberi
1	Corporate Procurement Management ISO 9001:2015	28 Oktober 2019	28 Oktober 2022	SGS





LAPORAN MANAJEMEN

28	Laporan Dewan Komisaris
36	Laporan Direksi
52	Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi



Dengan komitmen yang kuat dari Direksi dan arahan dari Dewan Komisaris, BTPN berhasil menavigasi perjalanan di tahun yang penuh tantangan akibat pandemi COVID-19.



Pengelolaan manajemen risiko Bank pada tahun 2020 merupakan tantangan yang cukup berat. Kondisi perekonomian yang terdampak oleh pandemi COVID-19 membuat kebijakan terkait restrukturisasi maupun penanganan nasabah terdampak menjadi fokus utama Bank. Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya pelaksanaan kebijakan tersebut oleh manajemen yang telah berhasil mengelola risiko yang ada dan menghasilkan peringkat komposit profil risiko 2 (“rendah sampai moderat”).

Chow Ying Hoong

Komisaris Utama



Laporan Dewan Komisaris

*Pemegang saham dan pemangku
kepentingan yang terhormat,*

Perkenankan kami menyampaikan laporan berkenaan dengan pelaksanaan tugas utama Dewan Komisaris, yaitu di bidang pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait dengan jalannya kegiatan usaha PT Bank BTPN Tbk (selanjutnya disebut sebagai “BTPN” atau “Bank”). Laporan ini juga menjadi bagian dari keterbukaan informasi yang dijalankan oleh Bank.

Landasan peraturan perundang-undangan dari laporan ini, antara lain sebagai amanat Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, berkenaan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

KONDISI MAKRO

Dewan Komisaris menyadari bahwa tahun buku 2020 merupakan masa yang penuh tantangan. Kondisi Perekonomian sepanjang tahun itu diakibatkan oleh dampak negatif penyebaran *corona virus disease* (COVID-19). Negara-negara dunia sibuk menekan penyebaran virus tersebut. Dampaknya, kegiatan perekonomian mengalami perlambatan.

Karena alasan di atas, Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan “*World Economic Outlook Update*” yang dikeluarkan Juni 2020, memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan terkontraksi atau tumbuh minus 4,9%. Alasan dari besarnya tingkat kontraksi adalah dampak dari pandemi COVID-19 jauh lebih buruk dari yang diperkirakan.

Sedangkan Bank Dunia, pada bulan yang sama memperkirakan pertumbuhan ekonomi global diprediksi akan minus 5,2%. Guncangan yang sangat cepat dan masif akibat pandemi COVID-19 telah membuat tekanan negara-negara di dunia dari segi ekonomi sepanjang tahun.

Indonesia termasuk negara yang perekonomiannya terimbas cukup dalam dari pandemi COVID-19. Pada kuartal III-2020, Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan bahwa perekonomian Indonesia mengalami resesi setelah kuartal II dan III-2020 tumbuh minus secara tahunan, yaitu masing-masing: 5,32% dan 3,49% (yoy).

Hingga akhir 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi, yaitu minus 2,07%. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap industri perbankan sebagai lembaga intermediasi, mengingat sebagian besar dunia usaha mengalami kinerja negatif.

Situasi seperti inilah yang dihadapi oleh manajemen sepanjang tahun 2020. Untuk itu, Dewan Komisaris juga memberikan perhatian serius pada kondisi tersebut.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI DAN DASAR PENILAIAN

Dasar Penilaian

Pencapaian kinerja pada tahun buku 2020 dinilai dari sudut pandang penerapan strategi bisnis dan inisiatif yang berkesinambungan. Penerapan inisiatif dan strategi yang baru memungkinkan Bank untuk memperkuat fundamental bisnis dan mencapai kinerja keuangan yang baik.

Penilaian Kinerja

Mempertimbangkan kondisi eksternal serta dasar penilaian yang menjadi acuan, Dewan Komisaris memberikan kesimpulan bahwa secara umum, Direksi telah berhasil membuat BTPN membukukan kinerja yang baik meskipun menghadapi situasi sulit akibat dari pandemi COVID-19 yang dihadapi tidak mudah.

Manajemen telah mengambil sikap defensif dalam memitigasi dampak COVID-19 di tahun 2020. Di antaranya, menjalankan mitigasi dampak dan risiko dengan cara memberikan pinjaman secara selektif, proaktif mengelola kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*), mengelola biaya kredit dan melakukan restrukturisasi serta mengurangi biaya dana secara signifikan.

Selain fokus pada kredit, Dewan Komisaris juga melihat manajemen telah berupaya secara aktif mengelola likuiditas dan pendanaan serta meningkatkan efektivitas operasional secara berkesinambungan. Pada saat bersamaan, manajemen Bank tetap menjalankan inisiatif-inisiatif yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan Bank ke depan, tentu saja dengan tetap memperhatikan situasi saat ini.

Hasil kinerja manajemen juga dapat dilihat melalui kualitas kredit dan kecukupan pencadangan dalam kondisi baik. Pada tahun buku, Bank mencatat rasio NPL hanya 1,21% (*gross*) dan 0,50% (*net*), lebih baik dibandingkan dengan rata-rata industri. Bank juga terus melakukan *monitoring* yang ketat atas portofolio tersebut.

Fokus perhatian manajemen terhadap segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), komersial, serta pembiayaan konsumen dan syariah sangat tepat, mengingat sektor-sektor tersebut yang paling terdampak. Dewan Komisaris memandang upaya manajemen yang sejalan dengan POJK 11/POJK.03/2020 tentang “Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*” dan perubahannya dengan POJK No. 48/POJK.03/2020 mengenai kebijakan perpanjangan relaksasi bagi debitur yang terkena dampak COVID-19 sampai dengan 31 Maret 2022 itu sudah berada di jalur yang tepat.

Apalagi, hingga akhir tahun buku 2020, BTPN berhasil membukukan laba bersih setelah pajak (*net profit after tax/NPAT*) yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp1,7 triliun. Kendati lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, namun kinerja tersebut masih dapat dianggap bagus mengingat situasi krisis.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Kebijakan Direksi yang menjadi perhatian utama Dewan Komisaris adalah upaya memitigasi dampak dari pandemi COVID-19, karena pandemi telah membawa dampak negatif terhadap kegiatan dunia usaha. Kegiatan utama perbankan, yaitu penyaluran kredit, mengalami penurunan, sementara risiko yang dihadapi Bank justru meningkat.

Karena itu, pengelolaan manajemen risiko Bank pada tahun 2020 merupakan tantangan yang cukup berat. Kondisi perekonomian yang terdampak oleh pandemi COVID-19 membuat kebijakan terkait restrukturisasi maupun penanganan nasabah terdampak menjadi fokus utama Bank. Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya pelaksanaan kebijakan tersebut oleh manajemen yang telah berhasil mengelola risiko yang ada dan menghasilkan peringkat komposit profil risiko 2 (“rendah sampai moderat”).

Dewan Komisaris juga memberikan kesimpulan bahwa kebijakan manajemen yang menerapkan *strategic crisis action plans* untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 telah efektif. Strategi itu, antara lain meliputi upaya antisipatif terhadap perubahan dan dinamika pasar serta pengembangan skenario dan stress test untuk menyimulasikan dampak potensial terhadap bisnis Bank, termasuk risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar.

Dalam hal pelaksanaan restrukturisasi kredit, secara mingguan Bank menyampaikan laporannya kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK yang berlaku. Manajemen telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan *monitoring* atas nasabah-nasabah restrukturisasi tersebut untuk memastikan kesesuaian antara kualitas kredit nasabah dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dibentuk.



Secara internal, Bank juga telah mengambil langkah-langkah penting di bidang operasional, seperti pelaksanaan *split operations* dan *work from home*, penyediaan suplai masker, vitamin serta dukungan lainnya kepada karyawan. Dewan Komisaris memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan eksternal seperti restrukturisasi kredit dan internal di bidang operasional yang telah diambil manajemen tersebut.

Seluruh kebijakan yang dijalankan manajemen tersebut berada dalam 3 (tiga) kerangka kebijakan inti dalam penetapan prioritas Bank dan 8 (delapan) *strategic focus* yang dilengkapi dengan 3 (tiga) tahap pelaksanaan: Stabilisasi (*Stabilize*), Bersinergi (*Synergize*), dan Berkembang (*Scale up*).

Kerangka kebijakan tersebut sangat efektif, sehingga implementasi yang dijalankan terarah dengan baik. Selain itu, manajemen akan lebih mudah melakukan pemantauan dan evaluasi. Karena itu, Dewan Komisaris memberikan apresiasi terhadap pelaksanaannya.

Selain terkait dengan dampak COVID-19, Dewan Komisaris memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan strategis berkenaan dengan tindak lanjut paska merger. Pada tahun pertama, yaitu 2019, fokus Bank adalah stabilisasi. Fokus tersebut adalah integrasi manajemen Bank, operasi, budaya kerja karyawan dan dalam mengadopsi standar global tata kelola, kepatuhan, manajemen risiko dan pengendalian internal SMBC.

Bank juga telah mengembangkan rencana jangka menengah 3 (tiga) tahun. Di tahun kedua yaitu 2020, fokus Bank adalah Sinergi, yang mengadopsi standar global SMBC, mengintegrasikan sistem teknologi informasi (TI), dan membangun sinergi bisnis dalam Bank dan perusahaan-perusahaan grup SMBC lainnya di Indonesia. Bank sedang mengembangkan rencana untuk mentransformasi model operasinya untuk mencapai target secara lebih efektif dan efisien.

Namun, mengingat situasi terkait COVID-19, Bank beradaptasi dengan menerapkan strategi baru atau memprioritaskan strategi dalam rangka mengarahkan kinerja yang dapat dikategorikan sebagai *good performance*. Melalui strategi itu, fungsi intermediasi Bank diharapkan dapat tetap berjalan dengan lancar dan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA

Prospek usaha yang telah disusun Direksi, tidak hanya untuk tahun 2021, tetap juga mencakup kurun waktu 2021-2023. Dewan Komisaris telah menerima penjelasan yang cukup dan melakukan pembahasan serta memahami Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2021-2023.

Dewan Komisaris menyadari bahwa kondisi tahun 2021 juga masih sarat dengan tantangan yang merupakan imbas dari pandemi COVID-19. Dalam kondisi seperti itu, BTPN akan terus fokus untuk secara proaktif mengelola restrukturisasi kredit dan nasabah yang terdampak pandemi. Bank juga akan mengadopsi *risk appetite* yang lebih konservatif untuk segmen tersebut selama tahun 2021 dan berencana untuk meningkatkan pinjaman secara bertahap di tahun-tahun berikutnya

Pada situasi pemulihan ekonomi saat ini, Bank perlu mengandalkan segmen Korporasi mengingat *risk appetite* Bank, kapabilitas inti, serta dukungan dari jaringan SMBC global untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang lebih cepat. Di segmen Korporasi dan Komersial, Bank akan menyalurkan kredit secara selektif untuk tetap menjaga kualitas kredit, dan Bank juga akan meningkatkan *fee based income* bersamaan dengan peningkatan bisnis *Transaction Banking* dan *Treasury*. Pada saat bersamaan, Bank membangun sinergi dan terus meningkatkan bisnis yang sedang berkembang seperti Jenius serta mulai membangun bisnis baru.

Manajemen telah memutuskan untuk terus berinvestasi di Jenius guna mempertahankan kepemimpinan di perbankan digital Indonesia. Penerapan strategi digital akan terus menjadi prioritas Bank di semua segmen. Hal itu diharapkan dapat menopang pertumbuhan perbankan ritel di masa depan.

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis, selain pengembangan teknologi informasi tersebut, Bank juga akan memperkuat sumber daya manusia dan operasional. Hal yang sama juga dilakukan terhadap manajemen risiko, kepatuhan dan GCG akan terus ditingkatkan demi menjaga kesinambungan usaha.

Strategi lain yang akan diterapkan pada tahun 2021 adalah mengoptimalkan portofolio bisnis pensiun dan menyelaraskan kembali sumber daya pada bisnis yang sudah *mature*. Transformasi bisnis dan mengoptimalkan model operasi juga terus dilakukan.

Bank juga terus menumbuhkan ketersediaan dana murah atau rasio *Current Account Saving Account* (CASA). Hal itu diupayakan, antara lain melalui *trade, cash management, treasury*, dan ritel yang menjadi fokus Bank. Dalam rangka menjaga keseimbangan usaha, Bank akan meningkatkan *fee based income* dan efisiensi biaya operasional.

Strategi-strategi yang telah disiapkan oleh manajemen tersebut membuat Dewan Komisaris yakin bahwa prospek usaha Bank ke depan, khususnya pada tahun 2021, akan sangat baik. Apalagi, kemampuan manajemen dalam merespons tekanan COVID-19 telah menunjukkan hasil yang sangat baik.

MEKANISME DAN FREKUENSI PEMBERIAN NASIHAT

Dalam menjalankan tugas, yaitu mengawasi jalannya kegiatan usaha Bank dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris memiliki 4 (empat) komite yang membantu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Komite-komite tersebut termasuk dalam mekanisme pengawasan dan pemberian nasihat yang dijalankan oleh Dewan Komisaris. Masing-masing komite menyampaikan laporan serta rekomendasi secara kuartalan untuk dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.

Pembahasan serta pemantauan rekomendasi tersebut akan dilakukan pada rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang dilaksanakan dalam waktu minimal 2 (dua) bulan sekali. Sedangkan pada tahun 2020, rapat gabungan tersebut telah dijalankan sebanyak 7 kali.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN GCG

Dewan Komisaris memandang bahwa penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) merupakan fundamental yang kokoh dalam menjaga kesinambungan usaha Bank. Perbankan merupakan bisnis di sektor jasa keuangan yang menjadikan kepercayaan para pemangku kepentingan sebagai fundamental dalam bisnis.

Pemantauan Dewan Komisaris terkait dengan penerapan GCG pada Bank, terutama dilakukan melalui penilaian yang secara berkala dilakukan setiap tahun. Pada tahun 2020, penerapan tata kelola yang dilakukan oleh manajemen Bank sudah baik, yang tercermin dari hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tata kelola dengan peringkat komposit 2 (“Baik”).

Mengingat bisnis di sektor keuangan bergerak sangat dinamis, Dewan Komisaris mengingatkan kepada manajemen untuk senantiasa siaga dalam melakukan penyesuaian dan pengembangan GCG. Dewan Komisaris akan memantau hal ini, dalam rangka bersama-sama Direksi untuk memastikan kesinambungan usaha yang baik.

Pandangan atas Penerapan WBS dan Keterlibatan Dewan Komisaris

Penerapan *whistleblowing system* (WBS) merupakan bagian penting dari penerapan GCG. Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan WBS di lingkungan Bank sudah berjalan dengan baik, dan akan terus ditingkatkan.

Sebagai bentuk dukungan, Dewan Komisaris berkomitmen penuh untuk senantiasa melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan pengendalian internal Bank secara keseluruhan dan berkelanjutan. Hal itu ditujukan demi melakukan pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan evaluasi dengan berpedoman pada Kebijakan Strategi Anti-Fraud Bank BTPN. Pembahasan terkait *fraud* juga merupakan salah satu fokus yang dijalankan oleh Komite Pemantau Risiko.

Dalam konteks itulah keterlibatan Dewan Komisaris, yaitu dari sisi pencegahan dan pemenuhan kepatuhan. Dewan Komisaris akan terus melakukan pemantauan terhadap penerapan WBS serta pelaksanaan tindaklanjutnya.

PANDANGAN ATAS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Dewan Komisaris berpandangan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) termasuk bagian penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Bank. Apalagi, hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Implementasi pelaksanaan CSR di lingkungan BTPN dijalankan oleh satu unit bisnis khusus, yaitu Daya. Kebijakan ini menunjukkan komitmen dan keseriusan manajemen dalam mengimplementasikan kewajiban CSR, sekaligus kesadaran pentingnya menjaga keseimbangan antara tujuan bisnis dengan pelestarian lingkungan serta pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, ada integrasi antara misi bisnis dengan misi sosial atau *corporate share value*.



Pelaksanaan CSR tersebut mengacu pada 4 (empat) pilar: pengembangan kompetensi nasabah, pengelolaan keuangan, kehidupan yang berkesinambungan, serta kapasitas untuk tumbuh. Dewan Komisaris berpandangan bahwa prinsip tersebut telah menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan kegiatan di bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Implementasi CSR yang juga diarahkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), menurut Dewan Komisaris, merupakan inisiatif yang sangat baik. SDGs merupakan komitmen global yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sehingga, BTPN menjadi bagian dari upaya pencapaian 17 tujuan SDGs yang telah ditetapkan.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2020 telah terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris yang disahkan melalui 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pertama, RUPS Tahunan pada April 2020 yang mengesahkan pengunduran diri Mari Elka Pangestu sebagai Komisaris Utama. Kedua, RUPS Luar Biasa pada November 2020 yang mengesahkan Chow Ying Hoong sebagai Komisaris Utama dari sebelumnya sebagai Wakil Komisaris Utama dan pengangkatan Edmund Tondobala sebagai Komisaris Independen.

Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris pada akhir tahun buku 2020 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Chow Ying Hoong
Komisaris Independen : Ninik Herlani Masli Ridhwan
Komisaris : Takeshi Kimoto
Komisaris Independen : Irwan Mahjudin Habsjah
Komisaris Independen : Edmund Tondobala

Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih kepada Mari Elka Pangestu atas kontribusinya selama menjadi bagian dari Bank. Bank juga menyampaikan selamat menjalankan tugas baru kepada Chow Ying Hoong serta mengucapkan selamat bergabung untuk Edmund Tondobala.

APRESIASI DAN PENUTUP

Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih kepada pemegang saham yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan usaha BTPN hingga pada tahun buku 2020. Terima kasih juga disampaikan atas arahan dan bimbingan yang telah disampaikan oleh pemegang saham.

Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan kepada Direksi dan seluruh karyawan atas kinerja yang telah dicapai pada Tahun Buku 2020. Kepada regulator, Dewan Komisaris juga menyampaikan terima kasih atas bimbingan dan pengawasannya, sehingga usaha perusahaan berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan dan praktik bisnis terbaik di tengah tantangan kegiatan usaha yang tidak mudah.

Kepada para pemangku kepentingan lain, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang sudah berjalan selama ini. Dengan dukungan para pemangku kepentingan pula, manajemen mampu mencapai kinerja usaha yang baik untuk Tahun Buku 2020.

Jakarta, Maret 2021
Atas Nama Dewan Komisaris,

Chow Ying Hoong
Komisaris Utama

Dewan Komisaris



1. **Chow Ying Hoong**
Komisaris Utama
2. **Takeshi Kimoto**
Komisaris



3



4



5

- 3. **Edmund Tondobala**
Komisaris Independen
- 4. **Ninik Herlani Masli Ridhwan**
Komisaris Independen
- 5. **Irwan Mahjudin Habsjah**
Komisaris Independen



Perjalanan kegiatan sepanjang tahun 2020 yang penuh tantangan dan dinamika bisnis yang cepat telah berhasil dilalui dengan baik oleh BTPN. Kami senantiasa hadir di sisi nasabah serta mendukung proses pemulihan ekonomi nasional. Kesehatan karyawan dan nasabah menjadi prioritas di tengah pandemi. Dengan adanya perubahan di lingkungan eksternal akibat COVID-19, kami telah melakukan penyesuaian strategi untuk mempersiapkan *rebound* paska pandemi. Kami juga terus mengakselerasi kapabilitas perbankan digital untuk menghadirkan layanan perbankan yang bukan saja relevan tapi menjawab tantangan pandemi bagi para nasabah kami.

Kami mengapresiasi semua itu dapat terjadi berkat dukungan dari para pemangku kepentingan, baik arahan dari regulator maupun pengawasan dewan komisaris, serta kepercayaan penuh dari pemegang saham.

Ongki Wanadjati Dana

Direktur Utama



Laporan Direksi

*Pemegang saham dan pemangku
kepentingan yang terhormat,*

Salam sejahtera untuk kita semua, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan laporan tahunan PT Bank BTPN Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020. Laporan ini merupakan bagian dari tanggung jawab atas pengelolaan usaha oleh manajemen dalam kurun waktu satu tahun.

Seluruh isi laporan ini telah sejalan dengan laporan yang diaudit oleh auditor independen serta disampaikan kepada regulator, baik berkala seperti laporan keuangan maupun waktu tertentu, yang berkenaan dengan aksi korporasi dan pemenuhan kewajiban lain. Karena itu, laporan ini merupakan bagian dari keterbukaan informasi dan kepatuhan yang dilaksanakan oleh Bank.

KONDISI EKONOMI DAN INDUSTRI PERBANKAN 2020

Tekanan pada Perekonomian

Tahun 2020 diwarnai dengan penyebaran pandemi COVID-19 yang memberikan dampak buruk terhadap kegiatan perekonomian. Hingga akhir tahun misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekonomi nasional mengalami kontraksi, yaitu tumbuh minus 2,07%. Mayoritas sektor usaha mengalami pertumbuhan minus.

Sementara konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar dalam struktur perekonomian nasional, mengalami kontraksi sebesar 2,63%. Kondisi ini membuat tingkat permintaan terhadap barang dan jasa mengalami penurunan, sehingga kegiatan produksi ikut melemah.

Sebagai respons untuk mendukung pergerakan ekonomi, sepanjang tahun 2020 Bank Indonesia (BI) telah 5 (lima) kali menurunkan suku bunga acuan yaitu BI 7-day (*reverse*) *repo rate*. Dari 5,00% pada Januari 2020 hingga menjadi 3,75% di Desember.

Posisi suku bunga BI ini merupakan tingkat terendah sepanjang sejarah. Kebijakan ekspansif tersebut adalah bagian dari upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi melalui penyaluran pembiayaan, sehingga dunia usaha dapat beraktivitas.

Selain itu, BI juga menurunkan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM). Dengan longgarnya likuiditas perbankan membuat suku bunga terus menurun dan mendukung pembiayaan perekonomian.

Dinamika Industri Perbankan

Di tengah krisis yang dipicu oleh pandemi COVID-19 tersebut, ketahanan sistem keuangan tetap terjaga. Kendati demikian, perbankan mengalami risiko pembiayaan yang meningkat, yaitu berupa kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons kondisi tersebut dengan regulasi restrukturisasi kredit untuk nasabah terdampak COVID-19. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK-3/2020 dan perubahannya Peraturan OJK Nomor 48/POJK-3/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Kebijakan restrukturisasi kredit tersebut bertujuan untuk menahan laju kenaikan NPL dan juga memberikan relaksasi bagi debitur yang terkena dampak COVID-19 dalam membayar angsuran kewajiban terhadap bank selama masa pandemi. Dengan implementasi kebijakan stimulus ini diharapkan mampu memberikan ruang likuiditas dan permodalan yang lebih longgar bagi perbankan sehingga stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah pandemi.

KONDISI BANK PADA TAHUN BUKU

Perubahan Penting, Aktivitas Utama dan Target Pasar Bank

Pada awal tahun 2020, Bank telah mengambil langkah-langkah penting dalam menghadapi COVID-19, baik dalam hal operasional seperti pelaksanaan *split operations* dan *work from home*, penyediaan suplai masker dan vitamin serta dukungan lainnya kepada staff, dan juga dalam hal penanganan restrukturisasi kredit yang diperlukan.

Dengan adanya perubahan di lingkungan eksternal akibat COVID-19 bank telah mengkaji strategi di beberapa area tertentu serta operating model bank. Bank juga melakukan pengkajian atas cara kerja (*new way of working*) di masa *new normal*.

Sedangkan aktivitas utama BTPN pada tahun buku 2020 tidak mengalami perubahan. Semuanya masih berjalan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan, baik dengan sistem konvensional maupun syariah. Selain itu, Bank melaksanakan aktivitas lain berkenaan dengan layanan perbankan.

Untuk target pasar, di tengah kondisi yang sedang terjadi, Bank fokus dalam menjaga hubungan baik dengan nasabah dari seluruh segmen, memberikan fokus terutama pada debitur UMKM yang paling terdampak, memberikan solusi keuangan yang disesuaikan dengan kondisi debitur serta menangani potensi restrukturisasi pinjaman. Hal tersebut dilakukan sebagai arahan strategi bisnis Bank untuk menyikapi situasi pandemi COVID-19. Dengan demikian Bank dapat menangani kondisi dan memitigasi dampak dan risiko COVID-19 sepanjang tahun 2020.

Jaringan Mitra Usaha dan Kantor

Dalam menjalankan aktivitas utama, Bank telah menjangkau sebagian besar wilayah di Indonesia untuk melayani nasabah dan masyarakat, yang didukung oleh 536 jaringan kantor. Layanan Bank juga didukung oleh 225 anjungan tunai mandiri (ATM).

KINERJA USAHA TAHUN 2020

Kendala dan Tantangan di Tahun Pandemi

Seiring dengan pandemi COVID-19, tantangan yang dihadapi BTPN antara lain kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai respons pemerintah untuk menekan penyebaran virus tersebut. Kondisi ini tidak hanya membuat kegiatan ekonomi mengalami perlambatan drastis, aktivitas Bank juga ikut terdampak.

Meredupnya aktivitas ekonomi mengakibatkan penyaluran pembiayaan mengalami penurunan. Pada saat bersamaan, biaya kredit justru mengalami peningkatan. Dalam kondisi tersebut, sejalan dengan kebijakan regulator, BTPN fokus mengelola restrukturisasi kredit dan nasabah yang terdampak pandemi COVID-19, sekaligus mengadopsi *risk appetite* yang lebih konservatif. Kebijakan manajemen risiko tersebut khususnya untuk segmen yang paling terdampak.

Kebijakan Bank Indonesia merespons perlambatan kegiatan ekonomi tersebut, dengan menurunkan suku bunga acuan. Kebijakan itu, di satu sisi membuat Bank berhasil mengurangi beban bunga. Namun di lain sisi, kebijakan tersebut telah menekan *Net Interest Margin* (NIM) Bank.

Karena itu, Bank juga terus melakukan *monitoring* nasabah-nasabah restrukturisasi untuk memastikan kesesuaian antara kualitas kredit nasabah dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dibentuk agar tidak menjadi beban tambahan.

Pandemi COVID-19 tidak hanya mempengaruhi kegiatan dunia usaha termasuk Bank, tapi juga telah melahirkan beragam perubahan perilaku. Untuk itu, kinerja operasional Bank ikut beradaptasi melalui *work from home* sebagai cara kerja di masa *new normal*.



Perubahan juga terjadi pada perilaku nasabah, yang semakin giat menggunakan *digital banking* dalam transaksi. Hal ini berdampak positif bagi BTPN, karena penggunaan produk unggulan Bank, yaitu Jenius, mengalami peningkatan. Hingga akhir 2020, total pengguna Jenius naik 26,92% (*year on year*), menjadi 3,1 juta dan jumlah transaksinya tumbuh 70,19%.

Respons Kebijakan Strategis

Menyikapi tantangan pandemi COVID-19 di tahun 2020, BTPN menerapkan *strategic crisis action plans* untuk memitigasi dampak dan risiko dari penyebaran virus tersebut. Di bidang pembiayaan, Bank makin selektif menyalurkan kredit dan proaktif mengelola NPL, restrukturisasi kredit dan mengelola biaya pinjaman.

Terkait dengan restrukturisasi kredit, di antaranya Bank telah menyesuaikan ketentuan atau prosedur pelaksanaan relaksasi dan restrukturisasi bagi debitur yang terdampak COVID-19. Termasuk di dalamnya, ketentuan terkait dengan kriteria debitur yang mengikuti restrukturisasi, skema restrukturisasi, serta pemetaan sektor ekonomi yang terdampak sesuai dengan segmen bisnis serta rekan kerja sama. Kendati telah dilakukan analisis dan pemetaan tersebut, Bank tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit.

Beragam penyesuaian yang telah dibuat Bank tersebut mengacu metode perhitungan pencadangan atas debitur yang direstrukturisasi sesuai Surat OJK Nomor S-7/D.03/2020 perihal Penerapan PSAK 71 dan PSAK 68 dalam Kondisi Pandemi COVID-19. Pengawasan atas pelaksanaan restrukturisasi kredit tersebut dilakukan dari tingkat segmen hingga tingkat manajemen secara berkala.

Model perhitungan pencadangan termasuk yang dipantau secara ketat dan terus dikaji ulang dalam rangka mengantisipasi potensi terjadinya pemburukan kondisi makro ekonomi serta dampak terhadap *cost of credit*. Bank juga telah menetapkan mekanisme monitor terhadap debitur yang mendapatkan restrukturisasi kredit.

Pada tanggal 31 Desember 2020, *outstanding balance* kredit yang di restrukturisasi akibat COVID-19 adalah sebesar Rp8,75 triliun. Jumlah itu setara dengan 6,42% dari keseluruhan portofolio kredit konsolidasi.

Bersamaan dengan itu, Bank juga mengurangi biaya dana serta secara aktif mengelola likuiditas dan pendanaan. Biaya operasional juga mendapat perhatian khusus, karena Bank memberikan kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap risiko operasional dan terus meningkatkan efektivitas operasi.

Sementara berkenaan dengan penerapan Strategi dan Inisiatif Pasca Merger dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) pada 1 Februari 2019, pada tahun 2020 Bank fokus pada peningkatan sinergi. Di antaranya, dengan mengadopsi standar global SMBC, mengintegrasikan sistem teknologi informasi (TI) serta membangun sinergi bisnis. Bank juga sedang mengembangkan rencana untuk mentransformasi model operasinya, untuk mencapai target secara lebih efektif dan efisien.

Inovasi Melalui Pengembangan Digital

Fenomena yang cukup mencolok akibat pandemi COVID-19, terjadinya perubahan pada aktivitas dan layanan dunia usaha, termasuk sektor keuangan, yang mengarah pada digitalisasi. Bahkan hampir seluruh bank di Indonesia, terutama bank-bank besar fokus pada digitalisasi untuk bertransformasi menjadi bank digital.

Mengingat BTPN telah melakukan digitalisasi sejak 2016, sebagai langkah strategis untuk tetap memimpin dalam layanan bank digital, Bank terus memperluas layanan digital untuk produk-produk bank ritel lainnya. Bank memanfaatkan Jenius sebagai landasan *platform*, sehingga layanan bank digital BTPN semakin lengkap dan terintegrasi.

Selain melengkapi layanan, Bank memperluas jangkauan penerimaan (*acceptance*) transaksi digital melalui pengembangan kerja sama dengan berbagai mitra e-niaga dan mitra-mitra niaga lainnya sesuai dengan tujuan bank digital kami utk menjadi penyedia ekosistem keuangan nasabah (*Life Finance*).

Pengembangan digital masih terus berjalan, termasuk pada tahun buku 2020, terutama untuk mempertahankan kepemimpinan BTPN di perbankan digital Indonesia, sehingga menopang pertumbuhan perbankan ritel di masa depan. Digitalisasi ini sesuai dengan visi Bank “Menjadi bank pilihan utama di Indonesia, yang dapat memberikan perubahan berarti dalam kehidupan jutaan orang, terutama dengan dukungan teknologi digital”.

Pengembangan digital telah meningkatkan efisiensi bisnis di Bank, antara lain melalui penghematan waktu dan biaya. Bank juga menjadi lebih cepat dalam merespons perubahan pasar. Pada akhirnya, digitalisasi dapat meningkatkan kepuasan nasabah.

Pencapaian Kinerja Bank

Hingga berakhirnya tahun buku 2020, BTPN membukukan laba bersih setelah pajak (*net profit after tax/NPAT*) yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp1,7 triliun, lebih rendah 32,0% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp2,6 triliun. Penurunan pendapatan bunga bersih dan peningkatan biaya CKPN sebagai dampak dari pandemi COVID-19 termasuk yang jadi penyebab berkurangnya laba.

Dari sisi kredit, pada akhir tahun buku yang berhasil disalurkan mencapai Rp136,2 triliun, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Perlambatan kredit disebabkan adanya pelemahan aktivitas bisnis dan *repayment* kredit yang lebih tinggi dibandingkan pemberian fasilitas kredit baru. Bahkan industri perbankan juga mengalami kontraksi kredit sebesar 2,41% pada akhir tahun 2020.

Kendati demikian, Bank terus menjaga kualitas kredit tetap terjaga seperti ditunjukkan melalui tingkat kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*). Pada tahun buku, Bank mencatat rasio NPL sebesar 1,21% (*gross*) dan 0,50% (*net*). Pencapaian tersebut lebih baik dibandingkan dengan rata-rata industri.

Dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), terjadi peningkatan 15,93%. Peningkatan DPK itu, terutama berasal dari layanan Jenius dan Korporasi. Peningkatan dana tersebut diimbangi dengan penurunan simpanan dari bank-bank lain dan pinjaman yang diterima, sehingga secara keseluruhan total liabilitas dibandingkan tahun lalu adalah stabil.

Perbandingan Realisasi dengan Target

Tantangan berat yang dihadapi perekonomian nasional telah menekan sektor usaha, termasuk perbankan. Begitu pun dengan yang dialami oleh BTPN, sehingga beberapa target usaha yang telah ditetapkan tidak tercapai.

Dampak yang dialami Bank, terutama pada segmen mikro, *small and medium enterprises* (SME) atau UMKM, komersial, pembiayaan konsumen dan syariah. Kendati demikian, secara keseluruhan Bank masih membukukan kinerja keuangan yang cukup baik, mencatat pertumbuhan yang sehat serta menjaga fundamental tetap kuat.

Pada penyaluran kredit misalnya, dari target yang diharapkan ada kenaikan 5-7%, justru menurun 3,9%. Hal ini disebabkan pandemi COVID-19 yang membuat kinerja dunia usaha mengalami hambatan, sehingga berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Segmen usaha yang masih mengalami pertumbuhan adalah segmen Korporasi dan Pembiayaan Syariah yang masing-masing masih tumbuh sebesar 3,9% dan 5,8%.

Dengan beragam strategi yang telah direalisasikan oleh Bank, BTPN berhasil membukukan laba bersih melebihi target sebesar 71,71% dari target dalam Rencana Bisnis Bank revisi. Pencapaian itu terjadi, terutama karena biaya operasional maupun biaya pencadangan kredit yang dibukukan lebih rendah dibandingkan target. Selain itu, BTPN juga membukukan pendapatan yang lebih tinggi di Syariah karena lebih banyak kegiatan yang dapat dilakukan selama Triwulan ke-4 vs. yang diantisipasi sebelumnya karena COVID-19, serta membukukan beban bunga yang lebih rendah (biaya dana yang lebih rendah) sebagai dampak dari penurunan suku bunga acuan. Beberapa indikator target dan realisasi disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Perbandingan Target dan Realisasi

Keterangan	Target 2020	Realisasi 2020
<i>Loan Growth</i>	5-7%	-3,9%
<i>Deposit Growth</i>	16-18%	15,9%
<i>Capital Adequacy Ratio</i>	>22%	25,6%
ROA	<1%	1,4%
ROE	>3%	6,1%
NPL (<i>gross</i>)	<2%	1,2%



Kinerja Entitas Anak Syariah

Di tengah situasi yang penuh dengan tantangan, PT Bank BTPN Syariah Tbk (“BTPN Syariah”) masih mencatatkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp9,5 triliun tumbuh 5,81% dibanding periode sebelumnya yang Rp9,0 triliun. Pertumbuhan pembiayaan yang sehat ini juga disertai dengan kualitas pembiayaan yang baik, seperti tercermin melalui *Non Performing Finance* (NPF) di posisi yang rendah, yaitu 1,91%.

BTPN Syariah juga memiliki rasio kecukupan modal (CAR) yang kuat, yaitu 49,44 %, jauh di atas rata-rata industri. Total aset tumbuh 6,49% (yoy) menjadi Rp16,4 triliun, dari sebelumnya yang Rp15,4 triliun. DPK tumbuh 4,26%, dari Rp9,4 triliun menjadi Rp9,8 triliun. Sementara laba bersih setelah pajak (NPAT) mencapai Rp855 miliar.

Pencapaian tersebut berkat strategi yang diterapkan BTPN Syariah. Dalam melayani segmen prasejahtera produktif yang menjadi fokus misalnya, Bank antara lain ikut memberdayakan nasabah secara berkesinambungan. Tim #bankirpemberdaya di lapangan yang disebut “*community officer*” menjalin hubungan yang intensif dan terukur, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari nasabah bahwa mereka bisa menghadapi tantangan dengan optimis dan tangguh bersama di masa pandemi.

Penyaluran Kredit kepada UMKM

BTPN sejak lama memiliki komitmen besar terhadap perkembangan sektor UMKM. Untuk tahun 2020, sejalan dengan *concern* pemerintah terhadap pemberdayaan sektor tersebut, Bank telah menyalurkan kredit senilai Rp7,0 triliun. Nilai tersebut setara dengan 5,52% dari portofolio kredit Bank.

Pembiayaan tersebut dialokasikan untuk tiga kelompok usaha: mikro sebesar Rp218 miliar, kecil Rp595 miliar dan menengah Rp6,2 triliun.

Program Daya dari BTPN, pada tahun 2020 juga fokus pada pengembangan kapasitas nasabah UMKM untuk menjalankan usaha dengan lebih modern dan juga memperluas akses pasar. Dari analisis Bank, dampak pandemi COVID-19 telah menekan omset UMKM hingga separuhnya. Karena itu, sebagai wujud dukungan Bank, Daya mengembangkan program pelatihan berkelanjutan yang bertujuan untuk memberikan motivasi dan alternatif solusi dalam mempertahankan dan memperbaiki usaha.

Program pelatihan diselenggarakan melalui webinar dan bekerja sama dengan para tenaga ahli yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya. Para pengusaha UMKM tersebut mendapatkan tips dan bertanya secara langsung terkait permasalahan usaha kepada tenaga ahli yang ada di Daya.id. Pengguna Daya.id juga dapat melakukan *assessment* terhadap kondisi usahanya serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan usahanya.

Persentase Imbalan Penghimpunan dan Penyaluran Dana

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, seluruh bank umum wajib memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mempublikasikan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Publikasi ini, antara lain untuk memberikan kejelasan dan memudahkan nasabah dalam menimbang manfaat, biaya dan risiko kredit yang ditawarkan.

Pada tahun 2020, SBDK BTPN untuk kredit korporasi sebesar 6,08%. Sedangkan untuk ritel dan mikro, masing-masing 9,92% dan 15,87%. Sementara kredit konsumsi untuk selain kredit pemilikan rumah sekitar 10,34%.

Sedangkan imbalan untuk dana pihak ketiga (DPK) yang dikumpulkan Bank, berpatokan pada suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Imbal hasil pinjaman turun menjadi 7,63% di tahun 2020 dari 9,43% di tahun 2019. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan suku bunga acuan, tekanan penurunan bisnis dengan imbal hasil tinggi dan dampak restrukturisasi. Meskipun demikian, Bank berhasil mengurangi biaya dana menjadi 3,71% di tahun 2020 dari 5,27% di tahun 2019.

ANALISIS PROSPEK USAHA 2021 DAN HAL PENTING YANG DIPERKIRAKAN TERJADI PADA MASA MENDATANG

Prospek Usaha

BTPN memperkirakan perekonomian pada tahun 2021 akan mulai memasuki fase pemulihan. Hal itu sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah, seperti tertuang dalam APBN 2021 yang sebesar 5,00%. Keyakinan tersebut, tentu saja dengan asumsi bahwa upaya vaksinasi berjalan sesuai dengan target, yaitu menekan lajunya penyebaran COVID-19.

Dengan demikian, pada tahun 2021 tetap masih ada ketidakpastian yang perlu mendapatkan perhatian serius. Karena itu, Bank menyeimbangkan antara tujuan angka pendek dengan jangka panjang untuk menciptakan prospek usaha yang baik dan sesuai harapan. Sejumlah strategi yang telah disiapkan, antara lain:

- Mempertahankan dan mempersiapkan untuk rebound: Melanjutkan restrukturisasi kredit, melakukan peningkatan sistem dan kapabilitas, tata kelola, model operasi dan *operational excellence*.
- Meningkatkan/Mempercepat dan Menjaga momentum pertumbuhan *digital banking*: Memanfaatkan kekuatan untuk menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang lebih cepat (*Corporate, Transaction Banking, Treasury* dan *Wealth Management*) dan memperkuat bisnis lain untuk pertumbuhan (SME, Pembiayaan Konsumen dan Jenius).
- Mengejar pertumbuhan yang berkelanjutan: Meneruskan pertumbuhan pada segmen *Corporate, Transaction Banking, Treasury and Wealth Management*, serta menumbuhkan segmen SME dan Pembiayaan Konsumen, memperluas basis pelanggan dan pendapatan melalui kolaborasi dengan ekosistem digital dan menjelajahi bisnis baru.

Bersamaan dengan itu, BTPN akan terus fokus untuk secara proaktif mengelola restrukturisasi kredit nasabah yang terdampak pandemi. Sedangkan untuk penyaluran kredit, Bank mengadopsi *risk appetite* yang lebih konservatif untuk segmen UMKM, Pembiayaan Konsumen dan Mitra Usaha Rakyat/ Mikro.

Bank juga mengandalkan segmen Korporasi, karena Bank memiliki *risk appetite*, kapabilitas inti, serta dukungan dari jaringan SMBC global untuk menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang lebih cepat. Di segmen Korporasi dan Komersial, Bank akan menyalurkan kredit secara selektif untuk tetap menjaga

kualitas kredit, dan Bank juga akan meningkatkan *fee based income* bersamaan dengan peningkatan bisnis *Transaction Banking* dan *Treasury*. Bank akan berinvestasi dan mengatasi kebutuhan di area tersebut agar menghasilkan pendapatan tambahan guna mendukung lintasan pertumbuhan usaha ke depan seraya membangun kembali bisnis SME dan Pembiayaan Konsumen serta meningkatkan efisiensi operasinya.

Selain itu, BTPN akan melanjutkan investasi di Jenius untuk mempertahankan kepemimpinan di perbankan digital Indonesia, sehingga menopang pertumbuhan perbankan ritel di masa depan. Bank juga akan mengoptimalkan portofolio bisnis pensiun dan menyelaraskan kembali sumber daya Bank di *Mature Business*, terus melakukan transformasi bisnis dan mengoptimalkan model operasinya.

Strategi digital akan terus menjadi prioritas Bank di semua segmen. Untuk itu, memperkuat teknologi informasi, sumber daya manusia, operasional, manajemen risiko, kepatuhan dan GCG untuk mendukung pertumbuhan bisnis menjadi perhatian dan fokus Bank ke depan.

Hal-hal Penting yang Diperkirakan Terjadi pada Masa Mendatang

Bank berpandangan bahwa tren ke depan dalam industri perbankan akan mengarah pada digitalisasi yang saat ini geliatnya sudah semakin mulai terasa. Tantangan lain ke depan yang dihadapi perbankan adalah eksekusi dari pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih.

Dari sisi global, ketidakpastian masih akan terjadi dan mempengaruhi perekonomian domestik pada kurun waktu 2021-2023. Potensi ketidakpastian dipicu oleh kemajuan pelaksanaan vaksin COVID-19 untuk mengakhiri pandemi, seberapa cepat pemulihan perekonomian global dari pandemi, dan potensi eskalasi ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina bersama dengan risiko geopolitik lainnya.

Dalam menghadapi potensi tantangan di masa depan tersebut, strategi jangka menengah dan panjang yang telah disiapkan Bank, antara lain meningkatkan/mempercepat dan menjaga momentum pertumbuhan *digital banking* dan mengejar pertumbuhan yang berkelanjutan.



PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Mengingat pentingnya penerapan GCG ini, BTPN senantiasa memastikan bahwa prinsip atau asas GCG diterapkan dalam setiap aspek bisnis pada seluruh struktur organisasi Bank. Sejalan dengan regulasi, penerapan dilakukan dari tingkat jajaran Dewan Komisaris, Direksi, hingga unit organisasi terbawah dan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Peraturan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Bank telah menerapkan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan berdasarkan pendekatan “*comply or explain*”.

Pada tahun 2020, Bank telah melakukan beberapa perubahan terkait dengan penerapan GCG. Di antaranya, kajian berkala terhadap kebijakan/prosedur mengenai pengadaan barang dan jasa dan kebijakan anti-*fraud*.

Bank juga melakukan evaluasi terhadap penerapan GCG secara berkala, sejalan dengan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Untuk itu, pada tahun 2020 Bank telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan GCG. Hasil penilaian sendiri oleh Bank merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan tata kelola.

Komposisi Pemegang Saham dan Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris pada BTPN dan Kelompok Usaha SMBC

Sebagai bagian dari pelaksanaan GCG, seluruh Dewan Komisaris dan Direksi BTPN tidak ada yang memiliki saham BTPN maupun saham milik kelompok usaha SMBC. Kondisi sangat mendukung sikap independensi para pengurus Bank, sekaligus menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam pengelolaan Bank.

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pengembangan teknologi informasi (TI) telah lama menjadi kepedulian BTPN, setidaknya sejak tahun 2016. Kehadiran Jenius menjadi salah satu penanda bahwa praktik digitalisasi di lingkungan Bank telah berjalan, bahkan Bank menjadi pemimpin di bidang *digital banking*.

Sebagai bagian dari pengembangan berkelanjutan, pada tahun 2020, yang menjadi fokus adalah penyusunan *IT Strategic Planning* (ITSP) yang baru untuk periode tahun 2020-2022. Hal ini merupakan respons atas penggabungan usaha Bank serta upaya menghadapi kondisi masa depan.

Fokus kegiatan TI pada tahun buku, antara lain konsolidasi aplikasi inti Bank yang mencakup *core banking system*, aplikasi pendukung fungsi *corporate banking* dan aplikasi *non-core banking* lainnya. Tujuannya menyederhanakan arsitektur aplikasi pasca merger.

Bank juga terus mendayagunakan *platform* digital pada beragam produk dan kanal dalam rangka menciptakan arsitektur digital *platform* yang seragam. Dengan demikian, Bank dapat menyajikan pengalaman pelanggan yang konsisten dan sempurna.

Selain itu, Bank juga mengembangkan sistem kartu kredit guna menambah jenis layanan yang akan ditawarkan ke nasabah. Dalam rangka keamanan penggunaan aplikasi digital, Bank melanjutkan implementasi otentikasi nasabah dengan menggunakan teknologi biometrik.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Hingga berakhirnya tahun buku 2020, total karyawan BTPN mencapai 7.482 orang. Bagi Bank, para karyawan tersebut merupakan bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari perjalanan usaha Bank.

Karena itu, Bank senantiasa berupaya memberikan yang terbaik dalam pengelolaan manajemen terkait karyawan, termasuk pengembangan kompetensi dan karier. Sejalan dengan inisiatif digitalisasi dan upaya mengatasi pandemi COVID-19, Bank telah mengubah program pengembangan talenta serta pelatihan menjadi digital.

Penyelenggaraan pelatihan selain fokus pada pengembangan kompetensi yang mendukung bisnis, juga didesain untuk mempersiapkan karyawan dalam menghadapi kebiasaan baru, termasuk *new way of working*. Di antaranya, melalui 493 jam pelatihan terkait kepemimpinan dan teknologi informasi.

Program penyesuaian budaya dan kepemimpinan di seluruh jajaran organisasi juga dilakukan melalui program komunikasi visi, misi dan nilai-nilai perusahaan kepada seluruh karyawan. Manajemen dari kantor pusat termasuk Direksi misalnya, melakukan kunjungan ke kantor-kantor cabang, serta ada juga pembentukan agen-agen perubahan dan pelaksanaan program untuk meningkatkan *employee engagement*.

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) di lingkungan BTPN dilaksanakan oleh Daya. Pada tahun 2020, dalam rangka meningkatkan mutu program dan meningkatkan jangkauan layanannya, Daya telah merealisasikan 5 (lima) rencana utama.

Pertama, peningkatan dampak program Daya melalui Daya.id. Untuk maksud ini, Daya berupaya meningkatkan jumlah pengguna sebagai indikator perluasan dampak. Hal itu dilakukan melalui peningkatan kualitas dan relevansi materi. Hingga akhir tahun buku 2020, total pengunjung Daya.id telah mencapai 833.926 pengunjung.

Kedua, pengembangan program yang relevan dan memberdayakan nasabah. Sebagai contoh, selama tahun 2020 BTPN melalui unit bisnis Sinaya mengembangkan program melalui seminar *online* dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kapasitas nasabah. Program yang dilaksanakan di 7 (tujuh) kota tersebut diikuti oleh 1.149 nasabah.

Ketiga, penguatan kolaborasi dengan mitra dan nasabah. Pada tahun 2020, Daya telah bekerja sama dengan 17 mitra di bidang kesehatan, usaha dan pendidikan yang terlibat secara aktif dalam pengembangan dan pelaksanaan program Daya.

Keempat, menjadi inspirasi pemberdayaan bagi Indonesia. Di antara realisasinya, bekerja sama dengan Universitas Trisakti dan Sekolah Bisnis IPB University, Daya menjalankan program relawan yang diikuti oleh 207 mahasiswa dari dua kampus tersebut.

Kelima, mendukung terlaksananya inisiatif Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.3/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Untuk mendukung inisiatif tersebut, BTPN telah melakukan berbagai hal seperti peningkatan portofolio keuangan berkelanjutan untuk korporasi, pelatihan terkait keuangan berkelanjutan untuk karyawan dan pengembangan prosedur terkait keuangan berkelanjutan.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2020 telah terjadi perubahan komposisi Direksi BTPN. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) telah disepakati adanya pergantian Wakil Direktur Utama dari Kazuhisa Miyagawa kepada Kaoru Furuya.

BTPN menyampaikan terima kasih atas kontribusi besar yang telah diberikan oleh Kazuhisa Miyagawa selama bergabung dengan Bank, hingga ikut mengawal pelaksanaan penggabungan usaha SMBC Indonesia ke dalam BTPN pada tahun 2019 lalu.

Kepada Kaoru Furuya, manajemen menyampaikan selamat bergabung. Pengalaman Kaoru Furuya yang telah bergabung dengan SMBC sejak 1989 tentu akan memberikan manfaat besar bagi perkembangan Bank.

Dengan demikian, komposisi Direksi BTPN pada akhir tahun buku 2020 adalah:

Direktur Utama	: Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama	: Darmadi Sutanto
Wakil Direktur Utama	: Kaoru Furuya*
Direktur Kepatuhan	: Dini Herdini
Direktur	: Yasuhiro Daikoku
Direktur	: Henoeh Munandar
Direktur	: Adrianus Dani Prabawa
Direktur	: Hiromichi Kubo
Direktur	: Merisa Darwis
Direktur	: Hanna Tantani

* Kaoru Furuya diangkat dengan RUPSLB tanggal 18 November 2020 dan efektif menjabat sebagai Wakil Direktur Utama pada tanggal 4 Januari 2021 setelah memperoleh Ijin Kerja secara lengkap dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.



APRESIASI BAGI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Perjalanan kegiatan sepanjang tahun 2020 yang penuh tantangan telah berhasil dilalui dengan baik oleh BTPN. Kami mengapresiasi semua itu dapat terjadi berkat dukungan dari para pemangku kepentingan, baik arahan dari regulator maupun pengawasan dewan komisaris, serta kepercayaan penuh dari pemegang saham. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih tak terhingga atas segala yang sudah dilakukan.

Begitu juga dengan para karyawan yang kami yakini telah mencurahkan seluruh sumber daya, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Termasuk juga kepada para pemangku kepentingan lain, seperti mitra usaha yang telah bekerja sama dengan baik selama ini, terima kasih atas dukungannya.

Kami berharap tahun depan dan yang akan datang akan lebih baik. Karena itu, kerja sama dengan para pemangku kepentingan, baik di lingkungan internal maupun eksternal menjadi sangat penting.

Jakarta, Maret 2021
Atas nama Direksi,

Ongki Wanadjati Dana
Direktur Utama

Direksi



1. **Adrianus Dani Prabawa**
Direktur
2. **Henoch Munandar**
Direktur
3. **Dini Herdini**
Direktur Kepatuhan
4. **Ongki W. Dana**
Direktur Utama
5. **Darmadi Sutanto**
Wakil Direktur Utama



6



7



8



9



10

- 6. **Kazuhisa Miyagawa**
Wakil Direktur Utama
- 7. **Merisa Darwis**
Direktur
- 8. **Yasuhiro Daikoku**
Direktur
- 9. **Hanna Tantani**
Direktur
- 10. **Hiromichi Kubo**
Direktur

Board of Management



1. **Nathan Christianto**
Head of Wholesale Banking
2. **Mira Fitria**
Head of Human Capital
3. **Helena**
Head of Wealth Management Business
4. **Irwan Sutjipto Tisnabudi**
Head of Digital Banking



5



6



7



8

- 5. **Jeffrey C. Tjoeng**
Head of Business Banking
- 6. **Nurhajati Soerjo Hadi**
Head of Internal Audit
- 7. **Jeny Mustopha**
Head of Information Technology
- 8. **Vincentius Hidayat**
Head of Retail Lending Business

Pejabat Eksekutif





Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2020 PT Bank BTPN Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank BTPN Tbk tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan PT Bank BTPN Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, April 2021

Dewan Komisaris



Chow Ying Hoong
Komisaris Utama



Ninik Herlani Masli Ridhwan
Komisaris Independen



Takeshi Kimoto
Komisaris



Irwan Mahjudin Habsjah
Komisaris Independen



Edmund Tondobala
Komisaris Independen



Direksi

Ongki Wanadjati Dana
Direktur Utama

Kazuhisa Miyagawa *
Wakil Direktur Utama

Darmadi Sutanto
Wakil Direktur Utama

Dini Herdini
Direktur Kepatuhan

Yasuhiro Daikoku
Direktur

Henoch Munandar
Direktur

Adrianus Dahi Prabawa
Direktur

Hiromichi Kubo
Direktur

Merisa Darwis
Direktur

Hanna Tantani
Direktur

* catatan: Kazuhisa Miyagawa telah mengundurkan diri sebagai Wakil Direktur Utama efektif setelah ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 November 2020 (RUPSLB). RUPSLB kemudian menyetujui pengangkatan Kaoru Furuya sebagai Wakil Direktur Utama yang efektif menjabat sejak tanggal 4 Januari 2021 setelah yang bersangkutan memperoleh Ijin Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia secara lengkap.





PROFIL PERUSAHAAN

56	Informasi Umum Perusahaan	88	Profil Pejabat Eksekutif
57	Riwayat Singkat Perusahaan	91	Statistik Karyawan
58	Jejak Langkah	97	Struktur Kepemilikan
60	Bidang Usaha	98	Komposisi dan Profil Pemegang Saham
61	Produk dan Layanan	98	Informasi Entitas Induk Terakhir
62	Struktur Organisasi	99	Informasi Pemegang Saham Utama
64	Visi, Misi & Nilai-Nilai Utama	102	Daftar Entitas Anak
66	Profil Dewan Komisaris	102	Kantor Cabang
71	Profil Direksi	103	Kronologi Pencatatan Saham
81	Profil Anggota Komite	104	Kronologi Pencatatan Efek Lainnya
81	Komite Audit	105	Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Penunjang Pasar Modal
83	Komite Pemantau Risiko	106	Informasi pada <i>Website</i> Perusahaan
85	Komite Remunerasi dan Nominasi		
86	Komite Tata Kelola Terintegrasi		



BTPN menjadi bank universal yang memiliki bisnis lebih lengkap dan melayani nasabah lebih luas, mulai dari segmen ritel hingga korporasi.

Informasi Umum Perusahaan

Nama Perusahaan

PT Bank BTPN Tbk



Nama Bursa Efek dan Tanggal Pencatatan

Bursa Efek Indonesia (12 Maret 2008)

Kode Saham

BTPN

ISIN Code

101000118508

Informasi Perubahan Nama

- 1958: Nama awal adalah Bank Pegawai Pensiunan Militer (Bapemil)
- 1986: Bapemil berubah menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional
- 2019: PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk berubah menjadi PT Bank BTPN Tbk

Komposisi Pemegang Saham

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (92,43%)
PT Bank Central Asia Tbk (1,02%)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (0,15%)
Publik (5,23%)
Treasury Stock (1,17%)

Tanggal Pendirian

1958

Alamat Kantor Pusat

Menara BTPN
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5-5.6
Jakarta Selatan 12950, Indonesia

Bidang Usaha

Layanan Perbankan

Website dan E-mail

www.btpn.com
corporate.communication@btpn.com

Dasar Hukum Pendirian

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("Bank") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 21 tanggal 6 Oktober 1959 dari Notaris Noezar S.H. Akta ini mengalami perubahan yang termuat pada Akta tanggal 31 Mei 1960 No. 203 dan akta tertanggal 7 November 1960 No. 53 Notaris Noezar S.H., telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14 Februari 1961 No. 13, tambahan No. 5.

Peringkat (Fitch)

Peringkat oleh PT Fitch Rating Indonesia AAA(idn), Outlook Stabil Peringkat oleh PEFINDO idAAA (Triple A, Outlook Stabil)

Modal Dasar

Rp300.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Rp162.978.637.380



Riwayat Singkat Perusahaan

PT Bank BTPN Tbk didirikan pada tahun 1958 di Bandung, Jawa Barat, yang pada awalnya hanya menerima simpanan dan memberi pinjaman kepada anggota. Bank bertransformasi menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (PT BTPN) pada tahun 1986.

Selanjutnya pada 1993, menjadi bank umum melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993. Perubahan tersebut terjadi sejalan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (sebagaimana selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998).

Hingga berusia 50 tahun pada 2008, PT BTPN melakukan aksi *go public* dengan melepas saham milik pemerintah dan mencatatkan diri di Bursa Efek Jakarta (BEJ) (sekarang Bursa Efek Indonesia, BEI). Tahun 2008 juga merupakan salah tonggak sejarah dari PT BTPN setelah TPG Nusantara S.AR.L mengakuisisi 71,61% saham BTPN. Fokus Bank bertambah ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

BTPN melakukan transformasi lanjutan melalui melakukan penggabungan usaha (merger) dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) pada tanggal 1 Februari 2019 dan resmi menjadi anak perusahaan SMBC dengan persetujuan dari Japan Financial Services Authority yang secara resmi keluar pada tahun 2019.

Sejak tahun itu, BTPN resmi beroperasi sebagai bank baru

hasil penggabungan usaha. Dalam bisnisnya, Bank menjadi bank universal yang memiliki bisnis lebih lengkap dan melayani nasabah lebih luas, mulai dari segmen ritel hingga korporasi.

INFORMASI PERUBAHAN NAMA

Pada tahun 1958, saat pertama kali didirikan, nama yang digunakan adalah Bank Pegawai Pensiunan Militer (Bapemil). Bapemil bertransformasi menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (PT BTPN) dengan izin usaha sebagai Bank Tabungan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Setelah resmi merger dengan SMBCI pada 1 Februari 2019, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk berubah nama menjadi PT Bank BTPN Tbk. Perubahan nama itu resmi berlaku setelah keputusan berikut:

1. Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006169.AH.01.10.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 22 Januari 2019;
2. Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-9/PB.1/2019 tentang Penetapan Izin Usaha atas nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank BTPN Tbk tanggal 28 Januari 2019.



Jejak Langkah



- Didirikan di Bandung, Jawa Barat, dengan nama Bank Pegawai Pensiunan Militer (Bapemil).
- Pada 1960, BTPN memperoleh izin sebagai bank komersial.
- Pada 1986, berganti nama menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional.



Pada 2008, TPG Nusantara S.a.r.l. mengakuisisi saham BTPN sebesar 71,6% melalui pembelian saham di Bursa Efek Indonesia. BTPN menjadi bank publik dengan nilai aset Rp13,7 triliun



- BTPN meluncurkan bisnis usaha mikro dan kecil (UMK) dengan nama BTPN Mitra Usaha Rakyat dengan membuka 539 kantor cabang dan berhasil mencatatkan pertumbuhan kredit yang mencapai Rp2,3 triliun.
- BTPN menerbitkan obligasi rupiah jangka panjang yang pertama, dengan peringkat A+ (National Scale Rating) dari Fitch Ratings dan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dalam mata uang rupiah dari International Finance Corporation, anak perusahaan Bank Dunia.



Nilai aset BTPN tumbuh menjadi Rp34,5 triliun dibandingkan Rp13,7 triliun dua tahun sebelumnya. Menjadi bank ke-10 terbesar dalam kapitalisasi pasar, serta menduduki peringkat ke-5 dalam jumlah cabang dan peringkat ke-6 dalam jumlah karyawan.

1958-1986

2008

2009

2010



2020

2019

2018

Pada tahun 2020, BTPN meluncurkan SINAYA PRIORITAS dan bekerja sama dengan Jenius yang meluncurkan Sinaya Prioritas Apps.

Merger antara BTPN dengan SMBCI resmi efektif pada 1 Februari. Penggabungan usaha ini akan memperkuat kemampuan BTPN dalam menyediakan layanan perbankan yang lebih lengkap untuk basis nasabah yang lebih luas. BTPN saat ini adalah universal bank.

BTPN berhasil menyelesaikan dua aksi korporasi penting. Pertama, pencatatan saham perdana (IPO) BTPN Syariah, anak usaha dengan kepemilikan saham mayoritas. Kedua, proses merger BTPN dengan SMBCI dan *Subsidization* BTPN ke dalam SMBC.





- BTPN meluncurkan Daya, program pemberdayaan *mass market* yang berkelanjutan serta menjadi bagian integral dari aktivitas bisnis BTPN. Bisnis Pendanaan memperkenalkan *brand* Sinaya, yang terhubung dengan inisiatif Daya.
- Menyelesaikan uji coba bisnis Perbankan Komunitas Syariah (BTPN Syariah – Tunas Usaha Rakyat).
- BTPN memperluas jaringan layanan ATM dengan jaringan ATM Prima selain jaringan ATM Bersama yang sudah ada. Total jaringan yang terhubung mencapai lebih dari 57.331 ATM di seluruh Indonesia.



- BTPN Syariah - Tunas Usaha Rakyat tumbuh pesat, sampai akhir tahun telah melayani 28.927 sentra komunitas di Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur serta memberdayakan 444.000 nasabah di sentra komunitas.
- BTPN menyelesaikan program uji coba *mobile banking* baru yang diberi nama BTPN Wow!. Program ini kemudian diluncurkan pada 2015.



- Pembiayaan BTPN Syariah – Tunas Usaha Rakyat tumbuh dua kali lipat mencapai sekitar Rp1,4 triliun dan menyumbang 3% dari total kredit BTPN. Jaringan Unit Usaha Syariah mencapai 69.500 sentra di seluruh nusantara, yang memberdayakan lebih dari 931.500 nasabah di daerah pedesaan.
- BTPN mengakuisisi PT Bank Sahabat Purba Danarta (Bank Sahabat) yang dikonversikan menjadi bank syariah sebelum BTPN memisahkan unit syariah ke dalam entitas baru di 2014.
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) dari Jepang memiliki 24,3% saham BTPN melalui transaksi pembelian saham yang sebelumnya dimiliki oleh TPG Nusantara S.a r.l. dan pemegang saham lainnya.

2011

2012

2013



2017

2016

2015

2014

BTPN telah memperluas fitur aplikasi *mobile banking* BTPN Wow! dan Jenius untuk mengembangkan basis nasabah dan meningkatkan transaksi perbankan dengan fokus pada *customer centric*. Dua layanan *mobile banking* ini telah membawa perubahan yang signifikan pada pengalaman nasabah (*customer experience*) dan berdampak pada operasional Unit Pendukung. Transformasi yang disebut “Gemilang” meliputi struktur organisasi Bank, teknologi, sumber daya manusia dan pengendalian risiko. Jaringan cabang Bank telah mengalami transformasi yang cukup besar dimana seluruh cabang dapat menyediakan layanan perbankan kepada semua segmen nasabah.

- Februari 2016 BTPN mulai beroperasi sebagai Bank devisa setelah memperoleh izin pada bulan Desember 2015, yang memungkinkan Bank untuk melakukan transaksi dalam valuta asing dan lebih fleksibel untuk mulai menawarkan produk simpanan liabilitas dalam mata uang asing.
- Jenius, yang merupakan *platform mobile phone* kedua, diluncurkan. Layanan telepon seluler Jenius menggunakan *smart phone* untuk menghubungkan rekening nasabah dengan Bank dan melakukan transaksi perbankan. Hingga Desember 2016, Jenius telah memiliki 70.000 pengikut di situs media sosial dan ditonton lebih dari 3 juta kali di YouTube.

BTPN secara resmi meluncurkan BTPN Wow!, sebuah layanan perbankan bagi *mass market* yang memanfaatkan telepon seluler dan didukung jasa agen sebagai perpanjangan tangan Bank untuk meningkatkan jangkauan layanan kepada masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan.

Transaksi yang dapat dilakukan yaitu simpanan, tarik tunai, transfer dana, pembayaran tagihan dan pengajuan permohonan kredit mikro serta pembelian produk asuransi mikro.

SMBC Jepang telah meningkatkan kepemilikan sahamnya di BTPN dan menjadi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan 40,0%. SMBC merupakan bank terbesar kedua di Jepang berdasarkan nilai pasar dengan aset sebesar USD1,3 triliun.



Bidang Usaha

BIDANG USAHA SESUAI ANGGARAN DASAR

A. Kegiatan Usaha Utama:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan.

B. Kegiatan Usaha Penunjang:

1. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
2. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah:
 - a. Surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - c. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan Pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - e. Obligasi;
 - f. Surat Dagang dan/atau surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
3. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
4. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada, Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
5. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
6. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
7. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak dan/atau perjanjian;
8. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat di Bursa Efek;
9. Melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
10. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
11. Melakukan penyertaan modal pada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang perbankan;
12. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
13. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank (termasuk bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan. Seperti sewa guna usaha, modal ventura, Perusahaan Efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
14. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dan/atau kegagalan pembiayaan lainnya, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
15. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
16. Menerbitkan kredit berdokumen (letter of credit) dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BIDANG USAHA DIJALANKAN PADA TAHUN BUKU

Bidang usaha pada tahun buku sesuai dengan yang tercantum pada Anggaran Dasar terakhir.



Produk dan Layanan

CORPORATE/WHOLESALE BANKING

- **Produk Lindung Nilai**
IRS/CCS dan transaksi valas
- **Produk pinjaman**
 - Bilateral dan Syndication Loans (IDR, USD dan, JPY)
 - Kredit Modal Kerja
 - Kredit Investasi
 - Project/Structured Finance
 - ECA
 - Kredit Lainnya
- **Produk Manajemen Kas**
 - Current account dan Term Deposits
 - Payment (ACH, RTGS, Payroll, Wires)
 - E-Tax Payment (pajak non-impor dan impor)
 - Collections (ACH, RTGS, Payroll, Wires, Cheque/ Cash Deposit, Giro)
 - Virtual Account
 - Internet Banking/ Host to Host
 - Liquidity Management (domestic cash polling)
- **Domestik, Ekspor dan Impor Produk Trade**
 - Import LC Issuance/Import Bill Negotiation
 - Export LC Advising/ Confirmation/Export Bill Collection
 - Documentary Collection (DP, DA)
 - Trust Receipt/Trade Loan
 - Structured Trade Finance
 - Receivable Purchase
 - Bank Guarantees/SBLC
 - Avalization

BTPN WOW!

- Funding Wow!
- Produktif dan Konsumtif
- Student Loan
- Supply Chain

JENIUS

- Aplikasi Jenius
- Tabungan (Flexi Saver, Dream Saver & Valuta Asing)
- Deposito (Maxi Saver)
- Pembayaran Tagihan
- ATM Card/Debit Jenius
- Transfer (RTOL, SKN & RTGS)
- Top-up e-Wallet
- Pinjaman (Flexi Cash)
- Jenius Pay
- Jenius QRIS
- Jenius Keyboard
- Jenius for Business
- Bisniskit by Jenius
- Moneytory
- Sinaya Prioritas di Aplikasi Jenius

TREASURY & FI

- Foreign Exchange
- Derivative
- Pasar Uang

WEALTH MANAGEMENT BUSINESS

- Taseto Premium
- Taseto Bisnis
- Tabungan Pasti
- Giro Sinaya
- Deposito Berjangka
- Deposito Fleksi
- Reksadana
- Bancassurance
- Kartu ATM/Debit Sinaya
- Safe Deposit Box
- Layanan Syariah Bank
- Weekend Banking
- Sinaya Prioritas

UMK/MIKRO

- Kredit Angsuran Berjangka
- Kredit Usaha Rakyat
- Tabungan Mitra Usaha
- Tabungan Setara Deposito
- Pembiayaan Petani Kelapa Sawit
- Upper Micro

RETAIL LENDING BUSINESS

- Kredit Pensiun
- Kredit Pegawai Aktif
- Kredit Cross Over

BUSINESS BANKING

- Cash Management
- CPP Mitra Bisnis
- BPR Financing
- ABF

SUPPLY CHAIN AND STRUCTURED PROGRAM

- Supply Chain
- Lending Program

CONSUMER FINANCE

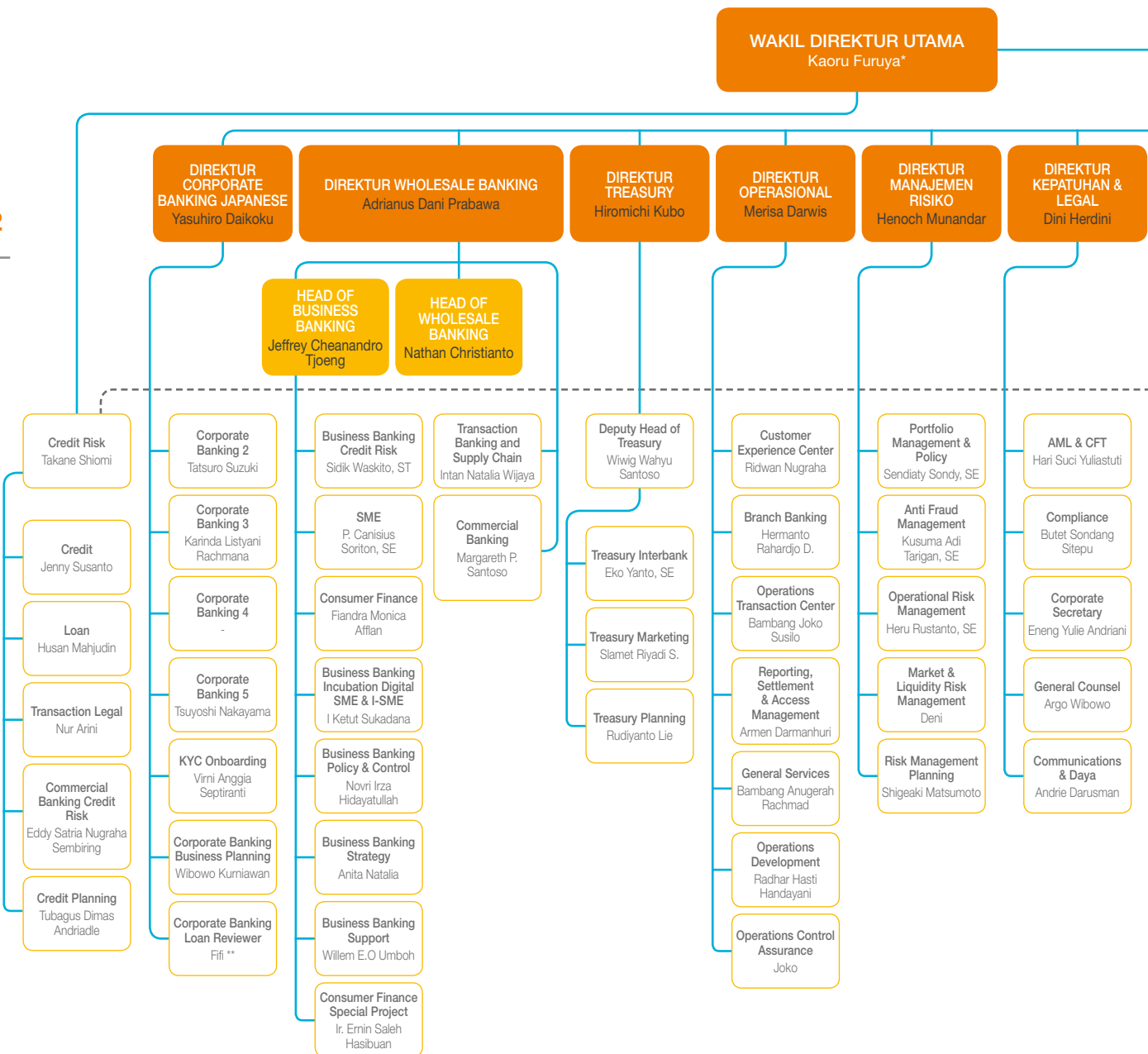
- Asset Based Financing (A/R Financing)
- Fintech
- Pembiayaan dengan MF

Struktur Organisasi



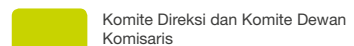
62

Laporan Tahunan 2020 PT Bank BTPN Tbk



* diangkat dengan RUPS tanggal 18 November 2020 dan efektif menjabat sejak tanggal 4 Januari 2021

** Efektif tanggal 27 Desember 2020





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

DIREKTUR UTAMA
Ongki Wanadjati Dana

DEWAN KOMISARIS

Komite Pemantau Risiko

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Audit

Komite Tata Kelola Terintegrasi

WAKIL DIREKTUR UTAMA
Darmadi Sutarto

DIREKTUR KEUANGAN
Hanna Tantani

HEAD OF INFORMATION TECHNOLOGY
Jeny Mustopha

HEAD OF HUMAN CAPITAL
Mira Fitria

HEAD OF INTERNAL AUDIT
Nurhajati Soerjo Hadi

HEAD OF RETAIL LENDING BUSINESS
Vincentius Hidajat

HEAD OF WEALTH MANAGEMENT BUSINESS
Helena

HEAD OF DIGITAL BANKING
Irvan Sutjipto Tisnabudi

- Planning & Deputy CFO
Yenny Lim
- Financial Control
Tanpanjana
- Finance Technology & Operations
Arif Suseno
- Alignment & Synergy
Masayoshi Higuchi

- IT Strategy & Planning
Jufri
- IT Business Enablement
Andi Febri Cahyo
- IT Digital Service Enablement
Joko Kurniawan
- IT Transaction Management
Setiasmo
- IT Data Management
Hendra Rahardja
- IT Special Projects
Iman Triono
- IT Special Projects
Lyza Ariesta
- IT Special Projects
Yudi Sukendro
- IT Special Projects
Seiji Tamura

- HC Strategy & Development
Aris Munandar
- HCBP Corporate Banking
Yvonne Febrina Syofyan
- HCBP Business Banking
Debbie Gracia Retnoningsih
- HCBP Retail Banking
Galih Suri Pakerti Ningrum
- HCBP IT & Functions
Denty Avianty
- HCBP Operations & Outregion
Aloysius Wilhelmus Jr. B
- HC Technology & Operations
Jemmy Maruto

- Wholesale & Commercial Banking Audit
Iswandi
- IT, Digital Banking & Analytics Audit
Willy Johan Widjaja S.
- Operations Audit
Stefanus Rudy Kristianto
- Retail Lending & Business Banking Audit
Dessy Natalia
- Funding & Corporate Functions Audit
Ahmad Sairman Farizy
- Audit Methodology, Qa & Development
Bernanta Budi Danardana

- Retail Banking Risk
Adli Pamungkas
- Micro Business Banking
Erpanjtja Toho S. Pasaribu
- Retail Banking Analytics, Business Planning & Credit Policy
Eriana Tandoko
- Retail Banking Business Management
Toni Handiono Wirja

- Sales Distribution Pension Business 1
Enrico Novian
- Sales Distribution Pension Business 2
Helmut Simanjuntak
- Sales Distribution Pension Business 3
Irradiatie Pierenika
- Payroll Loan RLB (PJs)
- Strategic Partnership & Relationship Management Pension Business
Dewi Puspita Sari
- Product & Sales Management RLB
Tri Sujatiodadi
- Business Solution & Customer Experience RLB
Yose Parlinta, SIP.
- Business Risk RLB
Medi Suharno, SE

- Sales Management WMB
Rudyanto Kemal
- Liabilities & Digital Management WMB
Elvie Iskandar
- Wealth Product Management WMB
Aegeus Hutama Soewito
- Customer Experience WMB
Sanny Kumalasari
- Network & Distribution WMB
Chairul Sani

- Digital Banking Acquisition, Service & Marketing Jenius
Anita Ekasari C
- Digital Banking Solution
Frenky Guslove
- Digital Banking Business Product Jenius
Anggraeni Arief Widjaja
- Digital Banking Business Product Jenius
Waasi Briman Sumintardja
- Digital Banking Business Performance & Customer Value Management
Lollyta Kurniawan
- Digital Banking Partnership Jenius
Febri
- Digital Banking Lending Business Product BTPN Wow!
-
- Digital Banking Sales Management BTPN Wow!
Mohammad Reza Rizal
- Digital Banking Product & Customer Experience BTPN Wow!
Achmad Nusyirwan Sugondo

Visi

Menjadi bank pilihan utama di Indonesia, yang dapat memberikan perubahan berarti dalam kehidupan jutaan orang, terutama dengan dukungan digital.



Misi

- Menawarkan solusi dan layanan keuangan yang lengkap ke berbagai segmen ritel, mikro, UKM dan korporat bisnis di Indonesia, serta Bangsa dan Negara Indonesia secara keseluruhan;
- Memberikan kesempatan berharga bagi pertumbuhan profesional karyawan Bank BTPN;
- Menciptakan nilai yang signifikan dan berkesinambungan bagi *stakeholder* termasuk masyarakat Indonesia;
- Memanfaatkan inovasi teknologi sebagai pembeda utama untuk memberikan kualitas dan pengalaman terbaik di kelasnya kepada nasabah dan mitra Bank BTPN.



Nilai-Nilai Utama

Nilai-nilai yang kami anut merupakan pedoman kami dalam menjalankan bisnis. Ada 5 (lima) nilai, seperti dijelaskan berikut ini:

Sebagai profesional selalu berlaku secara tulus dengan standar etika yang tinggi

Berani bertindak dan berinovasi tanpa henti

Berkolaborasi sebagai satu tim



Berkaitan dengan Visi dan Misi, landasan dasar integrasinya adalah untuk melayani nasabah SMBCI dan BTPN agar dapat mencapai tujuan dan aspirasi mereka dengan cara yang terbaik, serta diharapkan juga memberikan dampak positif kepada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Bank akan menjadi mitra yang dapat diandalkan dan dipercaya, yang mampu memahami dan memenuhi secara efektif kebutuhan finansial nasabah yang terus berkembang.

Visi dan Misi yang ditetapkan telah sesuai dengan rancangan penggabungan usaha sebagaimana tercermin pada ringkasan rencana penggabungan usaha. Visi dan Misi ini juga telah melalui *review* oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Profil Dewan Komisaris



Chow Ying Hoong
Komisaris Utama

Warga Negara

Singapura

Domisili

Singapura

Usia

60 tahun pada akhir Tahun Buku 2020.

Riwayat Pendidikan

Business Administration in Finance dari the National University of Singapore (1984).

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum

Menjabat sebagai Komisaris Utama BTPN berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 18 November 2020.

Rangkap Jabatan

- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi BTPN
- Managing Executive Officer, Co-Head of Asia Pacific Division and Head of Asia Growing Markets Division di SMBC

Pengalaman Kerja

- Bank Officer, United Overseas Bank (1984-1987)
- Head of Syndication for Asia of ABN Amro Bank Asia HQ (1996-1997)
- Branch Manager/Managing Director of Societe Generale Bank (1997-2000)
- Head of Syndication S.E. Asia of Sumitomo Bank Singapore Branch (2000-2005)
- General Manager, Debt Capital Market Department and Joint General Manager of SMBC Singapore (2005-2010)
- General Manager of Planning Department Asia Pacific Division of SMBC (2011-2013)
- Managing Executive Officer, Co-Head of Asia Pacific Division and Head of Asia Growing Markets Division of SMBC, Singapore (2013-2020).

Hubungan Afiliasi

Hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham Pengendali.



Ninik Herlani Masli Ridhwan
Komisaris Independen

Warga Negara

Indonesia

Domisili

Jakarta

Usia

63 tahun pada akhir Tahun Buku 2020.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti (1983)
- Magister bidang Keuangan dari Universitas Indonesia (2008)

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum

Menjabat sebagai Komisaris Independen BTPN sejak Tanggal Efektif Penggabungan, yaitu 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019.

Rangkap Jabatan

- Ketua Komite Audit BTPN
- Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi BTPN
- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan SMBC sampai dengan tanggal 18 November 2020

Pengalaman Kerja

- Auditor Senior di Kantor Akuntansi Utomo (SGV - Utomo) (1981-1985)
- Terakhir menjabat sebagai Head of Audit Development and Quality Control PT Bank Central Asia Tbk (1985-2012).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali.



Takeshi Kimoto
Komisaris

Warga Negara

Jepang

Domisili

Singapura

Usia

50 tahun pada akhir Tahun Buku 2020

Riwayat Pendidikan

Bachelor of Arts in Business and Commerce dari KEIO University

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum

Menjabat sebagai Komisaris BTPN sejak Tanggal Efektif Penggabungan, yaitu 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPST tanggal 15 Februari 2019.

Rangkap Jabatan

- Anggota Komite Pemantau Risiko BTPN
- General Manager of Asia Growing Markets Division SMBC
- Komisaris PT Summit Oto Finance

Pengalaman Kerja

- Vice President, International Finance Department, Sumitomo Bank Ltd (2000-2001).
- Vice President for Global Institutional Banking Department (“GIBD”) of SMBC, Vice President for GIBD Singapore, Group Head & Senior Vice President for Global Trade Finance Department Singapore (2002-2013).
- Senior Vice President for Emerging Markets Business Division (“EMBD”) Singapore, Joint General Manager for EMBD Tokyo and Joint General Manager for Business Development Department at the International Banking Unit of SMBC (2013-2018).

Hubungan Afiliasi

Hubungan Kepengurusan dengan Pemegang Saham Pengendali.



Irwan Mahjudin Habsjah
Komisaris Independen

Warga Negara

Indonesia

Domisili

Jakarta

Usia

73 tahun pada akhir Tahun Buku

Riwayat Pendidikan

- Sarjana di bidang Ekonomi dari Erasmus University Rotterdam, Belanda (1974)
- Magister di bidang Monetary & International Economics dari University of Amsterdam (1978).

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum

Menjabat sebagai Komisaris Independen BTPN sesuai hasil RUPSLB tanggal 11 September 2019.

Rangkap Jabatan

- Ketua Komite Pemantau Risiko BTPN
- Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan SMBC
- Komisaris Utama PT Sriboga Marugame Indonesia

Pengalaman Kerja

- Direktur Utama PT BT Securities Indonesia (1996-1999)
- Komisaris Independen PT Bank Universal (1999-2000)
- Anggota MPR dari Fraksi Utusan Golongan mewakili Indonesian Financial Executives Association (IFEA) (2000-2004)
- Direktur Utama PT ING Indonesia Bank (2000-2004)
- Komisaris PT Sari Melati Kencana/Pizza Hut (2013-2016)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali.



Edmund Tondobala
Komisaris Independen

Warga Negara

Indonesia

Domisili

Jakarta

Usia

55 tahun pada akhir Tahun Buku 2020

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi dari Drake University, Moines, Iowa, Amerika Serikat (1987)
- Magister Manajemen Internasional dari American Graduate School of Internasional Management, Thunderbird. Glendale, Arizona (1990)

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum

Menjabat sebagai Komisaris Independen Bank BTPN sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada 18 November 2020.

Rangkap Jabatan

- Anggota Komite Audit BTPN
- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan SMBC

Pengalaman Kerja

- Direktur of BCA Remittance Sdn Bhd Malaysia (2009-2011)
- Direktur BCA Finance Hongkong (2011-November 2011)
- Kepala Divisi di PT BCA Indonesia (2011-April 2020)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali.



Profil Direksi



Ongki Wanadjati Dana
Direktur Utama

Warga Negara

Indonesia

Domisili

Jakarta

Usia

63 tahun pada akhir Tahun Buku 2020

Riwayat Pendidikan

Sarjana Teknik Mesin dari ITB (1981)

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum

Menjabat sebagai Direktur Utama BTPN sejak Tanggal Efektif Penggabungan, yaitu 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPST tanggal 15 Februari 2019.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan

Pengalaman Kerja

- Credit Cycle Manager – Consumer Banking, Citibank, N.A (1987-1990)
- Direktur Utama Bank Subentra (1993-1998)
- Senior Advisor, Bank Universal (1999-2000)
- Wakil Direktur Utama di Bank Universal (2000-2002)
- Direktur Wholesale Banking Bank Permata (2002-2008)
- Wakil Direktur Utama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2008-Januari 2019)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali.



Kazuhisa Miyagawa
Wakil Direktur Utama

Warga Negara

Jepang

Domisili

Jakarta

Usia

55 tahun pada akhir Tahun Buku 2020

Riwayat Pendidikan

Bachelor of Law dari Gakushuin University, Jepang (1988)

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum

Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama BTPN sejak Tanggal Efektif Penggabungan, yaitu 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPST tanggal 15 Februari 2019

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan

Pengalaman Kerja

- Seoul Branch, Head of Planning Group, Korea di Sakura Bank (1998-1999)
- Tokyo Corporate Business Office 1 and Global Corporate Banking Dept. after merger, Staff (and Group Head later on) in Corporate Business, Japan di SMBC (2000-2009)
- Seoul Branch, Joint General Manager, Korea di SMBC (2009-2013)
- Direktur Utama PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (2014-Januari 2019)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali.



Darmadi Sutanto
Wakil Direktur Utama

Warga Negara

Indonesia

Domisili

Jakarta

Usia

56 tahun pada akhir Tahun Buku 2020

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Trisakti, Jakarta (1988)
- Magister Administrasi Bisnis dari University of Western Illinois, Macomb (1991)

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum

Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama BTPN secara efektif sejak 14 Mei 2020 berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 23 April 2020.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan

Pengalaman Kerja

- National Sales Manager of Citibank (1991-2000)
- EVP Sales & Distribution of Standard Chartered Bank (2000-2006)
- SVP Distribution of Bank Permata (2007)
- Consumer Banking Director of ABN Amro/RBS (2007-2010)
- Consumer Banking Director of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2010-2015)
- Komisaris PT Metro Retailmart (2015-2018)
- Komisaris PT Trans Ice (2015-2018)
- Komisaris PT Bank Mega Tbk (2015-2018)
- Group Director of PT CT Corpora Bank Mega (2015-2018)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali.



Dini Herdini
Direktur Kepatuhan

Warga Negara

Indonesia

Domisili

Jakarta

Usia

55 tahun pada akhir Tahun Buku 2020

Riwayat Pendidikan

Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti, Jakarta (1987)

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum

Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak Tanggal Efektif Penggabungan, yaitu 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPST tanggal 15 Februari 2019.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan

Pengalaman Kerja

- Legal Officer PT Bank Sumitomo Niaga (1989-1993)
- Legal Manager PT ING Bank (1993-1996)
- Kepala Divisi Legal PT Bank PDICI Tbk (1996-1999)
- Partner/Konsultan Hukum di Firma Hukum Herdini & Partners (2000-2004)
- General Counsel & Corporate Secretary PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2004- 2014)
- Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (2014-Januari 2019)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali.



Yasuhiro Daikoku
Direktur

Warga Negara

Jepang

Domisili

Jakarta

Usia

51 tahun pada akhir Tahun Buku 2020

Riwayat Pendidikan

Bachelor of Law dari Keio University, Japan (1992)

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum

Menjabat sebagai Direktur sejak Tanggal Efektif Penggabungan, yaitu 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPST tanggal 15 Februari 2019.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan

Pengalaman Kerja

- Vice President, Sumitomo Bank (1999-2001)
- Section Head, Senior Vice President, SMBC Bangkok Branch (2006-2008)
- Senior Vice President Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Jepang (2011-2015)
- Wakil Direktur Utama PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (2015-Januari 2019)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali.



Henoeh Munandar
Direktur

Warga Negara

Indonesia

Domisili

Jakarta

Usia

54 tahun pada akhir Tahun Buku 2020

Riwayat Pendidikan

Sarjana Ekonomi dari Universitas Atma Jaya, Jakarta (1989)

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum

Menjabat sebagai Direktur sejak Tanggal Efektif Penggabungan, yaitu 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPST tanggal 15 Februari 2019.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan

Pengalaman Kerja

- Sub Branch Manager Bank Susila Bakti (1991-1993)
- Account Manager Panin Bank (1993-1995)
- Account Manager PT Bogor Multifinance (1995-1995)
- Local Corporate Head-Senior Manager, Sanwa Bank Indonesia/ Bank United Financial of Japan (UFJ) (1995-2006)
- Co-Dept Head of Corporate Banking, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (2006-2006)
- Deputy SMEC Risk + Remedial Head PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2006-2010)
- Deputy Head of Credit/Credit Risk Management Head SMEC Bank DBS Indonesia (2010-2013)
- Direktur PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (2014-Januari 2019)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali.



Adrianus Dani Prabawa
Direktur

Warga Negara

Indonesia

Domisili

Jakarta

Usia

53 pada akhir Tahun Buku 2020

Riwayat Pendidikan

Bachelor Degree in Financial Administration dari University of New England, Armidale, Australia (1989)

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum

Menjabat sebagai Direktur sejak Tanggal Efektif Penggabungan, yaitu 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPST tanggal 15 Februari 2019.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan

Pengalaman Kerja

- Account Officer PT Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) (1990-1992).
- Account Relationship Manager, Standard Chartered Bank (1992-1995)
- Senior Marketing Manager, PT BII Lend Lease (1995-1996)
- Senior Manager - Vice President ING Bank (1996-2003)
- Direktur PT Bank DBS Indonesia (2006-2014)
- Wakil Direktur Utama PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (2014-Januari 2019)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali.



Hiromichi Kubo
Direktur

Warga Negara

Jepang

Domisili

Jakarta

Usia

50 pada akhir Tahun Buku 2020

Riwayat Pendidikan

Bachelor of Commercial Science dari Kobe University, Hyogo, Japan (1992)

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum

Menjabat sebagai Direktur sejak Tanggal Efektif Penggabungan, yaitu 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPST tanggal 15 Februari 2019.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan

Pengalaman Kerja

- Manager of Foreign Exchange Group Trading Department Sakura Bank (1999-2001)
- Senior Vice President, Trading Group, Treasury Department SMBC Kantor Cabang New York (2006-2009)
- Head of Treasury, Treasury Department, Kantor Cabang Sydney, SMBC (2011-2014)
- Deputy General Manager, Head of Treasury Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) Kantor Cabang Sydney (2014-2015)
- Joint General Manager, Planning Department, Treasury Unit SMBC, Tokyo (2015-2016)
- Direktur Treasury, PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (2016-Januari 2019)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali.



Hanna Tantani
Direktur

Warga Negara

Indonesia

Domisili

Jakarta

Usia

53 pada akhir Tahun Buku 2020

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Airlangga (1990)
- Master of Business Administration dari Australian Graduate School of Management, University of New South Wales, Australia (1993).

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum

Menjabat sebagai Direktur berdasarkan hasil RUPSLB tanggal 11 September 2019.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan

Pengalaman Kerja

- Staff, Credit Operations & Trade Services, Management Accountant, Manager Treasury Operations, AVP Treasury Services, VP Global Payment & Cash Management, VP Credit Operation, VP Area Finance, HSBC (1990-2004)
- Market Controller, American Express Bank (2004-2008)
- Financial Controller, Standard Chartered Bank (2008-2009)
- SVP MI Planning & Analysis, KCBA HSBC Indonesia (2009-2014)
- Direktur Keuangan, PT Bank HSBC Indonesia (2014-2018)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali.



Merisa Darwis
Direktur

Warga Negara

Indonesia

Domisili

Jakarta

Usia

53 tahun pada akhir Tahun Buku 2020

Riwayat Pendidikan

Sarjana Teknik Informatika dari ITB (1991)

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum

Menjabat sebagai Direktur sejak Tanggal Efektif Penggabungan, yaitu 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPST tanggal 15 Februari 2019

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan

Pengalaman Kerja

- Programmer/Analyst, USI/IBM Jakarta (1992-1993)
- Operations - Control & Reporting Head, Transaction Services Head, Control & Support Head, Consumer IT Head & Country IT Financial Head, serta IT QA Head, Privacy Officer and BISO (Business Information Security Officer) Citibank, N.A., Indonesia (1996-2009)
- Operations - Head of Internal Control, Bank Barclays Indonesia (2009-2010)
- HR & Internal Control Director, Bank Barclays Indonesia (2010-2011)
- Kepala Satuan Kerja Audit Internal, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2011-2016)
- Head of Operations, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2017-Januari 2019)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali.



Komite Audit



Ivan Purnama Sanoesi

Anggota
(Pihak Independen)
Komite Audit

Warga Negara

Indonesia

Domisili

Jakarta

Usia

59 tahun pada akhir Tahun Buku 2020

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanegara
- Master Manajemen Keuangan, Sekolah Tinggi PPM (2004)

Riwayat Jabatan Dasar Hukum & Masa Jabatan

Menjabat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Audit sejak 1 Februari 2019.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan

Pengalaman Kerja

- Staf Audit di PT Bank BCA Tbk (1986)
- Wakil Kepala Divisi Audit PT Bank BCA Tbk (2016)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.



Kanaka Puradireja

Anggota
(Pihak Independen)
Komite Audit

Warga Negara

Indonesia

Domisili

Bogor, Jawa Barat

Usia

77 pada akhir Tahun Buku 2020

Riwayat Pendidikan

Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Padjadjaran (1971)

Riwayat Jabatan Dasar Hukum & Masa Jabatan

Menjabat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Audit sejak 1 Februari 2019 .

Rangkap Jabatan

- Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko BTPN sampai dengan 18 November 2020
- Anggota Dewan Kehormatan Profesional di Asosiasi Manajemen Risiko (PRIMA)
- Ketua Dewan Sertifikasi Institut Komite Audit Indonesia.

Pengalaman Kerja

- Managing Partner and Chairman of KPMG Indonesia (1978-1999)
- Pendiri dan Senior Partner KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (2000-2007)
- Ketua Majelis Kehormatan IAI (2002-2010)
- Ketua Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia (2004-2010)
- Saat ini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Sertifikasi Ikatan Komite Audit Indonesia
- Anggota Dewan Kehormatan Profesional di Asosiasi Manajemen Risiko (PRIMA).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.



Komite Pemantau Risiko



Sofyan Rambey

Anggota
(Pihak Independen) Komite
Pemantau Risiko

Warga Negara

Indonesia

Domisili

Jakarta

Usia

62 pada akhir Tahun Buku 2020

Riwayat Pendidikan

- MBA di bidang Finance dari John. M. Olin School of Business, Washington University, St. Louis, USA (1993)
- Gelar profesi Financial Risk Manager (FRM®) dari Global Association of Risk Professional ("GARP")

Riwayat Jabatan Dasar Hukum & Masa Jabatan

Menjabat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko sejak 1 Februari 2019.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan

Pengalaman Kerja

Memulai karirnya pada tahun 1984 sebagai Account Officer di PT Bank Exim, kemudian dilanjutkan sebagai Bureau Head, Komisaris di PT Exim Securities dan Group Head di PT Bank Mandiri. Ia juga menjabat sebagai Regional Director GARP (2005), Deputy Head IRPA (2006) dan CEO & President Director dari Risk Forum School of Finance sejak 2007 hingga sekarang.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.



**Yosef Antonius Boliona
Badilangoe**

Anggota
(Pihak Independen)
Komite Pemantau Risiko
dan Komite Tata Kelola
Terintegrasi

Warga Negara

Indonesia

Domisili

Jakarta

Usia

61 tahun pada akhir Tahun Buku 2020

Riwayat Pendidikan

Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada (1983).

Riwayat Jabatan Dasar Hukum & Masa Jabatan

- Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko sejak 18 November 2020.
- Anggota (Pihak Independen) Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak 1 Februari 2019.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan

Pengalaman Kerja

- Executive Vice President-Head of Network & Services (2004-2005) and Executive Vice President - Head of Subsidiaries & Special Asset Management (2002-2003)
- Executive Vice President - Head of Retail Sales & Services (2006-2007)
- Executive Director-Compliance & Human Resources of PT Bank Niaga Tbk (2007-2008).
- Executive Director - Compliance & Human Resources of PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk (2009-2011)
- Advisor, Asset Restructuring and Recovery of PT Bank CIMB Niaga Tbk (2011-2016)
- Audit Committee & Risk Monitoring Committee PT Bank BTPN Tbk (2016-2019)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.



Komite Remunerasi dan Nominasi



Mira Fitria

Anggota
(Pejabat Eksekutif HC)
Komite Remunerasi dan
Nominasi

Warga Negara

Indonesia

Domisili

Jakarta

Usia

43 pada akhir Tahun Buku 2020

Riwayat Pendidikan

- Program Riset bidang Psikologi Organisasi dari The London School of Economics and Political Science (LSE), Inggris (2006)
- Magister Analisis dan Perilaku Organisasi dari Lancaster University, Inggris (2001)
- Sarjana Psikologi dari Universitas Indonesia (1996-2000).

Riwayat Jabatan Dasar Hukum & Masa Jabatan

Menjabat sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 1 Juli 2020

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan

Pengalaman Kerja

- Citibank Indonesia
 - Management Associate Citibank Indonesia (2001-2002)
 - Investment, Treasury and Insurance Compliance Manager Citibank Indonesia (2002-2003)
- Regional Management Associate: Consumer Bank Training & Development Manager Citibank Asia Pacific Consumer Bank, Singapore (2003-2004)
- Leadership, Talent and Performance Management Head CITI Indonesia (2006-2008)
- HR Generalist for Retail Bank, Consumer Finance, Risk Management and Financial Control CITI Indonesia (2008-2013)
- Senior HR Business Partner Microsoft Indonesia (2013-2014)
- Human Resources Director Microsoft Indonesia (2014-2016)
- CHRO - Corporate Affairs & Sustainability, Human Resources, Technology, and Strategy Management The Body Shop Indonesia (2017-2019)
- VP of Human Resources Danone Waters Indonesia (2019-2020)
- Head of Human Capital, PT Bank BTPN Tbk (2020-Sekarang)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.

Komite Tata Kelola Terintegrasi



Dewie Pelitawati

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (Komisaris Independen BTPN Syariah)

Warga Negara

Indonesia

Domisili

Jakarta

Usia

61 pada akhir Tahun Buku 2020

Riwayat Pendidikan

Sarjana dan Magister Hukum, masing-masing pada tahun 1984 dan 2005, dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran; mengikuti berbagai program pelatihan di antaranya yang dilakukan oleh LSPP, Asosiasi Advokat Indonesia, Dubai International Finance Center, Corporate Leadership Development Institute dan Training Social Innovation in Action yang diselenggarakan oleh The Economist.

Riwayat Jabatan Dasar Hukum & Masa Jabatan

Menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak 1 Februari 2019.

Rangkap Jabatan

Komisaris Independen BTPN Syariah.

Pengalaman Kerja

- PT Indosat (1985-1999)
- Head of Chairman Office dari Indonesia Bank Restructuring Agency (1999-2000)
- Secretary to Junior Minister dari Minister for National Economic Restructuring-RI (2001)
- Komisaris PT Indosat Mega Media Mobile (2002-2003)
- Komisaris PT Satelindo (2002-2003)
- Chief of Legal and Compliance di PT Indosat (2009-2010)
- Partners pada Bahar and Partners Attorney At Law (2010-2013)
- Senior GM Corporate Legal, Governance and Compliance and Advisor to CEO pada XL-Axiata Tbk (2013-November 2018).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.



Muhammad Faiz

Anggota Komite Tata
Kelola Terintegrasi (Dewan
Pengawas Syariah BTPN
Syariah)

Warga Negara

Indonesia

Domisili

Jakarta

Usia

46 pada akhir Tahun Buku 2020

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Syariah dari Universitas Islam Madinah pada tahun 1997 dan gelar Pasca Sarjana Daarul Ulum dari Universitas Kairo pada tahun 2013. Sertifikasi DPS Perbankan Syariah tingkat I (2008) dan tingkat II (2013) dari DSN-MUI dan BI, serta Pra Workshop Ijtima Sanawi Peningkatan Kompetensi DPS Perbankan, Pembiayaan dan Modal Ventura Syariah (2016).

Riwayat Jabatan Dasar Hukum & Masa Jabatan

Menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak 1 Februari 2019.

Rangkap Jabatan

Anggota Dewan Pengawas BTPN Syariah

Pengalaman Kerja

- Ketua Dewan Pengawas Syariah di UUS PT Bank Permata, Tbk (2008-sekarang)
- Wakil Pengasuh PP Darul Rohman (2008-sekarang)
- Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI (2010-sekarang)
- Dewan Pengawas Syariah di PT IMFI Syariah (2012-sekarang)
- Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail di PBNU (2015-sekarang)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.

Profil Pejabat Eksekutif

No.	Nama	Pendidikan Terakhir	Universitas	Bergabung di BTPN	Jabatan
1	Tatsuro Suzuki	Bachelor Degree	Aoyama Gakuin University	2019	Corporate Banking 2 Head
2	Karinda Listyani Rachmana	Bachelor Degree	Ritsumeikan Asia Pacific University	2019	Corporate Banking 3 Head
3	Hiroaki Seguchi	Bachelor Degree	Tokyo University of Science	2020	Corporate Banking 4 Head
4	Tsuyoshi Nakayama	Bachelor Degree	Kobe University	2019	Corporate Banking 5 Head
5	Virni Anggia Septiranti	Bachelor Degree	Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik Jakarta	2019	KYC Onboarding Manager
6	Wibowo Kurniawan	Bachelor Degree	Universitas Bina Nusantara	2019	Corporate Banking Business Planning Head
7	Fifi	Bachelor Degree	Tokyo International University	2019	Corporate Banking Loan Reviewer Head
8	Nathan Christianto	Master Degree	University of Tokyo	2019	Head of Wholesale Banking
9	Intan Natalia Wijaya	Bachelor Degree	Sanata Dharma - Jogjakarta	2019	Transaction Banking & Supply Chain Head
10	Margareth P. Santosa	Master Degree	Universitas Indonesia	2019	Commercial Banking Head
11	Wiwig Wahyu Santoso	Bachelor Degree	CSU Fullerton	2019	Deputy Head of Treasury
12	Eko Yanto SE	Master Degree	Universitas Padjadjaran, Bandung	2019	Treasury Interbank Head
13	Slamet Riyadi S.	Bachelor Degree	Perbanas Institute	2019	Treasury Marketing Head
14	Rudiyanto Lie	Master Degree	Tokyo Institute of Technology	2019	Treasury Planning Head
15	Jeffrey Cheanandro Tjoeng	Bachelor Degree	Oklahoma State University	2020	Head of Business Banking
16	I Ketut Sukadana	Bachelor Degree	Univ Brawijaya, Financial Management, Business Administration Faculty	2008	Business Incubation Digital SME & I-SME Head
17	Willem E.O Umboh	Bachelor Degree	Universitas Sam Ratulangi Manado	2015	Business Banking Support Head
18	Sidik Waskito,ST	Bachelor Degree	Universitas Sebelas Maret	2012	Business Banking Credit Risk Head
19	Novri Irza Hidayattullah	Bachelor Degree	Universitas Gadjah Mada	2019	Business Banking Policy & Control Head
20	P Canisius Soriton, SE	Bachelor Degree	Universitas Sam Ratulangi Manado	2013	SME Head
21	Anita Natalia	Bachelor Degree	Universitas Trisakti	2013	Business Banking Strategy Head
22	Fiandra Monica Affian	Bachelor Degree	Universitas Trisakti	2019	Consumer Finance Head
23	Erpantja Toho S. Pasaribu	Bachelor Degree	Universitas Sumatera Utara	2019	Micro Business Banking Head
24	Yenny Lim	Bachelor Degree	Oregon State University	2019	Planning & Deputy CFO
25	Arif Suseno	Bachelor Degree	Universitas Indonesia	2019	Finance Technology & Operations Head
26	Tanpanjana	Bachelor Degree	Stie Widya Wiwaha	2008	Financial Control Head
27	Masayoshi Higuchi	Master Degree	University of Rochester	2019	Alignment & Synergy Head
28	Jeny Mustopha	Master Degree	Emeritus Institute of Management	2020	Head of Information Technology
29	Jufri	Bachelor Degree	Alexander Collage - Perth, Western Australia	2013	IT Strategy & Planning Head
30	Andi Febri Cahyo	Master Degree	Others	2008	IT Business Enablement Head
31	Hendra Rahardja	Bachelor Degree	Universitas Gunadarma	2019	IT Data Management Head
32	Setiasmo	Master Degree	Swiss German University	2017	IT Transaction Management Head
33	Joko Kurniawan	Bachelor Degree	Binus Business School	2010	IT Digital Service Enablement Head
34	Iman Triono	Master Degree	Others	2019	IT Special Projects 1
35	Lyzia Ariesta	Bachelor Degree	Universitas Padjadjaran	2009	IT Special Projects 2
36	Yudi Sukendro	Master Degree	Tu Delft, Netherland	2020	IT Special Projects 3



No.	Nama	Pendidikan Terakhir	Universitas	Bergabung di BTPN	Jabatan
37	Seiji Tamura	Bachelor Degree	Tokyo Institute of Technology	2020	IT Special Projects 4
38	Sendiatty Sondy SE	Bachelor Degree	Universitas Trisakti	2012	Portfolio Management & Policy Head
39	Kusuma Adi Tarigan, SE	Bachelor Degree	Universitas Sebelas Maret	2016	Anti Fraud Management Head
40	Heru Rustanto, SE	Master Degree	Universitas Tarumanagara	2014	Operational Risk Management Head
41	Deni	Master Degree	Universitas Indonesia	2019	Market & Liquidity Risk Management Head
42	Shigeaki Matsumoto	Bachelor Degree	The University of Electro-Communications (Japan)	2019	Risk Management Planning
43	Takane Shiomi	Bachelor Degree	Waseda University	2019	Credit Risk Head
44	Husan Mahjudin	Bachelor Degree	Universitas Trisakti	2019	Loan Head
45	Jenny Susanto	Bachelor Degree	Monash University, Australia	2019	Credit Head
46	Nur Arini	Bachelor Degree	Universitas Indonesia	2019	Transaction Legal Head
47	Eddy Satria Nugraha Sembiring	Master Degree	Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya (Jakarta)	2019	Commercial Banking Credit Risk Head
48	Tubagus Dimas Andriadie	Master Degree	Magister Management Agribisnis - Institut Pertanian Bogor	2019	Credit Planning Head
49	Hari Suci Yulastuti	Bachelor Degree	Universitas Gadjah Mada	2019	Anti Money Laundering & CFT Head
50	Butet Sondang Sitepu	Master Degree	Universitas Gadjah Mada	2009	Compliance Head
51	Eneng Yulie Andriani	Master Degree	Universitas Indonesia	2019	Corporate Secretary Head
52	Argo Wibowo	Master Degree	Universitas Indonesia	2011	General Counsel
53	Andrie Darusman	Bachelor Degree	Universitas Indonesia	2015	Communications & Daya Head
54	Bambang Joko Susilo	Bachelor Degree	Universitas Trisakti	2014	Operations Transaction Center Head
55	Radhar Hasti Handayani	Bachelor Degree	Universitas Katolik Parahyangan	2008	Operations Development Head
56	Hermanto Rahardjo D.	Bachelor Degree	Universitas Padjadjaran	2014	Branch Banking Head
57	Ridwan Nugraha	Master Degree	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta	2011	Customer Experience Center Head
58	Joko	Bachelor Degree	Universitas Katolik Indonesia Atmajaya	2015	Operations Control Assurance Head
59	Armen Damanhuri	Bachelor Degree	Universitas Indonesia	2019	Reporting, Settlement & Access Management Head
60	Bambang Anugerah Rachmad	Bachelor Degree	Universitas Trisakti - Jakarta	2019	General Services Head
61	Mira Fitria	Master Degree	Lancaster University, UK	2020	Head of Human Capital
62	Yvonne Febrina Syofyan	Master Degree	Golden Gate University	2019	HCBP Head Corporate Banking
63	Aris Munandar	Master Degree	Loughborough University	2017	HC Strategy & Development Head
64	Aloysius Wilhelmus Jr. B	Master Degree	Others	2019	HCBP Head Operations & Outregion
65	Jemmy Maruto	Bachelor Degree	Universitas Bina Nusantara	2020	HC Technology & Operations Head
66	Debbie Gracia Retnoningsih	Master Degree	Thunderbir, Graduate School of International Management	2015	Hcbp Head Business Banking
67	Galih Suri Pakerti Ningrum	Bachelor Degree	Belum Ada Data	2008	HCBP Head Retail Banking
68	Denty Avianty	Master Degree	Universitas Indonesia	2015	HCBP Head IT & Functions
69	Nurhajati Soerjo Hadi	Bachelor Degree	Oregon State University, Or - USA	2015	Head of Internal Audit
70	Willy Johan Widjaja S.	Master Degree	Bina Nusantara	2016	IT, Digital Banking & Analytics Audit Head
71	Bernanta Budi Danardana	Bachelor Degree	Universitas Indonesia	2019	Audit Methodology, Qa & Development Head
72	Dessy Natalia	Bachelor Degree	Stie Malangkeucecwara	2012	Retail Lending & Business Banking Audit Head
73	Stefanus Rudy Kristianto	Bachelor Degree	Institut Pertanian Bogor	2013	Operations Audit Head

No.	Nama	Pendidikan Terakhir	Universitas	Bergabung di BTPN	Jabatan
74	Ahmad Salman Farizy	Master Degree	Indonesia Banking School	2015	Funding & Corporate Functions Audit Head
75	Iswandi	Bachelor Degree	Universitas Lampung	2019	Wholesale & Commercial Banking Audit Head
76	Vincentius Hidayat	Bachelor Degree	Universitas Brawijaya Malang	2019	Head of Retail Lending Business
77	Yose Parlinta,Sip.	Bachelor Degree	Universitas Gadjah Mada	2011	Business Solution & Customer Experience Head RLB
78	Medi Suharno, SE	Master Degree	Universitas Narotama Surabaya	2017	Business Risk Head RLB
79	Enrico Novian	Bachelor Degree	Universitas Indonesia	2008	Sales Distribution Head Pension Business 1
80	Helmut Simanjuntak	Master Degree	Stie Ibek Jakarta	2020	Sales Distribution Head Pension Business 2
81	Irradiatie Pierenika	Bachelor Degree	Universitas Gajah Mada	2010	Sales Distribution Head Pension Business 3
82	Dewi Puspita Sari	Bachelor Degree	Universitas	2017	Strategic Partnership & Relationship Management Head Pension Business
83	Tri Sujatioadi	Bachelor Degree	Institut Teknologi Bandung	2010	Product & Sales Management Head RLB
84	Helena	Bachelor Degree	Intstitut Pertanian Bogor	2008	Head of Wealth Management Business
85	Rudyanto Kemal	Bachelor Degree	Universitas Gajah Mada	2009	Sales Management Head WMB
86	Aegeus Hutama Soewito	Master Degree	Universitas Indonesia	2020	Wealth Product Management Head WMB
87	Chairul Sani	Bachelor Degree	Universitas Islam Sumatera Utara	2009	Network & Distribution Head WMB
88	Elvie Iskandar	Bachelor Degree	Others	2008	Liabilities & Digital Management Head Wmb
89	Sanny Kumalasari	Master Degree	Unika Atma Jaya	2019	Customer Experience Head WMB
90	Anggraeni Arief Widjaja	Master Degree	University of California	2016	Digital Banking Consumer Product Head Jenius
91	Frenky Guslove	Bachelor Degree	President University	2015	Digital Banking Solution Head
92	Irwan Sutjipto Tisnabudi	Bachelor Degree	The University of New South Wales	2016	Head of Digital Banking
93	Febri	Master Degree	Prasetiya Mulya	2015	Digital Banking Partnership Head Jenius
94	Lollyta Kurniawan	Master Degree	The American Graduate School of International Management	2017	Digital Banking Business Performance & Customer Valuemangement Head
95	Anita Ekasari. C	Bachelor Degree	Universitas Katolik Parahyangan	2016	Digital Banking Acquisition, Service & Marketing Head Jenius
96	Waasi Briman Sumintardja	Bachelor Degree	Universitas Padjadjaran	2010	Digital Banking Business Product Head Jenius
97	Achmad Nusyirwan Sugondo	Bachelor Degree	University of Toledo	2011	Digital Banking Product & Customer Experience Head Btpn Wow!
98	Mohammad Reza Rizal	Bachelor Degree	Universitas Indonesia	2011	Digital Banking Sales Management Head Btpn Wow!
99	Adil Pamungkas	Bachelor Degree	Upn Veteran Yogyakarta	2020	Retail Banking Risk Head
100	Toni Handiono Wirja	Master Degree	Saint Louis University	2010	Retail Banking Business Management Head
101	Erliana Tandoko	Bachelor Degree	IPB	2015	Retail Banking Analytics, Business Planning & Credit Policy Head



Statistik Karyawan

Per 31 Desember 2020, jumlah karyawan BTPN tercatat sebanyak 7.482, dengan rincian sebagai berikut:

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

Status Kepegawaian	2020	2019	2018
Permanen	6.908	6.948	6.437
Kontrak	574	792	1.365
TOTAL	7.482	7.740	7.802

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN GENDER

Gender	2020	2019	2018
Laki-laki	4.392	4.584	4.751
Perempuan	3.090	3.156	3.051
TOTAL	7.482	7.740	7.802

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

Pendidikan	2020	2019	2018
< D1-D3/Akademi	1.287	1.485	1.513
S1/Sarjana	5.899	5.970	6.025
S2-S3/Master	296	285	264
TOTAL	7.482	7.740	7.802

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN DIREKTORAT

Nama Direktorat	2020	2019	2018
Analytics & Decision Science	-	16	15
Branchless Banking	-	232	249
Business Banking	789	1.831	1.998
Business Incubation	-	-	6
Corporate Banking - Japanese	96	85	-
Credit Risk	47	42	219
Digital Banking	506	290	-
Executive Secretary to Retail Banking Director	1	-	-
Human Capital	92	102	95
Internal Audit	56	57	52
Kepatuhan & Legal	100	98	-
Kepatuhan & Manajemen Risiko	-	-	127
Keuangan	67	59	70
Manajemen Risiko	50	51	-
Micro Business Banking	758	-	-
Operations	2.251	2.311	2.371
Retail Banking Analytics, Business Planning & Credit Policy	28	-	-
Retail Banking	-	2	-
Retail Banking Business Management	2	2	-
Retail Banking Risk	620	-	-
Retail Credit Risk	-	434	-

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN DIREKTORAT

Nama Direktorat	2020	2019	2018
Retail Risk	-	-	483
Retail Funding Business	-	682	706
Retail Lending Business	736	895	974
Strategy Implementation	-	-	1
Supply Chain & Structure Program Business	-	-	15
Secretary To Deputy President Director	1	1	-
Teknologi Informasi	459	405	356
Treasury	35	33	-
Wealth Management Business	642	-	-
Wholesale Banking	144	112	65
TOTAL	7.482	7.740	7.802

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL JABATAN

Level Jabatan	2020	2019	2018
Grade 2-7 (Clerical)	2.073	2.266	2.024
Grade 8-9 (Officer/Supervisor)	1.720	1.909	2.586
Grade 10-13 (Management)	2.809	2.692	2.418
Grade 14-15 (Senior Management)	708	706	649
Grade 16-17 (Top Management)	161	154	115
Grade 17 ke atas (Board Management)	11	13	10
TOTAL	7.482	7.740	7.802

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN USIA

Usia	2020	2019	2018
< 25 tahun	278	384	447
25-29 tahun	1.308	1.533	1.472
30-34 tahun	2.005	2.139	2.373
35-39 tahun	1.924	1.870	1.841
40-44 tahun	1.026	902	827
45-49 tahun	545	550	520
50-54 tahun	378	347	311
55-59 tahun	18	14	11
> 60 tahun	-	1	-
TOTAL	7.482	7.740	7.802

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN MASA KERJA

Years of Services	2020	2019	2018
0 - < 1 Tahun	1.909	2,271	2,137
> 1 - < 3 Tahun	735	850	1,410
> 3 - < 5 Tahun	1.084	1,232	1,456
> 5 - < 10 Tahun	2.488	2,531	2,117
> 10 - < 20 Tahun	970	538	338
> 20 Tahun	296	318	344
TOTAL	7.482	7,740	7,802



PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Biaya Pengembangan Kompetensi

Sepanjang tahun 2020, Bank BTPN telah menginvestasikan sekitar Rp71,07 miliar untuk biaya pelatihan, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Rp110,6 miliar yang dikeluarkan pada tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2021, Bank mengalokasikan anggaran sebesar 5% untuk biaya pegawai.

Uraian	Realisasi 2020
Jumlah Program Pelatihan	281
Jumlah Peserta	87.970
Total Man-days	30.038
Jumlah Investasi Pelatihan (Rp juta)	71.070
Rata-rata Investasi Pelatihan per Karyawan (Rp juta)	9,6
Total Jam Pelatihan	240.305

RINGKASAN PELAKSANAAN PELATIHAN

	2020	2019	2018	2017
Jumlah Program Pelatihan	281	279	207	360
Jumlah Peserta	87.970	77.743	26.263	16.928
Total Man-Days	30.038	28.267	18.734	16.291
Total Jam Pelatihan	240.305	226.137	221.655	130.326

PELATIHAN BERDASARKAN LEVEL JABATAN

Level Jabatan	Jumlah Peserta	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Penyelenggara
Unit head	91	Leadership Development Program (LDP) P1	Membangun kompetensi leadership khususnya untuk first time leader	Dynargie
Departement Head	47	Leadership Development Program (LDP) P2	Membangun kompetensi leadership khususnya untuk memimpin sebuah tim	Dynargie
Berdasarkan PBI	372	SMR Level 1	Sertifikasi SMR sesuai regulasi (PBI)	RDS/BSL
Berdasarkan PBI	158	SMR Level 2	Sertifikasi SMR sesuai regulasi (PBI)	RDS/BSL
Berdasarkan PBI	39	SMR Level 3	Sertifikasi SMR sesuai regulasi (PBI)	RDS/BSL
Berdasarkan PBI	7	SMR Level 4	Sertifikasi SMR sesuai regulasi (PBI)	RDS/BSL/GPS
Berdasarkan PBI	1	SMR Level 5	Sertifikasi SMR sesuai regulasi (PBI)	RDS/BSL/GPS
Berdasarkan PBI	383	Refreshment SMR Level 1	Refresher SMR sesuai regulasi (PBI)	RDS
Berdasarkan PBI	182	Refreshment SMR Level 2	Refresher SMR sesuai regulasi (PBI)	RDS
Berdasarkan PBI	138	Refreshment SMR Level 3	Refresher SMR sesuai regulasi (PBI)	RDS
Berdasarkan PBI	61	Refreshment SMR Level 4	Refresher SMR sesuai regulasi (PBI)	RDS
Berdasarkan PBI	13	Refreshment SMR Level 5	Refresher SMR sesuai regulasi (PBI)	RDS

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

No	Nama	Pelatihan	Waktu
1	Chow Ying Hoong Komisaris Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analysis of Economic Condition Impact from COVID-19 2. Senior Officer Briefing on Financial Highlights of 2019 and Managing the Bank through COVID-19 3. BTPN Leadership Workshop as part of the BTPN Operating Model 4. Impact Analysis of Economic Conditions due to COVID- 19 5. Session I - Leadership Alignment Workshop 6. Session II - Leadership Alignment Workshop 7. Session III - Leadership Alignment Workshop 8. BTPN : Refreshment Risk Certification (Mandatory) for all BOC Members 9. Economic Outlook Seminar dari Creco Consultant Group 10. BTPN : Leadership Series: COVID-19 : Opportunities for MSMEs and Digitization of Financial Services 11. PwC Future of Banking Event 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 31 Maret 2020 2. 8 April 2020 3. 5 Juni 2020 4. 9 Juni 2020 5. 16 Juni 2020 6. 18 Juni 2020 7. 22 Juni 2020 8. 1 September 2020 9. 20 Oktober 2020 10. 10 Desember 2020 11. 11 Desember 2020
2	Takeshi Kimoto Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahasa Indonesia 5 days course 2. Analysis of Economic Condition Impact from COVID-19 3. APPI Seminar 4. AGMD Socialization by Commissioner Office Unit 5. Impact Analysis of Economic Conditions due to COVID -19 6. Session I - Leadership Alignment Workshop 7. Session II - Leadership Alignment Workshop 8. Session III - Leadership Alignment Workshop 9. SMBC Compliance Training - Insider Dealings and Conflicts of Interest 10. Risk Certification Refreshment (Mandatory) for all BOC members 11. SMBC Compliance Training - Banking Secrecy, PDPA, Firewall 12. Economic Outlook Seminar dari Creco Consultant Group 13. Leadership Series Training - Opportunities for MSMEs and Digitization of Financial Services by Graham Wright (Microsave Consulting) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 10-14 Februari 2020 2. 31 Maret 2020 3. 28 Mei 2020 4. 4 Juni 2020 5. 9 June 2020 6. 16 Juni 2020 7. 18 Juni 2020 8. 22 Juni 2020 9. 26 Agustus 2020 10. 1 September 2020 11. 28 September 2020 12. 20 Oktober 2020 13. 10 Desember 2020
3	Ninik Herlani Masli Ridhwan Komisaris Independen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analysis of Economic Condition Impact from COVID-19 2. Impact Analysis of Economic Conditions due to COVID 19 3. Risk Certification Refreshment (Mandatory) for all BOC members 4. Economic Outlook Seminar dari Creco Consultant Group 5. Leadership Series Training - Opportunities for MSMEs and Digitization of Financial Services by Graham Wright (Microsave Consulting) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 31 Maret 2020 2. 9 Juni 2020 3. 1 September 2020 4. 20 Oktober 2020 5. 10 Desember 2020
4	Irwan Mahjudin Habsjah Komisaris Independen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analysis of Economic Condition Impact from COVID-19 2. Impact Analysis of Economic Conditions due to COVID-19 3. Program Pemeliharaan Sertifikasi BNSP 4. Regulasi dan Peran Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) terkait Kesehatan Bank 5. Etika Integritas dan Tata kelola di Industri Finansial 6. Risk Certification Refreshment (Mandatory) for all BOC members 7. Economic Outlook Seminar dari Creco Consultant Group 8. The Age of Digital Transformation : Enabling Organizations with Artificial Intelligence During Market Transitions 9. Leadership Series Training - Opportunities for MSMEs and Digitization of Financial Services by Graham Wright (Microsave Consulting) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 31 Maret 2020 2. 9 Juni 2020 3. 30 Juni 2020 4. 12 Agustus 2020 5. 25 Agustus 2020 6. 1 September 2020 7. 20 Oktober 2020 8. 19 November 2020 9. 10 Desember 2020
5	Edmund Tondobala Komisaris Independen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Refreshment Manajemen Risiko Level 4 2. Leadership Series Training - Opportunities for MSMEs and Digitization of Financial Services by Graham Wright (Microsave Consulting) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 6 April 2020 2. 10 Desember 2020



PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

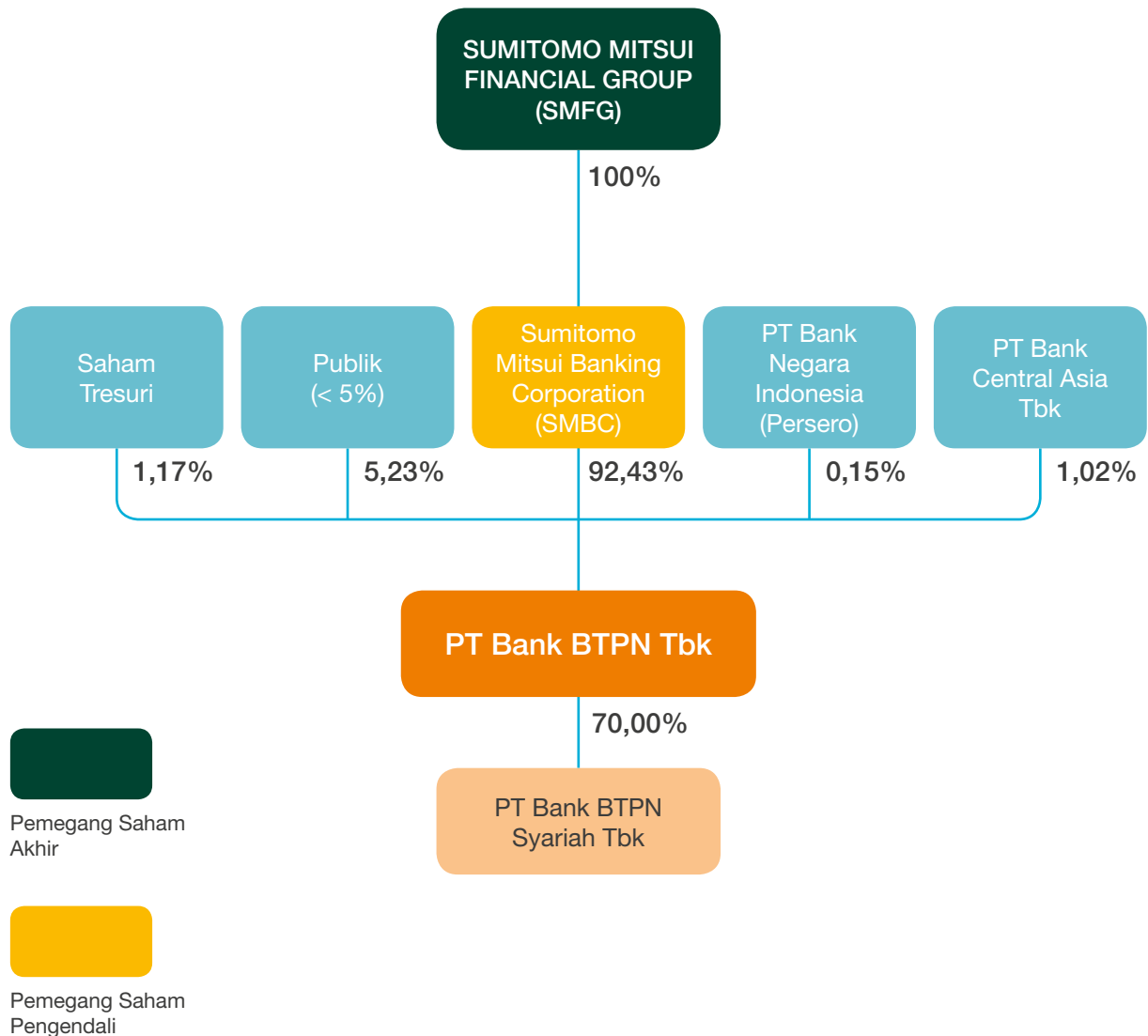
No	Nama	Pelatihan	Waktu
1	Ongki Wanadjati Dana – Direktur Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analysis of Economic Condition Impact from COVID-19 2. Impact Analysis of Economic Conditions due to COVID-19 3. Session I - Leadership Alignment Workshop 4. Session II - Leadership Alignment Workshop 5. Session III - Leadership Alignment Workshop 6. Executive Risk Management Certification Refresher 2020 7. Economic Outlook Seminar dari Creco Consultant Group 8. Egon Zehnder Talent Development Program 9. Leadership Series Training - Opportunities for MSMEs and Digitization of Financial Services by Graham Wright (Microsave Consulting) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 31 Maret 2020 2. 9 Juni 2020 3. 16 Juni 2020 4. 18 Juni 2020 5. 22 Juni 2020 6. 1 September 2020 7. 20 Oktober 2020 8. 4 Desember 2020 9. 10 Desember 2020
2	Kazuhisa Miyagawa - Wakil Direktur Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analysis of Economic Condition Impact from COVID-19 (CreCo Consulting) 2. Impact Analysis of Economic Conditions due to COVID-19 3. MURAL Training for Leadership Workshop (PWC) 4. Session I - Leadership Alignment Workshop 5. Session II - Leadership Alignment Workshop 6. Session III - Leadership Alignment Workshop 7. Executive Risk Management Certification Refresher 2020 8. Economic Outlook Seminar dari Creco Consultant Group 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 31 Maret 2020 2. 9 Juni 2020 3. 12 Juni 2020 4. 16 Juni 2020 5. 18 Juni 2020 6. 22 Juni 2020 7. 1 September 2020 8. 20 Oktober 2020
3	Darmadi Sutanto – Wakil Direktur Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analysis of Economic Condition Impact from COVID-19 2. Impact Analysis of Economic Conditions due to COVID -19 3. Session I - Leadership Alignment Workshop 4. Session II - Leadership Alignment Workshop 5. Session III - Leadership Alignment Workshop 6. Executive Risk Management Certification Refresher 2020 7. Economic Outlook Seminar dari Creco Consultant Group 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 31 Maret 2020 2. 9 Juni 2020 3. 16 Juni 2020 4. 18 Juni 2020 5. 22 Juni 2020 6. 1 September 2020 7. 20 Oktober 2020
4	Dini Herdini – Direktur Kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analysis of Economic Condition Impact from COVID-19 2. Impact Analysis of Economic Conditions due to COVID -19 3. Session I - Leadership Alignment Workshop 4. Session II - Leadership Alignment Workshop 5. Session III - Leadership Alignment Workshop 6. Executive Risk Management Certification, Risk Refreshment 2020 7. Refreshment Training APUPPT 2020 8. Economic Outlook Seminar dari Creco Consultant Group 9. Economic & Political Outlook 2021 10. FGD bersama Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia terkait Formulasi Kebijakan Makroprudensial dalam Mendorong Pembiayaan Inklusif 11. Egon Zehnder Talent Development Program 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 31 Maret 2020 2. 9 Juni 2020 3. 16 Juni 2020 4. 18 Juni 2020 5. 22 Juni 2020 6. 1 September 2020 7. 5 Oktober 2020 8. 20 Oktober 2020 9. 1 Desember 2020 10. 11 Desember 2020 11. 23 Desember 2020
5	Yasuhiro Daikoku – Direktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. ALPS Masterclass: Leadership in a Digital Age 2. Analysis of Economic Condition Impact from COVID-19 3. Impact Analysis of Economic Conditions due to COVID -19 4. Session I - Leadership Alignment Workshop 5. Session II - Leadership Alignment Workshop 6. Session III - Leadership Alignment Workshop 7. Executive Risk Management Certification Refresher 2020 8. Economic Outlook Seminar dari Creco Consultant Group 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 20 Februari 2020 2. 31 Maret 2020 3. 9 Juni 2020 4. 16 Juni 2020 5. 18 Juni 2020 6. 22 Juni 2020 7. 01 September 2020 8. 20 Oktober 2020
6	Henoch Munandar – Direktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analysis of Economic Condition Impact from COVID-19 2. Impact Analysis of Economic Conditions due to COVID- 19 3. Session I - Leadership Alignment Workshop 4. Session II - Leadership Alignment Workshop 5. Session III - Leadership Alignment Workshop 6. Executive Risk Management Certification Refresher 2020 7. Economic Outlook Seminar dari Creco Consultant Group 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 31 Maret 2020 2. 9 Juni 2020 3. 16 Juni 2020 4. 18 Juni 2020 5. 22 Juni 2020 6. 1 September 2020 7. 20 Oktober 2020
7	Adrianus Dani Prabawa – Direktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. ALPS Masterclass: Leadership in a Digital Age 2. Analysis of Economic Condition Impact from COVID-19 3. Impact Analysis of Economic Conditions due to COVID 19 4. Session I - Leadership Alignment Workshop 5. Session II - Leadership Alignment Workshop 6. Session III - Leadership Alignment Workshop 7. Executive Risk Management Certification Refresher 8. Indonesia Supply Chain Finance by IFC 9. Economic Outlook Seminar dari Creco Consultant Group 10. Ekonomi Nasional Outlook 2021: Year of Opportunity 11. OJK Institute Research Webinar 2020: The New Path on Digital Talent, Holistic Leadership, and Social Fintech 12. Economic & Political Outlook 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 20 Februari 2020 2. 31 Maret 2020 3. 9 Juni 2020 4. 16 Juni 2020 5. 18 Juni 2020 6. 22 Juni 2020 7. 1 September 2020 8. 12 Oktober 2020 9. 20 Oktober 2020 10. 21 Oktober 2020 11. 27 Oktober 2020 12. 1 Desember 2020

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

No	Nama	Pelatihan	Waktu
8	Merisa Darwis - Direktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analysis of Economic Condition Impact from COVID-19 2. Delivering Engaging Customer Experience 3. Accelerating Corporate Banking Digitalization 4. Impact Analysis of Economic Conditions due to COVID-19 5. Session I - Leadership Alignment Workshop 6. Session II - Leadership Alignment Workshop 7. Session III - Leadership Alignment Workshop 8. Leadership Alignment Workshop 9. Executive Risk Management Certification Refresher 2020 10. Webinar Asia Banking Roundtable – Reinventing Banking Distribution 11. Webinar Reimagining the next normal for Asia and the world 12. Economic Outlook Seminar dari Creco Consultant Group 13. Economic & Political Outlook 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 31 Maret 2020 2. 21 Mei 2020 3. 28 Mei 2020 4. 4 Juni 2020 5. 16 Juni 2020 6. 18 Juni 2020 7. 22 Juni 2020 8. 9 Juli 2020 9. 1 September 2020 10. 10 September 2020 11. 12 Oktober 2020 12. 20 Oktober 2020 13. 1 Desember 2020
9	Hiromichi Kubo - Direktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analysis of Economic Condition Impact from COVID-19 2. Impact Analysis of Economic Conditions due to COVID 19 3. Session I - Leadership Alignment Workshop 4. Session II - Leadership Alignment Workshop 5. Session III - Leadership Alignment Workshop 6. Executive Risk Management Certification Refresher 7. Economic Outlook Seminar dari Creco Consultant Group 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 31 Maret 2020 2. 9 Juni 2020 3. 16 Juni 2020 4. 18 Juni 2020 5. 22 Juni 2020 6. 1 September 2020 7. 20 Oktober 2020
9	Hanna Tantani - Direktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analysis of Economic Condition Impact from COVID-19 2. Accounting Impact of COVID-19 for Financial Services 3. Impact Analysis of Economic Conditions due to COVID-19 4. Session I - Leadership Alignment Workshop 5. Session II - Leadership Alignment Workshop 6. Session III - Leadership Alignment Workshop 7. Key Audit Matters in the Context of The New Audit Regulation 8. SMBC APD Town Hall & BOD Meeting I in July 2020 9. Leadership Alignment Workshop - Sponsor Meeting 10. PWC Webinar - robotic in finance 11. Discuss Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI) Online 12. Townhall Meeting of Mr Oshima with BTPN's Management 13. Risk Management Certification Refresher 2020 14. Sharing Session Work Flexible Arrangement @Microsoft 15. Sharing Session of Sustainable Finance 16. Exclusive - Indonesia Supply Chain Finance Webinar 17. Economic Outlook Seminar dari Creco Consultant Group 18. UNDANGAN CFO Forum Perbanas- Banking Update: Post Implementasi PSAK 71 dan Isu-Isu Penerapannya 19. IBM Confirmation - Banking Executive Symposium: Extending the Banking Ecosystem for the Platform Economy 20. KPMG Webinar Omnibus Law on Job Creation Webinar Series - Manpower 21. 2020 Annual Technical Update - Financial Services Accounting & Tax 22. Egon Zehnder Talent Development Program 23. Economic & Political Outlook 2021 24. Leadership Series: COVID-19: Opportunities for MSMEs and Digitization of Financial Services) 25. [Webinar] ASIFMA Virtual Event - IBOR Transition Series: A Local Market Perspective - Indonesia IBOR 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 31 Maret 2020 2. 2 Juni 2020 3. 9 Juni 2020 4. 16 Juni 2020 5. 18 Juni 2020 6. 22 Juni 2020 7. 30 Juni 2020 8. 7 Juli 2020 9. 9 Juli 2020 10. 6 Agustus 2020 11. 12 Agustus 2020 12. 26 Agustus 2020 13. 1 September 2020 14. 18 September 2020 15. 06 Oktober 2020 16. 12 Oktober 2020 17. 20 Oktober 2020 18. 23 Oktober 2020 19. 17 November 2020 20. 18 November 2020 21. 20 November 2020 22. 1 Desember 2020 23. 1 Desember 2020 24. 10 Desember 2020 25. 16 Desember 2020



Struktur Kepemilikan



Posisi per 31 Desember 2020

Komposisi dan Profil Pemegang Saham

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) adalah bagian dari Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) yang merupakan satu dari tiga grup finansial terbesar di Jepang. Per 30 September 2020, SMBC memiliki total aset sebesar JPY 177,9 triliun, total dana pihak ketiga sebesar JPY 113,3 triliun dan total pinjaman dan piutang sebesar JPY 76,2 miliar. SMBC berkantor pusat di 1-1-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan.

SMBC didirikan pada bulan April 2001 melalui penggabungan dua bank terkemuka, yaitu The Sakura Bank, Limited dan The Sumitomo Bank, Limited. SMFG didirikan pada bulan Desember 2002 melalui transfer saham sebagai perusahaan induk, dan SMBC menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh SMFG.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) dan kelompok usahanya menawarkan berbagai layanan keuangan yang terpusat pada bisnis perbankan. SMBC juga bergerak di bidang usaha leasing, sekuritas, kartu kredit, investasi, sekuritisasi kredit pemilikan rumah, *venture capital* dan bidang pemberian kredit lainnya.

Informasi Entitas Induk Terakhir

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. ("SMFG") didirikan pada tanggal 2 Desember 2002 dan merupakan induk perusahaan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC"), Pemegang Saham Pengendali Bank. Saham SMFG terdaftar di Tokyo Stock Exchange (First Section) dan Nagoya Stock Exchange (First Section). Misi Usaha SMFG adalah untuk tumbuh dan sejahtera bersama nasabah dengan menyediakan layanan yang mempunyai nilai yang lebih besar bagi mereka; memaksimalkan nilai pemegang saham melalui pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan; serta menciptakan lingkungan kerja yang mendorong dan menghargai karyawan yang tekun dan mempunyai motivasi yang tinggi.

Berkantor Pusat di Tokyo, Jepang, SMFG bergerak dalam bidang manajemen anak perusahaan perbankan dan perusahaan lain yang dapat diperlakukan sebagai anak perusahaan berdasarkan ketentuan Undang-undang Perbankan Jepang, serta melakukan fungsi-fungsi terkait (*ancillary functions*), serta fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh perusahaan *holding* perbankan di bawah ketentuan Undang-undang Perbankan Jepang. Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha SMFG terutama bergerak di bidang perbankan komersial melalui layanan keuangan berikut: *leasing*, sekuritas, pembiayaan konsumen, keuangan, pemrosesan data pengembangan sistem, dan manajemen aset.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.smfg.co.jp.



Informasi Pemegang Saham Utama

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) didirikan pada bulan April 2001 melalui penggabungan dua bank terkemuka, The Sakura Bank, Limited dan The Sumitomo Bank, Limited. Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. didirikan pada bulan Desember 2002 sebagai perusahaan induk bank melalui transfer saham, dan SMBC menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh SMFG. Pada Maret 2003, SMBC melakukan penggabungan usaha (merger) dengan The Wakashio Bank, Ltd.

Berkantor Pusat di Tokyo, Jepang, saat ini SMBC merupakan salah satu bank terbesar di Jepang dengan jaringan usaha yang telah menyebar ke beberapa wilayah di dunia, seperti Australia, Eropa, Kanada, Brasil dan Indonesia. SMBC dan kelompok perusahaannya menawarkan berbagai jasa keuangan yang berpusat pada perbankan. SMBC memiliki bisnis perbankan di 16 negara selain negara asalnya Jepang. Mereka juga bergerak dalam bidang usaha *leasing*, sekuritas, kartu kredit, investasi, sekuritisasi KPR, modal ventura dan bisnis kredit terkait lainnya.

Di Indonesia, selain Bank, SMBC juga memiliki beberapa anak perusahaan lainnya yaitu PT Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Indonesia, PT Nikko Securities Indonesia, PT SBCS Indonesia, dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.smbc.co.jp.

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PER 31 DESEMBER 2020

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	7.532.311.297	92,43
PT Bank Central Asia Tbk	83.052.408	1,02
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12.007.137	0,15
Saham Treasuri	95.198.900	1,17
Publik	426.362.127	5,23
Total	8.148.931.869	100,00

KOMPOSISI 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION - EQ	7.532.311.297	92,43
UBS AG LONDON-2140724000	400.000.063	4,91
PT BANK BTPN TBK	95.198.900	1,17
PT BANK CENTRAL ASIA TBK	83.052.408	1,02
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	12.007.137	0,15
SIX SIS LTD	2.984.700	0,04
PT TIMUR NUSA NIAGAJAYA	1.189.000	0,01
CAYUGA PACIFIC GROUP LIMITED	1.177.500	0,01
LINDA SULISTYANINGSIH. BCS	755.000	0,01
CHRISTIAN SANTOSO	720.000	0,01
ANG PHEK TUAN	649.900	0,01
KAMAJAYA	649.600	0,01
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN	601.900	0,01
PT BANK BTPN TBK	577.500	0,01
CHRISTIAN SANTOSO	544.900	0,01
YANSEN LOKANATA	427.700	0,01
DJOKO SUSANTO	417.500	0,01
NIKOLAS JUSUF	363.300	0,00
ROBINSON SITEPU	350.800	0,00
CACEIS BANK. LUXEMBOURG BRANCH/EDR EUROPE	345.400	0,00

JUMLAH PEMEGANG SAHAM DAN PERSENTASE 5% ATAU LEBIH BERDASARKAN KLASIFIKASI

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase
Perorangan Indonesia	18.358.385	0,23
Dana Pensiun	117.500	0,00
Asuransi	132.100	0,00
Bank	190.835.945	2,34
Perusahaan Terbatas	1.316.234	0,02
Reksa Dana	604.700	0,00
Perorangan Asing	161.200	0,00
Perusahaan Asing	7.937.405.805	97,40
Total	8.148.931.869	100



KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Nama	Jumlah Saham	Persentase	Jabatan
Dewan Komisaris			
Chow Ying Hoong	0	0,00	Komisaris Utama
Ninik Herlani Masli Ridhwan	0	0,00	Komisaris Independen
Takeshi Kimoto	0	0,00	Komisaris
Irwan Mahjudin Habsjah	0	0,00	Komisaris Independen
Edmund Tondobala	0	0,00	Komisaris Independen
Direktur			
Ongki Wanadjati Dana	0	0,00	Direktur Utama
Kazuhisa Miyagawa	0	0,00	Wakil Direktur Utama
Darmadi Sutanto	0	0,00	Wakil Direktur Utama
Dini Herdini	0	0,00	Direktur Kepatuhan
Yasuhiro Daikoku	0	0,00	Direktur
Henoch Munandar	0	0,00	Direktur
Adrianus Dani Prabawa	0	0,00	Direktur
Hiromichi Kubo	0	0,00	Direktur
Merisa Darwis	0	0,00	Direktur
Hanna Tantani	0	0,00	Direktur

Daftar Entitas Anak

Nama Perusahaan

PT Bank BTPN Syariah Tbk

Bidang Usaha

Perbankan Syariah

Alamat Kantor Pusat

Menara BTPN
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5-5.6
Jakarta Selatan 12950

Kepemilikan

70%

Jenis Badan Hukum

Perseroan Terbatas (PT)

Total Aset

Rp16.435.005 (dalam jutaan rupiah)

Status Operasi

Masih Beroperasi

Kantor Cabang

Keterangan	Total
Kantor Pusat Operasional	1
Kantor Wilayah Non Operasional	9
Kantor Cabang	61
• Universal	55
• Sinaya	6
Kantor Cabang Pembantu	264
• Universal	234
• Sinaya	29
• Jenius	1
Function Office	1
• Operational Function Office	1
• Non-Operational Function Office	-
Kantor Fungsional	-
Payment Point	141
Total Jaringan Kantor	477
ATM	216
TCR	2
Total Jaringan Kantor & ATM	695



Kronologi Pencatatan Saham

Berikut adalah penjelasan tentang kronologi pencatatan saham Bank BTPN di Bursa Efek Indonesia.

Tanggal Pencatatan	Aksi Korporasi	Nominal/Saham (Rp)	Harga Pelaksanaan	Tambahan Saham	Jumlah Saham
12 Maret 2008	Penawaran Umum Perdana	100	2.850	267.960.220	943.936.190
10 Desember 2010	Penawaran Umum dengan HMETD I	100	-	188.787.238	1.132.723.428
28 Maret 2011	Pemecahan Nilai Nominal Saham	20	-	-	5.663.617.140
14 Maret 2012	Tambahan Saham dari Konversi Hutang IFC	20	-	176.670.117	5.840.287.257
23 Mei 2016	Pembelian Saham Kembali	20	-	-	5.840.287.257
1 Februari 2019	Tambahan Saham dari Pemegang Saham SMBCI	20	-	-	8.148.916.869
12 Agustus 2019	Pengalihan Saham SMBC	20	-	12.000	8.148.916.869
31 Desember 2019	MESOP 2015:		-	-	
	Tahap I	20	-	-	
	Tahap II	20	-	-	
	Tahap III	20	-	-	
	Tahap IV	20	-	-	
	Tahap V	20	-	-	
	Tahap VI	20	-	-	
31 Desember 2019	ESOP 2016:				
	Tahap I	20	2.617	10.670.600	
	Tahap II	20	2.617	1.112.900	
	Tahap III	20	2.617	12.000	
	Tahap IV	20	2.617	3.000	
	Tahap V	20	-	-	

Kronologi Pencatatan Efek Lainnya

Nama Obligasi	Tanggal Penerbitan	Nilai Pokok	Bunga (%)	Mata Uang	Jatuh Tempo	Peringkat		Periode Pemeringkatan
						2020	2019	
Medium Term Notes (MTN) II Tahun 2017 PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	14 Juni 2017	1.302.000.000.000	8,25	IDR	14 Juni 2020	idAAA	idAAA	9 Mei 2017 - 14 Juni 2020
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017 Seri B	18 Oktober 2017	900.000.000.000	7,50	IDR	17 Oktober 2020	AAA (idn)	AAA (idn)	26 September 2017 - 17 Oktober 2020
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2019 Seri A	27 November 2019	799.000.000.000	7,55	IDR	26 November 2022	AAA (idn)	AAA (idn)	6 September 2019 - 26 November 2022
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2019 Seri B	27 November 2019	201.000.000.000	7,75	IDR	26 November 2024	AAA (idn)	AAA (idn)	6 September 2019 - 26 November 2024



Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Penunjang Pasar Modal

AUDITOR INDEPENDEN

Siddharta Widjaja & Rekan
Wisma GKBI Lantai 33
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210

Jasa yang Diberikan
Audit

Biaya
IDR 8,500,000,000 (sesuai dengan
Engagement Letter - exclude VAT
& OPE)

Periode Penugasan
Audit Laporan Keuangan
31 Desember 2020

LEMBAGA PEMERINGKAT

PT Fitch Rating Indonesia
DBS Bank Tower, Lantai 24,
Suite 2403
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5
Jakarta 12940 – Indonesia
Tel. +62 21 2988 6800
Fax. +62 21 2988 6822

Jasa yang Diberikan
Pemeringkatan atas Perusahaan
dan Surat Berharga yang
Diterbitkan

Biaya
Annual Rating Fee Rp130juta
(sebelum PPN)

Periode Penugasan
s/d 3 Juli 2021
(Peringkat terakhir: AAA (idn);
Outlook Stabil dirilis 18 November
2020)

PT Pemeringkat Efek Indonesia
(PEFINDO)
Panin Tower Senayan City,
Lantai 17
Jl. Asia Afrika Lot. 19
Jakarta 10270 – Indonesia
Tel. +62 21 7278 2380
Fax. +62 21 7278 2370

Jasa yang Diberikan
Pemeringkatan atas Perusahaan
dan Surat Berharga yang
Diterbitkan

Biaya
2020 Annual Rating Fee Rp100juta
(sebelum PPN)

Periode Penugasan
s/d 1 Mei 2021
(Peringkat terakhir: idAAA; Outlook
Stabil dirilis 8 Mei 2020)

WALI AMANAT

PT Bank Permata Tbk
Gedung WTC II, Lantai 21-30
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920 – Indonesia
Tel. +62 21 772 89928
Fax. +62 21 772 89928

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega
Jl. Kapten P Tendean No. 12-14A
Jakarta 12790 – Indonesia
Tel. +62 21 791 75000
Fax. +62 21 799 0720

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120 – Indonesia
Tel. +62 21 350 8077
Fax. +62 21 350 8078

NOTARIS

Ashoya Ratam, SH, MKn
Notaris & PPAT Kota Administrasi
Jakarta Selatan
Jl. Suryo No. 54
Jakarta 12180 – Indonesia
Telp. +62 21 2923 6060
Fax. +62 21 2923 6070

Informasi pada Website Perusahaan



Informasi yang termuat dalam *website* Bank BTPN mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. Seluruh informasi tersebut dapat diakses oleh publik melalui situs *web* www.btpn.com



Informasi yang tersedia, antara lain:

Informasi	Tautan
PROFIL PERUSAHAAN	https://www.btpn.com/
Informasi Umum: Nama, Alamat, Kontak Kantor Pusat, Perwakilan	https://www.btpn.com/id/hubungi-kami
Riwayat Singkat	https://www.btpn.com/id/tentang-kami
Struktur Organisasi	https://www.btpn.com/id/tentang-kami/manajemen
Struktur Kepemilikan	https://www.btpn.com/id/hubungan-investor/komposisi-pemegang-saham-dan-struktur-organisasi-grup
Struktur Grup	https://www.btpn.com/id/hubungan-investor/komposisi-pemegang-saham-dan-struktur-organisasi-grup
INFORMASI BAGI INVESTOR	https://www.btpn.com/id/hubungan-investor
Prospektus Penawaran Umum	https://www.btpn.com/id/hubungan-investor/aksi-korporasi/prospektus
Laporan Tahunan (5 tahun)	https://www.btpn.com/id/hubungan-investor/laporan-tahunan-dan-keberlanjutan/laporan-tahunan
Kode Etik	https://www.btpn.com/id/hubungan-investor/tata-kelola-perusahaan/dokumen-tata-kelola
Profil Dewan Komisaris	https://www.btpn.com/id/tentang-kami/manajemen
Profil Direksi	https://www.btpn.com/id/tentang-kami/manajemen
KINERJA	https://www.btpn.com/id/hubungan-investor/laporan-keuangan/laporan-keuangan-publikasi
Laporan Keuangan Tahunan Terpisah	https://www.btpn.com/id/hubungan-investor/ikhtisar-keuangan
TATA KELOLA PERUSAHAAN	https://www.btpn.com/id/hubungan-investor/tata-kelola-perusahaan/komite
Piagam/Charter Dewan Komisaris	https://www.btpn.com/id/tentang-kami/manajemen
Piagam/Charter Direksi	https://www.btpn.com/id/tentang-kami/manajemen
Piagam/Charter Komite Audit	https://www.btpn.com/id/hubungan-investor/tata-kelola-perusahaan/komite
Piagam/Charter Komite Nominasi dan Remunerasi	https://www.btpn.com/id/hubungan-investor/tata-kelola-perusahaan/komite
Piagam/Charter Audit Internal	https://www.btpn.com/id/hubungan-investor/tata-kelola-perusahaan/dokumen-tata-kelola
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	https://www.btpn.com/id/tentang-kami/daya





ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

110	Tinjauan Ekonomi dan Industri Perbankan	122	Micro Business
110	Perkembangan Perekonomian	124	Business Banking
112	Perkembangan Industri	124	Corporate Banking
114	Tinjauan Bisnis dan Operasional	127	Treasury
114	Kinerja Bisnis Per Segmen Usaha	129	Perbankan Syariah
114	Retail Banking	131	Profitabilitas Per Segmen Usaha
115	Digital Banking - Jenius	132	Tinjauan Kinerja Keuangan
118	Digital Banking - BTPN Wow!	151	Aspek Pemasaran
119	Retail Lending Business		
120	Wealth Management Business		



BTPN menjaga fondasi yang kuat di tengah situasi pandemi yang menantang, bersiap untuk melanjutkan pertumbuhan pasca pandemi.

Tinjauan Ekonomi dan Industri Perbankan



PDB

-2,07%

Produk Domestik Bruto (PDB) terkontraksi 2,07% yoy



Aset dan DPK bertumbuh sebesar

7,18% dan 11,11%

Kredit terkontraksi sebesar **2,41%**

Stabilitas industri perbankan masih terjaga. Aset dan DPK bertumbuh sebesar 7,18% dan 11,11%, sementara Kredit terkontraksi sebesar 2,41%, di tengah persepsi tingginya risiko kredit seiring dampak pandemi COVID-19. NIM menurun menjadi 4,45%. CAR tetap kuat di 23,89%.

Meski lebih rendah dari perkiraan semula, perkembangan sejumlah indikator pada Desember 2020 mengindikasikan perbaikan pertumbuhan ekonomi domestik yang terus berlangsung.

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN

Pandemi *coronavirus* (COVID-19) telah membuat ekonomi global mengalami resesi pada 2020 sehubungan dengan adanya pembatasan aktivitas ekonomi dalam usaha pembatasan penyebaran COVID-19. Walaupun demikian, kinerja perekonomian global terus menunjukkan perbaikan dan diperkirakan akan mengalami pemulihan pada 2021. Aktivitas ekonomi global diperkirakan terus meningkat, didorong oleh implementasi vaksinasi COVID-19 di banyak negara serta keberlanjutan stimulus kebijakan fiskal dan moneter. Pemulihan ekonomi global tersebut ditopang terutama oleh Tiongkok dan Amerika Serikat (AS), serta sejumlah negara maju seperti Eropa dan Jepang, dan negara berkembang seperti India dan ASEAN. Perkembangan tersebut dikonfirmasi oleh kinerja sejumlah indikator dini pada Desember 2020 yang terus menunjukkan perbaikan ekonomi. *Purchasing Manager's Index* (PMI) manufaktur dan jasa di AS, Tiongkok, dan India melanjutkan fase ekspansi. Selain itu, keyakinan konsumen, terutama di Tiongkok dan kawasan Eropa, juga terus membaik, dan keyakinan bisnis di banyak negara melanjutkan peningkatan. Perbaikan ekonomi global tersebut mendorong

berlanjutnya kenaikan volume perdagangan dan harga komoditas dunia. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global diperkirakan menurun seiring dengan ekspektasi perbaikan perekonomian global, termasuk arah kebijakan fiskal Pemerintah AS yang baru, di tengah kondisi likuiditas global yang besar dan suku bunga yang tetap rendah. Perkembangan ini kembali mendorong aliran modal ke negara berkembang dan menopang penguatan mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi domestik telah berangsur membaik hingga akhir 2020, dan perekonomian diperkirakan meningkat secara bertahap pada 2021. Meski lebih rendah dari perkiraan semula, perkembangan sejumlah indikator pada Desember 2020 mengindikasikan perbaikan yang terus berlangsung, seperti aktivitas ekspor dan impor yang meningkat, PMI manufaktur yang membaik, serta ekspektasi penjualan dan konsumen yang masih tetap baik. Program vaksin nasional yang telah dimulai pada awal Januari 2021 dan disiplin yang tetap dibarengi dengan penerapan protokol COVID-19 diharapkan dapat mendukung proses pemulihan ekonomi domestik.



Kinerja positif transaksi berjalan diprakirakan berlanjut pada triwulan IV 2020, terutama didorong oleh surplus neraca barang yang meningkat. Neraca perdagangan pada triwulan IV 2020 mencatat surplus sebesar 8,3 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 8,0 miliar dolar AS. Secara keseluruhan tahun 2020, defisit transaksi berjalan diprakirakan sekitar 0,5% dari PDB. Sementara itu, aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik kembali berlanjut, tercermin dari investasi portofolio yang mencatat *net inflow* sebesar 2,1 miliar dolar AS pada triwulan IV 2020, berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang mencatat *net outflow* 1,7 miliar dolar AS. Memasuki awal tahun 2021, aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik ini terus berlanjut dan mencapai 5,1 miliar dolar AS (per 19 Januari 2021), termasuk penerbitan obligasi global oleh Pemerintah. Dengan perkembangan ini, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2020 tetap tinggi, yakni sebesar 135,9 miliar dolar AS.

Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi

Indikator	2020	2019	2018
Pertumbuhan PDB Nasional (% YoY)	-2,1	5,0	5,2
PDB Per Kapita (USD) – Nominal	3.912	4.175	4.050
Neraca Berjalan Eksternal (% dari PDB)	-1,3	-2,7	-3,3
Utang Pemerintah Pusat (% dari PDB)	38,1	30,2	30,3
Cadangan Devisa-IRFCL (USD Miliar)	135,9	129,2	120,7
Kemampuan Cadangan Devisa – (Jumlah bulan impor & utang eksternal)	10,2	7,3	7,7
Kebijakan Suku Bunga BI (% akhir tahun)	3,75	5,00	6,00
Indeks Harga Konsumen (% akhir tahun)	1,68	2,72	3,13
Neraca Fiskal (% dari PDB; Tahun Fiskal)	-6,1	-2,2	-1,8
Peringkat S&P - Valuta Asing	BBB	BBB	BBB+

Sumber: Riset BTPN

PERKEMBANGAN INDUSTRI

Tekanan akibat pandemi COVID-19 terhadap kondisi perekonomian secara makro membuat industri perbankan ikut terdampak. Hal itu, terutama terjadi akibat hampir seluruh sektor usaha di Indonesia mengalami kontraksi.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi industri perbankan sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19. Hal ini tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK-3/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Kebijakan restrukturisasi kredit yang awalnya ditetapkan berakhir pada 31 Maret 2021, kemudian diperpanjang selama satu tahun, menjadi 31 Maret 2022, yaitu dengan berlakunya Peraturan OJK Nomor 48/POJK-3/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 11/POJK-3/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Kebijakan restrukturisasi kredit bertujuan untuk menahan laju kenaikan NPL dan juga memberikan relaksasi bagi debitur yang terkena dampak COVID-19 dalam membayar angsuran kewajiban terhadap bank selama masa pandemi. Dengan implementasi kebijakan stimulus ini diharapkan mampu memberikan ruang likuiditas dan permodalan yang lebih longgar bagi perbankan sehingga stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah pandemi.

Bank Indonesia (BI) juga ikut merespons, yang antara lain melalui penurunan suku bunga acuan, yaitu BI *7-day (reverse) repo rate*. Sepanjang tahun ini, BI telah 5 (lima) kali menurunkan suku bunga acuan dari 5,00% di Januari 2020 menjadi 3,75% di November. Baik fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman juga turun masing-masing menjadi 3,00% dan 4,50%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi, di tengah rendahnya inflasi dan relatif stabilnya nilai tukar Rupiah. Suku bunga kebijakan Bank Indonesia ini merupakan tingkat terendah sepanjang sejarah.

Selain itu, Bank Indonesia juga menurunkan kewajiban Giro Wajib Minimum bagi perbankan. Kebijakan itu tertuang melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/2/PADG/2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah

dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hal ini menjadikan kondisi likuiditas tetap longgar, suku bunga terus menurun dan mendukung pembiayaan perekonomian.

Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga, meskipun risiko dari berlanjutnya dampak COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan terus dicermati. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan Desember 2020 tetap tinggi yakni 23,89%, dan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) tetap rendah yakni 3,06% (bruto) dan 0,98% (neto). Fungsi intermediasi dari sektor keuangan masih lemah tercermin dari pertumbuhan kredit yang masih terkontraksi, yaitu sebesar 2,41% (yoy) pada bulan Desember 2020 di tengah likuiditas yang masih tinggi sejalan dengan pertumbuhan DPK yang tetap tinggi yaitu sebesar 11,11% (yoy). Bank Indonesia memandang bahwa pertumbuhan kredit yang rendah lebih disebabkan oleh lemahnya sisi permintaan dari dunia usaha, di samping karena persepsi risiko dari sisi penawaran perbankan. Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif, serta memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, KSSK, perbankan dan dunia usaha untuk menjaga optimisme dan mengatasi permasalahan sisi permintaan dan penawaran dalam penyaluran kredit/pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha, dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Transaksi Sistem Pembayaran baik tunai maupun nontunai menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbaikan ekonomi, disertai dengan percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Nilai transaksi pembayaran menggunakan ATM, Kartu Debet, dan Kartu Kredit pada Desember 2020 tercatat Rp695,5 triliun, kembali tumbuh 1,36% (yoy), setelah kontraksi pada bulan November 2020 sebesar 1,93% (yoy). Transaksi ekonomi dan keuangan digital terus tumbuh tinggi sejalan dengan penggunaan *platform e-commerce* dan instrumen digital di masa pandemi, serta kuatnya preferensi dan akseptasi masyarakat akan transaksi digital. Hal itu terlihat dari nilai transaksi Uang Elektronik (UE) pada Desember 2020 sebesar Rp22,1 triliun, atau tumbuh 30,44% (yoy). Lebih lanjut, volume transaksi *digital banking* pada Desember 2020 mencapai 513,7 juta transaksi, atau tumbuh 41,53% (yoy) dan nilai transaksi *digital banking* sebesar Rp2.774,5 triliun, tumbuh 13,91% (yoy). Bank Indonesia memprakirakan tren digitalisasi akan terus berkembang pesat didukung dengan perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang semakin inklusif. Bank Indonesia terus mengakselerasi kebijakan digitalisasi sistem pembayaran untuk pembentukan ekosistem



ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien, serta untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dilakukan antara lain melalui perluasan *merchant* QRIS 12 juta, perluasan fitur QRIS transfer, tarik, dan setor, menetapkan *Merchant Discount Rate* Uang Elektronik (MDR UE) *Chip Based* berlaku efektif 1 Maret 2021, dan implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025.

Di tahun 2021, dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, industri perbankan dapat mendorong penyaluran kredit di sektor produktif dan aman. Hal ini sejalan dengan prioritas Pemerintah pada pembukaan sektor produktif dan aman menurut peta risiko penularan COVID-19 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yaitu sektor yang risiko penularan paling rendah sementara sektor yang risiko medium atau tinggi perlu penerapan

protokol COVID-19 sesuai tingkatannya. Selanjutnya, penyusunan prioritas berdasarkan dampak ekonomi dapat diutamakan pada sektor-sektor yang mempunyai kontribusi terhadap PDB dan/atau ekspor tertinggi. Berdasarkan hasil pemetaan, prioritas pertama, yaitu 6 (enam) sektor yang aman dan memberikan kontribusi besar baik terhadap PDB maupun ekspor, meliputi: industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, kehutanan dan penebangan kayu, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, serta pertambangan bijih logam. Prioritas kedua, yaitu 15 (lima belas) sektor ekonomi yang aman dan memberikan kontribusi besar terhadap PDB atau ekspor, di antaranya industri logam dasar, informasi dan komunikasi, industri barang dari logam, industri barang galian bukan logam serta industri mesin dan perlengkapan.

Kinerja Bank Umum Konvensional

Indikator	Hingga 31 Desember 2020	Hingga 31 Desember 2019	Hingga 31 Desember 2018
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	23,9%	23,4%	23,0%
Margin Bunga Bersih (NIM)	4,4%	4,9%	5,1%
Rasio Kredit terhadap Simpanan (LDR)	82,5%	94,4%	94,8%
Kredit Bermasalah (NPL)	3,1%	2,5%	2,4%
<i>Special Mention</i> (SM)	4,4%	5,1%	4,5%
Pertumbuhan Kredit	-2,4%	6,1%	11,8%
Pertumbuhan Simpanan	11,1%	6,5%	6,4%
Keuntungan Bersih Setelah pajak	Rp104,7 triliun	Rp156,5 triliun	Rp150,0 triliun

Sumber: OJK



Pertumbuhan Kredit Industri

-2,41%

Pertumbuhan kredit perbankan 2020 mengalami kontraksi 2,41 persen (yoy), di tengah likuiditas yang masih tinggi sejalan dengan pertumbuhan DPK yang tetap tinggi yaitu sebesar 11,11% (yoy).



Tinjauan Bisnis dan Operasional



Total Kredit

Rp **136,2** triliun

Total kredit yang disalurkan tahun 2020 mencapai Rp136,2 triliun, dengan kualitas tetap terjaga dengan NPL yang rendah sebesar 1,21% di bawah industri yang sebesar 3,06%.



Total Aset dan DPK bertumbuh sebesar

0,84% dan **15,93%**

Pendanaan dan likuiditas tetap solid, tercermin dari LCR 282% dan NSFR 115%, serta didukung fasilitas pinjaman dari Perusahaan Induk sebagai *buffer*. CAR tetap kuat mencapai 25,55%.

Strategi digital akan terus menjadi prioritas Bank di semua segmen. Bank akan terus berinvestasi di Jenius, untuk mempertahankan kepemimpinan di Perbankan Digital Indonesia sehingga menopang pertumbuhan perbankan ritel di masa depan.

KINERJA BISNIS PER SEGMENT USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BTPN membagi segmen usaha menjadi 5 (lima) bagian: Retail Banking, Business Banking, Corporate Banking, Treasury dan Perbankan Syariah. Segmentasi tersebut sejalan dengan perubahan struktur organisasi BTPN yang terjadi sejak tahun 2019, saat merger dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI).

Khusus untuk bisnis perbankan syariah, pelaksanaannya tetap dijalankan oleh anak perusahaan, PT Bank BTPN Syariah. Dengan demikian, laporan kinerja bisnis per segmen usaha yang disajikan merupakan laporan konsolidasi.

Penjelasan kinerja masing-masing segmen usaha disampaikan pada uraian di bawah ini.

RETAIL BANKING

Segmen usaha Retail Banking BTPN memiliki 4 (empat) unit bisnis utama: Wealth Management Business, Retail Lending Business, Digital Banking Business (Jenius dan BTPN Wow!) dan Micro Business (melayani segmen pelaku usaha mikro dan komunitasnya). Seluruh segmen bisnis tersebut merupakan layanan lengkap Bank yang diberikan kepada nasabah untuk segmen ritel.

Pada tahun 2020, Bank seperti halnya industri perbankan menghadapi tantangan yang sama, terutama akibat pandemi COVID-19. Kondisi tersebut membuat produktivitas penjualan menurun. Kinerja operasional juga harus mengalami penyesuaian.

Tantangan lain yang dialami oleh Bank adalah adanya sejumlah portofolio yang sudah masuk kategori *mature*. Kondisi itulah yang dihadapi segmen Retail Banking.



DIGITAL BANKING – JENIUS

Jenius merupakan *platform* perbankan digital BTPN yang dapat diakses melalui aplikasi *mobile* yang diunduh ke *smartphone*. Produk ini merupakan satu di antara layanan dalam segmen usaha Retail Banking.

Melalui layanan Jenius yang memiliki fitur beragam, nasabah dapat mengelola kehidupan keuangannya secara digital, yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Jenius menawarkan pengalaman perbankan yang revolusioner bagi nasabah.

Inisiatif & Strategi

Tahun 2020 telah menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian secara keseluruhan baik domestik maupun internasional, dengan maraknya pandemi COVID-19 mulai dari awal tahun 2020 yang berdampak pada banyaknya bisnis yang runtuh, pemutusan hubungan kerja dan kehilangan pekerjaan dan keterbatasan mobilitas. Dengan diberlakukannya

perintah jarak sosial, masyarakat Indonesia dituntut untuk berpindah ke dunia digital untuk menjalankan bisnis, bekerja, sekolah serta memenuhi kebutuhan finansial. Selama masa pandemi ini, Jenius terus mendukung nasabah dengan memberikan solusi digital baru dan terus mengembangkan fitur yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan yang relevan di masa pandemi, seiring dengan berkembangnya kebutuhan akan akses layanan perbankan digital.

Sepanjang tahun 2020, Jenius telah meluncurkan sejumlah produk baru untuk mendukung kebutuhan nasabah di tengah musibah pandemi COVID-19. Produk tersebut adalah:

1. Jenius QR (mengikuti standar QRIS yang diterbitkan Bank Indonesia)
Fitur pembayaran digital yang dapat digunakan oleh nasabah secara *contactless* atau nir sentuh, sebagai dukungan bagi inisiatif pemerintah dalam memperluas “*Cashless Society*” atau masyarakat yang melakukan pembayaran nontunai.

2. Moneytory
Fitur *Personal Financial Management* (PFM) yang membantu nasabah mencatat dan mengelola keuangan pribadi, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Melalui layanan tersebut, nasabah dapat memantau pengeluaran dan pendapatan dengan lebih baik serta dapat melakukan kategorisasi yang lebih tepat dalam menganalisa kebutuhan finansialnya.
3. *Top up* uang Elektronik
Top up uang elektronik dan *update* saldo Tapcash, bekerja sama dengan BNI. Fitur ini membuat nasabah dapat melakukan *top up* dan *update* saldo uang elektronik Tapcash melalui aplikasi Jenius dari telepon seluler tanpa harus ke kantor cabang atau ATM. Fitur ini tersedia bagi pengguna telepon seluler berbasis android dengan fitur NFC.
4. Jenius Bisnis *Account*
Rekening bank untuk keperluan bisnis yang dapat membantu mereka dalam mengelola rekening pribadi dan bisnis secara terpisah dan efisien melalui satu aplikasi.
5. Jenius Bisniskit
Aplikasi untuk usaha kecil atau pebisnis dalam mengelola kegiatan operasional, seperti penjualan, pengeluaran, inventarisasi, pembayaran dan piutang yang langsung terkoneksi dengan rekening “Jenius Bisnis” nasabah.

Pada tahun 2020, fokus strategi bisnis yang dijalankan oleh Jenius, pertama adalah melanjutkan pengembangan fitur inovatif yang relevan sebagai solusi finansial bagi nasabah khususnya di masa pandemi. Kedua, meningkatkan akuisisi nasabah secara daring dengan dukungan fitur Video Call KYC. Ketiga, memperluas ekosistem pembayaran digital Jenius melalui kolaborasi dengan para pelaku bisnis utama, baik di *online* maupun *offline*. Keempat, meningkatkan transaksi dan keterikatan nasabah terhadap Jenius dalam mendukung aktivitas *Life Finance* nasabah sehari hari.

Tentu tak mudah merealisasikan fokus tersebut, mengingat tahun 2020 ada tantangan yang sangat besar, yaitu pandemi COVID-19. Dalam kondisi seperti itu, Jenius hadir memberikan solusi digital bagi nasabah dan terus menyempurnakan layanan yang sudah ada. Beberapa strategi pengembangan yang direalisasikan, misalnya:

1. Pengembangan layanan digital untuk membantu nasabah beradaptasi dengan situasi pandemi, antara lain dengan:
 - a. Penyempurnaan fitur *video call* KYC *Know Your Customer* (KYC) untuk memfasilitasi pembukaan rekening secara digital bagi nasabah selama pandemi, terutama ketika banyak gerai fisik Jenius yang terpaksa tutup selama periode pembatasan sosial berskala besar yang berdampak pada pembatasan aktivitas nasabah di luar rumah.
 - b. Perluasan kemitraan Jenius Pay dengan *e-commerce* besar seperti Blibli, Tokopedia, dan JD.ID dan lainnya untuk memfasilitasi perubahan perilaku nasabah dari transaksi *offline* menjadi *online* selama pandemi.
2. Penerapan kriteria risiko yang lebih ketat untuk mencegah kegagalan pembayaran pinjaman.

Terkait dengan Flexicash, sejak Maret 2020 Bank telah menerapkan *risk appetite* lebih ketat untuk mencegah gagal bayar pinjaman akibat COVID-19. Belajar dari implementasi kebijakan baru ini selama Maret-Oktober 2020, kebijakan tersebut secara bertahap dilonggarkan per Oktober 2020. Kebijakan penerapan *risk appetite* yang lebih ketat, termasuk:

1. Mengurangi batas pinjaman nasabah.
2. Memblokir akses penggunaan Flexicash untuk tipe nasabah tertentu.
3. Menghentikan akuisisi nasabah baru untuk Flexicash.



Rencana Strategis Tahun 2021

- Terus mengembangkan fitur inovatif melalui konsep *co-creation* dan kolaborasi, menyediakan rangkaian produk dan layanan keuangan yang lebih luas, seperti Kartu Kredit, Asuransi, dan Investasi
- Memperkenalkan Jenius UI/UX yang baru untuk memberikan tampilan yang lebih segar, pengalaman yang lebih mudah dan untuk mendukung penambahan fitur-fitur baru
- Meningkatkan kinerja, keandalan, dan stabilitas aplikasi untuk beradaptasi dan mendukung semakin banyak pengguna dan fitur sambil menjaga tingkat keamanan yang tinggi
- Terus memperluas kehadiran Jenius di ekosistem keuangan digital baik domestik maupun internasional, bekerja sama dengan pemain utama melalui *Open Application Programming Interfaces (API)*.
- Meningkatkan *engagement* dan *active rate* nasabah untuk mendorong loyalitas dengan memanfaatkan personalisasi yang digerakkan oleh *Artificial Intelligent (AI)* ditambah dengan otomatisasi pemasaran untuk penawaran yang lebih berwawasan dengan metode pengiriman yang tepat/paling efektif pada waktu yang tepat
- Meningkatkan *branding* Jenius
- Menjelajahi pendekatan kemitraan untuk akuisisi Flexicash untuk mendapatkan portofolio yang lebih baik.

Pencapaian Kinerja

Di tengah tantangan kondisi eksternal tahun 2020 yang tidak ringan, kinerja Jenius dibandingkan dengan tahun sebelumnya masih terkelola dengan baik. Jumlah nasabah meningkat 27% dibandingkan tahun 2019.

Jenius secara berkesinambungan mengembangkan fitur inovatif melalui konsep *kokreasi* dan kolaborasi bersama, menyediakan rangkaian produk dan layanan keuangan yang lebih luas untuk mendukung dan memberikan solusi *digital Life Finance* yang semakin relevan bagi penggunaannya. Seiring terus menerus meningkatkan kinerja, keandalan dan stabilitas aplikasi untuk beradaptasi dan mendukung semakin banyaknya pengguna dan fitur yang ada dan memberikan tingkat keamanan yang tinggi.

Kinerja Jenius Tahun 2020

Uraian	Satuan	2020	2019
Nasabah	Unit	3.056.319	2.407.977
Pendanaan	Rp Juta	13.281.099	6.634.884

Sedangkan untuk Flexicash, sejak diberlakukannya kebijakan pengetatan penyaluran kredit sebagai imbas dari pandemi COVID-19, kinerja Flexicash mengalami penurunan 19,2%. Kendati demikian, kualitas portofolio Flexicash masih terjaga dengan sangat baik.

Kualitas Kredit

Selain itu, kualitas penyaluran dana Flexicash pada tahun 2020 juga sangat baik. Tingkat kredit bermasalahnya (*Non Performing Loan – NPL*) hanya 1,7% dan tingkat pengembalian (*repayment rate*) mencapai 95,6%. Pencapaian yang baik ini disebabkan oleh penerapan "*Risk Acceptance Criteria*", kolektibilitas yang pro aktif dan program relaksasi kredit terkait dengan COVID-19.



DIGITAL BANKING - BTPN WOW!

BTPN Wow! merupakan unit layanan perbankan pada segmen Retail Banking yang memanfaatkan teknologi telepon genggam. Layanan ini didukung oleh Agen Laku Pandai yang berperan sebagai perpanjangan tangan Bank, yakni agen BTPN Wow!

Layanan BTPN Wow merupakan kontribusi Bank untuk membuka akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani industri perbankan. Pada tahun 2020, Bank fokus pada penguatan kapasitas agen dalam memberikan layanan kepada nasabah agar produktivitasnya meningkat, sehingga pendapatannya pun bertambah.

BTPN Wow! juga terus mengembangkan produk dan fitur layanan yang relevan untuk mendukung kemudahan transaksi para nasabah. Di antaranya, terkait dengan paket data seluler, *e-voucher* telepon seluler dengan denominasi kecil, *top up* dompet elektronik termasuk Go Pay dan OVO serta lainnya. Melalui pengembangan dan inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan transaksi agen dan nasabah, sehingga menumbuhkan *fee based income*.

BTPN Wow! menjalin hubungan dengan mitra yang memiliki banyak gerai untuk mendukung pengelolaan likuiditas agen untuk kebutuhan pengelolaan kas mereka sehari-hari. Bank juga telah meluncurkan *cash in* dan *cash out* bersama perusahaan ritel terbesar di Indonesia, Alfamart dan Indomaret pada April 2020 untuk mendukung kebutuhan agen. Melalui layanan tersebut, nasabah dapat melakukan transaksi *cash in* dan *cash out* pada lebih dari 35 ribu jaringan ritel tersebut di seluruh Indonesia.

Pengelolaan biaya juga menjadi fokus BTPN Wow! Sejumlah inisiatif baru, seperti manajemen dan peningkatan produktivitas penjualan, penurunan biaya produksi, membuat *fee based income* terus meningkat.

Bank juga berencana untuk mengubah saluran USSD dalam waktu dekat. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pola hubungan (*engagement*) agen BTPN Wow! dengan nasabah, Bank telah menyiapkan aplikasi BTPN Wow! yang memberikan peningkatan keramahan pengguna serta antarmuka (*interface*) aplikasi lebih baik.

Untuk tahun buku 2021, bisnis BTPN Wow! akan tetap fokus pada *liquidity management*, *fee based income* serta mengenalkan aplikasi BTPN Wow! sebagai pengganti saluran berbasis USSD yang digunakan saat ini. Aplikasi berbasis *smartphone* ini diharapkan mampu meningkatkan pengalaman serta lebih ramah pengguna. Melalui aplikasi tersebut, nasabah dapat memanfaatkan beragam fungsi yang dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari dalam transaksi keuangan.

Bank juga akan memperbarui manajemen penjualan untuk meningkatkan produktivitas agen BTPN Wow! Dalam pembaruan manajemen tersebut, model insentif dalam penjualan akan diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan bisnis.

Peningkatan jumlah transaksi melalui BTPN Wow! agen dan nasabah menjadi fokus penting dalam meningkatkan transaksi baik bagi agen maupun bisnis BTPN Wow! sehingga dapat meningkatkan pendapatan baik bagi agen maupun BTPN.

Inisiatif & Strategi

Fokus kepada agen BTPN Wow! di pulau Jawa menjadi strategi dalam melakukan efisiensi biaya serta meningkatkan aktivitas layanan kepada agen dan nasabah. Pengembangan kerjasama antara agen dan nasabah juga akan di titik beratkan secara komunitas sehingga layanan yang diberikan oleh agen dapat menjaring nasabah yang ada disekitar agen dalam memenuhi kebutuhan akan produk dan servis demi mendukung transaksi sehari-hari.

Rencana Strategis Tahun 2021

Peluncuran aplikasi BTPN Wow! menjadi rencana strategis di tahun 2021 untuk lebih meningkatkan layanan yg lebih "*user friendly*" kepada nasabah dalam melakukan transaksi. Peluncuran ini sekaligus mengantisipasi perkembangan digital yang terjadi di masyarakat laku pandai dimana kepemilikan *smartphone* terus meningkat terutama dalam mendukung transaksi digital yang ada saat ini.



Pencapaian Kinerja

BTPN Wow! Lending memiliki 2 (dua) produk yang berbeda. Pertama *Student Loan*, yaitu produk pinjaman yang bekerja sama dengan perusahaan teknologi keuangan (Fintech), PT Pinduit Teknologi (Pintek). Pinjaman ditawarkan kepada nasabah Pintek untuk tujuan pendidikan.

Pada tahun 2020, pinjaman yang telah dicairkan mencapai Rp10,6 miliar.

Produk pinjaman kedua adalah *Supply Chain Loan* (SCL). Produk ini menyasar segmen ritel, bekerja sama dengan para distributor dalam penjualan *voucher* telepon seluler (paket dana dan internet) serta peritel barang konsumsi atau *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG).

Pada tahun 2020, pencairan pinjaman untuk SCL mencapai Rp8,5 miliar. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang Rp4,6 miliar, terjadi peningkatan 84,8%. Pinjaman tersebut berjangka mingguan sebagai modal kerja untuk para nasabah peritel terpilih.

Memasuki masa pandemi COVID-19 hingga akhir tahun 2020, kedua produk pinjaman di atas saat ini pencairannya di tangguhkan akibat indikasi kualitas portofolio yang menurun. Keputusan ini dilakukan sekaligus untuk melakukan *review* terhadap proses yang terjadi serta diperlukannya adaptasi atas beberapa proses terkait kondisi pandemi yang terjadi. Kedua produk ini, hingga waktu yang akan ditentukan kemudian, tidak lagi ditawarkan kepada nasabah di tahun 2021.

Dari sisi jumlah nasabah BTPN Wow!, hingga akhir tahun buku totalnya mencapai 4,8 juta. Jumlah tersebut tumbuh 1,4% dibandingkan tahun 2019 yang sebanyak 4,7 juta nasabah. Sedangkan total agen menjadi 167 ribu yang tersebar di banyak kota di Indonesia.

Terkait dengan transaksi, jumlah liabilitas pihak ketiga mencapai Rp140 miliar. Sementara *fee based income* sebesar Rp9,4 miliar.

Kinerja BTPN Wow! Tahun 2020

Uraian	Satuan	2020	2019	2018
Jumlah Nasabah	unit	4.813.637	4.745.054	4.016.482
Jumlah Agen	unit	167.633	194.943	155.741
Fee-Based Income	Rp miliar	9,44	3,62	6,84
NPL	%	n/a	0,05%	n/a

RETAIL LENDING BUSINESS

Pada tahun buku tersebut, segmen Retail Lending Business ("RLB") fokus pada pemberian kredit pensiun dan pra pensiun. Terkait dengan fokus tersebut, Bank mendorong pertumbuhan kredit pensiun kepada pensiunan dari Taspen, Asabri dan Dana Pensiun Lainnya serta dari anggota TNI/Polri yang akan memasuki masa pensiun.

RLB merupakan unit bisnis dalam segmen Retail Banking yang menyediakan layanan jasa perbankan bagi para pensiunan, seperti pembayaran manfaat

pensiun melalui produk tabungan. Sedangkan untuk pinjaman, tidak terbatas pada pensiunan tetapi juga untuk karyawan yang masih aktif, dengan tenor sesuai kebutuhan.

Sejumlah program strategis yang telah dijalankan sepanjang tahun 2020 adalah:

1. Ekspansi bisnis kredit BTPN secara nasional dengan menawarkan fitur produk kredit yang lebih kompetitif bekerja sama dengan perusahaan swasta.
2. Fokus dalam melakukan akuisisi nasabah dari Taspen, Asabri, TNI/Polri dan Dana Pensiun yang dimiliki oleh BUMN.

3. Melakukan digitalisasi proses kredit untuk memudahkan dan mempercepat proses pengajuan hingga pencairan kredit yang dapat dilakukan di rumah nasabah.
4. Menggunakan *telemarketing* untuk meningkatkan produktivitas penjualan kredit.
5. Mengembangkan jaringan *payment point* bekerja sama dengan PT Pos Indonesia yang meningkatkan level layanan kepada nasabah BTPN penerima pensiun. Pemberian fasilitas kartu ATM berbasis chip dan penerbitan kartu ATM dengan desain khusus

Pada tahun buku 2020, seiring dengan pandemi COVID-19 yang menjadi tantangan berat industri perbankan termasuk Bank BTPN, kinerja pinjaman juga mengalami perlambatan. Tidak hanya dari sisi volume, tetapi juga jumlah akun atau rekening. Penyebab lainnya adalah produk yang telah memasuki kategori *mature*.

Inisiatif dan Strategi

Sejalan dengan tantangan yang dihadapi oleh Bank, terutama terkait pandemi COVID-19, inisiatif dan strategi yang direalisasikan mengalami penyesuaian. Tujuannya adalah menjaga produktivitas penjualan tetap stabil. Untuk menangani hal tersebut, sejumlah strategi yang direalisasikan antara lain:

- Mengembangkan proses kredit dengan meminimalisir pertemuan tatap muka dengan nasabah.
- Menyediakan *web based monitoring tools* bagi supervisor untuk memudahkan proses pemantauan aktivitas penjualan tim.

Rencana Strategis Tahun 2021

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja segmen usaha RLB, Bank telah menyiapkan sejumlah rencana strategis yang akan dijalankan. Beberapa di antaranya adalah:

- Memperluas model akuisisi, dan bentuk kerja sama dengan pihak ketiga.
- Tetap fokus kepada pensiunan Taspen, Asabri dan Dana Pensiun Lainnya
- Melakukan pengembangan produk pinjaman, baik untuk tujuan konsumtif maupun produktif dan tabungan untuk meningkatkan layanan terhadap nasabah, termasuk pula melakukan sinergi dengan segmen korporasi dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah korporasi
- Menstabilisasikan proses kredit yang baru
- Melakukan efisiensi dari sisi biaya operasional dan proses kredit.

Pencapaian Kinerja

Pada akhir 2020, total portofolio kredit yang dikelola Retail Lending Business mencapai Rp32,1 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp35,6 triliun, turun 9,8%. Hal ini disebabkan oleh semakin ketatnya persaingan di bisnis pensiun, berdampak kepada menurunnya jumlah akuisisi nasabah baru, yang mengakibatkan portofolio kredit pensiun diproyeksikan mengalami penurunan.

Dari sisi kualitas pinjaman, tingkat kredit bermasalah untuk kredit pensiun termasuk dalam kategori rendah yaitu sebesar 0,72%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,73%. Hal itu karena sumber pembayaran berupa uang pensiun direalisasikan melalui Bank BTPN setiap bulan. Untuk debitur yang uang pensiunannya dibayarkan melalui PT Pos Indonesia, selama ini Bank telah menjalin kerja sama pemotongan angsuran dengan PT Pos Indonesia dan dana angsuran tersebut dikirimkan ke Bank setiap bulan.

WEALTH MANAGEMENT BUSINESS

Wealth Management Business (“WMB”) merupakan salah satu unit bisnis dalam segmen *Retail Banking*. Unit ini disediakan untuk melayani nasabah individu segment *affluent*. Karena itu, produk simpanan dan investasi Bank disediakan melalui 59 kantor cabang yang tersebar di 34 kota serta dapat diakses juga melalui *platform digital* (Jenius) yang memberikan keleluasaan nasabah dalam bertransaksi kapan saja dan di mana saja.

Dengan mengusung konsep *digitalizing your priority*, ditahun 2020 WMB meluncurkan layanan Sinaya Prioritas dimana selain Nasabah mendapatkan layanan secara personal melalui Relationship Manager, layanan prioritas juga dapat dinikmati secara digital.

WMB akan fokus pada pengembangan produk investasi dan layanan dengan terus mengembangkan aplikasi digital sehingga dapat memberikan solusi *wealth management* yang terintegrasi.



Inisiatif dan Strategi 2020

Sepanjang tahun 2020, sejalan dengan rencana bisnis bank, unit WMB telah merealisasikan sejumlah inisiatif yaitu:

- Peluncuran Layanan Nasabah Prima/Sinaya Prioritas
- Pengembangan produk simpanan dan investasi (*Wealth Management*) yang meliputi:
 - Produk tabungan valas dalam 4 (empat) mata uang, yaitu EUR, GBP, HKD, AUD;
 - Produk *Bancassurance*: Guardia Signature dan Guardia Pasti;
 - Produk reksa dana terproteksi, yaitu Mandiri seri 206 dan 224.
- Pengembangan *platform* digital untuk Layanan Nasabah Prima, dengan menggunakan aplikasi Jenius.
- Mengkaji strategi jaringan distribusi seluruh cabang BTPN (termasuk cabang Sinaya) dengan merelokasi 2 (dua) kantor cabang pembantu di Surabaya dan menutup 5 (lima) kantor cabang pembantu (KCP Gajah Mada Jakarta, KCP Wisma Kalla Makassar, KCP Roxy Jakarta, KCP Banda Aceh, KCP Tomang Jakarta).
Dengan demikian, saat ini terdapat 59 kantor cabang yang menyediakan layanan Sinaya Prioritas
- Bank juga melakukan perubahan sistem kerja sama dengan BTPN Syariah menjadi sistem referral. Melalui sistem baru tersebut, jika ada nasabah/calon nasabah yang tertarik dengan produk syariah, maka petugas bank di cabang Layanan Syariah Bank (LSB) akan memberikan referensi ke petugas BTPN Syariah.

Pencapaian Kinerja

Dari sisi operasional, dalam pengembangan BTPN Sinaya, Jenius menjadi produk simpanan utama yang dipasarkan. Hasilnya, menunjukkan pertumbuhan jumlah rekening sebesar 334,9% menjadi 56.580 rekening dan pertumbuhan dana sebesar 397,5% dengan total dana menjadi Rp3,4 triliun.

Selain itu hingga akhir tahun buku, jumlah nasabah Sinaya Prioritas mencapai 9.216 nasabah.

Pada tahun 2020, BTPN Sinaya berhasil membukukan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp27,2 triliun, meningkat 3,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan fokus dalam pengembangan produk investasi, DPK tersebut mengalami pergeseran dari produk simpanan bank ke produk investasi. Dana produk simpanan bank turun 3,1% atau senilai Rp683 miliar, Rp20,9 triliun dan dana produk investasi naik 32,4% atau Rp1,5 triliun, menjadi Rp6,3 triliun.

Rencana Strategis tahun 2021

- Pengembangan lanjutan layanan digital untuk Nasabah Prima meliputi dan tidak terbatas pada:
 - Pengembangan fitur dalam aplikasi Jenius berupa fitur informasi dan transaksi produk investasi di dalam aplikasi Jenius.
 - Pengembangan aplikasi untuk digunakan oleh staff yang berfungsi sebagai sebagai alat bantu dalam proses penjualan dan peningkatan kualitas layanan.
 - Pengembangan aplikasi sebagai media pemberian apresiasi kepada nasabah secara digital untuk meningkatkan loyalitas nasabah.
- Pengembangan produk *Wealth Management*, termasuk namun tidak terbatas pada penambahan reksa dana manajer investasi dan produk reksadana, penambahan produk *bancassurance*, obligasi pemerintah pasar sekunder, dan menjadi mitra distribusi penawaran perdana surat berharga negara untuk investor ritel.
- Mengkaji strategi jaringan distribusi seluruh cabang BTPN Sinaya dan ATM termasuk namun tidak terbatas pada penambahan cabang.

Kinerja Produk

	Unit	2020	2019
Jumlah Nasabah	Item	120.973	92.695
Total Dana Pihak Ketiga	Rp billion	27.175	26.311
Dana Produk Simpanan	Rp billion	20.856	21.538
Dana Produk Investasi	Rp billion	6.319	4.772

Jumlah nasabah bertumbuh diikuti dengan pertumbuhan dana pihak ketiga terutama pada produk investasi

Indikator Kinerja WMB tahun 2020

	Unit	2020	2019
Biaya Bunga	%	5,38%	6,84%
Pendapatan Bunga Bersih	Rp billion	124	148
Pendapatan lainnya	Rp billion	116	119
Biaya Operasional	Rp billion	(227)	(234)

Penyesuaian suku bunga tabungan yang diselarakan dengan penurunan suku bunga dari regulator, dilakukan untuk mendapatkan penurunan biaya bunga.

Meskipun tahun 2020 terjadi kondisi pandemi, namun pendapatan bank melalui produk investasi masih dapat dipertahankan dan biaya operasional masih bisa diefisiensikan.

MICRO BUSINESS

Segmen Micro Business fokus pada pemberian kredit Usaha Mikro & Kecil. Micro Business merupakan unit bisnis dalam segmen Retail Banking yang menyediakan layanan jasa perbankan bagi para pelaku ekonomi produktif dan komunitasnya.

Sejumlah program strategis yang telah dijalankan sepanjang tahun 2020 adalah:

1. Menerapkan proses transformasi yang berjalan dengan baik dari bisnis mikro pada lokasi UMKM yang ditargetkan
2. Membangun hubungan baik dengan nasabah melalui kemitraan dan ekosistem bisnis mikro
3. Membangun saluran dan *platform* digital lengkap untuk menciptakan diferensiasi ke pasar melalui kemitraan

Pada tahun buku 2020, seiring dengan pandemi COVID-19 yang menjadi tantangan berat industri perbankan termasuk Bank BTPN, kinerja pinjaman juga mengalami perlambatan dari sisi volume dan juga jumlah nasabah. Bisnis mikro menunda pertumbuhan bisnis dan fokus kepada nasabah yang sedang membutuhkan perhatian pada masa pandemi.

Inisiatif dan Strategi

Sejalan dengan tantangan yang dihadapi oleh Bank, terutama terkait pandemi COVID-19, inisiatif dan strategi yang direalisasikan mengalami penyesuaian.

Tujuannya adalah menjaga kualitas kredit tetap baik. Untuk menangani hal tersebut, sejumlah strategi yang direalisasikan antara lain:

1. Fokus pada ekosistem melalui *platform* dan strategi bisnis rantai pasokan
2. Membangun otomatisasi dan digitalisasi untuk menciptakan diferensiasi, menangkap peluang (model yang dipimpin kemitraan) dan memungkinkan akuisisi massal skala besar
3. Memberikan program relaksasi kepada debitur-debitur yang mengalami dampak penurunan pendapatan karena dampak dari pandemi COVID-19.
4. Memberikan pelayanan yang baik kepada debitur yang tidak terdampak pandemi COVID-19, dengan melakukan komunikasi yang berkelanjutan.



Sedangkan rincian dari inisiatif dan target yang ingin dicapai, disampaikan dalam tabel di bawah ini:

Tujuan	Inisiatif
Pengelola Kinerja	1 Mengelola kualitas portofolio dengan model relaksasi bagi debitur mikro sesuai dengan program pemerintah seperti pemberian stimulus kepada nasabah mikro yang layak diberikan relaksasi
	2 Melakukan pembiayaan bagi nasabah mikro dengan sistem PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang merupakan stimulus bagi perbankan dari program pemerintah
Optimalisasi Proses dan Jangkauan	3 Melanjutkan pembiayaan pengusaha ekonomi produktif untuk sektor ekonomi seperti; perdagangan, industri, manufaktur, jasa, dan agribisnis
	4 Menerapkan model bisnis mikro dengan mengedepankan proses bisnis yang baik dan menjaga kualitas portofolio
	5 Menerapkan model bisnis mikro dengan pembiayaan kredit mikro digital
Optimalisasi Daya	6 Menyediakan program Daya BTPN untuk mengembangkan bisnis nasabah mikro
	7 Program webinar untuk pelanggan bisnis mikro dengan narasumber yang kompeten
Penguatan Kapabilitas dan Efektivitas Organisasi melalui Penyesuaian dengan Perubahan Pasar	8 Menerapkan model pembiayaan baru bagi nasabah mikro dengan model digital (pinjaman tanpa agunan)
	9 Peningkatan sumber daya manusia melalui program pelatihan <i>online</i>
Memperkuat Kemitraan Strategis dengan Mitra Bisnis	10 Membangun program kerja sama dengan beberapa unit bisnis untuk pembiayaan sektor mikro

Rencana Strategis Tahun 2021

Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja segmen usaha Micro Business, melakukan sejumlah strategis:

1. Melanjutkan proses transformasi bisnis mikro.
2. Melanjutkan konsolidasi cabang, menyelaraskan model distribusi/jalur pelayanan bisnis mikro dan menyesuaikan dengan model distribusi yang ada saat ini.
3. Melanjutkan strategi terkait sumber daya manusia, kesempatan pindah ke bisnis yang lain dan berbagi sumber daya untuk unit pendukung guna mengelola efektivitas organisasi bisnis mikro.
4. Melanjutkan proses *roll-out* model baru bisnis mikro melalui Pinjaman dengan jaminan
5. Mengembangkan model digital untuk bisnis mikro (pinjaman tanpa agunan).
6. Mengelola model bisnis KUR dengan model kemitraan dan Avalis

Pencapaian Kinerja

Segmen usaha Mikro merupakan salah satu segmen usaha yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19. Bank BTPN bekerja sama dengan nasabah yang terdampak, serta mendukung kelangsungan usaha mereka dengan melakukan relaksasi kredit menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bisnis Mikro secara intensif melakukan proses restrukturisasi.

Sejalan dengan proyeksi anggaran dan strategi untuk tahun 2020 di mana bisnis Mikro sedang melakukan proses transformasi bisnis, terutama dalam hal melihat peluang bisnis mikro yang baru dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan pola pengusaha mikro dalam menjalankan bisnisnya, maka pinjaman Mikro diproyeksikan menurun. Pada akhir Desember 2020, saldo kredit tercatat sebesar Rp905 miliar, mengalami penurunan 43,8% yoy.

Kualitas kredit Mikro yang tercermin dari menurunnya rasio NPL menjadi 1,76% dari 2,82% pada tahun sebelumnya. Penurunan lebih disebabkan oleh restrukturisasi kredit nasabah yang terdampak COVID-19.

BUSINESS BANKING

Unit Business Banking Bank BTPN memiliki dua segmen bisnis, yaitu BTPN Mitra Bisnis (SME) dan Consumer Finance. Kedua segmen tersebut memberikan layanan yang lengkap, dari kredit hingga layanan perbankan lain dan pelatihan.

Kebutuhan utama dari bisnis Mitra Bisnis adalah ketepatan waktu dan ketersediaan modal kerja setiap saat dalam menjalankan perputaran usahanya, kebutuhan akan akses ke pasar, kebutuhan akan hubungan berkelanjutan dan jangka panjang dengan supplier serta kebutuhan akan peningkatan kompetensi dan informasi bisnis

Pengembangan bisnis Consumer Finance dilakukan melalui pembiayaan kepada *end-user*, perusahaan atau lembaga pembiayaan, baik melalui skema pembiayaan langsung maupun tidak langsung. Bisnis Consumer Finance juga berupaya meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan perusahaan afiliasi dalam rangka memperluas jaringan nasabah.

Inisiatif dan Strategi

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan dimana kondisi perekonomian yang dilanda pandemi COVID-19 antara lain menyebabkan penurunan pembiayaan yang disalurkan, baik untuk Mitra Bisnis maupun Consumer Finance masing-masing sebesar 10,7% dan 60,8% dibandingkan akhir tahun 2019.

Sejumlah inisiatif dan strategi yang dikembangkan sepanjang tahun buku guna meningkatkan kinerja segmen Business Banking, antara lain:

1. Kolaborasi internal melalui skema *supply chain*.
2. Bekerja sama melalui *cross-selling* dengan Jenius untuk pendanaan dan akun *payroll*.
3. Layanan transaksi melalui *platform* digital "AksesBisnis@BTPN".
4. Optimalisasi proses restrukturisasi kredit pada debitur terdampak COVID-19.
5. Pengembangan aplikasi guna meningkatkan kualitas serta kecepatan layanan pada nasabah.

Rencana Strategis Tahun 2021

- Fokus untuk secara proaktif mengelola restrukturisasi kredit dan nasabah yang terdampak pandemi.
- Mengadopsi *risk appetite* yang lebih konservatif dalam penyaluran kredit yang tumbuh secara bertahap.
- Mitra Bisnis akan berfokus pada nasabah yang sudah ada saat ini dan juga memperoleh nasabah baru melalui jangkar *Supply Chain* korporasi dalam sinergi dengan segmen Korporasi.

- Mengembangkan SME Digital dengan target segmen SME yang lebih rendah dan segmen yang lebih *digital savvy*.
- Melanjutkan pengembangan bisnis Consumer Finance melalui pembiayaan kepada pengguna akhir, perusahaan *multifinance* dan perusahaan *fintech*.

Pencapaian Kinerja

Kinerja segmen usaha Business Banking diuraikan berdasarkan lini bisnis: Mitra Bisnis dan Consumer Finance yang rinciannya adalah sebagai berikut:

Mitra Bisnis

Hingga akhir tahun 2020, total rekening nasabah yang dilayani oleh BTPN Mitra Bisnis mencapai lebih dari 2.800 nasabah. Jumlah tersebut sedikit menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 3.100 nasabah.

Dari jumlah nasabah tersebut, pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp11,5 triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan 10,7% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp12,8 triliun.

Consumer Finance

Penyaluran kredit kepada *end-user*, perusahaan atau lembaga pembiayaan baik melalui skema pembiayaan langsung dan pembiayaan tidak langsung hingga akhir tahun 2020 mencapai Rp2,2 triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp5,6 triliun. Dalam penyaluran kredit BTPN berpedoman pada asas-asas pemberian kredit yang sehat dan prinsip kehati-hatian.

Kualitas Kredit

Dari sisi kualitas, karena dampak pandemik, tingkat kredit bermasalah (*Non Performing Loan – NPL*) Business Banking tercatat sebesar 4,70%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

CORPORATE BANKING

Segmen usaha Corporate Banking Bank BTPN memiliki dua segmen bisnis, yaitu segmen korporasi Jepang dan segmen korporasi Non Jepang (Wholesale Banking).

Segmen Corporate Banking melayani nasabah perusahaan Jepang, perusahaan Indonesia di segmen Tier 1, Tier 2, Commercial Banking dan Perusahaan Multinasional (*Multinational Corporation/MNC*).



Secara umum, layanan yang diberikan berupa pembiayaan baik secara bilateral, terstruktur maupun *trade finance*, penghimpunan dana, serta pengelolaan kas. Di bidang pembiayaan, Bank BTPN tidak terbatas pada pembiayaan modal kerja untuk jangka pendek, tetapi juga pembiayaan investasi yang berjangka menengah dan panjang baik dalam denominasi rupiah maupun valuta asing. Selain itu, termasuk pembiayaan untuk Lembaga Kredit Ekspor (*Export Credit Agency/ ECA*) yang telah terakreditasi.

Di bidang penghimpunan dana korporasi, Bank BTPN menyediakan layanan *Corporate Account* dalam bentuk Rekening Giro. Layanan Rekening Giro ini dapat diakses melalui teknologi digital, sehingga tidak membatasi ruang dan waktu nasabah.

Untuk memudahkan transaksi, Bank BTPN menyediakan rekening dengan 12 mata uang. Sedangkan bagi keperluan penarikan dana, ada empat jenis mata uang yang disediakan, yaitu Rupiah, Dolar Amerika Serikat, Yen Jepang dan Euro.

Bank BTPN juga melayani keperluan remitansi, mengingat Bank merupakan anggota kliring nasional dan anggota sistem SWIFT dengan beragam jaringan mitra bank koresponden di dalam dan luar negeri. Aktivitas terkait remitansi dapat dilakukan melalui *internet banking* maupun manual. Fasilitas lain yang disediakan oleh Corporate Banking adalah pembiayaan *trade finance* (termasuk ekspor dan impor) dan pembayaran pajak. Dukungan terhadap kinerja operasional nasabah juga diberikan melalui pengelolaan kas atau *cash management*.

Inisiatif dan Strategi

Sepanjang tahun 2020, tantangan yang dihadapi oleh segmen usaha Corporate Banking adalah risiko penurunan volume transaksi nasabah sebagai dampak global dari pandemi COVID-19. Dampak yang dirasakan tidak hanya terjadi pada sisi pertumbuhan pinjaman namun juga kualitas portofolio kredit. Dari sisi pertumbuhan pinjaman, secara umum kebutuhan modal kerja dan investasi segmen korporasi mengalami penurunan seiring perlambatan ekonomi.

Dalam kondisi tren suku bunga acuan yang menurun, Corporate Banking secara relatif dapat mempertahankan *Net Interest Margin*. Hal ini turut berkontribusi terhadap pencapaian pendapatan bunga sebesar 102,8% terhadap target 2020

Dalam kondisi demikian, Corporate Banking meningkatkan fokus pada nasabah korporasi besar yang merupakan pemain terdepan pada beberapa sektor. Misalnya otomotif, *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG), telekomunikasi, kesehatan dan obat-obatan/farmasi, proyek ketahanan energi, ketahanan pangan dan infrastruktur, serta industri berorientasi ekspor yang sejalan dengan program pembangunan pemerintah Indonesia.

Bank juga mendorong kebijakan khusus, antara lain fokus menjaga kualitas portofolio kredit. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah dan OJK dalam kebijakan restrukturisasi dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Corporate Banking secara proaktif bekerja sama dengan debitur terdampak dalam rangka pemberian restrukturisasi/keringanan untuk membantu debitur agar dapat melalui masa sulit ini sekaligus memastikan kualitas portofolio kredit tetap terjaga.

Segmen usaha Corporate Banking juga telah merealisasikan sejumlah inisiatif dan strategi lain sebagai respons terhadap kondisi pasar. Hal itu dilakukan untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan. Di antaranya adalah:

1. Mendorong pembiayaan agar nasabah mendapatkan dukungan finansial dalam menghadapi pandemi tahun ini.
2. Memberikan layanan terpadu pada nasabah melalui kolaborasi dengan unit bisnis lain, seperti Jenius, Sinaya, dan *Supply Chain Financing* untuk memberikan layanan *end to end* kepada nasabah.
3. Menerapkan strategi pemasaran baru berbasis *online* kepada nasabah, seperti dalam bentuk *web meeting* untuk menangkap setiap kebutuhan finansial yang nasabah perlukan secara cepat dan tepat. Selain itu, menyelenggarakan seminar *online* dengan berbagai tema untuk memberikan dukungan moral kepada nasabah.
4. Meningkatkan porsi *fee-based income* dari transaksi *trade finance*, transaksi valuta asing, serta manajemen kas.
5. Menciptakan ekosistem dan konektivitas baik untuk pembiayaan *end-to-end* maupun *cash management*.
6. Memperkuat sinergi dengan lini bisnis lain, yaitu segmen Business Banking dan Retail Banking.
7. Memperluas layanan korporasi dengan mempergunakan cabang-cabang Bank BTPN yang telah ada.
8. Berkomitmen untuk terus memberikan pinjaman dengan prinsip berkelanjutan demi peningkatan kepentingan masyarakat.
9. Meningkatkan interkoneksi sistem informasi untuk mendukung layanan *cash management*.

Rencana Strategis Tahun 2021

Untuk tahun depan segmen usaha Corporate Banking telah menyiapkan sejumlah rencana strategi. Beberapa di antaranya adalah:

1. Memperkuat ekosistem dan konektivitas untuk pembiayaan *end-to-end* serta *cash management* melalui penguatan sinergi dengan unit bisnis lain. Hal itu dilakukan, antara lain melalui perluasan jaringan di lokasi strategis semacam kawasan industri agar dapat memberikan layanan komprehensif sekaligus penetrasi pasar. Misalnya, membuka cabang korporasi di area Cikarang, memperluas layanan korporasi di cabang Bandung dengan memanfaatkan jaringan kantor Bank BTPN yang sudah ada dan juga pemasangan ATM di beberapa kantor nasabah, berkolaborasi dengan unit kerja lain seperti Jenius dan Sinaya.
2. Memperkuat layanan *collection* untuk nasabah sebagai inisiatif untuk meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga.
3. Meningkatkan transaksi *fee-based* di antaranya melalui transaksi *Trade, Supply Chain Financing, Structured Finance (Project Finance, Sindikasi dan ECA)*, dan produk derivatif.
4. Meningkatkan pemberian pinjaman dengan prinsip berkelanjutan demi peningkatan kepentingan masyarakat.
5. Dari sisi penyaluran kredit, Corporate Banking akan fokus pada industri-industri yang tetap bertahan dalam masa pandemi COVID-19 dan industri-industri yang berpotensi bertumbuh lebih cepat seiring dengan program prioritas pemerintah, di antaranya: efek positif dari *Omnibus Law*, program hilirisasi mineral, ketahanan energi, ketahanan pangan, dan infrastruktur.

Pencapaian Kinerja

Kondisi ekonomi nasional yang lesu akibat pandemi COVID-19, seperti sempat terhentinya operasional pabrik otomotif yang ikut mempengaruhi rantai suplai, berpengaruh terhadap kinerja volume transaksi nasabah. Begitu juga pada industri-industri lain. Kendati demikian, kinerja segmen Corporate Banking sepanjang tahun buku 2020 masih tetap terjaga.

Bahkan hingga akhir tahun buku, segmen Korporasi BTPN bersama dengan SMBC dipercaya menjadi *Mandated Lead Arranger and Bookrunner (MLAB)/ Mandated Lead Arranger (MLA)* pada 13 kesepakatan sindikasi. Hal ini membuat Bank terus masuk dalam peringkat “Top 3” *Indonesian Mandated Lead Arranger and Bookrunner (MLAB)*.

Di tahun 2020 segmen korporasi fokus untuk meningkatkan kredit korporasi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian, serta menjaga pengeluaran atas biaya operasional.

Mengacu pada revisi RBB 2020, per 31 Desember 2020, pencapaian kredit korporasi adalah 83,3% dari target. Di tengah kondisi pandemi, penentuan target market yang tepat dengan pemberian pinjaman yang fokus pada beberapa *industry leaders* di sektor sektor strategis diiringi dengan manajemen portofolio kredit yang proaktif merupakan dua kunci utama keberhasilan. Adapun sektor-sektor yang menjadi fokus BTPN diantaranya adalah FMCG, telekomunikasi, kesehatan dan obat-obatan/*pharmaceutical*, otomotif, proyek ketahanan energi, ketahanan pangan dan infrastruktur, dan industri berorientasi ekspor.

Kinerja Produk Corporate Banking tahun 2020

Pinjaman

Untuk kinerja pinjaman, hingga akhir tahun buku 2020 berhasil disalurkan sebesar Rp78,6 triliun, tumbuh 3,9% dibandingkan tahun 2019 yang Rp75,7 triliun. Bisnis penyaluran pinjaman Corporate Banking memiliki porsi 57,7% dari total kredit Bank BTPN.

Dari sisi kualitas, Corporate Banking berhasil menjaga tingkat kredit bermasalah (*Non Performing Loan – NPL*) yang rendah di posisi 0,73%, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, NPL tersebut masih relatif rendah dibandingkan NPL industri perbankan yang tercatat sebesar 3,1%.

Hingga akhir tahun 2020, saldo pinjaman Corporate Banking Japanese meningkat 4,3% sedangkan saldo rata-rata pinjaman meningkat sebesar 15,5% dibandingkan tahun 2019. Pertumbuhan ini disebabkan adanya kenaikan signifikan pada penyaluran pinjaman dalam mata uang rupiah yang mencapai 42%, sebagai dampak meningkatnya kebutuhan nasabah dalam menghadapi COVID-19 di dalam negeri.



Trade Finance

Produk pembiayaan perdagangan (*trade finance*) BTPN semakin lengkap dengan adanya perpaduan antara *trade finance* dengan *global connectivity* yang diperlukan untuk transaksi ekspor dan impor dan *local value-chain financing* yang dibutuhkan nasabah korporasi. Bank memberikan dukungan fasilitas kepada pemasok dan distributor. Hal ini bisa dimungkinkan dengan adanya sinergi dengan lini bisnis Business Banking di BTPN.

Hingga akhir tahun 2020, aset *trade finance* mencapai Rp14,3 triliun, tumbuh 47,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp9,7 triliun.

Cash Management

BTPN sudah lama dikenal sebagai pemimpin dalam *digital banking* dengan adanya beberapa *electronic banking platform*, seperti SMAR&TS, AksesBisnis, *digital banking* Jenius dan BTPN Wow! yang saling melengkapi dan mendukung kebutuhan nasabah korporasi Bank. Hal ini akan sangat membantu nasabah korporasi dalam melakukan manajemen likuiditas yang lebih baik pada seluruh *value chain* nasabah dan memberikan *digital experience* dengan standar yang tinggi.

Hingga akhir tahun 2020, total dana pada *cash management* tumbuh 103,6%. Jika pada 2019 sebesar Rp28,8 triliun, maka pada tahun 2020 menjadi Rp58,6 triliun.

Foreign Exchange

BTPN menyediakan layanan lengkap lindung nilai yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah korporasi untuk melindungi aset, kewajiban maupun arus kas nasabah dari dampak negatif pergerakan pasar keuangan, baik suku bunga, mata uang, dan lainnya.

Hingga akhir tahun 2020, volume transaksi *Foreign Exchange* mencapai 11,9 juta. Dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 10,8 juta, tumbuh 10,3%.

TREASURY

Unit Treasury BTPN melayani kebutuhan nasabah terhadap produk Treasury, seperti produk valuta asing dan derivatif. Segmen Treasury senantiasa melakukan optimalisasi portofolio pada tingkat yang efisien dan proaktif dalam mengelola likuiditas Bank. Treasury juga berperan aktif dalam melakukan manajemen risiko dan pemenuhan rasio-rasio yang dimandatkan oleh regulator.

Pada tahun 2020, seperti halnya segmen usaha lain atau pada umumnya perbankan, pandemi COVID-19 memberikan dampak tidak menguntungkan bagi Segmen Treasury. Karena itu, kebijakan khusus yang diterapkan selama pandemi adalah *split operation* untuk menjaga kelangsungan aktivitas Treasury terpenuhi selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan.

Inisiatif dan Strategi

Di tengah pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kondisi perekonomian pada tahun 2020, tantangan terbesar yang dialami oleh Segmen Treasury adalah lemahnya pertumbuhan kredit. Karena itu, Treasury menempatkan dana di instrumen lain, seperti Surat Berharga Negara/Surat Utang Negara (SBN/SUN).

Dalam rangka menjaga tingkat likuiditas pada level yang aman, BTPN telah melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Memantau indikator-indikator likuiditas agar berada pada kondisi aman, yaitu lebih tinggi dari ketentuan yang diwajibkan. Per 31 Desember 2020 tercatat *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) sebesar 282% dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) sebesar 115%.
2. Melakukan diversifikasi sumber pendanaan dengan mengembangkan pendanaan dari sektor *wholesale*, *retail funding* dan *public sector/financial institutions*.
3. Terus mengembangkan pendanaan jangka-panjang (*long-term funding*) dengan menerbitkan obligasi rupiah dan mendapatkan fasilitas pinjaman jangka-panjang *standby* dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing dari bank lokal dan bank asing/institusi keuangan internasional.

- Mengoptimalkan *structured funding* untuk kebutuhan likuiditas.

Kecukupan kebijakan dan pengelolaan likuiditas (ALMA) BTPN relatif memadai dan selalu dilakukan pemutakhiran dengan indikator pendukung, sebagai berikut:

- Telah memiliki program *contingency plan* dalam penyediaan *back-up* likuiditas.
- Telah memiliki kebijakan yang relatif baik sesuai dengan struktur *assets & liabilities*.
- Telah memiliki penetapan dan prosedur limit kewenangan pengelolaan likuiditas.
- Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan Bank.

Rencana Strategis Tahun 2021

Untuk tahun buku 2021, Segmen Usaha *Treasury* tetap menjaga likuiditas sesuai yang diwajibkan. Selain itu, akan terus memperhatikan pertumbuhan kredit yang diperkirakan membaik. Dengan demikian, kinerja Bank pun akan meningkat.

Pencapaian Kinerja

Hingga akhir tahun 2020 penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain adalah sebesar Rp17,0 triliun, meningkat 91,8% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp8,8 triliun. Peningkatan terbesar berasal dari penempatan pada deposito berjangka dengan penambahan sebesar Rp9,3 triliun. Sementara posisi efek-efek di akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp14,8 triliun, meningkat 39,0% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp10,7 triliun.

Sedangkan transaksi *foreign exchange* dengan nasabah naik 10,3%. Sementara pendapatan dari *fee margin* menurun sekitar 9,6% dibandingkan tahun 2019.

Pada tahun 2020, hutang obligasi adalah sebesar Rp993 miliar dan pinjaman yang diterima sebesar Rp31,2 triliun.

Bank membukukan pinjaman antarbank sebesar Rp6,5 triliun. Hal ini dilakukan karena pinjaman antarbank memiliki biaya bunga yang lebih rendah sehingga efisiensi biaya bunga dapat terjadi sesuai dengan arah yang ingin dicapai oleh manajemen.

Dari sisi likuiditas, kinerja Bank cukup baik, seperti ditunjukkan melalui sejumlah indikator di bawah ini:

- Posisi rasio penyaluran pinjaman terhadap penghimpunan dana (*Loan to Deposit Ratio - LDR*) relatif moderat, yaitu mencapai 134%. Untuk pinjaman dalam mata uang USD, selain pendanaan dari Dana Pihak Ketiga, Bank mengandalkan pendanaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dari SMBC
- Indikator-indikator likuiditas, seperti *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* dan *Net Stable Funding Ratio (NSFR)* berada pada level aman: Masing-masing berada di posisi 282% untuk LCR dan NSFR sebesar 115%.
- Ketergantungan kepada depositan inti (*concentration risk*) sebagaimana terlihat dari rasio total 50 depositan utama terhadap total DPK per posisi 31 Desember 2020 mencapai 34,45%. Sejalan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga, BTPN akan terus berupaya untuk menurunkan tingkat *concentration risk* ini.
- Pendanaan relatif masih stabil walaupun mengalami sedikit penurunan, yaitu sebesar 0,2% sampai Desember 2020. Pertumbuhan DPK mencapai 15,9% dan diimbangi dengan penurunan pinjaman yang diterima sebesar 15,7%.

Uraian	Satuan	2020	2019	2018
Jumlah Nasabah	Unit	1.252	837	-
Volume Foreign Exchange	Juta USD	11.414	10.240	7.322
Volume Derivatives	Juta USD	455	524	432



PERBANKAN SYARIAH

Bisnis perbankan syariah BTPN dijalankan oleh entitas usaha tersendiri, yaitu anak usaha yang bernama PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPN Syariah). Perusahaan ini telah menjadi perusahaan publik yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2018.

Sejalan dengan visi dan misi, bisnis syariah Bank tetap fokus pada segmen *mass market* atau masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini diambil lantaran potensi pasarnya yang sangat besar, namun tidak ada bank konvensional maupun syariah yang fokus ke segmen tersebut. Bagi BTPN Syariah, hal ini merupakan peluang sekaligus panggilan.

Karena itulah, di tengah musibah COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020, BTPN Syariah tetap konsisten dan fokus dengan arah dan kebijakan yang telah dicanangkan sejak tahun 2017, yaitu untuk menciptakan “Syariah Digital Ecosystem” bagi segmen keluarga prasejahtera. Ada 4 (empat) pilar yang menjadi fokus membangun *operational excellence*, meningkatkan aset bank, mengeksplorasi *fee-based income* dan memperkuat organisasi.

BTPN Syariah juga akan terus mendukung program-program regulator ataupun pemerintah, seperti:

1. Relaksasi pembiayaan kepada nasabah yang terdampak sesuai dengan POJK No. 11/POJK.04/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
2. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
3. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah
4. Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 51 tahun 2017 mengenai Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Selain itu, bersamaan dengan Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga acuan, BTPN Syariah juga telah merespons kebijakan tersebut. BTPN Syariah melakukan penurunan secara berkala untuk indikasi *rate* Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan mengacu pada suku bunga Bank Indonesia.

Inisiatif dan Strategi

Pandemi COVID-19 banyak Negara yang menyesuaikan kebijakannya terkait protokol kesehatan, seperti *lockdown* dan pembatasan sosial bagi masyarakat. Dampak dari kebijakan tersebut membuat pertumbuhan ekonomi dunia melambat. Hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia merespons dengan penurunan suku bunga acuan oleh Bank Sentral, kebijakan fiskal ekspansif dan pemberian berbagai stimulus keuangan oleh pemerintah.

Dalam kondisi seperti itu, sejumlah inisiatif dan strategi yang diimplementasikan oleh BTPN Syariah sepanjang tahun 2020, antara lain:

1. Turut serta aktif mengambil bagian dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah terutama untuk segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Bank tetap konsisten menjalankan prinsip kehati-hatian dan fokus pada segmen prasejahtera secara disiplin serta menunjang inisiatif keuangan inklusif agar segmen ini dapat memperoleh akses, layanan dan produk perbankan yang memberi rasa aman, nyaman dengan prinsip Syariah.
3. Tetap menjaga kinerja keuangan dan terus tumbuh mengikuti prinsip “Do Good, Do Well”. BTPN Syariah selalu memastikan bahwa kinerja keuangan yang baik akan terus diseimbangkan dengan dampak sosial yang berarti dan terukur. BTPN Syariah tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial tetapi juga selalu memastikan untuk terus menciptakan dampak positif dalam kehidupan nasabah prasejahtera produktif, yang dapat membuat kehidupan mereka lebih baik.

4. Dari sisi pendanaan, BTPN Syariah juga memiliki insiatif dan strategi, seperti:
 - a. *Bundling* produk tabungan dengan pembiayaan kepada nasabah Tunas Usaha Rakyat (TUR)
 - b. Penjualan *Basic Saving Account* (BSA) dan *Regular Saving Account* (RSA) dari layanan Mitra Tepat kepada segmen *mass market*.
 - c. Mengembangkan produk pendanaan syariah dengan mengeluarkan produk tabungan atau deposito sesuai dengan prinsip Syariah (Tepat Tabungan, Tepat Tabungan Platinum, Tepat Deposito, Tepat Tabungan Rencana, Tepat Giro).
 - d. Produk Rekening Tabungan Jamaah Haji dengan meminta ijin dari SISKOHAT.
 - e. Memiliki cabang dengan fokus utama pendanaan seperti yang telah berjalan baik di BTPN Konvensional.
 - f. Layanan *internet banking* untuk mempermudah dan memberikan kenyamanan transaksi nasabah yang dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun tanpa harus pergi ke kantor cabang.
 - g. Melakukan sinergi dengan Bank Induk melalui pengoptimalan sumber daya manusia, teknologi informasi dan jaringan kantor milik Bank Induk guna menunjang pelaksanaan kegiatan BTPN Syariah yang memberikan nilai tambah bagi BTPN Syariah dan Bank Induk.
 - h. Mengelola likuiditas dana syariah secara efisien dan efektif melalui *money market desk* di *Treasury*, di antaranya: fasilitas *interbank* dengan BTPN konvensional, maupun bank-bank syariah lainnya.
 - i. Layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) meliputi kartu ATM dan layanan mesin ATM itu sendiri untuk meningkatkan pendanaan

Rencana Strategis 2021

Untuk tahun depan, BTPN Syariah akan tetap melanjutkan 4 (empat) langkah strategis utama yang sudah dirintis sejak 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu:

1. Membangun *Operational Excellence* untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelayanan
2. Meningkatkan Aset BTPN Syariah.
3. Mengeksplorasi *fee-based income*.
4. Memperkuat kemampuan organisasi Bank, baik secara permodalan, teknologi serta sumber daya manusia dan organisasi sehingga manajemen risiko Bank & GCG bisa terlaksana dengan baik, predikat risiko komposit pada posisi 2 dapat dipertahankan dan tetap menjaga kestabilan permodalan sebagai Bank BUKU 3.

Pencapaian Kinerja

Hingga berakhirnya tahun buku 2020, total aset BTPN Syariah terakumulasi sebesar Rp16,435 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp15,383 triliun, telah meningkat 7%.

Secara umum, kinerja BTPN Syariah pada tahun buku tetap baik, seperti ditunjukkan oleh beberapa rasio keuangan yang tetap terjaga seperti rasio BOPO dan NPF *gross* yang berada pada angka 72,4% dan 1,9%. Untuk CAR yang memperhitungkan risiko pembiayaan dan risiko operasional mencapai 49,4%, sangat jauh melebihi ketentuan minimum yang ditetapkan oleh regulator.

Untuk pembiayaan, sepanjang tahun 2020 total pembiayaan yang disalurkan oleh BTPN Syariah mencapai Rp9,523 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp9,000 triliun, telah meningkat 6%. Pertumbuhan tersebut masih didominasi oleh pembiayaan dengan fokus utama pada segmen *mass market* yang tumbuh 6% (*year on year*).

Kualitas pembiayaan yang disalurkan juga masih tetap terjaga dengan baik. Secara netto, NPF tahun 2020 mencapai 0,0%, sementara tahun lalu 0,2%. Pencapaian ini merupakan salah satu yang terbaik jika dibandingkan dengan rata-rata industri perbankan. Sedangkan kinerja penghimpunan dana, total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil diakumulasi oleh BTPN Syariah mencapai Rp9,780 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp9,446 triliun, mengalami peningkatan 4%.

Tingkat pertumbuhan DPK berkorelasi langsung terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yang hingga akhir tahun buku mencapai 97,4%. Dalam kebijakan Bank, penghimpunan dana pihak ketiga harus diharmonisasikan dengan tingkat pertumbuhan penyaluran dana sehingga tingkat FDR dapat terjaga dengan baik sesuai dengan target.



PROFITABILITAS PER SEGMENT USAHA

(Rp Juta)

Indikator	Ritel			Korporasi		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Penghasilan/(Beban) Bunga Bersih	3.024.241	3.390.763	3.542.223	1.971.878	1.519.206	-
Pendapatan/(Beban) Operasional Bersih	(2.019.912)	(2.039.224)	(1.931.192)	(426.443)	(37.965)	-
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	1.004.524	1.345.484	1.610.745	1.545.359	1.481.241	-
Laba/(Rugi Bersih)	799.360	1.001.118	1.155.818	1.229.733	1.102.129	-

(Rp Juta)

Indikator	UMKM			Penghimpunan Dana & Treasuri		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Penghasilan/(Beban) Bunga Bersih	716.642	785.909	1.042.545	1.371.704	1.362.052	1.936.046
Pendapatan/(Beban) Operasional Bersih	(1.778.897)	(1.303.368)	(1.309.200)	(1.105.672)	(1.525.919)	(1.635.215)
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(1.060.641)	(517.556)	(266.778)	262.205	(168.496)	276.442
Laba/(Rugi Bersih)	(844.015)	(385.092)	(191.431)	208.652	(125.370)	198.366

(Rp Juta)

Indikator	Syariah		
	2020	2019	2018
Penghasilan/(Beban) Bunga Bersih	3.539.963	3.933.765	3.079.594
Pendapatan/(Beban) Operasional Bersih	(2.420.323)	(2.052.701)	(1.777.045)
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	1.124.296	1.878.249	1.299.019
Laba/(Rugi Bersih)	854.614	1.399.633	965.311

Tinjauan Kinerja Keuangan



DPK

Rp **100,8** triliun

Upaya menghimpun dana pihak ketiga dilakukan didampingi dengan upaya menekan biaya dana seiring dengan tren penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia.



Total Ekuitas

Rp **33** triliun

Total Ekuitas meningkat 4,74% menjadi Rp33 triliun, seiring dengan kenaikan saldo laba ditahan. Bank menjaga CAR tetap kuat sebesar 25,55% di atas rata-rata industri.

Total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dibukukan oleh Bank hingga berakhirnya tahun buku 2020 sebesar Rp100,8 triliun, naik 15,93% dibandingkan dengan tahun 2019 yang Rp86,9 triliun. Sementara Saldo CASA meningkat sebesar 13,81% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan dana pihak ketiga Bank tidak lepas dari tingginya tingkat kepercayaan nasabah serta kuatnya fondasi bisnis Bank BTPN.

Uraian kinerja keuangan BTPN disusun sejalan dengan laporan keuangan konsolidasian yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Laporan tersebut juga menjadi bagian dari Laporan Tahunan 2020.

Kinerja BTPN pada tahun 2020, seperti halnya industri perbankan, dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Bahkan sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Bank Indonesia 5 (lima) kali menurunkan suku bunga acuan, BI 7-day (reverse) Repo Rate. Dari 5,00% pada awal tahun, hingga menjadi 3,75% pada pertengahan Desember. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi industri perbankan sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19. Hal ini tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK-3/2020 tentang "Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona

Virus Disease 2019" yang kemudian diubah dengan berlakunya Peraturan OJK Nomor 48/POJK-3/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 11/POJK-3/2020. Dengan perubahan tersebut, kebijakan restrukturisasi kredit yang awalnya ditetapkan berakhir pada 31 Maret 2021, kemudian diperpanjang selama satu tahun, menjadi 31 Maret 2022.

Kendati demikian, BTPN dapat menjaga fundamental tetap kuat pada tahun 2020 di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dalam negeri akibat hantaman pandemi COVID-19. BTPN fokus dalam memastikan kesehatan nasabah dan karyawan, bekerja sama dengan nasabah yang terdampak, serta mendukung kelangsungan usaha mereka dengan melakukan relaksasi kredit menurut ketentuan OJK dan pada saat bersamaan juga merealisasikan fasilitas program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

BTPN memitigasi dampak dan risiko dengan cara memberikan pinjaman secara selektif, melakukan



restrukturisasi dan manajemen biaya kredit, secara proaktif mengelola NPL, mengurangi biaya dana, aktif mengelola likuiditas dan pendanaan serta meningkatkan efektivitas operasional secara berkesinambungan. Selain itu juga terus mengakselerasi kapabilitas perbankan digital untuk menghadirkan layanan perbankan yang bukan saja relevan tapi menjawab tantangan pandemi bagi para nasabah.

Berikut ini adalah tinjauan keuangan atas tahun 2020 dan 2019. BTPN bergabung dengan SMBCI sejak merger di tanggal 1 Februari 2019.

NERACA KEUANGAN

ASET

Hingga berakhirnya tahun buku 2020, total aset yang dibukukan oleh BTPN secara konsolidasi mencapai Rp183,2 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp181,6 triliun, telah terjadi peningkatan sebesar 0,8%. Peningkatan tersebut, terutama berasal

dari penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain dan efek-efek seiring dengan pertumbuhan dana pihak ketiga yang cukup signifikan.

Pinjaman yang diberikan mengalami penurunan seiring dengan perlambatan penyaluran kredit di industri perbankan akibat melemahnya aktivitas perekonomian sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Penurunan penyaluran kredit BTPN terdampak terutama pada segmen pembiayaan konsumen dan UMKM. Perlambatan kredit juga disebabkan karena adanya pelemahan aktivitas bisnis dan *repayment* kredit yang lebih tinggi dibandingkan pemberian fasilitas kredit baru. Namun segmen korporasi dan syariah masih mencatat pertumbuhan sebesar 3,9% dan 5,8% (yoy) menjadi Rp78,6 triliun dan Rp9,5 triliun, masing-masing.

Perkembangan Aset

(Rp Juta)

Uraian	2020	2019	2018
Kas	2.433.196	2.299.062	1.838.136
Giro pada Bank Indonesia	5.616.968	8.987.079	5.248.644
Giro pada bank-bank lain	896.568	1.056.904	841.464
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	16.954.868	8.839.876	11.720.619
Efek-efek	14.804.656	10.654.624	6.806.407
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	1.591.672
Pinjaman yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah	136.212.619	141.760.183	68.136.780
Aset tetap – Net	2.357.987	1.893.746	1.786.727
Aset tak berwujud - Net	1.040.599	1.068.542	940.830
Aset lain-lain	2.848.517	5.071.369	2.429.945
Total Aset	183.165.978	181.631.385	101.341.224

Posisi kas Bank BTPN pada tahun 2020 mencapai Rp2,4 triliun, meningkat 5,8% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,3 triliun.

Giro pada Bank Indonesia mengalami penurunan 37,5%, dari Rp9,0 triliun menjadi Rp5,6 triliun.

Aset Keuangan

Aset keuangan Bank BTPN terdiri atas giro pada Bank Indonesia, giro pada bank-bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain, efek-efek, tagihan derivatif, tagihan akseptasi dan pinjaman yang diberikan. Sebagian besar aset keuangan tersebut berupa pinjaman yang diberikan senilai Rp136,2 triliun atau 77,0% dari total aset keuangan.

Hingga berakhirnya tahun buku 2020, aset keuangan yang dimiliki oleh Bank BTPN senilai Rp176,9 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2019, terjadi peningkatan 1,7%. Peningkatan terutama disebabkan oleh penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan berupa Sukuk Bank Indonesia, Surat Berharga Syariah Negara, Obligasi Pemerintah, Wesel Ekspor dan lain-lain nilainya mencapai Rp5,0 triliun.

Sedangkan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain berupa Obligasi Pemerintah dan Reksa Dana Syariah nilainya mencapai Rp9,8 triliun.

Penyaluran Kredit

Jumlah kredit yang berhasil disalurkan pada tahun buku 2020 sebesar Rp136,2 triliun. Dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp141,8 triliun, terjadi penurunan sebesar 3,9%. Penurunan itu, terutama disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menjadi tantangan berat bagi industri perbankan. Perlambatan kredit juga disebabkan karena adanya pelemahan aktivitas bisnis dan repayment kredit yang lebih tinggi dibandingkan pemberian fasilitas kredit baru.

Segmen usaha yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19 pada tahun 2020 adalah segmen Pembiayaan Konsumen dan UMKM. Segmen usaha yang masih mengalami pertumbuhan adalah segmen Korporasi dan Pembiayaan Syariah yang masing-masing masih tumbuh sebesar 3,9% dan 5,8%. Sedangkan segmen usaha Pensiun mengalami penurunan lebih dikarenakan bisnis Pensiun yang sudah *mature*.

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan di tengah ketidakpastian dan tekanan akibat penyebaran pandemi COVID-19. Secara proaktif Bank memberikan dukungan kepada para debitur dengan fokus terutama pada debitur yang paling terdampak, memberikan solusi keuangan yang disesuaikan dengan kondisi debitur, kebijakan restrukturisasi kredit sejalan dengan peraturan pemerintah yang berlaku dalam upaya mendukung para nasabah. Pada tanggal 31 Desember 2020, *outstanding balance* kredit yang di restrukturisasi akibat COVID-19 adalah sebesar Rp8,75 triliun. Jumlah itu setara dengan 6,42% dari keseluruhan portofolio kredit konsolidasi.



Kredit Berdasarkan Segmen

(Rp Juta)

Segmen	2020	2019	2018
Growing Business			
Korporasi	78.642.664	75.713.860	-
Usaha Kecil dan Menengah	12.545.170	13.883.980	12.898.289
Pembiayaan Konsumen	2.181.035	5.561.484	5.634.680
Pembiayaan/Piutang Syariah	9.522.866	8.999.574	7.277.162
Lain-Lain	307.548	378.871	823.006
Mature Business			
Retail Lending	32.107.874	35.611.265	38.459.840
Mikro	905.462	1.611.149	3.043.802
Total	136.212.619	141.760.183	68.136.780

Penyaluran kredit berdasarkan penggunaan, porsi terbesar adalah untuk modal kerja, yaitu senilai Rp72,3 triliun atau mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu sebesar 0,5%.

Sedangkan kredit investasi yang disalurkan senilai Rp30,7 triliun, meningkat 2,1%. Sementara untuk pemanfaatan lainnya, seperti kredit konsumsi, nilainya Rp33,2 triliun, turun 14,9% dibandingkan tahun 2019.

Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

(Rp Juta)

Penggunaan	2020	2019	2018
Modal Kerja	72.263.707	72.622.684	23.208.258
Investasi	30.715.053	30.084.752	3.234.863
Konsumsi	33.233.859	39.052.746	41.693.660
Jumlah	136.212.619	141.760.183	68.136.780

Kualitas kredit BTPN terjaga baik, seperti tercermin dari NPL *gross* (Konsolidasian) yang berada di level 1,21% pada akhir Desember 2020. Angka ini relatif rendah dibandingkan NPL industri perbankan yang pada akhir Desember 2020 tercatat sebesar 3,06%.

Kemampuan Bank BTPN menjaga tingkat kredit bermasalah yang dapat dijaga dengan baik tersebut merupakan hasil dari penerapan manajemen risiko yang selalu dikembangkan. Manajemen risiko juga memastikan bahwa tingkat risiko sesuai dengan kemampuan Bank dalam menyerap risiko.

Kredit berdasarkan Kolektibilitas

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

Penggunaan	2020	2019	2018
Lancar	130.019.658	136.164.728	65.838.753
Dalam Perhatian Khusus	4.550.761	4.442.850	1.453.471
Total Kredit Tidak Bermasalah	134.570.419	140.607.578	67.292.224
Kurang Lancar	700.012	326.913	193.589
Diragukan	138.451	280.541	281.207
Macet	803.737	545.151	369.760
NPL	1.642.200	1.152.605	844.556
Total Kredit	136.212.619	141.760.183	68.136.780
NPL-Kotor	1,2%	0,8%	1,2%
NPL-Bersih	0,5%	0,4%	0,5%
LLP/NPL	208,4%	127,3%	134,3%

LIABILITAS

Liabilitas Bank BTPN terutama berasal dari dana pihak ketiga (DPK) termasuk dana syirkah temporer yang pada tahun 2020 mencapai 67,1% dari total liabilitas. Dibandingkan tahun 2019, porsi DPK dan dana syirkah temporer terhadap total liabilitas meningkat sebesar 9,2%.

Peningkatan DPK itu, terutama berasal dari layanan Jenius dan Korporasi. Peningkatan dana tersebut diimbangi dengan penurunan simpanan dari bank-bank lain dan pinjaman yang diterima, sehingga secara keseluruhan total liabilitas dibandingkan tahun lalu adalah stabil.

Perkembangan Liabilitas

(Rp Juta)

Uraian	2020	2019	2018
Simpanan Nasabah	92.865.540	79.388.815	64.851.852
Dana Syirkah Temporer	7.923.366	7.550.664	5.992.860
Simpanan dari Bank-bank Lain	6.549.336	11.633.474	14.394
Efek-efek yang diterbitkan	993.045	3.190.628	1.197.442
Pinjaman Diterima	31.064.289	38.047.455	8.442.765
Lain-lain	10.805.649	10.348.421	2.055.581
Total Liabilitas	150.201.225	150.159.457	82.554.894

136

Simpanan Nasabah

Total simpanan nasabah termasuk dana syirkah temporer yang dibukukan Bank BTPN hingga berakhirnya tahun buku 2020 sebesar Rp100,8 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2019 yang Rp86,9 triliun, mengalami kenaikan 15,9%.

Saldo CASA meningkat sebesar 13,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Upaya menghimpun dana pihak ketiga dilakukan sejalan dengan upaya menekan biaya dana seiring dengan tren penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pertumbuhan dana pihak ketiga Bank tidak lepas dari tingginya tingkat kepercayaan nasabah serta kuatnya fondasi bisnis Bank BTPN. Rasio CASA mengalami sedikit penurunan di 27,5% dibandingkan tahun 2019 sebesar 28,1%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan saldo dana pihak ketiga yang lebih besar dibandingkan peningkatan saldo CASA.

Rincian Simpanan Nasabah (termasuk Dana Syirkah Temporer)

(Rp Juta)

Uraian	2020	2019	2018
Giro	15.760.708	14.374.226	1.118.905
Tabungan	11.929.298	10.060.583	7.843.220
Deposito	73.098.900	62.504.670	61.882.587
Jumlah	100.788.906	86.939.479	70.844.712

Dari sisi mata uang, sebagian besar simpanan dalam denominasi rupiah, yaitu mencapai Rp90,4 triliun atau 89,7% dari total simpanan. Sedangkan dalam bentuk valuta asing mencapai Rp10,4 triliun atau dengan porsi 10,3%. Dibandingkan dengan tahun 2019, proporsi rupiah mengalami peningkatan sebesar 3,6%.

Simpanan Nasabah Berdasarkan Mata Uang (termasuk Dana Syirkah Temporer)

(Rp Juta)

Uraian	2020	2019	2018
Rupiah	90.430.613	74.867.803	66.620.481
Valuta Asing	10.358.293	12.071.676	4.224.231
Jumlah	100.788.906	86.939.479	70.844.712



EKUITAS

Hingga berakhirnya tahun buku 2020, total ekuitas Bank BTPN sebesar Rp33,0 triliun, yang terdiri atas modal saham, tambahan modal disetor, cadangan revaluasi aset tetap, dan lain-lain. Dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp31,5 triliun, terjadi kenaikan 4,7%, terutama berasal dari kenaikan pada saldo laba ditahan.

Perkembangan Ekuitas

(Rp Juta)

Uraian	2020	2019	2018
Modal saham	162.979	162.979	117.033
Tambahan modal disetor	11.158.710	11.158.702	1.458.886
Cadangan revaluasi aset tetap	801.553	801.553	801.553
Cadangan pembayaran berbasis saham	-	244.012	281.748
Cadangan nilai wajar – bersih	101.255	12.176	3.527
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual, setelah pajak	-	-	-
Transaksi dengan kepentingan non-pengendali	(24.267)	(24.267)	(24.267)
Saldo laba (dicadangkan & tidak dicadangkan)	19.017.089	17.775.292	15.228.584
Saham treasuri	(262.404)	(262.404)	(262.404)
Kepentingan non-pengendali	1.749.037	1.603.885	1.181.670
Komponen ekuitas lainnya	260.801	-	-
Total Ekuitas	32.964.753	31.471.928	18.786.330

KINERJA LABA RUGI

Hingga berakhirnya tahun buku 2020, Bank BTPN berhasil membukukan laba bersih setelah pajak (*net profit after tax/NPAT*) sebesar Rp2,0 triliun dan NPAT yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp1,7 triliun, lebih rendah 32,0% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp2,6 triliun.

Tekanan akibat pandemi COVID-19 terhadap kondisi perekonomian secara makro membuat industri perbankan ikut terdampak, terutama akibat adanya pembatasan aktivitas ekonomi dalam usaha pembatasan penyebaran COVID-19. Bank tidak dapat sepenuhnya melakukan kegiatan usaha, termasuk pula dengan anak usaha BTPNS di mana penerapan PSBB juga membatasi kegiatan penyaluran kredit dan penerimaan pendapatan di BTPNS. Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank BTPN bekerja sama dengan nasabah yang terdampak, serta mendukung kelangsungan usaha mereka dengan melakukan relaksasi kredit, baik berupa penurunan suku bunga maupun penundaan pembayaran bunga kredit. Segmen Pembiayaan Konsumen dan UMKM merupakan segmen yang paling terdampak. Sementara, di segmen Korporasi, suku bunga sangat kompetitif

seiring dengan penurunan suku bunga acuan, sehingga Bank mengalami penurunan imbal hasil di segmen ini. Situasi ini menyebabkan tekanan pada pendapatan bunga, terlebih Bank juga mengalami tekanan pada bisnis dengan imbal hasil tinggi yaitu segmen Pembiayaan Konsumen dan UMKM yang disebabkan oleh restrukturisasi kredit. Namun, di sisi lain, Bank dapat menekan biaya dana yaitu turun dari 5,3% menjadi 3,7%, sehingga beban bunga Bank dapat berkurang. Namun, secara keseluruhan, pendapatan bunga bersih mengalami penurunan sebesar 3,3% menjadi Rp10,6 triliun.

Sementara, Bank BTPN mengalami peningkatan pendapatan *fee* sebesar 4,5% terutama berasal dari kenaikan keuntungan dari selisih kurs dan transaksi derivatif.

Beban operasional tercatat sebesar Rp6,9 triliun, atau 3,5% lebih rendah dari tahun sebelumnya, terutama diakibatkan terhambatnya sebagian kegiatan operasional yang mengurangi aktivitas seperti perjalanan dan pemasaran di saat pandemi.

Melemahnya sektor perekonomian akibat COVID-19 dan dampaknya terhadap debitur perbankan menyebabkan BTPN perlu menyiapkan tambahan biaya pencadangan kredit sebesar Rp2,8 triliun di tahun 2020.

Rincian kinerja laba rugi untuk tahun 2020 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Perkembangan Laba-Rugi

(Rp Juta)

Uraian	2020	2019*	2018
Pendapatan bunga	16.403.483	18.680.979	14.126.651
Beban Bunga	(5.779.055)	(7.689.284)	(4.526.243)
Pendapatan Bunga Bersih	10.624.428	10.991.695	9.600.408
Pendapatan Operasional Lainnya	1.688.837	1.616.578	600.139
Beban Operasional Lainnya	(9.682.751)	(8.575.754)	(7.252.791)
Laba Tahun Berjalan – Sebelum Pajak	2.633.076	4.018.922	2.919.428
Laba bersih tahun berjalan	2.005.677	2.992.418	2.128.064
Laba Bersih (<i>net profit after tax/NPAT</i>) yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.749.293	2.572.528	1.838.471

* Beberapa akun dalam informasi komparatif telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha Bank BTPN pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,3% dibandingkan tahun 2019. Hal itu, terutama disebabkan penurunan pendapatan bunga akibat dari penurunan pinjaman yang diberikan, restrukturisasi kredit disertai dengan penurunan suku bunga kredit yang dipicu oleh penurunan tingkat suku bunga *7-days Reverse Repo* BI. Sebagian dari dampak penurunan ini dapat di-offset oleh penurunan beban bunga.

Beban Usaha

Pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan pada kegiatan dunia usaha, sehingga berimbas terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh Bank BTPN. Kondisi tersebut ikut berkontribusi terhadap peningkatan beban usaha, yang terutama berasal dari Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Melemahnya sektor perekonomian akibat COVID-19 dan dampaknya terhadap debitur perbankan menyebabkan Bank BTPN perlu menyiapkan biaya pencadangan kredit sebesar Rp2,8 triliun. Sementara itu, Biaya Operasional lainnya (selain biaya CKPN) lebih rendah 3,5% dibandingkan tahun 2019, terutama karena berkurangnya biaya terkait perjalanan, pemasaran sebagai dampak pembatasan mobilitas di tengah pandemi.

ARUS KAS

Bank BTPN membukukan kas dan setara kas pada akhir tahun 2020 sebesar Rp25,2 triliun, naik 27,1% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp19,8 triliun. Pertumbuhan kinerja arus kas tersebut, terutama dikonstruksikan oleh kas bersih dari aktivitas operasi yang proporsinya terhadap total kas dan setara kas mencapai 74,0%.

Kinerja Arus Kas

(Rp Juta)

Uraian	2020	2019	2018
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	18.663.821	(11.970.920)	4.585.807
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi	(3.805.233)	11.301.087	(573.678)
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	(9.462.054)	122.307	1.505.543
Kenaikan (Penurunan) bersih kas dan setara kas	5.396.534	(547.526)	5.517.672
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	(10.562)	(35.026)	(10.878)
Saldo kas dan setara kas awal tahun	19.841.659	20.424.211	14.917.417
Saldo kas dan setara kas akhir tahun	25.227.631	19.841.659	20.424.211



Arus Kas untuk Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2020 mencapai Rp18,7 triliun, berbalik dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan dana pihak ketiga dan penurunan pinjaman yang diberikan, berkebalikan dengan kondisi tahun 2019.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi pada tahun 2020 tercatat minus. Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya pembelian bersih efek-efek di tahun 2020, sedangkan pada tahun 2019 terdapat pengalihan kas dan setara kas sehubungan dengan penggabungan usaha.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih dari aktivitas pendanaan juga seperti arus kas investasi, dari positif berubah menjadi negatif. Kondisi ini disebabkan pembayaran efek-efek yang diterbitkan, serta pembayaran angsuran dan pelunasan dari pinjaman yang diterima.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek dan Panjang

Bank BTPN memiliki tingkat likuiditas dan solvabilitas yang baik. Hal ini tercermin pada kemampuan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo secara tepat waktu, baik terhadap pembayaran pokok utang ataupun beban bunganya.

Dalam hal kemampuan pemenuhan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang juga telah dinilai sangat baik, sebagaimana disampaikan oleh lembaga pemeringkat eksternal. PT Fitch Rating Indonesia mempertahankan Peringkat Nasional untuk jangka panjang dan jangka pendek masing-masing AAA(idn), Outlook Stabil dan F1+(idn). Sementara PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) memberikan peringkat perusahaan idAAA (Triple A, Outlook Stabil).

Rasio Likuiditas

Rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas yang sehat. Di antaranya adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR), Rasio Intermediasi (RIM), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).

Tingkat LDR dan RIM Bank per 31 Desember 2020 adalah 134% dan 106%. Selain Dana Pihak Ketiga, untuk sumber pendanaan, Bank juga memiliki pinjaman yang sebagian besar dari induknya, serta pinjaman dari bank lain dan surat berharga yang diterbitkan. Di samping itu, rasio LCR dan NSFR per 31 Desember 2020 adalah sebesar 282% dan 115%, atau jauh melampaui batas ketentuan yang ditetapkan oleh OJK sebesar 100%. Dengan demikian, secara keseluruhan tingkat likuiditas Bank BTPN masih sangat sehat.

Rasio Solvabilitas

Parameter lain terkait dengan kemampuan membayar utang adalah rasio permodalan yang diukur melalui rasio solvabilitas. Bank BTPN senantiasa menjaga permodalan yang sehat, antara lain dengan memenuhi rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sejalan dengan yang ditentukan oleh regulator.

Solvabilitas atau kemampuan membayar utang Bank BTPN juga tercermin dari tingkat kecukupan modal untuk menutupi risiko-risiko kredit, pasar dan operasional. Rasio kecukupan modal (CAR) per 31 Desember 2020 mencapai sebesar 25,6%. Pencapaian tersebut jauh di atas ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mencerminkan tersedianya ruang untuk pertumbuhan ke depan.

Kolektibilitas Kredit

Bank BTPN senantiasa menjaga kualitas aset produktif agar kinerja usaha yang berkualitas dapat berkesinambungan. Hal itu, antara lain ditunjukkan melalui tingkat kolektibilitas kredit.

Perkembangan Kolektibilitas Kredit

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2020	2019	2018
Belum jatuh tempo	130.019.658	136.164.728	65.838.753
Tunggakan 1-90 hari	4.550.761	4.442.850	1.453.471
Tunggakan >90 hari	1.642.200	1.152.605	844.556
Jumlah kredit yang menunggak	6.192.961	5.595.455	2.298.027
Jumlah kredit yang diberikan – kotor	136.212.619	141.760.183	68.136.780
% Jumlah tunggakan terhadap jumlah kredit yang diberikan – kotor	4,55%	3,95%	3,37%

Pada tahun 2020, jumlah tunggakan pada kredit yang diberikan oleh Bank BTPN (kotor) sebesar Rp6,2 triliun dengan persentase terhadap total kredit sebesar 4,55%. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 3,95%. Kenaikan itu disebabkan oleh meningkatnya risiko kredit akibat pandemi COVID-19. Bank BTPN terus melakukan upaya pengendalian risiko kredit, sehingga tingkat kolektibilitas kredit yang diberikan tetap terjaga.

Sementara kualitas kredit juga dapat dilihat dari tingkat kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*). Per 31 Desember 2020, rasio *NPL gross* sebesar 1,21% rasio *NPL-net* sebesar 0,50%, meningkat dibandingkan tahun 2019 masing-masing sebesar 0,81% dan 0,43%. Kendati demikian, pencapaian itu masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata industri.

SUKU BUNGA DASAR KREDIT

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, seluruh bank umum wajib memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mempublikasikan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Publikasi ini, antara lain untuk memberikan kejelasan dan memudahkan nasabah dalam menimbang manfaat, biaya dan risiko kredit yang ditawarkan.

Selain itu, SBDK juga merupakan upaya peningkatan tata kelola perusahaan yang baik serta mendorong persaingan yang sehat dalam industri perbankan. Bank mengelompokkan SBDK berdasarkan segmentasi kredit menjadi 4 kelompok, yaitu Korporasi, Ritel, Mikro, dan Konsumsi. Rinciannya disampaikan dalam tabel Suku Bunga Dasar Kredit.

Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (*Prime Lending Rate*)
(Period 31 December 2020)

	Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (<i>Prime Lending Rate</i>) Berdasarkan Segmen Kredit				
	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
				KPR	Non-KPR
<i>Prime Lending Rate</i> (PLR)	6,08%	9,92%	15,87%	-	10,34%

Selama tahun 2020, penyesuaian Suku Bunga Dasar Kredit yang dilakukan oleh Bank BTPN mencapai di atas 1% (untuk segmen operasi Korporasi, Ritel, dan Konsumsi Non KPR). Perubahan tersebut sejalan dengan penurunan tingkat suku bunga *7 days Reverse Repo* BI yang mengalami penurunan sebesar 1,25%.

STRUKTUR MODAL

Dasar dan Kebijakan Struktur Modal

Bank BTPN senantiasa menjaga kecukupan modal untuk mendukung pertumbuhan usaha dan melindungi Bank dari gejolak pasar. Dalam pengelolaannya, Bank terus menjaga keseimbangan antara efisiensi modal dan tingkat pengembalian investasi pemegang saham, dengan menjaga tersedianya modal tambahan yang mencukupi untuk menutupi potensi risiko yang dihadapi.

Bank telah menyampaikan laporan kepada OJK tentang proses yang dilakukan untuk menetapkan kecukupan

modal Bank (ICAAP), yang sejalan dengan peraturan yang berlaku. Bank juga terus memastikan tersedianya modal yang cukup sejalan dengan profil risikonya.

Dalam pengelolaan modal atas risiko kredit, Bank menggunakan pendekatan standar yang menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) berdasarkan pedoman Bank Indonesia dan peringkat dari lembaga pemeringkatan.

Bank BTPN mengukur kecukupan modal untuk risiko operasional berdasarkan Metode Pendekatan Indikator Dasar sesuai ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Metode ini memungkinkan Bank untuk mengalokasikan modal bagi risiko operasional, berdasarkan data historis, yang sama jumlahnya dengan rata-rata pendapatan kotor 3 tahun terakhir, dikalikan dengan faktor koefisien yang berlaku sebesar 15,0%.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal



Minimum Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tentang perubahan dari POJK No. 11/ POJK.03/2016, Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai dengan profil risiko. Penyediaan modal minimum untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 yaitu sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Selain kebutuhan untuk memenuhi modal minimum berdasarkan profil risiko, Bank juga berkewajiban untuk menyediakan tambahan modal penyangga (*buffer*) dengan rincian sebagai berikut: (i) *Capital Conservation Buffer*, (ii) *Countercyclical Buffer*, dan (iii) *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systemically Important Bank* (D-SIB).

Untuk tahun 2020, karena situasi pandemik, tambahan modal penyangga yang dilakukan oleh regulator adalah *Capital Conservation Buffer* sebesar 0% (dari 2,5% di tahun 2019), *Countercyclical Buffer* sebesar 0% dan *Capital Surcharge* untuk D-SIB sebesar

1,00%. Persyaratan *Countercyclical buffer* dan *Capital Surcharge* untuk D-SIB akan ditinjau (*review*) oleh regulator sebanyak dua kali setiap tahunnya. Seluruh kewajiban modal penyangga harus dipenuhi dengan *Common Equity Tier 1* (CET 1).

Rincian Struktur Modal

Total Modal Bank per posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp36,3 triliun, meningkat dibandingkan dengan Total Modal pada posisi akhir tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya Selisih kurang antara Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) dan CKPN atas aset produktif pada komponen modal inti (Tier 1) sehingga saldo modal inti meningkat. Sedangkan modal pelengkap (Tier 2) mengalami penurunan terutama disebabkan oleh penurunan Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2 yaitu pinjaman subordinasi yang mulai di amortisasi di tahun 2020.

Rincian struktur modal Bank BTPN diuraikan melalui tabel di bawah ini.

Perkembangan Struktur Modal

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

Struktur Modal	2020	2019	2018
Modal Tier 1	29.426.916	27.259.773	15.898.538
Modal Tier 2	6.920.396	7.543.294	622.526
Total Modal	36.347.312	34.803.067	16.521.064
Aset Tertimbang Menurut Risiko:			
Risiko Kredit	118.425.350	124.368.632	49.742.514
Risiko Kredit dan Operasional	141.752.434	142.780.626	67.077.208
Risiko Kredit, Operasional dan Pasar	142.253.917	143.582.952	67.131.441
Rasio Kecukupan Modal:			
Risiko Kredit	30,7%	28,0%	33,2%
Risiko Kredit dan Operasional	25,6%	24,4%	24,6%
Risiko Kredit, Operasional dan Pasar	25,6%	24,2%	24,6%

Ikatan Material terkait Investasi Barang Modal

Sampai dengan akhir tahun 2020, Bank BTPN tidak memiliki ikatan/komitmen yang material terkait investasi barang modal).

Realisasi Investasi Barang Modal

Hingga berakhirnya tahun buku 2020, komposisi investasi barang modal dalam bentuk aset tetap dan aset tak berwujud secara keseluruhan naik sebesar Rp13,1 miliar atau 1,9%. Perolehan aset tetap di tahun 2020 sedikit menurun sebesar Rp3,3 miliar atau 1,0% dibandingkan dengan perolehan pada tahun 2019, yang disebabkan karena penyesuaian dengan kebutuhan Bank. Namun penurunan tersebut dapat diimbangi dengan kenaikan pada aset tak berwujud sebesar Rp16,4 miliar atau 4,3%.

Realisasi Investasi Barang Modal

(Rp Juta)

Jenis Barang Modal	2020	2019	2018
Aset Tetap	321.383	324.700	382.971
Aset Tak Berwujud	396.680	380.234	392.940
Total	718.063	704.934	775.911

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan.

TARGET, REALISASI, DAN PROYEKSI

Pada tahun 2020, kondisi dunia usaha termasuk sektor perbankan mengalami tantangan yang sangat besar. Begitu pun dengan yang dialami oleh Bank BTPN, sehingga Bank BTPN perlu merevisi target usaha yang telah ditetapkan sebelumnya.

COVID-19 telah mempengaruhi industri perbankan termasuk BTPN mulai pada triwulan II 2020. Pada semester pertama tahun 2020, BTPN melakukan kajian terhadap potensi dampak COVID-19. Bank perlu melakukan revisi terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB). Bank merevisi RBB untuk tahun buku yang berakhir Desember 2020, dalam RBB Revisi yang diajukan pada

akhir Juni 2020. Namun pada akhir 2020, Bank BTPN berhasil membukukan Laba Bersih melebihi target. Bank BTPN membukukan pendapatan yang lebih tinggi di Syariah karena lebih banyak kegiatan yang dapat dilakukan selama Triwulan ke-4 dibandingkan dengan yang diantisipasi sebelumnya karena COVID-19, serta membukukan beban bunga yang lebih rendah (biaya dana yang lebih rendah) sebagai dampak dari penurunan suku bunga acuan.

Pada penyaluran kredit, dari target yang diharapkan ada kenaikan 5-7%, justru menurun 3,9%. Hal ini disebabkan lambatnya penyaluran kredit. Segmen usaha yang paling terdampak adalah segmen Pembiayaan Konsumen dan UMKM. Segmen usaha yang masih mengalami pertumbuhan adalah segmen Korporasi dan Pembiayaan Syariah yang masing-masing masih tumbuh sebesar 3,9% dan 5,8%.

Rincian kinerja perbandingan target dan realisasi pada tahun 2020 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Perbandingan Target dan Realisasi

Uraian	Target 2020	Realisasi 2020
Pertumbuhan Kredit	5-7%	-3,9%
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga	16-18%	15,9%
Rasio Kecukupan Modal	>22%	25,6%
ROA	<1%	1,4%
ROE	>3%	6,1%
NPL (gross)	<2%	1,2%

Proyeksi 2021

Proyeksi tahun 2021 dibangun dengan beberapa asumsi bahwa COVID-19 masih akan berdampak pada perekonomian dan kegiatan usaha selama tahun 2021.

Proyeksi 2021

Uraian	Target 2021
Pertumbuhan Kredit	5-7%
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga	5-7%
Rasio Kecukupan Modal	>22%
ROA	>1%
ROE	>5%
NPL (gross)	<2%



PROSPEK USAHA

Penyusunan prospek usaha Bank BTPN termasuk mempertimbangkan kondisi eksternal, seperti target kinerja perekonomian nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk tahun 2021, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang optimistis, yaitu 4,5-5,5%.

Salah satu indikasi penting dalam prospek usaha tahun 2021, Bank BTPN seperti halnya pemerintah, antara lain mengacu pada ketersediaan vaksin COVID-19 yang diharapkan meningkatkan pengendalian penyebaran virus tersebut. Bahkan Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2021 mengungkapkan bahwa ketersediaan vaksin COVID-19 akan meningkatkan keyakinan masyarakat dan dunia usaha dalam percepatan pemulihan ekonomi.

Bersamaan dengan itu, Bank BTPN akan terus fokus untuk secara proaktif mengelola restrukturisasi kredit dan nasabah yang terdampak pandemi. Bank mengadopsi *risk appetite* yang lebih konservatif untuk segmen Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Pembiayaan Konsumen dan Mitra Usaha Rakyat/ Mikro selama tahun 2021 dalam penyaluran kredit yang tumbuh secara bertahap.

Di tahun 2021, Bank BTPN tetap mengandalkan segmen Korporasi, karena Bank memiliki *risk appetite*, kapabilitas inti, serta dukungan dari jaringan SMBC global untuk menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang lebih cepat. Di segmen Korporasi dan Komersial, Bank akan menyalurkan kredit secara selektif untuk tetap menjaga kualitas kredit, dan Bank juga akan meningkatkan *fee based income* bersamaan dengan peningkatan bisnis *Transaction Banking* dan *Treasury*. Bank juga akan berinvestasi dan mengatasi kebutuhan area-area ini untuk menghasilkan pendapatan tambahan guna mendukung lintasan pertumbuhan ke depan, mendanai investasi dan mempertahankan pertumbuhan di masa depan seraya membangun kembali bisnis SME dan Pembiayaan Konsumen serta meningkatkan efisiensi operasinya.

Bank BTPN akan meneruskan upaya untuk meningkatkan CASA dan mengurangi biaya dana sekaligus tetap menjaga pendanaan dan likuiditas yang sehat. Demikian juga dengan biaya operasional, Bank akan meneruskan upaya manajemen biaya dengan baik, yang diharapkan dapat mencapai rasio *cost to income* yang lebih optimum.

Bank BTPN akan melanjutkan investasi di Jenius yang merupakan *digital banking* untuk ritel, untuk

mempertahankan posisi kepemimpinannya di Perbankan Digital Indonesia, sehingga menopang pertumbuhan perbankan ritel di masa depan. Bank juga akan mengoptimalkan portofolio bisnis pensiun dan *retail lending* dan menyelaraskan kembali sumber daya Bank di *Mature Business*, terus melakukan transformasi bisnis dan mengoptimalkan model operasinya.

Strategi digital juga akan terus menjadi prioritas Bank di semua segmen. Untuk itu, memperkuat Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Operasional, Manajemen Risiko, Kepatuhan dan GCG untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

DIVIDEN

Kebijakan Dividen

Kebijakan pembagian dividen Bank BTPN ditetapkan di dalam RUPS Tahunan dengan mempertimbangkan kecukupan saldo laba ditahan, peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti persyaratan modal jangka panjang dan jangka pendek, serta ekspektasi pertumbuhan Bank dan kondisi pasar. Usulan pembagian dividen diajukan oleh Direksi kepada Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya, usulan tersebut dibawa ke dalam RUPS Tahunan untuk disetujui oleh Pemegang Saham.

Untuk mendukung pertumbuhan usaha selanjutnya, Bank BTPN belum merencanakan untuk membagikan dividen untuk tiga tahun ke depan.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM KARYAWAN DAN MANAJEMEN

Tahun 2015

Bank BTPN menyelenggarakan *Management & Employee Stock Options Program* (MESOP) dengan menerbitkan hak opsi untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel ("Hak Opsi") tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham Perseroan untuk periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 ("Program Hak Opsi"). Harga pelaksanaan yang akan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat ("Peraturan No. I-A").

Program Hak Opsi yang dilaksanakan oleh Bank mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal

Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 50 Tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat oleh Hadijah, SH, Notaris di Jakarta, Pemegang Saham menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan *Management and Employee Stock Option Program* (Program MESOP 2015).

Manfaat Program Hak Opsi bagi Bank BTPN:

1. Program Hak Opsi disusun untuk meningkatkan rasa memiliki Perseroan sehingga akan meningkatkan kinerja masing-masing Peserta Program Hak Opsi yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan.
2. Dengan pemberian Hak Opsi untuk membeli saham yang merupakan program kepemilikan saham manajemen dan karyawan, diharapkan akan tercapai keselarasan kepentingan Perseroan dengan kepentingan Peserta Program.
3. Memberikan penghargaan dan insentif terhadap kontribusi Peserta Program sehingga dapat memacu kinerja manajemen dan karyawan kunci Perseroan.
4. Pemberian Hak Opsi diharapkan dapat meningkatkan loyalitas Peserta Program serta meningkatkan kinerja Perseroan di kemudian hari dengan membangun program yang transparan, terukur serta memiliki kepastian implementasinya.

Hak opsi yang diterbitkan dalam setiap tahapan akan berakhir pada tanggal 26 Maret 2020 yakni 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham BTPN yang menyetujui Program Hak Opsi ini.

Rincian Pemberian Hak Opsi 2015

Tanggal Pemberian Hak Opsi	Harga Eksekusi per lembar (dalam Rp)	Lembar Saham (dalam ribuan)
15 April 2015	4.000	141.575
10 Juli 2015	4.000	-
9 Oktober 2015	4.000	-
8 Januari 2016	4.000	-
11 April 2016	4.000	-
11 Juli 2016	4.000	-
10 Oktober 2016	4.000	10.500

Pelaksanaan seluruh hak opsi yang diterbitkan dibagi menjadi 6 (enam) periode yaitu:

1. Periode I dimulai sejak tanggal 1 Mei 2017

2. Periode II dimulai sejak tanggal 6 November 2017
3. Periode III dimulai sejak tanggal 7 Mei 2018
4. Periode IV dimulai sejak tanggal 5 November 2018
5. Periode V dimulai sejak tanggal 6 Mei 2019
6. Periode VI dimulai sejak tanggal 2 Desember 2019

Seluruhnya dilaksanakan selama 30 hari bursa.

Harga Pelaksanaan Hak Opsi akan dilakukan mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor:Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 30 Januari 2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat: sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia selama 25 hari bursa sebelum tanggal laporan ke Bursa Efek Indonesia terkait rencana pelaksanaan Program Hak Opsi.

Perseroan menetapkan harga pelaksanaan atas seluruh hak opsi yang akan diterbitkan sebesar Rp4.000 per saham. Jumlah saham yang dapat dikeluarkan dalam Program Hak Opsi adalah sebanyak-banyaknya 233.611.491 lembar saham atau 4% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Periode Pelaksanaan Program MESOP 2015

Tahap	Jumlah Opsi	Jumlah Opsi Saham yang diberikan	Jumlah Opsi Saham yang dieksekusi	Jumlah Opsi Saham yang hangus	Harga Pelaksanaan
I	131.445.000	39.433.500	-	240.000	-
II	129.235.000	38.770.500	-	1.350.000	-
III	119.180.000	71.508.000	-	1.620.000	-
IV	108.140.000	64.884.000	-	-	-
V	92.840.000	92.840.000	-	160.000	-
VI	91.260.000	91.260.000	-	-	-



Tahun 2016

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 60 Tanggal 29 April 2016 yang dibuat oleh Hadijah, SH, Notaris di Jakarta, Pemegang Saham menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan *Employee Stock Option Program* (ESOP), atau Program Pemberian Hak Opsi Saham Kepada Karyawan Perseroan dan Karyawan Perusahaan Terkendali (Program ESOP 2016).

Sebagai implementasi program untuk mempertahankan karyawan yang berkinerja tinggi, maka untuk meningkatkan rasa memiliki perusahaan sehingga dapat tercapai keselarasan antara kepentingan Perseroan dan kepentingan karyawan, di samping Program MESOP 2015, Dewan Komisaris juga telah membuat suatu program pemberian insentif kepada para karyawan Perseroan maupun Perusahaan Terkendali akan diberikan hak opsi untuk memesan dan membeli saham-saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dengan membayar harga khusus yang dinamakan Harga Pelaksanaan (Program ESOP 2016).

Hak opsi yang diterbitkan dalam setiap tahapan akan berakhir pada tanggal 29 April 2021 yakni 5 tahun terhitung sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Bank BTPN yang menyetujui Program Hak Opsi ini.

Tahun 2017

Rincian pemberian hak opsi selama tahun 2017 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Rincian Pemberian Hak Opsi 2017

Tanggal Pemberian Hak Opsi	Harga Eksekusi per lembar (dalam Rp)	Lembar Saham (dalam ribuan)
15 Juni 2016	2.617	56.645.000
9 September 2016	2.617	-
9 Desember 2016	2.617	-
10 Maret 2017	2.617	-
12 Juni 2017	2.617	-
11 September 2017	2.617	-
11 Desember 2017	2.617	-

Periode pelaksanaan seluruh hak opsi yang diterbitkan dibagi menjadi 6 periode yaitu:

1. Periode I dimulai sejak tanggal 28 Mei 2018
2. Periode II dimulai sejak tanggal 17 Desember 2018
3. Periode III dimulai sejak tanggal 28 Mei 2019
4. Periode IV dimulai sejak tanggal 19 Desember 2019
5. Periode V dimulai sejak tanggal 1 Juni 2020
6. Periode VI dimulai sejak tanggal 17 Desember 2020

Seluruhnya dilaksanakan selama 30 hari bursa.

Kondisi tertentu yang dapat berpengaruh terhadap hak dan kepesertaan Program Hak Opsi adalah:

Kondisi	Konsekuensi
Mencapai usia pensiun /pensiun dini /habisnya kontrak kerja yang tidak diperpanjang /diberhentikan karena alasan kesehatan / pengurangan pegawai /pengambilalihan perusahaan	Berhak secara penuh atas Hak Opsi yang telah dialokasikan atas nama peserta
Meninggal dunia	Ahli waris berhak secara penuh atas Hak Opsi yang telah dialokasikan atas nama peserta
Mengundurkan diri/diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan pelanggaran/Perseroan atau Perusahaan Terkendali dalam keadaan pailit/disita	Tidak berhak atas Hak Opsi yang telah dialokasikan atas nama Peserta

Harga Pelaksanaan Hak Opsi dilakukan dengan mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor:Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 30 Januari 2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yakni sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia selama 25 hari bursa sebelum tanggal laporan ke Bursa Efek Indonesia terkait rencana pelaksanaan Program Hak Opsi. Perseroan menetapkan harga pelaksanaan atas seluruh hak opsi yang akan diterbitkan sebesar Rp2.617 per saham. Jumlah saham yang dapat dikeluarkan dalam Program Hak Opsi adalah sebanyak-banyaknya 116.805.746 lembar saham atau 2% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Periode Pelaksanaan Program ESOP 2016

Tahap	Jumlah Opsi	Jumlah Opsi Saham yang diberikan	Jumlah Opsi Saham yang dieksekusi	Jumlah Opsi Saham yang hangus	Harga Pelaksanaan (Rp)
I	52.690.000	15.807.000	10.670.600	54.000	2.617
II	39.072.400	5.073.400	1.112.900	-	2.617
III	21.000	90.000	12.000	-	2.617
IV	198.000	78.000	3.000	-	2.617
V	195.000	195.000	-	-	2.617
VI	195.000	195.000	-	-	2.617

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Rincian penerbitan hasil penawaran umum Bank BTPN serta realisasi pemanfaatan dananya diuraikan dalam tabel-tabel di bawah ini.

Penerbitan Obligasi Tahun Buku

Nama Obligasi	Nominal (Rp)	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016 Seri B	300.000.000.000	11 Juli 2016	1 Juli 2019
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap II Tahun 2017 Seri B	900.000.000.000	18 Oktober 2017	17 Oktober 2020
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 Seri A	799.000.000.000	27 November 2019	26 November 2022
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 Seri B	201.000.000.000	27 November 2019	26 November 2024
Medium Term Notes (MTN) II Tahun 2017 PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	1.302.000.000.000	14 Juni 2017	14 Juni 2020

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

(Rp Juta)

No.	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Realisasi Penggunaan Dana		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Rencana Penggunaan Dana	Realisasi Penggunaan Dana	
1	Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009	29 September 2009	750.000	8.699	741.301	741.301	741.301	0
2	Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010	18 Mei 2010	1.300.000	8.116	1.291.884	1.291.884	1.291.884	0
3	Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010	14 Desember 2010	1.100.000	6.476	1.093.524	1.093.524	1.093.524	0



No.	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Realisasi Penggunaan Dana		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Rencana Penggunaan Dana	Realisasi Penggunaan Dana	
4	Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap I Tahun 2011	20 Juni 2011	500.000	5.057	494.943	494.943	494.943	0
5	Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap II Tahun 2012	20 Juni 2011	1.250.000	6.069	1.243.931	1.243.931	1.243.931	0
6	Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap II Tahun 2013	20 Juni 2011	750.000	3.668	746.332	746.332	746.332	0
7	Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Tahap I Tahun 2013	26 Juni 2013	5.800.000	5.292	794.708	794.708	794.708	0
8	Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016	27 Juni 2016	1.000.000	6.483	993.517	993.517	993.517	0
9	Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap II Tahun 2017	27 Juni 2016	1.500.000	5.871	1.494.129	1.494.129	1.494.129	0
10	Obligasi Berkelanjutan IV 2019 Bank BTPN Tahap I Tahun 2019	27 November 2019	1.000.000 A serie: 799.000 B serie: 201.000	10.220	989.780	989.780	989.780	0

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2020, tidak terdapat Transaksi Material antara BTPN dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi atau Berelasi

Selama tahun 2020, BTPN mencatat 1 Transaksi Afiliasi yang dijalankan dengan (1) menggunakan jasa Penilai Independen, (2) mengumumkan Keterbukaan Informasi terkait Transaksi Afiliasi tersebut kepada masyarakat, dan (3) menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada OJK, namun Transaksi ini tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham Independen.

Transaksi Afiliasi yang dimaksud adalah Transaksi dengan SMBC berupa penggunaan dan pembayaran layanan teknologi informasi, termasuk di dalamnya biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi, yang mencakup:

- (a) Aplikasi FOX
- (b) Aplikasi OBS
- (c) Aplikasi SMAR&TS
- (d) Aplikasi GBR
- (e) Aplikasi Online Circuit
- (f) Aplikasi eKYC
- (g) Aplikasi SWIFT, dan
- (h) Aplikasi Bankers Almanac, yang disampaikan kepada publik dan OJK pada tanggal 18 Mei 2020.

Selanjutnya guna memenuhi Pasal 8 dan Pasal 9 POJK 42/2020, terkait dengan Transaksi Afiliasi yang merupakan kegiatan usaha Perseroan yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/ atau berkelanjutan telah diungkapkan dalam laporan keuangan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit, dalam catatan umum berjudul Informasi Mengenai Pihak Berelasi halaman 175-178.

Direksi Perseroan dalam hal ini telah memberikan pernyataan bahwa Transaksi Afiliasi yang merupakan kegiatan usaha dan dijalankan setelah berlakunya POJK 42/2020 tersebut dilakukan dengan memenuhi prosedur yang berlaku termasuk Pengelolaan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Transaksi Afiliasi.

Realisasi Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bangkok	Perusahaan afiliasi	Giro pada bank lain; simpanan dari bank lain
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Dusseldorf	Perusahaan afiliasi	Giro pada bank lain
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Europe Ltd	Perusahaan afiliasi	Giro pada bank lain
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Hongkong	Perusahaan afiliasi	Giro pada bank lain; simpanan dari bank lain; transaksi derivatif
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Korea	Perusahaan afiliasi	Kewajiban akseptasi
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Malaysia Berhad	Perusahaan afiliasi	Simpanan dari bank lain; transaksi derivatif
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, New Delhi	Perusahaan afiliasi	Giro pada bank lain
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, New York	Perusahaan afiliasi	Giro pada bank lain
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Seoul	Perusahaan afiliasi	Efek-efek
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore	Perusahaan afiliasi	Giro pada bank lain; simpanan dari bank lain; pinjaman yang diterima; pinjaman subordinasi; transaksi derivative; kewajiban akseptasi
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo	Pemegang saham pengendali	Giro pada bank lain; simpanan dari bank lain; transaksi derivatif
SMFL Leasing	Perusahaan afiliasi	Simpanan nasabah; pinjaman yang diberikan; transaksi derivatif
Summit Oto Finance	Perusahaan afiliasi	Simpanan nasabah; pinjaman yang diberikan; transaksi derivatif
Oto Multiartha	Perusahaan afiliasi	Simpanan nasabah; pinjaman yang diberikan; transaksi derivatif
PT SBCS Indonesia	Perusahaan afiliasi	Simpanan nasabah
Nikko Securities Indonesia	Perusahaan afiliasi	Simpanan nasabah

Nilai transaksi pihak berelasi

Rincian saldo transaksi dengan pihak berelasi telah diungkapkan pada Catatan 37 Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2020 yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan ini.

Kewajaran, Mekanisme Review dan Pemenuhan Peraturan Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usaha, BTPN memiliki kebijakan dalam memberikan persetujuan terhadap transaksi dengan pihak yang berelasi secara adil dan wajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Bank melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak berelasi dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan yang berlaku bagi pihak ketiga.

Bank BTPN melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama



INFORMASI TRANSAKSI TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI

BTPN tidak memiliki aksi korporasi material sepanjang tahun 2020.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN

Pada tahun 2020, terdapat beberapa peraturan baru yang telah terbit dan dapat memberikan pengaruh terhadap kegiatan usaha Bank dan entitas anak.

Adapun peraturan tersebut adalah antara lain:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang mulai berlaku sejak 16 Maret 2020. Kebijakan ini mengatur mengenai kualitas kredit yang terkena dampak COVID-19 dan direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi sampai dengan 31 Maret 2021. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Adapun kebijakan tersebut diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2022 dengan mengacu kepada POJK No. 48/ POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 yang mulai berlaku sejak 3 Desember 2020.
- Peraturan Bank Indonesia No. 22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia Sebagai Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai pembatasan sosial berskala besar dan untuk tetap menjaga dapat terlaksananya berbagai ketentuan BI sesuai dengan tujuannya.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.22/10/PADG/2020 tanggal 29 April 2020 perihal Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengenai penurunan GWM Rupiah sebesar 2% dari 5,5% menjadi 3,5% bagi BUK dan penurunan sebesar 0,5% dari 4% menjadi 3,5% bagi BUS dan UUS. Hal ini sebagai upaya dalam menjaga ketersediaan likuiditas perbankan dan memitigasi risiko dari dampak perlambatan ekonomi domestik.

- Peraturan Bank Indonesia No.22/4/PBI/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang mulai berlaku sejak 1 April 2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona, berupa kelonggaran GWM Rupiah harian sebesar 0,5% kepada Bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu untuk mendorong intermediasi perbankan selama periode tertentu.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 63/POJK.03/2020 Tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan serta SEOJK No. 26/SEOJK.03/2020 Tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Kebijakan ini memuat mengenai pengawasan berbasis teknologi melalui digitalisasi laporan ke OJK, sebagai bagian dari program integrasi pelaporan OJK, BI, dan LPS dan sejalan dengan perkembangan teknologi.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PERUSAHAAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR, ALASAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

Rincian perubahan kebijakan akuntansi dan dampak perubahan terhadap Laporan Keuangan telah diungkapkan pada Catatan 2d dan 47 Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2020 yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan ini. Alasan perubahan dikarenakan mengikuti implementasi kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan IAI.

KETAATAN SEBAGAI WAJIB PAJAK

Bank BTPN senantiasa menjalankan kewajibannya sebagai entitas usaha, seperti membayar pajak. Rincian pelaksanaan kepatuhan tersebut disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Pembayaran Pajak	2020	2019	2018
Pajak Penghasilan Badan	541.834	545.060	521.559
Pajak Penghasilan Karyawan	306.888	318.760	229.246

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Kondisi Tahun Buku 2020

Pada tahun buku 2020, kondisi yang paling berpengaruh terhadap Bank BTPN, begitu juga dengan industri perbankan adalah pandemi COVID-19. Penyebaran virus tersebut telah membuat perekonomian nasional masuk resesi. Mayoritas sektor usaha mengalami tekanan kinerja, sehingga mempengaruhi perbankan.

Kondisi tersebut telah menurunkan *baseline* Bank BTPN. Segmen SME, Pembiayaan Konsumen dan segmen bawah (Mikro dan Syariah) terkena dampak negatif yang menyebabkan penurunan volume, pendapatan, dan peningkatan biaya kredit yang signifikan.

Kendati demikian, Bank BTPN mampu mengatasi dampak negatif dari pandemi COVID-19 tersebut dan dapat menjaga kesinambungan usaha Bank di masa depan.

Hasil Kajian dan Asumsi yang Digunakan

Dalam kondisi pandemi COVID-19 tersebut, Bank BTPN telah melakukan kajian, yang antara lain mengacu pada kerangka manajemen risiko. Bank mengukur tingkat risiko dengan mengadopsi *risk appetite* yang telah ditetapkan oleh Bank.

Dari hasil pertimbangan tersebut, hingga akhir tahun buku 2020, Bank menemukan bahwa dampak dari pandemi COVID-19 terkelola dengan baik. Kendati demikian, Bank akan terus memantau perkembangan ke depan secara ketat, sehingga ada peringatan dini jika terjadi risiko yang harus direspons oleh Bank.

Salah satu wujud dari kemampuan Bank mengelola situasi, terlihat pada tingkat kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) yang dapat dijaga. *NPL gross* meningkat dari 0,81% tahun 2019 ke 1,21% di tahun 2020, namun berada di bawah rata-rata industri.

Hingga laporan tahunan 2020 ini diterbitkan, Bank BTPN tidak mendapatkan temuan atas ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank dalam mencapai target dan terus melanjutkan kelangsungan usaha.

Penerapan Strategi

Mengingat situasi terkait COVID-19 yang masih terasa, Bank BTPN akan terus fokus untuk secara proaktif mengelola restrukturisasi kredit dan nasabah yang terdampak pandemi. Bank juga akan mengadopsi *risk appetite* yang lebih konservatif untuk beberapa segmen usaha yang dilayani. Bank akan senantiasa menjaga kualitas portofolio kredit.

Selain itu, secara umum, Bank BTPN selalu mempertimbangkan faktor-faktor strategis lainnya dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Bank, yang antara lain meliputi kondisi makroekonomi dan perbankan, kinerja segmen usaha, kinerja keuangan, permodalan, tingkat likuiditas dan solvabilitas dalam melakukan assessment terkait kelangsungan usaha Bank. Melalui pertimbangan strategis tersebut, Bank dapat melakukan antisipasi melalui penerapan manajemen risiko yang tepat. Dengan demikian, hasil yang dicapai akan maksimal serta berkesinambungan, sehingga dapat menjaga kelangsungan usaha Bank ke depan.



Aspek Pemasaran

Bank BTPN berpandangan bahwa aktivitas pemasaran merupakan bagian yang sangat penting dalam kegiatan operasional demi mencapai tujuan usaha. Apalagi, tingkat persaingan di industri keuangan, khususnya perbankan semakin ketat dari tahun ke tahun, yang antara lain didorong oleh ekspektasi nasabah yang terus berkembang.

Kondisi tersebut merupakan tantangan yang harus dijawab oleh Bank agar senantiasa dapat beradaptasi terhadap segala perubahan yang terjadi. Karena itu, Bank secara terus-menerus meningkatkan mutu pelayanan dan strategi pemasaran yang efektif menghadapi pertumbuhan kebutuhan nasabah yang semakin bervariasi.

Bagi Bank BTPN, mempertahankan sekaligus meningkatkan pangsa pasar menjadi sangat penting demi menjaga pertumbuhan usaha yang berkesinambungan,

STRATEGI PEMASARAN

Pada tahun 2020, Bank BTPN telah menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran untuk meningkatkan kinerja produk dan layanan. Hal ini dilakukan bukan sekadar untuk meningkatkan kinerja usaha Perseroan, tetapi juga memberikan kepuasan maksimum terhadap nasabah.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi pada industri keuangan termasuk perbankan, Bank juga telah menerapkan strategi pemasaran berbasis online kepada nasabah, seperti dalam bentuk *web*

meeting untuk menangkap setiap kebutuhan finansial yang nasabah perlukan secara cepat dan tepat. Selain itu, menyelenggarakan seminar dengan berbagai tema untuk memberikan dukungan moral kepada nasabah.

Bank juga menggunakan *telemarketing* untuk meningkatkan produktivitas penjualan kredit. Bersamaan dengan itu, Bank melakukan perluasan kemitraan Jenius Pay dengan *e-commerce* besar seperti Blibli, Tokopedia, dan JD.ID untuk menangkap perubahan perilaku nasabah dari belanja *offline* menjadi *online* selama pandemi COVID-19.

Bahkan Bank telah menyediakan *monitoring tools* bagi supervisor untuk memudahkan proses pemantauan aktivitas penjualan tim serta meningkatkan kemampuan tenaga penjual sejalan dengan proses baru. Selain itu, Bank juga melakukan perubahan sistem kerja sama dengan BTPN Syariah menjadi sistem *referral*. Melalui sistem baru tersebut, jika ada nasabah/calon nasabah yang tertarik dengan produk syariah, petugas Bank di cabang Layanan Syariah Bank (LSB) akan memberikan referensi ke petugas BTPN Syariah.

Untuk mendukung layanan yang maksimal kepada nasabah, Bank senantiasa mengukur *Service Level Agreement* (SLA). Bank menangani keluhan nasabah dengan baik, terutama agar dapat direspons dengan cepat dan tepat.

PANGSA PASAR

Penjelasan tentang pangsa pasar Bank BTPN pada tahun 2020 disampaikan dalam tabel di bawah ini.

(Rp Miliar, kecuali dinyatakan lain)

Kriteria	Keterangan	2020	2019
Aset	Bank Umum	9.177.894	8.562.974
	Bank BTPN	183.166	181.631
	Pangsa Pasar	2,0%	2,1%
Jumlah Dana Pihak Ketiga	Bank Umum	6.665.390	5.998.648
	Bank BTPN	100.789	86.939
	Pangsa Pasar	1,5%	1,4%
Jumlah Pinjaman yang Diberikan	Bank Umum	5.481.560	5.616.992
	Bank BTPN	136.213	141.760
	Pangsa Pasar	2,5%	2,5%





MANAJEMEN RISIKO

154	Kebijakan Manajemen Risiko
155	Tata Kelola Manajemen Risiko
155	Organisasi Manajemen Risiko
155	Penerapan Manajemen Risiko
156	Fokus Tahun 2020
158	Hasil <i>Review</i> Penerapan Manajemen Risiko
158	Sistem Pengendalian Internal
159	Pengungkapan Permodalan
173	Pengungkapan Eksposur Risiko



PT Bank BTPN Tbk senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya serta berlandaskan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT Bank BTPN Tbk (“BTPN”, “Bank”) senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha. Perkembangan kondisi eksternal dan internal yang pesat membuat tingkat kompleksitas risiko yang makin tinggi dalam kegiatan usaha perbankan, seperti yang dijalankan oleh Bank.

Karena itulah, proses manajemen risiko dirancang agar mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risiko yang dihadapi BTPN dan anak usahanya, yaitu BTPN Syariah. Peningkatan kemampuan tersebut, terutama bertujuan agar kegiatan usaha Bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan Bank, atau bahkan mengganggu kelangsungan usaha Bank.

Bank telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi yang mencakup semua jenis risiko demi kelangsungan bisnis Bank dan anak perusahaan. Seluruh kewajiban terkait dengan hal itu juga telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk penyampaian laporan secara berkala kepada regulator.

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Kebijakan manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank secara konsisten sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategis Bank. Kebijakan tersebut dibuat untuk memastikan bahwa eksposur risiko Bank konsisten dengan kebijakan dan prosedur internal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penerapan kebijakan manajemen risiko adalah sebagai berikut:

1. Jenis usaha dan produk yang dijalankan sesuai dengan visi, misi dan strategi bisnis Bank.
2. Identifikasi dan mitigasi risiko secara jelas dan terkontrol, khususnya terkait dengan produk dan transaksi Bank.
3. Garis tanggung jawab dan pertanggungjawaban yang jelas dalam mengelola masing-masing jenis risiko.
4. Metodologi dan sistem informasi manajemen yang digunakan dapat mengukur risiko dan mendukung bisnis.
5. Penerapan kewenangan dan besaran limit menggambarkan maksimum risiko kerugian yang dapat diterima selaras dengan toleransi dan *risk appetite* Bank.
6. Pengelolaan rencana kelangsungan usaha (*Business Continuity Management*).
7. Kebijakan yang mengatur produk dan aktivitas baru.
8. Kebijakan kredit yang merupakan pedoman kredit yang mengatur pemberian kredit yang sehat, analisis, persetujuan dan batas wewenang memutus kredit, pencatatan, penetapan limit dan laporan.

9. Pengukuran dan penetapan peringkat risiko Bank disajikan dalam bentuk profil risiko.
10. Kebijakan Treasury yang mencakup pengelolaan risiko likuiditas dan kebijakan ALMA.

Acuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan manajemen risiko Bank, antara lain:

- Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank umum.
- Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Peraturan OJK No. POJK No.13/POJK.03/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- Surat Edaran OJK No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan Anak.
- Peraturan OJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Surat Edaran OJK No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum
- Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
- *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS)

Selain itu, Bank juga telah memiliki sejumlah ketentuan internal terkait dengan penerapan manajemen risiko, yang di antaranya adalah:

- Kebijakan Manajemen Risiko
- Kebijakan Kepatuhan



- Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
- Kebijakan Internal Audit dan Internal Audit Charter
- Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
- Kebijakan Pengelolaan dan Pengamanan Informasi
- Kebijakan Pengelolaan Kelangsungan Usaha

TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO

Penerapan tata kelola risiko di BTPN mengacu pada Peraturan OJK No.18/POJK.03/2016 dan Surat Edaran No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak. Bank menyampaikan laporan profil risiko setiap kuartal, baik secara individu maupun secara terkonsolidasi.

Selain itu, sejalan dengan Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tertanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BTPN sebagai Entitas Utama menyampaikan laporan profil risiko terintegrasi setiap semester kepada OJK.

Tata kelola risiko di BTPN dikelola oleh Direktorat Risk Management yang independen dari unit bisnis. Pada tingkat Direksi, Komite Manajemen Risiko memiliki pertemuan secara berkala atau minimal 8 kali setahun

(sesuai dengan piagam Komite Manajemen Risiko) untuk memberikan rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan kegiatan manajemen risiko Bank termasuk mendiskusikan potensi risiko yang dihadapi Bank yang memiliki dampak signifikan. Direktorat Risk Management rutin mengkaji ulang kebijakan dan prosedur, termasuk sosialisasi terhadap risiko-risiko yang ada dan dihadapi BTPN.

ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan tugasnya berkenaan dengan penerapan manajemen risiko, Dewan Komisaris dan Direksi dibantu beberapa komite dan satuan kerja, yaitu:

1. Komite Pemantau Risiko
2. Komite Manajemen Risiko
3. Satuan Kerja Manajemen Risiko
4. *Asset and Liabilities Committee* (ALCO)
5. Komite Audit
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi
7. Internal Audit
8. Risk Taking Unit
9. Unit Kepatuhan

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam menerapkan manajemen risiko, Bank mengacu pada proses yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko Bank. Proses dimaksud adalah:

No	Proses Manajemen Risiko	Uraian
1	Identifikasi Risiko	Seluruh jenis risiko yang melekat (inheren) pada setiap aktivitas produk dan kegiatan usaha harus diidentifikasi. Hal itu dilakukan untuk mengetahui potensi risiko dan dampak yang diakibatkan agar Bank dapat menyiapkan mekanisme kontrol. Identifikasi wajib dilakukan oleh setiap Risk Taking Unit sebagai lapis pertahanan pertama dan diperkuat dengan identifikasi risiko oleh Risk Management Unit sebagai lapis pertahanan kedua, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala. b. Memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis Bank. c. Proses identifikasi dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko dari produk dan aktivitas Bank serta memastikan bahwa risiko tersebut telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.
2	Pengukuran Risiko	Seluruh risiko yang telah diidentifikasi harus diukur sebagai salah satu bahan evaluasi hasil pelaksanaan penerapan manajemen risiko dan dasar penentuan langkah perbaikan. Salah satu cara untuk mengukur eksposur risiko adalah dengan menentukan parameter risiko. parameter ini harus disesuaikan jika terjadi perubahan yang material dari produk, proses, atau faktor risiko.
3	Pemantauan Risiko	<i>Risk Taking Unit</i> dan Satuan Kerja Manajemen Risiko wajib melakukan pemantauan terhadap eksposur risiko dan limit risiko, serta melaporkannya kepada Manajemen dan/atau Komite Manajemen Risiko secara berkala.
4	Pengendalian Risiko	Pengendalian risiko wajib dilakukan terhadap produk dan aktivitas Bank. Pengendalian tersebut mengacu pada prinsip <i>three lines of defence</i> , yaitu <i>Risk Taking Unit</i> dan <i>Business Risk</i> sebagai lini pengendalian pertama, Manajemen Risiko dan Kepatuhan sebagai lini pengendalian kedua dan Internal Audit (SKAI) sebagai lini pengendalian terakhir.
5	Sistem Informasi Manajemen Risiko	Sistem Informasi Manajemen Risiko dapat mengakomodasi strategi mitigasi risiko, akurat, informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja fungsional dan eksposur risiko, terkini, aman, konsisten, dan tersedia tepat waktu serta memiliki jejak audit.
6	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	Pemantauan manajemen risiko secara konsolidasi/terintegrasi dilakukan terbatas pada anak perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Hal itu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan OJK yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi. b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta informasi manajemen risiko. d. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh.

FOKUS TAHUN 2020

Pada tahun 2020, Bank telah menetapkan fokus terkait dengan penerapan manajemen risiko, yang antara lain diurai sebagai berikut:

1. Bank telah mempersiapkan *Dokumen Credit Risk Appetite, Market and Liquidity Risk Appetite*, dan *Operasional Risk Appetite* untuk memastikan Bank dapat mengakomodasi risiko yang mungkin timbul dari strategi bisnis yang dilakukan dan memastikan bahwa tingkat risiko sesuai dengan kemampuan Bank dalam menyerap risiko.
2. Bank berupaya untuk selalu mematuhi ketentuan terkait risiko pasar dan likuiditas dengan menjaga pertumbuhan bisnis yang dapat meningkatkan eksposur risiko dan menjaga pertumbuhan permodalan Bank
3. Bank tetap menjaga profil risiko Bank dengan nilai komposit risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko di peringkat 2.
4. Bank telah melakukan *assessment* terhadap metodologi perhitungan CKPN berdasarkan PSAK 71 dan saat ini dilakukan pengembangan dan monitoring berkelanjutan terhadap metodologi tersebut.
5. Sebagai bank dalam kategori D-SIB, Bank telah mempersiapkan dokumen *recovery plan* tahun 2020 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK dan melaksanakan ketentuan terkait dengan Penetapan Bank Sistemik berdasarkan penetapan OJK.
6. Melanjutkan koordinasi untuk kesiapan *Business Risk/ICR* sebagai PIC (*Person in Charge*) yang membantu di lini pertahanan pertama terkait pengelolaan risiko operasional pada setiap unit kerja melalui pelaksanaan *Business Risk Forum* setiap triwulan terkait dengan inisiatif atau metodologi baru yang perlu diimplementasikan di unit kerja masing-masing.
7. Pengembangan ORMS (*Operational Risk Management System*) untuk membantu Bank dalam pengelolaan risiko operasional melalui pengembangan modul KORI (*Key Operational Risk Indicator*).
8. Pengembangan perangkat kerja ORM yaitu:
 - Implementasi atas RGM (*Risk Grading Matrix*), PRC (*Process Risk Control*), KCSA (*Key Control Self-Assessment*), dan KORI di seluruh unit kerja bisnis dan fungsi pendukung.
 - Pengembangan metodologi perangkat kerja ORM terkait *Operational Risk Gain, Risk Acceptance*, KORI, dan ORA (*Operational Risk Appetite*).
 - Pengembangan ICR *Maturity Self-Assessment* untuk seluruh unit kerja
 - Pengembangan ORM dan *information security e-learning* serta
 - Pelaksanaan program untuk meningkatkan *user awareness* terhadap keamanan informasi dengan melakukan simulasi *phishing* setiap kuartal
 - Pengembangan program keamanan informasi seperti pembatasan akses karyawan untuk mengirimkan *e-mail* ke luar BTPN, penerapan *Data Leakage Protection* untuk *e-mail* dan enkripsi untuk *removable media*
9. Melakukan uji coba perhitungan dan pelaporan ATMR Risiko Operasional dengan pendekatan *Standardized Approach (SA)*.
10. Khusus untuk meminimalisir risiko *fraud*, maka Bank telah menjalankan program *risk awareness, anti-fraud awareness* dan Penandatanganan pakta integritas yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan setiap pegawai bank. Penyesuaian terhadap kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan risiko operasional termasuk strategi *anti-fraud* sehingga tetap sesuai dengan kondisi terkini, serta melakukan kajian risiko atas setiap proposal inisiatif, produk dan aktivitas Bank baik baru maupun pengembangannya. Sosialisasi *risk awareness* dan *anti-fraud awareness* dilakukan melalui beberapa media, yaitu melalui *e-newsletter broadcast, e-mail broadcast, wallpaper desktop PC/laptop, standing acrylics*, komik strip pada *B-Connect*, BTPN Info, penayangan video animasi *anti-fraud*, penambahan informasi layanan *whistleblowing* pada *website* BTPN yang dapat digunakan untuk pelaporan kejadian berindikasi *fraud*, pelaksanaan *mandatory assessment anti-fraud* melalui *e-learning*, pelaksanaan deklarasi *anti-fraud* melalui *e-learning* dan *anti-fraud awareness* yang disampaikan didalam *in-class training* maupun secara *online training* kepada karyawan. Sejalan dengan strategi *anti-fraud* yang berlaku, Bank juga secara berkelanjutan terus melakukan sosialisasi pelaporan kejadian indikasi *fraud* melalui *whistleblowing channel*.



11. Bank telah melakukan pengembangan terhadap infrastruktur data yang baru untuk mengakomodasi keperluan pengembangan *Financial Analytic Framework* yang terbagi menjadi beberapa fase yang salah satunya adalah untuk pengembangan mekanisme model pelaksanaan *financial simulation*.
12. Sudah dilakukan pelatihan serta kajian pembagian tugas dan kewenangan terkait usaha penerapan *internal grading model* untuk *segment SME, Commercial* dan *Enterprise*
5. Membuat protokol kerja di BTPN yang wajib diterapkan agar dapat melindungi karyawan maupun nasabah guna meminimalisir kemungkinan penyebaran virus
6. Menerapkan beberapa model kerja baru di BTPN terutama dengan diterapkannya WFH (*work from home*) seperti penggunaan VPN, persetujuan dokumen internal melalui *e-mail*, dan lainnya
7. Menerapkan mekanisme pengendalian risiko atas penyampaian instruksi nasabah melalui *channel* elektronik

Dalam menyikapi dampak pandemi COVID-19, Bank telah melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian ketentuan atau prosedur baik di tingkat *bankwide* atau tingkat Bisnis atas pelaksanaan relaksasi dan restrukturisasi bagi debitur yang terdampak dengan menetapkan kriteria debitur dan skema restrukturisasi bagi debitur debitur serta sektor ekonomi yang terdampak sesuai dengan segmen bisnis serta rekan kerja sama dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
2. Melakukan penyesuaian atas ketentuan dan metode dalam metode perhitungan pencadangan atas debitur yang direstrukturisasi sesuai dengan surat No. S-7/D.03/2020 perihal Penerapan PSAK 71 dan PSAK 68 dalam Kondisi Pandemi COVID-19
3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan restruktur dari debitur yang terdampak COVID-19 dilakukan dari tingkat segmen sampai dengan tingkat manajemen atas implementasi restrukturisasi dimasing masing segmen secara berkala
4. Menetapkan mekanisme monitor atas debitur terdampak COVID-19 yang direstruktur dan melakukan kaji ulang dan pemantauan kinerja model perhitungan pencadangan dalam mengantisipasi pemburukan kondisi makro ekonomi serta dampak terhadap *cost of credit*.
8. Memastikan kecukupan likuiditas baik untuk operasional secara normal maupun dalam *stress scenario* atas dampak kondisi pandemi COVID-19. Bank senantiasa berupaya memenuhi semua ketentuan regulasi terkait likuiditas seperti GWM, LCR dan NSFR.
9. Melakukan *monitoring* secara harian atas pergerakan posisi dana pihak III dan likuiditas lainnya, serta *early warning indicators* agar dapat menginformasikan kepada ALCO dan manajemen untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.
10. Menjaga posisi dalam mata uang asing untuk memastikan bank dapat mencukupi kebutuhan dalam mata uang asing pada saat ada kebutuhan transaksi dan pembayaran/*settlement* tanpa menyebabkan timbulnya risiko kerugian bagi Bank.
11. Mengelola risiko suku bunga secara optimal dan fleksible sesuai dengan kondisi pasar dalam kondisi pandemi COVID-19 agar tetap seiring dengan kebijakan dan strategi internal terkait.

HASIL REVIEW PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

BTPN melakukan kajian atas kecukupan kebijakan manajemen risiko, *contingency funding plan*, rencana keberlanjutan usaha, serta kebijakan-kebijakan penting lainnya setiap tahun. Di tingkat Direksi, Komite Manajemen Risiko memantau dan mengelola risiko di seluruh bagian Bank. Komite Pemantau Risiko di tingkat Dewan Komisaris mengawasi secara periodik terhadap implementasi manajemen risiko.

Sejalan dengan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 dan Surat Edaran No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, serta Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, Bank menyampaikan laporan profil risiko setiap kuartal, baik secara individu maupun secara terkonsolidasi.

Selain itu, mengacu pada Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tertanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank sebagai Entitas Utama membuat dan menyampaikan laporan profil risiko terintegrasi dan KPMM terintegrasi secara periodik sesuai dengan ketentuan OJK.

Sesuai peraturan Bank Indonesia dan OJK, penilaian atas profil risiko merupakan penilaian atas risiko inheren serta kualitas dari implementasi Manajemen Risiko. Penilaian dilakukan atas 8 jenis risiko, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko strategis, risiko hukum, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Untuk periode per desember 2020 dan desember 2019, profil risiko Bank baik secara individu maupun secara konsolidasi berada di peringkat 2 (rendah hingga moderate).

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Kerangka kerja pengendalian internal BTPN menerapkan model tiga lapis pertahanan (*Three Lines of Defense*), yang masing-masing bekerja secara independen:

- Lini Pertahanan Pertama (*First Line of Defense*) yaitu *Risk Taking Unit* (RTU) dibantu oleh Fungsi *Internal Control & Risk* (ICR) yang terkait, menegakkan praktik manajemen risiko operasional sehari-hari secara disiplin.

- Lini Pertahanan Kedua (*Second Line of Defense*) yaitu Direktorat *Risk Management* bersama dengan Unit Kepatuhan mendefinisikan, menyempurnakan dan memastikan terlaksananya pengelolaan risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian yang memadai disertai dengan kebijakan dan prosedur yang tepat, serta mengkoordinasikan/memfasilitasi kegiatan pengelolaan risiko secara keseluruhan.
- Lini Pertahanan Ketiga (*Third Line of Defense*) yaitu Internal Audit secara independen memastikan bahwa semua risiko yang melekat (*inherent risk*) telah dikelola sehingga risiko residual telah sesuai dengan toleransi risiko yang telah disepakati dan *risk appetite* yang ditetapkan Bank.

Sebagai lini pertahanan kedua, Direktorat *Risk Management* berkoordinasi dengan Fungsi ICR di lini pertahanan pertama untuk memastikan penerapan manajemen risiko yang efektif. Sebagai lini pertahanan ketiga dalam sistem pengendalian internal, Internal Audit memiliki fungsi pengawasan untuk mengevaluasi manajemen risiko, efektivitas pengendalian internal, dan tata kelola semua aspek kegiatan Bank menggunakan pendekatan berbasis risiko. Dengan demikian, fungsi pengawasan dilakukan terhadap lini pertahanan pertama (*Risk Taking Unit* dan ICR) dan lini pertahanan kedua (Direktorat *Risk Management* dan Unit Kepatuhan).

Evaluasi yang dilakukan oleh Internal Audit terhadap efektivitas pengendalian internal turut memperhatikan organisasi dan sumber daya manusia, pelayanan nasabah, infrastruktur bank maupun kualitas pelaksanaan proses-proses utama yang memiliki risiko bagi Bank.

Untuk setiap temuan, Internal Audit melakukan pemantauan status perbaikan yang dilakukan secara berkala dan melaporkannya kepada Direktur Utama, Direksi maupun Komite Audit. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Internal Audit dilakukan berdasarkan POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan International Practices Professional Framework (IPPF). Setiap 3 (tiga) tahun dilakukan audit terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan Internal Audit oleh pihak yang independen untuk meninjau kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang berlaku.



PENGUNGKAPAN PERMODALAN

A. Struktur Permodalan

Tujuan dari manajemen permodalan Bank adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan menjaga kepercayaan investor, deposan, kreditur, pelanggan, dan kepercayaan pasar.

Dalam pengelolaan permodalan, Bank mempertimbangkan faktor-faktor seperti: pengembalian modal yang optimal untuk pemegang saham, keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan *gearing ratio* serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat. Posisi permodalan Bank per tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan peraturan OJK yang berlaku, adalah sebagai berikut:

UMUM – Ukuran Utama (*Key Metrics*) Konsolidasi

No	Deskripsi	T	T-1	T-2	T-3	T-4
Modal yang Tersedia (nilai)						
1	Modal Inti Utama (CET1)	29.426.916	29.083.754	28.405.557	27.624.194	27.220.728
2	Modal Inti (<i>Tier 1</i>)	29.426.916	29.083.754	28.405.557	27.624.194	27.220.728
3	Total Modal	36.347.312	36.755.597	36.007.862	36.396.011	34.764.023
Aset Tertimbang Menurut Risiko (Nilai)						
4	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	142.253.917	147.537.590	155.976.978	161.912.996	143.582.952
Rasio Modal berbasis Risiko dalam bentuk persentase dari ATMR						
5	Rasio CET1 (%)	20,69%	19,71%	18,21%	17,06%	18,96%
6	Rasio <i>Tier 1</i> (%)	20,69%	19,71%	18,21%	17,06%	18,96%
7	Rasio Total Modal (%)	25,55%	24,91%	23,09%	22,48%	24,24%

No	Deskripsi	T	T-1	T-2	T-3	T-4
Tambahan CET1 yang berfungsi sebagai buffer dalam bentuk persentase dari ATMR						
8	<i>Capital conservation buffer</i> (2,5% dari ATMR) (%)	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	2,50%
9	<i>Countercyclical Buffer</i> (0-2,5% dari ATMR) (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	<i>Capital Surcharge</i> untuk Bank Sistemik (1%-2,5%) (%)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
11	Total CET1 sebagai <i>buffer</i> (Baris 8 + Baris 9 + Baris 10)	1,00%	1,00%	1,00%	3,50%	3,50%
12	Komponen CET1 untuk <i>buffer</i>	14,69%	13,71%	12,21%	11,06%	12,96%
Rasio pengungkit sesuai Basel III						
13	Total Eksposur	205.390.509	208.191.497	206.092.200	222.479.923	-
14	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada)	14,33%	13,97%	13,78%	12,42%	0,00%
14b	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada)	14,33%	13,97%	13,78%	12,42%	0,00%
14c	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset <i>Securities Financing Transaction</i> (SFT) secara <i>gross</i>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14d	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR)						
15	Total Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA)	33.572.779	27.239.795	30.965.420	27.096.106	27.494.460
16	Total Arus Kas Keluar Bersih (<i>net cash outflow</i>)	11.917.913	11.052.879	13.951.187	12.753.912	11.998.920
17	LCR (%)	281,70%	246,45%	221,96%	212,45%	229,14%
Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR)						
18	Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF)	121.006.657	126.229.004	130.895.925	138.079.389	125.059.410
19	Total Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF)	104.909.759	111.582.330	112.296.931	119.179.782	110.629.973
20	NSFR (%)	115,34%	113,13%	116,56%	115,86%	113,04%

Modal inti Bank per posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp29,4 triliun, sedikit meningkat dibandingkan dengan Modal inti pada periode sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan.

Total Modal Bank per posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp36,3 triliun, sedikit menurun dibandingkan dengan Total Modal pada periode sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan *Tier 2* (karena dampak selisih kurs dan amortisasi) dan berkurangnya Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)

Total ATMR mengalami penurunan di bulan Desember 2020 menjadi Rp142,3 triliun seiring dengan penurunan ATMR risiko kredit. Penurunan Total ATMR serta peningkatan Modal Inti menyebabkan Rasio CET1, Rasio *Tier 1* & Rasio Total Modal meningkat. Pada Desember 2020 Rasio Total Modal berada di posisi 25,55%.

T adalah periode triwulanan, T-1 adalah periode 1 triwulan sebelumnya



UMUM - Perbedaan antara Cakupan Konsolidasi dan *Mapping* pada Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dengan Kategori Risiko sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Kategori Risiko (L1)

	a	b	c	d	e	f	g
	Carrying values of items						
	Carrying values sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan	Carrying values berdasarkan prinsip kehati-hatian	Sesuai kerangka risiko kredit	Sesuai kerangka counterparty credit risk	Sesuai kerangka sekuritisasi	Sesuai kerangka risiko pasar	Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal
ASET							
Kas	2.433.196	2.433.196	-	-	-	-	2.433.196
Penempatan pada Bank Indonesia	22.571.836	22.571.836	-	-	-	22.571.836	22.571.836
Penempatan pada bank lain	896.568	896.568	-	-	-	896.568	896.568
Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	917.082	917.082	-	-	-	917.082	917.082
Surat berharga yang dimiliki	14.804.656	14.804.656	-	-	-	14.804.656	14.804.656
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan akseptasi	1.490.634	1.490.634	-	-	-	-	1.490.634
Kredit yang diberikan	126.689.753	126.689.753	126.689.753	-	-	126.689.753	126.689.753
Pembiayaan syariah	9.522.866	9.522.866	9.522.866	-	-	9.522.866	9.522.866
Penyertaan modal	22.522	22.522	-	-	-	22.522	22.522
Aset keuangan lainnya	961.550	961.550	-	-	-	-	961.550
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(3.428.808)	(3.428.808)	-	-	-	-	(3.428.808)
a. Surat berharga yang dimiliki	(291)	(291)	-	-	-	(291)	(291)
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(3.422.325)	(3.422.325)	(3.422.325)	-	-	(3.422.325)	(3.422.325)
c. Lainnya	(6.192)	(6.192)	-	-	-	(6.192)	(6.192)
Aset tidak berwujud	2.528.427	2.528.427	-	-	-	-	-
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(1.487.828)	(1.487.828)	-	-	-	-	-
Aset tetap dan inventaris	4.883.148	4.883.148	-	-	-	-	4.883.148
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(2.525.161)	(2.525.161)	-	-	-	-	(2.525.161)
Aset non produktif	19.202	19.202	-	-	-	-	19.202
a. Properti terbengkalai	-	-	-	-	-	-	-
b. Agunan yang diambil alih	19.190	19.190	19.190	-	-	-	19.190
c. Rekening tunda	12	12	-	-	-	-	12
d. Aset antarkantor	-	-	-	-	-	-	-
Aset lainnya	2.866.335	2.866.335	-	-	-	-	2.398.450
TOTAL ASET	183.165.978	183.165.978	132.809.484	-	-	171.996.475	181.657.494
LIABILITAS DAN EKUITAS							
LIABILITAS							
Giro	15.760.708	15.760.708	-	-	-	15.760.708	15.760.708
Tabungan	11.929.298	11.929.298	-	-	-	11.929.298	11.929.298
Deposito	73.098.900	73.098.900	-	-	-	73.098.900	73.098.900
Uang Elektronik	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-

	a	b	c	d	e	f	g
	Carrying values of items						
	Carrying values sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan	Carrying values berdasarkan prinsip kehati-hatian	Sesuai kerangka risiko kredit	Sesuai kerangka counterparty credit risk	Sesuai kerangka sekuritisasi	Sesuai kerangka risiko pasar	Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal
Liabilitas kepada bank lain	6.549.336	6.549.336	-	-	-	6.549.336	6.549.336
Liabilitas spot dan derivatif/forward	887.157	887.157	-	-	-	887.157	887.157
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas akseptasi	767.282	767.282	-	-	-	-	767.282
Surat berharga yang diterbitkan	993.045	993.045	-	-	-	993.045	993.045
Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	37.176.039	37.176.039	-	-	-	37.176.039	31.653.218
Setoran jaminan	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas antarkantor	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas lainnya	3.039.460	3.039.460	-	-	-	-	3.039.460
Kepentingan minoritas (minority interest)	1.749.037	1.749.037	-	-	-	-	1.749.037
TOTAL LIABILITAS	151.950.262	151.950.262	-	-	-	146.394.483	146.427.441
EKUITAS							
Modal disetor	161.075	161.075	-	-	-	-	-
a. Modal dasar	300.000	300.000	-	-	-	-	-
b. Modal yang belum disetor -/-	(137.021)	(137.021)	-	-	-	-	-
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	(1.904)	(1.904)	-	-	-	-	-
Tambahan modal disetor	11.134.744	11.134.744	-	-	-	-	236.534
a. Agio	10.898.210	10.898.210	-	-	-	-	-
b. Disagio -/-	-	-	-	-	-	-	-
c. Dana setoran modal	-	-	-	-	-	-	-
d. Lainnya	236.534	236.534	-	-	-	-	236.534
Penghasilan komprehensif lain	946.589	946.589	-	-	-	-	43.782
a. Keuntungan	946.589	946.589	-	-	-	-	43.782
b. Kerugian -/-	-	-	-	-	-	-	-
Cadangan	67.596	67.596	-	-	-	-	-
a. Cadangan umum	67.596	67.596	-	-	-	-	-
b. Cadangan tujuan	-	-	-	-	-	-	-
Laba/rugi	18.905.712	18.905.712	-	-	-	-	-
a. Tahun-tahun lalu	17.156.419	17.156.419	-	-	-	-	-
b. Tahun berjalan	1.749.293	1.749.293	-	-	-	-	-
c. Dividen yang dibayarkan -/-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	31.215.716	31.215.716	-	-	-	-	280.316
TOTAL EKUITAS	31.215.716	31.215.716	-	-	-	-	280.316
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	183.165.978	183.165.978	-	-	-	146.394.483	146.707.757

Analisa Kualitatif

Pada jenis aset keuangan, pemberian kredit dan pembiayaan syariah merupakan aset dengan ekposur terbesar yang memiliki risiko kredit dan risiko pasar. Terkait dengan risiko kredit, atas ekposur tersebut telah diperhitungkan pencadangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sementara terkait dengan risiko pasar, Bank telah menetapkan metode pengukuran risiko dan melakukan pemantauan risiko suku bunga di *Banking Book* yang dilaporkan secara berkala di rapat komite ALCO.



UMUM - Perbedaan Utama antara Nilai Tercatat sesuai Standar Akuntansi Keuangan dengan Nilai Eksposur sesuai dengan Ketentuan OJK (LI2)

	a	b	c	d	e
	Total	Kerangka risiko kredit	Item sesuai: Kerangka sekuritisasi	Kerangka Counterparty credit risk	Kerangka risiko pasar
Nilai <i>asset carrying value</i> sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada template LI1)	183.165.978	132.809.484	-	-	171.996.475
Nilai <i>liabilities carrying value</i> sesuai lingkup sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada template LI1)	183.165.978	-	-	-	146.394.483
Total nilai bersih sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	-	132.809.484	-	-	25.601.992
Nilai rekening administratif	107.509.308	107.509.308	-	-	-
Perbedaan valuasi	-	-	-	-	-
Perbedaan antara <i>netting rules</i> , selain dari yang termasuk pada baris 2	-	-	-	-	-
Perbedaan provisi	-	-	-	-	-
Perbedaan <i>prudential filters</i>	-	-	-	-	-
Nilai eksposur yang dipertimbangkan, sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	-	-	-	-	-

Permodalan - Komposisi Permodalan (CC1)

(dalam jutaan Rupiah)

No	Komponen	Individual	Konsolidasian
Modal Inti Utama (Common Equity Tier 1) /CET 1: Instrumen dan Tambahan Modal Disetor			
1	Saham biasa (termasuk <i>stock surplus</i>)	11.068.798	11.059.285
2	Laba ditahan	16.019.421	18.905.712
3	Akumulasi penghasilan komprehensif lain (dan cadangan lain)	931.693	970.403
4	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari CET1	N/A	N/A
5	Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	-	-
6	CET1 sebelum <i>regulatory adjustment</i>	28.019.912	30.935.400
CET 1 : Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)			
7	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>trading book</i>	-	-
8	<i>Goodwill</i>	-	(61.116)
9	Aset tidak berwujud lain (selain <i>Mortgage-Servicing Rights</i>)	(877.175)	(979.483)
10	Aset pajak tangguhan yang berasal dari <i>future profitability</i>	N/A	N/A
11	<i>Cash-flow hedge reserve</i>	N/A	N/A
12	<i>Shortfall on provisions to expected losses</i>	N/A	N/A
13	Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	-	-
14	Peningkatan/penurunan nilai wajar atas liabilitas keuangan (DVA)	-	-
15	Aset pensiun manfaat pasti	N/A	N/A

(dalam jutaan Rupiah)

No	Komponen	Individual	Konsolidasian
16	Investasi pada saham sendiri (jika belum di <i>net</i> dalam modal di neraca)	N/A	N/A
17	Kepemilikan silang pada instrumen CET 1 pada entitas lain	-	-
18	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan, di mana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	N/A
19	Investasi signifikan pada saham biasa Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	N/A
20	<i>Mortgage servicing rights</i>	-	-
21	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (jumlah di atas batasan 10%, <i>net</i> dari kewajiban pajak)	N/A	N/A
22	Jumlah melebihi batasan 15% dari:	N/A	N/A
23	investasi signifikan pada saham biasa <i>financials</i>	N/A	N/A
24	<i>mortgage servicing right</i>	N/A	N/A
25	pajak tangguhan dari perbedaan temporer	N/A	N/A
26	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	(1.554.360)	(467.885)
26.a	Selisih PPKA dan CKPN	-	-
26.b	PPA atas aset non produktif	-	-
26.c	Aset Pajak Tangguhan	(271.398)	(467.885)
26.d	Penyertaan	(1.282.962)	-
26.e	Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	-
26.f	Eksposur sekuritisasi	-	-
26.g	Lainnya	-	-
27	Penyesuaian pada CET 1 akibat AT 1 dan <i>Tier 2</i> lebih kecil daripada faktor pengurangnya	-	-
28	Jumlah pengurang (<i>regulatory adjustment</i>) terhadap CET 1	(2.431.535)	(1.508.484)
29	Jumlah CET 1 setelah faktor pengurang	25.588.377	29.426.916
Modal Inti Tambahan (AT 1) : Instrumen			
30	Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh bank (termasuk <i>stock surplus</i>)	-	-
31	Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi	-	-
32	Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi	-	-
33	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari AT1	N/A	N/A
34	Instrumen AT1 yang diterbitkan oleh entitas anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	-	-
35	Instrumen yang diterbitkan entitas anak yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	N/A
36	Jumlah AT 1 sebelum <i>regulatory adjustment</i>	-	-
Modal Inti Tambahan : Faktor Pengurang (<i>Regulatory Adjustment</i>)			
37	Investasi pada instrumen AT1 sendiri	N/A	N/A
38	Kepemilikan silang pada instrumen AT1 pada entitas lain	-	-
39	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan, di mana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	N/A
40	Investasi signifikan pada saham biasa Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	N/A
41	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-	-
41.a	Penempatan dana pada instrumen AT1 pada bank lain	-	-
42	Penyesuaian pada AT1 akibat <i>Tier 2</i> lebih kecil daripada faktor pengurangnya	-	-



(dalam jutaan Rupiah)

No	Komponen	Individual	Konsolidasian
43	Jumlah faktor pengurang (<i>regulatory adjustment</i>) terhadap AT1	-	-
44	Jumlah AT 1 setelah faktor pengurang	-	-
45	Jumlah Modal Inti (<i>Tier 1</i>) = (CET1 + AT 1)	25.588.377	29.426.916
Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>) : Instrumen dan cadangan			
46	Instrumen <i>Tier 2</i> yang diterbitkan oleh Bank (termasuk <i>stock surplus</i>)	-	-
47	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari <i>Tier 2</i>	N/A	N/A
48	Instrumen <i>Tier 2</i> yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	5.522.821	5.522.821
49	Modal yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	N/A
50	Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR untuk Risiko Kredit	1.340.025	1.397.575
51	Jumlah Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>) sebelum faktor pengurang	6.862.846	6.920.396
Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>) : Faktor Pengurang (<i>Regulatory Adjustment</i>)			
52	Investasi pada instrumen <i>Tier 2</i> sendiri	N/A	N/A
53	Kepemilikan silang pada instrumen <i>Tier 2</i> pada entitas lain	-	-
54	Investasi pada kewajiban TLAC modal bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi <i>short</i> yang diperkenankan, di mana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan; nilai sebelumnya ditetapkan dengan <i>threshold</i> 5% namun tidak lagi memenuhi kriteria (untuk Bank Sistemik)	N/A	N/A
55	Investasi signifikan pada modal atau instrumen TLAC bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (<i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan)	N/A	N/A
56	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-	-
56.a	<i>Sinking fund</i>	-	-
56.b	Penempatan dana pada instrumen <i>Tier 2</i> pada Bank lain	-	-
57	Jumlah faktor pengurang (<i>regulatory adjustment</i>) Modal Pelengkap	-	-
58	Jumlah Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>) setelah <i>regulatory adjustment</i>	6.862.846	6.920.396
59	Total Modal (Modal Inti + Modal Pelengkap)	32.451.223	36.347.312
60	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	128.849.595	142.253.917
Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dan Tambahan Modal (<i>Capital Buffer</i>)			
61	Rasio CET1 – persentase terhadap ATMR	19,86%	20,69%
62	Rasio Modal Inti (<i>Tier 1</i>) – persentase terhadap ATMR	19,86%	20,69%
63	Rasio Total Modal – persentase terhadap ATMR	25,19%	25,55%
64	Tambahan modal (<i>buffer</i>) – persentase terhadap AMTR	5,50%	5,50%
65	<i>Capital Conservation Buffer</i>	0,00%	0,00%
66	<i>Countercyclical Buffer</i>	0,00%	0,00%
67	<i>Capital Surcharge</i> untuk Bank Sistemik	1,00%	1,00%
68	CET 1 yang tersedia untuk memenuhi <i>Buffer</i> – persentase terhadap ATMR	13,86%	14,69%
National minimal (jika berbeda dengan Basel 3)			
69	Rasio terendah CET 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	N/A
70	Rasio terendah Tier 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	N/A
71	Rasio terendah total modal nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	N/A
Jumlah di bawah batasan pengurangan (sebelum pembobotan risiko)			
72	Investasi non-signifikan pada modal entitas keuangan lain	N/A	N/A
73	Investasi signifikan pada saham biasa entitas keuangan	N/A	N/A
74	<i>Mortgage servicing rights</i> (net dari kewajiban pajak)	N/A	N/A
75	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (net dari kewajiban pajak)	N/A	N/A

(dalam jutaan Rupiah)

No	Komponen	Individual	Konsolidasian
Cap yang dikenakan untuk provisi pada Tier 2			
76	Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan standar (sebelum dikenakan cap)	N/A	N/A
77	Cap atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan standar	N/A	N/A
78	Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan IRB (sebelum dikenakan cap)	N/A	N/A
79	Cap atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan IRB	N/A	N/A
Instrumen Modal yang termasuk phase out (hanya berlaku antara 1 Jan 2018 s.d. 1 Jan 2022)			
80	Cap pada CET 1 yang termasuk phase out	N/A	N/A
81	Jumlah yang dikecualikan dari CET1 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah redemptions dan maturities)	N/A	N/A
82	Cap pada AT1 yang termasuk phase out	N/A	N/A
83	Jumlah yang dikecualikan dari AT1 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah redemptions dan maturities)	N/A	N/A
84	Cap pada Tier 2 yang termasuk phase out	N/A	N/A
85	Jumlah yang dikecualikan dari Tier 2 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah redemptions dan maturities)	N/A	N/A

Permodalan - Rekonsiliasi Permodalan (CC2)

(dalam jutaan Rupiah)

No	Pos-pos	31 Desember 2020	
		Individual	Konsolidasian
ASET			
1	Kas	1.323.222	2.433.196
2	Penempatan pada Bank Indonesia	19.592.514	22.571.836
3	Penempatan pada bank lain	894.072	896.568
4	Tagihan spot dan derivatif/forward	917.082	917.082
5	Surat berharga yang dimiliki	12.201.417	14.804.656
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-	-
8	Tagihan akseptasi	1.490.634	1.490.634
9	Kredit yang diberikan	126.689.753	126.689.753
10	Pembiayaan syariah	-	9.522.866
11	Penyertaan modal	1.305.484	22.522
12	Aset keuangan lainnya	803.827	961.550
13	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(2.579.318)	(3.428.808)
	a. Surat berharga yang dimiliki	(291)	(291)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(2.572.835)	(3.422.325)
	c. Lainnya	(6.192)	(6.192)
14	Aset tidak berwujud	2.281.920	2.528.427
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(1.404.745)	(1.487.828)
15	Aset tetap dan inventaris	4.068.493	4.883.148
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(2.042.622)	(2.525.161)
16	Aset non produktif	19.202	19.202
	a. Properti terbengkalai	-	-
	b. Aset yang diambil alih	19.190	19.190
	c. Rekening tunda	12	12
	d. Aset antarkantor	-	-



(dalam jutaan Rupiah)

No	Pos-pos	31 Desember 2020	
		Individual	Konsolidasian
17	Aset lainnya	2.617.109	2.866.335
	TOTAL ASET	168.178.044	183.165.978
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1	Giro	15.709.755	15.760.708
2	Tabungan	9.955.853	11.929.298
3	Deposito	65.342.817	73.098.900
4	Uang Elektronik	-	-
5	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-
6	Liabilitas kepada bank lain	6.575.274	6.549.336
7	Liabilitas <i>spot</i> dan derivatif/ <i>forward</i>	887.157	887.157
8	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-	-
9	Liabilitas akseptasi	767.282	767.282
10	Surat berharga yang diterbitkan	993.045	993.045
11	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	37.176.039	37.176.039
12	Setoran jaminan	-	-
13	Liabilitas antarkantor	-	-
14	Liabilitas lainnya	2.462.971	3.039.460
15	Kepentingan minoritas (<i>minority interest</i>)	-	1.749.037
	TOTAL LIABILITAS	139.870.193	151.950.262
EKUITAS			
16	Modal disetor	161.075	161.075
	a. Modal dasar	300.000	300.000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(137.021)	(137.021)
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	(1.904)	(1.904)
17	Tambahan modal disetor	11.168.524	11.134.744
	a. Agio	10.907.723	10.898.210
	b. Disagio -/-	-	-
	c. Dana setoran modal	-	-
	d. Lainnya	260.801	236.534
18	Penghasilan komprehensif lainnya	926.235	946.589
	a. Keuntungan	926.235	946.589
	b. Kerugian -/-	-	-
19	Cadangan	32.596	67.596
	a. Cadangan umum	32.596	67.596
	b. Cadangan tujuan	-	-
20	Laba/rugi	16.019.421	18.905.712
	a. Tahun-tahun lalu	14.625.691	17.156.419
	b. Tahun berjalan	1.393.730	1.749.293
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-	-
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	28.307.851	31.215.716
	TOTAL EKUITAS	28.307.851	31.215.716
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	168.178.044	183.165.978

Permodalan - Fitur Utama Instrumen Permodalan dan Instrumen TLAC-Eligible (CCA)

No.	Pertanyaan	Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan			
		Individual		Konsolidasian	
		Modal Disetor	Pinjaman Subordinasi	Modal Disetor	Pinjaman Subordinasi
1	Penerbit	PT Bank BTPN Tbk	SMBC	PT Bank BTPN Tbk	SMBC
2	Nomor identifikasi	ISIN: 101000118508	N/A	ISIN: 101000118508	N/A
3	Hukum yang digunakan	Hukum Indonesia	Hukum Indonesia	Hukum Indonesia	Hukum Indonesia
3.a	Sarana yang memungkinkan kewajiban pelaksanaan pada Bagian 13 dari Lembar Istilah TLAC tercapai (untuk instrumen TLAC sah lainnya diatur oleh hukum asing)				
	Perlakuan Instrumen berdasarkan ketentuan KPMM				
4	Pada saat masa transisi	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Setelah masa transisi	CET1	T2	CET1	T2
6	Apakah instrumen <i>eligible</i> untuk Individu/Konsolidasi atau Konsolidasi dan Individu	Individu	Individu	Individu	Individu
7	Jenis instrumen	Saham Biasa	Pinjaman Subordinasi	Saham Biasa	Pinjaman Subordinasi
8	Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM	11.068.798	5.522.821	11.059.285	5.522.821
9	Nilai <i>Par</i> dari instrumen	162.979	-	162.979	-
10	Klasifikasi sesuai Standar Akuntansi Keuangan	Ekuitas	Liabilitas – Amortised Cost	Ekuitas	Liabilitas – Amortised Cost
11	Tanggal penerbitan		27 Mar 2003 (USD 50 juta), 5 Sep 2008 (USD 35 juta), 24 Des 2013 (USD 150 juta), 26 Sep 2018 (USD 100 juta), & 23 Nov 2018 (USD 100 juta)	27 Mar 2003 (USD 50 juta), 5 Sep 2008 (USD 35 juta), 24 Des 2013 (USD 150 juta), 26 Sep 2018 (USD 100 juta), & 23 Nov 2018 (USD 100 juta)	
12	Tidak ada jatuh tempo (<i>perpetual</i>) atau dengan jatuh tempo	Perpetual	Dengan Jatuh Tempo	Perpetual	Dengan Jatuh Tempo
13	Tanggal Jatuh tempo	-	27 Mar 2025, 26 Sep 2025, & 21 Nov 2025	-	27 Mar 2025, 26 Sep 2025, & 21 Nov 2025
14	Eksekusi <i>Call Option</i> atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
15	Tanggal <i>call option</i> , jumlah penarikan dan persyaratan <i>call option</i> lainnya (bila ada)	-	N/A	-	N/A
16	<i>Subsequent call option</i>	-	N/A	-	N/A
	Kupon/deviden				
17	Dividen/Kupon dengan bunga tetap atau <i>floating</i>	-	N/A	-	N/A
18	Tingkat dari <i>coupon rate</i> atau indeks lain yang menjadi acuan	-	N/A	-	N/A
19	Ada atau tidaknya <i>dividend stopper</i>	-	N/A	-	N/A
20	<i>Fully discretionary; partial or mandatory</i>	-	N/A	-	N/A
21	Apakah terdapat fitur <i>step up</i> atau insentif lain	-	N/A	-	N/A
22	Non kumulatif atau kumulatif	-	N/A	-	N/A
23	Dapat dikonversi atau tidak dapat dikonversi	Tidak dapat dikonversi	Dalam Pinjaman Subordinasi, terdapat pilihan untuk melakukan Konversi/ <i>Write Down</i> , yang akan diusulkan kepada Kreditor melalui suatu Rencana Aksi pada saat <i>trigger event</i> terjadi dan akan disampaikan kepada OJK	Tidak dapat dikonversi	Dalam Pinjaman Subordinasi, terdapat pilihan untuk melakukan Konversi/ <i>Write Down</i> , yang akan diusulkan kepada Kreditor melalui suatu Rencana Aksi pada saat <i>trigger event</i> terjadi dan akan disampaikan kepada OJK
24	Jika dikonversi, sebutkan <i>trigger point</i> -nya.	-	Rasio CET1 lebih rendah atau sama dengan 5,125% dari ATMR	-	Rasio CET1 lebih rendah atau sama dengan 5,125% dari ATMR



No.	Pertanyaan	Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan			
		Individual		Konsolidasian	
		Modal Disetor	Pinjaman Subordinasi	Modal Disetor	Pinjaman Subordinasi
25	Jika dikonversi, apakah seluruh atau sebagian	-	N/A	-	N/A
26	Jika dikonversi, bagaimana <i>rate</i> konversinya	-	N/A	-	N/A
27	Jika dikonversi; apakah <i>mandatory</i> atau <i>optional</i>	-	N/A	-	N/A
28	Jika dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya	-	N/A	-	N/A
29	Jika dikonversi, sebutkan <i>issuer of instrument it converts into</i>	-	N/A	-	N/A
30	Fitur <i>Write-down</i>	Tidak	Dalam Pinjaman Subordinasi, terdapat pilihan untuk melakukan Konversi/ <i>Write Down</i> , yang akan diusulkan kepada Kreditur melalui suatu Rencana Aksi pada saat trigger event terjadi dan akan disampaikan kepada OJK	Tidak	Dalam Pinjaman Subordinasi, terdapat pilihan untuk melakukan Konversi/ <i>Write Down</i> , yang akan diusulkan kepada Kreditur melalui suatu Rencana Aksi pada saat trigger event terjadi dan akan disampaikan kepada OJK
31	Jika terjadi <i>write-down</i> , sebutkan <i>trigger</i> -nya	-	Rasio CET1 lebih rendah atau sama dengan 5,125% dari ATMR	-	Rasio CET1 lebih rendah atau sama dengan 5,125% dari ATMR
32	Jika terjadi <i>write down</i> , apakah penuh atau sebagian	-	N/A	-	N/A
33	Jika terjadi <i>write down</i> ; <i>permanent</i> atau <i>temporer</i>	-	N/A	-	N/A
34	Jika terjadi <i>write down temporer</i> , jelaskan <i>mechanisme write-up</i>	-	N/A	-	N/A
35	Hierarki instrumen pada saat likuidasi	-	Setelah hutang kepada kreditur dilunasi	-	Setelah hutang kepada kreditur dilunasi
36	Apakah terdapat fitur yang <i>non-compliant</i>	Tidak	N/A	Tidak	N/A
37	Jika Ya, jelaskan fitur yang <i>non-compliant</i>	-	N/A	-	N/A

LAPORAN TOTAL EKSPOSUR DALAM RASIO PENGUNGKIT

(dalam jutaan Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah	
		Individu	Konsolidasi
1	Total aset di neraca pada laporan keuangan publikasi. (nilai gross sebelum dikurangi CKPN)	170.757.362	186.594.786
Penyesuaian:			
2	Penyesuaian untuk nilai investasi pada bank, lembaga keuangan, perusahaan asuransi dan/atau entitas lain berdasarkan standar akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan namun di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	-
3	Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (<i>underlying</i>) yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset yang memenuhi persyaratan jual putus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan OJK mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum. Dalam hal aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (<i>underlying</i>) dimaksud telah dikurangkan dari total aset pada neraca maka angka pada baris ini adalah 0 (nol)."	-	-
4	Penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada).		
5	Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebagai komponen neraca berdasarkan standar akuntansi keuangan namun dikeluarkan dari perhitungan total eksposur dalam Rasio <i>Leverage</i> .		
6	Penyesuaian untuk nilai pembelian dan penjualan aset keuangan secara reguler dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan.	-	-
7	Penyesuaian untuk nilai transaksi <i>cash pooling</i> yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	-	-
8	Penyesuaian untuk nilai eksposur transaksi derivatif.	1.703.505	1.703.505

(dalam jutaan Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah	
		Individu	Konsolidasi
9	Penyesuaian untuk nilai eksposur <i>Securities Financing Transaction</i> (SFT) sebagai contoh transaksi <i>Reverse Repo</i> .	-	-
10	Penyesuaian untuk nilai eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA) yang telah dikalikan dengan Faktor Konversi Kredit (FKK).	21.584.147	21.584.147
11	<i>Prudent valuation adjustments</i> berupa faktor pengurang modal dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).	(4.761.977)	(4.491.929)
12	Penyesuaian lainnya	-	-
Total eksposur dalam perhitungan Rasio Leverage (Penjumlahan baris 1 + baris 2 s.d baris 12)		189.283.037	205.390.509

LAPORAN PERHITUNGAN RASIO PENGUNGKIT

(dalam jutaan Rupiah)

No	Keterangan	Individu		Konsolidasi	
		T	T-1	T	T-1
Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan					
1	Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan termasuk aset jaminan, namun tidak termasuk eksposur transaksi derivatif dan eksposur SFT. (Nilai gross sebelum dikurangi CKPN)	169.840.280	174.078.668	185.677.704	188.952.101
2	Nilai penambahan kembali untuk agunan derivatif yang diserahkan kepada pihak lawan yang mengakibatkan penurunan total eksposur aset dalam neraca karena adanya penerapan standar akuntansi keuangan.	-	-	-	-
3	(Pengurangan atas piutang terkait CVM yang diberikan dalam transaksi derivatif)	-	-	-	-
4	(Penyesuaian untuk nilai tercatat surat berharga yang diterima dalam eksposur SFT yang diakui sebagai aset)	-	-	-	-
5	(CKPN atas aset tersebut sesuai standar akuntansi keuangan)	(2.579.318)	(2.062.659)	(3.428.808)	(2.909.213)
6	(Aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum)	(2.182.659)	(2.169.990)	(1.063.121)	(1.065.375)
7	Total Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan Penjualan dari baris 1 sampai dengan baris 6	165.078.303	169.846.019	181.185.775	184.977.513
Eksposur Transaksi Derivatif					
8	Nilai RC untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat <i>variation margin</i> yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu	1.283.527	1.197.767	1.283.527	1.197.767
9	Nilai penambahan yang merupakan PFE untuk seluruh transaksi derivatif	1.337.060	1.468.686	1.337.060	1.468.686
10	(Pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diselesaikan melalui <i>central counterparty</i> (CCP))	-	-	-	-
11	Penyesuaian untuk nilai nosional yang efektif dari derivatif kredit	-	-	-	-
12	(Penyesuaian untuk nilai nosional efektif yang dilakukan saling hapus dan pengurangan <i>add-on</i> untuk transaksi penjualan derivatif kredit)	-	-	-	-
13	Total Eksposur Transaksi Derivatif Penjualan dari baris 8 sampai dengan baris 12	2.620.587	2.666.453	2.620.587	2.666.453
Eksposur <i>Securities Financing Transaction</i> (SFT)					
14	Nilai tercatat aset SFT secara gross	-	-	-	-
15	(Nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas)	-	-	-	-
16	Resiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT yang mengacu pada perhitungan <i>current exposure</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini	-	-	-	-
17	Eksposur sebagai agen SFT	-	-	-	-
18	Total Eksposur SFT Penjualan dari baris 14 sampai dengan baris 17	-	-	-	-



(dalam jutaan Rupiah)

No	Keterangan	Individu		Konsolidasi	
		T	T-1	T	T-1
Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)					
19	Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi Nilai <i>gross</i> sebelum dikurangi CKPN	107.509.309	99.979.195	107.509.309	99.979.195
20	(Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi dan FKK kemudian dikurangi CKPN)	(85.887.131)	(79.396.840)	(85.887.131)	(79.396.840)
21	(CKPN atas TRA sesuai standar akuntansi keuangan)	(38.031)	(34.824)	(38.031)	(34.824)
22	Total Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan Penjualan dari baris 19 sampai dengan baris 21	21.584.147	20.547.531	21.584.147	20.547.531
Modal dan Total Eksposur					
23	Modal Inti	25.588.377	24.841.573	29.426.916	29.083.754
24	Total Eksposur (7+ 13+ 18 +22)	189.283.037	193.060.003	205.390.509	208.191.497
Rasio Pengungkit					
25	Nilai Rasio pengungkit termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	13,52%	12,87%	14,33%	13,97%
25a	Nilai Rasio Pengungkit tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	13,52%	12,87%	14,33%	13,97%
26	Nilai Minimum Rasio Pengungkit	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
27	Bantalan terhadap nilai Rasio Pengungkit	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengungkapan Nilai Rata-rata					
28	Nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> , setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (<i>sale accounting transaction</i>) yang dihitung secara bersih (<i>nett</i>) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT				
29	Nilai akhir triwulan laporan dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> , setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (<i>sale accounting transaction</i>) yang dihitung secara bersih (<i>nett</i>) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT				
30	Total Eksposur, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> sebagaimana dimaksud dalam baris 28				
30a	Total Eksposur, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> sebagaimana dimaksud dalam baris 28				
31	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> sebagaimana dimaksud dalam baris 28				
31a	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> sebagaimana dimaksud dalam baris 28				

Secara umum, komponen permodalan didominasi oleh modal yang bersifat permanen. Modal inti merupakan unsur terbesar dari modal Bank. Per Desember 2020, posisi rasio total modal terhadap ATMR adalah sebesar 25,55% (konsolidasi). Rasio tersebut jauh di atas ketentuan KPMM minimum dari Otoritas Jasa Keuangan untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 yaitu sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%. Bank juga akan berupaya terus untuk mempertahankan KPMM pada tingkat yang sehat.

Struktur permodalan Bank secara konsolidasi didominasi oleh modal inti (81,0% dari total modal BTPN secara konsolidasi). Permodalan tersebut terdiri dari modal disetor, tambahan modal disetor, dan laba ditahan.

Bank senantiasa melakukan kajian untuk memperkuat tingkat permodalan sesuai kebutuhan apabila kondisi pasar kondusif.

Sumber-sumber permodalan yang diharapkan dapat ditempuh oleh Bank untuk merealisasikan rencana permodalan ataupun memenuhi kebutuhan permodalan Bank adalah berasal dari Laba Ditahan dan tambahan modal dari pemegang saham, baik melalui *right issue* ataupun penawaran umum. Akumulasi Laba Ditahan dipengaruhi oleh besarnya dividen yang dibayarkan Bank kepada para pemegang saham yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam menentukan pembayaran dividen, Bank selalu mempertimbangkan kecukupan modal baik dari segi pemenuhan KPMM maupun pemenuhan BMPK sesuai dengan rencana pertumbuhan kredit di masa depan. Modal Bank diproyeksikan meningkat sejalan dengan akumulasi laba.

B. Kecukupan Modal

Manajemen menggunakan standar rasio permodalan untuk memantau kecukupan modal sesuai dengan standar industri. Pendekatan OJK untuk mengukur modal tersebut terutama didasarkan pada pemantauan kebutuhan modal yang diwajibkan (yang diukur sebesar 8,0% dari aktiva tertimbang menurut risiko) terhadap modal yang tersedia dan Bank secara berkesinambungan menerapkan Proses Penilaian Kecukupan Modal Internal (ICAAP) sesuai peraturan yang berlaku.

Hal itu berkenaan dengan penetapan kecukupan modal sesuai dengan ketentuan profil risiko Bank. Proses ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Bank dalam manajemen risiko.

Bank menggunakan Pendekatan Standar dalam mengelola modal atas risiko kredit. Perhitungan ATMR secara umum dilakukan dengan mengacu pada bobot risiko sesuai dengan ketentuan OJK dan hasil peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang telah ditetapkan oleh pihak regulator.

Sesuai ketentuan BI dan OJK yang berlaku saat ini, Bank mengukur kecukupan modal untuk risiko operasional dengan menggunakan metode Pendekatan Indikator Dasar (PID). Berdasarkan metode tersebut, Bank mengalokasikan modal minimum untuk risiko operasional berdasarkan data historis, yakni sama dengan rata-rata jumlah pendapatan bruto (*gross income*) tahunan selama 3 tahun terakhir (yang positif) dikalikan dengan koefisien alfa yang berlaku, yaitu sebesar 15,0%.

Dalam mengelola risiko pasar, Bank menggunakan metode standar dalam melakukan penghitungan ATMR untuk Risiko Pasar.

Manajemen Bank memiliki pemahaman yang baik dalam mengelola permodalannya, serta memandang perencanaan permodalan sebagai elemen penting untuk mewujudkan tujuan strategis Bank dengan melakukan analisis atas kecukupan modal Bank untuk saat ini dan masa yang akan datang melalui proses perencanaan strategis. Hal ini ditunjukkan dengan mempertahankan kinerja Bank melalui pengawasan yang berkesinambungan terhadap kualitas manajemen risiko, audit berkala oleh Satuan Kerja Audit Internal, kebijakan yang memadai tentang pembagian dividen, serta komitmen manajemen terhadap strategi dan target Bank sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank.

Rasio permodalan Bank dinilai sangat baik, yaitu di atas persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Tren pertumbuhan modal berdasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB) juga menunjukkan kemampuan untuk mendukung ekspansi usaha Bank ke depan.

Demikian pula jika dikaitkan dengan insentif untuk kebutuhan Giro Wajib Minimum (GWM) untuk RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial). Nilai KPMM Bank telah memenuhi ketentuan minimum yang dipersyaratkan OJK, yakni 8,0%-14,0%. Sesuai dengan hasil penilaian mandiri atas profil risiko Bank, rasio KPMM yang diperlukan sesuai Profil Risiko Bank secara Konsolidasi per Desember 2020 adalah 9,25%.



PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO

A. Risiko Kredit

Risiko kredit pada BTPN merupakan prinsip kehati-hatian untuk mencegah risiko yang timbul akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk* dan *settlement risk*.

1. Kerangka Manajemen Risiko Kredit

Pengukuran risiko kredit dilakukan berdasarkan portofolio dan transaksional. Pengukuran tersebut dapat menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif sesuai ketentuan standar dari Bank Indonesia, OJK dan/atau *best practise* yang diadopsi atau model internal yang dikembangkan oleh Bank.

Pengukuran risiko kredit, antara lain dilakukan melalui: peringkat risiko dan *stress test*.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Kebijakan perkreditan BTPN mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 mengenai Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum. Kebijakan kredit merupakan pedoman dalam pelaksanaan proses kredit yang dilakukan oleh Bank. Bank senantiasa melakukan kaji ulang atas kebijakan dan prosedur secara berkala, terutama jika terdapat perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan dan/atau pendekatan bisnis.

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan manajemen risiko kredit yang sesuai dengan standar global sebagai Bank yang aktif secara internasional dan menjalankan kredit secara wajar dan terorganisir demi budaya kredit Bank yang lebih baik.

Bank dikategorikan sebagai salah satu bank sistemik di Indonesia. Oleh karena itu, Bank telah menyusun Laporan Rencana Pemulihan (*Recovery Plan Document*), termasuk aspek kualitas aset. Rencana pemulihan tersebut mengidentifikasi pilihan-pilihan untuk memulihkan kekuatan dan kelayakan finansial jika Bank menghadapi tekanan yang berat, terutama dalam hal kualitas aset.

Bank secara aktif terus mengelola dan mengawasi penerapan manajemen risiko dan secara efektif melakukan penyempurnaan kebijakan, prosedur dan pengembangan sistem manajemen risiko.

Selain menetapkan kebijakan dan prosedur, Bank juga menetapkan batasan (limit) untuk menjaga agar eksposur risiko kredit sesuai dengan risk appetite Bank. Limit tersebut antara lain meliputi limit untuk kewenangan pengambilan keputusan kredit yang disesuaikan dengan kompetensi pengambil keputusan dan tingkat risikonya serta memastikan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam proses kredit yang diberikan kepada nasabah. Sementara itu, penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK yaitu POJK No. 32/POJK.03/2018 berikut perubahannya pada POJK No. 38/POJK/.03/2019 dengan memperhatikan peraturan terkini.

Bank mengelola, dan mengendalikan konsentrasi risiko kredit di mana pun risiko tersebut teridentifikasi khususnya, terhadap debitur individu dan kelompok, dan industri serta sektor geografis.

Sistem Informasi Manajemen yang tersedia mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap perkembangan yang kurang baik sedini mungkin sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan secara tepat waktu untuk memperbaiki kualitas kredit yang menurun atau untuk meminimalisasi kerugian kredit.

Bank dengan seksama memantau perkembangan portofolio kredit yang memungkinkan Bank untuk melakukan tindakan pencegahan secara tepat waktu apabila terjadi penurunan kualitas kredit, dengan melakukan deteksi dini terhadap permasalahan dan melakukan pemantauan yang ketat.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Kerangka kerja Risiko Kredit BTPN diimplementasikan melalui proses terintegrasi dan terdiri dari proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian/mitigasi risiko.

Proses identifikasi risiko kredit antara lain dilakukan mulai dari penentuan sektor industri atau segmen nasabah yang akan dibiayai, melakukan analisis atas pengajuan kredit nasabah serta analisis atas produk dan aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko kredit dengan melakukan kajian risiko terhadap Program Produk Kredit. Berdasarkan proses identifikasi risiko kredit tersebut, Bank melakukan pengukuran atas risiko kredit dengan menggunakan indikator utama yang menunjukkan kualitas kredit debitur, seperti rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) dan secara berkala mengukur kualitas aset berkualitas rendah serta melakukan pengawasan terhadap debitur yang termasuk dalam *watchlist account*.

Sebagai bagian dari pengukuran risiko kredit, *stress testing* dilakukan untuk menilai ketahanan Bank dalam menghadapi kondisi ekstrem.

Sistem pengukuran risiko kredit harus mempertimbangkan karakteristik produk, jangka waktu, aspek jaminan, potensi gagal bayar (*default*), dan kemampuan Bank untuk menyerap potensi kegagalan serta melakukan kuantifikasi, antara lain atas komposisi portofolio aset meliputi jenis, fitur eksposur, pertumbuhan kredit, kecukupan pencadangan, tingkat konsentrasi dan kualitas penyediaan dana, termasuk tingkat aset bermasalah dan aset yang telah diambil alih, serta *mark to market* pada transaksi risiko kredit tertentu. Bank melakukan pemantauan atas eksposur risiko kredit aktual dibandingkan limit risiko kredit, memantau pengelolaan kredit yang bermasalah serta memantau kesesuaian antara kebijakan dengan penerapan manajemen risiko kredit.

Pengembangan sistem informasi manajemen dilakukan secara berkesinambungan untuk dapat menyajikan informasi risiko kredit secara berkala.

4. **Sistem Pengendalian Internal atas Risiko Kredit**
Sistem Pengendalian Internal dilakukan untuk mengelola risiko yang membahayakan kelangsungan usaha Bank. Contohnya adalah penerapan prosedur penanganan kredit bermasalah yang efektif dengan memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah dari fungsi pemutus kredit.

Hasil dari penanganan kredit yang bermasalah harus didokumentasikan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyalurkan atau merestrukturisasi kredit.

Risiko kredit juga dapat dikendalikan melalui mitigasi risiko, pengelolaan posisi dan risiko portofolio secara aktif dan penetapan target batasan risiko konsentrasi.

5. **Kebijakan Pengelolaan Risiko Konsentrasi Kredit**
Bank melakukan pengelolaan risiko konsentrasi kredit dengan melakukan pemantauan antara lain untuk eksposur sektor industri, jenis kredit tertentu serta eksposur perorangan dan grup usaha.
6. **Definisi Tagihan yang Melewati Jatuh Tempo**
Tagihan yang telah melewati jatuh tempo adalah seluruh tagihan yang telah tertunggak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga.
7. **Definisi Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai**
Bank melakukan evaluasi atas aset keuangan/kelompok aset keuangan yang mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal neraca. Tagihan yang mengalami penurunan nilai/*impairment* ditentukan berdasarkan aset keuangan/kelompok aset keuangan yang jika terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan). Peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara akurat.



8. Pendekatan untuk Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Dalam mengestimasi cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan, Bank telah menerapkan PSAK 71 sejak tanggal 1 Januari 2020. PSAK 71 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian (ECL 12 bulan) atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (ECL *lifetime*). ECL *lifetime* adalah kerugian ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan ECL 12 bulan adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit (yaitu nilai kini dari seluruh kekurangan kas) selama perkiraan umur instrumen keuangan. Kekurangan kas adalah selisih antara arus kas yang diperkirakan akan diterima entitas. Karena kerugian kredit ekspektasian mempertimbangkan jumlah dan waktu pembayaran, kerugian kredit tetap timbul meskipun entitas mengharapkan untuk dibayar penuh namun setelah jatuh tempo.

Kerugian kredit ekspektasian atau *Expected Credit Loss* ("ECL") diakui untuk seluruh instrumen utang keuangan, komitmen pinjaman dan jaminan keuangan yang diklasifikasikan sebagai *hold to collect* atau *hold to collect and sell* dan memiliki arus kas SPPI. ECL tidak diakui untuk instrumen keuangan yang ditetapkan sebagai FVTPL dan instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai FVOCI.

Estimasi eksposur kredit untuk tujuan manajemen risiko adalah kompleks dan membutuhkan penggunaan model, dikarenakan eksposur yang bervariasi terkait dengan perubahan kondisi pasar, arus kas yang diharapkan dan berjalannya waktu. Penilaian risiko kredit dari portofolio aset memerlukan estimasi lebih lanjut mengenai kemungkinan terjadinya gagal bayar, dari rasio kerugian yang terkait dan korelasi gagal bayar antar pihak. Bank mengukur risiko kredit menggunakan *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD), *Loss Given Default* (LGD) dan variabel makroekonomi untuk estimasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*).

Sesuai PSAK 71, Bank menerapkan model "Tiga-Tahap" untuk penurunan nilai berdasarkan perubahan kualitas kredit sejak pengakuan awal seperti dirangkum di bawah ini:

- Instrumen keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai kredit sejak pengakuan awal diklasifikasikan dalam "Tahap 1".
- Jika peningkatan signifikan dalam risiko kredit ("SICR") sejak pengakuan awal diidentifikasi, instrumen keuangan dipindahkan ke "Tahap 2" tetapi belum dianggap mengalami penurunan nilai kredit.
- Jika instrumen keuangan mengalami penurunan nilai kredit, instrumen keuangan kemudian dipindahkan ke "Tahap 3"

PSAK 71 tidak berlaku terhadap Entitas Anak yang merupakan suatu entitas berbasis Syariah.

9. Pengungkapan Kuantitatif Risiko Kredit

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individual

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020						Total
		Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah						
		Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan & Sulawesi	Luar Negeri		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Tagihan kepada Pemerintah	30.515.454	-	-	-	-	30.515.454	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	12.531.332	-	2.588.101	-	2.767	15.122.200	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	2.848.661	-	-	-	940.816	3.789.477	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	99	117	-	128	-	344	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	15.311.937	1.856.571	7.691.761	7.298.647	-	32.158.916	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1.334.555	47.654	417.547	183.268	-	1.983.024	
9	Tagihan kepada Korporasi	80.533.772	219.133	6.125.104	4.923.565	282.435	92.084.009	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	204.258	7.632	110.837	52.107	-	374.834	
11	Aset Lainnya	5.736.530	-	-	-	-	5.736.530	
	Total	149.016.598	2.131.107	16.933.350	12.457.715	1.226.018	181.764.788	

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020						Total
		Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah						
		Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan & Sulawesi	Luar Negeri		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Tagihan kepada Pemerintah	35.969.438	-	-	-	-	35.969.438	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	12.709.545	-	2.588.101	-	2.767	15.300.413	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	3.096.720	-	-	-	940.816	4.037.536	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	99	117	-	128	-	344	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	15.311.937	1.856.571	7.691.761	7.298.647	-	32.158.916	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	7.428.796	361.046	2.406.560	537.170	-	10.733.572	
9	Tagihan kepada Korporasi	80.542.004	219.133	6.125.104	4.923.565	282.435	92.092.241	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	206.037	7.751	111.184	52.206	-	377.178	
11	Aset Lainnya	6.785.044	42.549	334.912	68.856	-	7.231.361	
	Total	162.049.620	2.487.167	19.257.622	12.880.572	1.226.018	197.900.999	



31 Desember 2019						
Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah						
Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan & Sulawesi	Luar Negeri	Total	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
21.963.565	-	-	-	-	21.963.565	
9.157.858	-	998.700	-	61.966	10.218.524	
-	-	-	-	-	-	
2.023.573	-	-	-	925.895	2.949.469	
105	264	-	-	-	369	
-	-	-	-	-	-	
18.202.810	2.449.881	7.284.261	7.731.183	-	35.668.135	
3.453.269	137.660	917.016	446.301	-	4.954.246	
74.027.155	7.995.466	9.436.228	5.260.281	452.940	97.172.070	
292.362	9.732	107.243	64.651	-	473.988	
6.036.467	-	-	-	-	6.036.467	
135.157.164	10.593.003	18.743.448	13.502.416	1.440.801	179.436.832	

31 Desember 2019						
Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah						
Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan & Sulawesi	Luar Negeri	Total	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
26.980.247	-	-	-	-	26.980.247	
9.281.177	-	998.700	-	61.966	10.341.843	
-	-	-	-	-	-	
2.190.440	-	-	-	925.895	3.116.336	
105	264	-	-	-	369	
-	-	-	-	-	-	
18.202.810	2.449.881	7.284.261	7.731.183	-	35.668.135	
9.580.392	420.844	2.919.084	778.931	-	13.699.251	
74.055.992	7.995.466	9.436.228	5.260.281	452.940	97.200.907	
309.297	10.848	110.782	66.274	-	497.201	
6.860.325	33.424	164.542	45.622	-	7.103.913	
147.460.785	10.910.727	20.913.597	13.882.291	1.440.801	194.608.201	

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank Secara Individual

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020						Total
		Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka waktu						
		<1 Tahun	1-3 Tahun	3-5 Tahun	>5 Tahun	Tanpa Kontrak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Tagihan kepada Pemerintah	30.515.454	-	-	-	-	30.515.454	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	2.974.568	4.549.720	7.273.431	324.481	-	15.122.200	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	1.692.431	1.000.483	636.217	40.842	419.504	3.789.477	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	117	227	-	-	-	344	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	23.034.449	9.124.467	-	-	-	32.158.916	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1.981.670	1.354	-	-	-	1.983.024	
9	Tagihan kepada Korporasi	32.075.501	32.257.635	15.132.929	12.617.944	-	92.084.009	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	323.969	50.865	-	-	-	374.834	
11	Aset Lainnya	5.736.530	-	-	-	-	5.736.530	
	Total	98.334.689	46.984.751	23.042.577	12.983.267	419.504	181.764.788	

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020						Total
		Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka waktu						
		<1 Tahun	1-3 Tahun	3-5 Tahun	>5 Tahun	Tanpa Kontrak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Tagihan kepada Pemerintah	34.523.281	688.968	378.718	-	378.471	35.969.438	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	3.152.781	4.549.720	7.273.431	324.481	-	15.300.413	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	1.692.431	1.000.483	636.217	40.842	667.563	4.037.536	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	117	227	-	-	-	344	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	23.034.449	9.124.467	-	-	-	32.158.916	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	8.256.826	2.476.746	-	-	-	10.733.572	
9	Tagihan kepada Korporasi	32.078.108	32.263.260	15.132.929	12.617.944	-	92.092.241	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	326.206	50.972	-	-	-	377.178	
11	Aset Lainnya	5.736.530	-	-	-	1.494.831	7.231.361	
	Total	108.800.729	50.154.843	23.421.295	12.983.267	2.540.865	197.900.999	



31 Desember 2019						
Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka waktu						
	<1 Tahun	1-3 Tahun	3-5 Tahun	>5 Tahun	Tanpa Kontrak	Total
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	21.963.565	-	-	-	-	21.963.565
	1.894.538	2.571.810	5.349.945	402.231	-	10.218.524
	-	-	-	-	-	-
	1.649.934	408.388	134.587	4.796	751.764	2.949.469
	129	240	-	-	-	369
	-	-	-	-	-	-
	24.686.079	10.982.057	-	-	-	35.668.136
	4.922.424	31.822	-	-	-	4.954.246
	22.675.815	41.901.690	19.228.307	13.366.257	-	97.172.070
	426.417	47.571	-	-	-	473.988
	6.036.466	-	-	-	-	6.036.466
	84.255.367	55.943.578	24.712.839	13.773.284	751.764	179.436.832

31 Desember 2019						
Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka waktu						
	<1 Tahun	1-3 Tahun	3-5 Tahun	>5 Tahun	Tanpa Kontrak	Total
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	25.825.934	429.779	266.132	458.402	-	26.980.247
	2.017.857	2.571.810	5.349.945	402.231	-	10.341.843
	-	-	-	-	-	-
	1.649.934	408.388	134.587	171.663	751.764	3.116.336
	129	240	-	-	-	369
	-	-	-	-	-	-
	24.686.079	10.982.057	-	-	-	35.668.136
	11.390.546	2.308.705	-	-	-	13.699.251
	22.699.702	41.906.640	19.228.307	13.366.257	-	97.200.907
	449.050	48.151	-	-	-	497.201
	6.036.467	-	-	1.067.445	-	7.103.912
	94.755.698	58.655.770	24.978.971	15.465.998	751.764	194.608.201

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individual

No	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Desember 2020					
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	1.232.597	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
3	Industri pengolahan	-	2.183.074	-	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	6.005.363	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	4.780.186	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	750.000	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	19.604.666	170.956	-	3.389.752
12	Real Estat	-	24	-	-
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
16	Pendidikan	-	-	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
22	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-
23	Lainnya	10.910.788	-	-	399.725
	Total	30.515.454	15.122.200	-	3.789.477
Desember 2019					
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	499.364	-	-
3	Industri pengolahan	-	1.246.636	-	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	3.548.021	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	4.895.253	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	29.250	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	20.141.722	-	-	2.750.265
12	Real Estat	-	-	-	-
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
16	Pendidikan	-	-	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
22	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-
23	Lainnya	1.821.843	-	-	199.204
	Total	21.963.565	10.218.524	-	2.949.469



(dalam jutaan Rupiah)

	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	-	-	46.018	74.371	2.924.782	515	-
	-	-	-	887	2.651.773	-	-
	-	-	6.378	108.874	31.838.494	58.659	-
	-	-	99	473	1.393.051	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	5.674	1.492.116	19.968	-
	-	-	45.521	416.703	16.190.596	134.167	-
	-	-	-	-	9.072.486	-	-
	-	-	16.244	53.927	132.076	695	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	12.180	2.632	19.216.855	1.122	-
	-	-	-	-	6.452.398	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	999	74	-	-
	-	-	81	14.966	1.433	366	-
	-	-	-	155.413	86.013	7.135	-
	-	-	-	-	56.058	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	344	-	32.031.041	964.032	5.344	144.784	-
	-	-	1.207	3.134	560.010	3.475	-
	-	-	147	180.389	-	3.948	-
	-	-	-	550	10.450	-	5.736.530
	344	-	32.158.916	1.983.024	92.084.009	374.834	5.736.530
	-	-	58.026	120.665	3.285.647	1.562	-
	-	-	-	750	2.311.375	-	-
	-	-	8.453	184.926	34.670.391	83.048	-
	-	-	109	605	1.948.789	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	116	3.628	1.829.492	18.069	-
	-	-	56.863	759.407	14.739.302	158.017	-
	-	-	-	-	7.782.362	-	-
	-	-	20.374	90.737	137.316	1.630	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	20.778.076	-	-
	-	-	15.504	4.391	8.878.235	2.421	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1.485	812	-	-
	-	-	96	29.362	2.895	185	-
	-	-	21	259.200	142.357	4.830	-
	-	-	-	-	-	-	-
	369	-	35.507.171	2.494.193	5.966	167.754	-
	-	-	1.403	-	-	-	-
	-	-	-	1.000.067	-	19.878	-
	-	-	-	4.830	659.055	16.594	6.036.466
	369	-	35.668.136	4.954.246	97.172.070	473.988	6.036.466

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Desember 2020					
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	1.232.597	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
3	Industri pengolahan	-	2.183.074	-	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	6.005.363	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	4.780.186	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	750.000	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	19.604.666	170.956	-	3.389.752
12	Real Estat	-	24	-	-
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
16	Pendidikan	-	-	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
22	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-
23	Lainnya	16.364.772	178.213	-	647.784
	Total	35.969.438	15.300.413	-	4.037.536
Desember 2019					
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	499.364	-	-
3	Industri pengolahan	-	1.246.636	-	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	3.548.021	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	4.895.253	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	29.250	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	20.141.722	-	-	2.750.265
12	Real Estat	-	-	-	-
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
16	Pendidikan	-	-	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
22	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-
23	Lainnya	6.838.525	123.319	-	366.071
	Total	26.980.247	10.341.843	-	3.116.336



(dalam jutaan Rupiah)

	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	-	-	46.018	717.323	2.924.782	657	-
	-	-	-	3.146	2.651.773	1	-
	-	-	6.378	341.930	31.838.494	58.706	-
	-	-	99	473	1.393.051	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	5.674	1.492.116	19.968	-
	-	-	45.521	7.700.795	16.190.596	136.139	-
	-	-	-	10.706	9.072.486	6	-
	-	-	16.244	183.229	132.076	758	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	12.180	2.912	19.225.087	1.122	-
	-	-	-	3.956	6.452.398	1	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	999	74	-	-
	-	-	81	14.966	1.433	366	-
	-	-	-	157.713	86.013	7.136	-
	-	-	-	34.879	56.058	12	-
	-	-	-	-	-	-	-
	344	-	32.031.041	1.369.403	5.344	144.883	-
	-	-	1.207	3.134	560.010	3.475	-
	-	-	147	180.453	-	3.948	-
	-	-	-	1.881	10.450	-	7.231.361
	344	-	32.158.916	10.733.572	92.092.241	377.178	7.231.361
	-	-	58.026	793.719	3.285.647	2.618	-
	-	-	-	4.930	2.311.375	5	-
	-	-	8.453	516.068	34.670.390	83.917	-
	-	-	109	605	1.948.789	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	116	3.628	1.829.492	18.069	-
	-	-	56.863	7.439.711	14.739.302	176.796	-
	-	-	-	26.556	7.782.362	63	-
	-	-	20.374	267.415	137.316	2.248	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	802	20.806.914	-	-
	-	-	15.504	10.543	8.878.235	2.435	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1.485	812	-	-
	-	-	96	32.598	2.895	201	-
	-	-	21	302.218	142.357	4.943	-
	-	-	-	-	-	-	-
	369	-	35.507.171	3.287.389	5.966	169.393	-
	-	-	1.403	-	-	-	-
	-	-	-	1.000.137	-	19.878	-
	-	-	-	11.447	659.055	16.635	7.103.912
	369	-	35.668.136	13.699.251	97.200.907	497.201	7.103.912

Tabel Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individual

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020						Total
		Wilayah						
		Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan & Sulawesi	Luar Negeri	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Tagihan	135.570.932	2.139.866	16.328.283	12.519.933	849.388	167.408.402	
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (Stage 2 dan 3)							
	a. Belum jatuh tempo	731.635	15.665	222.929	101.993	-	1.072.222	
	b. Telah jatuh tempo	157.535	8	5.425	8.376	-	171.344	
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1	433.631	45.224	87.947	111.793	50	678.645	
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	498.933	83.697	216.105	41.808	-	840.603	
5	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3	844.946	65.142	136.156	51.857	-	1.098.101	
6	Tagihan yang dihapus buku	3.161.546	277.531	1.152.052	354.082	-	4.945.211	

Tabel Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan berdasarkan Wilayah - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020						Total
		Wilayah						
		Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan & Sulawesi	Luar Negeri	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Tagihan	149.254.810	2.523.628	18.792.133	12.974.144	849.388	184.394.103	
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (Stage 2 dan 3)							
	a. Belum jatuh tempo	731.635	15.665	222.929	101.993	-	1.072.222	
	b. Telah jatuh tempo	291.461	6.897	39.319	15.752	-	353.429	
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1	1.084.487	72.927	227.525	143.146	50	1.528.135	
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	498.993	83.697	216.105	41.808	-	840.603	
5	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3	844.946	65.142	136.156	51.857	-	1.098.101	
6	Tagihan yang dihapus buku	3.837.698	327.298	1.330.794	433.998	-	5.929.788	



31 Desember 2019						
Wilayah						
Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan & Sulawesi	Luar Negeri	Total	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
129.514.518	2.876.028	18.775.197	13.568.928	870.726	165.605.396	
759.895	20.421	183.322	132.860	-	1.096.498	
21.094	26	15	100	-	21.235	
2.495.551	260.944	1.136.619	333.482	-	4.226.596	

31 Desember 2019						
Wilayah						
Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan & Sulawesi	Luar Negeri	Total	
(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	
142.024.112	3.206.552	21.002.664	13.964.832	870.726	181.068.885	
-	-	-	-	-	-	
759.895	20.421	183.322	132.860	-	1.096.498	
108.890	5.244	20.706	9.065	-	143.905	
2.970.130	292.799	1.270.365	395.672	-	4.928.966	

Tabel Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individual

(dalam jutaan Rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3	Tagihan yang Dihapus Buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Desember 2020								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.278.244	821	-	11.045	2.080	898	21.333
2	Pertambangan dan Penggalian	1.909.472	-	-	1.864	8.145	-	5.814
3	Industri pengolahan	28.768.586	116.932	55.363	122.015	123.946	154.466	385.163
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	6.065.418	-	-	1.701	-	-	2.195
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	6.196.394	28.937	3.000	14.578	182.361	16.925	77.314
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	15.875.335	325.177	86.836	291.702	272.021	372.902	739.245
8	Pengangkutan dan Pergudangan	8.069.801	2.761	25.977	19.375	15.398	40.057	60.576
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	210.015	1.054	-	5.810	10.419	8.154	21.382
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	40.063.085	60.295	-	11.389	82.525	113.038	124.179
12	Real Estat	4.492.743	168.308	-	16.095	27.305	170.943	49.194
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.073	-	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	16.846	-	-	19	8	183	109
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	248.742	547	-	758	914	574	1.734
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	60.590	11.667	-	7.313	7.463	7.098	25.768
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	33.352.703	326.175	168	174.981	108.018	212.863	3.393.759
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	567.826	-	-	-	-	-	-
22	Bukan Lapangan Usaha	184.484	29.548	-	-	-	-	37.447
23	Lainnya	17.047.045	-	-	-	-	-	-
	Total	167.408.402	1.072.222	171.344	678.645	840.603	1.098.101	4.945.211
Desember 2019								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.062.071	2.357	-	-	-	-	20.429
2	Pertambangan dan Penggalian	2.071.157	-	-	-	-	-	8.093
3	Industri pengolahan	31.077.983	135.518	8.059	-	-	-	297.714
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	4.450.519	-	-	-	-	-	2.523
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	6.502.458	39.819	-	-	-	-	61.585
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	15.268.553	254.353	8.002	-	-	-	623.329
8	Pengangkutan dan Pergudangan	7.262.381	36.852	-	-	-	-	51.862
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	269.815	8.926	5.000	-	-	-	19.832
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	41.241.045	-	-	-	-	-	168.518
12	Real Estat	5.807.520	210.329	-	-	-	-	45.268
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	2.297	-	-	-	-	-	169
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	32.613	260	-	-	-	-	2.397
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	408.654	7.075	-	-	-	-	27.288
19	Aktivitas Jasa Lainnya	1.403	-	-	-	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	38.388.989	351.033	174	-	-	-	2.820.411
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
22	Bukan Lapangan Usaha	1.019.944	49.976	-	-	-	-	77.179
23	Lainnya	8.737.993	-	-	-	-	-	-
	Total	165.605.396	1.096.498	21.235	-	-	-	4.226.596



Tabel Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3	Tagihan yang Dihapus Buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Desember 2020								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.978.969	821	11.482	68.676	2.080	898	53.784
2	Pertambangan dan Penggalian	1.912.015	-	60	2.147	8.145	-	6.086
3	Industri pengolahan	29.028.114	116.932	61.934	148.439	123.946	154.466	422.061
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	6.065.418	-	-	1.701	-	-	2.195
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	6.196.394	28.937	3.000	14.578	182.361	16.925	77.314
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	23.851.094	325.177	229.284	981.396	272.021	372.902	1.562.033
8	Pengangkutan dan Pergudangan	8.082.109	2.761	26.418	20.972	15.398	40.057	62.629
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	356.608	1.054	4.828	23.039	10.419	8.154	51.162
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	40.071.691	60.295	-	11.483	82.525	113.038	124.179
12	Real Estat	4.497.274	168.308	105	16.669	27.305	170.943	50.146
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.073	-	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	16.846	-	-	19	8	183	109
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	251.307	547	45	1.022	914	574	2.012
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	99.824	11.667	1.002	11.657	7.463	7.098	29.042
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	55
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	33.809.064	326.175	15.133	225.871	108.018	212.863	3.448.929
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	567.826	-	-	-	-	-	-
22	Bukan Lapangan Usaha	184.548	29.548	-	-	-	-	38.053
23	Lainnya	24.423.929	-	138	466	-	-	-
	Total	184.394.103	1.072.222	353.429	1.528.135	840.603	1.098.101	5.929.788
Desember 2019								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.753.394	2.357	5.610	-	-	-	40.639
2	Pertambangan dan Penggalian	2.075.474	-	19	-	-	-	8.223
3	Industri pengolahan	31.421.213	135.518	12.474	-	-	-	322.808
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	4.450.519	-	-	-	-	-	2.523
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	6.502.458	39.819	-	-	-	-	61.585
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	22.195.996	254.353	107.878	-	-	-	1.225.771
8	Pengangkutan dan Pergudangan	7.289.780	36.852	293	-	-	-	53.188
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	453.999	8.926	8.231	-	-	-	42.135
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	41.270.984	-	-	-	-	-	168.518
12	Real Estat	5.813.923	210.329	96	-	-	-	45.963
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	2.297	-	-	-	-	-	169
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	36.002	260	72	-	-	-	2.539
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	453.332	7.075	690	-	-	-	29.020
19	Aktivitas Jasa Lainnya	1.403	-	-	-	-	-	56
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	39.208.779	351.033	8.340	-	-	-	2.848.580
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
22	Bukan Lapangan Usaha	1.020.014	49.976	-	-	-	-	77.179
23	Lainnya	15.119.317	-	202	-	-	-	70
	Total	181.068.885	1.096.498	143.905	-	-	-	4.928.966

Tabel Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank Secara Individual

(dalam jutaan Rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
		CKPN Stage 1	CKPN Stage 2	CKPN Stage 3	CKPN Stage 1	CKPN Stage 2	CKPN Stage 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
1	Saldo awal CKPN	(742.764)	(299.069)	(630.487)			
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)						
a.	Pembentukan CKPN pada periode berjalan	(2.506)	(541.534)	(1.562.458)			
b.	Pemulihan CKPN pada periode berjalan	66.625	-	-			
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	-	-	1.205.498			
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	-	(110.654)			
	Saldo Akhir	(678.645)	(840.603)	(1.098.101)			

Tabel Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
		CKPN Stage 1	CKPN Stage 2	CKPN Stage 3	CKPN Stage 1	CKPN Stage 2	CKPN Stage 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Saldo awal CKPN	(1.034.883)	(299.069)	(630.487)			
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)						
a.	Pembentukan CKPN pada periode berjalan	(794.200)	(541.534)	(1.562.458)			
b.	Pemulihan CKPN pada periode berjalan	4.176	-	-			
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	296.772	-	1.205.498			
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	-	(110.654)			
	Saldo Akhir	(1.528.135)	(840.603)	(1.098.101)			



10. Pengungkapan Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Dalam menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit, Bank menggunakan pendekatan standar yang sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku, yaitu SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

Dengan pendekatan standar tersebut bobot risiko ditetapkan berdasarkan peringkat debitur atau pihak lawan, sesuai kategori portofolio atau persentase tertentu untuk jenis tagihan tertentu. Portofolio kelompok tagihan dibagi dalam kategori

tagihan kepada pemerintah, tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional, kredit beragun rumah tinggal, kredit beragun properti komersial, tagihan kepada entitas sektor publik, tagihan kepada bank, tagihan kepada pegawai dan pensiun, tagihan kepada usaha mikro, kecil dan portofolio ritel, tagihan kepada korporasi dan tagihan yang telah jatuh tempo.

Bobot risiko ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Regulator. Apabila terdapat tagihan yang telah memiliki peringkat, maka Bank menggunakan lembaga pemeringkat yang diakui oleh Regulator.

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individual

No	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat			
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-
		(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tagihan kepada Pemerintah		9.165	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik		852.031	222.450	4.719.004
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-
4	Tagihan kepada Bank		413.523	356.160	774.242
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal				
6	Kredit Beragun Properti Komersial				
7	Kredit Pegawai/Pensiunan				
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel				
9	Tagihan kepada Korporasi		1.600.180	6.105.882	3.494.516
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo				
11	Aset Lainnya				
	Total		2.874.899	6.684.492	8.987.762

No	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat			
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-
		(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tagihan kepada Pemerintah		56.557	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik		102.667	299.564	4.629.828
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-
4	Tagihan kepada Bank		216.116	812.153	1.077.154
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal				
6	Kredit Beragun Properti Komersial				
7	Kredit Pegawai/Pensiunan				
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel				
9	Tagihan kepada Korporasi		275.000	7.233.430	1.762.879
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo				
11	Aset Lainnya				
	Total		650.341	8.345.147	7.469.861



31 Desember 2020									
Tagihan Bersih									
Peringkat Jangka Panjang				Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	(16)
BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.506.289
5.903.331	-	-	2.722.047	-	-	-	-	-	703.337
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.365.950	497.666	-	-	-	-	-	-	-	381.936
									344
									-
									32.158.916
									1.983.024
1.612.766	298.563	591.824	36.163	-	-	-	-	-	78.344.115
									374.834
									5.736.530
8.882.047	796.229	591.824	2.758.210	-	-	-	-	-	150.189.325

31 Desember 2019									
Tagihan Bersih									
Peringkat Jangka Panjang				Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	(16)
BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.907.008
-	499.364	-	-	-	-	-	-	-	4.687.101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92.383	144.499	-	-	-	-	-	-	-	607.163
									369
									-
									35.668.135
									4.954.246
1.129.489	634.239	194.314	-	-	-	-	-	-	85.942.719
									473.988
									6.036.467
1.221.872	1.278.102	194.314	-	-	-	-	-	-	160.277.195

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat			
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-
		(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tagihan kepada Pemerintah		9.165	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik		852.031	222.450	4.897.217
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-
4	Tagihan kepada Bank		582.577	356.160	774.242
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal				
6	Kredit Beragun Properti Komersial				
7	Kredit Pegawai/Pensiunan				
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel				
9	Tagihan kepada Korporasi		1.600.180	6.105.882	3.494.516
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo				
11	Aset Lainnya				
	Total		3.043.953	6.684.492	9.165.975

No	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat			
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-
		(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tagihan kepada Pemerintah		56.557	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik		102.667	299.564	4.753.147
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-
4	Tagihan kepada Bank		303.878	812.153	1.077.154
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal				
6	Kredit Beragun Properti Komersial				
7	Kredit Pegawai/Pensiunan				
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel				
9	Tagihan kepada Korporasi		275.000	7.233.430	1.762.879
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo				
11	Aset Lainnya				
	Total		738.103	8.345.147	7.593.180



31 Desember 2020									
Tagihan Bersih									
Peringkat Jangka Panjang				Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	
BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.960.273
5.903.331	-	-	2.722.047	-	-	-	-	-	703.337
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.365.950	497.666	-	-	5	-	-	-	-	460.936
									344
									-
									32.158.916
									10.733.572
1.612.766	298.563	591.824	36.163	-	-	-	-	-	78.352.347
									377.178
									7.231.361
8.882.047	796.229	591.824	2.758.210	5	-	-	-	-	165.978.264

31 Desember 2019									
Tagihan Bersih									
Peringkat Jangka Panjang				Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	
BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.923.690
-	499.364	-	-	-	-	-	-	-	4.687.101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92.383	144.499	-	-	105	-	-	-	-	686.163
									369
									-
									35.668.135
									13.699.251
1.129.489	634.239	194.314	-	-	-	-	-	-	85.971.556
									497.201
									7.103.913
1.221.872	1.278.102	194.314	-	105	-	-	-	-	175.237.378

11. Pengungkapan Risiko Kredit Counterparty

Risiko kredit *counterparty* bagi Bank adalah risiko yang timbul dari kegagalan pembayaran *counterparty* atas suatu kontrak dengan pihak Bank yang menyebabkan potensi kerugian bagi bank untuk menggantikan kontrak tersebut.

Counterparty credit risk pada umumnya timbul dari FX swap dan transaksi *repo/reverse repo*. Mitigasi *counterparty credit risk* dilakukan sesuai SE OJK No 42/SEOJK.03/2016, yaitu dengan pengakuan keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit dan dilengkapi dengan kebijakan Bank untuk mengelola risiko kredit dari *counterparty*.

Eksposur risiko kredit *counterparty* per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel Analisis Eksposur *Counterparty Credit Risk* (CCR1)

No		Replacement Cost (RC)	Potential Future Exposure (PFE)	EEPE	Alpha Digunakan untuk Perhitungan Regulatory EAD	Tagihan Bersih	ATMR
1	SA-CCR (untuk derivatif)	916.804.655.741	955.042.811.627		1,4	2.620.586.454.315	
2	Metode Internal Model (untuk derivatif dan SFT)					N/A	N/A
3	Pendekatan sederhana untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					N/A	N/A
4	Pendekatan komprehensif untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)						
5	VaR untuk SFT					N/A	N/A
Total							

Tabel CCR2: *Capital Charge* untuk *Credit Valuation Adjustment* (CVA)

No		Tagihan bersih	ATMR
1	Total portfolios berdasarkan <i>Advanced CVA capital charge</i>	N/A	N/A
2	(i) komponen VaR (termasuk 3x multiplier)		N/A
3	(ii) komponen <i>Stressed VaR</i> (termasuk 3x multiplier)		N/A
4	Semua Portfolio sesuai <i>Standardised CVA Capital Charge</i>	902.512.479.573	
Total sesuai CVA Capital Charge		902.512.479.573	



Tabel Eksposur CCR berdasarkan Kategori Portofolio dan Bobot Risiko (CCR3)

Kategori Portofolio	0%	10%	20%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	Total Tagihan Bersih
Tagihan kepada Pemerintah dan Bank Sentral			292,850,722,031	351,186,702,249		1,303,565,967			645,340,990,247
Tagihan kepada Entitas Sektor Publik									
Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional									
Tagihan kepada Bank Lain									
Tagihan kepada perusahaan sekuritas									
Tagihan kepada Korporasi			37,459,836,411	12,989,310,784		1,924,796,316,873			1,975,245,464,068
Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel									
Aset lainnya									
Total			330,310,558,442	364,176,013,033		1,926,099,882,840			2,620,586,454,315

Tabel Tagihan bersih Derivatif Kredit (CCR6)

	Proteksi yang Dibeli	Proteksi yang Dijual
Nilai Notional	-	-
Single-name credit default swaps		
Index credit default swaps		
Total return swaps		
Credit options		
Derivatif kredit lainnya		
Total Nilai Notional	-	-
Nilai wajar	-	-
Nilai wajar positif (aset)		
Nilai wajar negatif (kewajiban)		

Saat ini, Bank tidak memiliki eksposur atas sekuritisasi aset.

12. Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit

Bank mengadopsi serangkaian kebijakan dan praktik untuk memitigasi risiko kredit. Bank memiliki panduan tentang jenis-jenis agunan yang dapat diterima dalam rangka memitigasi risiko kredit. Jenis-jenis agunan yang diterima antara lain adalah sebagai berikut:

- Tanah dan/atau bangunan
- Kendaraan
- Peralatan (termasuk mesin dan alat berat)
- *Cash collateral*
- SBLC
- Piutang
- Persediaan

Tabel Tagihan Bersih berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individual

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020										ATMR	Beban Modal	
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit												
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
A Eksposur Neraca														
1	Tagihan kepada Pemerintah	30.515.454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	324.482	-	-	-	-	9.769.142	-	-	2.722.047	-	9.032.538	722.603
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	1.543.273	-	-	-	-	1.493.660	-	107.204	-	-	1.162.689	93.015
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	344	-	-	-	-	-	-	-	-	120	10
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	32.158.917	-	-	-	-	16.079.459	1.286.357
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	21.525	-	-	-	-	-	1.959.248	-	-	-	1.473.741	117.899
9	Tagihan kepada Korporasi	188.107	7.133.602	-	-	-	-	12.782.269	-	58.634.216	627.987	-	67.394.051	5.391.524
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	108	-	-	-	-	-	-	-	374.725	-	562.109	44.969
11	Aset Lainnya	1.323.222	-	-	-	-	-	-	-	4.371.596	41.712	-	4.434.164	354.733
	Total Eksposur Neraca	32.026.783	9.022.990	344	-	-	-	56.203.988	1.959.248	63.113.016	3.766.471	-	100.138.871	8.011.110
B. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif														
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	750.000	-	-	-	-	1.556.529	-	-	-	-	928.265	74.261
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	2.250	-	-	-	1.688	135
9	Tagihan kepada Korporasi	19.418	535.000	-	-	-	-	4.175.812	-	5.713.791	298.562	-	8.356.540	668.523
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	19.418	1.285.000	-	-	-	-	5.732.341	2.250	5.713.791	298.562	-	9.286.492	742.919
C. Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)														
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	292.851	-	-	-	-	351.187	-	1.304	-	-	1.137.980	91.038
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	37.460	-	-	-	-	12.989	-	1.924.796	-	-	1.938.783	155.103
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	-	330.311	-	-	-	-	364.176	-	1.926.100	-	-	3.076.762	246.141



31 Desember 2019											ATMR	Beban Modal
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit												
0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	"Lainnya			
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
21.946.714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	402.231	-	-	-	9.420.292	-	109.134	-	-	4.899.726	391.978	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.431.084	-	-	-	661.442	-	-	-	-	616.938	49.355	-
-	-	368	-	-	-	-	-	-	-	129	10	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	35.668.136	-	-	-	-	17.834.068	1.426.725	-
-	33.111	-	-	-	-	4.921.134	-	-	-	3.697.473	295.798	-
120.170	6.368.501	-	-	-	10.035.631	-	67.093.813	235.255	-	73.738.211	5.899.057	-
-	216	-	-	-	-	-	-	473.773	-	710.703	56.856	-
1.587.729	-	-	-	-	-	-	4.426.216	22.522	-	4.459.998	356.800	-
23.654.613	8.235.143	368	-	-	55.785.501	4.921.134	71.629.163	731.550	-	105.957.246	8.476.579	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	286.867	-	-	-	-	143.434	11.475	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.473	1.137.500	-	-	-	4.360.307	-	6.108.397	-	-	8.516.049	681.284	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.473	1.137.500	-	-	-	4.647.174	-	6.108.397	-	-	8.659.484	692.759	-
16.851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	530.016	-	-	-	322.986	-	3.940	-	-	1.038.769	83.102	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.680.023	-	-	1.680.022	134.402	-
16.851	530.016	-	-	-	322.986	-	1.683.963	-	-	2.718.791	217.504	-

Tabel Tagihan Bersih berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020											ATMR	Beban Modal
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit												
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
A. Eksposur Neraca														
1	Tagihan kepada Pemerintah	35.969.438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	324.482	-	-	-	-	9.947.355	-	-	2.722.047	-	9.121.645	729.732
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	1.791.332	-	-	-	-	1.493.660	-	107.204	-	-	1.212.301	96.984
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	344	-	-	-	-	-	-	-	-	120	10
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	32.158.917	-	-	-	-	16.079.459	1.286.357
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	2.140.808	-	-	-	-	8.590.513	-	-	-	-	6.871.046	549.683
9	Tagihan kepada Korporasi	188.107	7.133.602	-	-	-	-	12.790.501	-	58.634.216	627.987	-	67.394.051	5.391.524
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	108	-	-	-	-	-	-	2.344	374.725	-	564.453	45.157
11	Aset Lainnya	2.433.196	-	-	-	-	-	-	-	4.756.453	41.712	-	4.819.021	385.522
	Total Eksposur Neraca	38.590.741	11.390.332	344	-	-	-	56.390.433	8.590.513	63.500.217	3.766.471	-	106.062.096	8.484.968
B. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif														
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	750.000	-	-	-	-	1.556.529	-	-	-	-	928.264	74.261
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	2.250	-	-	-	1.688	135
9	Tagihan kepada Korporasi	19.418	535.000	-	-	-	-	4.175.812	-	5.713.791	298.562	-	8.356.541	668.523
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	19.418	1.285.000	-	-	-	-	5.732.341	2.250	5.713.791	298.562	-	9.286.492	742.919
C. Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)														
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	292.851	-	-	-	-	351.187	-	1.304	-	-	1.137.980	91.038
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	37.460	-	-	-	-	12.989	-	1.924.796	-	-	1.938.783	155.103
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	-	330.311	-	-	-	-	364.176	-	1.926.100	-	-	3.076.762	246.141

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individual

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020				
		Tagihan Bersih	Bagian yang dijamin			
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Eksposur Neraca						
1	Tagihan kepada Pemerintah	30.515.454	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	12.815.671	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	3.144.137	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	344	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	32.158.917	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1.980.773	-	-	21.525	-
9	Tagihan kepada Korporasi	79.366.181	10.616.752	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	374.833	-	-	108	-
11	Aset Lainnya	5.736.530	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	166.092.840	10.616.752	-	21.633	-
B Eksposur Rekening Administratif						
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	2.306.529	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	2.250	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	10.742.583	4.195.230	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Rekening Administratif	13.051.362	4.195.230	-	-	-
C Eksposur Counterparty Credit Risk						
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	645.341	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	1.975.245	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	2.620.586	-	-	-	-
	Total (A+B+C)	181.764.789	14.811.982	-	21.633	-



	31 Desember 2019						Bagian yang tidak dijamin
	Bagian yang tidak dijamin	Tagihan Bersih	Bagian yang dijamin				
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(8)=(3)-(4)+(5)+(6)+(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(9)-(10)+(11)+(12)+(13)	
	30.515.454	21.946.714	-	-	-	-	21.946.714
	12.815.671	9.931.657	390.230	-	-	-	9.541.427
	-	-	-	-	-	-	-
	3.144.137	2.092.526	-	-	-	-	2.092.526
	344	368	-	-	-	-	368
	-	-	-	-	-	-	-
	32.158.917	35.668.136	-	-	-	-	35.668.136
	1.959.248	4.954.245	-	-	33.111	-	4.921.134
	68.749.429	83.853.370	8.392.930	-	-	-	75.460.440
	374.725	473.989	-	-	216	-	473.773
	5.736.530	6.036.467	-	-	-	-	6.036.467
	155.454.455	164.957.472	8.783.160	-	33.327	-	156.140.985
	-	-	-	-	-	-	-
	2.306.529	286.867	-	-	-	-	286.867
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	2.250	-	-	-	-	-	-
	6.547.353	11.638.677	4.392.780	-	-	-	7.245.897
	-	-	-	-	-	-	-
	8.856.132	11.925.544	4.392.780	-	-	-	7.532.764
	-	16.851	-	-	-	-	16.851
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	645.341	856.943	-	-	-	-	856.943
	-	-	-	-	-	-	-
	1.975.245	1.680.023	-	-	-	-	1.680.023
	2.620.586	2.553.816	-	-	-	-	2.553.816
	166.931.174	179.436.832	13.175.940	-	33.327	-	166.227.565

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020					
		Tagihan Bersih	Bagian yang dijamin				
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A Eksposur Neraca							
1	Tagihan kepada Pemerintah	35.969.438	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	12.993.884	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	3.392.196	-	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	344	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	32.158.917	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	10.731.321	2.119.283	-	21.525	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	79.374.413	10.624.984	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	377.177	-	-	108	-	
11	Aset Lainnya	7.231.361	-	-	-	-	
	Total Eksposur Neraca	182.229.051	12.744.267	-	21.633	-	
B Eksposur Rekening Administratif							
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	2.306.529	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	2.250	-	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	10.742.583	4.195.230	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
	Total Eksposur Rekening Administratif	13.051.362	4.195.230	-	-	-	
C Eksposur Counterparty Credit Risk							
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	645.341	-	-	-	-	
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi	1.975.245	-	-	-	-	
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	2.620.586	-	-	-	-	
	Total (A+B+C)	197.901.000	16.939.497	-	21.633	-	



	31 Desember 2019						Bagian yang tidak dijamin
	Bagian yang tidak dijamin	Tagihan Bersih	Bagian yang dijamin				
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(8)=(3)-(4)+(5)+(6)+(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(9)-(10)+(11)+(12)+(13)	
	35.969.438	26.963.396	-	-	-	-	26.963.396
	12.993.884	10.054.976	390.230	-	-	-	9.664.746
	-	-	-	-	-	-	-
	3.392.196	2.259.393	-	-	-	-	2.259.393
	344	368	-	-	-	-	368
	-	-	-	-	-	-	-
	32.158.917	35.668.136	-	-	-	-	35.668.136
	8.590.513	13.699.250	-	-	33.111	-	13.666.139
	68.749.429	83.882.207	8.421.768	-	-	-	75.460.440
	377.069	497.202	-	-	216	-	496.986
	7.231.361	7.103.913	-	-	-	-	7.103.913
	169.463.151	180.128.841	8.811.998	-	33.327	-	171.283.517
	-	-	-	-	-	-	-
	2.306.529	286.867	-	-	-	-	286.867
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	2.250	-	-	-	-	-	-
	6.547.353	11.638.677	4.392.780	-	-	-	7.245.897
	-	-	-	-	-	-	-
	8.856.132	11.925.544	4.392.780	-	-	-	7.532.764
	-	16.851	-	-	-	-	16.851
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	645.341	856.943	-	-	-	-	856.943
	-	-	-	-	-	-	-
	1.975.245	1.680.023	-	-	-	-	1.680.023
	2.620.586	2.553.816	-	-	-	-	2.553.816
	180.939.870	194.608.201	13.204.778	-	33.327	-	181.370.097

Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar - Bank Secara Individual

Tabel Eksposur Aset di Laporan Posisi Keuangan, kecuali Eksposur Sekuritisasi

(dalam jutaan Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan kepada Pemerintah	30.515.454	-	-	21.946.714	-	-
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	30.515.454	-	-	21.946.714	-	-
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	12.815.671	9.032.538	9.032.538	9.931.657	5.094.841	4.899.726
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	3.144.137	1.162.689	1.162.689	2.092.526	616.938	616.938
	a. Tagihan Jangka Pendek	1.921.612	501.070	501.070	1.548.552	346.256	346.256
	b. Tagihan Jangka Panjang	1.222.525	661.618	661.618	543.974	270.682	270.682
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	344	120	120	368	129	129
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	32.158.917	16.079.459	16.079.459	35.668.136	17.834.068	17.834.068
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1.980.773	1.485.580	1.473.741	4.954.246	3.715.684	3.697.473
9	Tagihan kepada Korporasi	79.366.181	72.243.622	67.394.051	83.853.370	77.994.761	73.738.211
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	374.833	562.250	562.109	473.988	710.984	710.703
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	374.833	562.250	562.109	473.988	710.984	710.703
11	Aset Lainnya	5.736.530	-	4.434.164	6.036.467	-	4.459.999
	a. Uang tunai, emas, dan commemorative coin	1.323.222	-	-	1.587.729	-	-
	b. Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal)	22.522	-	33.783	22.522	-	33.783
	1) Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit	-	-	-	-	-	-
	2) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa	22.522	-	33.783	22.522	-	33.783
	3) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa	-	-	-	-	-	-
	c. Aset tetap dan inventaris neto	2.025.871	-	2.025.871	1.684.196	-	1.684.196
	d. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	19.190	-	28.785	-	-	-
	e. Antar kantor neto	-	-	-	-	-	-
	f. Lainnya	2.345.725	-	2.345.725	2.742.020	-	2.742.020
	Total	166.092.840	100.566.257	100.138.871	164.957.472	105.967.404	105.957.246

Tabel Eksposur Kewajiban Komitmen/ Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi

(dalam jutaan Rupiah)

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	31 Desember 2020			31 Desember 2019	
			ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	2.306.529	928.265	928.265	286.867	143.433	143.433
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	2.250	1.688	1.688	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	10.742.583	10.452.772	8.356.540	11.638.677	10.728.672	8.516.050
10	Tagihan yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-
	Total	13.051.362	11.382.724	9.286.492	11.925.544	10.872.105	8.659.483



Tabel Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

(dalam jutaan Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
	a. Tagihan kepada Pemerintah Indonesia	-	-	-	-	-	-
	b. Tagihan kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-
	a. Tagihan Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
	b. Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-

Tabel Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (*Settlement Risk*)

(dalam jutaan Rupiah)

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
		Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR
1	<i>Delivery versus payment</i>	-	-	-	-	-	-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	-	-	-	-	-	-
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	-	-	-	-	-	-
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	-	-	-	-	-	-
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-	-	-	-	-	-
2	<i>Non-delivery versus payment</i>	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-

Tabel Eksposur Sekuritisasi

(dalam jutaan Rupiah)

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
1	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>External Rating Base Approach</i> (ERBA)	-	-	-	-
2	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>Standardized Approach</i> (SA) persyaratan	-	-	-	-
3	Eksposur Sekuritisasi yang merupakan Faktor Pengurang Modal Inti Utama	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-

Tabel Eksposur Derivatif

(dalam jutaan Rupiah)

No	Kategori	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
		Tagihan Bersih	ATMR	Tagihan Bersih	ATMR
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	16.851	-
	a. Tagihan kepada Pemerintah Indonesia	-	-	16.851	-
	b. Tagihan kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	645.341	235.467	856.943	271.437
	a. Tagihan Jangka Pendek	23.688	4.738	37.295	13.081
	b. Tagihan Jangka Panjang	621.653	230.729	819.647	258.355
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	1.975.245	1.938.783	1.680.022	1.680.022
7	Eksposur tertimbang dari <i>Credit Valuation Adjustment</i> (CVA risk weighted assets)	-	902.512	-	767.332
	Total	2.620.586	3.076.762	2.553.816	2.718.791

Tabel Total Pengukuran Risiko Kredit (1+2+3+4+5+6)

(dalam jutaan Rupiah)

Kategori	31 Desember 2020	31 Desember 2020	31 Desember 2019
		31 Desember 2013	31 Desember 2013
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	(A)	112.502.125	117.335.520
"FAKTOR PENGURANG ATMR RISIKO KREDIT: Selisih lebih antara cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dan 1,25% ATMR untuk Risiko Kredit"	(B)		
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT (A) - (B)	(C)	112.502.125	117.335.520
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	(D)	-	-

Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar - Bank Secara Konsolidasi Audited dengan Entitas Anak

Tabel Eksposur Aset di Laporan Posisi Keuangan, kecuali Eksposur Sekuritisasi

(dalam jutaan Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020				31 Desember 2019	
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan kepada Pemerintah	35.969.438	-	-	26.963.396	-	-
	a. Tagihan kepada Pemerintah Indonesia	35.969.438	-	-	26.963.396	-	-
	b. Tagihan kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	12.993.884	9.121.645	9.121.645	10.054.976	5.156.501	4.961.386
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	3.392.196	1.212.300	1.212.300	2.259.393	650.311	650.311
	a. Tagihan Jangka Pendek	2.028.333	522.415	522.415	1.665.419	369.629	369.629
	b. Tagihan Jangka Panjang	1.363.863	689.886	689.886	593.974	280.682	280.682
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	344	120	120	368	129	129
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	32.158.917	16.079.459	16.079.459	35.668.136	17.834.068	17.834.068
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	10.731.321	8.048.491	6.871.046	13.699.251	10.274.438	10.256.227
9	Tagihan kepada Korporasi	79.374.413	72.247.738	67.394.051	83.882.207	78.009.180	73.738.212
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	377.177	564.594	564.453	497.201	734.197	733.916
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	377.177	564.594	564.453	497.201	734.197	733.916
11	Aset Lainnya	7.231.360		4.819.020	7.103.913		4.816.110
	a. Uang tunai, emas, dan commemorative coin	2.433.196		-	2.299.062		-
	b. Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal)	22.522	-	33.783	22.522	-	33.783
	1) Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit	-		-	-		-
	2) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa	22.522		33.783	22.522		33.783
	3) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa	-		-	-		-
	c. Aset tetap dan inventaris neto	2.357.987		2.357.987	1.893.746		1.893.746
	d. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	19.190		28.785	-		-
	e. Antar kantor neto	-		-	-		-
	f. Lainnya	2.398.465		2.398.465	2.888.583		2.888.581
Total		182.229.051	107.274.347	106.062.096	180.128.841	112.658.823	112.990.358



Tabel Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi

(dalam jutaan Rupiah)

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	31 Desember 2020			31 Desember 2019	
			ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	2.306.529	928.265	928.265	286.867	143.433	143.433
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	2.250	1.688	1.688	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	10.742.583	10.452.772	8.356.540	11.638.677	10.728.672	8.516.050
10	Tagihan yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-
	Total	13.051.362	11.382.724	9.286.492	11.925.544	10.872.105	8.659.483

Tabel Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

(dalam jutaan Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia						
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain						
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-
	a. Tagihan Jangka Pendek						
	b. Tagihan Jangka Panjang						
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-

Tabel Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (Settlement Risk)

(dalam jutaan Rupiah)

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
		Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR
1	<i>Delivery versus payment</i>	-		-	-		-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	-		-	-		-
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	-		-	-		-
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	-		-	-		-
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-		-	-		-
2	<i>Non-delivery versus payment</i>	-	-		-	-	
	Total	-	-	-	-	-	-

Tabel Eksposur Sekuritisasi

(dalam jutaan Rupiah)

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
1	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>External Rating Base Approach</i> (ERBA)		-		-
2	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>Standardized Approach</i> (SA) persyaratan		-		-
3	Eksposur Sekuritisasi yang merupakan Faktor Pengurang Modal Inti Utama	-		-	
Total		-	-	-	-

Tabel Eksposur Derivatif

(dalam jutaan Rupiah)

No	Kategori	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
		Tagihan Bersih	ATMR	Tagihan Bersih	ATMR
1	Tagihan kepada Pemerintah		-	16.851	-
	a. Tagihan kepada Pemerintah Indonesia	-	-	16.851	-
	b. Tagihan kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	645.341	235.467	856.943	271.437
	a. Tagihan Jangka Pendek	23.688	4.738	37.295	13.081
	b. Tagihan Jangka Panjang	621.653	230.729	819.647	258.355
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	1.975.245	1.938.783	1.680.022	1.680.022
7	Eksposur tertimbang dari <i>Credit Valuation Adjustment</i> (CVA <i>risk weighted assets</i>)		902.512		767.332
Total		2.620.586	3.076.762	2.553.816	2.718.791

Tabel Total Pengukuran Risiko Kredit (1+2+3+4+5+6)

(dalam jutaan Rupiah)

Kategori		31 Desember 2020	31 Desember 2019
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	(A)	118.425.350	124.368.632
FAKTOR PENGURANG ATMR RISIKO KREDIT: Selisih lebih antara cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dan 1,25% ATMR untuk Risiko Kredit	(B)		
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT (A) - (B)	(C)	118.425.350	124.368.632
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	(D)	-	-

B. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang melekat pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar termasuk risiko perubahan harga *option*. Tujuan utama dari manajemen risiko pasar adalah untuk meminimalkan dampak negatif perubahan kondisi pasar tersebut terhadap nilai aset dan modal Bank.

1. Kerangka Manajemen Risiko Pasar

Bank menggunakan kerangka kerja pengendalian risiko sebagai pedoman yang jelas dan tegas mengenai batasan dalam pengambilan risiko. Tiga komponen kunci dalam kerangka pengendalian risiko tersebut adalah:

- Kebijakan dan Prosedur: Menetapkan aturan dan standar yang jelas atas semua aktivitas bisnis, pengendalian, strategi operasional dan organisasi di Bank terkait manajemen risiko pasar.



- b. Limit Eksposur: Memberikan batasan yang jelas terkait dengan risiko pasar. Limit/Toleransi risiko pasar disesuaikan dengan regulasi terkait, kebijakan global dan kebijakan lokal di Bank.
- c. Pendelegasian Wewenang Risiko: Memastikan bahwa pengambilan keputusan atas risiko utama hanya boleh dilakukan oleh individu atau unit kerja tertentu yang telah mendapat persetujuan dari komite manajemen di Bank.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank secara berkala melakukan peninjauan terhadap kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit dalam mengelola risiko pasar, sehingga selaras dengan peraturan eksternal seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03.2016 dan Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko. Selain itu kebijakan ini juga disusun sejalan dengan kebijakan global risiko pasar dan risiko likuiditas dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) karena BTPN merupakan grup SMBC.

Kebijakan dan prosedur risiko pasar Bank menetapkan aturan dan standar yang jelas atas semua aktivitas bisnis, pengendalian, strategi operasional dan organisasi di Bank terkait risiko pasar. Bank memiliki metodologi berikut langkah-langkah yang terukur dan jelas untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau risiko pasar.

Untuk memastikan pengendalian risiko berjalan dengan baik, bank juga *check* dan *balances* dan melakukan pemisahan *front office*, *middle office* dan *back office*, serta penerapan kerangka kerja *Three Lines of Defense*, yaitu:

- Pimpinan Unit Kerja (PUK) (*first line of defense*),
- Market and Liquidity Risk Management Departemen dan Unit Kepatuhan (*second line of defense*)
- Satuan Kerja Audit Internal/SKAI (*Third Line of Defense*)

Penetapan limit risiko pasar ditinjau secara berkala untuk menjamin kesesuaian dengan perkembangan bisnis serta kondisi ekonomi dan pasar terbaru berdasarkan faktor-faktor risiko nilai tukar dan suku bunga.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi risiko pasar senantiasa dilakukan melalui analisis setiap produk, transaksi atau layanan yang ditawarkan oleh Bank melalui *product program*, hingga produk, transaksi atau layanan tersebut menjadi eksposur risiko pasar yang diukur, dipantau dan dikontrol secara harian.

Untuk setiap pengembangan fitur dan pertumbuhan yang signifikan, risiko pasar senantiasa diidentifikasi kembali secara terus menerus dan didiskusikan bersama antara Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dalam hal ini adalah unit kerja Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas, dengan unit-unit bisnis terkait.

Kebijakan internal BTPN menetapkan Bank untuk tidak memiliki eksposur *trading book* di surat berharga (sekuritas). Seluruh surat berharga yang dimiliki Bank dikategorikan sebagai *banking book* dengan tujuan menjadikannya aset likuid yang dapat digunakan kapan saja jika ada kebutuhan likuiditas.

Eksposur valuta asing yang dilakukan Unit Treasury sebagian besar berasal dari transaksi FX yang dilakukan untuk kepentingan nasabah dan swap atas sumber dana yang diperoleh dalam mata uang asing.

Pengukuran eksposur risiko nilai tukar dilakukan atas posisi devisa neto Bank. Rata-rata *net open position* Bank di bawah 1,0% dari modal, atau jauh di bawah ketentuan ambang batas maksimum Bank Indonesia, yaitu 20,0% dari modal.

Bank melakukan proses revaluasi (*mark to market/mtm*) berdasarkan harga pasar setiap akhir hari dan mengamati eksposur risiko pasar secara harian sebagai bagian dari mitigasi risiko dan memastikan eksposur tersebut tidak melebihi limit yang telah ditetapkan oleh *Asset Liabilities Committee* (ALCO).

Perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk risiko pasar dan kebutuhan modal atas eksposur risiko pasar dilakukan berdasarkan pendekatan standar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Berikut ini adalah Tabel Pengungkapan Risiko Pasar dengan menggunakan Metode Standar.

Tabel Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar

(dalam jutaan Rupiah)

No	Jenis Risiko	31 Desember 2020				31 Desember 2019			
		Individual		Konsolidasian		Individual		Konsolidasian	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Risiko Suku Bunga								
	a. Risiko Spesifik	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Risiko Umum	31.159	389.489	31.159	389.489	61.250	765.623	61.250	765.623
3	Risiko Nilai Tukar	8.960	111.994	8.960	111.994	2.936	36.702	2.936	36.702
4	Risiko Ekuitas			-	-			-	-
5	Risiko Komoditas			-	-			-	-
6	Risiko <i>Option</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	40.119	501.483	40.119	501.483	64.186	802.326	64.186	802.326

Pengelolaan risiko pasar dilakukan dengan melaporkan hasil pengukuran dan pemantauan limit risiko pasar yang telah ditetapkan ALCO secara harian. Bank juga secara rutin melakukan perhitungan PV01 dan simulasi proyeksi perubahan *net interest income* (NII) dan *economic value of equity* (EVE) yang dilaporkan dalam rapat yang diselenggarakan oleh Komite ALCO dan Komite Manajemen Risiko (KMR).

Setiap tahun, atau bila ada penambahan fitur atau produk, Bank akan melakukan validasi atas hasil pengukuran dari sistem yang digunakan. Sistem informasi yang ada saat ini telah dapat memfasilitasi proses revaluasi (*mark to market*), memberikan informasi yang terkini atas eksposur risiko pasar Bank, serta memonitor pergerakan faktor risiko pasar Bank.

4. Sistem Pengendalian Internal atas Risiko Pasar

Pemantauan terhadap Risiko Pasar dilakukan melalui *Asset Liabilities Committee* (ALCO) dan Komite Manajemen Risiko. Sistem Pengendalian Intern telah efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko Pasar. Internal Audit melakukan audit secara berkala terhadap kecukupan kebijakan, prosedur, limit, serta toleransi dan kepatuhan dari setiap pihak yang terkait dengan penerapan manajemen risiko pasar sesuai dengan rencana audit Bank yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah struktur organisasi dalam Tata Kelola Risiko Pasar:





5. Pengungkapan Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book*

Eksposur *banking book* atas aset dan liabilitas Bank diukur menggunakan analisis sensitivitas berdasarkan profil kesenjangan *repricing* suku bunga untuk menghitung dampak perubahan suku bunga terhadap laba bersih Bank dengan menggunakan pendekatan Pendapatan Bunga Bersih (NII), dan dampak perubahan suku bunga terhadap modal Bank, atau dengan menggunakan pendekatan *Economic Value of Equity* (EVE).

Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book*

Nama Bank : PT Bank BTPN Tbk (individu)

Posisi Laporan : Desember 2020

Analisis Kualitatif

Pengukuran IRRBB dilakukan dengan menggunakan metode standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam melakukan pengelolaan IRRBB, Bank telah menetapkan *risk appetite* yang diwujudkan dalam bentuk *internal buffer* atas maksimum Δ EVE yang harus dijaga. Apabila tingkat IRRBB telah mendekati atau melampaui angka *buffer* tersebut, maka ALCO akan memutuskan strategi bisnis maupun

strategi lindung nilai yang harus dilakukan untuk mengembalikan angka IRRBB ke tingkatan yang diinginkan.

Risk Management bertanggung jawab untuk melakukan pengukuran dan pemantauan IRRBB secara berkala untuk dilaporkan kepada Direksi dan ALCO/KMR. Sedangkan unit bisnis dan *treasury* yang bertanggung jawab untuk melakukan strategi bisnis dan lindung nilai yang telah dirumuskan tersebut.

Analisis Kuantitatif

Dari hasil pengukuran IRRBB untuk posisi Desember 2020 dapat dilihat bahwa Δ EVE tertinggi Bank terjadi pada skenario *Parallel Shock Up* yaitu sebesar Rp1,93 triliun (7,59% dari CET1). Sementara dari perspektif Δ NII, pada skenario *Parallel Shock Up*, NII Bank diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp0,22 triliun. Hal ini merupakan 4,67% dari proyeksi NII Bank pada kondisi *baseline*.

Laporan Perhitungan IRRBB

Nama Bank : PT Bank BTPN Tbk (individu)

Posisi Laporan Desember 2020

Mata Uang : Total dalam Rupiah

Tabel Laporan Perhitungan IRRBB

(dalam jutaan Rupiah)

	Δ EVE		Δ NII	
	Dec 2020	Dec 2019	Dec 2020	Dec 2019
<i>Parallel up</i>	-1.933.645,94	-2.210.846,30	-222.349,16	-329.180,67
<i>Parallel down</i>	1.719.818,96	2.003.276,83	149.765,59	256.428,97
<i>Steeper</i>	989.200,22	1.026.579,26		
<i>Flattener</i>	-1.439.994,25	-1.517.149,16		
<i>Short rate up</i>	-1.264.738,28	-1.460.321,70		
<i>Short rate down</i>	1.201.801,82	1.455.309,01		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	1.933.645,94	2.210.846,30	222.349,16	329.180,67
Modal <i>Tier 1</i> (untuk Δ EVE) atau <i>Projected Income</i> (untuk Δ NII)	25.482.799,26	24.077.577,85	4.757.533,05	5.251.085,89
Nilai Maksimum dibagi Modal <i>Tier 1</i> (untuk Δ EVE) atau <i>Projected Income</i> (untuk Δ NII)	7,59%	9,18%	4,67%	6,27%

C. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang mungkin timbul akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dengan menggunakan arus kasnya dan/atau aset likuidnya yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Risiko likuiditas juga berkaitan dengan optimalisasi struktur neraca dan risiko struktural terhadap ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu. Pengelolaan risiko likuiditas Bank berupaya agar dapat mengelola risiko likuiditas dalam perspektif jangka pendek maupun struktural.

Dalam perspektif jangka pendek, Bank memastikan kecukupan likuiditas yang dimonitor berdasarkan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *early warning indicators* lainnya. Dalam perspektif jangka panjang, risiko likuiditas dikelola dan dimonitor melalui *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).

Risiko likuiditas dikelola secara struktural dengan menggunakan indikator yang ditetapkan oleh regulator, dan dikelola secara internal berdasarkan keputusan ALCO sebagaimana tercermin dalam struktur neraca dan profil jatuh tempo.

1. Kerangka Manajemen Risiko Likuiditas

Bank menggunakan kerangka kerja pengendalian sebagai pedoman yang jelas dan tegas mengenai batasan dalam pengambilan risiko. Tiga komponen kunci dalam kerangka pengendalian risiko tersebut adalah:

- a. Kebijakan dan Prosedur: Menetapkan aturan dan standar yang jelas atas semua aktivitas bisnis, pengendalian, strategi operasional dan organisasi di Bank terkait manajemen risiko likuiditas.
- b. Limit Eksposur: Memberikan batasan yang jelas terkait dengan risiko likuiditas. Limit/Toleransi risiko likuiditas disesuaikan dengan regulasi terkait, kebijakan global dan kebijakan lokal di Bank.
- c. Pendelegasian Wewenang Risiko: Memastikan bahwa pengambilan keputusan atas risiko utama hanya boleh dilakukan oleh individu atau unit kerja tertentu yang telah mendapat persetujuan dari komite manajemen di Bank.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank secara berkala menelaah kecukupan kebijakan, prosedur dan batasan risiko likuiditas dan kesesuaiannya dengan *risk appetite* dan strategi bisnis sejalan dengan pertumbuhan bisnis, kompleksitas transaksi, dan kondisi ekonomi serta kondisi pasar.



Untuk menerapkan kebijakan, prosedur dan menetapkan batasan-batasan pada risiko likuiditas secara efektif, Bank juga telah secara jelas menetapkan pemisahan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas antara unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko likuiditas yaitu unit kerja yang memiliki aktivitas yang terekspos terhadap risiko likuiditas. Direktorat Manajemen Risiko memberikan masukan dan analisis yang independen dan objektif dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan risiko likuiditas.

Kebijakan dan prosedur yang saat ini diterapkan juga telah mengatur pengelolaan risiko likuiditas dimasa krisis dimulai dengan aktifasi rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan/CFP*), dan implementasinya hingga kembali ke kondisi normal (*business as usual/BAU*).

- 3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko**
Identifikasi risiko likuiditas dilakukan terhadap seluruh sumber, baik dari sisi produk dan aktivitas perbankan yang baru, maupun sisi pertumbuhan yang signifikan dari sumber dan hasil pendanaan tertentu, baik berupa posisi aset, kewajiban maupun

rekening administratif. Identifikasi juga dilakukan setiap munculnya potensi peningkatan risiko, baik risiko suku bunga, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum dan risiko karena adanya peraturan baru dari Bank Indonesia.

Bank mengukur dan memantau indikator risiko likuiditas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan likuiditas melalui Indikator Peringatan Dini (*Early Warning Indicators/EWI*) yang memonitor tingkat *roll-over*, konsentrasi pendanaan, peringkat publik Bank, tingkat likuiditas pasar uang, dan pemenuhan kewajiban *ratio regulatory*. Bank juga secara struktural mengukur risiko likuiditas dengan menggunakan rasio seperti *Loan to Deposit Ratio* (LDR), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) serta perhitungan dana keluar dan melakukan *stress testing*.

Kebijakan internal menetapkan Bank untuk selalu patuh terhadap peraturan atau regulasi yang telah ditetapkan, seperti Giro Wajib Minimum dan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR). Bank juga telah menerapkan regulasi *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).

Laporan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) per 31 Desember 2020:

Tabel Pengungkapan Nilai *Liquidity Coverage Ratio* (LCR)

No	Komponen	Individual			
		Posisi Tanggal Laporan (Desember 2020)		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Desember 2019)	
		Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>), <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>).	Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>), <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>).
1	Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR		59 Hari		64 hari
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)					
2	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)		27.584.910		22.351.479
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)					
3	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:	24.183.313	1.524.049	19.856.836	1.406.249
	a. Simpanan/Pendanaan stabil	17.885.641	894.282	11.588.699	579.435
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	6.297.672	629.767	8.268.137	826.814
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:	45.965.974	22.777.278	49.036.096	23.498.122
	a. Simpanan operasional	-	-	-	-
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	45.965.974	22.777.278	49.027.285	23.489.311
	c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank	-	-	8.811	8.811
5	Pendanaan dengan agunan (<i>secured funding</i>)		-		-
6	Arus kas keluar lainnya (<i>additional requirement</i>), terdiri dari:	117.122.610	3.260.869	104.511.556	3.878.358
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	637.075	637.075	897.742	897.742
	b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	-	-	-	-
	c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	-	-	-	-
	d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	14.023.897	2.073.385	10.431.686	1.838.166
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-	-	-
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontinjensi pendanaan lainnya	102.285.304	374.075	92.562.427	522.748
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	176.334	176.334	619.702	619.702
7	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)		27.562.196		28.782.729
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)					
8	Pinjaman dengan agunan Secured lending	-	-	-	-
9	Tagihan berasal dari pihak lawan (<i>counterparty</i>)	29.309.759	16.636.329	30.466.723	17.413.369
10	Arus kas masuk lainnya	1.525.259	1.146.845	2.083.584	1.484.486
11	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)	30.835.019	17.783.174	32.550.307	18.897.854
			TOTAL ADJUSTED VALUE1		TOTAL ADJUSTED VALUE1
12	TOTAL HQLA		27.584.910		22.351.479
13	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		9.779.022		9.884.874
14	LCR (%)		282,08%		226,12%

Keterangan : *Adjusted value* dihitung setelah pengenaan nilai (*haircut*), tingkat penarikan (*run-off rate*), dan tingkat penerimaan (*inflow rate*) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.



	Konsolidasian			
	Posisi Tanggal Laporan (Desember 2020)		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Desember 2019)	
	Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>), <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>).	Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>), <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>).
		59 Hari		64 hari
		33.572.778		27.494.459
	28.084.454	1.765.552	23.416.171	1.621.832
	20.857.871	1.042.894	14.395.693	719.785
	7.226.583	722.658	9.020.478	902.048
	49.211.489	24.865.211	52.471.071	25.625.876
	-	-	-	-
	49.211.489	24.865.211	52.462.260	25.617.064
	-	-	8.811	8.811
	117.122.610	3.260.869	104.511.947	3.878.514
	637.075	637.075	897.742	897.742
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	14.023.897	2.073.385	10.432.076	1.838.322
	-	-	-	-
	102.285.304	374.075	92.562.427	522.748
	176.334	176.334	619.702	619.702
		29.891.632		31.126.223
	-	-	-	-
	29.520.434	16.826.874	30.772.787	17.642.818
	1.525.259	1.146.845	2.083.584	1.484.486
	31.045.693	17.973.720	32.856.371	19.127.303
		TOTAL ADJUSTED VALUE1		TOTAL ADJUSTED VALUE1
		33.572.778		27.494.459
		11.917.912		11.998.919
		281,70%		229,14%

ANALISIS PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO)

Analisis secara Individu

Perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) Bank BTPN Individual pada Triwulan IV 2020 sebesar 282,08%. Nilai LCR pada Triwulan ini naik sebesar 55,97% dibanding Triwulan IV 2019 yang sebesar 226,12%. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan aset likuid berkualitas tinggi (*high quality liquid assets/HQLA*) dan penurunan arus keluar bersih (*net cash outflow*).

Seluruh HQLA Bank merupakan HQLA level 1, yang terdiri atas kas dan setara kas, penempatan di Bank Indonesia dan surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia. Sedangkan proyeksi arus kas keluar terutama berasal dari nasabah korporasi, diikuti oleh nasabah individu dan usaha mikro dan usaha kecil.

Bank senantiasa menjaga rasio LCR di atas ketentuan yang berlaku untuk menjaga ketahanan likuiditas.

Analisis secara Konsolidasi

Liquidity Coverage Ratio (LCR) Bank BTPN secara konsolidasi bersama perusahaan anak pada Triwulan IV tahun 2020 naik sebesar 52,55% menjadi 281,70%. Kenaikan ini juga disebabkan oleh kenaikan aset likuid berkualitas tinggi (*high quality liquid assets/HQLA*) dan penurunan arus keluar bersih (*net cash outflow*).

Baik Bank maupun perusahaan anak senantiasa memenuhi ketentuan LCR untuk memastikan ketahanan likuiditas.

Tabel Pengungkapan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) Individu

No	Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan (Desember 2020)				
		Nilai Tercatat berdasarkan Sisa Jangka Waktu				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu ¹	<6 Bulan	≥6 Bulan-<1 Tahun	≥1 Tahun	
1	Modal:	29.359.936	-	-	5.522.821	34.882.757
2	Modal sesuai POJK KPMM	29.359.936	-	-	5.522.821	34.882.757
3	Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	-
4	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:	10.729.631	22.317.371	563.903	23.972	31.433.407
5	Simpanan dan pendanaan stabil	10.270.376	12.588.663	333.379	3.358	22.036.154
6	Simpanan dan pendanaan kurang stabil	459.255	9.728.708	230.524	20.614	9.397.253
7	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	14.978.002	54.829.695	305.995	25.892.710	42.867.177
8	Simpanan operasional	-	-	-	-	-
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	14.978.002	54.829.695	305.995	25.892.710	42.867.177
10	Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	-	-	-	-	-
11	Liabilitas dan ekuitas lainnya:	2.766.853	5.059.214	83	-	-
12	NSFR liabilitas derivatif		-	-	-	
13	Ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	2.766.853	5.059.214	83	-	-
14	Total ASF					109.183.341

¹ Komponen yang dilaporkan dalam kategori tanpa jangka waktu adalah komponen yang tidak memiliki jangka waktu kontraktual, antara lain: instrumen modal yang bersifat permanen (*perpetual*), *short positions*, *open maturity positions*, giro, ekuitas yang tidak masuk dalam kategori HQLA dan komoditas.

No	Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan (Desember 2020)				
		Nilai Tercatat berdasarkan Sisa Jangka Waktu				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu ¹	<6 Bulan	≥6 Bulan-<1 Tahun	≥1 Tahun	
15	Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR					536.061
16	Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	894.072	-	-	-	447.036
17	Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>)	-	46.640.772	7.211.111	70.310.376	85.619.668
18	kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	-	-	-	-
19	kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	-	5.842.042	1.967.589	9.882.596	11.742.697



No	Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan (Desember 2020)				
		Nilai Tercatat berdasarkan Sisa Jangka Waktu				
		Tanpa Jangka Waktu ¹	<6 Bulan	≥6 Bulan-<1 Tahun	≥1 Tahun	Total Nilai Tertimbang
20	kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang di antaranya:	-	37.813.165	4.926.687	57.888.937	70.575.523
21	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	1.822.198	-	2.538.843	2.561.347
22	Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminakan, yang di antaranya:	-	-	-	-	-
23	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	-	-	-	-
24	Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (<i>performing</i>) yang tidak sedang dijaminakan, tidak gagal bayar, dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	-	1.163.367	316.835	-	740.101
25	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	-	-	-	-	-
26	Aset lainnya:	4.484.081	4.592.555	179.165	5.867.526	10.775.036
27	Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas	-	-	-	-	-
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai <i>initial margin</i> untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai <i>default fund</i> pada <i>central counterparty</i> (CCP)	-	-	-	-	-
29	NSFR aset derivatif	-	29.925	29.925	29.925	29.925
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin	-	177.431	177.431	177.431	177.431
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	4.484.081	4.385.199	179.165	5.867.526	10.567.680
32	Rekening Administratif	-	121.521.707	121.521.707	121.521.707	1.090.189
33	Total RSF	-	-	-	-	98.467.989
34	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%))	-	-	-	-	110.88%

¹ Komponen yang dilaporkan dalam kategori tanpa jangka waktu adalah komponen yang tidak memiliki jangka waktu kontraktual, antara lain: instrumen modal yang bersifat permanen (*perpetual*), *short positions*, *open maturity positions*, giro, ekuitas yang tidak masuk dalam kategori HQLA dan komoditas.

ANALISIS NSFR INDIVIDU

Nama Bank : Bank BTPN, Tbk (Individual)

Posisi Laporan : Desember 2020

Analisis secara Individu (Audited)

Rasio Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*/NSFR) Bank secara Individu selama bulan Desember 2020 sebesar 110,88% sesuai dengan POJK No.50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum.

Nilai *Asset Stable Funding* (ASF) selama bulan Desember sebesar IDR 109,18 triliun, sedangkan nilai *Required Stable Funding* (RSF) selama bulan Desember sebesar Rp98,47 triliun. Kenaikan NSFR dibanding periode sebelumnya terutama disebabkan karena penurunan nilai *Required Stable Funding* (RSF) lebih besar dari penurunan nilai *Available Stable Funding* (ASF).

Bank BTPN senantiasa memonitor dan menjaga agar dapat memenuhi ketentuan terkait NSFR dan dalam strategi pendanaan telah mempertimbangkan portofolio dari sisi sumber dana maupun tenor berdasarkan dampaknya terhadap NSFR.

Tabel Pengungkapan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) Konsolidasi

No	Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan (Desember 2020)				
		Nilai Tercatat berdasarkan Sisa Jangka Waktu				
		Tanpa Jangka Waktu ¹	<6 Bulan	≥6 Bulan-<1 Tahun	≥1 Tahun	Total Nilai Tertimbang
1	Modal:	35.277.495	-	-	5.522.821	40.800.316
2	Modal sesuai POJK KPMM	35.277.495	-	-	5.522.821	40.800.316
3	Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	-
4	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:	12.726.824	25.219.001	576.418	23.992	36.042.445
5	Simpanan dan pendanaan stabil	12.186.842	14.440.950	340.893	3.378	25.623.629
6	Simpanan dan pendanaan kurang stabil	539.983	10.778.051	235.524	20.614	10.418.816
7	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	15.005.207	59.864.463	313.145	25.892.710	44.163.896
8	Simpanan operasional	-	-	-	-	-
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	15.005.207	59.864.463	313.145	25.892.710	44.163.896
10	Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	-	-	-	-	-
11	Liabilitas dan ekuitas lainnya:	3.556.471	5.059.214	83	-	-
12	NSFR liabilitas derivatif		-	-	-	
13	Ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas	3.556.471	5.059.214	83	-	-
14	Total ASF					109.183.341

¹ Komponen yang dilaporkan dalam kategori tanpa jangka waktu adalah komponen yang tidak memiliki jangka waktu kontraktual, antara lain: instrumen modal yang bersifat permanen (*perpetual*), *short positions*, *open maturity positions*, giro, ekuitas yang tidak masuk dalam kategori HQLA dan komoditas.

No	Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan (Desember 2020)				
		Nilai Tercatat berdasarkan Sisa Jangka Waktu				
		Tanpa Jangka Waktu ¹	<6 Bulan	≥6 Bulan-<1 Tahun	≥1 Tahun	Total Nilai Tertimbang
15	Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR					654.072
16	Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	921.793	-	-	-	460.896
17	Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>)	-	49.337.560	12.360.468	73.087.048	91.420.543
18	kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	-	-	-	-
19	kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	-	5.842.042	1.970.223	9.888.195	11.749.612
20	kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang di antaranya:	-	40.288.851	10.073.411	60.483.095	76.108.553
21	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	1.822.198	-	2.538.843	2.561.347
22	Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang di antaranya:	-	-	-	-	-
23	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	-	-	-	-
24	Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (<i>performing</i>) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar, dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	-	1.384.469	316.835	176.916	1.001.030
25	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	-	-	-	-	-



No	Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan (Desember 2020)				
		Nilai Tercatat berdasarkan Sisa Jangka Waktu				
		Tanpa Jangka Waktu ¹	<6 Bulan	≥6 Bulan-<1 Tahun	≥1 Tahun	Total Nilai Tertimbang
26	Aset lainnya:	4.484.081	4.592.555	179.165	6.376.548	11.284.058
27	Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas	-				-
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai <i>initial margin</i> untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai <i>default fund</i> pada <i>central counterparty</i> (CCP)		-	-	-	-
29	NSFR aset derivatif		29.925	29.925	29.925	29.925
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan <i>variation margin</i>		177.431	177.431	177.431	177.431
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	4.484.081	4.385.199	179.165	6.376.548	11.076.702
32	Rekening Administratif		121.521.707	121.521.707	121.521.707	1.090.189
33	Total RSF					104.909.758
34	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%))					115,34%

¹ Komponen yang dilaporkan dalam kategori tanpa jangka waktu adalah komponen yang tidak memiliki jangka waktu kontraktual, antara lain: instrumen modal yang bersifat permanen (*perpetual*), *short positions*, *open maturity positions*, giro, ekuitas yang tidak masuk dalam kategori HQLA dan komoditas.

ANALISIS NSFR KONSOLIDASI

Nama Bank : Bank BTPN, Tbk (Konsolidasi)

Posisi Laporan : Triwulan IV 2020

Analisis secara Konsolidasi (Audited)

Rasio Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*/NSFR) Bank secara Konsolidasi pada akhir 2020 sebesar 115,34% sesuai dengan POJK No.50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum.

Nilai *Asset Stable Funding* (ASF) selama bulan Desember sebesar IDR 121,01 triliun, sedangkan nilai *Required Stable Funding* (RSF) selama bulan Desember sebesar Rp104,91 triliun. Kenaikan NSFR dibanding periode sebelumnya terutama disebabkan karena penurunan nilai *Required Stable Funding* (RSF) lebih besar dari penurunan nilai *Available Stable Funding* (ASF).

Bank BTPN senantiasa memonitor dan menjaga agar dapat memenuhi ketentuan NSFR dan dalam strategi pendanaan telah mempertimbangkan portofolio dari sisi sumber dana maupun tenor berdasarkan dampaknya terhadap NSFR.

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan dengan melaporkan hasil pemantauan atas *Early Warning Indicators* dan Batasan Risiko Likuiditas secara harian. Bank juga secara berkala melaporkan kondisi dan perkembangan *liquidity key risk indicators* dalam rapat Komite ALCO serta Komite Manajemen Risiko (KMR).

Direktorat Manajemen Risiko, melalui Unit Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas, melakukan pemantauan terhadap indikator risiko likuiditas, sumber dan hasil pendanaan dan posisi likuiditas yang meliputi strategi penetapan suku bunga, perubahan perilaku nasabah, termasuk perubahan struktur dan volatilitas sumber pendanaan.

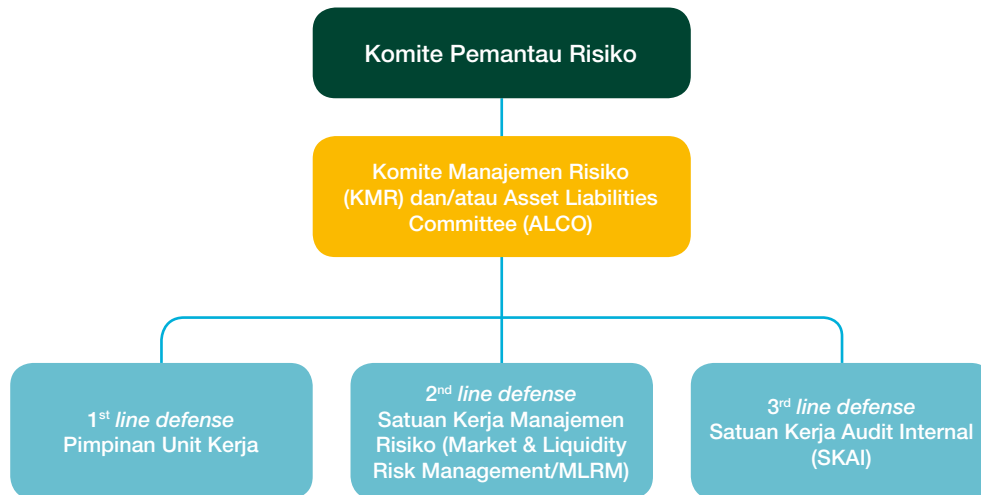
Untuk setiap pelampauan atau kejadian risiko (*risk event*) tertentu, SKMR melakukan komunikasi dan meminta tindak lanjut dari unit bisnis terkait, termasuk meneruskan masalah tersebut ke manajemen yang lebih tinggi.

Sistem informasi yang digunakan saat ini dapat menyajikan informasi tentang kondisi likuiditas secara harian untuk kebutuhan proses pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas.

4. Sistem Pengendalian Internal atas Risiko Likuiditas

Pemantauan terhadap risiko likuiditas dilakukan oleh ALCO dan Komite Manajemen Risiko. Pengelolaan risiko likuiditas juga dilakukan dengan menyiapkan *contingency funding plan* sebagai antisipasi jika terjadi kondisi likuiditas yang buruk. Sistem Pengendalian Intern telah secara efektif mendukung

pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas. Internal Audit telah melakukan audit secara berkala atas kecukupan kebijakan, prosedur, limit transaksi, dan toleransi yang berlaku serta kepatuhan dari setiap pihak terkait sesuai dengan rencana audit Bank yang telah ditetapkan.



D. Risiko Operasional

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi aktivitas operasional bank.

1. Tata kelola Manajemen Risiko Operasional

Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan secara aktif terhadap manajemen risiko operasional melalui berbagai komite seperti Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala sesuai *terms of reference* masing-masing untuk membahas risiko operasional beserta pelaksanaan, kewenangan dan tanggung jawabnya.

Satuan kerja ORM (*Operational Risk Management*) yang memiliki garis pelaporan secara langsung kepada Direktur Manajemen Risiko, bertanggung jawab atas manajemen risiko operasional. Bank telah merumuskan dan menetapkan tingkat risiko operasional secara memadai agar sejalan dengan sasaran dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. Tingkat risiko operasional tersebut dituangkan ke dalam *operational risk appetite* yang didokumentasikan dalam Kerangka Kerja Manajemen Risiko Operasional.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Satuan kerja ORM bertanggung jawab dalam pembuatan dan pengembangan kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional. Kebijakan dan prosedur tersebut dikaji ulang secara berkala, dengan memperhitungkan setiap perubahan signifikan, baik secara internal maupun eksternal. Setiap unit kerja wajib berpedoman kepada kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional dalam menjalankan aktivitas operasionalnya sehari-hari. Bank juga telah memiliki sistem dan penetapan ambang batas (*limit*) untuk mendukung pengendalian umum dan khusus, seperti pemisahan tugas dan tanggung jawab, cuti wajib tahunan, rekonsiliasi dan lainnya.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi risiko operasional dilakukan atas seluruh aktivitas/proses, produk, sistem dan organisasi. Selain dilakukan terhadap inisiatif baru Bank, pengkajian risiko juga dilakukan terhadap pengembangan ataupun perubahan. Proses identifikasi risiko operasional juga dilengkapi dengan perangkat manajemen risiko operasional di antaranya *Risk Grading Matrix*, *Risk Registration*, *KORI (Key Operational Risk Indicator)*, dan *Risk Acceptance*.



Proses pengukuran risiko meliputi kegiatan penilaian mandiri (*self-assessment*) secara berkala melalui KCSA (*Key Control Self Assessment*), analisa kejadian dan kerugian operasional, pelaksanaan aktivitas pemeriksaan oleh ICR, pengukuran *Key Operational Risk Indicators* (KORI), pembuatan *operational risk appetite* yang dilaporkan secara berkala dalam rapat Komite Manajemen Risiko (KMR).

Pemantauan risiko operasional dilakukan melalui pelaporan kepada manajemen senior dan regulator, baik secara rutin ataupun *ad-hoc*, termasuk pelaporan kejadian dengan kategori signifikan melalui SINP (*Significant Incident Notification Protocol*). Hal ini diterapkan agar setiap permasalahan yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti.

Pengendalian risiko operasional juga dilakukan dengan menerapkan mekanisme kontrol pencegahan, deteksi dan koreksi yang efektif dan/atau menyediakan asuransi yang mencukupi untuk meminimalkan dampak kerugian operasional bagi Bank. Sebagai salah satu tindakan pengendalian, Bank telah memiliki pedoman bagi Manajemen Kelangsungan Bisnis yang komprehensif yang merujuk kepada standar industri ISO-22301 yang diuji secara berkala.

Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional (ORMS) dilakukan untuk menyajikan kebutuhan informasi secara akurat, tepat waktu dan terkini untuk memudahkan analisis dan pengambilan keputusan.

4. Sistem Pengendalian Internal atas Risiko Operasional

Pengendalian internal atas risiko operasional dilakukan melalui penerapan model tiga lapis pertahanan (*three lines of defense*). Pada lini pertahanan pertama, *Risk Taking Unit* (RTU) dibantu oleh *Business Risk/ICR* melaksanakan pengelolaan risiko operasional sehari-hari. Pada lini pertahanan kedua, satuan kerja ORM bertugas mengidentifikasi dan mengukur risiko yang melekat, serta memastikan kecukupan mekanisme pengendalian yang telah diterapkan.

Pada lini pertahanan ketiga, Internal Audit secara independen bertanggung jawab memastikan bahwa risiko yang tersisa (*residual risks*) masih berada dalam batasan yang dapat ditoleransi oleh Bank (*risk tolerance*).

Penyelarasan kerja antara pihak-pihak bertanggung jawab atas praktik pengendalian internal Bank dilakukan secara berkelanjutan melalui *ICR maturity*

self-assessment, yang terstandarisasi dan forum-forum yang diselenggarakan oleh satuan kerja ORM untuk memfasilitasi fungsi *Internal Control & Risk*.

5. *Fraud Risk Management*

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur strategi *anti-fraud* yang memadai yang terus disempurnakan secara berkesinambungan. Pengelolaan risiko pelanggaran dilakukan secara sistematis melalui sejumlah proses/strategi.

Terkait dengan proses pencegahan risiko *fraud* maka Bank telah menjalankan program *anti-fraud awareness* untuk seluruh karyawan dan penandatanganan pakta integritas yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan setiap pegawai bank. Penyesuaian terhadap kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan strategi *anti-fraud* sehingga tetap sesuai dengan kondisi terkini, serta melakukan kajian risiko atas setiap proposal inisiatif, produk dan aktivitas Bank baik baru maupun pengembangannya. Sosialisasi *anti-fraud awareness* dilakukan melalui beberapa media, yaitu melalui *e-newsletter broadcast*, *e-mail broadcast*, *wallpaper desktop* PC/laptop, *standing acrylics*, komik strip pada B-Connect, BTPN Info, penayangan video animasi *anti-fraud*, penambahan informasi layanan *whistleblowing* pada *website* Bank BTPN yang dapat digunakan untuk pelaporan kejadian berindikasi *fraud*, pelaksanaan *mandatory assessment anti-fraud* melalui *e-learning*, pelaksanaan deklarasi *anti-fraud* melalui *e-learning* dan *anti-fraud awareness* yang disampaikan secara *in-class training* maupun *online training* kepada karyawan.

Sejalan dengan strategi *anti-fraud* yang berlaku, Bank juga secara berkelanjutan terus melakukan sosialisasi pelaporan kejadian indikasi *fraud* melalui *whistleblowing channel* sebagai salah satu media pendeteksian kejadian pelanggaran, yang secara berkala dikomunikasikan kepada seluruh karyawan melalui berbagai media internal Bank. Melalui saluran *e-mail* (*Speak Your Mind*, Ayo Laporkan), Whatsapps, telepon, surat maupun tatap muka, karyawan dapat mengungkap dan melaporkan setiap tindakan pelanggaran (*misconduct*).

Bank juga telah memiliki kebijakan yang memadai terkait proses investigasi dan pelaporan kejadian pelanggaran. Untuk setiap kasus *fraud* yang terbukti, proses pemberian sanksi diputuskan oleh Komite *Fraud* dan melibatkan unit kerja terkait, Fungsi *Business Risk/ICR* terkait, unit Sumber Daya Manusia dan *Anti-Fraud Management* (AFM). Implementasi keputusan Komite *Fraud* dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menentukan upaya perbaikan di masa yang akan datang.

Tabel Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank Secara Individual

(dalam jutaan Rupiah)

No	Pendekatan yang Digunakan	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Dasar	8.451.193	1.267.679	15.845.987	7.293.907	1.094.086	13.676.076
Total		8.451.193	1.267.679	15.845.987	7.293.907	1.094.086	13.676.076

Tabel Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan Rupiah)

No	Pendekatan yang Digunakan	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Dasar	12.441.111	1.866.167	23.327.084	9.819.730	1.472.960	18.411.994
Total		12.441.111	1.866.167	23.327.084	9.819.730	1.472.960	18.411.994

E. Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis dan bertujuan untuk memastikan bawa proses manajemen risiko hukum dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan serta proses litigasi.

1. Kerangka Manajemen Risiko Hukum

Direktur Kepatuhan & Legal adalah Direktur independen, sehingga tidak membawahi unit bisnis & operasional, treasury, keuangan, audit internal serta lainnya. Karena itu, Divisi Legal dan Litigasi memberikan pendapat hukum secara independen dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tanpa dipengaruhi satuan kerja lainnya.

Divisi Legal dan Litigasi juga memberikan jasa hukum baik secara tertulis dan atau lisan berupa pendapat hukum, pemeriksaan dokumen hukum, pembuatan draf dokumen hukum, penelitian informasi hukum, pendampingan hukum. Selain itu, memberikan bantuan hukum secara litigasi dan/atau penyelesaian sengketa hukum dengan mekanisme ADR (*Alternative Dispute Resolution*).

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Divisi Legal & Litigasi telah memiliki kebijakan, prosedur dan batasan kewenangan atas fungsi kerjanya. Terdapat Kajian Risiko Hukum atas transaksi yang sifatnya Materil dilakukan oleh Legal & Litigasi, sehingga di awal transaksi sudah dapat termitigasi risiko hukum yang mungkin akan terjadi dan telah dapat mengantisipasi atas risiko tersebut, misalnya kewajiban penggunaan *draft* perjanjian standar.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

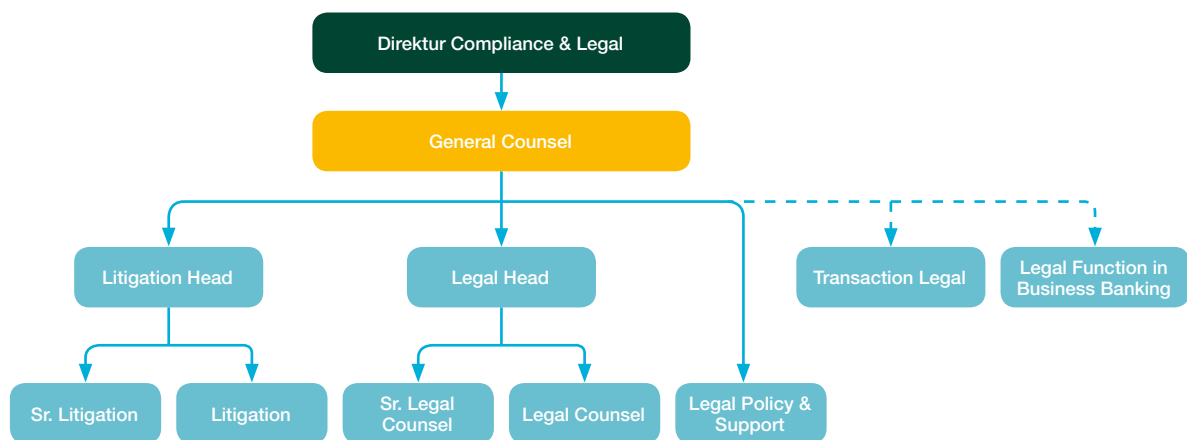
Direksi dan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan terhadap perkara-perkara di Bank, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- Laporan Perkara Mingguan kepada Direktur Kepatuhan & Legal
- Laporan Perkara Bulanan kepada General Counsel, Direktur Kepatuhan & Legal dan Komisaris
- Laporan Perkara Triwulanan kepada Komisaris
- Laporan *Ad Hoc* kepada Komisaris (jika ada)

Walaupun terdapat laporan reguler yang diatur tersebut, namun *General Counsel* setiap saat dapat memberikan laporan atau pendapat secara lisan untuk pengambilan keputusan yang sifatnya darurat dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi kepada Direktur Kepatuhan & Legal



Organisasi dalam manajemen risiko hukum adalah:



F. Risiko Strategis

Risiko strategis merupakan risiko akibat tidak tepatnya dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

1. Kerangka Manajemen Risiko Strategis

Unit Kerja Risiko Strategis berperan dalam pengelolaan risiko strategis dan berada di bawah pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Kelompok kerja risiko strategis mencakup keseluruhan lini bisnis dan unit-unit pendukung yang bekerja sama dengan Divisi *Investor Relations* dari Direktorat keuangan dalam menganalisis dan memonitor risiko strategis.

Bank senantiasa melakukan *review* atas isu strategi yang timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang berdampak negatif pada kondisi usaha atau keuangan Bank. Seluruh implementasi strategi dikembangkan secara berkala setelah melakukan evaluasi dan penyesuaian.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur proses perumusan dan penyusunan Rencana Bisnis Bank yang termasuk kajian mengenai arahan strategi dan aktivitas kunci untuk mendukung pelaksanaan strategi yang telah dicanangkan.

Kebijakan Manajemen Risiko Strategis mencakup:

- Kebijakan terkait risiko strategis sebagai pedoman bagi fungsi pengendalian strategis.
- Pengelolaan risiko strategis mencakup mitigasi kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

- Kebijakan umum audit sebagai pedoman Audit Intern Bank.

Sedangkan prosedur risiko strategis terkait dengan penetapan prosedur dan limit dengan berpedoman pada kebijakan yang diterapkan. Limit risiko strategis yang ditetapkan dapat meliputi risiko akibat penyimpangan dari rencana strategis karena adanya deviasi anggaran dan target waktu penyelesaian.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi terhadap risiko strategis merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko tersebut. Dalam proses identifikasi, Bank senantiasa mencatat dan menata usaha setiap data risiko strategis dan potensi dari kerugian akibat tidak terealisasi atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha atau rencana bisnis yang telah ditetapkan, terutama yang berdampak signifikan terhadap permodalan Bank.

Sistem informasi manajemen risiko strategis Bank mencakup kegiatan:

- Menyajikan kebutuhan informasi secara akurat, tepat waktu dan terkini.
- Mendukung fungsi manajemen untuk memudahkan proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
- Memenuhi ketersediaan data sesuai rencana bisnis Bank.
- Mendukung pelaksanaan jejak audit atas data-data kejadian risiko strategis dalam hal pengelolaan dan pelaporannya, serta mendokumentasikan setiap kejadian risiko strategis untuk proyeksi potensi kerugian periode tertentu.

4. **Sistem Pengendalian Internal atas Risiko Strategis**
Bank telah memiliki sistem pengendalian internal untuk manajemen risiko strategis dengan melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja Bank baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif.

G. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan bank dalam menjalankan kegiatan bisnisnya tidak patuh dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kerangka Manajemen Risiko Kepatuhan

Bank memiliki Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan yang merupakan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan tata kelola Fungsi Kepatuhan. Kaji ulang dan penyempurnaan terhadap Kebijakan Kepatuhan Bank dilakukan secara berkelanjutan antara lain sejalan dengan terbitnya ketentuan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) maupun ketentuan perundangan lainnya serta ketentuan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank.

Direksi senantiasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yang antara lain dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Kepatuhan kepada Direktur Kepatuhan & Legal (bulanan)
- Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan & Legal kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris (triwulanan)
- Laporan hasil pemantauan terhadap risiko kepatuhan kepada Dewan Direksi pada Rapat Direksi dan kepada Dewan Komisaris pada forum pertemuan Dewan Direksi dengan Dewan Komisaris serta pada rapat Komite Audit secara berkala.

Di samping itu, Direksi telah menyetujui Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan yang merupakan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan tata kelola Fungsi Kepatuhan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.

Sebagai pemenuhan terhadap POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Fungsi

Kepatuhan Bank yang dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun (semesteran).

Bank senantiasa memastikan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan tata kelola pada perusahaan anak, yaitu BTPN Syariah telah dilakukan dengan memadai sejalan dengan ketentuan OJK terkait Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan, termasuk Kebijakan dan Prosedur APU & PPT yang merupakan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan tata kelola fungsi kepatuhan yang digunakan sebagai pedoman dalam penerapan fungsi kepatuhan Bank. Secara berkelanjutan dilakukan kaji ulang dan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur dimaksud guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk penyempurnaan atas formulir-formulir yang digunakan dalam pelaksanaan APU & PPT.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pengelolaan Risiko Kepatuhan dilakukan secara berkelanjutan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko guna memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

- Proses identifikasi Risiko Kepatuhan dilakukan antara lain, melalui uji kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur serta produk/aktivitas baru maupun pengembangannya serta aksi korporasi yang akan dilaksanakan, termasuk terhadap transaksi yang wajib memperoleh persetujuan Komite Kredit.
- Proses Pengukuran Risiko Kepatuhan dilakukan melalui pelaksanaan penilaian mandiri atas Risiko Kepatuhan sebagai bagian dari penyusunan profil risiko Bank yang dilakukan secara berkala.

Sebagai *subsidiary* dari SMBC Group, proses pengukuran risiko dilakukan melalui pelaksanaan *Compliance Risk Assessment (CRA)* dan *Compliance Self Review (CSR)* berdasarkan ketentuan SMBC sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank serta ketentuan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku.



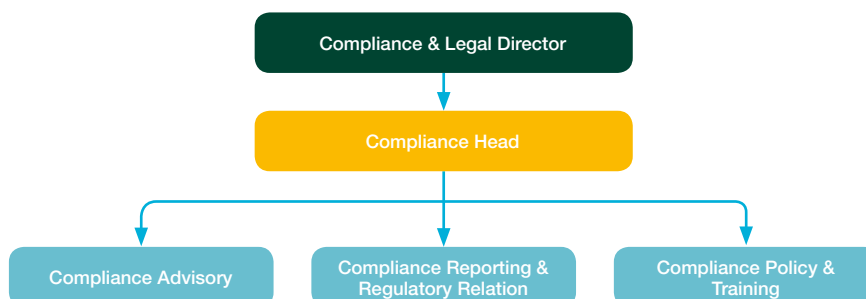
- Proses Pemantauan Risiko Kepatuhan dilakukan melalui antara lain *review* terhadap kesesuaian kebijakan Bank dengan ketentuan yang berlaku, pemenuhan parameter kehati-hatian, penyampaian laporan kepada OJK, BI dan otoritas lainnya yang berwenang, tindak lanjut temuan OJK/BI
- Proses Pengendalian Risiko Kepatuhan dilakukan melalui antara lain kaji ulang berkala terhadap Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan, melakukan tindak lanjut hasil audit eksternal maupun internal.
- Secara berkala dan berkelanjutan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank dilaporkan kepada Direktur Kepatuhan & Legal dan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris serta dalam forum Rapat Direksi, rapat Direksi dengan Dewan Komisaris serta pada rapat Komite Audit secara berkala

4. Sistem Pengendalian Internal atas Risiko Kepatuhan

Bank memiliki sistem pengendalian internal yang memadai guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan OJK dan BI maupun peraturan perundangan lainnya. Laporan penerapan kepatuhan disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala.

Bank senantiasa memastikan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan tata kelola pada perusahaan anak, yaitu BTPN Syariah telah dilakukan dengan memadai sejalan dengan ketentuan OJK terkait Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan di Bank adalah sebagai berikut.



5. Pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko tahun 2020:

Penilaian atas kepatuhan terhadap regulasi Selama tahun 2020, Bank dapat memelihara pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan OJK, BI serta peraturan perundangan yang berlaku, yang telah dicapai Bank antara lain:

- Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) posisi Desember 2020 yang berada pada peringkat 2 (Sehat).
- Pemenuhan terhadap *Regulatory Parameter* antara lain:
 - Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), termasuk Rasio Penyediaan Modal Inti (*Leverage Ratio*) di atas ketentuan yang berlaku.
 - Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
 - Net NPL yang berada di bawah level 1%.
 - Pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) baik Rupiah maupun Valas di atas ketentuan yang berlaku.
 - Pemenuhan Posisi Devisa Netto (PDN) sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) dan pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) di atas ketentuan yang berlaku
- Pemenuhan pembentukan *capital surcharge* sesuai ketentuan OJK sejalan dengan penetapan BTPN sebagai Bank Sistemik.
- Mayoritas pemenuhan terhadap komitmen tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dapat dipenuhi sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

H. Risiko Reputasi

Reputasi BTPN merupakan aset yang sangat penting bagi kelangsungan bisnis. Oleh karena itu setiap kegiatan penyampaian pesan kepada pihak eksternal, baik yang melibatkan media massa maupun tidak, yang dinilai dapat memengaruhi reputasi perusahaan perlu dikoordinasikan kepada Corporate Communications yang berada didalam divisi Communications & Daya.

Mengacu pada SOP.01/CCOM/03/2018, Corporate Communications merupakan unit di bawah Direktorat Legal, Compliance & Corporate Secretary yang memiliki fungsi utama mengelola reputasi perusahaan, dengan cara melakukan aktivitas komunikasi (penyampaian informasi) kepada pihak internal dan eksternal.

Tugas dan fungsi pokok Corporate Communications yaitu mengelola reputasi perusahaan melalui aktivitas komunikasi yang efektif dan efisien sesuai dengan strategi, visi, misi dan nilai-nilai perusahaan. Terkait dengan fungsi pokok untuk mengelola reputasi perusahaan, Corporate Communications bertanggung jawab dan berperan sebagai pintu utama dalam penyampaian informasi internal dan eksternal. Corporate Communications juga melaksanakan fungsi pengawasan (kontrol & *monitoring*) seluruh aktivitas komunikasi BTPN secara umum dan secara khusus yang dilaksanakan oleh setiap unit bisnis dan unit pendukung.

1. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Profil risiko Bank secara Individu dan Konsolidasi pada triwulan III-2020, berada pada peringkat 2 (*Satisfactory*).

2. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Mengacu pada *Crisis Communication Manual*, Divisi Communications & Daya adalah penanggung jawab komunikasi krisis reputasi di pusat dan menunjuk penanggung jawab komunikasi krisis reputasi di daerah (*regional*). Communication & Daya memberikan dukungan untuk semua aspek komunikasi eksternal dan internal mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitor dan evaluasi proses komunikasi di saat krisis reputasi.

Tugas utama dalam situasi krisis reputasi, antara lain:

- Menyusun strategi komunikasi dan taktik mengomunikasikan;
- Merancang dan menyusun pesan-pesan pokok;
- Mempertimbangkan saluran (*channel*) komunikasi yang digunakan;
- Menentukan juru bicara dan penanggung jawab komunikasi;
- Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab komunikasi dan juru bicara yang ditunjuk;
- Melaksanakan fungsi komunikasi secara intensif kepada pihak eksternal dan internal;
- Mengatur permintaan informasi atau wawancara dengan media;
- Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap efektivitas komunikasi.



3. Sistem Pengendalian Internal atas Risiko Reputasi

Mengacu pada SOP.01/CCOM/03/2018, Corporate Communications memiliki tugas dan fungsi utama mengelola reputasi Bank, dengan cara melakukan program komunikasi yang efektif dan berkualitas, untuk mendukung aktivitas Bank, sehingga tercapai visi dan misi Bank. SOP Corporate Communications menjadi pedoman pengelolaan reputasi Bank melalui program dan aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh Corporate Communications.

Untuk mengoptimalkan fungsi dan peran Corporate Communications maka seluruh program dan aktivitas penyampaian informasi yang dilaksanakan Corporate Communications harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Di antaranya, undang-undang dan peraturan instansi pemerintah terkait, kebijakan dan peraturan BTPN, Pedoman Kerja (*Standard Operating Procedures*) Corporate Communications, ketentuan dan peraturan terkait lainnya, serta prinsip *Good Corporate Governance*.

Corporate Communication merupakan unit di bawah Direktorat Legal, Compliance & Corporate Secretary yang terdiri dari fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. External Communication;
2. Internal Communication;
3. Corporate Brand & Activation





TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

230	Sumber Daya Manusia
234	Teknologi Informasi dan Operasional
234	Teknologi Informasi
240	Operasional



Tiga lini dalam pendukung bisnis: Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi serta Operasional memberikan dukungan maksimal dalam pencapaian kinerja BTPN, terutama pada seluruh segmen usaha. Pada tahun 2020, kinerjanya tetap maksimal walaupun di tengah pandemi COVID-19.

Sumber Daya Manusia



Jumlah Jam Pelatihan
SDM

240.305

Pada tahun buku 2020, BTPN telah merealisasikan kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai. Kegiatan ini dilakukan secara berkala setiap tahun, sehingga SDM yang merupakan pendukung atau organ penting dalam pencapaian tujuan Bank mampu memberikan kontribusi maksimal bagi perusahaan

KEBIJAKAN BIDANG SDM TAHUN 2020

Beberapa inisiatif utama yang telah dilaksanakan oleh Fungsi Human Capital pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Stabilisasi organisasi pasca merger dan optimalisasi fungsi organisasi secara berkesinambungan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Fungsi Human Capital bekerja sama dengan fungsi-fungsi terkait untuk memastikan program integrasi budaya berjalan dengan baik melalui pelaksanaan pengkajian kebijakan dan prosedur kerja yang ada di Fungsi Human Capital agar tetap patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang ada.
 - b. Pelaksanaan program-program penyalarsan budaya dan kepemimpinan di seluruh jajaran organisasi melalui program komunikasi visi, misi dan nilai-nilai perusahaan kepada seluruh pegawai melalui serangkaian kunjungan manajemen ke kantor-kantor cabang, pembentukan agen-agen perubahan dan

- c. Optimalisasi fungsi organisasi sebagai salah satu usaha untuk mendukung kelancaran proses integrasi pasca merger. Inisiatif yang fokus kepada proses *excellence*, otomasi proses dan digitalisasi yang berdampak kepada penggabungan beberapa fungsi telah dijalankan.
- d. Sejalan dengan inisiatif digitalisasi dan upaya mengatasi situasi pandemi COVID-19, Bank telah mengubah program-program talenta serta pelatihan menjadi digital dan virtual secara penuh. Bank juga menyediakan fasilitas *employee assistance program* untuk memberikan dukungan kepada pegawai untuk menjaga kesehatan mental dan psikologis.



2. Rekrutmen dan pengembangan kompetensi pegawai, baik secara *soft* dan *hard competency* terus dilakukan, terutama terhadap area bisnis baru yang akan dibangun sejalan dengan arahan strategis Bank dan juga pada area teknologi. Sejumlah kegiatan terkait inisiatif ini adalah:
 - a. Proses rekrutmen untuk pemenuhan sumber daya manusia, baik untuk pemenuhan kebutuhan bisnis dan *replacement* tetap dilakukan selama tahun 2020.
 - b. Realisasi penyelenggaraan pelatihan selain difokuskan pada pengembangan kompetensi yang mendukung bisnis, dalam masa pandemi ini pelatihan untuk pegawai juga didesain untuk mempersiapkan pegawai menghadapi kebiasaan baru termasuk *new way of working*.
3. Bank tetap menjalankan fokus terhadap proses pengelolaan *Talent Management*. Beberapa program telah didesain untuk melahirkan calon pemimpin masa mendatang di beberapa *layer* organisasi. Adapun programnya adalah:
 - a. Program *Management Trainee* yang dirancang untuk menyiapkan *future leaders* Bank BTPN, yaitu *Corporate Acceleration Program (CAP) Batch 4*.
 - b. Program *Management Trainee* yang dirancang secara khusus untuk mengembangkan talenta di area bisnis tertentu, antara lain di bidang IT, yaitu *Creative Hacknology Intensive Program (CHIP) Batch 5* dan *6* dan di bidang *Retail Banking* melalui *Relationship Manager Development Program (RMDP) Batch 3*.
 - c. Selain program *management trainee*, selaras dengan implementasi *Employee Value Proposition (EVP)* dan untuk meningkatkan kolaborasi dengan *SMBC Group*, saat ini telah dipersiapkan sebuah program kerja sama dengan *SMBC APAC* untuk dapat memberikan eksposur internasional bagi para talenta terpilih melalui pelatihan, proyek berskala internasional, maupun kesempatan bekerja di beberapa unit di luar negeri.



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021

Mengacu kepada inisiatif strategis Bank untuk secara terus-menerus menjaga stabilitas organisasi dan menciptakan sinergi di antara fungsi dan bisnis yang ada, Human Capital BTPN akan fokus pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada. Bank juga akan membangun Fungsi Human Capital yang secara berkesinambungan mampu mendukung pertumbuhan organisasi di masa depan. Fokus strategi Human Capital diturunkan dalam 4 (empat) strategi utama Human capital sebagai berikut:

1. Memperkuat inisiatif yang ada saat ini untuk mendukung organisasi. Selain memulai inisiatif pelaksanaan program, *Human Capital* juga akan berkolaborasi dengan fungsi-fungsi terkait untuk memperkuat sinergi di seluruh organisasi.
2. Di area *Talent Management* dan *Development*, Fungsi Human capital akan fokus kepada usaha untuk mempertahankan *key talent* (pegawai-pegawai yang menduduki fungsi kerja kunci), dan fokus kepada persiapan talenta masa depan.
3. Untuk mendukung sinergi bisnis dan mencapai tingkat pertumbuhan di masa depan, inovasi Fungsi Human Capital terkait dengan produk, layanan dan inisiatif-inisiatif diarahkan untuk memperkuat *employee value propositions*, melakukan pengkajian terhadap: benefit pegawai, penerapan *way of working* yang baru, model kompetensi dan jenjang karir dan pelaksanaan program *employee engagement*.
4. Untuk mendukung tercapainya inisiatif-inisiatif *human capital* di atas, Fungsi Human Capital juga akan melakukan pembaharuan dan peningkatan atas proses, teknologi dan sarana pendukung.



REKRUTMEN

Pada tahun 2020 Bank merekrut 634 pegawai untuk bergabung dengan BTPN. Perekrutan pegawai dilakukan melalui beberapa *channel* yang dimiliki Bank di antaranya *website* karir BTPN, situs pencarian kerja, kerja sama dengan beberapa universitas untuk mendapatkan talenta terbaik dan memberikan kesempatan yang setara serta seluas-luasnya bagi calon pegawai. Namun demikian, pengisian jabatan tertentu ditujukan untuk pegawai internal, dengan maksud untuk memberikan kesempatan pengembangan pegawai BTPN.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pada tahun buku 2020, Bank BTPN telah merealisasikan kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai. Kegiatan ini dilakukan secara berkala setiap tahun, sehingga SDM yang merupakan pendukung atau organ penting dalam pencapaian tujuan Bank mampu memberikan kontribusi maksimal bagi perusahaan.

Pengembangan kompetensi tersebut diikuti oleh pegawai dari level tertinggi dan terendah. Rata-rata total investasi yang direalisasikan oleh Bank bagi setiap pegawai untuk kegiatan tersebut mencapai Rp8 juta per orang.

Rincian realisasi pelatihan disampaikan pada bab “Profil Perusahaan” yang ada dalam Laporan Tahunan ini. Sedangkan secara akumulasi, disajikan pada tabel di berikut.

REALIZATION OF THE COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

Uraian	Unit	Realisasi 2020
Jumlah Program Pelatihan	Full unit	281
Jumlah Peserta	Person	87.970
Total Man-days	Day	30.038
Jumlah Investasi Pelatihan	Rp juta	71.070
Rata-rata Investasi Pelatihan per Karyawan	Rp juta	9,6
Total Jam Pelatihan	Hours	240.305

Teknologi Informasi dan Operasional

Pada tahun 2020, teknologi informasi BTPN, antara lain fokus pada konsolidasi aplikasi inti Bank pasca merger. Pada saat bersamaan, Bank juga meningkatkan *user experience* nasabah BTPN atas penggunaan layanan digital Bank. Hal ini sejalan dengan fokus Bidang Operasional yang menitikberatkan kegiatan pada peningkatan layanan tanpa cabang.

234

Bank BTPN menyadari bahwa teknologi informasi (TI) saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan operasional dan pertumbuhan bisnis

Bank. Karena itu, perbankan digital yang menjadi keunggulan utama Bank terus dikembangkan secara berkesinambungan.

Pada tahun 2020, yang menjadi fokus Direktorat TI Bank BTPN adalah menyusun *IT Strategic Planning* (ITSP) yang baru untuk periode tahun 2020-2022. Hal ini merupakan respons atas penggabungan usaha Bank. Rincian fokus kegiatan pada tahun buku dimaksud, antara lain:

1. Konsolidasi aplikasi inti Bank yang mencakup *core banking system*, aplikasi pendukung fungsi *corporate banking* dan aplikasi *non-core banking* lainnya dalam rangka menyederhanakan arsitektur aplikasi pasca merger.
2. Mendayagunakan *platform* digital pada beragam produk dan kanal dalam rangka menciptakan arsitektur *platform* digital yang seragam, sehingga secara konsisten menyediakan pengalaman pelanggan yang konsisten dan sempurna.
3. Memperluas penggunaan API dan *Microservices* yang dimiliki oleh Bank termasuk membangun kemampuan dalam mengelola dan mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan API untuk berkolaborasi dengan berbagai mitra.
4. Membangun *digital servicing hub* yang membuat semua informasi terkait dengan profil pelanggan, riwayat transaksi pelanggan, dan riwayat interaksi dari setiap hubungan antara pelanggan dan bank dapat diakses secara *bankwide* dan secara *real time* untuk memungkinkan *integrated servicing strategy* (CRM, pemasaran, dan penjualan) di antara lini bisnis. Saat ini Bank sedang dalam tahap pemilihan solusi.
5. Melanjutkan peningkatan manajemen data dan kemampuan tata kelola data pada *data lake* yang dimiliki serta infrastruktur *data warehouse* untuk memastikan kualitas dan konsistensi data dalam memberikan informasi yang tepat waktu dan akurat.



6. Melakukan ekspansi modernisasi infrastruktur dan memiliki sistem pengawasan untuk mempertahankan keandalan dan ketersediaan layanan IT. Pengembangan otomatisasi infrastruktur juga akan dilakukan untuk memperoleh kecepatan yang lebih tinggi dan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur untuk *compute*, *storage*, dan *network*.
7. Melakukan pengembangan dan pemutakhiran sistem-sistem terkait regulasi (termasuk pelaporan terhadap regulator) sesuai dengan kebutuhan yang telah disyaratkan oleh regulator.
8. Melakukan pengembangan sistem baru terkait layanan kartu kredit kepada nasabah guna menambah jenis layanan yang akan ditawarkan ke nasabah.
9. Melanjutkan implementasi otentikasi nasabah dengan menggunakan teknologi biometrik.

Selain itu, Bank juga memastikan layanan yang terkait kepatuhan, seperti AML (*Anti Money Laundering*) dan E-KYC dapat dilakukan secara konsisten dan stabil. Seluruh kanal layanan Bank BTPN pun mengadopsi yang berkenaan dengan kepatuhan tersebut.

Kendati demikian, sepanjang tahun 2020 ada sejumlah tantangan yang dihadapi pengelolaan TI oleh Bank. Pertama, berkenaan dengan adanya musibah COVID-19. Peningkatan kolaborasi di lingkungan tim maupun dengan para pemangku kepentingan dan nasabah terkendala.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Tim TI tetap melakukan komunikasi yang baik agar dapat mengurangi interpretasi atau asumsi yang kurang tepat. Selain itu, ada program *daily standup* dan *daily checkout* serta transparansi informasi demi mengatasi tantangan COVID-19 dan bekerja dari rumah (*Work From Home*).

Tantangan berikutnya adalah memberikan penjelasan atau transparansi informasi kepada manajemen Bank BTPN yang baru pasca merger atas perjalanan transformasi TI. Informasi tersebut, terutama yang berkenaan dengan cara kerja, investasi serta dukungan yang diharapkan agar pengembangan TI sejalan dengan tujuan taktis maupun strategis Bank BTPN.

VISI DAN MISI DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI

Visi

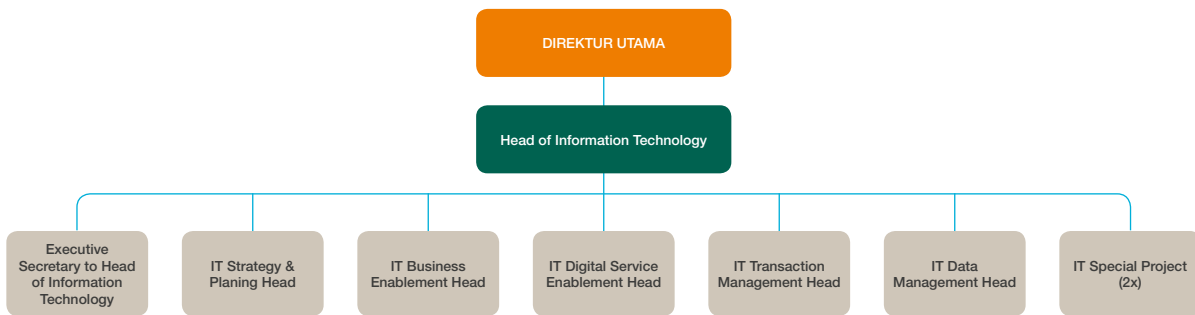
Menjadi penyedia solusi inovatif terbaik, menghadirkan pengalaman berbeda.

Misi

Membuat hidup para pemangku kepentingan lebih mudah melalui kreasi layanan yang bernilai.

ORGANISASI PENGELOLAAN TI

Pelaksanaan kegiatan teknologi informasi di lingkungan Bank dikelola oleh Direktorat Teknologi Informasi yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Berikut ini adalah struktur organisasi yang berlaku hingga tahun 2020.



SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Menjadi bank pertama yang memiliki kemampuan digital (*Digital Capabilities*) dan memberikan solusi *Digital Banking*, Bank BTPN harus menyiapkan SDM yang berkualitas. Kendati demikian, dalam konteks tersebut, tantangan yang dihadapi adalah banyaknya SDM bidang TI di lingkungan Bank yang menjadi incaran industri keuangan dan teknologi informasi.

Untuk mengatasi hal itu, Direktorat TI bersama Human Capital menjalankan program CHIP (Creative Hacknology Intensive Program) agar talenta-talenta TI dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Termasuk dalam program tersebut, mengembangkan talenta digital untuk area lainnya agar transformasi dapat dilakukan secara berkesinambungan. Misalnya pada *area DevOps, Data Engineer, Agile leadership*, dan lainnya.

Hingga akhir tahun 2020, jumlah SDM di Direktorat Teknologi Informasi sebanyak 426 orang yang terbagi dalam 6 (enam) organisasi:

Organisasi	Tanggung Jawab	Total (Karyawan)
IT Business Enablement	Menyediakan solusi IT bagi pengguna di berbagai lini bisnis	55
IT Digital Service Enablement	Menyediakan solusi IT yang digunakan bersama di seluruh bank dan fokus pada penyediaan aset digital melalui Antarmuka Pemrograman Aplikasi/ Microservices	202
IT Transaction Management	Operasional infrastruktur IT dan penyediaan layanan IT bagi seluruh pengguna di bank	130
IT Strategy & Planning	Strategi dan perencanaan IT, tata kelola, pengelolaan risiko, pengelolaan rekanan dan anggaran biaya IT	39
IT Data Management	Ketersediaan, manajemen dan operasional data bank	27
IT Special Project	Implementasi atas proyek prioritas utama bank termasuk konsolidasi core banking, AML/KYC dan Digital SME	3



Untuk mendukung kinerja SDM Teknologi Informasi di BTPN, Direktorat TI juga menyelenggarakan pengembangan kompetensi. Pada tahun 2020, kebijakan di bidang tersebut adalah mengoptimalkan penggunaan UDEMY, Coursera dan *media e-learning online* lainnya.

Beberapa program *sharing* dan *learning internal* juga telah direalisasikan pada tahun buku 2020.

SERTIFIKASI YANG DIMILIKI

Untuk menjamin standar mutu pengembangan teknologi informasi di lingkungan BTPN, sejumlah SDM di lingkungan Bank telah memiliki sertifikasi atau *training* berkaitan dengan TI. Di antaranya adalah:

- *Agile Practices (Product Owner, Scrum Master, Kanban* serta *Agile Coach)*
- *DevOps (Container Platform, Kubernetes, Continuous Integration/Continuous Deployment, Automation Testing)*
- *Modern Application Development (Microservices, Node.JS, Spring Boot, React Native, AngularJS)*
- *Engineering Practices (misal Application Monitoring, Performance Testing)*

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Penerapan tata kelola teknologi informasi (TI) di lingkungan Bank BTPN harus sejalan dengan rencana Bank dan induk usaha (SMBC Group). Selain itu, tentu saja memperhatikan kesesuaian dengan aturan yang ada, baik dari regulator di bidang keuangan maupun pemerintah.

Implementasi kebijakan tata kelola tersebut dituangkan dalam IT *Strategic Planning* (ITSP - IT Road Map) yang disusun setelah mempertimbangkan:

- Visi dan Misi BTPN.
- Tujuan Strategis Bank BTPN.
- Aspirasi dan strategi saat merger.
- Tren Industri dan Informasi Teknologi, misalnya *Open Source, Cloud, Open API*, dan lainnya.
- *Key point* serta tantangan utama.
- Turut juga mempertimbangkan *IT Strategic Initiative* yang dilakukan pada periode sebelumnya.

Sistem Evaluasi

Setiap tahun, Direktorat TI melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja pengembangan TI. Hingga berakhirnya tahun buku 2020, performa TI pada skala 95,5%, dari indikator minimal 93,0%.

Performa tersebut diukur dengan melihat performa masing-masing layanan TI seperti dijelaskan dalam tabel berikut ini.

No.	Indikator	Penjelasan Evaluasi
1	Memampukan Bisnis (<i>Business Enablement</i>)	Pengukuran kinerja IT dalam menyediakan layanan pengembangan aplikasi IT, baik melalui metode <i>agile</i> maupun <i>waterfall</i> . Hal yang diukur adalah biaya, kualitas, waktu penyediaan dan umpan balik dari pengguna.
2	Pengalaman Pengguna Akhir di Cabang	Pengukuran dari layanan IT dalam menyediakan jaminan ketersediaan jaringan data di berbagai jenis cabang, ATM dan pusat pembayaran (<i>payment point</i>).
3	Kesempurnaan Operasional (<i>Operation Excellence</i>)	Pengukuran dari layanan IT dalam menyediakan jaminan ketersediaan beragam aplikasi dan sistem di Kantor Pusat BTPN dan pusat pengelolaan data (<i>data center</i>). Dalam hal ini, pengukuran menggunakan ketersediaan seluruh aplikasi dari <i>database, server</i> aplikasi atau seluruh perangkat. Akurasi dari proses akhir hari dan akhir bulan juga menjadi pengukuran.
4	Pengalaman Nasabah (<i>Customer Experience</i>)	Pengukuran layanan IT dari sudut pandang pelanggan. Pada kategori ini, IT mengukur layanan perbankan BTPN seperti halnya layanan tersebut diakses oleh nasabah dan waktu yang dibutuhkan untuk proses transaksi. Dengan pengukuran secara periodik setiap 15 menit sebagai contoh, maka Bank dapat menentukan indeks kepuasan nasabah, khususnya untuk layanan yang langsung digunakan seperti Layanan Digital, Internet Banking, Layanan Perbankan melalui USSD (WoW!).

ROADMAP

BTPN telah menyelesaikan proyek *IT Strategic Plan* (ITSP) 2017-2019. ITSP periode tersebut yang sudah direalisasikan telah memberikan fondasi kuat untuk tahapan berikutnya. Dengan demikian, ada kesinambungan rencana strategis. Selanjutnya, Bank telah menyusun ITSP baru yang akan berlaku untuk periode 2020–2022.

PENCAPAIAN 2020

BTPN terus membangun sistem teknologi informasi yang terkini dan sejalan dengan bisnis Bank. Pengembangan tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan akses, keamanan bertransaksi, membantu layanan *back office* dalam mendukung operasional bisnis Bank, serta dapat memberikan efisiensi biaya operasional dalam mendukung bisnis Bank.

Pasca merger, Direktorat TI melakukan sejumlah hal krusial terkait dengan teknologi informasi. Dari mengonsolidasikan sistem hingga meningkatkan tata kelola TI agar dapat sejalan dengan aturan SMBC sebagai induk usaha dan *Global Systemic Bank*.

Dalam realisasinya, Direktorat TI pada tahap awal telah membentuk gugus tugas audit (*Audit Task Force*) dan penguatan unit kerja *IT Governance*. Unit kerja ini fokus pada *ensuring* dan melapor langsung kepada *Head of*

IT. Rekomendasi dari *Task Force Audit* dan unit kerja baru tersebut diharapkan dapat secara berkelanjutan meningkatkan tata kelola yang baik di lingkungan Bank dan memastikan penerapan TI telah memenuhi berbagai aturan pasca merger.

Selain itu, Direktorat TI juga telah merealisasikan 240 proyek. Sebanyak 119 di antaranya telah selesai dan 121 lainnya masih dalam proses.

Direktorat TI mengimplementasikan standar kerja yang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2017. Tema dari standar tersebut adalah “*New Way of Working*”. Pada tahun 2020, standar tersebut terus disempurnakan tingkat *maturity* dan adopsinya.

Beberapa hal ini bagian dari “*New Way of Working*” yang dimaksud dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

No.	Program	Penjelasan Aktualisasi
1	<i>Agile (Scrum)</i>	Pengembangan aplikasi dengan cara iterasi dan batasan waktu yang tetap.
2	<i>DevOps</i>	Proses otomatisasi untuk pengujian dan penyebaran dalam pengembangan aplikasi dengan tujuan agar secara proses tetap konsisten.
3	Adopsi arsitektur native cloud	Penerapan <i>Microservices</i> dan <i>Containerization</i> (Layanan <i>Platform</i>), sehingga aplikasi dapat dengan mudah diperluas dan juga mudah mengelola perawatannya.
4	Peningkatan <i>Engineering Practices</i>	Fasilitas pembelajaran dan praktik standar sehingga produk IT berkualitas, berkesinambungan dan dirawat secara baik.

Pada unit kerja yang terkait infrastruktur, selain mengadopsi “*New Way of Working*” juga menyesuaikan dengan mengusung tema “*excel@ITTM* (*Innovate, Team Up, Take it On dan Make it Happen*)” serta menjalankan beberapa cara kerja baru. Penjelasan disampaikan dalam tabel di bawah ini:

No.	Program	Penjelasan Aktualisasi
1	<i>DevSecOps</i>	Menerapkan otomasi termasuk mencakup aspek keamanan informasi.
2	Antar muka aplikasi dan pemantauan (<i>Application & Dashboard Monitoring</i>)	Pemantauan tidak hanya dilakukan pada aplikasi dan <i>server</i> , tetapi juga sudut pandang nasabah (pemantauan pengalaman nasabah).
3	Otomasi	Menyediakan layanan infrastruktur yang lebih cepat terkait dengan proses otomasi.
4	<i>Kanban</i>	Menyediakan aktivitas atau tugas yang transparan sehingga tim IT memiliki kesamaan informasi serta kecukupan upaya untuk melakukan kolaborasi.
5	<i>TGIF</i>	Waktu untuk berbagi rencana, kemajuan, pengetahuan atau perkenalan pada inovasi baru.

KEUNGGULAN TI BANK BTPN

Bank memiliki sejumlah keunggulan TI di lingkungan industri perbankan yang menjadi kekuatan, sehingga terus dijaga agar berkesinambungan. Keunggulan yang menjadi kekuatan tersebut, terutama berkenaan dengan *local digital capability* yang menjadi *Unique Value Proposition* (UVP).

Hal itu, antara lain berkenaan dengan karyawan pengelola TI di lingkungan Bank yang hampir keseluruhannya warga Indonesia. Mereka mengadopsi teknologi sekaligus menjalankan cara kerja untuk mengimplementasikan perkembangan produk digital secara terus-menerus. Mulai dari *Design Thinking* (*Co-Creation*), *Agile Development Methodology*, proses otomasi melalui *DevOps practices*, *User Journey Monitoring* dan kapabilitas lainnya.



Selain itu, BTPN memiliki intensi untuk kapabilitas digital selalu ada dan terus berkembang dengan strategi jangka panjang melalui program CHIP, *internship* serta program *management trainee* lainnya. Program tersebut menciptakan adanya kesinambungan dari sisi ketersediaan talenta dan perkembangan produk digital.

Hal itu memperbesar kesempatan Bank untuk unggul dalam inovasi di bidang TI. Bahkan ikut memberikan solusi yang relevan untuk nasabah *existing* maupun segmen baru perbankan digital.

INVESTASI TEKNOLOGI

Pada tahun 2020, total biaya investasi yang dikeluarkan Bank untuk pengembangan TI mencapai Rp475 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp425 miliar, meningkat 9%.

RENCANA STRATEGIS 2021

Direktorat TI Bank BTPN telah mengidentifikasi sejumlah tantangan yang akan dihadapi pada tahun depan. Sejumlah hal yang akan diantisipasi dan rencana mitigasi adalah sebagai berikut:

No.	Tantangan	Rencana Mitigasi
1	Ketersediaan Dana	Beberapa inisiatif yang tidak terencana atau bertujuan untuk peningkatan akan diproses secara selektif agar dapat dilanjutkan ke tahap implementasi berikutnya.
2	Pengambilan keputusan atas prioritas	Direktorat IT akan mendiskusikan prioritas bersama dengan <i>stakeholder</i> .
3	Kapasitas	Bank telah menentukan kapasitas maksimum personel IT agar penggunaan talenta dapat optimal dan mampu mencapai pemenuhan target sesuai rencana.
4	Kurangnya Penguasaan Teknis	Direktorat IT akan membentuk unit khusus yang fokus pada penelitian dan pengembangan dan juga pelatihan (internal) yang bertujuan untuk meningkatkan penguasaan teknologi serta implementasinya dapat diperluas agar lebih mendapat manfaat yang lebih optimal.
5	Kompleksitas Sistem	Melakukan konsolidasi beberapa sistem khususnya sistem utama penunjang kegiatan perbankan dan sistem lainnya yang bertujuan untuk mengurangi kompleksitas, memudahkan pemeliharaan dan meningkatkan penguasaan dalam pengelolaan sistem yang ada.
6	COVID-19	Membangun komunikasi yang konsisten dalam beberapa bentuk seperti IT <i>Townhall</i> , <i>1 on 1 Meeting</i> , <i>Coffee Corner with CIO</i> atau para pimpinan dan forum komunikasi lainnya.
7	Peningkatan Biaya	Faktor eksternal dapat mempengaruhi rencana IT, seperti perubahan nilai tukar, biaya pemeliharaan, begitu juga dengan perubahan model lisensi baru dari pemilik produk. Hal ini dapat diantisipasi dengan menyiapkan pencadangan terpisah, dan juga melakukan negosiasi, dan menerapkan sistem tender termasuk pada perangkat IT.
8	Keamanan siber	Mengimplementasikan kapabilitas lanjutan dalam kemanan siber (<i>Next Generation Security Operation Center</i>) dan juga melanjutkan program kemanan siber yang ada saat ini khususnya dalam hal peningkatan kesadaran dari semua <i>stakeholder</i> termasuk nasabah.
9	Persaingan dalam pemenuhan talenta	Kelangkaan talenta digital harus diantisipasi secara jangka panjang dengan menjalankan program CHIP serta diformalkan sebagai unit kerja Academy di IT.

Sedangkan untuk rencana strategis, seluruhnya telah tercantum dalam Rencana Pengembangan Teknologi Informasi 2021. Terkait dengan hal itu, terdapat 73 inisiatif yang ingin dilakukan untuk mendukung bank dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp300 miliar.

Fokus utama selain melanjutkan rencana strategis 2020 dan mendukung inisiatif strategis bisnis terkait implementasi teknologi di tahun 2021, Direktorat TI juga akan meningkatkan sistem dan proses keamanan terkait pengembangan aplikasi dan infrastruktur. Kemudian, melanjutkan peningkatan manajemen data dan kemampuan tata kelola data terutama pada pemantauan operasional layanan serta standardisasi data.

Selain itu, inisiatif yang akan dijalankan adalah melanjutkan mengembangkan inovasi digital serta talenta untuk mendukung rencana bisnis strategis. Bersamaan dengan itu, Bank akan mengoptimalkan manajemen pengelolaan perangkat pada *end user*.

Standard acuan yang menjadi dasar dalam pengelolaan TI adalah ITSP 2020-2022. Kendati demikian, dalam realisasinya tetap memperhatikan kondisi perekonomian, khususnya terkait pandemi COVID-19.

Operasional

Bidang Operasional di PT Bank BTPN Tbk (“BTPN”, “Bank”) memiliki kebijakan dan visi sebagai mitra yang berkompeten untuk mendukung kinerja dan percepatan pengembangan usaha Bank melalui layanan operasional yang terbaik. Pada prinsipnya, kehadiran Bidang Operasional bertujuan untuk mendukung pencapaian bisnis Bank.

Dalam rangka mendukung pengembangan kinerja, Bidang Operasional telah mengimplementasikan 3 (tiga) pilar strategi untuk meningkatkan kualitas operasional menjadi lebih baik. Rinciannya sebagai berikut:

1. Sejalan dengan strategi BTPN untuk terus melakukan transformasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, bidang operasional telah mengembangkan layanan tanpa cabang melalui pembukaan *Contact Center* baru di Semarang. *Contact Center* tersebut beroperasi 24 jam sehari 1 (satu) minggu penuh (24/7) dalam 1 (satu) tahun dengan menyediakan layanan utama bagi *Digital Jenius non-voice*, seperti *live chat*, *e-mail* dan *twitter*.
2. Secara konsisten melakukan optimalisasi titik layanan cabang dengan *me-leverage* moda titik layanan lain. Dengan semakin optimalnya titik layanan cabang, BTPN diharapkan dapat memberikan layanan kepada nasabah secara lebih optimal melalui titik layanan alternatif (misalnya ATM, Kantor Pos, dan lain-lain) serta dalam hal pemanfaatan sumber daya.
3. Secara berkelanjutan melakukan efisiensi proses dan meningkatkan kontrol internal, dengan melakukan beberapa inisiatif antara lain:
 - a. Membangun *back end system* secara *agile* (bertahap) yang terintegrasi dengan *satellite applications*.
 - b. Membangun aplikasi *Collateral Management System* secara *agile* (bertahap) yang merupakan konsolidasi dari 5 (lima) aplikasi penatausahaan dokumen jaminan. Saat ini sudah dilakukan migrasi data jaminan dari 4 (empat) aplikasi penatausahaan dokumen jaminan.
 - c. Membangun *Bankwide Reconciliation System* secara *agile* (bertahap) guna memperkuat proses kontrol internal. Modul pertama yang sudah diluncurkan adalah proses rekonsiliasi untuk ATM Bersama, Prima dan NPG.

Hal lainnya yang penting adalah melanjutkan penerapan robotik untuk proses pinjaman Purna Bakti yang dipercepat. Bidang Operasional juga melakukan *setting* parameter untuk perubahan limit, *user alternate*, dan untuk melakukan *enabling user ID*.

INISIATIF DAN STRATEGI TAHUN 2020

Sepanjang tahun 2020, yang menjadi fokus utama dari Bidang Operasional terletak pada peningkatan kualitas operasional dan layanan Bank dengan titik berat pada layanan tanpa cabang. Terkait dengan fokus tersebut, sejumlah inisiatif dan strategi yang telah diimplementasikan adalah:

1. Mengembangkan layanan tanpa cabang dengan berpijak dan memanfaatkan kemajuan teknologi.
2. Optimalisasi titik layanan Nasabah.
3. Efisiensi proses dan peningkatan pengendalian internal termasuk optimalisasi sumber daya.

PENCAPAIAN TAHUN 2020

Kondisi pandemi COVID-19 ikut memberikan tantangan bagi kinerja operasional, terutama terkait dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kendati demikian, lingkungan kerja operasional di BTPN tetap berjalan dengan baik.

Pencapaian tersebut, terutama sebagai hasil dari penerapan manajemen keberlangsungan bisnis yang lengkap dan terpadu (*Business Continuity Management*). Bidang Operasional berhasil menjaga keberlangsungan layanan dan kinerja yang baik, meskipun harus berulang kali menerapkan pembatasan rantai kerja maupun cabang demi mencegah terjadinya penyebaran COVID-19.

Bidang Operasional juga terlibat langsung dalam gugus tugas yang dibentuk untuk penanganan pandemi COVID-19 di BTPN. Lebih dari itu, Bidang Operasional termasuk berperan aktif dalam penanganan dan kegiatan antisipasi bagi nasabah, karyawan maupun masyarakat.



Pada tahun 2020, layanan *Contact Center* BTPN mendapatkan penghargaan sebagai salah satu *Contact Center* terbaik di Indonesia dalam kompetisi “The Best Contact Center Indonesia 2020”. Peserta dari ajang penghargaan tersebut tidak hanya bank-bank besar di Indonesia, tetapi juga perusahaan-perusahaan dari industri non keuangan, termasuk institusi pemerintah.

Tahun 2020 merupakan partisipasi pertama bagi BTPN. Adapun penghargaan yang diperoleh untuk kategori korporasi adalah sebagai berikut:

1. Pemenang Platinum dalam kategori The Best Contact Center
2. Pemenang Gold dalam kategori The Best Contact Center Employee Engagement.

Selain itu, BTPN juga memenangkan beberapa penghargaan untuk kategori individual karyawan *Contact Center*, seperti:

1. Pemenang Platinum untuk kategori The Best Supervisor
2. Pemenang Platinum untuk kategori The Best Quality Assurance
3. Pemenang Gold untuk kategori The Best Manager
4. Pemenang 4 Silver untuk kategori The Best Trainer, The Best Quality Assurance, The Best Desk Control dan The Best Team Leader
5. Pemenang Bronze untuk kategori The Best Team Leader.

Secara umum BTPN *Contact Center* berada pada posisi “6” besar di Indonesia pada tahun 2020, yaitu sebagai pemenang “Runner Up 5”.

RENCANA STRATEGIS 2021

Untuk tahun 2021, Bidang Operasional telah menyiapkan rencana strategis, yaitu mengimplementasikan 5 (lima) pilar strategi yang akan dijalankan dalam 3 (tiga) tahun ke depan (2021 - 2023). Tujuan dari pilar strategi ini dalam rangka meningkatkan kualitas dengan tujuan untuk membangun lini operasional yang efisien, berorientasi pada layanan dan memenuhi unsur kepatuhan:

1. Mengembangkan layanan tanpa cabang dengan berpijak dan memanfaatkan kemajuan teknologi.
2. Sejalan dengan strategi Bank, BTPN akan melakukan optimalisasi titik layanan nasabah termasuk melakukan perluasan layanan korporasi melalui pembukaan cabang baru serta memanfaatkan titik layanan yang telah ada.
3. Meningkatkan infrastruktur untuk memfasilitasi model operasi yang fleksibel dengan membangun *digital workspace* yang mendukung inisiatif *remote work* dan *flexi office* bagi karyawan serta *contact center*.
4. Pemenuhan peraturan Qanun dengan menjalankan aktivitas sesuai dengan perencanaan
5. Peningkatan infrastruktur guna mendukung efisiensi proses dan penguatan pengendalian internal.





TATA KELOLA PERUSAHAAN

244	Prinsip-Prinsip Dalam Penerapan GCG
246	Tujuan Penerapan GCG
246	Struktur GCG
247	Penerapan dan Komitmen GCG
253	Komitmen Penerapan GCG Tahun 2021



Pada tahun 2020, BTPN telah melakukan beberapa perubahan terkait dengan penerapan GCG, seperti kebijakan/prosedur mengenai pengadaan barang dan jasa dan kebijakan anti-*fraud*.

PT Bank BTPN Tbk (“BTPN” atau “Bank”) terus berupaya meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai prinsip-prinsip GCG.

Penerapan prinsip-prinsip GCG merupakan komitmen Bank yang berkelanjutan karena Bank percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut memiliki arti yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan dan stabilitas kinerja yang berkesinambungan.

Mengingat pentingnya penerapan prinsip-prinsip GCG ini, Bank senantiasa memastikan bahwa prinsip atau asas GCG diterapkan dalam setiap aspek bisnis pada seluruh struktur organisasi Bank. Sejalan dengan ketentuan perundang-undangan, penerapan dilakukan dari tingkat jajaran Dewan Komisaris, Direksi, hingga unit organisasi terbawah dan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Prinsip-Prinsip dalam Penerapan GCG

Dengan merujuk pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip GCG yang diterapkan oleh Bank sebagaimana dikutip dari Pedoman GCG dari KNKG dan Pedoman GCG Bank adalah sebagai berikut:

PRINSIP	KONSEP DASAR	PENERAPAN PADA BANK
Transparansi	Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, Bank harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Bank harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.	Keterbukaan informasi Bank termasuk penjelasan mengenai kinerja melalui <i>website</i> Bank: http://www.btpn.com . Sebagai tambahan, Bank juga melakukan keterbukaan atau transparansi secara berkala terkait hal tertentu kepada regulator.
Akuntabilitas	Bank harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perseroan dengan tetap memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.	Bank menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing organ perusahaan serta masing-masing karyawan secara jelas dan sejalan dengan visi, misi, nilai serta strategi Bank.
Tanggung Jawab	Bank harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga negara yang baik.	Seluruh organ Bank secara ketat menjalankan prinsip kehati-hatian dan memastikan terpenuhinya ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Bank.
Independensi	Bank harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.	Seluruh organ Bank menghindari adanya dominasi dari pihak manapun, tidak dipengaruhi oleh kepentingan siapapun, bebas dari benturan kepentingan dan dari pengaruh atau tekanan, sehingga keputusan yang diambil dapat dijalankan secara objektif.
Kewajaran dan Kesetaraan	Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.	Bank menyediakan kesempatan bagu para pemangku kepentingan untuk menyampaikan tanggapan dan opini mereka untuk kepentingan perseroan serta membuka akses informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup jabatannya.



DASAR HUKUM PELAKSANAAN

Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, Bank berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“POJK 55”) yang berlaku sejak 7 Desember 2016.
4. POJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
5. POJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
6. POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
7. POJK No. 45/POJK.03/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan.
8. POJK lainnya termasuk yang mengatur mengenai Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris dan Direksi, Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Internal Audit, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, serta Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan.
9. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
10. Anggaran Dasar Bank.
11. Kebijakan dan Prosedur Bank.

Kebijakan dan prosedur Bank dikelompokkan dalam suatu hierarki kebijakan yang terdiri dari:

- **Kebijakan Utama Bank**
Kebijakan Utama Bank adalah kebijakan utama atau induk atas seluruh kebijakan Bank, merupakan kebijakan yang menyangkut tata kelola, maupun hal strategis lainnya yang mempengaruhi jalannya pengelolaan Bank secara baik, dan yang merupakan prinsip dasar serta pedoman pokok bagi semua ketentuan yang ada dan berlaku di Bank.

Kebijakan Utama Bank meliputi Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi.

- **Kebijakan Operasional Bank**
Kebijakan Operasional Bank adalah ketentuan yang mengatur setiap aktivitas di Bank yang mencerminkan strategi manajemen risiko Bank termasuk di antaranya menjelaskan secara umum risk appetite Bank atas aktivitas tersebut.

Pedoman dan Tata Tertib kerja Komite serta Prosedur yang berlaku secara *bankwide* termasuk kebijakan mengenai produk dan layanan Bank, juga diperlakukan sebagai kebijakan operasional.

- **Standard Operational Procedures**
Standard Operational Procedures (SOP) adalah panduan yang mengatur secara detail atas suatu proses dan menjelaskan tahapan dari suatu kegiatan yang terstruktur dan sistematis yang wajib dilakukan, mencakup: siapa, bagaimana, di mana, kapan dilakukan dan mekanisme kontrolnya. Pengaturan ini wajib menerapkan fungsi *four eyes principle* secara tegas, fungsi internal kontrol yang memadai serta mengacu pada kebijakan.

- **User Manual/Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksana/dokumen lain yang dipersamakan**
User Manual atau Petunjuk Teknis, disebut juga Petunjuk Pelaksana adalah:
 - a. Tahapan/cara penggunaan suatu sistem/aplikasi yang menjelaskan secara detail cara input/ pengisian data pada setiap *screen* dan *field*, atau
 - b. Pedoman yang lebih detil dari SOP bagi user baik operator maupun supervisor, atau
 - c. Pengaturan mengenai suatu standar parameter yang ada di sistem, atau
 - d. Suatu panduan ringkas yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menjelaskan kepada Nasabah mengenai produk dan layanan, dan
 - e. Dibuat dengan mengacu pada SOP terkait.

Persetujuan atas penerbitan kebijakan dan prosedur dan/atau perubahannya dilakukan dengan memperhatikan hierarki masing-masing. Kaji ulang terhadap kebijakan dan prosedur yang dikeluarkan Bank dilakukan secara berkala, setidaknya setiap satu tahun sekali atau lebih cepat apabila diperlukan.

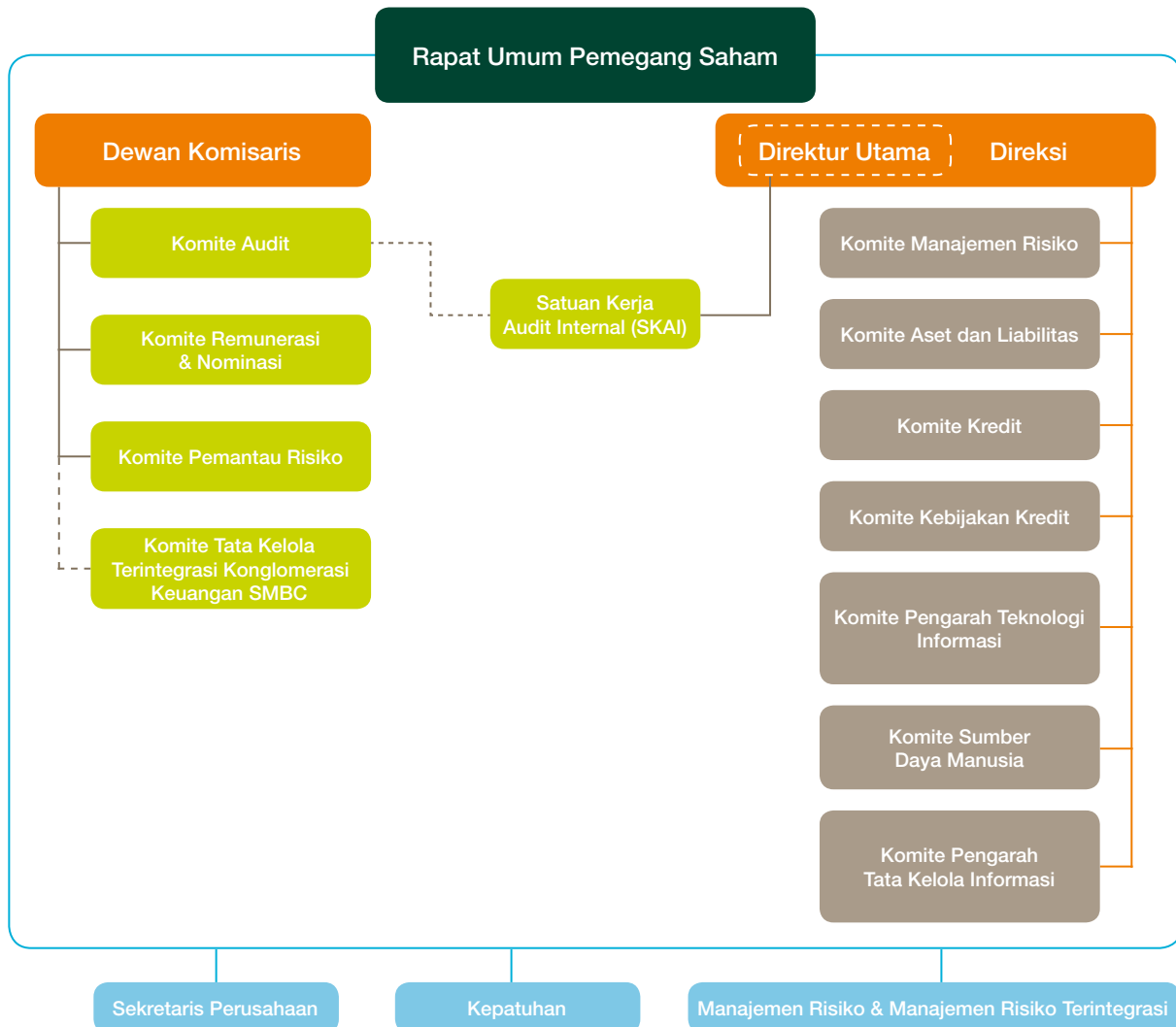
Tujuan Penerapan GCG

Secara umum, tujuan penerapan GCG di lingkungan Bank adalah untuk mendorong penciptaan dan pembangunan lingkungan usaha yang berlandaskan pada unsur kepercayaan, transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sangat diperlukan dalam

menumbuhkan investasi, stabilitas keuangan dan integritas usaha dalam jangka panjang, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan usaha yang kuat serta mampu meningkatkan komunitas sektor keuangan inklusif.

Struktur GCG

Hingga berakhirnya tahun buku 2020, struktur GCG yang berlaku di Bank adalah sebagai berikut:





Penerapan dan Komitmen GCG

Sebagai ukuran dari penerapan GCG, Bank memantau penerapan GCG dari hasil penilaian sendiri dan berhasil menetapkan peringkat 2-Baik (skala 1 sampai 3) dalam tahun 2019 dan tahun 2020.

Sebagai bentuk keseriusan Bank terhadap pelaksanaan GCG, Bank telah menunjuk salah satu konsultan terkait untuk melakukan penilaian atau kajian atas penerapan GCG dengan pedoman perbandingan yang berlaku di regional Asia Tenggara. Adapun hasil dari penilaian (*overall score*) dari penerapan GCG yang diperoleh Bank untuk tahun 2019 (ASEAN CG Scorecard 2020) adalah sebesar 94,49 poin dengan predikat “*Very Good*”, atau Level 4 (90,00 – 100,00) yang artinya Bank telah mengadopsi secara penuh standar internasional sebagaimana dirumuskan dalam ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

TINJAUAN PELAKSANAAN GCG TAHUN 2020

Pelaksanaan GCG selama tahun 2020 berlangsung baik, di tengah kondisi yang menantang karena adanya wabah COVID-19, Bank konsisten menjalankan semua kewajiban atau pemenuhan ketentuan, banyak alternatif yang dijalankan sebagai solusi, misalnya, dengan

melakukan *shifting* format pertemuan di semua level dengan menggunakan teknologi *Video Conference* baik itu Rapat berkala di jajaran Direksi maupun Dewan Komisaris, Rapat atau *update* bulanan dari dan untuk pejabat eksekutif, kunjungan Komite dan Dewan Komisaris ke kantor cabang secara virtual, serta penentuan formula pelaksanaan 2 kali Rapat Umum Pemegang Saham di tengah kondisi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain itu aktivasi pemberian persetujuan serta konsultasi atau saran dari Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan memaksimalkan teknologi yang ada berupa *e-mail* ataupun *electronic memo*.

TINJAUAN PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA BANK PERUSAHAAN TERBUKA

Sesuai dengan Peraturan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, berikut adalah penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan berdasarkan pendekatan “*comply or explain*” oleh Bank:

Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS	1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham	<i>Comply</i>	Prosedur teknis pemungutan suara diatur dalam AOA Bank serta pedoman setiap kali Bank berencana mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham. Kedua dokumen tersebut dipublikasikan di situs <i>web</i> Bank dan di KSEI <i>platform e-proxy</i> .
	1.2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	<i>Comply</i>	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 2020 dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat saat ini secara fisik maupun virtual.
	1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs <i>Web</i> Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 tahun.	<i>Comply</i>	Ringkasan risalah RUPS telah tersedia di situs <i>web</i> Bank.
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor	<i>Comply</i>	BTPN telah memiliki dan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor yang di dalamnya mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi 2. Program 3. Waktu pelaksanaan komunikasi
	2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs <i>Web</i>	<i>Comply</i>	Kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham telah diungkapkan dalam situs <i>web</i> Bank. Kebijakan komunikasi tersebut diatur dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan.

Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka	Comply	Penetapan jumlah anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank.
	3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Comply	Komposisi Dewan Komisaris didasarkan pada keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	Comply	BTPN telah memiliki kebijakan <i>self-assessment</i> untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, dengan cakupan antara lain: 1. Maksud dan tujuan kegiatan beserta penilaian 2. Waktu pelaksanaannya 3. Tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan Kebijakan tersebut diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.
	4.2 Kebijakan Penilaian Sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka	Comply	Kebijakan <i>self-assessment</i> diatur dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2020 ini pada bagian <i>Review/Penilaian Kinerja Dewan Komisaris</i> .
	4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Comply	Ketentuan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat kejahatan keuangan diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
	4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi.	Comply	Kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	Comply	Penetapan jumlah anggota Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank.
	5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Comply	Komposisi Direksi didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi
	5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi	Comply	Direktur Bank yang membidangi Keuangan memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2020 pada bagian Profil Direksi.
Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	Comply	BTPN telah memiliki kebijakan <i>self assessment</i> untuk menilai kinerja Direksi, dengan cakupan antara lain: 1. Maksud dan tujuan kegiatan beserta penilaian 2. Waktu pelaksanaannya 3. Tolak ukur atau kriteria Penilaian yang digunakan Kebijakan tersebut diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.
	6.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Comply	Kebijakan <i>self-assessment</i> telah diungkapkan dalam Penilaian Kinerja Direksi.



Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
	6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	<i>Comply</i>	Ketentuan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	<i>Comply</i>	Ketentuan mengenai pencegahan <i>insider trading</i> diatur dalam Prosedur Kepemilikan atas Informasi yang Sensitif terhadap Harga, Transaksi Investasi dan Kepemilikan Pribadi
	7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i> .	<i>Comply</i>	BTPN memiliki Prosedur Hiburan dan Hadiah dan Prosedur <i>Anti-Fraud</i> .
	7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	<i>Comply</i>	Kebijakan tersebut meliputi antara lain: a. Kriteria dalam pemilihan vendor b. Upaya peningkatan kemampuan vendor c. Pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan vendor Ketentuan terkait seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor telah diungkapkan di dalam situs <i>web</i> Bank.
	7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.	<i>Comply</i>	Kebijakan mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban terhadap kreditur. Kebijakan tersebut telah diungkapkan di dalam situs <i>web</i> Bank
	7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	<i>Comply</i>	Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> mencakup: 1. Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i> . 2. Cara pengaduan. 3. Perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor. 4. Penanganan pengaduan 5. Pihak yang mengelola aduan. 6. Hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan. Ketentuan tersebut telah diungkapkan dalam situs <i>web</i> Bank.
	7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan.	<i>Comply</i>	Kebijakan insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan diatur dalam SOP MESOP.
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs <i>web</i> sebagai media keterbukaan informasi.	<i>Comply</i>	BTPN memiliki akun resmi sosial media: Facebook : @BankBTPNOfficial https://facebook.com/BankBTPNOfficial Twitter: @sahabatBTPN https://twitter.com/sahabatbtpn Instagram: @lifeatbtpn https://www.instagram.com/lifeatbtpn/ Youtube: Bank BTPN https://www.youtube.com/user/BTPNBank
	8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	<i>Comply</i>	Laporan Tahunan Bank telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%. Informasi tersebut juga diungkapkan di dalam situs <i>web</i> Bank.

PENILAIAN PENERAPAN GCG TAHUN 2020

Meskipun tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan, namun kondisi yang ada tidak menyebabkan gangguan yang tidak dapat dikelola oleh Bank, dan karenanya menetapkan hasil penilaian sendiri GCG untuk tahun 2020 adalah *rating 2-Baik*.

Penilaian sendiri tersebut di atas dilakukan guna memenuhi Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan tata kelola.

Berikut ini adalah kesimpulan penilaian sendiri GCG Bank

Nama Bank : PT Bank BTPN Tbk
 Posisi : 31 Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Penerapan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Baik
Konsolidasi*	2	Baik

Analisis

Peringkat komposit 2 (dua) mencerminkan bahwa Manajemen telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen.

*) Bank memiliki Perusahaan Anak (PT Bank BTPN Syariah Tbk). Berdasarkan perbandingan aset Perusahaan Anak terhadap aset Bank, Bank menilai bahwa hasil Penilaian self-assessment Perusahaan Anak tidak memiliki dampak yang signifikan.

Kesimpulan atas penilaian pelaksanaan tata kelola Bank dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian tata kelola secara komprehensif dan terstruktur adalah sebagai berikut:

A. Governance Structure

Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah:

- Struktur keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat telah disetujui oleh RUPS dan lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) dari OJK. Baik Direksi maupun Dewan Komisaris tetap dan selalu menjaga integritas, reputasi keuangan dan kompetensinya.
- Keanggotaan dari setiap Komite Dewan Komisaris telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tugas dan

tanggung jawab setiap Komite Dewan Komisaris telah dimuat secara jelas dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja, yang dikaji secara berkala.

- Bank telah memiliki Ketentuan mengenai benturan kepentingan sesuai area dan lingkup kerja terkait.
- Satuan Kerja Kepatuhan didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan independen terhadap operasional unit kerja lainnya, selain itu penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Fungsi Audit intern didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan independen terhadap operasional unit kerja lainnya. Struktur Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Panduan Kerja SKAI telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Struktur organisasi untuk mendukung penerapan manajemen risiko telah memadai, didukung dengan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai.
- Penugasan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pelaksana fungsi audit ekstern telah dilakukan dengan memperhatikan kapasitas KAP yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik; dan komunikasi OJK dengan KAP dimaksud dengan baik. Penugasan ini sesuai dengan rekomendasi Komite Audit yang disetujui oleh RUPS Tahunan tanggal 23 April 2020. Evaluasi penugasan dan kinerja yang telah disampaikan kepada OJK pada bulan Mei 2020 melalui pelaporan elektronik.
- Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*), berikut pemantauan dan penyelesaian masalahnya.
- Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
- Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku.
- Pelaporan internal telah dilakukan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu dengan dukungan sumber daya dan prosedur yang memadai. Bank didukung dengan sistem informasi yang andal, yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi (*security system*) yang memadai.



- Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai visi dan misi Bank, dan didukung oleh Pemilik Bank.

Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank adalah:

Tidak terdapat faktor Negatif. Namun demikian Bank selalu berupaya melakukan penyempurnaan pemakaian teknologi dalam operasional Bank, dalam rangka memenuhi visi Bank sebagai pilihan utama bank di Indonesia yang dapat memberikan perubahan berarti dalam kehidupan jutaan orang dengan dukungan teknologi digital.

B. *Governance Process*

Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah:

- Pengelolaan Bank oleh Direksi serta Pengawasan terhadap tindakan Direksi Bank oleh Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pedoman Tata Tertib masing-masing, Kebijakan dan Prosedur Bank, serta Anggaran Dasar Bank, yang secara berkala dikaji oleh Bank.
- Penerapan tata kelola perusahaan secara menyeluruh telah dilakukan oleh Direksi dan dipastikan Oleh Dewan Komisaris.
- Pemegang Saham Bank tidak melakukan intervensi terhadap pengelolaan Bank yang dilakukan Direksi. Dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, Bank bahkan telah menyusun prosedur khusus yang mengatur Alur Komunikasi antara pemegang saham mayoritas dengan Bank (Sumitomo Mitsui Banking Corporation/SMBC).
- Komite-komite Dewan Komisaris telah masing-masing menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Pedoman Komite, untuk peningkatan ke depannya, Komite telah melakukan penilaian sendiri terhadap kinerja komite yang disampaikan ke Rapat Dewan Komisaris.
- Direksi dan Dewan Komisaris tidak ikut mengambil keputusan dalam hal suatu hal yang akan diputuskan mengandung Benturan Kepentingan. Daftar Pihak Terkait Bank untuk transparansi dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan.
- Fungsi Direktur Kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Tugas dan tanggung jawab Direksi dalam kaitan dengan pengendalian intern telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Temuan audit telah ditindaklanjuti dengan arahan Dewan Komisaris, dan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kerja Internal Audit, Bank telah melakukan kaji ulang secara berkala setiap tiga tahun sekali, terakhir pada tahun 2019.
- AP dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Selain itu, laporan hasil audit dan Management Letter telah disampaikan oleh AP kepada OJK.
- Tugas Direksi dan Dewan Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko dinyatakan dengan jelas dalam prosedur internal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah dijalankan secara *prudent*.
- Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur agar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Bank juga telah memastikan proses yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (*large exposure*) agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian, serta pengambilan keputusan terkait hal tersebut dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.
- Bank telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan kepada para Pemangku Kepentingan, menyampaikan laporan dengan isi yang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu.
- Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Bank juga telah menyampaikan revisi atas RBB pada bulan Juni 2020.

Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank adalah:

Tidak terdapat faktor-faktor negatif dari aspek ini. Meskipun demikian Bank tidak berhenti untuk berinisiatif di dalam upaya meningkatkan *Governance Process* dalam Bank, bahkan dengan anak Perusahaannya.

C. Governance Outcome

Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah:

- Untuk tahun buku 2019, Direksi dan Dewan Komisaris telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS, yang telah diterima dan memperoleh *Acquit et de charge* pada tanggal 23 April 2020.
- Untuk tahun 2020, dengan pengelolaan yang baik disertai dengan pengawasan Dewan Komisaris, maka gangguan terhadap kegiatan Operasional Bank di tengah Pandemi COVID19 pada umumnya tidak material
- Hasil Rapat Direksi atau Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik dan keputusan atau rekomendasi yang dihasilkan dari Rapat tersebut telah dan dalam proses tindak lanjut.
- Kinerja Komite Dewan Komisaris mengalami peningkatan dari sisi pembahasan yang variatif, frekuensi Rapat yang meningkat dengan materi Rapat yang relevan, sehingga dapat memberikan masukan yang tepat guna.
- Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemegang saham/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- Budaya kepatuhan terus menerus digaungkan, Kepatuhan melakukan pendekatan secara aktif, sehingga denda dibandingkan dengan periode sebelumnya mulai menurun.
- Terdapat perbaikan yang cukup signifikan terhadap kinerja SKAI, SKAI dinilai obyektif di dalam menemukan permasalahan dan mengingatkan Bank didalam menindaklanjuti temuan yang ada.

- Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana dalam jumlah besar dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan telah dilaporkan secara tepat waktu kepada OJK.
- Kewajiban penyusunan laporan dan penyampaian laporan kepada OJK telah dilakukan dengan isi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Situasi Pandemi COVID-19 tidak menyebabkan terhambatnya penyampaian laporan dari Bank.
- RBB dan Revisi RBB telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta disampaikan kepada OJK pada 28 November 2019 dan 29 Juni 2020.

Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank adalah:

Terdapat peningkatan denda yang dialami Bank pada semester 2 tahun 2020, diakibatkan karena adanya pengaruh dari kondisi saat ini. Namun demikian dengan adanya komitmen Bank terhadap “Zero Penalties” dan penerapan budaya kepatuhan, maka denda Bank diharapkan terus menurun sampai dengan angka nol.



Komitmen Penerapan GCG Tahun 2021

Untuk tahun 2021, Bank dengan ini menegaskan mengenai komitmen yang dimiliki untuk terus menerus melakukan dan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG di seluruh jenjang organisasi Bank. Komitmen tersebut diwujudkan dengan memperhatikan hasil penilaian pelaksanaan GCG dan kondisi Bank yaitu:

1. Meninjau hak-hak pemegang saham.
2. Meninjau kesetaraan perlakuan terhadap pemegang saham.
3. Peningkatan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk kajian terhadap independensi dari struktur perseroan.
4. Peningkatan kualitas transparansi dan pengungkapan informasi kepada pemegang saham.
5. Mengelola kemungkinan timbulnya penalti terkait laporan atau aksi korporasi.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Kebijakan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan Organ Perseroan yang memiliki semua kewenangan yang tidak didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Melalui RUPS, Pemegang Saham mempergunakan haknya dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan Anggaran Dasar, RUPS Bank terbagi menjadi dua, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau disebut juga RUPS Luar Biasa. Adapun dasar hukum penyelenggaraan RUPS mengacu pada:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Otoritas Jasa No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Anggaran Dasar BTPN.

Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Hak Pemegang Saham, antara lain:

1. Pemegang saham berhak untuk hadir dalam RUPS baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, memberikan tanggapan terhadap agenda RUPS serta turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.

2. Pemegang saham berhak untuk memperoleh informasi yang akurat, memadai dan tepat waktu berkaitan dengan Perseroan sepanjang berhubungan dengan agenda RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan, sehingga pemegang saham dapat mengambil keputusan yang tepat di dalam RUPS.
3. Pemegang saham berhak untuk memperoleh pembagian laba bersih dalam bentuk dividen dan pembagian laba dalam bentuk lain sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.

Tanggung jawab Pemegang Saham, antara lain:

1. Setiap pemegang saham tunduk dan patuh terhadap Anggaran Dasar Bank serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemegang saham pengendali wajib mempertimbangkan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemegang saham lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemegang saham minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.
4. Mengungkapkan daftar pihak terkait, apabila pemegang saham bertindak sebagai pemegang saham pengendali pada Bank.

PELAKSANAAN RUPS 2020

Sepanjang tahun 2020, Bank BTPN telah menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS: 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa.

Pelaksanaan RUPS dihadiri oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek sebagai pihak independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara.

MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA RUPS

Mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara pemungutan dan perhitungan suara diatur dalam tata tertib RUPS yang diungkapkan dalam situs *web* Bank dan disampaikan kepada Pemegang Saham.

Setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham memiliki hak bertanya dan/atau mengajukan pendapat kepada Pemimpin rapat sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap agenda rapat. Dalam perhitungan suara, 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara,

apabila seseorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan hanya diberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

Mekanisme pengambilan keputusan melalui pengumpulan suara (*voting*) secara terbuka yang dilakukan dengan cara Ketua Rapat akan meminta kepada pemegang saham dan wakil pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan masing-masing. Untuk memudahkan penghitungan, pemegang saham dan wakil pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan dimohon agar mencantumkan nama dan jumlah suara yang dikeluarkan dalam kartu suara yang disediakan oleh Biro Administrasi Efek.

Petugas dari Notaris akan mengumpulkan kartu suara yang telah diisi, untuk kemudian dihitung. Notaris akan melaporkan hasil perhitungan kepada Ketua Rapat.

Terhitung sejak pelaksanaan RUPS Luar Biasa, Bank menerapkan pelaksanaan *E-Proxy*, dimana pemegang saham dapat memberikan suara atas usulan mata acara yang diusulkan oleh Bank tanpa kedatangan secara fisik ke tempat pelaksanaan RUPS. Kesempatan memberikan suara diberikan kepada pemegang saham dari sejak tanggal panggilan sampai dengan pelaksanaan RUPS dan dijumlahkan dengan suara dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN

RUPS Tahunan yang diselenggarakan Perseroan pada tanggal 23 April 2020 dihadiri oleh para pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Kehadiran para peserta ada yang hadir secara fisik, ada pula yang melalui fasilitas *video conference*.

Tahapan Penyelenggaraan RUPS Tahunan

Tanggal Penyampaian Rencana Penyelenggaraan	Tanggal Pengumuman	Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham	Tanggal Pemanggilan	Pelaksanaan	Tanggal Penyampaian Hasil
9 Maret 2020 dan 23 Maret 2020	17 Maret 2020	31 Maret 2020	1 April 2020	23 April 2020	24 April 2020 dan 26 Mei 2020

Peserta RUPS Tahunan

Peserta yang menghadiri rapat secara fisik adalah:

Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Ongki Wanadjati Dana Direktur Utama	Ninik Herlani Masli Ridhwan Komisaris Independen	Sumitomo Mitsui Banking Corporation pemegang 7.532.311.297 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Konsultan Hukum HWMA, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 April 2020.
Dini Herdini Direktur Kepatuhan		PT Bank Central Asia Tbk pemegang 83.052.408 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Konsultan Hukum HWMA, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 April 2020.
Hanna Tantani Direktur		PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pemegang 12.007.137 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Konsultan Hukum HWMA, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 April 2020.
		Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5% sejumlah 426.362.127 saham dalam Perseroan.



Peserta yang menghadiri rapat melalui fasilitas video conference adalah:

Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Kazuhiisa Miyagawa Wakil Direktur Utama	Chow Ying Hoong Wakil Komisaris Utama	Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan.
Yasuhiro Daikoku Direktur	Irwan Mahjudin Habsjah Komisaris Independen	
Adrianus Dani Prabawa, Direktur	Takeshi Kimoto, Komisaris	
Henoch Munandar, Direktur		
Merisa Darwis, Direktur		
Hiroimichi Kubo, Direktur		

Agenda, Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan

MATA ACARA	KEPUTUSAN
<p>Mata Acara 1: Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan tahun buku 2019, termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2019 yang memuat Pernyataan Kembali akun-akun tertentu Laporan Keuangan tahun buku 2018; Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2019; dan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (<i>Volledig Acquit et Decharge</i>) untuk Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat untuk tahun buku 2019. 	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019; Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019; Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota dari KPMG International, dengan opini tanpa modifikasi dengan memuat paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali informasi komparatif dan bahwa informasi komparatif sebelum disajikan kembali telah diaudit oleh auditor lain, dalam laporannya No. 00090/2.1005/AU.1/07/0851-1/1/III/2020 tertanggal 23 Maret 2020; dan Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (<i>volledig acquit et decharge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019 sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<p>Pengambilan Suara: Suara Setuju : 7.628.613.815 saham atau 99,99% Suara Tidak Setuju : 0 saham atau 0% Suara Abstain : 340 saham atau 0,00%</p>	
<p>Realisasi/Tindak Lanjut: Sudah dilakukan sesuai keputusan RUPS</p>	
<p>Mata Acara 2: Penetapan penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019</p>	<p>Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 yang berjumlah Rp2.572.527.531.652 (dua triliun lima ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) yang diperuntukkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dana Cadangan Wajib Sejumlah Rp9.234.246.916,- (sembilan miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah) akan disisihkan/ dibukukan sebagai Dana Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagai tambahan atas cadangan Perseroan yang berjumlah Rp23.361.468.560,- (dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) per tanggal 31 Desember 2019, sehingga seluruh cadangan Perseroan akan menjadi berjumlah Rp32.595.715.476,- (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), atau 20% dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan per tanggal 31 Desember 2019; Sisa Laba Bersih tahun buku 2019, yaitu sejumlah Rp2.563.293.284.736 (dua triliun lima ratus enam puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.
<p>Pengambilan Suara: Suara Setuju : 7.628.600.215 saham atau 99,99% Suara Tidak Setuju : Tidak setuju 13.300 saham atau 0,00% Suara Abstain : 300 saham atau 0,00%</p>	
<p>Realisasi/Tindak Lanjut: Sudah dilakukan sesuai keputusan RUPS</p>	

MATA ACARA

KEPUTUSAN

Mata Acara 3:
Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

1. Merujuk pada Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar yang telah dicabut dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar, Perseroan menyatakan bahwa penamaan direktur independen atau direktur tidak terafiliasi tidak lagi berlaku.
2. Menerima pengunduran diri Ibu Mari Elka Pangestu dari jabatannya selaku Komisaris Utama (Independen) terhitung efektif sejak tanggal 1 Maret 2020, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatan beliau dan menyatakan bahwa jabatan yang ditinggalkan kosong untuk sementara waktu, sampai dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan berikutnya yang terkait dengan pengangkatan Komisaris Utama pengganti, dengan sepenuhnya memperhatikan hasil uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Mengangkat Bapak Darmadi Sutanto sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang akan berlaku efektif jika dan pada saat memperoleh persetujuan uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan demikian susunan selengkapnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Ongki Wanadjati Dana
 Wakil Direktur Utama : Kazuhisa Miyagawa
 Wakil Direktur Utama : Darmadi Sutanto*)
 Direktur Kepatuhan : Dini Herdini
 Direktur : Yasuhiro Daikoku
 Direktur : Henoeh Munandar
 Direktur : Adrianus Dani Prabawa
 Direktur : Hiromichi Kubo
 Direktur : Merisa Darwis
 Direktur : Hanna Tantani

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama (Independen) : Lowong
 Wakil Komisaris Utama : Chow Ying Hoong
 Komisaris : Takeshi Kimoto
 Komisaris (Independen) : Ninik Herlani Mashli Ridhwan
 Komisaris (Independen) : Irwan Mahjudin Habsjah

*) Pengangkatan Bapak Darmadi Sutanto akan berlaku efektif jika dan pada saat memperoleh persetujuan uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan

4. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam mata acara Rapat ini ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pengambilan Suara:

Suara Setuju : 7.627.390.315 saham atau 99,98%
 Suara Tidak Setuju : Tidak setuju 1.223.500 saham atau 0,02%
 Suara Abstain : 0 saham atau 0,00%

Realisasi/Tindak Lanjut:

Sudah dilakukan sesuai keputusan RUPS



MATA ACARA	KEPUTUSAN
<p>Mata Acara 4: Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 serta bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang akan dibayarkan dalam tahun 2020, seluruhnya tidak melebihi Rp27.300.000.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) gross kotor sebelum dipotong Pajak Penghasilan. b. Memberikan wewenang kepada Wakil Komisaris Utama Perseroan di dalam menentukan bagian honorarium dan tunjangan Tahun Buku 2020 serta bonus Tahun Buku 2019 untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan: Kewenangan oleh Wakil Komisaris Utama Perseroan ini dijalankan di dalam mewakili kewenangan jabatan Komisaris Utama Perseroan yang saat ini kosong dan dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi dan penghasilan serta tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020 serta bonus bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang dibayarkan pada tahun 2020. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
<p>Pengambilan Suara: Suara Setuju : 7.628.613.515 saham atau 99,99% Suara Tidak Setuju : 0 saham atau 0,00% Suara Abstain : 300 saham atau 0,00%</p>	
<p>Realisasi/Tindak Lanjut: Sudah dilakukan sesuai keputusan RUPS</p>	
<p>Mata Acara 5: Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun Buku 2020</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penunjukan Siddharta Widjaja & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Liana Lim sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. KAP Siddharta Widjaja & Rekan merupakan jaringan global KPMG International yang akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan. 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apa pun tidak dapat menyelesaikan/ melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2020 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/ atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.
<p>Pengambilan Suara: Suara Setuju : 7.628.613.515 saham atau 99,99% Suara Tidak Setuju : 0 saham atau 0,00% Suara Abstain : 300 saham atau 0,00%</p>	
<p>Realisasi/Tindak Lanjut: Sudah dilakukan sesuai keputusan RUPS</p>	

MATA ACARA

KEPUTUSAN

Mata Acara 6:
Penguatan kembali keputusan mengenai Program Pemberian Opsi Saham kepada Karyawan Perseroan (Program ESOP)

Menguatkan kembali keputusan untuk membuat dan melaksanakan Program ESOP 2016, yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 24 Maret 2017, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 29 Maret 2018 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 15 Februari 2019.

1. Memberikan kewenangan dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk melakukan dan melaksanakan semua dan setiap tindakan, perbuatan atau apa pun yang disyaratkan oleh peraturan perundang yang berlaku atau anggaran dasar Perseroan, atau yang oleh Dewan Komisaris dipandang perlu untuk dilakukan dan dilaksanakan, untuk dan dalam rangka melaksanakan atau merealisasikan Program ESOP 2016, antara lain (tetapi tidak terbatas pada):
 - a. Dari waktu ke waktu, menambah atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan jumlah tambahan seluruhnya tidak melebihi Rp2.336.114.920,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah), dengan cara mengeluarkan saham baru dalam jumlah tidak melebihi 116.805.746 (seratus enam belas juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh enam) saham, masing-masing bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah), sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPSLB 2017, RUPST 2018 dan RUPST 2019.
 - b. Membuat, menerbitkan serta memberlakukan peraturan, ketentuan dan kebijakan berupa apa pun mengenai pelaksanaan Program ESOP 2016 (dengan tidak mengurangi peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal), menetapkan para peserta yang berhak untuk membeli saham-saham Perseroan dalam rangka Program ESOP 2016 dan menetapkan harga saham-saham yang akan dibeli oleh para peserta Program ESOP 2016 atau Harga Pelaksanaannya, termasuk (tetapi tidak terbatas) membuat perubahan atau penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan Program ESOP 2016 sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang di kemudian hari dapat diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang Pasar Modal, termasuk Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perbuatan atau tindakan atau hal yang mengenai atau berhubungan dengan pelaksanaan Program ESOP 2016 yang mana Direksi Perseroan tidak mempunyai benturan kepentingan.
2. Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku terhitung sejak saat usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali, akan tetapi segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPT dan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.

Pengambilan Suara:

Suara Setuju : 7.627.390.015 saham atau 99,98%
Suara Tidak Setuju : 1.223.500 saham atau 0,02%
Suara Abstain : 300 saham atau 0,00%

Realisasi/Tindak Lanjut:

Sudah dilakukan sesuai keputusan RUPS

Mata Acara 7:

Persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan

Menyetujui Kebijakan dan Dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan

Pengambilan Suara:

Suara Setuju : 7.628.613.815 saham atau 100%
Suara Tidak Setuju : 0 saham atau 0,00%
Suara Abstain : 0 saham atau 0,00%

Realisasi/Tindak Lanjut:

Sudah dilakukan sesuai keputusan RUPS

Mata Acara 8:

Laporan realisasi penggunaan dana obligasi

-

Realisasi/Tindak Lanjut:

Mata Acara ini merupakan Laporan sehingga tidak dilakukan perhitungan suara



MATA ACARA	KEPUTUSAN
<p>Mata Acara 9: Perubahan Anggaran Dasar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai <i>e-Proxy</i> dan <i>e-RUPS</i> sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyesuaikan Pasal 11 ayat 2, menjadi tertulis dan berbunyi: Pemegang saham berhak untuk menghadiri RUPS Perseroan, baik sendiri maupun diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain, dengan surat kuasa atau media pembuktian lain yang diatur dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal. b. Menambah ketentuan baru dalam Pasal 11, sebagai berikut: Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal. 2. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam butir 1 yang diambil dalam mata acara Rapat ke dalam akta Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
<p>Pengambilan Suara: Suara Setuju : 7.628.613.515 saham atau 99,99% Suara Tidak Setuju : 0 saham atau 0,00% Suara Abstain : 300 saham atau 0,00%</p>	
<p>Realisasi/Tindak Lanjut: Sudah dilakukan sesuai keputusan RUPS</p>	

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan Perseroan pada tanggal 18 November 2020 dihadiri oleh para pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Kehadiran para peserta ada yang hadir secara fisik, ada pula yang melalui fasilitas *video conference*.

Tahapan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa

Tanggal Penyampaian Rencana Penyelenggaraan	Tanggal Pengumuman	Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham	Tanggal Pemanggilan	Pelaksanaan	Tanggal Penyampaian Hasil
2 Oktober 2020 dan 27 Oktober 2020	12 Oktober 2020	26 Oktober 2020	27 Oktober 2020	18 November 2020	19 November 2020 dan 8 Desember 2020

Peserta RUPS Luar Biasa

Peserta yang menghadiri rapat secara fisik adalah:

Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Ongki Wanadjati Dana Direktur Utama	Ninik Herlani Masli Ridhwan Komisaris Independen	Sumitomo Mitsui Banking Corporation pemegang 7.532.311.297 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Tetsushi Tanaka , berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Oktober 2020.
Dini Herdini Direktur Kepatuhan		PT Bank Central Asia Tbk pemegang 83.052.408 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Soma Muhammad Nur Huda , berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 November 2020.
		Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5% sejumlah 34.500 saham dalam Perseroan.

Peserta yang menghadiri rapat melalui fasilitas video conference adalah:

Direksi	Dewan Komisaris
Kazuhisa Miyagawa, Wakil Direktur Utama	Chow Ying Hoong, Wakil Komisaris Utama
Darmadi Sutanto, Wakil Direktur Utama	Irwan Mahjudin Habsjah, Komisaris Independen
Yasuhiro Daikoku, Direktur	Takeshi Kimoto, Komisaris
Adrianus Dani Prabawa, Direktur	
Henoch Munandar, Direktur	
Hiromichi Kubo, Direktur	
Merisa Darwis, Direktur	
Hanna Tantani, Direktur	

Agenda, Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa

MATA ACARA	KEPUTUSAN
<p>Mata Acara 1: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sebagaimana pokok-pokok perubahannya telah ditayangkan dalam Rapat. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan tersebut di atas termasuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dan melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<p>Pengambilan Suara: Suara Setuju : 7.615.398.105 saham atau 99,99% Suara Tidak Setuju : 100 saham atau 0,00% Suara Abstain : 0 saham atau 0,00%</p>	
<p>Realisasi/Tindak Lanjut: Sudah dilakukan sesuai keputusan RUPS</p>	
<p>Mata Acara 2: Pengunduran diri anggota Direksi Perseroan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui pengunduran diri Kazuhisa Miyagawa selaku Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) atas semua tindakan pengurusan yang telah dijalankannya dari bulan Januari 2020 sampai dengan efektifnya pengunduran diri yang bersangkutan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan dan sejauh Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan tersebut disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.
<p>Pengambilan Suara: Suara Setuju : 7.615.398.105 saham atau 99,99% Suara Tidak Setuju : 100 saham atau 0,00% Suara Abstain : 0 saham atau 0,00%</p>	
<p>Realisasi/Tindak Lanjut: Sudah dan akan dilakukan sesuai keputusan RUPS</p>	
<p>Mata Acara 3: Pengangkatan anggota Direksi Perseroan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui pengangkatan Kaoru Furuya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan masa jabatan yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi yang sedang menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan Kaoru Furuya sehubungan dengan ijin kerja yang bersangkutan tanpa perlu melalui keputusan RUPS.



MATA ACARA	KEPUTUSAN
<p>Pengambilan Suara: Suara Setuju : 7.615.398.105 saham atau 99,99% Suara Tidak Setuju : 100 saham atau 0,00% Suara Abstain : 0 saham atau 0,00%</p>	
<p>Realisasi/Tindak Lanjut: Sudah dan akan dilakukan sesuai keputusan RUPS</p>	
<p>Mata Acara 4: Pengangkatan anggota Dewan Komisaris (Komisaris Utama) Perseroan</p>	<p>Menyetujui pengangkatan Chow Ying Hoong sebagai Komisaris Utama Perseroan, yang semula menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan menghabiskan sisa masa jabatannya, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.</p>
<p>Pengambilan Suara: Suara Setuju : 7.615.398.105 saham atau 99,99% Suara Tidak Setuju : 100 saham atau 0,00% Suara Abstain : 0 saham atau 0,00%</p>	
<p>Realisasi/Tindak Lanjut: Sudah dan akan dilakukan sesuai keputusan RUPS</p>	
<p>Mata Acara 5: Pengangkatan anggota Dewan Komisaris (Komisaris Independen) Perseroan</p>	<p>1. Menyetujui pengangkatan Edmund Tondobala sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.</p> <p>Dengan demikian susunan selengkapannya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:</p> <p>Direksi: Direktur Utama : Ongki Wanadjati Dana Wakil Direktur Utama : Kaoru Furuya*) Wakil Direktur Utama : Darmadi Sutanto Direktur Kepatuhan : Dini Herdini Direktur : Yasuhiro Daikoku Direktur : Henoeh Munandar Direktur : Adrianus Dani Prabawa Direktur : Hiromichi Kubo Direktur : Merisa Darwis Direktur : Hanna Tantani</p> <p>Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Chow Ying Hoong Wakil Komisaris Utama : Ditiadakan**) Komisaris : Takeshi Kimoto Komisaris (Independen) : Ninik Herlani Mashli Ridhwan Komisaris (Independen) : Irwan Mahjudin Habsjah Komisaris (Independen) : Edmund Tondobala</p> <p>*) Pengangkatan Kaoru Furuya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan akan berlaku efektif setelah diterbitkannya ijin kerja dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.</p> <p>**) Jabatan Wakil Komisaris Utama menjadi hapus terhitung sejak diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia</p> <p>2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mata acara kedua sampai dengan mata acara kelima dari Rapat ke dalam akta Notaris dan menyampaikannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>Pengambilan Suara: Suara Setuju : 7.615.398.105 saham atau 99,99% Suara Tidak Setuju : 100 saham atau 0,00% Suara Abstain : 0 saham atau 0,00%</p>	
<p>Realisasi/Tindak Lanjut: Sudah dan akan dilakukan sesuai keputusan RUPS</p>	

KEPUTUSAN DAN REALISASI RUPS TAHUN SEBELUMNYA

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 15 Februari 2019

MATA ACARA	KEPUTUSAN
<p>Mata Acara 1: Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Menyetujui Laporan Tahunan SMBCI untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, yang memuat laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris SMBCI. b. Menyetujui Laporan Tahunan BTPN, untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, yang memuat laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris BTPN. 2. a. Mengesahkan Laporan Keuangan SMBCI untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan dengan pendapat WAJAR TANPA PENGECUALIAN, sebagaimana yang termuat dalam Laporan Tahunan SMBCI 2018. b. Mengesahkan Laporan Keuangan BTPN untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & Rekan dengan pendapat WAJAR TANPA PENGECUALIAN, sebagaimana yang termuat dalam Laporan Tahunan BTPN 2018. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris SMBCI yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BTPN yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, untuk semua tindakan pengurusan, dan/atau pengawasan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris SMBCI dan BTPN (termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris SMBCI dan BTPN yang telah mengundurkan diri masing-masing berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SMBCI dan BTPN pada tanggal 5 Oktober 2018) untuk semua tindakan pengurusan dan/atau pengawasan, yang telah dilakukan mereka selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan SMBCI dan BTPN untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.”
<p>Pengambilan suara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suara Setuju : 4.993.859.772 atau 99,99% 2. Suara Tidak Setuju : - 3. Suara Abstain : 644.800 atau 0,01% <p>Total Suara Setuju : 4.994.504.572 atau 100,00%</p> <p>Pengambilan Keputusan : Suara Bulat</p>	
<p>Realisasi Laporan Tahunan dan laporan keuangan Perseroan telah disetujui oleh Pemegang Saham dan tersedia di situs web Perseroan</p>	



MATA ACARA	KEPUTUSAN
<p>Mata Acara 2: Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan bahwa sesuai dengan Laporan Laba Rugi SMBCI untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, total laba bersih yang diperoleh SMBCI dalam tahun buku tersebut adalah sebesar Rp989.673.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah). 2. Menyatakan bahwa sesuai dengan Laporan Laba Rugi BTPN untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, total laba bersih yang diperoleh BTPN dalam tahun buku tersebut adalah sebesar Rp1.968.290.937.818,- (satu triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas Rupiah) 3. Menyetujui penggunaan jumlah total laba bersih yang diperoleh SMBCI sebesar Rp989.673.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah) sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, SMBCI tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham; b. Seluruh total laba bersih komprehensif tahun berjalan setelah pajak pendapatan yang diperoleh SMBCI selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebesar Rp989.673.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah), dinyatakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya atau <i>retained earnings</i>. 4. Menyetujui penggunaan jumlah total laba bersih yang diperoleh Perseroan sebesar Rp1.968.290.937.818,- (satu triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas Rupiah) sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham; b. Seluruh total laba bersih komprehensif tahun berjalan setelah pajak pendapatan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebesar Rp1.968.290.937.818,- (satu triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas Rupiah), dinyatakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya atau <i>retained earnings</i>."
<p>Pengambilan suara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suara Setuju : 4,994,504,572 or 100% 2. Suara Tidak Setuju : - 3. Suara Abstain : <p>Total Suara Setuju : Pengambilan Keputusan : Suara Bulat</p>	
<p>Realisasi Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS</p>	

MATA ACARA

KEPUTUSAN

Mata Acara 3:
Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

- Menyetujui mengangkat kembali :
 - Direksi
 - Direktur Utama : Ongki Wanadjati Dana
 - Wakil Direktur Utama : Kazuhisa Miyagawa
 - Direktur Kepatuhan (Independen) : Dini Herdini
 - Direktur : Yasuhiro Daikoku;
 - Direktur : Henoch Munandar;
 - Direktur : Adrianus Dani Prabawa;
 - Direktur : Hiromichi Kubo
 - Direktur : Merisa Darwis
 - Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama (Independen) : Mari Elka Pangestu;
 - Wakil Komisaris Utama : Chow Ying Hoong;
 - Komisaris : Takeshi Kimoto;
 - Komisaris (Independen) : Ninik Herlani Masli Ridhwan;
 - Komisaris (Independen) : Lowong (Posisi Yang Ditinggalkan Tony Prasetyantono)

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2022, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.
- Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam butir 1 yang diambil dalam mata acara Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

Pengambilan suara:

- Suara Setuju : 4.963.942.865 atau 99,3880933%
- Suara Tidak Setuju : 30.561.707 atau 0,6119067%
- Suara Abstain : -

Pengambilan Keputusan: Suara Bulat

Realisasi

Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS yang dituangkan dalam Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Tbk No. 14 tanggal 15 Februari 2019 dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.



MATA ACARA	KEPUTUSAN
<p>Mata Acara 4: Penetapan besarnya gaji serta jenis dan besarnya tunjangan untuk anggota Direksi dan besarnya honorarium serta jenis dan besarnya tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta menetapkan besarnya bonus untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, akan tetapi dibayarkan dalam tahun buku 2019.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, jumlah total gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta besarnya jumlah total bonus yang akan dibayarkan kepada para anggota Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang akan dibayarkan dalam tahun 2019, serta menentukan pembagiannya di antara para anggota Direksi, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian gaji dan tunjangan serta bonus para anggota Direksi tersebut Dewan Komisaris wajib mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. 2. Sesuai dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi yang termuat dalam Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan Nomor MOM/RNC/002/II/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang kemudian telah disetujui oleh Dewan Komisaris dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/005/II/2019 tanggal 8 Februari 2019, menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta besarnya bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang akan dibayarkan dalam tahun 2019, seluruhnya tidak melebihi Rp27,3 miliar (dua puluh tujuh koma tiga miliar Rupiah) kotor, sebelum dipotong Pajak Penghasilan, dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, pembagian jumlah total honorarium, tunjangan dan bonus tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total honorarium dan tunjangan serta bonus tersebut Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. 3. Jumlah bonus yang akan dibayarkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan mengurangi besarnya cadangan tantiem yang tercatat dalam Neraca atau Laporan Posisi Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan jika setelah dilakukan pengurangan dengan jumlah bonus yang dibayarkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris terdapat jumlah sisa pada cadangan tantiem, maka jumlah sisa tersebut akan dibukukan sebagai pendapatan lain dari Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 4. Besarnya gaji dan tunjangan, termasuk bonus, yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi, serta besarnya honorarium dan tunjangan, termasuk bonus, yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris, dalam tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan juga akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 5. Pemberian kuasa dan kewenangan yang termuat dalam keputusan ini berlaku terhitung sejak saat usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini dan tidak dapat dibatalkan.”
<p>Pengambilan suara: 1. Suara Setuju : 4.994.378.572 atau 99,9974772% 2. Suara Tidak Setuju : 126.000 atau 0,0025228% 3. Suara Abstain : - Pengambilan Keputusan: Suara Terbanyak</p>	
<p>Realisasi: Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS</p>	

MATA ACARA	KEPUTUSAN
<p>Mata Acara 5: Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan menetapkan besarnya honorarium dan syarat-syarat lain mengenai pengangkatan Akuntan Publik tersebut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Kantor Akuntan Publik SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan dan Akuntan Publik Liana Lim yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Menyetujui penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu biaya audit tahunan Perseroan sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) (di luar pajak & <i>out-of-pocket expenses</i>). Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2019 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.”
<p>Pengambilan suara:</p> <ol style="list-style-type: none"> Suara Setuju : 4.974.378.572 atau 99,5970371% Suara Tidak Setuju : 20.126.000 atau 0,4029629% Suara Abstain :- <p>Pengambilan Keputusan: Suara Terbanyak</p>	
<p>Realisasi: Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS</p>	
<p>Mata Acara 7: Pengukuhan kembali keputusan mengenai Program Pemberian Opsi Saham Kepada Karyawan Perseroan (Program ESOP) yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 29 April 2016 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 24 Maret 2017 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 29 Maret 2018 dan menyerahkan kewenangan serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perbuatan apapun untuk dan dalam rangka melaksanakan Program ESOP, antara lain (tetapi tidak terbatas) dari waktu ke waktu menambah atau meningkatkan besarnya modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut di atas</p>	<ol style="list-style-type: none"> Mengukuhkan kembali keputusan untuk membuat dan melaksanakan Program Pemberian Opsi Saham Kepada Karyawan Perseroan (Program ESOP 2016), yang telah diambil dalam RUPS-LB 2016, RUPS-T 2017 dan RUPS-T 2018. Memberikan kewenangan dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk melakukan dan melaksanakan semua dan setiap tindakan, perbuatan atau apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau anggaran dasar Perseroan, atau yang oleh Dewan Komisaris dipandang perlu untuk dilakukan dan dilaksanakan, untuk dan dalam rangka melaksanakan atau merealisasikan Program ESOP 2016, antara lain (tetapi tidak terbatas pada): <ol style="list-style-type: none"> Dari waktu ke waktu, menambah atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan jumlah tambahan seluruhnya tidak melebihi Rp2.336.114.920,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah), dengan cara mengeluarkan saham baru dalam jumlah tidak melebihi 116.805.746 (seratus enam belas juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh enam) saham, masing-masing bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah), sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPS-LB 2016, RUPST-2017 dan RUPS-T 2018. Membuat, menerbitkan serta memberlakukan peraturan, ketentuan dan kebijakan berupa apapun mengenai pelaksanaan Program ESOP 2016 (dengan tidak mengurangi peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal), menetapkan para peserta yang berhak untuk membeli saham-saham Perseroan dalam rangka Program ESOP 2016 dan menetapkan harga saham-saham yang akan dibeli oleh para peserta Program ESOP 2016 atau Harga Pelaksanaannya, termasuk (tetapi tidak terbatas) membuat perubahan atau penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan Program ESOP 2016 sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang di kemudian hari dapat diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang Pasar Modal, termasuk Otoritas Jasa Keuangan. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perbuatan atau tindakan atau hal yang mengenai atau berhubungan dengan pelaksanaan Program ESOP 2016 yang Direksi Perseroan tidak mempunyai benturan kepentingan. <p>Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku terhitung sejak saat usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali, akan tetapi segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPT dan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.</p> Untuk menghilangkan keragu-raguan, penambahan modal ditempatkan dan modal disetor yang termuat dalam keputusan ini tidak mengurangi keputusan penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang telah diputuskan dalam rangka melaksanakan Program MESOP 2015 yang telah dikukuhkan kembali dalam acara ke-6 (enam) Rapat
<p>Pengambilan suara:</p> <ol style="list-style-type: none"> Suara Setuju : 4.984.152.365 atau 99,7927281% Suara Tidak Setuju : 10.352.207 atau 0,2072720% Suara Abstain :- <p>Pengambilan Keputusan : Suara Terbanyak</p>	
<p>Realisasi: Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS</p>	



MATA ACARA	KEPUTUSAN
<p>Mata Acara 6: Pengukuhan kembali keputusan mengenai Program Pemberian Opsi Saham Kepada Karyawan Dan Manajemen Perseroan (Program MESOP) yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 26 Maret 2015, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 29 April 2016, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 24 Maret 2017 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 29 Maret 2018 dan menyerahkan kewenangan serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perbuatan apa pun untuk dan dalam rangka melaksanakan Program MESOP, antara lain (tetapi tidak terbatas) dari waktu ke waktu menambah atau meningkatkan besarnya modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut di atas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukuhkan kembali keputusan untuk membuat dan melaksanakan Program Pemberian Hak Opsi Saham Kepada Manajemen Dan Karyawan Perseroan (Program MESOP 2015) , yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 26 Maret 2015 (RUPS-LB 2015) , Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 29 April 2016 (RUPS-LB 2016), Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 24 Maret 2017 (RUPS-T 2017), serta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tanggal 29 Maret 2018 (RUPS-T 2018). 2. Memberikan kewenangan dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan dan melaksanakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau anggaran dasar Perseroan, atau yang dipandang perlu, untuk dilakukan dan dilaksanakan, untuk dan dalam rangka melaksanakan atau merealisasikan Program MESOP 2015, antara lain (tetapi tidak terbatas pada): <ol style="list-style-type: none"> a. Dari waktu ke waktu, menambah atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan jumlah tambahan seluruhnya tidak melebihi jumlah Rp4.672.229.820,- (empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh Rupiah), dengan cara mengeluarkan saham baru dalam jumlah tidak melebihi 233.611.491 (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu empat ratus sembilan puluh satu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah), sesuai dengan keputusan RUPS-LB 2015, yang dikukuhkan dalam RUPS-LB 2016, RUPS-T 2017 serta RUPST 2018. b. Membuat, menerbitkan serta memberlakukan peraturan, ketentuan dan kebijakan berupa apapun mengenai pelaksanaan Program MESOP 2015 (dengan tidak mengurangi peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal), menetapkan para peserta yang berhak untuk membeli saham-saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka Program MESOP 2015 dan menetapkan besarnya harga pelaksanaan, termasuk (tetapi tidak terbatas) membuat perubahan atau penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan Program MESOP 2015 dengan peraturan dan persyaratan yang di kemudian hari dapat diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang Pasar Modal, termasuk Otoritas Jasa Keuangan. c. Memberi kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perbuatan, tindakan atau hal yang mengenai atau berhubungan dengan pelaksanaan Program MESOP 2015 yang Direksi Perseroan tidak mempunyai benturan kepentingan. <p>Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku terhitung sejak saat usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali, akan tetapi segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPT dan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal."</p>
<p>Pengambilan suara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suara Setuju : 4.984.152.365 atau 99,7927281% 2. Suara Tidak Setuju : 10.352.207 atau 0,2072721% 3. Suara Abstain : - <p>Pengambilan Keputusan : Suara Terbanyak</p>	
<p>Realisasi: Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS</p>	

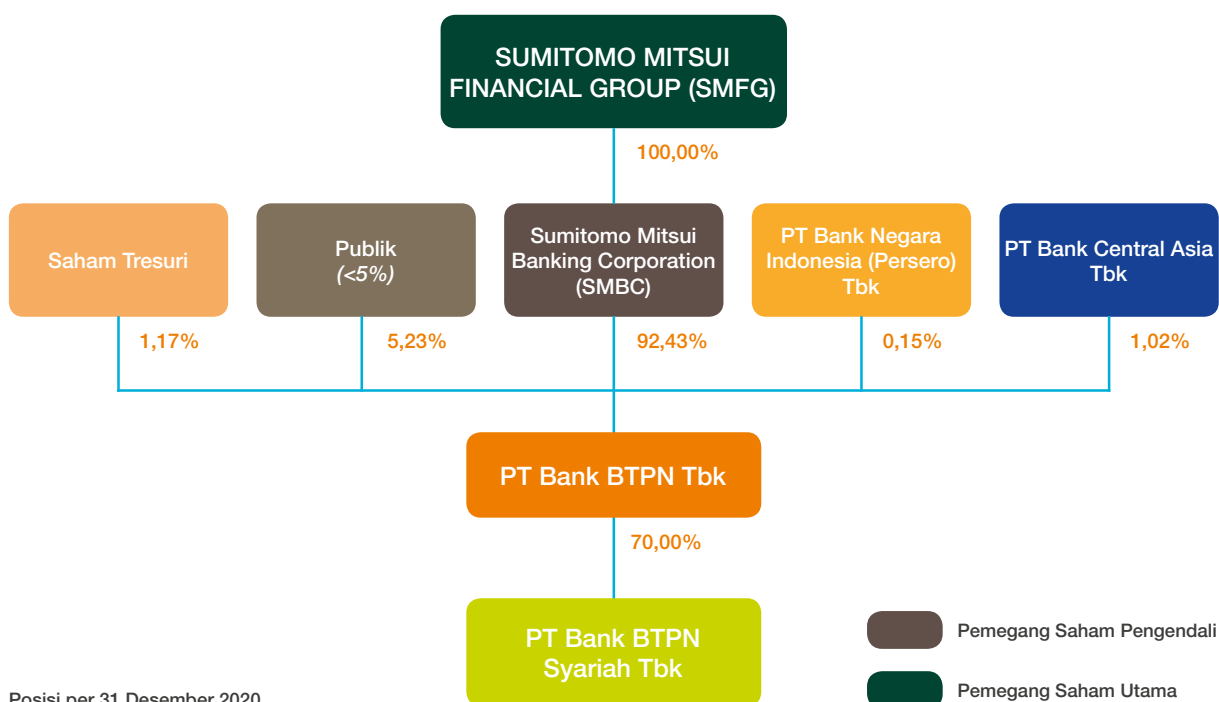
Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa 11 September 2019

MATA ACARA	KEPUTUSAN
<p>Mata Acara 1: Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan</p>	<p>Menyetujui untuk mengangkat ibu HANNA TANTANI sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi yang sedang menjabat, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022; sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>DIREKSI Direktur Utama : Ongki Wanadjati Dana Wakil Direktur Utama : Kazuhisa Miyagawa Direktur Kepatuhan (Independen) : Dini Herdini Direktur : Yasuhiro Daikoku Direktur : Henoeh Munandar Direktur : Adrianus Dani Prabawa Direktur : Merisa Darwis Direktur : Hiromichi Kubo Direktur : Hanna Tantani</p> <p>Seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2022, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.</p>
<p>Pengambilan suara: 1. Suara Setuju : 7.933.621.769 (100%) 2. Suara Tidak Setuju :- 3. Suara Abstain :- Pengambilan Keputusan : Suara Bulat</p>	
<p>Realisasi: Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Tbk No. 16 tanggal 11 September 2019 dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.</p>	

MATA ACARA	KEPUTUSAN
<p>Mata Acara 2: Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan</p>	<p>Menyetujui untuk mengangkat bapak IRWAN MAHJUDIN HABSJAH sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022; sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama (Independen) : Mari Elka Pangestu Wakil Komisaris Utama : Chow Ying Hoong Komisaris : Takeshi Kimoto Komisaris (Independen) : Ninik Herlani Masli Ridhwan Komisaris (Independen) : Irwan Mahjudin Habsjah</p> <p>Seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2022, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.</p>
<p>Pengambilan suara: 1. Suara Setuju : 7.933.621.769 (100%) 2. Suara Tidak Setuju :- 3. Suara Abstain :- Pengambilan Keputusan: Suara Bulat</p>	
<p>Realisasi: Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Tbk No. 16 tanggal 11 September 2019 dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.</p>	



Pemegang Saham Utama dan Pengendali



Posisi per 31 Desember 2020

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ utama Perseroan yang memiliki tanggung jawab di bidang pengawasan atas kebijakan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan lain yang dimiliki oleh Dewan Komisaris telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, di antaranya melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS serta berakhir pada saat ditutupnya RUPS ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan. Penetapan komposisi Dewan Komisaris dilakukan melalui mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank. Komposisi Dewan Komisaris didasarkan pada keahlian, pengalaman profesional serta latar belakang.

Dasar Hukum

Dasar hukum keberadaan Dewan Komisaris dalam organisasi Bank, didasarkan oleh sejumlah aturan yang berlaku. Di antaranya, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk Anggaran Dasar Perseroan.

Seluruh ketentuan tersebut mengharuskan perusahaan yang bernaung di bawah hukum Indonesia untuk memiliki Dewan Komisaris. Adapun tugasnya adalah mengawasi kebijakan manajemen, proses manajemen di dalam perusahaan sekaligus mengawasi dan memberikan saran/nasihat kepada Direksi.

Prosedur Pengangkatan

Kebijakan nominasi anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam rangka pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris yang selanjutnya akan disampaikan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Proses seleksi kandidat dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite tersebut akan mempertimbangkan kompetensi, dan pengalaman profesional, serta keberagaman komposisi tanpa membedakan ras, etnis, jenis kelamin, dan agama.

Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Berikut adalah alur proses nominasi anggota Dewan Komisaris:



Kriteria Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, anggota Dewan Komisaris wajib menjalani Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebelum menjalankan tugas. Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Per 31 Desember 2020, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan.

Independensi Dewan Komisaris

Bank BTPN telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan independensi Dewan Komisaris:

- Anggota Dewan Komisaris BTPN telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Bank Indonesia,
- jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 5 orang di mana 3 (tiga) orang atau lebih dari 50% adalah Komisaris Independen. Komisaris Independen telah memenuhi kriteria independensi berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Penggantian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.
- Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris melebihi yang diperkenankan dalam Peraturan OJK.

Anggota Dewan Komisaris Perseroan menandatangani pernyataan terkait pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada saat proses uji kemampuan dan kelayakan. Pernyataan ini selalu diperbaharui setiap tahun, dan terakhir dilakukan untuk posisi akhir Desember 2020.

Pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris (Board Manual)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Dewan Komisaris berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Board Manual*) Dewan Komisaris. Pedoman tersebut secara berkala dilakukan pemutakhiran dan penyempurnaan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pedoman dan Tata tertib Kerja Dewan Komisaris telah dilakukan kajian terakhir pada 18 Desember 2020.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, isi dari *Board Manual* Dewan Komisaris adalah:

1. Organisasi
2. Independensi
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Pembentukan Komite-komite
5. Fungsi Komisaris Utama
6. Nilai-nilai Etika Anggota Dewan Komisaris
7. Rapat
8. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah Dewan Komisaris adalah 5 (lima) orang dan tidak melebihi jumlah anggota Direksi yang sebanyak 10 orang. Sebanyak 3 (tiga) dari 5 (lima) orang atau lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris



merupakan Komisaris Independen. Mayoritas anggota dari anggota Dewan Komisaris warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

PERIODE SEBELUM RUPS TAHUNAN TANGGAL 23 APRIL 2020

Nama	Jabatan	Periode Jabatan
Mari Elka Pangestu	Komisaris Utama (Independen)	2019-2022
Chow Ying Hoong	Wakil Komisaris Utama	2019-2022
Takeshi Kimoto	Komisaris	2019-2022
Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris Independen	2019-2022
Irwan Mahjudin Habsjah	Komisaris Independen	2019-2022

PERIODE SESUDAH RUPS TAHUNAN TANGGAL 23 APRIL 2020

Nama	Jabatan	Periode Jabatan
lowong	Komisaris Utama (Independen)	-
Chow Ying Hoong	Wakil Komisaris Utama	2019-2022
Takeshi Kimoto	Komisaris	2019-2022
Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris Independen	2019-2022
Irwan Mahjudin Habsjah	Komisaris Independen	2019-2022

PERIODE SETELAH RUPS LUAR BIASA TANGGAL 18 NOVEMBER 2020

Nama	Jabatan	Periode Jabatan
Chow Ying Hoong	Komisaris Utama	2019-2022
Takeshi Kimoto	Komisaris	2019-2022
Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris Independen	2019-2022
Irwan Mahjudin Habsjah	Komisaris Independen	2019-2022
Edmund Tondobala	Komisaris Independen	2020-2022

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Dewan Komisaris

Secara umum, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya.

Secara khusus, masing-masing anggota Dewan Komisaris telah memiliki tugas. Rinciannya dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Nama	Jabatan	Tugas
Chow Ying Hoong	Komisaris Utama	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
Takeshi Kimoto	Komisaris	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite Pemantau Risiko
Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris Independen	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai: a. Ketua Komite Audit b. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
Irwan Mahjudin Habsjah	Komisaris Independen	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai: a. Ketua Komite Pemantau Risiko b. Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi
Edmund Tondobala	Komisaris Independen	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai: a. Anggota Komite Audit b. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Rencana dan Realisasi Program Kerja 2020

Di tahun 2020, Dewan Komisaris telah secara aktif mengawasi pengelolaan dan operasional Bank BTPN serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan tata kelola pada seluruh aktivitas Bank. Pengawasan difokuskan kepada pencapaian target bisnis dengan memperhatikan pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Pengawasan dilakukan secara langsung melalui pemantauan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi, maupun melalui komite-komite yang dibentuk.

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap aspek-aspek strategis Bank antara lain:

1. Kajian atas kinerja keuangan Bank dan Perusahaan Anak.
2. Melalui Komite Pemantau Risiko, telah dilakukan kajian terhadap manajemen risiko, kecukupan sistem pengendalian internal dan penerapan budaya kepatuhan.
3. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Internal Audit dan eksternal dan rekomendasi dari Internal Audit melalui Komite Audit.

4. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Persetujuan atas revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) 2020-2022.
6. Mengkaji dan menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) 2021-2023 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).
7. Pemantauan penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Terintegrasi.
8. Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan Rencana Kerja Tahunan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
9. Dewan Komisaris senantiasa melakukan pemantauan penerapan tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku antara lain rasio keuangan, Tingkat Kesehatan Bank - RBBR, penerapan APU PPT dan penerapan manajemen risiko.

Pengungkapan Kepemilikan Saham

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan terkait Laporan Kepemilikan Saham atau Perubahan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris, selama tahun 2020 tidak terdapat transaksi penjualan saham



Berikut ini merupakan tabel kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2020:

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase Saham
Chow Ying Hoong	Komisaris Utama	-	0,00
Takeshi Kimoto	Komisaris	-	0,00
Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris (Independen)	-	0,00
Irwan Mahjudin Habsjah	Komisaris (Independen)	-	0,00
Edmund Tondobala	Komisaris (Independen)	-	0,00

Orientasi bagi Dewan Komisaris

Bank BTPN memastikan setiap anggota Dewan Komisaris yang baru menjabat mendapatkan informasi yang diperlukan terkait Perusahaan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan Sekretaris Perusahaan bertugas menyediakan informasi yang diperlukan oleh anggota Dewan Komisaris tersebut.

Penilaian Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Selama tahun 2020, komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan tugas pengawasannya dengan baik melalui rapat berkala dengan Dewan Komisaris dan melakukan kunjungan ke kantor cabang untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan akuntabilitas dan tata kelola.

Penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan dengan penilaian sendiri oleh masing masing anggota komite yang dirangkum secara kuantitatif.

KOMISARIS INDEPENDEN

Jumlah Komisaris Independen

Pada tahun 2020, jumlah Komisaris Independen sebanyak 3 (tiga) dari total 5 (lima) Dewan Komisaris. Dengan demikian, jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Komisaris Independen

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Peran Komisaris Independen sangat penting khususnya fungsi pengawasan terhadap kinerja Direksi, mencegah benturan kepentingan serta meningkatkan independensi dan objektivitas.

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya;
3. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
4. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Bank; dan
5. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Independensi Komisaris Independen

Sesuai dengan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.

Aspek Independensi	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Irwan Mahjudin Habsjah	Edmund Tondobala
Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Bank	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank	√	√	√
Tidak memiliki rangkap jabatan sebagai: Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan pengawasan	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi	√	√	√

DIREKSI

Direksi merupakan organ penting dalam tata kelola perusahaan, yang memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank. Wewenang tersebut digunakan demi kepentingan dan pencapaian tujuan Bank. Hal ini sejalan dengan yang ditetapkan oleh regulasi bahwa Direksi dapat mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Tujuannya adalah demi mencapai efektivitas pengelolaan dan pencapaian hasil yang maksimal. Direksi Bank BTPN senantiasa menjunjung tinggi sikap profesional, obyektif, berpikiran strategis dan mengedepankan kepentingan Bank.

Dasar Hukum

Dasar hukum keberadaan Direksi dalam organisasi perusahaan, didasarkan oleh sejumlah aturan yang berlaku. Di antaranya adalah Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk Anggaran Dasar Perseroan.

Selain itu, Bank Juga Mengacu pada Peraturan OJK Nomor 55/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Regulasi tersebut menetapkan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. Karena itulah, Direksi wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap pelaksanaan kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Prosedur Pengangkatan

Kebijakan nominasi anggota Direksi dilakukan dalam rangka pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi yang selanjutnya akan disampaikan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Proses seleksi kandidat dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite tersebut akan mempertimbangkan kompetensi, dan pengalaman profesional, serta keberagaman komposisi tanpa membedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama.

Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Namun sebelumnya, Direksi adalah lulus dalam menjalani Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebelum menjalankan tugas. Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Per 31 Desember 2020, seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan.



Berikut adalah alur proses nominasi anggota Direksi:



Kriteria Direksi

Penetapan kriteria Direksi, antara lain mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Saat diangkat, Direksi minimal harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pemenuhan persyaratan tersebut wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Bank. Selanjutnya, Bank wajib meneliti dan mendokumentasikannya.

Independensi Direksi

Seluruh Anggota Direksi BTPN tidak memiliki hubungan kepemilikan, keuangan dan kepengurusan dengan pemegang saham utama BTPN, sesama anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris.

Komposisi Direksi

Penetapan komposisi Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank. Komposisi Direksi didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi tanpa membedakan gender, suku, ras dan agama. Direksi BTPN berjumlah 10 orang, yang 3 (tiga) di antaranya adalah perempuan.

Sejalan dengan itu, Bank BTPN telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan independensi Direksi:

- Anggota Direksi Bank BTPN telah memenuhi kriteria dan independensi sesuai ketentuan regulator, yang di antaranya menyebutkan bahwa Direktur Utama merupakan pihak independen.
- Penggantian dan pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

- Setiap anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Direksi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan OJK.

Anggota Direksi Perseroan menandatangani pernyataan terkait pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada saat proses uji kemampuan dan kelayakan. Pernyataan ini selalu diperbaharui setiap tahun, dan terakhir dilakukan untuk posisi akhir Desember 2020.

Pedoman Tata Tertib Direksi (Board Manual)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Board Manual*). Pedoman tersebut secara berkala dilakukan pemutakhiran dan penyempurnaan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pedoman dan Tata tertib Kerja Direksi telah dilakukan kajian terakhir pada 18 Desember 2020. Berdasarkan hasil kajian tersebut, isi dari *Board Manual* Direksi adalah:

1. Organisasi
2. Independensi
3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
4. Fungsi Direktur Utama
5. Direktur Kepatuhan
6. Nilai-nilai Etika Anggota Direksi
7. Rapat
8. Hubungan dengan *stakeholder*
9. Pelatihan

Susunan Keanggotaan Direksi

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 23 April 2020 dan RUPS Luar Biasa tanggal 18 November 2020 terjadi perubahan susunan anggota Direksi yaitu sebagai berikut:

PERIODE SEBELUM RUPS TAHUNAN TANGGAL 23 APRIL 2020

Nama	Jabatan	Periode Jabatan
Ongki Wanadjati Dana	Direktur Utama	2019-2022
Kazuhisa Miyagawa	Wakil Direktur Utama	2019-2022
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan (Independen)	2019-2022
Yasuhiro Daikoku	Direktur	2019-2022
Henoch Munandar	Direktur	2019-2022
Adrianus Dani Prabawa	Direktur	2019-2022
Hiromichi Kubo	Direktur	2019-2022
Merisa Darwis	Direktur	2019-2022
Hanna Tantani	Direktur	2019-2022

PERIODE SESUDAH RUPS TAHUNAN TANGGAL 23 APRIL 2020

Nama	Jabatan	Periode Jabatan
Ongki Wanadjati Dana	Direktur Utama	2019-2022
Kazuhisa Miyagawa	Wakil Direktur Utama	2019-2022
Darmadi Sutanto	Wakil Direktur Utama*	2019-2022
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan	2019-2022
Yasuhiro Daikoku	Direktur	2019-2022
Henoch Munandar	Direktur	2019-2022
Adrianus Dani Prabawa	Direktur	2019-2022
Hiromichi Kubo	Direktur	2019-2022
Merisa Darwis	Direktur	2019-2022
Hanna Tantani	Direktur	2019-2022

*) Darmadi Sutanto diangkat sebagai Wakil Direktur Utama melalui RUPS Tahunan tanggal 23 April 2020, dan efektif menjabat sejak 14 Mei 2020 setelah mendapat persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.



PERIODE SETELAH RUPS LUAR BIASA TANGGAL 18 NOVEMBER 2020

Nama	Jabatan	Periode Jabatan
Ongki Wanadjati Dana	Direktur Utama	2019-2022
Kaoru Furuya	Wakil Direktur Utama ¹⁾	2020-2022
Darmadi Sutanto	Wakil Direktur Utama	2019-2022
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan	2019-2022
Yasuhiro Daikoku	Direktur	2019-2022
Henoch Munandar	Direktur	2019-2022
Adrianus Dani Prabawa	Direktur	2019-2022
Hiromichi Kubo	Direktur	2019-2022
Merisa Darwis	Direktur	2019-2022
Hanna Tantani	Direktur	2019-2022

¹⁾ Kaoru Furuya diangkat sebagai Wakil Direktur Utama melalui RUPS Luar Biasa pada tanggal 18 November 2020, dan efektif menjabat sejak 4 Januari 2021 setelah memperoleh izin kerja secara lengkap dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Direksi

Secara umum, Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja Internal Audit, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Secara khusus, masing-masing anggota Direksi telah memiliki tugas. Rinciannya dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab
Direktur Utama	<p>Mengkoordinasikan dan secara umum membawahi tugas dan tanggung jawab seluruh anggota Direksi.</p> <p>Secara khusus membawahi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wakil Direktur Utama yang membawahi Corporate Banking b. Wakil Direktur Utama yang membawahi Retail Banking c. Direktur yang membawahi Corporate Banking (Japanese) d. Direktur yang membawahi Wholesale Banking e. Direktur Treasury/Treasury Director f. Direktur Operasional/Operation Director g. Direktur Manajemen Risiko/Risk Management Director h. Direktur Kepatuhan & Legal/Legal & Compliance Director i. Direktur Keuangan/Finance Director j. Head of Human Capital k. Head of Internal Audit l. Head of Information Technology <p>Koordinator pelaksana Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup SMBC.</p>
Wakil Direktur Utama	<p>Mengkoordinasikan dan secara umum membawahi tugas dan tanggung jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direktur yang membawahi Corporate Banking (Japanese) b. Direktur yang membawahi Wholesale Banking c. Direktur Treasury <p>Secara khusus membawahi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Credit Risk Division: <ul style="list-style-type: none"> • Credit • Loan • Transaction Legal • Commercial Banking Credit Risk • Credit Planning

Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab
Wakil Direktur Utama	<p>Secara khusus membawahi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Head of Retail Lending Business <ul style="list-style-type: none"> - Sales Distribution Pension Business 1 - Sales Distribution Pension Business 2 - Sales Distribution Pension Business 3 - Payroll Loan RLB - Strategic Partnership & Relationship Management Pension Business - Product & Sales Management RLB - Business Solution & Customer Experience RLB - Business Risk RLB b. Head of Wealth Management Business <ul style="list-style-type: none"> - Sales Management WMB - Liabilities & Digital Management WMB - Wealth Product Management WMB - Customer Experience WMB - Network & Distribution WMB c. Head of Digital Banking <ul style="list-style-type: none"> - Digital Banking Acquisition, Service & Marketing JENIUS - Digital Banking Solution - Digital Banking Consumer Product JENIUS - Digital Banking Business Product JENIUS - Digital Banking Business Performance & Customer Value Management - Digital Banking Partnership JENIUS - Digital Banking Lending Business Product BTPN Wow! - Digital Banking Sales Management BTPN Wow! - Digital Banking Product & Customer Experience BTPN Wow! d. Retail Banking Risk e. Micro Business Banking f. Retail Banking Analytics, Business Planning & Credit Policy g. Retail Banking Business Management
Direktur Kepatuhan	<p>Secara khusus membawahi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. AML&CFT b. Compliance c. Corporate Secretary d. Legal & Litigation e. Corporate Communication & DAYA <p>Mengawasi pelaksanaan fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan Terintegrasi.</p>
Direktur Corporate Banking (Japanese)	<p>Secara khusus membawahi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Corporate Banking 2 b. Corporate Banking 3 c. Corporate Banking 4 d. Corporate Banking 5 e. KYC Onboarding f. Corporate Banking Business Planning
Direktur Wholesale Banking	<p>Secara khusus membawahi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Head of Wholesale Banking b. Commercial Banking c. Transaction Banking & Supply Chain
Direktur Manajemen Risiko	<p>Secara khusus membawahi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Portfolio Management & Policy b. Anti-Fraud Management c. Operational Risk Management d. Market & Liquidity Risk Management e. Risk Management Planning <p>Mengawasi pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.</p>
Direktur Operasional	<p>Secara khusus membawahi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Customer Experience Center b. Branch Banking c. Operations Transaction Center d. Reporting, Settlement & Access Management e. Operations Control Assurance f. Operations Development g. General Services
Direktur Treasury	<p>Secara khusus membawahi Deputy Head of Treasury</p>
Direktur Keuangan	<p>Secara khusus membawahi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Planning and Deputy of Chief Financial Officer b. Financial Control c. Finance Technology & Operations d. Alignment & Synergy



Orientasi Anggota Direksi Baru

Direktur Utama memastikan anggota Direksi yang baru menjabat mendapatkan informasi yang diperlukan terkait Bank agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan Sekretaris Perusahaan bertugas menyediakan informasi yang diperlukan oleh anggota Direksi tersebut.

Rencana dan Realisasi Program Kerja 2020

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi secara berkala mengadakan pertemuan untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis dan memerlukan pertimbangan dan persetujuan Direksi.

Selama 2020, rapat Direksi telah membahas antara lain:

1. Pemantauan kinerja keuangan Bank dan Perusahaan Anak.
2. Evaluasi kinerja unit-unit bisnis atas target yang telah ditetapkan.
3. Kajian terhadap penerapan Teknologi Informasi (TI) dan operasional Bank serta inisiatif di bidang TI dan operasional.

4. Persetujuan rencana strategis pada Unit Bisnis dan Unit Pendukung.
5. Persetujuan realisasi promosi dan penyesuaian gaji promosi karyawan tahun 2020
6. Kajian terhadap penerapan manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian internal serta pemantauan penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU & PPT) termasuk kajian terhadap peraturan/ketentuan dari regulator serta dampaknya terhadap Bank.
7. Pemantauan tindak lanjut atas temuan audit dari Internal dan Eksternal Audit serta hasil pengawasan OJK dan otoritas lainnya.
8. Kajian terhadap *internal fraud, whistle blowing system* dan upaya tindak lanjut.
9. Persetujuan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) 2021-2023 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).

Pengungkapan Kepemilikan Saham

Sesuai dengan amanat regulator bahwa Direksi harus menyampaikan kepemilikannya terhadap Bank, maka dengan ini disampaikan bahwa:

Nama	Jumlah Saham	Persentase Saham	Status
Ongki Wanadjati Dana	0	0,00	Direktur Utama
Darmadi Sutanto	0	0,00	Wakil Direktur Utama
Kaoru Furuya	0	0,00	Wakil Direktur Utama*
Dini Herdini	0	0,00	Direktur Kepatuhan
Yasuhiro Daikoku	0	0,00	Direktur
Henoch Munandar	0	0,00	Direktur
Adrianus Dani Prabawa	0	0,00	Direktur
Hiromichi Kubo	0	0,00	Direktur
Merisa Darwis	0	0,00	Direktur
Hanna Tantani	0	0,00	Direktur

*) Kaoru Furuya diangkat sebagai Wakil Direktur Utama melalui RUPS Luar Biasa pada tanggal 18 November 2020, dan efektif menjabat sejak 4 Januari 2021 setelah memperoleh izin kerja secara lengkap dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Suksesi Direksi

Human Capital memfasilitasi kebijakan suksesi Direksi melalui proses *talent management & succession planning*. Dalam hal itu, dilakukan penilaian terhadap ketersediaan calon anggota Direksi dan potensi pengembangannya di masa depan. Pelaksanaan suksesi dilakukan melalui identifikasi pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki potensi tersebut. Masing-masing anggota Direksi menyampaikan calon penggantinya yang akan dievaluasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Penilaian Komite di Bawah Direksi dan Dasar Penilaiannya

Selama tahun 2020, komite di bawah pengawasan Direksi telah terlibat secara aktif dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi dengan memastikan semua strategi dan inisiatif-inisiatif utama telah ditindaklanjuti.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang diterapkan di lingkungan Bank mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Karena itulah, pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi telah mempertimbangkan faktor keragaman.

Keberagaman pada Dewan Komisaris tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Bank. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.

Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan, baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Bank. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Bank.

Dengan adanya pertimbangan kombinasi karakteristik pada Dewan Komisaris, akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegal. Begitu pun halnya dengan Dewan Komisaris.

PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan

Kebijakan rapat tercantum dalam Pedoman dan Tertib Kerja Dewan Komisaris yaitu antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama atau dalam hal berhalangan, oleh Komisaris lain yang ditunjuk di dalam rapat tersebut.
6. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
7. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
8. Segala keputusan yang diputuskan secara sah didalam Rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
9. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

KARAKTERISTIK KERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Aspek Keberagaman	Komisaris	Direksi
Kewarganegaraan	<ul style="list-style-type: none"> • Warga Negara Indonesia • Warga Negara Singapura • Warga Negara Jepang 	<ul style="list-style-type: none"> • Warga Negara Indonesia • Warga Negara Jepang
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Ilmu Ekonomi • Bidang Manajemen Keuangan • Bidang Moneter 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Ilmu Ekonomi • Bidang Manajemen Keuangan • Bidang Hukum
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Praktisi Perbankan • Auditor 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbankan Internasional • Manajemen Risiko • Eksekutif Keuangan
Gender	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Perempuan • 4 Laki-laki 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Perempuan • 7 Laki-laki



FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS

Nama Komisaris	Jumlah Rapat Dewan Komisaris	Persentase Kehadiran	Jumlah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi	Persentase Kehadiran
Mari Elka Pangestu	2	50%	2	50%
Chow Ying Hoong	6	100%	7	100%
Takeshi Kimoto	6	100%	7	100%
Ninik Herlani Masli Ridhwan	6	100%	7	100%
Irwan Mahjudin Habsjah	6	100%	7	100%
Edmund Tondobala	1	0%	1	100%

AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS

No. Risalah Rapat	Tanggal	Agenda
MOM.0001/BOC/I/2020	30-Jan-20	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Komite Audit Kuartal 4/2019 Laporan Komite Pemantau Resiko Kuartal ke-4/ 2019 Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi Kuartal ke- 4/2019 Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Semester II/2019
MOM.0002/BOC/IV/2020	16-Apr-20	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Komite Audit Kuartal 1/2020 Laporan Komite Pemantau Resiko Kuartal ke- 1/ 2020 Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi Kuartal ke- 1/2020
MOM.0003/BOC/VI/2020	24-Jun-20	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Komite Audit - Pengkinian terkait tindak lanjut manajemen Bank terhadap temuan Audit Intern SMBC yang melampaui batas waktu Laporan Penilaian Sendiri terhadap kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
MOM.0004/BOC/VII/2020	30-Jul-20	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Komite Audit Kuartal 2/2020 Laporan Komite Pemantau Risiko Kuartal ke- 2/2020 Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi Kuartal ke- 2/2020 Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Semester I/2020
MOM.0005/BOC/X/2020	23-Okt-20	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Komite Audit Kuartal ke- 3/2020 Laporan Komite Pemantau Risiko Kuartal ke- 3/2020 Laporan Komite Nominasi & Remunerasi Kuartal ke- 3/2020
MOM.0006/BOC/XI/2020	23-Nov-20	<ol style="list-style-type: none"> Rencana Kerja dan Agenda Komite Audit untuk tahun 2021 Rencana Kerja dan Agenda Komite Pemantau Risiko untuk tahun 2021

Rapat Direksi

Kebijakan

Kebijakan rapat tercantum dalam Pedoman dan Tertib Kerja Direksi, yaitu antara lain:

- Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 kali dalam setiap bulan.
- Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
- Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, atau dalam hal berhalangan oleh Direktur lain yang ditunjuk dalam rapat tersebut yang tidak perlu dibuktikan pada pihak ke-3.
- Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- Segala keputusan yang diputuskan secara sah dalam Rapat Direksi bersifat mengikat bagi seluruh anggota Direksi.
- Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI TAHUN 2020

Nama	Jumlah Rapat Direksi	Persentase Kehadiran	Jumlah Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris	Persentase Kehadiran
Ongki Wanadjati Dana	49	96%	7	100%
Kazuhisa Miyagawa	46	98%	6	100%
Darmadi Sutanto	26	96%	4	75%
Kaoru Furuya*	3	67%	1	0%
Dini Herdini	49	100%	7	100%
Yasuhiro Daikoku	49	100%	7	100%
Henoch Munandar	49	92%	7	100%
Adrianus Dani Prabawa	49	94%	7	100%
Hikomichi Kubo	49	96%	7	100%
Merisa Darwis	49	100%	7	86%
Hanna Tantani	49	96%	7	100%

*) Kaoru Furuya diangkat sebagai Wakil Direktur Utama melalui RUPS Luar Biasa pada tanggal 18 November 2020, dan efektif menjabat sejak 4 Januari 2021 setelah memperoleh izin kerja yang telah selesai dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

AGENDA RAPAT DIREKSI

No. Risalah Rapat	Tanggal	Agenda
MOM.0001/BOD/I/2020	07-Jan-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agenda tetap Rapat Direksi untuk tahun 2020 2. Laporan Kinerja Keuangan posisi Desember 2020 3. Pengkinian Biaya Dibayar Dimuka Asuransi 4. Pengkinian Tata Kelola 5. Evaluasi Penggunaan AMDK
MOM.0002/BOD/I/2020	14-Jan-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkinian SOX 2. Finansial Bank 3. Laporan Pengkinian <i>Digital Banking</i> 4. Laporan Pengkinian <i>Business Banking</i> 5. Pengkinian Tata Kelola 6. Kampanye Kolaborasi Gabungan Lini Bisnis
MOM.0003/BOD/I/2020	21-Jan-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengkinian <i>Retail Lending Business</i> 2. Laporan Pengkinian <i>Wealth Management Business</i> 3. Laporan Operasional Triwulan ke-4 tahun 2019 4. Dampak PSAK 73 5. Laporan Kepatuhan dan APU/PPT Triwulan ke-4 tahun 2019 6. Laporan Pengkinian <i>Treasury</i>
MOM.0004/BOD/I/2020	28-Jan-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengkinian <i>Human Capital</i> 2. <i>Pending Items</i> 3. Pengkinian Sosialisasi GLAO 4. Laporan Realisasi Rencana Bisnis untuk posisi Triwulan 4 tahun 2019 5. Pelaporan Segmental 6. Laporan terkait KCP KCU 7. Laporan Pengkinian <i>Corporate Banking Japanese Group</i> 8. Laporan Pengkinian <i>Wholesale Banking Group</i> 9. Pengkinian Tata Kelola 10. Proposal Logo Sinaya Prioritas
MOM.0005/BOD/I/2020	10-Feb-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komposisi Direksi dan perubahan Anggaran Dasar BTPN Syariah 2. Pengkinian <i>Mid-Term Plan</i> 3. Diskusi terkait Biaya Dibayar Dimuka (BDD)
MOM.0006/BOD/I/2020	11-Feb-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Pending Items</i> 2. Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi Januari 2020 3. Laporan Pengkinian Internal Audit 4. Penanganan Dokumen <i>FX Underlying</i> 5. EVP dan Laporan Ulang Tahun BTPN & Valuasi LED FX 6. Masalah Corona Virus
MOM.0007/BOD/I/2020	18-Feb-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Pending Items</i> 2. Laporan Segmentasi 3. Laporan Penanganan <i>Fraud</i> 4. Laporan Pengkinian <i>Treasury</i> 5. Pengkinian Tata Kelola 6. Laporan Bulanan <i>Cross Functional Team</i>



AGENDA RAPAT DIREKSI

No. Risalah Rapat	Tanggal	Agenda
MOM.0008/BOD/II/2020	25-Feb-20	1. Laporan Pengkinian Pemeriksaan Grup
MOM.0009/BOD/II/2020	25-Feb-20	1. Pengkinian SOX 2. Pengkinian Tata Kelola 3. Laporan Bulanan <i>Cross Functional Team</i>
MOM.0010/BOD/III/2020	03-Mar-20	1. Model Operasi <i>Human Capital</i> 2. Pengkinian KUT dan KPKM 3. Pengkinian kasus <i>Retail Risk</i> 4. Laporan Penanganan COVID-19 5. <i>PMO Handed Over Items</i>
MOM.0011/BOD/III/2020	10-Mar-20	1. Laporan Pengkinian Biaya Dibayar Dimuka (BDD) Asuransi 2. Diskusi Direksi terkait BDD
MOM.0012/BOD/III/2020	10-Mar-20	1. Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi Februari 2019 2. Pengkinian Tata Kelola 3. Laporan Penanganan COVID-19
MOM.0013/BOD/III/2020	16-Mar-20	1. Laporan Penanganan COVID-19
MOM.0014/BOD/III/2020	17-Mar-20	1. Laporan Hasil Kinerja Keuangan Desember 2019 2. Pengkinian terkait BDD
MOM.0015/BOD/III/2020	17-Mar-20	1. Laporan Penanganan COVID-19
MOM.0016/BOD/III/2020	20-Mar-20	1. Pengkinian terkait perlakuan akuntansi terhadap Kredit Pintar
MOM.0017/BOD/III/2020	24-Mar-20	1. Pengkinian SOX 2. Laporan Pengkinian <i>Treasury</i> 3. Pengkinian Tata Kelola 4. Laporan Penanganan COVID-19
MOM.0018/BOD/IV/2020	07-Apr-20	1. Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi Maret 2020 2. Laporan Pengkinian Internal Audit 3. Laporan Pengkinian <i>Human Capital</i> 4. Pengkinian Tata Kelola 5. Laporan Penanganan COVID-19
MOM.0019/BOD/IV/2020	14-Apr-20	1. Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi Maret 2020 2. Laporan Pengkinian <i>Business Banking</i> 3. Laporan Pengkinian <i>Digital Banking</i> 4. Pengkinian Tata Kelola 5. Laporan Penanganan COVID-19 6. <i>Remediation of Insurance Premium Payment</i> dan Amortisasi
MOM.0020/BOD/IV/2020	21-Apr-20	1. Manajemen Strategi Biaya 2. Laporan Pengkinian <i>Corporate Banking Japanese</i> 3. Laporan Pengkinian <i>Wholesale Banking Group</i> 4. Laporan Kepatuhan dan APU/PPT Triwulan ke-1 tahun 2020 5. Laporan Bulanan <i>Cross Functional Team</i>
MOM.0021/BOD/IV/2020	28-Apr-20	1. Laporan Pengkinian Finansial dalam SOX dan Audit KPMG 2. Laporan Pengkinian <i>Treasury</i> 3. Laporan Pengkinian Operasional Triwulan ke-1 tahun 2020 4. Laporan Pengkinian <i>Retail Lending Business</i> 5. Laporan Pengkinian <i>Wealth Management Business</i> 6. Pengkinian Tata Kelola 7. Laporan Penanganan COVID-19
MOM.0022/BOD/IV/2020	05-Mei-20	1. Pengkinian terkait Struktur Organisasi 2. Laporan Pengkinian Rencana Aksi APU/PPT 3. Laporan Penanganan COVID-19
MOM.0023/BOD/V/2020	12-Mei-20	1. Pengkinian SOX 2. Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi April 2020 3. Revisi Rencana Bisnis Bank tahun 2020 <i>Bank-wide Key Assumptions</i> 4. Pengkinian Tata Kelola 5. <i>BTPN COVID-19 Navigator</i> 6. Laporan Penanganan COVID-19
MOM.0024/BOD/V/2020	19-Mei-20	1. Laporan Pengkinian <i>Treasury</i> 2. Presentasi IICD - Gambaran terkait ASEAN CG Scorecard 3. <i>Settlement of PUR Insurance GL's (SP1)</i> 4. Proposal terkait Proyek Konsolidasi <i>Core Banking</i> 5. Manajemen Rencana Strategis

AGENDA RAPAT DIREKSI

No. Risalah Rapat	Tanggal	Agenda
MOM.0025/BOD/VI/2020	02-Jun-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. RACI Project (Pemberian Kewenangan) 2. Laporan Penanganan COVID-19 3. Pengkinian Retail Risk - Kasus Mule Account 4. KPI BOD 2020 5. Project Utara
MOM.0026/BOD/VI/2020	10-Jun-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi draft kedua Rencana Bisnis Bank
MOM.0027/BOD/VI/2020	16-Jun-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi Mei 2020 2. Pengkinian Tata Kelola 3. Pengkinian PMO Handed Over Items 4. Insiden TD Transaction ke Bank Indonesia 5. Laporan Penanganan COVID-19
MOM.0028/BOD/VI/2020	23-Jun-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkinian Status SOX 2. Revisi RBB tahun 2020 untuk persetujuan Direksi 3. Laporan Pengkinian Treasury 4. Pengkinian Tata Kelola
MOM.0029/BOD/VI/2020	30-Jun-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Tenor Asuransi Kesehatan 2. Kajian Strategi Bisnis dan Model Operasi 3. Pengkinian Proyek RACI
MOM.0030/BOD/VII/2020	07-Jul-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. GL Control dan Tata Kelolanya & Pengkinian SOX 2. Pengkinian Tata Kelola 3. Laporan Penanganan COVID-19 4. Masukan dan Persetujuan untuk Pemenuhan Komitmen kepada OJK terkait PT Rattancraft Indonesia
MOM.0031/BOD/VII/2020	14-Jul-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkinian Finansial dalam SOX dan Audit KPMG <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi Juni 2020 b. Manajemen Strategi Biaya 2. Laporan Pengkinian Business Banking 3. Laporan Pengkinian Internal Audit 4. Pengkinian Tata Kelola 5. Laporan Penanganan COVID-19
MOM.0032/BOD/VII/2020	21-Jul-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkinian Human Capital 2. Pengkinian Tata Kelola 3. Aplikasi Digital Sinaya
MOM.0033/BOD/VII/2020	28-Jul-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengkinian Operasional Triwulan ke-2 tahun 2020 2. Laporan Pengkinian Kepatuhan, APU/PPT dan Hukum 3. Laporan Pengkinian Corporate Banking Japanese Group 4. Laporan Pengkinian Wholesale Banking Group 5. Laporan Pengkinian Treasury 6. Laporan Pengkinian Retail Lending Business 7. Laporan Pengkinian Wealth Management Business 8. Laporan Penanganan COVID-19
MOM.0034/BOD/VII/2020	04-Agu-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengkinian Digital Banking 2. Pengkinian Tata Kelola 3. Proposal terkait perhitungan dampak BTPN kepada Indonesia 4. Proyek DOLFIN 5. Laporan Penanganan COVID-19 6. Kajian Strategi Bisnis dan Model Operasi
MOM.0035/BOD/VIII/2020	11-Agu-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkinian SOX 2. Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi Juli 2020 3. Pengkinian LCS 4. Laporan Penanganan COVID-19 5. Pengkinian Tata Kelola: D&O Insurance Liabilities
MOM.0036/BOD/VIII/2020	18-Agu-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengkinian Treasury 2. Laporan Penanganan COVID-19 3. Pengkinian Project Utara
MOM.0037/BOD/VIII/2020	25-Agu-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkinina Tata Kelola: <ul style="list-style-type: none"> - Hak Kekayaan Intelektual BTPN - Kolaborasi Foster BTPN dengan Perusahaan Grup di Indonesia 2. Pengkinian SOX
MOM.0038/BOD/IX/2020	08-Sep-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkinian Tata Kelola 2. Pengkinian Finansial dalam SOX dan Audit KPMG <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi Agustus 2020 • Asumsi Makro RBB 3. Pengkinian Qanun Project 4. Laporan Pengkinian Retail Lending Business <ul style="list-style-type: none"> • Qanun Project • Portofolio Karyawan Aktif 5. Laporan Penanganan COVID-19



AGENDA RAPAT DIREKSI

No. Risalah Rapat	Tanggal	Agenda
MOM.0039/BOD/IX/2020	15-Sep-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan <i>Digital Banking</i> 2. Laporan Internal Audit 3. Pengkinian Tata Kelola <ul style="list-style-type: none"> • Rasio Likuiditas • Pengkinian LCS 4. Laporan Penanganan COVID-19 5. Rencana Bisnis Bank (RBB) 2021 - 2023 RBB dan Pengkinian MTP - LOB dan <i>Support Functions</i>
MOM.0040/BOD/IX/2020	22-Sep-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkinian SOX 2. Laporan Pengkinian <i>Treasury</i> 3. Pengkinian Tata Kelola
MOM.0041/BOD/IX/2020	29-Sep-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkinian terhadap GL 2. Pengkinian Tata Kelola 3. Laporan dari Jenius: Biaya Administrasi 4. Laporan Penanganan COVID-19
MOM/0042/BOD/X/2020	06-Okt-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkinian Tata Kelola 2. Laporan dari Jenius: Program SGM 3. Inisiatif <i>ATM Offsite</i> 4. Pengkinian Human Capital 5. Laporan Penanganan COVID-19
MOM.0043/BOD/X/2020	13-Okt-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi terkait <i>Pending Items</i> 2. Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi September 2020 & Diskusi Rencana Bisnis Bank 3. Laporan Pengkinian <i>Business Banking</i> 4. Pengkinian Tata Kelola 5. <i>IT Task Force</i> 6. Laporan Penanganan COVID-19
MOM.0044/BOD/X/2020	20-Okt-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi terkait <i>Pending Items</i> 2. Laporan Pengkinian <i>Digital Banking</i> 3. Laporan Pengkinian <i>Wealth Management Business</i> 4. Laporan Pengkinian <i>Retail Lending Business</i> 5. Kerangka Manajemen <i>Outsourcing</i> 6. Benefit Asuransi Medis - Penawaran Asuransi Kesehatan
MOM.0045/BOD/XI/2020	03-Nov-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi terkait <i>Pending Items</i> 2. Pengkinian <i>Project Utara - Draft Work In Progress Cost Effectiveness Opportunities</i> 3. Laporan Pengkinian <i>Treasury</i> 4. Laporan Pengkinian <i>Corporate Banking Japanese Group</i> 5. Laporan Pengkinian <i>Wholesale Banking Group</i> 6. Laporan Kepatuhan & APU/PPT Triwulan 3 tahun 2020 7. Laporan Operasional dan Pengkinian <i>GL Operation</i>
MOM.0046/BOD/XI/2020	10-Nov-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi Terkait <i>Pending Items</i> 2. Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> i. Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi Oktober 2020 ii. Rencana Bisnis Bank ("RBB") 2021 – 2023 untuk persetujuan Direksi 3. Laporan Internal Audit 4. Pengkinian Tata Kelola
MOM.0047/BOD/XI/2020	24-Nov-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi terkait <i>Pending Items</i> 2. Pengkinian SOX 3. GL Control dan Tata Kelola 4. Laporan Pengkinian <i>Treasury</i> 5. BTPN DIGIFEST 6. <i>H1 & Q3 Progress of Key Initiatives</i> 7. Laporan <i>Cross Functional Team</i> Triwulan ke-3 8. Pelaporan Likuiditas pada APOLO
MOM.0048/BOD/XII/2020	08-Des-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi November 2020 2. Pengkinian <i>DOLFIN Project</i>
MOM.0049/BOD/XI/2020	15-Des-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkinian SOX 2. Laporan Pengkinian <i>Treasury</i> 3. <i>Market Code of Conduct</i> 4. Revisi Rencana Aksi APU/PPT & <i>Exceptional Handling</i>

Pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi telah ditetapkan jadwal dan agenda rapat. Bahan rapat serta risalah rapat telah didistribusikan kepada para peserta rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.

Dewan Komisaris mengadakan pertemuan secara berkala dengan Direksi sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang efektif terhadap aspek-aspek strategis, keuangan, operasi, sistem pengendalian internal, kepatuhan, manajemen risiko dan tata kelola.

Rapat dihadiri baik secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi oleh para anggota Dewan Komisaris. Selama tahun 2020, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi telah dilakukan sebanyak 7 kali.

Pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Selama tahun 2020, tidak terdapat *dissenting opinion* dalam keputusan rapat yang diselenggarakan.

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

No Registrasi MoM	Tanggal	Agenda
MOM.0001/BOC-BOD/BOD/II/2020	30-Jan-20	<ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Penilaian TataKelola untuk posisi Desember 2019 2) Laporan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi untuk posisi semester ke-2 tahun 2019 3) Laporan Kinerja Keuangan untuk tahun 2019 4) Profil Risiko Bank untuk posisi kuarta ke-4 tahun 2019 & Laporan <i>Anti-Fraud Management</i> 5) Laporan Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang Bank untuk posisi kuartal 4 tahun 2019
MOM.0002/BOC-BOD/III/2020	31-Mar-20	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengkinian Penanganan COVID-19
MOM.0003/BOC-BOD/IV/2020	16-Apr-20	<ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Kinerja Keuangan untuk periode bulan Maret tahun 2020 2) Laporan Pengkinian COVID-19 3) Laporan <i>Fraud Risk Management</i> untuk posisi kuartal ke-1 tahun 2020
MOM.0004/BOC-BOD/VI/2020	24-Jun-20	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persetujuan Dewan Komisaris untuk Revisi Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2020 2) Laporan Pengkinian untuk Strategi CASA 3) Tindak Lanjut Manajemen terhadap temuan audit yang melewati batas waktu
MOM.0005/BOC-BOD/VII/2020	30-Jul-20	<ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan <i>Self-Assessment</i> Tata Kelola untuk posisi Juni 2020 2) Laporan Profil Risiko Konglomerasi Keuangan Terintegrasi dan Rasio Kecukupan Modal Tahun 2019 3) Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi Bulan Juni Tahun 2020 4) Laporan Profil Risiko posisi Maret 2020, Tingkat Kesehatan Bank tahun 2019 & Laporan ICAAP dan Laporan <i>anti-fraud management</i> 5) Laporan Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang Bank untuk posisi kuartal ke-2 tahun 2020
MOM.0006/BOC-BOD/XI/2020	04-Nov-20	<ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Kinerja Keuangan untuk periode bulan September Tahun 2020 2) Laporan Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang untuk posisi Kuartal ke-3 Tahun 2020
MOM.0007/BOC-BOD/XI/2020	23-Nov-20	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2021-2023 untuk Persetujuan Dewan Komisaris 2) Pembahasan Strategi Bisnis SME 3) Laporan Profil Risiko BTPN untuk posisi Q3-2020 4) Laporan Penanganan COVID-19 BTPN 5) Pengembangan Talenta dan Kerangka Desain Remunerasi Direksi 6) Pemantauan Rekomendasi dari Komite Dewan Komisaris



HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

DEWAN KOMISARIS

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan		
		Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali
Chow Ying Hoong	Komisaris Utama	-	-	-	-	-	-
Takeshi Kimoto	Komisaris	-	-	-	-	-	-
Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris (Independen)	-	-	-	-	-	-
Irwan Mahjudin Habsjah	Komisaris (Independen)	-	-	-	-	-	-
Edmund Tondobala	Komisaris (Independen)	-	-	-	-	-	-

DIREKSI

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan		
		Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali
Ongki Wanadjati Dana	Direktur Utama	-	-	-	-	-	-
Darmadi Sutanto	Wakil Direktur Utama	-	-	-	-	-	-
Kazuhisa Miyagawa*	Wakil Direktur Utama	-	-	-	-	-	-
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan	-	-	-	-	-	-
Yasuhiro Daikoku	Direktur	-	-	-	-	-	-
Henoch Munandar	Direktur	-	-	-	-	-	-
Adrianus Dani Prabawa	Direktur	-	-	-	-	-	-
Hiromichi Kubo	Direktur	-	-	-	-	-	-
Merisa Darwis	Direktur	-	-	-	-	-	-
Hanna Tantani	Direktur	-	-	-	-	-	-

*) Kazuhisa Miyagawa efektif mengundurkan diri sejak tanggal 18 November 2020 dan digantikan oleh Kaoru Furuya yang efektif menjabat sejak 4 Januari 2021 setelah memperoleh izin kerja secara lengkap dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Hingga akhir tahun buku 2020, Dewan Komisaris memiliki empat komite di bawahnya, yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Setiap komite bertanggung jawab untuk melakukan kajian dan pengawasan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja masing-masing komite.

KOMITE AUDIT

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan internal dan eksternal serta pelaksanaan kepatuhan Bank.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit di Bank didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
5. Dasar hukum yang digunakan terkait dengan pembentukan Komite Audit adalah Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance Manual*) No. K.008/DIR/CCS/05/2019.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Komite Audit telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang menjadi panduan dalam pelaksanaan tugasnya. Pedoman tersebut, antara lain mengatur tentang: organisasi, keanggotaan, independensi, tugas dan tanggung jawab, wewenang, etika kerja, rapat, tanggung jawab pelaporan serta masa tugas.

Pedoman kerja tersebut dikaji secara berkala untuk memastikan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan bisnis Bank. Kajian terakhir disetujui oleh anggota Komite Audit pada tanggal 2 Oktober 2020.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab yang menjadi beban Komite Audit di lingkungan Bank, dirinci sebagai berikut:

1. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
2. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya, dan meyakinkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
3. Menganalisis ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank termasuk memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan.
4. Menganalisis rencana kerja dan pelaksanaan pemeriksaan oleh Internal Audit.
5. Menganalisis independensi dan objektivitas Kantor Akuntan Publik ("KAP") serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP Publik dengan standar audit yang berlaku.
6. Menganalisis kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.
7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Internal Audit, KAP, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
8. Melaporkan secara berkala hasil rapat dan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris

Independensi Komite Audit

Mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit, anggota Komite sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota independen, yang terdiri dari Komisaris Independen dan pihak independen atau paling kurang terdiri dari:

1. Seorang Komisaris Independen
2. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi
3. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.



Susunan Anggota Komite Audit

Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukan
Ninik Herlani Masli Ridhwan Komisaris Independen	Ketua	1 Februari 2019
Edmund Tondobala Komisaris Independen	Anggota	18 November 2020
Kanaka Puradiredja Pihak Independen	Anggota	1 Februari 2019
Ivan Purnama Sanoesi Pihak Independen	Anggota	1 Februari 2019

Masa Jabatan

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris, yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Sirkuler No. PS/BOC/055/XII/2020.

Profil Anggota Komite Audit

Profil lengkap telah disajikan pada bab “Profil Dewan Komisaris & Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat Komite Audit

Ketentuan terkait dengan rapat Komite Audit yang telah ditetapkan di lingkungan Bank adalah sebagai berikut:

- Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% dari seluruh anggota.
- Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Nama Anggota Komite Audit	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Ninik Herlani Masli Ridhwan	29	29	100%
Edmund Tondobala	1	1	100%
Kanaka Puradiredja	29	29	100%
Ivan Purnama Sanoesi	29	29	100%

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, kegiatan yang telah direalisasikan oleh Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Laporan Keuangan
 - Membahas dan melakukan evaluasi laporan keuangan Bank 2019
 - Memantau dan mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan
 - Memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan Bank secara berkala dan melakukan penelaahan atas informasi keuangan lainnya.
- Audit Eksternal
 - Membahas hasil audit laporan keuangan Bank tahun 2019
 - Membahas rencana audit eksternal tahun 2020, pendekatan audit, dan metodologi.
 - Memberikan rekomendasi penunjukan auditor eksternal.
 - Melakukan penelaahan dan penilaian atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal.
 - Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan public dengan standard audit.

3. Internal Audit

- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Internal Audit selama tahun 2019 dan 2020
- Melakukan penelaahan atas efektivitas pelaksanaan pemeriksaan Internal Audit
- Meninjau laporan audit serta memantau pelaksanaan komitmen tindak lanjut temuan Internal Audit.
- Melakukan kajian, menyetujui dan memberikan rekomendasi persetujuan kepada Dewan Komisaris atas Rencana Audit tahun 2020.

4. Kepatuhan, Legal dan Litigasi, dan Internal Fraud

- Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank
- Memantau penerapan kepatuhan Bank dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU & PPT).
- Memantau tindak lanjut hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

- Memantau dan melakukan penelaahan atas kasus Legal dan Litigasi Perseroan.
- Memantau kasus internal *fraud* dan melakukan evaluasi program penanggulangan *fraud* dan pengendalian internal Bank.
- Menelaah pengaduan yang masuk melalui saluran *whistleblowing* serta memantau pelaksanaan tindak lanjut penanganannya.

Rencana Kerja Komite Audit

Menyusun rencana dan program kerja Komite Audit tahun 2021 serta melakukan kajian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.

Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Komite Audit telah melakukan evaluasi dan memastikan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Bank dinilai sudah berjalan efektif dan memadai mencakup pengendalian keuangan, operasional, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Nama Peserta dan Jabatan	Jenis Pelatihan	Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
Kanaka Puradiredja	• <i>Workshop CACP Batch 14</i>	11 Agustus 2020, online	Ikatan Komite Audit Indonesia Ikatan Komite Audit Indonesia Ikatan Komite Audit Indonesia Ikatan Komite Audit Indonesia Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia
	• <i>Workshop CACP Batch 15</i>	22 September 2020, online	
	• <i>Workshop CACP Batch 16</i>	22 Oktober 2020,online	
	• <i>Workshop CACP Batch 17</i>	16 November 2020, online	
	• <i>Workshop CACP Batch 18</i>	15 Desember 2020, online	
	• Diskusi Panel “Empowering Board Leadership in Cyber Security: Your Cyber Decision Matters”	27 Februari 2020, Financial Club, Jakarta	
	• Diskusi <i>Online</i> “Peran dan Tanggung Jawab Komisaris Independen”	24 April 2020, online	
	• Diskusi <i>Online</i> “Peranan Komisaris Independen dalam Transformasi Perusahaan menuju New Normal”	24 Juni 2020, online	
Ivan Purnama Sanoesi	• Narasumber Modul “Board Function and Obligation” Inhouse Training PT. Aneka Tambang	5 Agustus 2020, online	Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia
	• Diskusi <i>Online</i> “Regulasi dan Peran Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) Terkait Tingkat Kesehatan Bank”	12 Agustus 2020, online	
	• Diskusi <i>Online</i> “Pailit di Masa Pandemi: Strategi Direksi dan Dewan Komisaris”	21 Oktober 2020, online	
	• Artificial Intelligence Auditing Framework	12 Oktober 2020	
	• The Role of Internal Auditor In Building Business Resilience	20 November 2020	The Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA-Indonesia) IIA-Indonesia IIA-Indonesia, IRMAPA (Indonesia Risk Management Profesional Association), IKAI (Indonesian Institute of Audit Committee) IIA-Indonesia
	• Three Lines Sebagai Katalisator Pemulihan Bisnis Era Normal Baru	25 Juni 2020	
	• From Data to Insight : Sharing Experience Generating From Data Analytics and Visual Storytelling	13 Juli 2020	



KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan terkait dengan pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance Manual*) No. K.008/DIR/CCS/06/2020.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Bank BTPN telah memiliki pedoman dan tata tertib Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan pada 1 Februari 2019 dan telah dikaji ulang pada tanggal 13 Maret 2020. Dalam dokumen tersebut, diatur tentang Organisasi, Syarat Keanggotaan, Independensi, Tugas dan Tanggung Jawab, Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, Kebijakan Penilaian Diri Sendiri (*Self Assessment*) untuk Direksi dan Dewan Komisaris, Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi, Etika Kerja, Rapat, Risalah Rapat, Tanggung Jawab Pelaporan, dan Masa Tugas.

Tugas dan Tanggung Jawab

Rincian tugas dan tanggung jawab Komite adalah:

Terkait dengan kebijakan remunerasi

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi, struktur remunerasi dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

- Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

Terkait dengan kebijakan nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Menyusun dan memberi rekomendasi mengenai kriteria serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komposisi, kualifikasi dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah sesuai dengan ketentuan OJK. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen dengan anggota satu orang Komisaris Independen, dua orang Komisaris dan satu orang Pejabat Eksekutif yang memiliki pengetahuan sistem remunerasi dan nominasi serta succession plan. Komposisi anggota komite yang telah berjalan di Bank dalam rangka mendukung prinsip independensi dalam melaksanakan tugas.

Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukan
Ninik Herlani Masli Ridhwan	Ketua (Komisaris Independen)	1 Maret 2020
Chow Ying Hoong	Anggota (Komisaris Utama)	1 Februari 2019
Mira Fitria Soejiptoto	Anggota (Pejabat Eksekutif/Head of Human Capital)	1 Juli 2020

Masa Jabatan

Anggota Komite Remunerasi & Nominasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris, yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK.002/DIR/CCS/VII/2020.

Profil Anggota Komite Remunerasi & Nominasi

Profil lengkap telah disajikan pada bab “Profil Dewan Komisaris & Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Mira Fitria	Anggota Komite Remunerasi & Nominasi
Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	43
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> The London School of Economics and Political Science (LSE), UK. Post Graduate Reseach, Organisational Psychology (2004-2006) Lancaster University, UK. Master of Arts (MA) in Organisational Analysis and Behaviour (2000 - 2001) University of Indonesia, Bachelor of Arts (BA), Psychology (1996 - 2000)
Dasar Penunjukan	1 July 2020
Rangkap Jabatan	-
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Head of Human Capital, PT Bank BTPN Tbk (2020-Present) VP of Human Resources, Danone Waters Indonesia (2019-2020) CHRO - Corporate Affairs & Sustainability, Human Resources, Technology, and Strategy Management, The Body Shop Indonesia (2017-2019) Microsoft Indonesia: <ul style="list-style-type: none"> Human Resources Director (2014-2016) Senior HR Business Partner (2013-2014) CITI Indonesia <ul style="list-style-type: none"> HR Generalist for Retail Bank, Consumer Finance, Risk Management and Financial Control (2008-2013) Leadership, Talent and Performance Management Head (2006-2008) Regional Management Associate: Consumer Bank Training & Development Manager, Citibank Asia Pacific Consumer Bank, Singapore (2003-2004) Citibank Indonesia <ul style="list-style-type: none"> Investment, Treasury and Insurance Compliance Manager (2002-2003) Management Associate (2001-2002)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali

Kebijakan Rapat

Ketentuan terkait dengan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah ditetapkan di lingkungan Bank adalah sebagai berikut:

- Komite Remunerasi Nominasi mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan 3 kali pertemuan.

Nama Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Ninik Herlani Masli Ridhwan, Komisaris Independen	3	3	100%
Chow Ying Hoong, Komisaris	3	3	100%
Mira Fitria, Pejabat Eksekutif	2	2	100%
Pratomo Soedarsono*, Pejabat Eksekutif	1	1	100%
Aloysius Wilhelmus*, Pejabat Eksekutif	-	-	-

* Per 27 Mei 2020 Pratomo Soedarsono digantikan oleh Aloysius Wilhelmus kemudian 1 Juli 2020 digantikan oleh Mira Fitria



Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, kegiatan yang telah direalisasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Tanggal	Agenda
13 Maret 2020	<ol style="list-style-type: none"> Masalah Tata Kelola Evaluasi Kinerja Direksi Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris Rekomendasi Remunerasi Anggota Dewan Komisaris & Direksi RNC Self Review & RNC Charter Rencana Kerja RNC Tahun 2020
24 Juli 2020	<ol style="list-style-type: none"> Wawancara Calon Anggota Direksi - Furuya Kaoru (FK) Keputusan Rekomendasi Furuya Kaoru
23 November 2020	<ol style="list-style-type: none"> Wawancara Calon Anggota Direksi – Kan Funakoshi (“KF”) Keputusan Rekomendasi Kan Funakoshi

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Nama Peserta dan Jabatan	Jenis Pelatihan	Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
Mira Fitria - Anggota	Refresher SMR LEVEL 1	1 September 2020 Virtual	BTPN
Mira Fitria - Anggota	HC Sharing Learning Agility	13 Oktober 2020 Virtual	BTPN
Mira Fitria - Anggota	Insight Discovery Profile & Workshop	16 Oktober 2020 Virtual	BTPN & TalentBox Indonesia
Mira Fitria - Anggota	Operational Risk Management	24 November 2020 Virtual	BTPN
Mira Fitria - Anggota	Ethics, Integrity & Conduct Risk	30 November 2020 Virtual	BTPN
Mira Fitria - Anggota	Entertainment & Gift 2020	1 Desember 2020 Virtual	BTPN
Mira Fitria - Member	Leadership Series : COVID-19 : Opportunities for MSMEs and Digitization of Financial Services	10 Desember 2020 Virtual	BTPN & Microsave Consulting

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan terkait dengan pembentukan Komite Pemantau Risiko adalah:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
3. Dasar hukum yang digunakan terkait dengan pembentukan Komite Pemantau Risiko adalah Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance Manual*) No. K.008/DIR/ CCS/06/2020 tanggal 1 Juli 2021.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko memiliki *board charter* sebagai Pedoman dan Tata Tertib Kerja, yang mengatur antara lain: organisasi, keanggotaan, independensi, tugas dan tanggung jawab, wewenang, etika kerja, rapat, tanggung jawab pelaporan, serta masa tugas.

Pedoman kerja tersebut dikaji secara berkala untuk memastikan cakupan kerja Komite Pemantau Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan bisnis Bank. Kajian terakhir disetujui oleh anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 2 Oktober 2020.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan terkait pengelolaan risiko Bank.

1. Membuat rencana kegiatan tahunan Komite yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
2. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
3. Melakukan evaluasi terhadap *risk appetite* dan batasan yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
4. Menganalisa efektivitas fungsi unit kerja manajemen risiko dan Komite Manajemen Risiko.
5. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
7. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Bank sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
8. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Direksi sekurang-kurangnya secara triwulan

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komposisi, kualifikasi dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen dengan anggota satu orang Komisaris, dan dua orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan bidang Keuangan.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukan
Irwan Mahjudin Habsjah Komisaris Independen	Ketua	11 September 2019
Takeshi Kimoto Komisaris	Anggota	1 Februari 2019
Kanaka Puradiredja Pihak Independen	Anggota	1 Februari 2019 s/d 17 November 2020
Sofyan Rambey Pihak Independen	Anggota	1 Februari 2019
Yosef Antonius Boliona Badilangoe Pihak Independen	Anggota	18 November 2020



Masa Jabatan

Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris, yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Sirkuler No. PS/BOC/055/XII/2020 tanggal 18 November 2020.

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil lengkap telah disajikan pada bab “Profil Dewan Komisaris & Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Rapat

Kebijakan rapat yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% dari seluruh anggota.
3. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
4. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2020, Komite Pemantau Risiko mengadakan 12 kali pertemuan.

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Irwan Mahjudin Habsjah	12	12	100%
Takeshi Kimoto	12	12	100%
Sofyan Rambey	12	12	100%
Kanaka Puradiredja	12	12	100%
Yosef Antonius Boliona Badilangoe	1	1	100%

Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2020

Pelaksanaan kegiatan yang telah direalisasikan sepanjang tahun 2020 adalah:

- Melakukan evaluasi dan analisis terhadap profil risiko Bank (individual dan konsolidasi) secara triwulanan.
- Melakukan monitor profil risiko terintegrasi PT Bank BTPN Tbk sebagai entitas utama dan Laporan Kecukupan Modal terintegrasi PT Bank BTPN Tbk sebagai entitas utama secara berkala.
- Evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar dan likuiditas, rencana aksi serta risiko lainnya.
- Pemantauan dan evaluasi terhadap tugas Komite Manajemen Risiko dan unit Manajemen Risiko terkait penetapan dan pengelolaan risiko kredit untuk masing-masing unit bisnis, risiko pasar dan likuiditas dan risiko operasional.
- Melakukan monitor terhadap tingkat kesehatan bank *Risk Based Bank Rating* (RBBR) dan kepatuhan Bank secara berkala.
- Pemantauan kasus-kasus internal dan eksternal *fraud* dan strategi penanganan *fraud* serta pengendalian internal Bank.
- Melakukan dua kali kunjungan kantor cabang secara virtual yaitu ke kantor cabang Palembang dan Surabaya.
- Menyusun rencana dan program kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2020 serta melakukan kajian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Nama Peserta dan Jabatan	Jenis Pelatihan	Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
Yosef A.B. Badilangoe	• Business Disruption	2020 Online Seminar	Business Consultant
	• HR development during pandemic	2020 Online Seminar	HR Consultant

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dasar Hukum

Dasar hukum Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
3. PBI nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SEBI nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 28/POJK.03/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah.

6. Dasar hukum yang digunakan terkait dengan pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance Manual*) No. K.008/DIR/CCS/06/2020

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Bank BTPN telah memiliki *Board Charter* yang mengatur tentang Pedoman dan Tata tertib Komite Tata Kelola Terintegrasi. Pedoman tersebut ditetapkan pada 1 Februari 2019 dan telah dikaji berkala pada 30 Juni 2020 yang berisi: Dasar Hukum, Tujuan, Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab, dan Prosedur.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Sinergi Perbankan.

Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukan
Irwan Mahjudin Habsjah Komisaris Independen	Ketua	11 September 2019
Ninik Herlani Masli Ridhwan Komisaris Independen	Anggota	1 Februari 2019 s/d 18 November 2020
Edmund Tondobala Komisaris Independen	Anggota	18 November 2020
Dewie Pelitawati Komisaris Independen - PT Bank BTPN Syariah Tbk	Anggota	1 Februari 2019
Muhammad Faiz Dewan Pengawas Syariah - PT Bank BTPN Syariah Tbk	Anggota	1 Februari 2019
Yosef Antonius Boliona Badilangoe Pihak Independen	Anggota	1 Februari 2019



Masa Jabatan

Ketetapan tentang masa tugas atau masa jabatan adalah sebagai berikut:

1. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa tugas sebagai anggota Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan Grup SMBC dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
2. Apabila Ketua dan/atau anggota Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Independen atau terdapat penggantian dari anggota Konglomerasi Keuangan Grup SMBC, maka masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan Grup SMBC tersebut segera menunjuk penggantinya.

Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Profil lengkap telah disajikan pada bab “Profil Dewan Komisaris & Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Rapat

Kebijakan rapat yang telah diatur dalam pedoman dan tata tertib Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah:

1. Komite mengadakan rapat paling sedikit sekali dalam setiap semester.
2. Undangan Rapat disampaikan dengan surat tercatat atau surat elektronik selambatnya pada tujuh (7) hari sebelum tanggal Rapat. Undangan tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan agenda Rapat. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat yang akan disampaikan pada peserta rapat Komite paling lambat dua Undangan disampaikan dua (2) hari sebelum Rapat.

3. Anggota Komite dapat mengundang pihak selain anggota Komite yang berasal dari Konglomerasi Keuangan grup SMBC, yang terlibat atau bertanggung jawab atas topik dari agenda Rapat apabila diperlukan.
4. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri baik secara langsung maupun melalui kuasa kepada anggota Komite lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komite termasuk Ketua Komite.
5. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal jabatan Ketua Komite lowong, maka komisaris independen dari Entitas Utama dapat untuk sementara menggantikan kedudukan ketua komite sebagai pimpinan Rapat.
6. Rapat Komite dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi atau media elektronik lain yang memungkinkan semua peserta Rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat. Anggota Komite yang berpartisipasi dalam Rapat melalui media dan dengan cara tersebut di atas dianggap turut hadir dalam Rapat dan dihitung dalam perhitungan kuorum kehadiran maupun keputusan Rapat.
7. Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua anggota Komite menyetujui keputusan tersebut secara tertulis dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sepanjang tahun 2020, Komite Tata Kelola Terintegrasi mengadakan 3 (tiga) kali pertemuan. Berikut adalah rinciannya:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Irwan Mahjudin Habsjah	3	3	100%
Ninik Hertani Masli Ridhwan	3	3	100%
Edmund Tondobala*	0	0	100%
Dewie Pelitawati	3	3	100%
Muhammad Faiz	3	2	67%
Yosef Antonius Boliona Badilangoe	3	3	100%

* Tidak ada pertemuan komite yang diselenggarakan sejak pengangkatan yang bersangkutan s/d 31 Desember 2020

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Nama Peserta dan Jabatan	Jenis Pelatihan	Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
Dewie Pelitawati	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi Online “Regulasi dan Peran Dewan Komisaris dan Direksi Terkait Tingkat Kesehatan Bank yang diikuti oleh Dewan Komisaris di Jakarta; Refreshment Risk Awareness yang diikuti oleh Dewan Komisaris di Jakarta; 	12 Agustus 2020 (online) 8 Oktober 2020 (online)	Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI) BTPN Syariah
Muhamad Faiz	Webinar Workshop Pra-Ijtima’ Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah bidang Perbankan Syariah	12-13 Oktober 2020 (online)	DSN-MUI
Yosef A.B. Badilangoe	<ul style="list-style-type: none"> Business Disruption HR Development during Pandemic 	2020 Online Seminar 2020 Online Seminar	Business Consultant HR Consultant

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Bank BTPN membentuk komite-komite yang bertanggung jawab kepada Direksi. Sesuai dengan ketentuan, Bank diwajibkan memiliki minimal 3 (tiga) komite yang membantu tugas Direksi yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite Aset dan Liabilitas dan Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Melihat kompleksitas usaha yang dijalankan BTPN, membutuhkan pengelolaan serta peningkatan kualitas penerapan tata kelola Perusahaan yang baik. Untuk itu, BTPN membentuk 8 (delapan) komite sebagai berikut:

1. Komite Aset dan Liabilitas
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Pengarah Teknologi Informasi
4. Komite Kebijakan Kredit
5. Komite Kredit
6. Komite Pengarah Tata Kelola Informasi
7. Komite Human Capital
8. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

KOMITE ASET DAN LIABILITAS (ALCO)

Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Anggota Tetap

- Ketua: Direktur Treasury
- Anggota:
 1. Direktur Utama
 2. Wakil Direktur Utama 1
 3. Wakil Direktur Utama 2
 4. Direktur Manajemen Risiko
 5. Direktur Keuangan
- Sekretaris: Deputy Head of Treasury

Pedoman Kerja

Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) telah mempunyai pedoman kerja yang telah diperbaharui pada tanggal 1 Juli 2020. Pedoman kerja tersebut memuat antara lain:

1. Memantau dan mengelola aset dan liabilities
2. Memantau perkembangan pasar dan faktor-faktor yang mungkin akan mempengaruhi keadaan pendanaan dan likuiditas bank.
3. Memantau eksposur risiko bank seperti risiko suku bunga dan nilai tukar
4. Memutuskan dan memberikan arahan dalam pengelolaan suku bunga baik suku bunga *funding* maupun *lending*
5. Dan hal-hal terkait lainnya

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Mengkaji ulang, mengawasi dan menyetujui strategi neraca secara keseluruhan, atas likuiditas, harga, dan manajemen permodalan.
2. Memberikan gambaran keadaan perekonomian domestik dan dunia, serta analisis implikasi dan kebijakan moneter dan fiskal yang telah dan atau akan diambil oleh pemerintah.

Pelaksanaan Tugas 2020

Pada tahun 2020, Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) menyelenggarakan 14 kali pertemuan dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

- Menyetujui pembatalan fasilitas pinjaman IFC
- Menyetujui proyeksi perhitungan IRRBB
- Menyetujui inisiatif CASA untuk nasabah khusus
- Menyetujui kenaikan eksposur Obligasi AFS sesuai yang diusulkan oleh Tresuri.



- Menyetujui perubahan SOP tentang prosedur persetujuan pembelian obligasi negara dan pergantian portofolio yang disampaikan Tresuri.
- Menyetujui batasan baru Tresuri pada sesuai yang disampaikan MLRM
- Menyetujui proposal dari Corporate Planning & Treasury mengenai tambahan batas Pinjaman Luar Negeri Jangka Panjang dari SMBC Singapura
- Menyetujui kenaikan limit BPV IDR untuk rentang waktu 5-10 tahun.
- Menyetujui proposal dari Corporate Planning & Treasury mengenai penyesuaian FTP & pendapatan modal pada perubahan kedua RBB tahun 2020.
- Menyetujui proposal Memanfaatkan Fasilitas Pinjaman USD dari SMBC Singapura dengan pemicu internal NSFR
- Menyetujui perubahan batasan dari *Supplementary Liquidity*.
- Menyetujui pengalihan penempatan dari FASBI ke Obligasi Pemerintah.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2020, Komite ALCO mengadakan 14 kali pertemuan, yang rincian kehadiran anggotanya adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Ongki Wanadjadi Dana	Anggota	14	100%
Kazuhiya Miyagawa	Anggota	12	86%
Hikomichi Kubo	Ketua	13	93%
Darmadi Sutanto	Anggota	14	100%
Hanna Tantani	Anggota	14	100%
Henoch Munandar	Anggota	13	93%
Wiwig Santoso	Anggota	14	100%

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Manajemen Risiko per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Keanggotaan komite bersifat *ex officio* (berdasarkan jabatan) yang terdiri dari:

Ketua: Direktur Manajemen Riisiko

Anggota

Anggota Tetap dengan Hak Suara:

1. Direktur Utama
2. Wakil Direktur Utama 1
3. Wakil Direktur Utama 2
4. Direktur Kepatuhan & Legal
5. Direktur Corporate Banking Japanese
6. Direktur Wholesale Banking
7. Direktur Treasury
8. Direktur Operasional
9. Direktur Keuangan
10. Head of Business Banking
11. Head of Information Technology
12. Head of Retail Lending Business
13. Head of Wealth Management Business
14. Head of Digital Banking
15. Head of Human Capital
16. Head of Wholesale Banking

Anggota Tetap Tanpa Hak Suara:

1. *Head of Internal Audit*
2. Pejabat Eksekutif Bidang Manajemen Risiko (Sekretaris)

Prosedur Rapat

Pedoman pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Rapat komite dilaksanakan sekurang-kurangnya 8 (delapan) kali dalam setahun sesuai dengan agenda rapat yang telah ditentukan. Bilamana dibutuhkan rapat dapat dilakukan setiap saat atas permintaan salah satu Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*).
2. Rapat dipimpin oleh Ketua. Dalam hal ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota komite yang menjabat sebagai Direktur dan ditunjuk dalam rapat.
3. Bilamana dipandang perlu, komite dapat mengundang pihak lain selain Anggota Komite untuk hadir dalam rapat, termasuk namun tidak terbatas pada Perusahaan Anak.
4. Hak suara hanya dimiliki oleh para Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*).
5. Anggota Tetap Tanpa Hak Suara (*Permanent Non-Voting Members*) tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

6. Rapat hanya dapat dilakukan apabila dihadiri dan/ atau diwakili lebih dari 50% dari seluruh jumlah anggota komite yang memiliki hak suara.
7. Keputusan rapat komite harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 50% bagian dari seluruh jumlah anggota komite yang memiliki hak suara yang hadir dalam rapat.
8. Dalam hal terdapat benturan kepentingan maka pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur dalam kebijakan perusahaan (*Corporate Policy*).
9. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terdapat dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
10. Laporan/materi Komite Manajemen Risiko disiapkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Unit terkait diwajibkan menyampaikan materi/ data setiap bulan kepada pihak yang ditunjuk (PIC) Satuan Kerja Manajemen Risiko selambat-lambatnya 8 hari kerja setelah akhir bulan.
11. Satuan Kerja Manajemen Risiko dapat meminta informasi/data tambahan dari unit lain di Bank untuk dicantumkan ke dalam laporan/materi Komite Manajemen Risiko.
12. Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.
13. Keputusan rapat berupa Risalah Rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat. Risalah Rapat kemudian disirkulasikan kepada anggota komite.
14. Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat dengan melalui media sirkuler komite yang disetujui oleh seluruh Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*). Proses ini dapat dilakukan sepanjang proposal yang diajukan telah disampaikan dalam sirkuler tersebut kepada semua Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*).

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Menyusun kebijakan dan kerangka manajemen risiko serta limit risiko berikut pemutakhiran, perbaikan, dan/atau penyempurnaan.
2. Melakukan evaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya.
3. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas transaksi atau aktivitas, yang menyimpang dari prosedur normal.

Pelaksanaan Tugas 2020

Selama tahun 2020, Komite Manajemen Risiko mengadakan 12 (dua belas) kali rapat. Rapat Komite Manajemen Risiko merupakan sarana anggota komite untuk memantau 8 (delapan) jenis risiko sebagaimana diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko dan Peraturan Bank Indonesia/OJK.

Komite Manajemen Risiko telah membahas dengan detail mengenai berbagai agenda penting, antara lain:

- Pengelolaan risiko kredit Bank, dilihat dari Biaya Kredit Bank (CoC), pemantauan *Credit Risk Appetite Framework* (CRAF), Portofolio Kredit, dan NPL.
- Menginformasikan atas penerapan IFRS 9/PSAK 71 beserta timeline implementasinya.
- Menginformasikan mengenai partisipasi Bank dalam program Relaksasi akibat dampak pandemi COVID-19, dan melakukan *monitoring* portofolio terkait relaksasi dengan menggunakan parameter pemantauan antara lain sebagai berikut:
 - a. Kinerja pasca restrukturisasi
 - b. Pemantauan pencadangan atas pinjaman yang direstruktur dalam rangka relaksasi
- Pengelolaan risiko operasional Bank dilihat dari *Risk Appetite Operasional*, Kerugian Operasional dan *Recovery*, *Key Operational Risk Indicator*, Risiko Operasional yang melekat pada Bank, termasuk *Business Continuity Management* terutama dalam rangka beradaptasi pasca pandemi COVID-19.
- Pengelolaan risiko pasar & likuiditas, Komite Manajemen Risiko membahas sekaligus sebagai bentuk pemantauan manajemen atas rasio-rasio Pasar & Likuiditas beserta status Bank atas rasio tersebut.
- Pengelolaan risiko lainnya, yaitu Risiko Kepatuhan, Risiko Strategis, Risiko Reputasi, dan Risiko Hukum.
- Pengelolaan *fraud management*, yaitu mengenai Jumlah Kasus *Fraud* beserta Kerugian dan *Recovery*, *Channel* Pendeteksian *Fraud*, Tipe *Fraud*, dan Rencana Aksi yang dilakukan *Anti Fraud Management* dalam rangka mitigasi dan pengelolaan *fraud* menyesuaikan dengan POJK 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum. Dilakukan juga pengkinian *Fraud Committee Decree* dan *Investigation – Threshold*.
- Penandatanganan pakta integritas dan deklarasi Anti fraud oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Bank.
- *Review* tahunan atas Rencana Aksi dan *Stress Test*.



Dalam rangka pemantauan risiko dengan anak perusahaan setiap kuartal disampaikan konsolidasi Bank dengan anak perusahaan serta pelaporan konsolidasi Profil Risiko, RBBR, ICAAP, Penilaian Profil Risiko Terintegrasi dan Laporan Modal Minimum Terintegrasi sesuai ketentuan BI/OJK.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2020, Komite Manajemen Risiko telah melakukan 12 kali rapat, yang rincian kehadiran anggotanya adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran	Keterangan
KETUA						
1	Henoch Munandar	Direktur Manajemen Risiko	12	12	100%	
ANGGOTA						
1	Ongki Wanadjati Dana	Direktur Utama	12	11	92%	
2	Kazuhisa Miyagawa	Wakil Direktur Utama 1	12	10	83%	Mengundurkan diri pada bulan November 2020
3	Darmadi Sutanto	Wakil Direktur Utama 2	12	12	100%	
4	Yasuhiro Daikoku	Direktur Corporate Banking Japanese	12	8	67%	
5	Adrianus Dani Prabawa	Direktur Wholesale Banking	12	11	92%	
6	Hikomichi Kubo	Direktur Treasury	12	11	92%	
7	Merisa Darwis	Direktur Operasional	12	12	100%	
8	Dini Herdini	Direktur Kepatuhan & Legal	12	11	92%	
9	Hanna Tantani	Direktur Keuangan	12	12	100%	
10	Vincentius Hidayat	Head of Retail Lending Business	12	11	92%	
11	Helena	Head of Wealth Management Business	12	9	75%	
12	Irwan Sutjipto Tisnabudi	Head of Digital Banking	12	10	83%	
13	Nathan Christianto	Head of Wholesale Banking	12	7	58%	Berlaku efektif per tanggal 1 Maret 2020 menjabat sebagai anggota BOM
14	Pratomo Soedarsono	Head of Human Capital	12	4	33%	Mengundurkan diri pada tanggal 26 Mei 2020
	Mira Fitria	Head of Human Capital	12	6	50%	Efektif per tanggal 1 Juli 2020 menjabat sebagai anggota BOM
15	Steffano Ridwan	Head of Business Banking	12	1	8%	Mengundurkan diri pada tanggal 30 Maret 2020
	Canisius Soriton (Pjs)	Head of Business Banking	12	5	42%	efektif per tanggal 15 Maret 2020 sd 14 September 2020 sebagai Pjs. anggota BOM
	Jeffrey Cheanandro Tjoeng	Head of Business Banking	12	4	33%	Berlaku efektif per tanggal 28 Agustus 2020 menjabat sebagai anggota BOM

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran	Keterangan
	YB Hariantono	Head of Information Technology	12	2	17%	Mengundurkan diri pada tanggal 20 Februari 2020
16	Setiasmo (Pjs)	Head of Information Technology	12	1	8%	efektif per tanggal 20 Februari 2020 menjabat sebagai Pjs. anggota BOM
	Jeny Mustopha	Head of Information Technology	12	4	33%	efektif pada bulan Agustus 2020 menjabat sebagai anggota BOM
ANGGOTA TETAP TANPA HAK SUARA						
1	Nurhajati Soerjo Hadi	Head of Internal Audit	12	12	100%	
2	Sendiaty Sondy	Pejabat Eksekutif Bidang Manajemen Risiko (Sekretaris)	12	12	100%	

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Keanggotaan komite bersifat *ex officio* (berdasarkan jabatan) yang terdiri paling sedikit:

Ketua: Head of Information Technology

Anggota Tetap dengan Hak Suara:

1. Direktur Utama
2. Wakil Direktur Utama 1 dan 2
3. Direktur Manajemen Risiko
4. Direktur Operasional
5. Direktur Corporate Banking Japanese
6. Direktur Wholesale Banking
7. Direktur Treasury
8. Direktur Keuangan
9. Head of Business Banking
10. Head of Retail Lending Business
11. Head of Wealth Management Business
12. Head of Digital Banking

Anggota Tetap tanpa Hak Suara:

1. Head of Internal Audit
2. Pejabat Eksekutif Bidang Teknologi Informasi (Sekretaris)

Pedoman Kerja

Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memiliki pedoman kerja yang telah disahkan Direksi pada tanggal 1 Juli 2020 yang memuat antara lain:

1. Rapat Komite Pengarah TI dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan agenda rapat yang telah ditentukan. Bilamana dibutuhkan, rapat Komite Pengarah TI dapat dilakukan setiap saat atas permintaan salah satu anggota tetap (*permanent voting members*)
2. Rapat dipimpin oleh ketua komite. Dalam hal ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota komite yang menjabat sebagai Direktur dan ditunjuk dalam rapat.
3. Hak suara hanya dimiliki oleh anggota tetap dengan hak suara (*permanent voting members*) atau wakilnya yang hadir dalam rapat.
4. Rapat hanya dapat dilakukan apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari 50% dari seluruh jumlah anggota komite yang memiliki hak suara dengan ketentuan salah satunya adalah ketua komite dan/atau Direktur Utama.
5. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan harus diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan, termasuk ketua komite dan/atau Direktur Utama.
6. Dalam hal terdapat bentuan kepentingan maka pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur dalam kebijakan Perusahaan (*Corporate Policy*)
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terdapat dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.



8. Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
9. Lebih dari 50% rapat komite dihadiri oleh lebih 70% anggota komite secara fisik.
10. Bilamana dipandang perlu, Komite Pengarah TI dapat mengundang pihak lain selain anggota, termasuk Perusahaan Anak untuk hadir dalam rapat.
11. Keputusan rapat berupa risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. Risalah rapat kemudian disirkulasikan kepada anggota komite.
12. Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat dengan melalui media sirkuler komite yang disetujui seluruh anggota tetap (*permanent voting members*). Proses ini dapat dilakukan sepanjang proposal yang diajukan disampaikan dalam sirkuler tersebut kepada semua anggota tetap (*permanent voting members*).

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi setidaknya mencakup, sebagai berikut:

1. Rencana strategis Teknologi Informasi (TI) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
2. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
3. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI.
4. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *service level agreement*.
5. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
6. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
7. Melakukan evaluasi terhadap kinerja dan penggunaan teknologi informasi untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat mendukung dan sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank.
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara.
9. Melakukan evaluasi atas ketersediaan dan kecukupan sumber daya manusia terkait dengan pengoperasian, pemeliharaan dan dukungan atas penggunaan TI.
10. Memberikan masukan atas proses berkaitan dengan risiko TI.

Pelaksanaan Tugas 2020

Sepanjang tahun 2020, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan tugas, yaitu 4 (empat) rapat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada: 17 Maret, 23 Juni, 22 September, dan 8 Desember.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2020, pada 4 (empat) kali rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi, rincian frekuensi kehadiran peserta adalah sebagai berikut:

Anggota Tetap dengan Hak Suara:

Ketua: Direktur Utama

Anggota:

- Wakil Direktur Utama
- Direktur dan Kepala yang membawahi/terkait bidang tugas Kredit
- Direktur yang membawahi bidang tugas Pengelolaan Risiko.
- Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan

Anggota tetap tanpa Hak Suara:

- Kepala Divisi Portfolio Management & Policy
- Kepala Risiko Bisnis (seluruh segmen)
- Kepala Divisi Audit Internal (pengamat)
- Kepala Divisi Kepatuhan
- Kepala Divisi Hukum dan Litigasi (General Counsel)

Pedoman Kerja

Komite Kebijakan Kredit telah memiliki pedoman kerja (*charter*) yang telah disahkan Direksi pada 1 Juli 2020, yang berisi antara lain:

1. Rapat
 - Rapat Komite Kebijakan Perkreditan diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
 - Rapat dipimpin oleh ketua komite. Dalam hal ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota tetap dengan hak suara dan ditunjuk dalam rapat
2. Kuorum
 - Rapat Komite Kebijakan Perkreditan hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 50% anggota tetap dengan hak suara termasuk ketua komite
 - Apabila anggota komite berhalangan hadir, maka kehadiran yang bersangkutan dapat digantikan oleh perwakilannya.

3. Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan pada Komite Kebijakan Perkreditan dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan harus dilakukan berdasarkan suara terbanyak, yaitu suara setuju lebih dari 50% jumlah anggota tetap dengan hak suara yang hadir dalam rapat, termasuk suara setuju ketua komite.
4. Pengambilan Keputusan Tanpa Mengadakan Rapat Formal
Komite Kebijakan Perkreditan dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat komite secara formal (Keputusan Sirkuler Komite), dengan ketentuan semua anggota tetap dengan hak suara menyetujui keputusan tersebut secara tertulis.
 - Hasil pemantauan/tinjauan dan evaluasi mengenai kualitas dan kondisi portofolio kredit.
 - Saran-saran untuk perbaikan kebijakan.
6. Melakukan *review*/penelaahan terhadap kebijakan kredit agar tetap sejalan dengan kebijakan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pelaksanaan Tugas 2020

Komite Kebijakan Kredit telah melakukan rapat pada semester 1 pada bulan pada tanggal 28 Juli 2020 dan semester 2 pada pada tanggal 15 Desember 2020.

Komite Kebijakan Kredit telah melakukan pembahasan secara mendetil atas kebijakan kredit yang berlaku di Bank dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

- Mempemberbaharui Kebijakan Perkreditan berdasarkan pada perubahan ketentuan regulator terkait dengan Kualitas Aktiva, pencadangan berdasarkan PSAK 71 serta beberapa perubahan kebijakan kredit dalam rangka penyesuaian pasca merger serta penyesuaian dengan kebijakan kredit dari group.
- Menyesuaikan kebijakan produk dan layanan yang antara lain mengatur mengenai produk kredit dan pembiayaan yang dikelola oleh bank.

Menginformasikan mengenai penanganan kredit akibat dampak pandemic COVID-19, termasuk mengenai kegiatan Bank dalam rangka ikut serta aktif melakukan relaksasi kepada debitur sebagaimana ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Ketentuan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional akibat dampak pandemi COVID-19.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Komite Kebijakan Kredit adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan rapat untuk menentukan arah kredit bank dan memantau implementasi dari kebijakan kredit
2. Memberikan masukan kepada Direksi Bank dalam penyusunan kebijakan Perkreditan Bank serta melakukan kajian secara berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank
3. Mengawasi penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank
4. Melakukan evaluasi dan analisa kualitas portofolio perkreditan terkait kebijakan perkreditan
5. Memberikan laporan berkala yang sekurang-kurangnya mencakup:
 - Rangkuman dari hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank.



Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Pada tahun 2020, Komite Kebijakan Kredit mengadakan 2 kali, dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Ketua				
Ongki Wanadjati Dana	Direktur Utama	2	2	100%
Anggota				
Darmadi Sutanto	Wakil Direktur Utama	2	2	100 %
Kazuhisa Miyagawa	Wakil Direktur Utama	2	1	50 %
Yasuhiro Daikoku	Direktur Japanese Corporate Banking	2	2	100 %
Dani Prabawa	Direktur Wholesale Banking	2	2	100 %
Husan Mahjudin	Head of Corporate Credit	2	1	50 %
Nathan Christianto	Head of Wholesale Banking	2	2	100 %
Vincentius Hidayat	Head of Retail Lending Business	2	2	100 %
Irwan Sutjipto Tisnabudi	Head of Digital Banking	2	1	50 %
Henoch Munandar	Direktur Manajemen Risiko	2	1	50 %
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan	2	2	100 %
Anggota Tanpa Hak Suara				
Sendiaty Sondy	Head of Portfolio Management & Policy	2	2	100 %
Adil Pamungkas	Head of Retail Risk	2	2	100 %
Sidik Warsito	Head of Credit Risk Business Banking	2	2	100 %
Nurhajati Soerjo Hadi	Head of Internal Audit	2	2	100 %
Butet Sondang Sitepu	Head of Compliance	2	1	50 %
Argo Wibowo	Head of General Counsel	2	0	0 %

KOMITE KREDIT

Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Kredit per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama

Anggota:

- Wakil Direktur Utama
- Direktur Bisnis/Kepala Bisnis
- Kepala Risiko Kredit
- Kepala Departemen Loan
- Kepala Risiko Kredit Bisnis
- Kepala Grup atau Departemen Bisnis
- Direktur Manajemen Risiko (Pengamat)

Pedoman Kerja

Komite Kredit telah memiliki pedoman kerja (*charter*) yang telah disahkan Direksi pada tanggal 1 Juli 2020, yang berisi antara lain:

1. Rapat

Komite Kredit menyelenggarakan Rapat pada saat kapanpun sesuai dengan kebutuhan Komite.

Rapat Komite Kredit diselenggarakan untuk menghasilkan suatu rekomendasi atau opini kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama yang akan memberikan keputusan akhir untuk menyetujui kredit, termasuk kondisi dan instruksi yang berkaitan dengan Persetujuan Kredit.

Pada rekomendasi atau opini Komite Kredit, Direktur/Kepala Bisnis terkait akan turut menandatangani lembar rekomendasi/opini bersama-sama dengan anggota komite lainnya.

Anggota Komite Kredit yang wajib hadir dalam rapat komite akan ditentukan berdasarkan agenda rapat dengan detail sebagai berikut:

2. Kuorum Rapat

Rapat Komite Kredit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% dari peserta rapat yang wajib hadir dan dengan minimum 1 perwakilan dari Credit Department atau Loan Department. Kehadiran pengamat tidak akan dihitung dalam kuorum rapat.

Anggota komite yang bukan merupakan peserta rapat yang wajib hadir, dapat hadir akan tetapi kehadirannya tidak dihitung sebagai kuorum rapat dan suaranya tidak dihitung dalam pengambilan keputusan.

Pengambilan Keputusan Rapat Komite

Pengambilan Keputusan pada Rapat Komite Kredit dilakukan berdasarkan suara terbanyak, yaitu suara setuju minimal 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah total anggota yang hadir dalam rapat sudah termasuk suara Direktur Utama/ Wakil Direktur Utama.

Suara Direktur Manajemen Risiko sebagai pengamat tidak akan dihitung dalam pengambilan keputusan Rapat Komite, namun setiap keputusan Rapat Komite harus diketahui oleh Direktur Manajemen Risiko.

Agenda	Peserta yang Wajib Hadir
1. Kredit terkait segmen Wholesale, Corporate dan Commercial Banking	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama • Direktur yang terkait dengan Wholesale, Corporate dan Commercial Banking • Kepala Risiko Kredit • Kepala Departemen Loan • Kepala Grup atau Departemen terkait Wholesale, Corporate dan Enterprise Banking • Direktur Manajemen Risiko (Pengamat) <p>Catatan: Rapat dipimpin oleh Ketua Komite (Direktur Utama). Dalam hal Ketua Komite tidak hadir maka Wakil Direktur Utama bertindak selaku Ketua Komite.</p>
2. Kredit terkait segmen Business Banking	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama • Direktur/Kepala Business Banking • Kepala Risiko Credit Business Banking • Kepala Risiko Kredit • Direktur Manajemen Risiko (Pengamat) <p>Catatan: Rapat dipimpin oleh Ketua Komite (Direktur Utama). Dalam hal Ketua Komite tidak hadir dalam rapat, maka salah satu anggota Komite dapat ditunjuk sebagai ketua rapat.</p>



Dalam hal pengambilan keputusan dalam Rapat Komite menghasilkan perhitungan jumlah suara setuju yang sama dengan jumlah suara tidak setuju, maka Ketua Komite dapat menentukan keputusan akhir yang akan diambil oleh Komite.

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam rangka membantu tugas dan tanggung jawab Direksi untuk melakukan pengelolaan dan perencanaan kredit, Komite Kredit memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menganalisis secara independen dan menyetujui pemberian kredit sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan (keputusan yang diambil harus bersifat objektif, dilakukan dengan analisa yang hati-hati dan terhindar dari kepentingan pribadi.
2. Memastikan bahwa bisnis yang dilakukan sesuai dengan kebijakan, standar dan praktik manajemen risiko bank.

Pelaksanaan Tugas 2020

Sepanjang tahun 2020, Komite Kredit mengadakan rapat sebanyak 30 kali, yang rincian kehadirannya adalah sebagai berikut:

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Komite Kredit Wholesale, Corporate dan Enterprise Banking

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Ongki Wanajati Dana/ Kazuhisa Miyagawa	Direktur Utama/Wakil Direktur Utama	30	30 kali	100
Dani Prabawa/Yasuhiro Daikoku	Direktur Wholesale/Direktur Korporasi Jepang	30	25 kali	83
Takane Shiomi	Kepala Bisnis Risiko Kredit	30	29 kali	97
1. Nathan Christianto, or 2. Tatsuro Suzuki, or 3. Karinda Rachmana, or 4. Kunihiro Shimizu, or 5. Tsuyoshi Nakayama, or Margareth Susanto	Kepala Grup atau Departemen Wholesale, Corporate atau Commercial Banking terkait	30	30 kali	100
Husan Mahjudin	Kepala Loan Department	30	30 kali	100
Henoch Munandar	Direktur Manajemen Risiko	30	10 kali	33

Komite Kredit Commercial dan Business Banking

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Ongki Wanajati Dana	Direktur Utama			
Darmadi Sutanto/Kazuhisa Miyagawa	Direktur/Kepala Business Banking			
Takane Shiomi	Kepala Risiko Kredit			
Sidik Waskito	Kepala Risiko Kredit Business Banking			
Henoch Munandar	Direktur Manajemen Risiko			
Steffano Ridwan	Head of Business Banking*)			
Jeffrey C. Tjoeng	Head of Business Banking**)			
Canisius Soriton	Pjs Head of Business Banking***)			

Note:

*) Mengundurkan diri pada 30 Maret 2020

***) Efektif 28 Agustus 2020

***) Efektif 15 Maret 2020 – 14 September 2020

Selama tahun 2020 Keputusan kredit dilakukan secara Sirkuler

KOMITE PENGARAH TATA KELOLA INFORMASI

Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Pengarah Tata Kelola Informasi per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Ketua: Head of Information Technology

Anggota Tetap dengan Hak Suara:

1. Direktur Kepatuhan
2. Direktur Manajemen Risiko
3. Direktur Operasional
4. Direktur Keuangan

Anggota Tetap tanpa Hak Suara:

1. Head of Internal Audit
2. Pejabat Eksekutif Bidang Teknologi Informasi Manajemen Data (Sekretaris)

Undangan Tetap (*Standing Invitee*)

1. Direktur Corporate Banking Japanese
2. Direktur Wholesale Banking
3. Direktur Treasury
4. Head of Business Banking
5. Head of Retail Lending Business
6. Head of Wealth Management Business
7. Head of Digital Banking
8. Pejabat Eksekutif Bidang Analytics, Business Planning & Credit Policy

Pedoman Kerja

Komite Pengarah Tata Kelola Teknologi Informasi telah memiliki pedoman kerja yang telah disahkan Direksi pada tanggal 1 Juli 2020 yang memuat antara lain:

1. Rapat Komite Pengarah Tata Kelola Informasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun dengan agenda rapat yang telah ditentukan. Apabila dibutuhkan, rapat Komite Pengarah Tata Kelola Informasi dapat dilakukan setiap saat atas permintaan salah satu anggota tetap (*permanent voting members*)
2. Rapat dipimpin oleh ketua komite. Dalam hal ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota komite yang menjabat sebagai Direktur dan ditunjuk dalam rapat.
3. Hak suara hanya dimiliki oleh anggota tetap dengan hak suara (*permanent voting members*) atau wakilnya yang hadir dalam rapat.
4. Rapat hanya dapat dilakukan apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota komite yang memiliki hak suara dengan ketentuan salah satunya adalah ketua komite dan/atau Direktur Kepatuhan.
5. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan

berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan harus diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan, termasuk ketua komite dan/atau Direktur Kepatuhan.

6. Dalam hal terdapat bentuan kepentingan maka pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur dalam kebijakan Perusahaan (*Corporate Policy*)
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terdapat dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
8. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
9. Apabila dipandang perlu, komite dapat mengundang pihak lain selain anggota, termasuk Perusahaan Anak untuk hadir dalam rapat.
10. Keputusan rapat berupa risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. Risalah rapat kemudian disirkulasikan kepada anggota komite.
11. Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat dengan melalui media sirkuler komite yang disetujui seluruh anggota tetap (*permanent voting members*). Proses ini dapat dilakukan sepanjang proposal yang diajukan disampaikan dalam sirkuler tersebut kepada semua anggota tetap (*permanent voting members*).

Tugas dan Tanggung Jawab

Pedoman yang dimiliki oleh Komite dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu memberikan rekomendasi kepada Direksi paling kurang mencakup, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dan prosedur tata kelola data dan informasi yang utama seperti kebijakan kualitas data dan manajemen risiko terkait data dan informasi Bank, mencakup standar yang hendak dicapai (*target-state*).
2. Perencanaan dan menetapkan skala prioritas proyek-proyek yang dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, serta mencapai standar yang telah ditetapkan.
3. Kesesuaian proyek-proyek yang disetujui dengan rencana tata kelola informasi, kebijakan dan prosedur tata kelola data dan informasi, serta standar yang hendak dicapai.
4. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek tata kelola data dan informasi serta data *analytics* dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati.
5. Kesesuaian tata kelola informasi dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi (TI) guna mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.



6. Pemantauan atas kondisi tata kelola data dan informasi Bank serta upaya peningkatannya, misalnya dengan mendeteksi permasalahan kualitas data dan mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan aset data dan informasi.
7. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait data dan informasi, yang tidak dapat diselesaikan dan dieskalasikan oleh forum tata kelola data dan informasi.
8. Membangun kultur organisasi yang bekerja berbasis data dan informasi (*data driven organization*).

Pelaksanaan Tugas 2020

Sepanjang tahun 2020, Komite Tata Kelola Informasi telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat sesuai yang ditetapkan dalam pedoman kerja. Rapat-rapat ini merupakan realisasi dari pelaksanaan tugas Komite.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2020, pada 4 (empat) kali rapat Komite Pengarah Tata Kelola Teknologi Informasi, rincian frekuensi kehadiran peserta adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Ketua				
Setiasmo (<i>ad interim</i>)	Kepala Teknologi Informasi	2	2	100%
Jeny Mustopha	Kepala Teknologi Informasi (efektif 5 Agustus 2020)	3	3	100%
Anggota Tetap dengan Hak Suara				
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan dan Legal	4	3	75%
Hanna Tantani	Direktur Keuangan	4	3	75%
Henoch Munandar	Direktur Manajemen Risiko	4	4	100%
Merisa Darwis	Direktur Operasional	4	4	100%
Anggota Tetap Tanpa Hak Suaran				
Nurhajati Soerjo Hadi	Kepala Internal Audit	4	3	75%
Hendra Rahardja	Kepala IT Data Management (Sekretaris)	4	4	100%
Undangan Tetap				
Yasuhiro Daikoku	Direktur Corporate Banking Japanese	4	4	100%
Adrianus Dani Prabawa	Direktur Wholesale Banking	4	3	75%
Hirromichi Kubo	Direktur Treasury	4	3	75%
Vincentius Hidajat	Kepala Retail Lending Business	4	4	100%
Helena	Kepala Wealth Management Business	4	4	100%
Irwan Sutjipto Tisnabudi	Kepala Digital Banking	4	4	100%
P. Canisius Soriton, SE (Pjs.)	Kepala Business Banking	4	4	100%
Erliana	Kepala Retail Banking Analytics, Business Planning & Credit Policy	4	3	75%
Nathan Christianto	Kepala Wholesale Banking	3	3	100%

KOMITE HUMAN CAPITAL

Struktur dan Keanggotaan

Keanggotaan Komite bersifat *ex officio* (berdasarkan jabatan) dan terdiri dari:

Ketua: Direktur Utama

Anggota tetap:

1. (para) Wakil Direktur Utama
2. Direktur Keuangan
3. Direktur Operasional
4. Direktur Manajemen Risiko

Sekretaris: Head of Human Capital

Pedoman Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite berpedoman pada ketentuan:

1. Keputusan rapat Komite harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan, termasuk Direktur Utama.
2. Dalam hal terdapat benturan kepentingan maka pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur dalam Kebijakan perusahaan (*Corporate Policy*).
3. Dalam perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terdapat dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2020, Komite Human Capital telah melaksanakan 8 kali rapat, dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Ongki Wanadjati Dana	Direktur Utama	8	8	100%
Kasuhiza Miyagawa*	Wakil Direktur Utama	8	8	100%
Darmadi Sutanto	Wakil Direktur Utama	4	4	100%
Merisa Darwis	Direktur	8	8	100%
Hanna Tantani	Direktur	8	8	100%
Henoch Munandar	Direktur	6	5	83%
Pratomo Soedarsono**	Kepala Human Capital	4	4	100%
Mira Fitria	Kepala Human Capital	4	4	100%

* Mengundurkan diri pada 18 November 2020

** Digantikan oleh Mira Fitria

Tugas dan Tanggung Jawab

Rincian tugas dan tanggung jawab Komite adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kebijakan, strategi dan sasaran dalam bidang Human Capital dan selanjutnya merekomendasikan kepada Direksi untuk ditetapkan sebagai kebijakan yang dimaksud khususnya adalah kebijakan yang sifatnya strategis.
2. Mengevaluasi pelaksanaan program remunerasi Human Capital dan selanjutnya merekomendasikan kepada Direksi untuk disetujui.
3. Menyetujui penyimpangan dari Prosedur atau peraturan Perseroan yang berlaku di bidang Human Capital yang melebihi kewenangan kepala divisi dan/atau Direktur yang membawahi dan atau dengan bidang tugas Human Capital, dengan memperhatikan hierarki kebijakan Perseroan.
4. Menyampaikan rekomendasi kepada Direksi mengenai penunjukan dan penempatan (nominasi) anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Karyawan Perseroan pada Perusahaan Anak (termasuk anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Anak yang menjalankan bisnis Syariah).

Pelaksanaan Tugas 2020

Tahun 2020, Komite Human Capital mengadakan beberapa meeting dan memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai berikut:

1. Operating Model Project
2. Promosi Grade Executive
3. Pay Review 2020
4. Nominasi Anggota *Board of Management*
5. Pemilihan Asuransi Kesehatan Karyawan
6. Promosi Off-Cycle Tahun 2020



KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Struktur dan Keanggotaan

Struktur keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut:

Anggota Tetap

1. Direktur *Integrated Risk Management* dari PT Bank BTPN Tbk (“BTPN”) sebagai Entitas Utama yang juga merangkap sebagai Ketua.
2. Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko atau pihak yang mewakili dan ditunjuk oleh BTPN Syariah
3. Pejabat Eksekutif Dalam Satuan Kerja Manajemen Risiko dari BTPN yang membawahi fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (“SKMRT”)

Anggota Tidak Tetap

Direktur dan Pejabat Eksekutif dari BTPN dan setiap Lembaga Jasa Keuangan (“LJK”) anggota Konglomerasi dan akan diundang disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi

Pedoman Kerja

Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

1. Rapat
 - Komite akan menyelenggarakan rapat minimal satu kali setiap semester, atau lebih cepat jika diperlukan.
 - Komite dapat mengundang Anggota Tidak Tetap dari Komite untuk menghadiri rapat jika diperlukan
 - Rapat Komite akan membahas Laporan Penilaian Profil Risiko Terintegrasi dari Konglomerasi. Selain itu, SKMRT juga akan mengumpulkan agenda rapat tambahan dari anggota Konglomerasi 1 (satu) bulan sebelum rapat Komite Manajemen Risiko dilangsungkan. Agenda ini akan dikirimkan bersamaan dengan undangan rapat komite.
 - Hasil rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi harus dituangkan dalam risalah rapat termasuk perbedaan pendapat yang terjadi, yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Tetap dan didokumentasikan dengan baik. Risalah rapat akan disirkulasikan kepada seluruh Anggota Tetap untuk diketahui.
 - Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat dengan melalui media sirkuler yang disetujui oleh seluruh anggota Komite. Proses ini dapat dilakukan sepanjang proposal yang diajukan telah disampaikan kepada semua anggota komite.

2. Kuorum

- Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi hanya dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Tetap ditambah Chairman.

3. Pengambilan Keputusan

- Pengambilan keputusan pada rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan harus dilakukan berdasarkan suara terbanyak yang dihitung berdasarkan suara dari Anggota Tetap yang menghadiri rapat.

4. Kaji Ulang

- Kaji ulang atas pedoman kerja Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau lebih cepat apabila diperlukan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama mengenai hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko khususnya dalam:

1. Penyusunan dan kaji ulang atas kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
2. Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi antara lain berupa penyempurnaan strategi dan kerangka risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan. Kaji ulang harus dilakukan secara berkala maupun setiap saat apabila dibutuhkan sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang dapat berpengaruh buruk terhadap kecukupan permodalan, profil risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko terintegrasi.
3. Hal-hal lain yang terkait dengan penerapan manajemen risiko terintegrasi yang menjadi perhatian Anggota Komite.

Pelaksanaan Tugas 2020

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah melakukan rapat sebanyak 2 (dua) yaitu pada posisi Semester I 2020 pada 5 Agustus 2020 dan posisi Semester II 2020 pada 10 Februari 2021.

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi melakukan pembahasan mendetil atas:

- Pencapaian keuangan secara konsolidasi – konglomerasi keuangan SMBC,
- Penyampaian laporan profil risiko terintegrasi dan laporan KPMM terintegrasi dari Konglomerasi Keuangan SMBC untuk posisi Juni 2020 dan Desember 2020.
- Menyusun Peraturan dan Tata Tertib Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Membuat jadwal dan Rencana Kerja Tahunan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi tahun 2020.
- Partisipasi Bank dan Perusahaan Anak dalam Program PEN yang dilakukan Pemerintah akibat pandemi COVID-19.
- Menyempurnakan parameter profil risiko terintegrasi dan Bank telah mengakomodir terkait penetapan Kebijakan Sinergi Bank dalam Kebijakan Manajemen Risiko.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2020, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah melaksanakan 2 kali rapat, dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Henoch Munandar	Direktur Manajemen Risiko	2	2	100%
Sendiaty Sondy	Kepala Kebijakan dan Manajemen Portofolio	2	2	100%
Arief Ismail	Direktur Pengawasan Kepatuhan dan Manajemen Risiko	2	2	100%

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

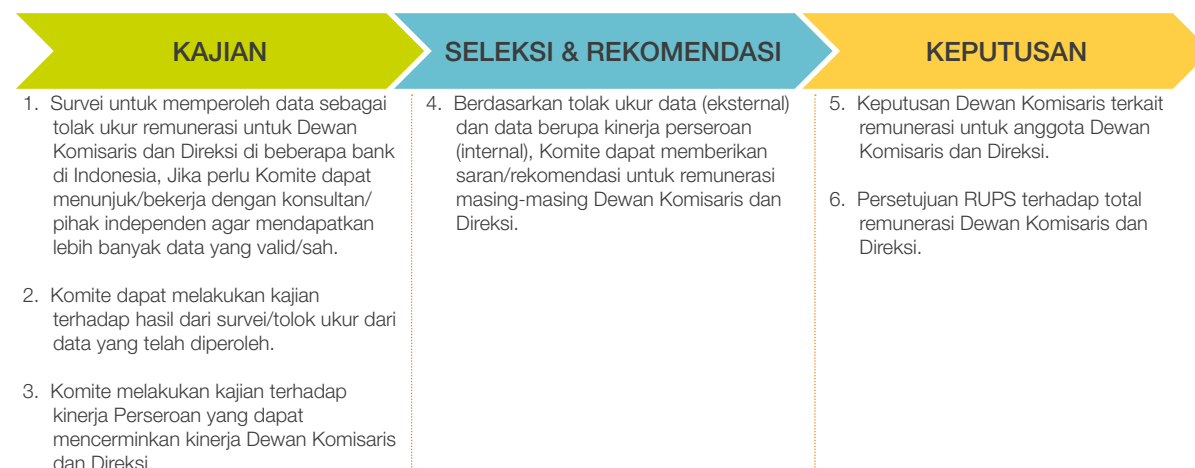
Kebijakan

Penetapan remunerasi dan fasilitas lain kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam RUPS. Penetapan tersebut memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dalam menetapkan remunerasi masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi, Bank mempertimbangkan kinerja secara umum, evaluasi kinerja, kewajaran dengan *peer group* dalam bank dan di industri perbankan, serta kemampuan Perusahaan. Kinerja perusahaan yang merupakan salah satu faktor dalam penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain digambarkan pada harga saham perusahaan di bursa.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Proses penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi di lingkungan Bank, dijelaskan dalam dalam alur di bawah ini.





STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Rupiah Diterima (Kotor) dalam 1 (satu) Tahun	
	Dewan Komisaris	
	Jumlah Penerima per 31 Desember 2020	Rp Juta
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura.*	5	7.511
Fasilitas lain dalam bentuk natura: perumahan, asuransi kesehatan dan sebagainya, yang:		
Dapat dimiliki	5	212
Tidak dapat dimiliki	5	6
Total	5	7.729

Jumlah Remunerasi dan Benefit dalam 1 Tahun	Jumlah Dewan Komisaris
Di atas Rp2 Miliar	1
Di atas Rp1 Miliar - Rp2 Miliar	2
Di atas Rp500 Juta - Rp1 Miliar	0
Di atas Di bawah Rp500 juta	1

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Penerima Remunerasi Bersifat Tetap dan Variabel selama 1 (satu) tahun dan Total Nominalnya.

KATEGORI TETAP

(Rp Juta)

Nama	2020	2019
Direksi	48,374	37,715
Dewan Komisaris	6,611	7,450
Karyawan	1,349,268	1,331,273

KATEGORI VARIABEL

(Rp Juta)

Nama	2020		2019	
	Headcount	Jumlah	Headcount	Jumlah
Direksi*	15	42,129	7	73,550
Dewan Komisaris	1	900	3	3,760
Karyawan Bonus	-	195,230	-	154,050
Karyawan Insentif	-	23,311	-	27,378

* termasuk mantan Direktur

SHARES OPTION DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEJABAT EKSEKUTIF

Nama	2020	2019
Direksi	-	6,300,000
Dewan Komisaris	-	-
Karyawan	-	20,140,000

*) Direksi, Komisaris dan Pejabat Eksekutif BTPN Konvensional

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

(Rp Juta)

Nama	2020
Karyawan Tertinggi - Karyawan Terendah	109,38
Diretur Tertinggi - Direktur Terendah	4,17
Komisaris Tertinggi - Komisaris Terendah	2,7
Direktur Tertnggi - Karyawan Tertinggi	2,02

TOTAL REMUNERASI BERSIFAT VARIABEL DITANGGUHKAN

(Rp Juta)

Nama	2020		2019	
	Headcount	Jumlah	Headcount	Jumlah
Bonus yang ditangguhkan (Gross)	10	9,559,601,564	7	16,350,000,000
MESOP 2015-2020	0	0	204	76,360,000
ESOP 2016-2021	3	195,000	3	198,000

*) Bonus kinerja tahun sebelumnya
 **) Direksi dan Pejabat Eksekutif BTPN Konvensional

Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

Keterkaitan antara kinerja dengan remunerasi dijelaskan sebagai berikut:

1. Bank menganut prinsip *meritocracy* dalam memberikan remunerasi kepada Direksi dan pegawai, baik untuk remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel. Kaji ulang remunerasi individu dilakukan setiap tahun dan penyesuaian remunerasi berdasarkan kinerja individu
2. Dalam Manajemen Kinerja Bank, setiap anggota Direksi dan pegawai memiliki target individu sebagai dasar untuk menilai kinerja individu. Target individu Direksi yang juga merupakan target unit kerja/ direktoratnya, diturunkan dari target bank, dan kemudian secara berjenjang diturunkan menjadi target unit kerja terkecil dan target individu pegawai pada lapisan paling bawah
3. Dalam penilaian Kinerja unit maupun individu, berdasarkan realisasi dari target unit kerja maupun individu. Kinerja unit dalam kategori - Melampaui Target, Mencapai target atau Tidak Mencapai Target. Kinerja unit juga mempengaruhi kinerja pimpinan unit kerja tersebut.

Kinerja individu dinilai berdasarkan realisasi dari target individu, dan dinilai dalam kategori – Istimewa (outstanding); Sangat baik (*very good*); Baik (*Good*);

Perlu perbaikan (*Need Improvement*); Kurang (*Poor*). Besarnya penyesuaian remunerasi berdasarkan penilaian kinerja individu; dimana manajemen memberikan panduan besaran penyesuaian remunerasi tetap maupun *variable* sesuai dengan kinerja individunya

Pemberian *variable income* yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 80% dari *Variable Income* diberikan dalam bentuk *cash*.
2. 20% dari *Variable Income* ditangguhkan (*Deferred Variable Income*) dengan distribusi sebagai berikut:
 - 10% diberikan dalam bentuk *cash*/tunai dan dibayarkan pada tahun pertama setelah 80% *Variable Income* diberikan.
 - 5% diberikan dalam bentuk saham dan diberikan pada tahun kedua setelah 80% *Variable Income* diberikan.
 - 5% diberikan dalam bentuk saham dan diberikan pada tahun ketiga setelah 80% *Variable Income* diberikan.

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material Risk Takers

Jabatan yang termasuk dalam kategori *material risk takers* adalah Direksi sejumlah 10 orang. Jumlah tersebut adalah jumlah *Material Risk Taker* (MRT) selama tahun 2020.



STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Rupiah Diterima (Kotor) dalam 1 Tahun	
	Direksi	
	Jumlah per 31 Desember 2020	Rp Juta
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	9	88.652
Fasilitas lain dalam bentuk natura: perumahan, asuransi kesehatan dan sebagainya, yang:		
Dapat dimiliki	9	5.258
Tidak dapat dimiliki	9	63
Total	9	93.974

Jumlah Remunerasi dan Benefit dalam 1 Tahun	Jumlah Direksi
Di atas Rp2 Miliar	11
Di atas Rp1 Miliar – Rp2 Miliar	3
Di atas Rp500 Juta – Rp1 Miliar	1
Di atas Di bawah Rp500 juta	1

Remunerasi Bersifat Variabel

Remunerasi yang bersifat variabel di lingkungan Bank terdiri dari: Insentif, Bonus Kinerja dan MESOP/ ESOP. Insentif tersebut diberikan berdasarkan kinerja individu pegawai dengan jabatan penjual (*sales*), *service* dan *Collection*. Insentif diberikan bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Bonus kinerja diberikan berdasarkan kinerja perusahaan, kinerja unit kerja terkait dan kinerja individu. Pembayaran direalisasikan pada tahun berikutnya. Bonus kinerja merupakan diskresi manajemen dan diberikan sesuai dengan kinerja dan kondisi keuangan Bank. Bonus kinerja diberikan tahunan kepada pegawai yang tidak menerima insentif, Direksi dan Komisaris.

MESOP/ESOP (*Management and Employee Stock Option Program/Employee Stock Option Program*) merupakan hak opsi untuk membeli sejumlah saham Bank dengan harga tertentu kepada Direksi dan karyawan pada tingkat tertentu. Besaran MESOP/ESOP diberikan kepada Direksi dan karyawan tingkat tertentu sesuai dengan kinerja individu. Kebijakan ini merupakan imbalan atas kinerja dan untuk meningkatkan kinerja/kontribusi individu terhadap kinerja bank di masa mendatang, yang dapat meningkatkan nilai saham bank dan merupakan program retensi.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Profil Sekretaris Perusahaan

Eneng Yulie Andriani menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak tanggal 10 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi No. PS/BOD/001/I/2020 tanggal 10 Januari 2020. Di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Corporate Secretary, yang bersangkutan menyampaikan laporan kegiatan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BTPN.

Memulai karir perbankan sejak tahun 1997 sebagai staf pada Group Legal dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk, sampai dengan tahun 2014 dengan posisi terakhir sebagai Corporate Action & Stakeholder Management Head, Divisi Corporate Sekretariat. Ia kemudian bergabung dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) sebagai Corporate Legal Department Head. Efektif sejak SMBCI melakukan penggabungan usaha (*merger*) dengan PT Bank BTPN Tbk pada tanggal 1 Februari 2019, yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Divisi Corporate Secretary BTPN.

Eneng Yulie Andriani memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1997, dengan fokus ilmu hukum tentang kegiatan perekonomian dan pada tahun 2012 meraih gelar master di bidang ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Eneng Yulie Andriani

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	46 tahun pada tahun buku 2020
Riwayat Pendidikan	1997 - Sarjana Hukum terkait Aktivitas Ekonomi dari Universitas Indonesia 2012 - Magister Hukum dari Universitas Indonesia
Dasar Penunjukan	Keputusan sirkuler Direksi Nomor PS/BOD/001/I/2020 tertanggal 10 Januari 2020
Rangkap Jabatan	Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Corporate Action & Stakeholder Management di Corporate Secretariat Division pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk (1997-2014) • Kepala Departemen Corporate Legal pada PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (2014-2019)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali

Masa Jabatan

Periode jabatan Sekretaris Perusahaan terhitung sejak 10 Januari 2020.

Dasar Acuan

Posisi Sekretaris Perusahaan di Bank BTPN mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan juncto Peraturan Pencatatan Efek PT Bursa Efek Indonesia Nomor 1-A lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01- 2014 tanggal 30 Januari 2014. Bank telah memiliki Sekretaris Perusahaan, yaitu Eneng Yulie Andriani terhitung mulai 10 Januari 2020, yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi No. PS/BOD/001/I/2020 tanggal 10 Januari 2020.

Tugas dan Tanggung Jawab

Rincian tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan di lingkungan Bank adalah sebagai berikut:

1. Menjaga hubungan baik dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Bertanggung jawab untuk memberikan informasi penting yang perlu diketahui publik mengenai kondisi Bank kepada seluruh pemangku kepentingan.
3. Mengikuti perkembangan pasar modal termasuk peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal.
4. Melakukan pemenuhan kewajiban Perseroan sebagai perusahaan terbuka berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.
5. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
6. Bertanggung Jawab dalam penyelenggaraan RUPS.
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

8. Membuat Risalah Rapat Direksi serta menyimpan Risalah Rapat tersebut.
9. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Rangkap Jabatan dan Struktur Organisasi

Fungsi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh pejabat eksekutif yang mengepalai Divisi Corporate Secretary, yang berada di bawah pengawasan/koordinasi Direktur Kepatuhan, dan tidak dirangkap dengan jabatan lain.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Perusahaan membawahi dan menangani fungsi Corporate Governance Assurance, Corporate Action & Stakeholder Management, serta Manajemen Dewan Komisaris dan Direksi.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2020, aktivitas Sekretaris Perusahaan dilakukan dengan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan karena adanya wabah penyebaran COVID-19.

Dengan segala keterbatasan tersebut, Sekretaris Perusahaan telah berhasil menyelesaikan dan melaksanakan tugas atau aktivitas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dan menghadiri rapat-rapat serta membuat notula dari Rapat Direksi, Dewan Komisaris, Rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris serta semua Komite di bawah Dewan Komisaris kecuali Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Menyelenggarakan rapat bulanan bagi pejabat eksekutif (*monthly managers meeting*).
3. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank.
4. Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan atau seminar untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris.



5. Melakukan pengurusan dan pemenuhan persyaratan untuk uji kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Menyiapkan dan menyerahkan laporan-laporan yang disyaratkan oleh ketentuan pasar modal dan perbankan.
7. Menyiapkan dan menyampaikan keterbukaan informasi dengan rincian sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
8. Menyusun kebijakan dan prosedur baru serta melakukan kajian berkala atas kebijakan dan prosedur yang terkait dengan tata kelola perusahaan termasuk Panduan Tata Kelola baik untuk individual maupun terintegrasi, Panduan dan Tata Tertib Kerja (*charter*), serta perubahan Anggaran Dasar Bank.
9. Melakukan kajian dari sisi undang-undang tentang perseroan terbatas, ketentuan pasar modal dan anggaran dasar terhadap suatu rencana Bank sekaligus menyiapkan persetujuan dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, jika diperlukan.
10. Memperkuat wawasan dan pemberian pembekalan dengan menghadiri *training* dan *workshop* terkait baik yang diselenggarakan oleh regulator maupun asosiasi profesi, dengan rincian sebagaimana tersebut di bawah ini.

Keterbukaan Informasi

Sebagai bagian dari tanggung jawab dan kepatuhan Bank sebagai perusahaan terbuka, berikut ini adalah daftar keterbukaan informasi yang disampaikan sepanjang tahun 2020:

Bulan	Tanggal	Nomor Dokumen	Perihal
Januari	17-Jan-20	S.002/CCS/I/2020	Pembayaran Biaya Obligasi
Januari	30-Jan-20	S.006/CCS/I/2020	Penegasan telah Berakhirnya Program MESOP 2015 BTPN
Februari	26-Feb-20	S.012/CCS/II/2020	Pembayaran Biaya Obligasi
Maret	16-Mar-20	S.018/CCS/III/2020	Pembayaran Biaya MTN II ke 11
Maret	24-Mar-20	S.022/CS/III/2020	Kinerja Tahun Buku 2019
Maret	24-Mar-20	S.023/CS/III/2020	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasi Kuartal 4 2019
April	01-Apr-20	S.029/CCS/IV/2020	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS Tahunan 2020
April	20-Apr-20	S.034/CCS/IV/2020	Pembayaran Biaya Obligasi
April	24-Apr-20	S.037/CCS/IV/2020	Penyampaian Bukti Iklan RUPS Tahunan 2020
April	24-Apr-20	S.036/CCS/IV/2020	Laporan Pelaksanaan RUPS Tahunan 2020
Mei	14-Mei-20	S.043/CCS/V/2020	Hasil Pemeringkatan Tahunan
Mei	15-Mei-20	S.045/CCS/V/2020	Perubahan Anggaran Dasar
Mei	15-Mei-20	S.046/CCS/V/2020	Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Mei	18-Mei-20	S.048/CCS/V/2020	Laporan Transaksi Afiliasi
Mei	19-Mei-20	S.052/CCS/V/2020	Siaran Pers yang mengenai Kinerja Kuartal 1 2020
Mei	26-Mei-20	S.055/CCS/V/2020	Pembayaran Bunga Obligasi PUB IV Tahap I Tahun 2019 seri A dan B ke-2
Juni	02-Jun-20	S.058/CCS/VI/2020	Perubahan Susunan Direksi
Juni	15-Jun-20	S.062/CCS/VI/2020	Pembayaran Pokok dan Bunga MTN II ke 12
Juni	15-Jun-20	S.063/CCS/VI/2020	Pengakhiran Tugas Wali Amanat
Juli	03-Jul-20	S.070/CCS/VII/2020	Siaran Pers yang Berjudul: SMBC Group bersama dengan UNICEF membantu masyarakat Indonesia
Juli	20-Jul-20	S.073/CCS/VII/2020	Pembayaran Bunga Obligasi PUB III Tahap II Tahun 2017 seri B ke-11
Juli	29-Jul-20	S.075/CCS/VII/2020	Siaran Pers yang Berjudul: Jenius Luncurkan fitur Jenius QR
Juli	30-Jul-20	S.079/CCS/VII/2020	Siaran Pers yang Berjudul: Laporan Kinerja Q2 PT Bank BTPN Tbk
Agustus	26-Agu-20	S.089/CCS/VIII/2020	Pembayaran Bunga Obligasi PUB IV Tahap 1 Tahun 2019 seri A dan B ke-3
Agustus	28-Agu-20	S.090/CCS/VIII/2020	Siaran Pers mengenai Public Expose 2020
Agustus	28-Agu-20	S.091/CCS/VIII/2020	Siaran Pers mengenai HUT Jenius ke-4
September	14-Sep-20	S.095/CCS/IX/2020	Siaran Pers yang Berjudul: SMBC Group Serahkan Bantuan Penanganan COVID-19 Senilai Rp. 1,3 Miliar kepada PDUI

Bulan	Tanggal	Nomor Dokumen	Perihal
September	17-Sep-20	S.096/CCS/IX/2020	Siaran Pers yang Berjudul: Partner Andalan untuk Bisnis yang Simpel, Cerdas dan Aman
September	28-Sep-20	S.104/CCS/IX/2020	Siaran Pers yang Berjudul: Kolaborasi Jenius dan BNI TapCash Dukung Gerakan Pembayaran Nontunai di Indonesia
Oktober	01-Okt-20	S.108/CCS/X/2020	Siaran Pers yang Berjudul: Edukasi untuk Nasabah pengguna Produk Jenius dalam menjaga Keamanan bertransaksi daring
Oktober	08-Okt-20	S.111/CCS/X/2020	Siaran Pers yang Berjudul: BTPN Wow! inklusif, Schwab Foundation Beri Penghargaan
Oktober	16-Okt-20	S.114/CCS/X/2020	Pengunduran Diri Kazuhisa Miyagawa
Oktober	19-Okt-20	S.115/CCS/X/2020	Pembayaran Pokok dan Bunga Obligasi PUB III Tahap II Tahun 2017 seri B ke-12
Oktober	19-Okt-20	S.116/CCS/X/2020	Pengakhiran Tugas Wali Amanat
Oktober	27-Okt-20	S.121/CCS/X/2020	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPSLB
Oktober Oktober	27-Okt-20	S.123/CCS/X/2020	Siaran Pers yang Berjudul: Bank BTPN Catatkan Pertumbuhan Kredit 6% Akhir Kuartal III-2020
November	02-Nov-20	S.124/CCS/XI/2020	Siaran Pers yang Berjudul: Jenius Co.Creation Week 2020, Ajak Digital Savvy Berteman dengan Perubahan
November	18-Nov-20	S.131/CCS/XI/2020	Siaran Pers yang Berjudul: RUPSLB Bank BTPN Setujui Perubahan Direksi, Dewan Komisaris
November	19-Nov-20	S.132/CCS/XI/2020	Hasil Pemingkatan Tahunan
November	20-Nov-20	S.134/CCS/XI/2020	Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPSLB
November	24-Nov-20	S.135/CCS/XI/2020	Perubahan Anggaran Dasar
November	24-Nov-20	S.136/CCS/XI/2020	Susunan Direksi dan Dewan Komisaris
November	30-Nov-20	S.137/CCS/XI/2020	Pembayaran Bunga Obligasi PUB IV Tahap 1 Tahun 2019 seri A dan B ke-4
Desember	04-Des-20	S.141/CCS/XII/2020	Siaran Pers yang Berjudul: Jenius Pay, Kolaborasi Jenius untuk Bertransaksi Online yang Mudah, Cerdas, dan Aman

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Di dalam rangka meningkatkan wawasan dan kompetensi sebagai Sekretaris Perusahaan, berikut ini adalah daftar *training* yang diikuti selama tahun 2020:

No	Tanggal	Penyelenggara	Materi
1	22 Januari 2020	ICSA Academy	Quantum Leap Your Communication
2	27 Januari 2020	BTPN	Strategic Direction Briefing 2020
3	5 Februari 2020	BTPN	Diskusi Terkait COVID19
4	5 Februari 2020	BTPN	Diskusi Terkait Retensi Dokumen
5	31 March 2020	Creco Consultant Group	Analysis of Economic Condition Impact from COVID-19
6	8 April 2020	ICSA Academy	Relaksasi Aturan OJK
7	15 April 2020	ICSA	Webinar ICSA – E-Proxy
8	28 April 2020	KSEI	Online Course – E-proxy
9	8 Mei 2020	Webinar HHP	Transaksi Material
10	29 Mei 2020	BTPN (OperatioN Risk Management)	Three line of defence model discussion
11	4 Juni 2020	Lembaga Penjamin Simpanan	Sosialisasi Rencana Survei Indeks Kepercayaan Depositor pada Bank Umum
12	9 Juni 2020	Creco Consultant Group	Market Update
13	9 Juni 2020	BEI	Webinar terkait Sosialisasi Peraturan Nomor I-B Tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang
14	11 Juni 2020	Asosiasi Emiten Indonesia	Undangan Halal Bi Halal dan Webinar “Emiten Menyambut New Normal, Tantangan dan Peluang”
15	18 Juni 2020	BTPN (Legal & Litigasi)	Awareness on the ABC Implementation



No	Tanggal	Penyelenggara	Materi
16	9 Juli 2020	ICSA	Sosialisasi POJK No.17-POJK.04-2020 ttg Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
17	10 Juli 2020	OJK	Sosialisasi dan RDP POJK Transparansi
18	16 Juli 2020	ICSA	Best Practice POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS pada Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik
19	17 Juli 2020	AEI	Undangan Webinar AEI Bersama Menteri Perindustrian Dengan Tema "Peluang dan Tantangan Industri & Dunia Usaha Pada Masa New Normal"
20	19 Juli 2020	ICSA	Undangan Webinar ICSA tema RISK MANAGEMENT for CORPORATE SECRETARY
21	4 Agustus 2020	BEI dan Global Reporting Initiative	Preparing Stakeholder Engagement & Sustainability
22	11 Agustus 2020	OJK-BEI	Sosialisasi POJK 37-POJK.04-2020 dan POJK 43-POJK.04-2020
23	11 Agustus 2020	OJK-BEI	Sosialisasi POJK 17-POJK.04-2020 dan POJK 42-POJK.04-2020
24	14 Agustus 2020	ICSA	Pendalaman POJK 42/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
25	7 September 2020	BTPN (Compliance)	Sosialisasi Penanganan Peraturan Yang Diterbitkan Oleh Regulator
26	1 September 2020	LSPP	Executive Risk Management Certification Refresher 2020
27	30 September 2020	BTPN (CorpCom)	Workshop RAKB dan SR
28	16 Oktober 2020	BTPN (CorpCom)	"Sharing Session #2: Kisah Melawan COVID-19"
29	16 Oktober 2020	Learning & Development Department, Asia Sumitomo Mitsui Banking Corporation	[Webinar] Lead and Motivate Virtual Teams on 20 Oct (For managers with direct reports)
30	19 Oktober 2020	Learning & Development Department, Asia Sumitomo Mitsui Banking Corporation	Rethinking Your Way To Success
31	20 Oktober 2020	Creco Consultant Group	Economic Outlook Seminar
32	21 Oktober 2020	AEI	Undangan Webinar Ekonomi Nasional
33	22 Oktober 2020	ICSA	Tantangan Corporate Secretary Dalam Menghadapi New Normal
34	26 Oktober 2020	Learning & Development Department, Asia Sumitomo Mitsui Banking Corporation	[Webinar] Practicing Mindfulness
35	11 November 2020	OJK	Webinar Focus Group Discussion (FGD) Dengar Pendapat RSEOJK Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan EPP Confirmation
36	3 Desember 2020	OJK	Sosialisasi POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan
37	10 Desember 2020	CRECO Consultant Group	Leadership Series : COVID-19 Opportunities for MSMEs and Digitization of Financial Services
38	10 Desember 2020	BEI-OJK	Undangan Menghadiri Webinar "Dasar Fikih dan Proses Seleksi Saham Syariah di Indonesia"
39	11 Desember 2020	BEI	Undangan Dengar Pendapat dalam rangka Rule Making Rule Konsep Peraturan Bursa

E-learning internal BPTN yang diikuti selama tahun 2020

No	Materi
1	Anti Fraud Awareness
2	Entertainment & Gift
3	Ethic, Conduct, Customer Protection
4	Information Security Awareness
5	LINK & HELP Communication
6	Operational Risk Management
7	Pernyataan Mengenai Anti-Fraud & Pakta Integritas Dan Kode Etik PT Bank BTPN Tbk
8	Refreshment APU PPT 2020
9	Refreshment Compliance 2020
10	Refreshment Fraud Awareness
11	Sustainable Finance (Keuangan Berkelanjutan) 2020

FUNGSI KEPATUHAN

Industri perbankan merupakan industri yang diwajibkan untuk menerapkan kepatuhan lebih ketat (*highly regulated*) dibandingkan dengan industri lainnya. Tingkat kepatuhan yang ketat itu terkait dengan misi publik dan tanggung jawab terhadap dana masyarakat.

Oleh karena itu, pengelolaan risiko kepatuhan di Bank menjadi sangat penting, apalagi seiring dengan meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha bank. Misalnya, berkenaan dengan perkembangan teknologi

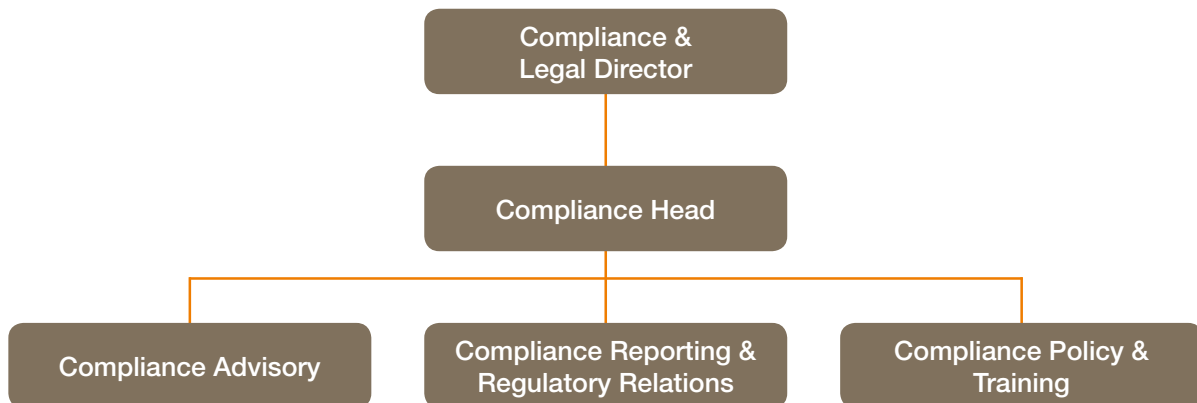
informasi dan digitalisasi yang dapat menyebabkan potensi risiko kepatuhan bagi Bank.

Sebagaimana tertuang pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Manual*), pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan OJK, BI maupun peraturan perundangan yang berlaku, merupakan salah satu komitmen BPTN. Begitu pun halnya dengan pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU & PPT).

Pemenuhan kepatuhan Bank dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang bersifat pencegahan guna memastikan bahwa pelaksanaan proses bisnis di lingkungan Bank telah sejalan dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Tata kelola ini, antara lain mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Struktur Organisasi

Agar penerapan Fungsi Kepatuhan dapat berjalan efektif, Bank telah memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang selanjutnya disebut “Divisi Compliance” yang independen sebagaimana peraturan OJK tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.



Dasar Hukum

Dalam menjalankan fungsi kepatuhan, Bank berpedoman kepada peraturan Peraturan OJK no. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum:

- Perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan akan menyebabkan peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank yang akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh bank, untuk itu diperlukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha bank, baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*);
- Upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*) dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha bank.



- Untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud diperlukan peningkatan peran dan tanggung jawab kepatuhan pada setiap jenjang organisasi serta Satuan Kerja Kepatuhan yang ada pada bank sehingga potensi risiko kegiatan usaha bank dapat diantisipasi lebih dini.

Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Kepatuhan dirumuskan sejalan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh regulator. Di antaranya adalah:

A. Fungsi Kepatuhan

Fungsi yang dijalankan di Bank telah mengacu arahan yang diberikan oleh regulator sesuai POJK no. 46/POJK/03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yang antara lain meliputi:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
5. Fungsi konsultatif (*advisory*) terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari unit kerja atau cabang, baik melalui media elektronik, diskusi, telepon atau pertemuan.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan, antara lain mengacu pada Peraturan OJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Berdasarkan peraturan tersebut, tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;

4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas & Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan :

1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu kepada peraturan OJK tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Bank Umum;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris

Mengacu pada kewajiban pemenuhan POJK no. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.

Terkait hal tersebut, guna memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan, Direksi senantiasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yang antara lain dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Kepatuhan kepada Direktur Kepatuhan (bulanan).
- Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris (triwulanan).
- Laporan hasil pemantauan terhadap risiko kepatuhan kepada Dewan Direksi pada Rapat Direksi dan kepada Dewan Komisaris pada forum pertemuan Dewan Direksi dengan Dewan Komisaris serta pada Komite Audit secara berkala.

Di samping itu, Direksi telah menyetujui Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan yang merupakan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan tata kelola Fungsi Kepatuhan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.

Sebagai pemenuhan terhadap POJK no. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank yang dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun (semesteran).

Fokus Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, penerapan Fungsi Kepatuhan memiliki sejumlah fokus yang menjadi perhatian Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Seluruh fokus tersebut telah dilaksanakan pada tahun buku. Di antaranya adalah:

1. Melakukan kaji ulang seluruh kebijakan utama dan kebijakan operasional Bank, termasuk kebijakan kepatuhan sebagai infrastruktur dasar yang menjadi pedoman dalam penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.
2. Melakukan uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan, produk program, aksi perusahaan maupun transaksi yang wajib memperoleh persetujuan Komite Kredit guna memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.
3. Sosialisasi peraturan baru OJK dan BI kepada Direksi, Dewan Komisaris, unit terkait dan karyawan cabang melalui *e-mail*, tatap muka maupun media internal Bank lainnya, termasuk diseminasi peraturan baru kepada unit terkait guna menetapkan tindak lanjut terhadap peraturan tersebut. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi ulang terhadap peraturan lama, terutama yang memiliki dampak signifikan bagi Bank.

4. Fungsi konsultatif (*advisory*) terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku dalam setiap penerbitan produk dan/atau aktivitas serta kebijakan; baik baru, pengembangan maupun kaji ulang tahunan melalui rapat koordinasi, media elektronik dan lain-lain.
5. Pelaksanaan *self-assessment* risiko kepatuhan sebagai bagian dari penyusunan Profil Risiko Bank yang dilakukan setiap triwulan dalam rangka mengelola Risiko Kepatuhan Bank.
6. Penyusunan *Compliance Self Assessment (CSA)* yang digunakan sebagai *tools* dalam mengukur dan memastikan penerapan kepatuhan unit kerja terhadap peraturan OJK dan BI serta peraturan perundangan yang berlaku maupun peraturan SMBC dalam rangka *global risk consolidation* dengan SMBC sebagai pemegang saham mayoritas, sekaligus Pemegang Saham Pengendali Bank yang juga merupakan global SIB Bank. Penyusunan CSA juga mencakup pemeriksaan mandiri (*Compliance Self Review*) dari unit kerja terhadap penerapan kepatuhan OJK, BI, SMBC serta peraturan perundangan yang berlaku.
7. Pelaksanaan *Compliance On-site Review (Branch Review)* yang dilaksanakan oleh *AML Compliance Champion* di kantor cabang Bank guna memastikan penerapan kepatuhan cabang terhadap penerapan peraturan OJK, BI maupun peraturan SMBC. Bersamaan dengan pelaksanaan *Branch Review*, dilaksanakan pula sosialisasi terhadap peraturan OJK serta peraturan SMBC guna meningkatkan pemahaman karyawan cabang terhadap peraturan dimaksud.
8. Pemantauan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan tata kelola pada perusahaan anak, yaitu BTPN Syariah sesuai ketentuan OJK terkait Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, termasuk penatalaksanaan sinergi perbankan syariah.
9. Penyelenggaraan pelatihan guna memperkuat Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank kepada seluruh karyawan, yang dilaksanakan melalui *e-learning*.
10. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia pada Direktorat Kepatuhan & Legal dalam rangka pemenuhan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, antara lain melalui training dan lain-lain.



Strategi Penerapan Kepatuhan

Bank telah memiliki strategi dalam rangka menciptakan kepatuhan secara berkesinambungan di lingkungan organisasi Bank. Rincian strategi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi peraturan baru OJK dan BI kepada Direksi, Dewan Komisaris, unit terkait dan kepada karyawan cabang, termasuk sosialisasi ulang peraturan lama yang memiliki dampak signifikan bagi Bank.
2. Uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan, produk program, tindakan korporasi serta transaksi yang wajib memperoleh persetujuan Komite Kredit, termasuk kaji ulang berkala terhadap kebijakan dan produk program.
3. Fungsi konsultatif (*advisory*) terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan dalam setiap penerbitan produk dan/atau aktivitas serta kebijakan; baik baru, pengembangan maupun kaji ulang tahunan.
4. Penyusunan *Compliance Self Assessment* (CSA), termasuk kaji ulang dan penyempurnaan berkelanjutan terhadap kertas kerja CSA sejalan dengan terbitnya peraturan baru OJK, BI dan peraturan perundangan lainnya.
5. Pelaksanaan pemeriksaan mandiri (*Compliance Self Review*) terhadap penerapan ketentuan OJK, BI dan SMBC serta ketentuan perundangan lainnya.
6. Pelaksanaan *Compliance On-site Review* (*Branch Review*) oleh *AML Compliance Champion* guna memastikan kepatuhan cabang terhadap penerapan ketentuan OJK, BI dan SMBC.
7. Memastikan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan tata kelola pada perusahaan anak, yaitu BTPN Syariah sejalan dengan ketentuan OJK terkait Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, termasuk penatalaksanaan sinergi perbankan syariah.

Sosialisasi Bidang Kepatuhan

Untuk mendukung penerapan kepatuhan secara berkesinambungan, Bank senantiasa melakukan sosialisasi di lingkungan organisasi. Materi yang disampaikan, terutama berkenaan dengan peraturan baru yang dikeluarkan oleh OJK dan BI kepada Direksi, Dewan Komisaris dan unit terkait, termasuk sosialisasi peraturan lama yang memiliki dampak signifikan bagi Bank

Penyampaian informasi tersebut dilakukan melalui *e-mail*, metode tatap muka maupun media internal Bank lainnya.

Di samping itu, guna meningkatkan pemahaman karyawan cabang dilakukan pula sosialisasi terhadap peraturan OJK dan BI serta peraturan SMBC oleh *AML Compliance Champion* di kantor cabang.

Inisiatif Kepatuhan Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Bank telah merealisasikan sejumlah inisiatif terkait dengan kepatuhan. Uraianya adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan *Compliance Self Assessment* (CSA) guna mengukur dan memastikan penerapan kepatuhan unit kerja terhadap peraturan OJK dan BI serta peraturan perundangan yang berlaku maupun peraturan SMBC.
2. Pelaksanaan pemeriksaan mandiri (*Compliance Self Review*) guna memastikan pemahaman karyawan terhadap risiko kepatuhan.
3. Pelaksanaan *Compliance On-site Review* (*Branch Review*) oleh *AML Compliance Champion* guna memastikan kepatuhan cabang terhadap penerapan ketentuan OJK, BI serta peraturan SMBC.
4. Penyelenggaraan pelatihan guna memperkuat Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank kepada seluruh karyawan yang dilaksanakan melalui *e-learning*.

Rencana Strategi Tahun 2021

Untuk tahun depan, Bank telah menyusun sejumlah inisiatif strategis yang akan dikembangkan. Di antaranya adalah:

1. Kaji ulang atas seluruh kebijakan utama dan operasional Bank, termasuk kaji ulang terhadap kebijakan kepatuhan yang merupakan infrastruktur dasar pedoman dalam penerapan Fungsi Kepatuhan Bank sejalan dengan terbitnya peraturan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) maupun peraturan perundangan lainnya serta aturan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank
2. Memastikan kebijakan, produk program, aksi perusahaan maupun keputusan transaksional yang wajib memperoleh persetujuan Komite Kredit telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku melalui proses uji kepatuhan serta fungsi *advisory*, termasuk kaji ulang berkala terhadap kebijakan dan produk program
3. Sosialisasi peraturan baru OJK dan BI kepada Direksi, Dewan Komisaris dan unit terkait, termasuk diseminasi peraturan baru kepada unit terkait guna menetapkan tindak lanjut terhadap peraturan baru tersebut. Di samping itu, juga dilakukan sosialisasi ulang peraturan lama, terutama peraturan yang memiliki dampak signifikan bagi Bank

4. Sebagai bagian dari langkah peningkatan Budaya Kepatuhan kepada karyawan, khususnya karyawan cabang, dilakukan sosialisasi peraturan OJK dan BI maupun peraturan SMBC guna meningkatkan pemahaman karyawan terhadap peraturan dimaksud yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan *Branch Review*
5. Penyusunan *Compliance Self Assessment (CSA)* yang digunakan sebagai *tools* dalam mengukur dan memastikan penerapan kepatuhan unit kerja terhadap peraturan OJK dan BI serta peraturan perundangan yang berlaku maupun peraturan SMBC dalam rangka *global risk consolidation* dengan SMBC sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank yang juga merupakan global SIB Bank.
6. Pelaksanaan pemeriksaan mandiri (*Compliance Self Review*) sebagai salah satu langkah dalam meningkatkan Budaya Kepatuhan seluruh karyawan terhadap penerapan ketentuan OJK dan BI serta ketentuan peraturan perundangan maupun ketentuan SMBC, termasuk pelaksanaan survei kepada seluruh karyawan guna memastikan pemahaman karyawan terhadap Risiko Kepatuhan.
7. Pelaksanaan *Compliance On-site Review (Branch Review)* guna memastikan kepatuhan terhadap penerapan ketentuan OJK, BI serta peraturan SMBC yang akan dilaksanakan oleh *AML Compliance Champion* di kantor cabang Bank yang akan bekerja sama dengan cabang dan unit bisnis terkait di cabang tersebut.
8. Memastikan pelaksanaan GCG, termasuk anti suap dan korupsi serta benturan kepentingan di semua proses Bank, antara lain dalam proses penunjukan vendor pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan jamuan kepada pihak ketiga guna memastikan pemenuhan terhadap ketentuan OJK, khususnya terkait Alih Daya maupun ketentuan SMBC.
9. Melakukan *monitoring* dan kontrol antara lain dengan *self assessment* oleh unit terkait atas pelaksanaan ketentuan internal Bank terkait Hiburan dan Hadiah (*Entertainment & Gift*).
10. Memastikan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan tata kelola pada perusahaan anak, yaitu BTPN Syariah telah dilakukan dengan memadai sejalan dengan ketentuan OJK terkait Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, termasuk penatalaksanaan sinergi perbankan syariah.
11. Penyempurnaan *compliance process* antara lain melalui penguatan infrastruktur pendukung pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Unit Kepatuhan berupa sistem monitoring terhadap pemenuhan tindak lanjut peraturan OJK dan/atau BI, pemenuhan hasil pemeriksaan Regulator dan lain-lain.
12. Menyelenggarakan pelatihan terkait *Refreshment Compliance Awareness* termasuk *Compliance Declaration*, anti suap dan korupsi serta Hiburan & Hadiah (E&G) kepada seluruh karyawan guna memperkuat budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank melalui *e-learning* maupun media internal Bank lainnya. Di samping itu juga diselenggarakan pelatihan terkait peraturan OJK dan/atau BI yang berdampak kepada pengembangan produk dan layanan Bank kepada unit terkait.
13. Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia pada Direktorat Kepatuhan & Legal dalam rangka pemenuhan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, antara lain melalui training, *refreshment program*.

INTERNAL FRAUD

Dasar Pencegahan Internal Fraud

Internal Fraud merupakan *fraud* yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (*honorer*) dan/atau tenaga kerja alih daya yang bernilai lebih dari Rp100 juta. Hal ini sesuai dengan Pasal 64 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK/.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Bab IX angka 5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Penerapan Strategi Anti-Fraud

Bank BTPN berkomitmen penuh untuk senantiasa melengkapi dan menyempurnakan penyelenggaraan pengendalian internal Bank secara keseluruhan dan berkelanjutan yang ditujukan untuk melakukan pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan evaluasi dengan berpedoman pada Kebijakan Strategi *Anti-Fraud* Bank BTPN.

Penyempurnaan penerapan Strategi *Anti-Fraud* Bank BTPN dilakukan dengan cara antara lain melalui:

1. Penyelarasan berkesinambungan di antara berbagai unit bisnis dan unit kerja dalam penerapan Strategi *Anti-Fraud* dan secara konsisten menerapkan *zero tolerance* terhadap pelaksanaan Strategi *Anti-Fraud*.
2. Secara terus menerus melakukan *awareness Anti-Fraud* dan *Whistleblowing Channel*, baik melalui *in-class training* maupun *online training* dan *e-learning* untuk karyawan tetap maupun karyawan baru. dan juga dilakukan melalui kampanye *Anti-Fraud* dan sosialisasi *Whistleblowing Channel* melalui media internal Bank di antaranya *e-news letter*, *e-mail blast*, *desktop wallpaper*, dan lain-lain yang berisi informasi mengenai *fraud* dan *channel* yang dapat digunakan untuk pelaporan kejadian berindikasi *fraud*, sehingga diharapkan kesadaran (*awareness*) dan kepedulian terhadap budaya *anti-fraud* di BTPN dapat terus terjaga dan semakin meningkat.



3. Pelaksanaan Deklarasi *anti fraud* melalui *e-learning* sebagai komitmen dan membangun kesadaran untuk tidak melakukan *fraud*, selalu taat kepada aturan yang berlaku disiplin dalam menjalankan tahapan proses kerja sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Bank BTPN.

Pelaksanaan di Bank

Penjelasan terkait dengan yang terjadi di Bank dalam dua tahun terakhir disampaikan dalam tabel di bawah ini.

PERKEMBANGAN INTERNAL FRAUD DI BANK

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh:					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Telah diselesaikan		-	1	2		-
Dalam proses penyelesaian di internal bank		-	-	-		-
Belum diupayakan penyelesaiannya		-	-	-		-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-	3	2		-
Total Fraud		-	4	4		-

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU & PPT)

Bank telah menerapkan kebijakan terkait dengan upaya pencegahan atas terjadinya pencucian uang dan pendanaan teroris. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan OJK Nomor Peraturan OJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris di Sektor Jasa Keuangan.

Sosialisasi

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kepatuhan, khususnya di bidang APU & PPT, Bank senantiasa melaksanakan sosialisasi kepada seluruh organ di lingkungan Bank. Sosialisasi tersebut, terutama dilakukan terkait dengan peraturan baru OJK dan BI kepada Direksi, Dewan Komisaris dan unit terkait.

Pelaksanaan sosialisasi direalisasikan melalui *e-mail*, metode tatap muka maupun media internal Bank lainnya, termasuk diseminasi peraturan baru kepada unit terkait guna menetapkan tindak lanjut terhadap peraturan baru tersebut. Selain itu juga dilakukan sosialisasi ulang terhadap peraturan lama, terutama yang memiliki dampak signifikan bagi Bank.

Sosialisasi tidak hanya untuk karyawan di kantor pusat, tetapi juga kantor cabang. Kebijakan itu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman karyawan cabang dilakukan pula sosialisasi terhadap peraturan OJK dan BI serta peraturan SMBC oleh *AML Compliance Champion* di kantor cabang.

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020

Penerapan kepatuhan terhadap peraturan tersebut yang telah direalisasikan oleh Bank sepanjang tahun 2020, antara lain:

1. Pelaksanaan "AML Action Plan", yang telah disusun untuk menindaklanjuti adanya perbedaan yang ditemukan dalam pelaksanaan Kebijakan APU & PPT sebelum penggabungan usaha dengan Kebijakan yang berlaku bagi anak perusahaan grup SMBC, serta untuk meningkatkan penerapan APU & PPT pada Bank. Pada tahun 2020, beberapa aktivitas terkait "AML Action Plan" yang dilaksanakan antara lain:
 - Proses seleksi karyawan yang akan ditunjuk sebagai "AML Compliance Champion" yang akan ditugaskan di kantor regional untuk monitor penerapan ketentuan APU & PPT di wilayah regional. Saat ini Bank telah menunjuk "AML Compliance Champion" untuk Regional Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera 1, Jakarta dan Indonesia Timur serta masih melakukan proses seleksi untuk Regional Sumatera 2.

- Proses *training* pembekalan bagi “AML Compliance Champion” untuk Regional Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera 1, Jakarta dan Indonesia Timur
 - Pemutakhiran SOP untuk Jenius dan BTPN Wow! guna menambahkan prosedur pengawasan terhadap agen.
 - Pelaksanaan *periodic refreshment training* bagi agen Jenius maupun agen Wow!
 - Pengumpulan data dari departemen terkait untuk kebutuhan penyampaian *Bank Wide Risk Assessment 2020*.
 - Melakukan *KYC Self Review* dengan metodologi *sampling* yang baru yang telah disesuaikan dengan kondisi setelah merger.
 - Pelaksanaan perubahan aturan untuk siklus *periodic review*/pemutakhiran data nasabah
 - Implementasi *training* serta penerapan terkait *JASF Screening*.
 - Telah ditetapkannya prosedur pengkinian serta pemeliharaan *watch list*.
2. Evaluasi terhadap penerapan kebijakan APU & PPT dengan perkembangan risiko yang dihadapi Bank telah dilakukan melalui penerapan Kajian Risiko APU & PPT guna memitigasi risiko APU & PPT pada Produk/Jasa baru maupun yang telah dimiliki Bank;
 3. Penyesuaian ketentuan APU & PPT dengan peraturan-peraturan terbaru dari regulator termasuk dengan mengakomodasi kebijakan baru dari pemegang saham yang berlaku bagi anak perusahaan SMBC;
 4. Mengadakan program pelatihan APU&PPT bagi karyawan baru maupun *existing*, serta memberikan *training* dengan materi APU&PPT maupun materi tematik terkait APU&PPT bagi Cabang dan karyawan yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU&PPT;
 5. Pelaksanaan *training* dengan mengundang nara sumber untuk memulai kajian terkait *AML Trade Base Screening Process*;
 6. Pelaksanaan optimalisasi fungsi sistem pendukung APU & PPT, antara lain:
 - Melakukan proses UAT *front channel* dan *testing integration channel* untuk integrasi sistem AML dengan aplikasi *front-end* untuk mendukung proses *screening* nasabah dan penentuan profil risiko nasabah;
 - Pengembangan sistem terkait pemutakhiran data *watch list/sanction list* agar proses pemutakhiran data dapat dilakukan sesegera mungkin;
 7. Meningkatkan budaya kepatuhan terhadap ketentuan dan kebijakan internal bank terkait penerapan program APU & PPT antara lain melalui:
 - Menyelesaikan proses UAT (*User Acceptance Test*) terkait dengan hasil *review* parameter dan *threshold* guna meningkatkan *reability* sistem monitoring transaksi nasabah dalam mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan;
 - Dalam proses *data mapping* dan pengembangan sistem, guna otomatisasi proses APU&PPT, terkait dengan sistem pelaporan baru Go-AML, untuk meminimalisir kesalahan yang disebabkan oleh *human error*.
 - Melanjutkan penyelesaian rencana yang telah disusun dalam “AML Action Plan” untuk menindaklanjuti adanya perbedaan (*gaps*) yang ditemukan dalam pelaksanaan Kebijakan APU & PPT sebelum penggabungan usaha dengan Kebijakan APU & PPT yang berlaku bagi anak perusahaan grup SMBC; serta untuk meningkatkan penerapan APU & PPT di Bank;
 - Evaluasi berkelanjutan terhadap penerapan kebijakan APU & PPT serta perkembangan risiko APU & PPT yang dihadapi, melalui penerapan kajian risiko APU & PPT secara berkala, serta kajian risiko yang mampu memitigasi risiko APU & PPT di produk/jasa yang dimiliki Bank;
 - Melanjutkan penyempurnaan program APU & PPT yang telah ada, terutama untuk:
 - Menyesuaikan dengan perkembangan ketentuan APU & PPT yang berlaku;
 - Menyesuaikan dengan risiko APU & PPT terkait perkembangan produk/jasa yang dimiliki bank, serta kasus/masalah terkait APU & PPT yang terjadi di Bank;
 - Mengakomodasi kebijakan pemegang saham yang berlaku bagi anak perusahaan SMBC;
 - Memastikan program pelatihan telah dilakukan terhadap karyawan yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU & PPT;
 - Menyempurnakan *risk assessment methodology*;
 - Meningkatkan kualitas KYC terkait proses penerimaan nasabah *digital banking* dan proses pemutakhiran data nasabah (Jenius dan WOW!) menjadi fokus utama.
 - Melanjutkan optimalisasi fungsi sistem pendukung APU & PPT terutama dengan:
 - Menyelesaikan proses integrasi sistem AML dengan aplikasi *front-end* untuk mendukung proses *screening* nasabah dan penentuan profil risiko nasabah, dengan mempertimbangkan adanya integrasi *core banking*;



- Penyelesaian proses pengembangan sistem terkait pemutakhiran data *watch list/sanction list* untuk memastikan proses pemutakhiran data dapat dilakukan sesegera mungkin;
- Melakukan evaluasi terkait parameter dan *threshold* dari sistem *monitoring* transaksi nasabah untuk mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan
- Stabilisasi sistem *monitoring* transaksi nasabah;

Menyelesaikan otomatisasi proses terkait APU & PPT, terkait dengan sistem pelaporan baru Go-AML, untuk meminimalisir kesalahan yang disebabkan karena *human error*.

PENGUNGKAPAN TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Penjelasan tentang materi ini disampaikan pada MDNA Tinjauan Keuangan yang ada dalam Laporan Tahunan ini.

PENGUNGKAPAN TRANSAKSI AFILIASI

Penjelasan tentang materi ini disampaikan pada MDNA Tinjauan Keuangan yang ada dalam Laporan Tahunan ini.

Selain itu, transparansi juga dilakukan melalui publikasi pada media nasional. Berikut ini, di antara rincian transparansi di bidang keuangan dan non keuangan:

Subjek Transparansi	Publikasi
Laporan Keuangan Bulanan kepada regulator	Situs <i>web</i>
Laporan Keuangan Triwulan kepada regulator	Media cetak dan situs <i>web</i>
Laporan Tahunan kepada regulator, lembaga pemeringkat, pemegang saham, serta pihak berkepentingan lain	Situs <i>web</i>
Informasi Tata Kelola	Situs <i>web</i>
Informasi Produk dan Layanan Bank termasuk jaringan kantor	Situs <i>web</i>
Pengumuman penyelenggaraan RUPS	Media cetak dan situs <i>web</i>
Informasi lainnya yang berkenaan dengan keterbukaan informasi	Situs <i>web</i> dan saluran informasi lain

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM ATAU OBLIGASI SUBORDINASI

Pembelian kembali saham dan obligasi merupakan upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2020, BANK BTPN tidak melakukan pembelian kembali saham dan obligasi (*share buy back* dan *buy back* obligasi).

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA DALAM JUMLAH BESAR

Bank BTPN secara konsisten mempertimbangkan kapasitas modal dan distribusi/diversifikasi portofolio dalam pemberian pinjaman. Selama tahun 2020 tidak terdapat pelanggaran terkait dengan eksposur besar yang berada di luar kewajaran, maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Bank BTPN tidak terlibat di dalam kegiatan politik dan tidak memberikan donasi untuk kepentingan politik. Sebaliknya dengan melaksanakan panggilan sosialnya, BTPN dapat terus mempertahankan kinerja usahanya.

Dalam hal tersebut, Bank BTMN menempatkan program tanggung jawab sosial sebagai bagian penting dan integral dari kegiatan bisnis Bank. Penjelasan lebih rinci terkait hal tersebut terdapat di bagian “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” dalam buku Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank BTPN telah memenuhi kewajiban berkenaan dengan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Mekanisme penyampaian dilakukan melalui beragam saluran komunikasi dari mengunggah melalui situs Bank, hingga disampaikan langsung kepada regulator dan pihak berkepentingan.

Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Berikut adalah tabel penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Eksposur Besar per 31 Desember 2020.

REALISASI PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK KETIGA DAN EKSPOSUR BESAR

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (Rp Juta)
1. Ke Pihak Terkait	13	2.184.151
2. Ke Debitur Utama	25	57.610.350,49
a. Individu	2	6.383.442,37
b. Grup	23	51.226.908,12

AUDIT EKSTERNAL

Dalam penyusunan laporan keuangan yang diaudit untuk tahun 2020, BTPN menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada Bank Indonesia dan Bapepam-LK, yaitu KAP Siddharta Widjaja & Rekan. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP tersebut telah memperoleh persetujuan RUPS Tahunan pada 23 April 2020 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

Penunjukan KAP Siddharta Widjaja & Rekan sebagai auditor eksternal dilakukan sejak tahun buku 2019. Total biaya yang dikeluarkan untuk audit Laporan Keuangan Konsolidasi tahun 2020 adalah Rp8,5 miliar sebelum PPN 10%.

Akuntan Publik dan KAP tersebut telah menyelesaikan tugas secara independen sesuai dengan pedoman standar profesi akuntan publik, serta sesuai dengan persyaratan kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan. Berikut adalah KAP yang telah mengaudit Laporan Keuangan BTPN dalam 5 (lima) tahun terakhir:

KAP PELAKSANA AUDIT LAPORAN KEUANGAN BANK BTPN

Tahun Pemeriksaan	Kantor Akuntan Publik	Akuntan Penanggung Jawab	Jasa yang Diberikan	Biaya (Rp Juta)
2020	KAP Siddharta Widjaja & Rekan	Liana Lim S.E., CPA	Audit of Financial Statements	8.500
2019	KAP Siddharta Widjaja & Rekan	Liana Lim S.E., CPA	Audit of Financial Statements	7.300
2018	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Jinny Pangestu	Audit of Financial Statements	5.755
2017	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA	Audit of Financial Statements	5.555
2016	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA	Audit of Financial Statements	5.050

Jasa Lain yang Diberikan

Sepanjang periode audit, seluruh KAP tidak memberikan jasa lain selain jasa audit keuangan.



SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

Internal Audit memiliki visi untuk menjadi mitra strategis manajemen dalam mendukung pertumbuhan Bank guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit memiliki dua fungsi.

Pertama adalah fungsi penjaminan (*assurance*). Terkait dengan fungsi ini Internal Audit mengevaluasi proses tata kelola, pengelolaan risiko dan efektivitas pengendalian internal pada semua aspek kegiatan Bank melalui pendekatan berbasis risiko.

Kedua, fungsi konsultatif. Melalui fungsi ini, Internal Audit memberikan masukan atas pengendalian internal kepada direktorat lainnya, seperti pemberian rekomendasi atau saran perbaikan dalam berbagai pemeriksaan yang dilakukan, masukan atas draf kebijakan atau prosedur, masukan atas inisiatif utama Bank, dan lainnya.

Profil Kepala Internal Audit

Nurhajati Soerjo Hadi

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	52 tahun hingga tahun buku 2020
Riwayat Pendidikan	Bachelor of Arts in Business Administration from Oregon State University, Corvallis - Oregon, USA (1991)
Dasar Penunjukan	Diangkat oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris sejak 1 Januari 2017, melalui Surat Keputusan No. PS/BOC/009/XII/2016 tentang Persetujuan Dewan Komisaris terkait dengan Penggantian Internal Audit Head PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
Rangkap Jabatan	Kepala Internal Audit
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Fraud Management Unit Head, PT Bank BTPN Tbk (2015-2016) • Quality Assurance and Corporate Client Execution Head, PT ANZ Bank Indonesia (2015) • Business Development Director (Business Manager) to International Banking, The Royal Bank of Scotland N.V., Jakarta Branch (2009-2013) • Business Development Director (Business Manager) to Executive Country, ABN AMRO Bank N.V./The Royal Bank of Scotland N.V., Jakarta Branch (2008-2013) • Director, PT RBS Finance Indonesia (2008-2012) • Credit Portfolio Management Head, ABN AMRO Bank N.V., Jakarta Branch (2005-2008) • Deputy Head Financial Restructuring & Recovery (FRR), ABN AMRO Bank N.V., Jakarta Branch (2003-2005) • Financial Restructuring & Recovery Officer, ABN AMRO Bank N.V., Jakarta Branch (1999-2005) • Relationship Manager for Corporate Banking, ABN AMRO Bank N.V., Jakarta Branch (1996-1998) • Corporate Credit Account Officer di PT IBJ Indonesia Bank, Jakarta (1991-1995)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.

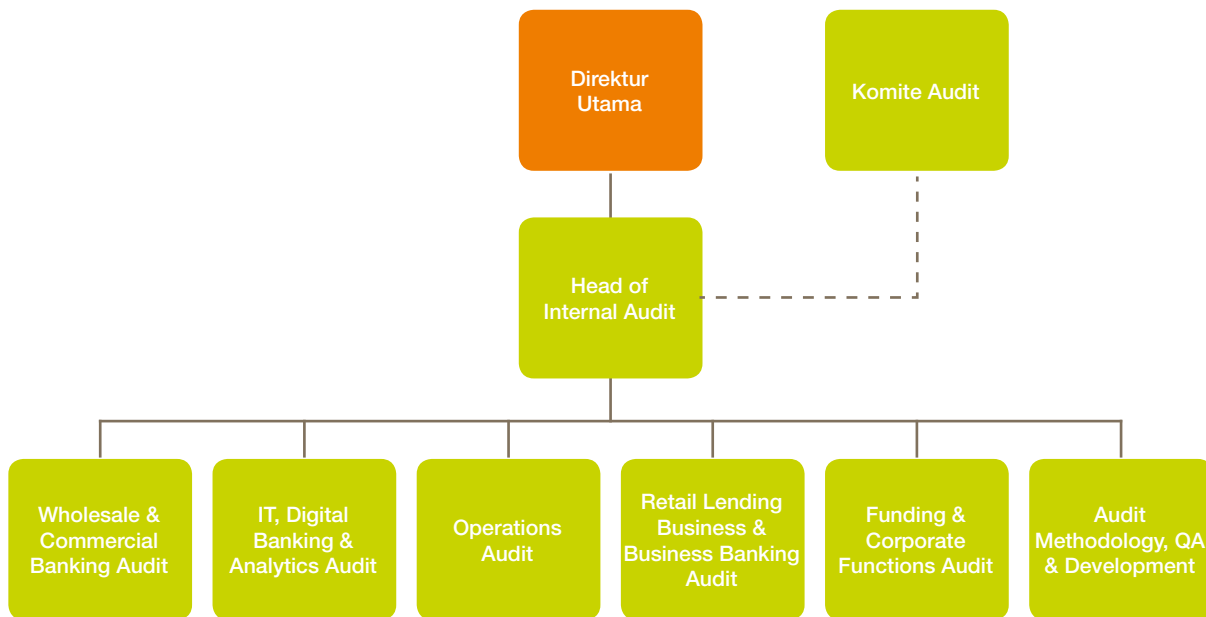
Pengangkatan dan Pemberhentian

Kepala Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Internal Audit dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Organisasi dan Kedudukan Internal Audit dalam Struktur Perusahaan

Internal Audit merupakan direktorat independen yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Direktorat ini memiliki 6 (enam) divisi.

Berikut adalah struktur organisasi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Mei 2020:



- Divisi *Wholesale dan Commercial Banking Audit* Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan atas segala aktivitas pada bisnis *Wholesale dan Commercial*, termasuk aktivitas *Treasury* serta layanan *Cash Management dan Trade Finance*
- Divisi *IT, Digital Banking dan Analytics Audit* Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap direktorat Teknologi Informasi dan *Digital Banking* (Jenius dan BTPN Wow!), serta mendukung divisi audit lainnya dalam pemeriksaan terhadap direktorat-direktorat lain yang menggunakan dukungan teknologi. Data Analytics bertanggung jawab melaksanakan *continuous audit/off-site monitoring* dan mendukung penugasan audit lainnya melalui penyediaan data
- Divisi *Operations Audit* Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap direktorat *Operations* baik di Kantor Pusat maupun di kantor cabang
- Divisi *Retail Lending dan Business Banking Audit* Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan atas segala aktivitas kredit pada bisnis *Retail Lending*, Mitra Usaha Rakyat (MUR), Mitra Bisnis (SME), dan *Consumer Finance Business*
- Divisi *Funding dan Corporate Functions Audit* Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap direktorat *Retail Funding* serta direktorat-direktorat pendukung di Kantor Pusat, seperti *Finance*, *Kepatuhan*, *Manajemen Risiko*, *Human Capital*, dan lain-lain

- Divisi *Audit Methodology, Quality Assurance dan Development* Bertanggung jawab untuk melakukan persiapan Rencana Audit Tahunan, pengembangan metodologi audit, kaji ulang atas kesesuaian aktivitas Internal Audit dengan standar yang berlaku, serta meningkatkan kompetensi staf Internal Audit melalui pemetaan pelatihan yang efektif

Tugas dan Tanggung Jawab

Internal Audit melaporkan setiap hasil pelaksanaan audit termasuk rekomendasi untuk perbaikan kepada Direktur Utama, Komite Audit, dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Secara berkala, Internal Audit mempresentasikan hasil audit kepada Direksi dan Komite Audit, serta memberikan rangkuman atas hasil audit kepada Direktur Utama, Direksi, dan Komite Audit.

Setiap tahun Internal Audit menyusun Rencana Audit Tahunan berbasis risiko terkait aktivitas utama Bank. Rencana Audit didiskusikan juga bersama Direktur terkait dan SMBC Internal Audit Department dalam kaitannya dengan rencana kolaborasi audit agar selaras dengan arah pengembangan bisnis secara keseluruhan dan mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama, Komite Audit, dan Dewan Komisaris.



Adapun rincian tugas dan tanggung jawab Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana audit tahunan berbasis risiko dan mendapatkan kajian serta persetujuan dari Direktur Utama, Komite Audit, dan Dewan Komisaris.
2. Mengkomunikasikan kepada Direktur Utama dan Komite Audit jika terdapat keterbatasan sumber daya yang berdampak pada rencana audit tahunan.
3. Mengkaji ulang dan menyesuaikan rencana audit tahunan jika terdapat perubahan bisnis, risiko, operasional, program, sistem, dan kontrol yang signifikan. Perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan kembali dari Direktur Utama, Komite Audit, dan Dewan Komisaris.
4. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui dengan melakukan analisa dan evaluasi efektivitas *Governance, Risk Management, and Internal Control (GRC)* guna mendukung tujuan dan sasaran Bank secara maksimal.
5. Melakukan audit konsultatif/kajian terhadap inisiatif/produk baru Bank apabila diperlukan baik oleh manajemen maupun Regulator.
6. Mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan untuk perbaikan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Menyampaikan laporan audit secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit yang berisi ikhtisar hasil kegiatan audit, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
8. Memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan hasil tindak lanjut hasil audit.
9. Memastikan fungsi Audit Intern pada Bank maupun anak perusahaan berjalan dengan efektif.
10. Bekerja sama dengan audit ekstern untuk tercapainya hasil audit yang komprehensif.
11. Menyusun dan mengkaji Piagam Internal Audit, kebijakan serta prosedur Internal Audit secara periodik

Piagam Internal Audit

Tugas dan tanggung jawab termasuk wewenang Internal Audit dalam melakukan pemeriksaan serta kode etik setiap karyawan dituangkan dalam Piagam Internal Audit yang telah disetujui oleh Komite Audit dan Dewan Komisaris. Secara berkala, Internal Audit telah melakukan kaji ulang dan penyesuaian piagam (*charter*), kebijakan serta prosedur Internal Audit dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan dan Piagam Internal Audit mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, International Practices Professional Framework (IPPF), Piagam Audit Internal, serta Rencana Audit Tahunan.

Landasan Pelaksanaan Audit Internal

BTPN telah memiliki standar dan metodologi dalam melakukan audit internal, yang dituangkan dalam Kebijakan Internal Audit 2020. Secara umum, kebijakan Internal Audit ini mencakup kebijakan umum, kebijakan pemeriksaan, kebijakan dokumentasi dan administrasi, serta kebijakan sumber daya. Kebijakan tersebut mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik terbaik di lingkungan industri, di antaranya adalah:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern untuk Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (IPPF)

SUMBER DAYA MANUSIA

Internal Audit senantiasa memperkuat kapabilitas tim dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada para karyawan, baik dalam bentuk *soft skills* maupun *technical skills*, serta sertifikasi untuk manajemen risiko, audit, IT, *sharing session*, dan lainnya. Selama tahun 2020, Internal Audit juga melakukan proses rekrutmen guna memperkuat tim audit dengan mencari kandidat yang telah berpengalaman pada bidangnya dan mengutamakan kandidat yang juga memiliki pengetahuan teknologi informasi.

Internal Audit juga berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas melalui pemeriksaan secara komprehensif dengan sumber daya manusia yang kompeten. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menerapkan standar profesi audit yang memberikan nilai tambah bagi Bank.

Hingga berakhirnya tahun buku 2020, jumlah sumber daya manusia Internal Audit sebanyak 56 orang

RINCIAN SEBARAN SUMBER DAYA MANUSIA

Direktorat/Divisi	Jumlah Sumber Daya Manusia
Head of Internal Audit	1
Wholesale and Commercial Banking Audit Division	4
IT, Digital Banking and Data Analytics Audit Division	14
Operations Audit Division	11
Retail Lending and Business Banking Audit Division	10
Funding and Corporate Functions Audit Division	11
Audit Methodology, QA and Development Division	5
Total	56

STANDAR KUALIFIKASI SDM INTERNAL AUDIT

Posisi	Kualifikasi Minimum
Head of Internal Audit	Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 4, Professional Certification related to Internal Audit
Audit Division Head	Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 3, Professional Certification related to Internal Audit
Audit Lead	Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 2
Senior Auditor/Auditor	Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 1

KEPEMILIKAN SERTIFIKASI PROFESI

Sertifikasi Profesi	Jumlah Karyawan Pemilik Sertifikat
CIA (Certified Internal Auditor)	1
CISA (Certified Information Systems Auditor)	2
CCNA (Cisco Certified Network Associate)	1
CEH (Certified Ethical Hacker)	1
CISM (Certified Information Security Manager)	1
CSX (Cyber Security Nexus)	1
CBAP (Certified Business Analyst Professional)	1
CPLHI (Certified Professional Life & Health Insurance)	1
QIA (Qualified Internal Auditor)	5
CBIA (Certified Bank Internal Audit)	31
SMR (Sertifikasi Manajemen Risiko)	56



PARTISIPASI DALAM PERHIMPUNAN PROFESI

Perhimpunan Profesi	Jumlah Karyawan Terlibat
IIA (Institute of Internal Auditors)	6
ISACA (Information Systems Audit and Control Association)	2
IAIB (Ikatan Auditor Intern Bank)	6

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020

Sampai dengan Desember 2020, Internal Audit telah melakukan pemeriksaan audit yang meliputi segmen bisnis dan jaringan cabang seperti *Corporate Banking, Business Banking, Retail Banking, Digital Banking*, serta fungsi-fungsi pendukung (*Support Functions*) termasuk *Operations, Compliance, Legal & Litigation, Treasury*, dan Teknologi Informasi (*Information Technology*). Di bulan Juli 2020, Internal Audit melakukan penyesuaian terhadap Rencana Audit Tahunan 2020 awal.

Penyesuaian dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi dan dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang berkelanjutan termasuk perubahan strategi bisnis, potensi kerentanan pada proses atau aktivitas tertentu, serta pembatasan dalam melakukan perjalanan bisnis. Adapun penyesuaian tersebut telah disetujui oleh Direktur Utama, Komite Audit, dan Dewan Komisaris.

Tipe pemeriksaan audit yang telah selesai dilakukan adalah *mandatory audit* (2), *line of business* (4), *thematic audit* (9), unit kerja (9), full branch audit (1), dan continuous monitoring (1) dengan tingkat penyelesaian sebesar 100% dari revisi Rencana Audit Tahunan yang telah disetujui.

Atas kelemahan/temuan yang ada, unit bisnis/unit kerja terkait telah melakukan/memiliki rencana tindak lanjut untuk perbaikan yang dipantau secara berkesinambungan oleh Internal Audit.

Selain itu Internal Audit juga telah melakukan *consultative* audit (15) atas kaji ulang pra dan pasca implementasi pengembangan layanan perbankan elektronik Jenius dan BTPN Wow!, serta *continuous monitoring* (7) atas analisa transaksi rekening karyawan dan nasabah khususnya di segmen *Retail Banking*.

Internal Audit memberikan *update* secara berkala atas pelaksanaan rencana audit, hasil audit, dan tindak lanjut unit bisnis/unit kerja atas temuan/rekomendasi Internal Audit kepada Dewan Direksi (setiap 2 bulan) dan Komite Audit (setiap triwulan). Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang hasil audit selama suatu periode tertentu (semester/tahunan), setiap semester Internal Audit memberikan laporan *overview* kepada Direktur Utama, Dewan Direksi maupun Komite Audit atas potensi peluang untuk perbaikan yang ada

untuk dapat lebih memperkuat pengendalian internal atas suatu bisnis maupun fungsi pendukung lainnya. Disamping itu, Internal Audit juga melakukan pertemuan dengan OJK paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam POJK No.1/POJK.03/2019. Dalam hal penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, Internal Audit secara berkala melakukan komunikasi antara Head of Internal Audit BTPN dengan Head of Internal Audit BTPN Syariah, melaksanakan pemeriksaan pada BTPN Syariah, serta mengadakan pertemuan tahunan antara Head of Internal Audit BTPN, Head of Internal Audit BTPN Syariah dan Dewan Komisaris BTPN Syariah.

Rencana Strategis Tahun 2021

Untuk mendukung penguatan tim Internal Audit dalam menjalankan Rencana Audit dan pengembangan kompetensi karyawan sejalan dengan pertumbuhan dan beberapa inisiatif utama Bank, terdapat beberapa hal yang telah direncanakan ataupun dijalankan dalam berbagai bidang sebagai berikut:

1. Pengetahuan *audit & soft skills*
 - Meneruskan pengadaan sesi pemahaman terkait proses/aktivitas Bank yang dilakukan melalui pelatihan, program sertifikasi internal maupun eksternal, penyelenggaraan sharing atas perkembangan strategi maupun prioritas bisnis, serta pengkinian metodologi audit.
 - Melanjutkan pengadaan pelatihan terkait dengan *soft skills* yang menunjang pelaksanaan audit lapangan seperti *communication skills* dan lainnya.
2. Meningkatkan efektivitas proses audit
Internal Audit telah menggunakan *Audit Management System (AMS)* untuk membantu tim Internal Audit agar lebih efektif dalam mempersiapkan, melakukan dan menyelesaikan penugasan audit, serta memonitor tindak lanjut dari temuan audit. Kedepannya, Internal Audit akan mengembangkan sistem monitoring terkait pemenuhan tindak lanjut hasil audit ekstern dan regulator.
3. *Continuous audit*
Internal Audit kedepannya akan terus mengembangkan *continuous audit* yang dapat membantu Bank dalam menerapkan *continuous monitoring* yang tidak hanya berfokus pada lini bisnis tertentu melainkan untuk Bank secara menyeluruh.

- Meningkatkan kualitas *data analytics*
Tim Internal Audit telah menggunakan perangkat lunak *Audit Command Language (ACL)* sebagai alat data analisis dan membuat '*Internal Audit Dashboard*' untuk menghasilkan beberapa informasi seperti kinerja masing-masing lini bisnis, anomali data, *macro risk assessment*, dan informasi lainnya yang dapat dikinikan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk membantu tim Internal Audit dalam melakukan analisa data sehingga dapat meningkatkan pendekatan audit berbasis risiko (*risk based audit*) dan memberikan masukan yang bernilai tambah bagi Bank.
- Perbaikan kualitas Internal Audit yang berkelanjutan Internal Audit secara berkesinambungan akan menjalin kerjasama dengan institusi terdepan di bidang Perbankan dan Internal Auditing yang dapat memberikan wawasan, saran dan alat untuk mendorong peningkatan kualitas Internal Audit.

Internal Audit akan melaksanakan penilaian kembali atas kesesuaian aktivitas Internal Audit dengan standar yang berlaku pada tahun 2022 dengan tetap menunjuk akuntan publik yang independen, kompeten dan berpengalaman.

Pelatihan Pengembangan Kompetensi

Internal Audit mengupayakan pengadaan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi dan memperbaharui pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia secara terus-menerus untuk menjaga kualitas profesionalisme dan mengikuti perkembangan yang mutakhir. Program pengembangan dilakukan secara internal dan eksternal, antara lain melalui:

- Pelatihan/Seminar
- Observasi
- Rotasi Penugasan
- Sharing/Presentasi

Selain itu, setiap individu dalam organisasi Internal Audit juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan karier profesional. Kebijakan pengembangan karier tersebut mempertimbangkan kompetensi dari masing-masing individu, baik secara teknis maupun non-teknis, seperti *leadership* atau *softskill* lainnya.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)

Bank menerapkan sistem pengendalian intern yang merupakan suatu bentuk pengawasan secara berkesinambungan oleh manajemen Bank. Sistem tersebut ditujukan untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, maupun kebijakan dan prosedur intern Bank.

Selain itu, dalam rangka tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu dalam rangka mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan; meningkatkan efektivitas dan efisiensi atas penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian; meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) dan kedisiplinan pada organisasi Bank secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini. Terakhir adalah untuk menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Sistem pengendalian intern yang efektif menjadi dasar penyediaan laporan keuangan yang dapat dipercaya, serta pelaksanaan kegiatan operasional yang sehat dan aman. Terselenggaranya sistem pengendalian intern yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi Bank, antara lain:

1. Dewan Komisaris
2. Komite Audit
3. Direksi
4. Satuan Kerja Kepatuhan
5. Satuan Kerja Manajemen Risiko
6. Satuan Kerja Keuangan
7. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
8. Pejabat dan Pegawai Bank
9. Pihak Eksternal

REALISASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Jumlah Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
56	Mandatory E-learning	Januari – Desember 2020	Internal
41	Banking Knowledge	Januari – Desember 2020	Internal & External
35	Online Class (soft skills & technical skills)	Januari – Desember 2020	Internal & External



Selain itu, Direksi dan Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) dan disiplin pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi.

Sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh Bank mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum.

Kesesuaian dengan COSO (*Internal Control Framework*)

Sistem pengendalian intern Bank terdiri dari 5 (lima) komponen utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*)

Pengawasan oleh manajemen merupakan landasan utama dari sistem pengendalian intern. Direksi dan Dewan Komisaris secara aktif memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa strategi, kebijakan dan prosedur, serta struktur organisasi yang ditetapkan telah memadai untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang dihadapi oleh Bank. Selain itu, secara berkala Direksi dan Dewan Komisaris juga melakukan pemantauan dan kaji ulang terhadap kecukupan dan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern.

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan suatu budaya organisasi yang menekankan kepada seluruh karyawan Bank mengenai pentingnya pengendalian intern yang berlaku di Bank.

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*)

Identifikasi dan penilaian risiko merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang dihadapi Bank dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Risiko yang mempengaruhi pencapaian sasaran harus diidentifikasi, dinilai, dipantau dan dikelola secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pengendalian intern perlu segera dikaji ulang apabila terdapat risiko yang belum dikendalikan.

Kaji ulang dilaksanakan antara lain melalui evaluasi secara berkesinambungan mengenai pengaruh dari setiap perubahan lingkungan dan kondisi serta dampak dari pencapaian sasaran atau efektivitas pengendalian intern dalam kegiatan dan organisasi Bank.

3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*)

Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh karyawan Bank, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris. Kegiatan pengendalian akan berjalan efektif apabila direncanakan dan diterapkan secara tepat guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur secara konsisten telah dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank. Kegiatan pengendalian diterapkan pada seluruh tingkatan fungsional sesuai dengan struktur organisasi Bank.

Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang pada seluruh jenjang organisasi tidak memiliki peluang untuk melakukan dan/atau menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Bank harus mematuhi prinsip pemisahan fungsi yang dikenal sebagai "*Four-Eyes Principle*". Sistem pengendalian intern yang efektif mensyaratkan pemisahan fungsi dan menghindari pemberian wewenang serta tanggung jawab yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*). Seluruh aspek yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan harus diidentifikasi, dikelola dan dipantau oleh pihak independen, seperti akuntan publik.

4. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*)

Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan atau Kelemahan (*Monitoring Activities and Correcting Defficiencies*)

Bank harus melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan terhadap risiko utama harus diprioritaskan dan menjadi bagian dari kegiatan Bank, termasuk evaluasi secara berkala. Bank harus memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian intern secara terus-menerus berkaitan dengan perubahan kondisi intern dan ekstern, serta meningkatkan kapasitas sistem pengendalian intern tersebut agar senantiasa terlaksana secara efektif.

Kelemahan dalam pengendalian intern harus segera dilaporkan dan menjadi perhatian pejabat dan/atau Direksi yang berwenang. Kelemahan pengendalian intern yang material harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Kelima komponen utama di atas sejalan dengan komponen pengendalian yang ditetapkan dalam *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh The Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO), yaitu Control Environment (CE); Risk Assessment (RA); Control Activities (CA); Information and Communication (IC); serta Monitoring Activities (MA).

Kajian Ulang atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Bank telah memiliki mekanisme review atas penerapan sistem pengendalian internal secara berkala. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Internal Audit yang membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara langsung dan tidak langsung.

Internal Audit secara proaktif bersama-sama dengan Komite Audit berkomunikasi dan bekerjasama dengan Auditor Eksternal untuk menghasilkan analisis dan evaluasi yang komprehensif di bidang keuangan dan akuntansi. Secara umum, penerapan sistem pengendalian intern Bank mengacu pada Surat Edaran

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Berpegang pada pedoman tersebut, Bank menyempurnakan penilaian hasil audit yang mencakup: evaluasi atas kecukupan dan efektivitas desain serta implementasi pengendalian intern berdasarkan pendekatan kerangka pengendalian intern.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

Selama Tahun 2020, Tidak Terdapat perkara penting yang dihadapi Perusahaan, Entitas Anak, anggota Dewan Komisaris Dan anggota Direksi

SANKSI ADMINISTRASI

- BTPN : Rp 108.167.246,-
- BTPNS : Rp 38.650.000,-
- Dewan Komisaris & Direksi : nihil

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Bank BTPN telah menyediakan akses dan kemudahan informasi bagi para pemangku kepentingan mengenai Bank melalui beragam media komunikasi. Di antaranya adalah melalui:

Saluran Informasi	Alamat
Situs web (Bahasa Indonesia dan Inggris)	www.btpn.com
Call Center	1500300 (BTPN Call), +62 21 2450 5500 (International Call)
E-mail Sekretaris Perusahaan	Corporate.secretary@btpn.com
E-mail Komunikasi Korporasi	corporate.communications@btpn.com
E-mail Pengaduan Nasabah	btpncare@btpn.com
Keterbukaan Informasi melalui website Bank dan Bursa Efek Indonesia	www.btpn.com and idx.co.id
Siaran Pers	www.btpn.com and distribution through the media
Media Sosial	- Facebook: Bank BTPN Official - Twitter : @sahabatBTPN - Youtube: BTPN - LinkedIn: PT Bank BTPN Tbk - Instagram : @lifeatbtpn

KODE ETIK

Kode Etik berfungsi sebagai pedoman dasar bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen dan seluruh karyawan dalam bersikap dan berperilaku. Kajian Kode Etik dilakukan secara berkala, penyempurnaan Kode Etik terakhir telah disetujui oleh Direksi pada tanggal 30 September 2020 melalui Memorandum No. M/2020/EMEMO/SEP/03383



Prinsip-prinsip moral yang digariskan dalam Kode Etik merupakan elemen utama dari budaya di BTPN yang memuat antara lain:

Speak Your Mind

Merupakan saluran pelaporan dan penyampaian aspirasi yang aman dan terjamin kerahasiaannya, sehingga karyawan dapat mengungkapkan permasalahan yang berkaitan dengan perilaku yang tidak baik (*misconduct*) dan/atau kejadian *fraud*, aspirasi, dan/atau ide perbaikan.

Pokok-pokok Kode Etik

Berikut ini rincian dari pokok-pokok kode etik yang diberlakukan di Bank BTPN:

1. Kepatuhan & Manajemen Risiko
2. Benturan Kepentingan
3. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif
 - 3.1 Perlakuan Adil kepada Seluruh Karyawan
 - 3.2 Anti Diskriminasi dan Pelecehan
 - 3.3 Keamanan di tempat kerja
 - 3.4 Penggunaan Fasilitas Perusahaan
 - 3.5 Aktivitas di luar Perusahaan
 - 3.6 Penggunaan Sosial Media
 - 3.7 Komunikasi dengan LInK
4. Pengelolaan & Pengamanan Informasi
 5. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
 - 5.1 Hubungan dengan Nasabah
 - 5.2 Anti Pencucian Uang
 - 5.3 Hubungan dengan Rekanan atau Mitra Usaha
 - 5.4 Hubungan dengan Regulator
 - 5.5 Hubungan dengan Pemegang Saham dan Anak Perusahaan
 - 5.6 Penyuapan dan Korupsi
 - 5.7 Pemberian dan Penerimaan Hadiah
 - 5.8 Informasi Orang Dalam dan Transaksi Investasi dan Kepemilikan Pribadi

Upaya Penegakan Kode Etik

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus membangun perilaku yang sesuai standar etika Bank, BTPN telah melaksanakan *Induction Program* untuk eksekutif dan karyawan baru terkait Kode Etik. Selain itu secara berkala, dilakukan sosialisasi Kode Etik untuk memberikan pemahaman bagi karyawan serta memberikan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran Kode Etik.

Pernyataan Kode Etik Berlaku pada Seluruh Level Organisasi

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pihak Independen yang berada di bawah Dewan Komisaris, semua karyawan tanpa terkecuali wajib untuk membaca, mempelajari, dan memahami isi Kode Etik,

dan bersedia untuk menaati dan melaksanakan Kode Etik dengan sebaik-baiknya. Apabila terbukti melakukan pelanggaran atas Kode Etik, maka bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Bank BTPN.

Sosialisasi dan Penyebarluasan Kode Etik

Sosialisasi Kode Etik dilakukan dengan *E-mail Blast* dan penyegaran melalui *sistem E-Learning*, berlaku bagi seluruh jenjang di Bank BTPN baik yang baru bergabung maupun yang lama.

TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bank memiliki kebijakan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa yang antara lain mengatur tugas dan tanggung jawab Komite Pengadaan Barang dan Jasa, serta mengatur syarat serta pengelolaan vendor.

Kebijakan ini tertuang di dalam 'SOP (*Standard Operating Procedure*) Pengadaan Barang dan/atau Jasa'. Mencakup proses pengadaan melalui tender/*bidding* dan melalui proses Penunjukan Langsung. Pengkajian terakhir dilakukan bulan Agustus 2020.

WHISTLE BLOWING SYSTEM/PELAPORAN PELANGGARAN

Bank BTPN telah memiliki sarana penyampaian pelaporan pelanggaran melalui *Whistleblowing Channel*. Fasilitas tersebut merupakan sarana yang disediakan bagi semua karyawan untuk melaporkan permasalahan yang terkait dengan perilaku yang menyimpang serta kejadian *fraud*.

Termasuk di dalamnya adalah indikasi dan kecurigaan atas tindakan tersebut, baik yang sudah terjadi maupun yang sedang berlangsung dan/atau dicurigai dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

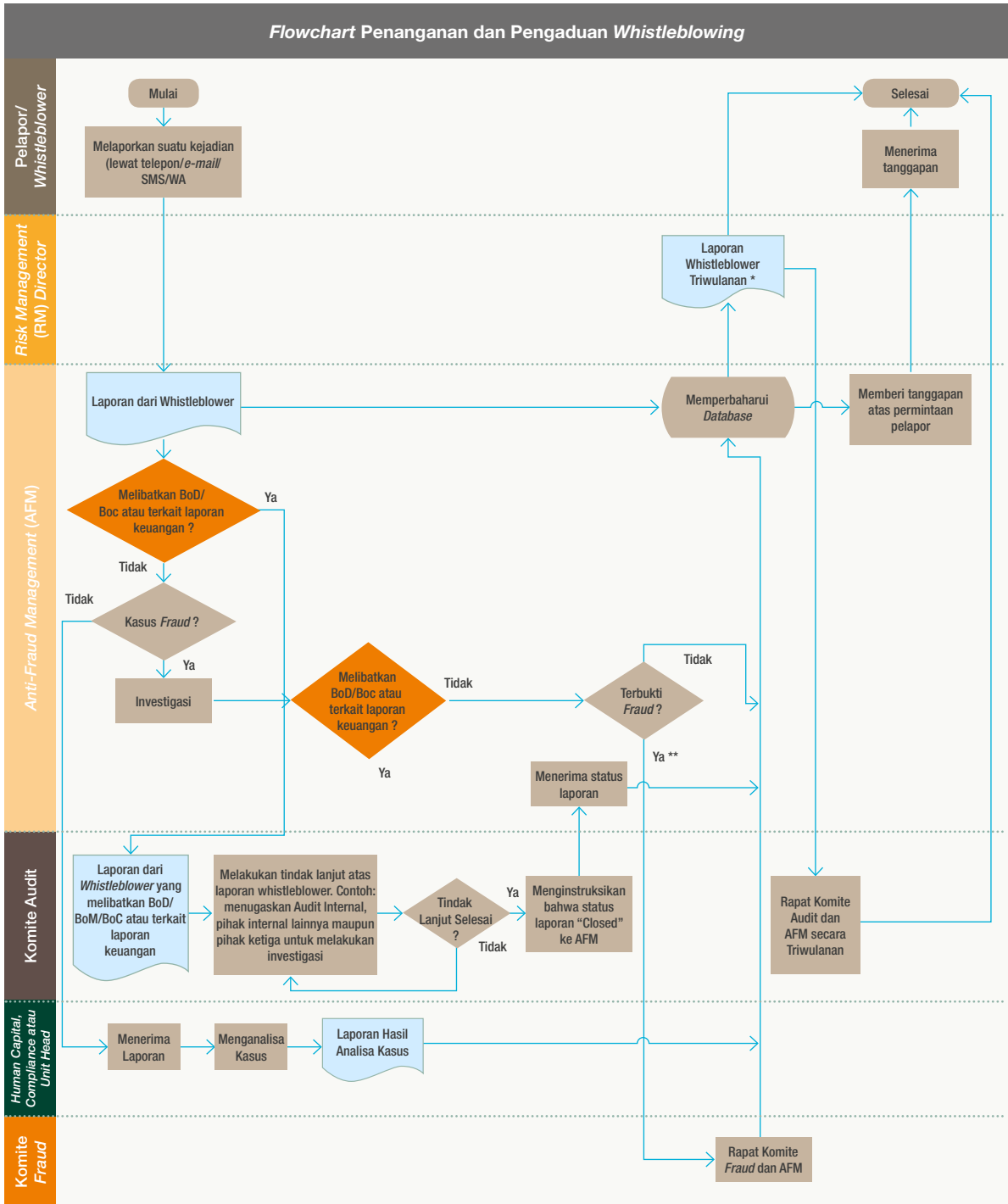
Whistleblowing Channel dapat digunakan oleh karyawan melalui *e-mail*, aplikasi Whatsapp, *hotline*, surat maupun secara tatap muka dengan staf AFM. BTPN berkomitmen menjamin kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelapor memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilaporkan dengan memenuhi unsur (4W+1H) yang meliputi:

1. Menjelaskan kejadian (*What*)
2. Pihak yang terlibat (*Who*)
3. Waktu kejadian (*When*)
4. Lokasi kejadian (*Where*)
5. Bagaimana terjadinya (*How*)

Mekanisme Pelaporan

Mekanisme Penyampaian dan Pengelolaan *Whistleblowing Channel* adalah sebagai berikut:



* Laporan mencakup informasi summary statistik seluruh laporan whistleblowing/kasus yang masuk dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh AFM
 ** Tindak lanjut mengacu pada Petunjuk Teknis Investigasi



Perlindungan bagi Pelapor

Bank memberikan perlindungan terhadap pelapor, yaitu kerahasiaan identitas dan isi laporan yang disampaikan.

Pihak Pengelola Pengaduan

Pengelolaan saluran *Whistleblowing* dilakukan oleh pihak internal yaitu Anti Fraud Management.

Jenis Sanksi bagi Pelanggar

Jenis sanksi bagi pelaku *fraud* mengacu pada ketentuan yang telah diatur pada Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku.

Penanganan Pengaduan dan Tindak Lanjut Tahun 2020

Selama tahun 2020, terdapat 48 pengaduan yang masuk melalui *Whistleblowing Channel* yang telah ditindaklanjuti dan diselesaikan.

BTPN senantiasa mengimbau karyawan untuk dapat menyampaikan aspirasi, ide dan permasalahan yang terkait penyimpangan dan *fraud* dengan berpedoman pada Prosedur Mekanisme Pelaporan *Whistleblowing*, sehingga secara berkelanjutan selalu menjadikan BTPN sebagai Bank terpercaya dan berintegritas terhadap masyarakat, karyawan dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

- 342 | Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- 343 | Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- 346 | Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia
- 348 | Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi yang Adil
- 349 | Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup
- 351 | Tanggung Jawab Sosial di Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 353 | Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Nasabah
- 354 | Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan



Program tanggung jawab sosial perusahaan pada prinsipnya adalah mengintegrasikan misi bisnis dengan misi sosial BTPN atau *corporate shared value*.



Rp **2,96** Miliar

Realisasi Anggaran CSR Tahun 2020

Seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19 serta perubahan pelaksanaan program, anggaran CSR yang direalisasikan ikut menyesuaikan.

Program CSR BTPN juga berorientasi pada penciptaan nilai tambah kepada pemangku kepentingan maupun komunitas sekitar, serta mendukung program tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) oleh PT Bank BTPN Tbk (“BTPN”, “Bank”) merupakan upaya untuk bisa memberikan perubahan yang berarti dalam hidup jutaan orang, khususnya bagi nasabah dan masyarakat di Indonesia. Karena itulah, kegiatan CSR bagi Bank bukan sekadar memenuhi kewajiban, namun ada tanggung jawab moral kepada para pemangku kepentingan.

Pada tahun 2020, mengingat ada pandemi COVID-19, Bank BTPN menyesuaikan fokus kegiatan pemberdayaan oleh unit kerja Daya. Kegiatan pemberdayaan berupa pelatihan dan seminar yang semula dilakukan melalui tatap muka, sejak akhir kuartal pertama tahun lalu tersebut disesuaikan menjadi pelatihan dan seminar daring (*online*).

Dalam memberikan materi melalui media informasi dan seminar *online* misalnya, Bank BTPN fokus kepada materi terkait gaya hidup sehat di era *new normal*. Selain itu, ada materi mengenai cara mengelola keuangan dan mempertahankan usaha di saat pandemi.

Selain fokus kepada pelatihan dan seminar *online*, Bank BTPN juga terus berupaya membantu nasabah dan masyarakat dengan memberikan berbagai informasi seputar kesehatan, keuangan, kewirausahaan. Serta, materi berkenaan dengan pelestarian lingkungan hidup melalui platform digital www.Daya.id.

Bank BTPN juga merasa terpanggil untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Hal itu, antara lain dilakukan melalui penyaluran donasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, mulai dari tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam menghadapi pandemi, hingga anak-anak pedalaman yang membutuhkan dukungan sinyal kuat agar mereka dapat belajar daring.



Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

KOMITMEN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Komitmen pelaksanaan CSR bagi BTPN mengacu pada prinsip implementasi dari kepatuhan dan tanggung jawab moral kepada para pemangku kepentingan. Untuk itulah, Bank melaksanakan dan menjaga komitmen implementasi CSR secara berkesinambungan agar kehadiran Bank semakin memberikan manfaat luas terhadap masyarakat. Selain itu, ikut menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalisir dampak negatif terhadap seluruh pemangku kepentingan.

Dasar dari komitmen untuk mendukung tanggung jawab sosial perusahaan, antara lain melalui implementasi atau penerapan keuangan berkelanjutan, seperti tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017. Bagi BTPN, upaya tersebut merupakan bagian penting dari komitmen untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dari sisi internal, komitmen pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan diimplementasikan melalui kehadiran unit khusus yang menanganinya, yaitu Daya. Pada prinsipnya, program ini mengintegrasikan misi bisnis dengan misi sosial BTPN atau *corporate shared value*.

ORGANISASI PELAKSANA

Komitmen pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di BTPN diimplementasikan melalui kehadiran unit khusus yang menanganinya, yaitu Daya. Semua kegiatan pemberdayaan di BTPN sepenuhnya berjalan di bawah koordinasi dari unit kerja tersebut.

Secara struktur pengelolaan, Daya berada di bawah koordinasi langsung Divisi Communications dan Daya, yang merupakan bagian dari direktorat Kepatuhan.

METODE DAN LINGKUP *DUE DILIGENCE* TERHADAP DAMPAK SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN DARI AKTIVITAS BANK

BTPN senantiasa melakukan kajian atas dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas usahanya dalam rangka memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Dalam melakukan analisis dampak dari kegiatan usaha Bank, prosesnya dilakukan secara internal dan masukan dari pihak eksternal, baik yang terdampak langsung maupun tidak.

Pihak eksternal yang dimaksud bersifat beragam. Dari masukan yang diterima melalui *contact center*, survei kepuasan nasabah, berdiskusi dengan nasabah dan karyawan, serta dari pihak lain seperti investor, media dan akademisi.

Masukan-masukan tersebut dijadikan bahan pertimbangan oleh internal Bank. Selanjutnya, ditentukan kegiatan yang akan direalisasikan serta para pemangku kepentingan yang dituju, berkenaan dengan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

STAKEHOLDER PENTING YANG TERDAMPAK ATAU TERPENGARUH KEGIATAN BANK

Hasil identifikasi BTPN, para pemangku kepentingan yang paling terpengaruh atau terdampak terhadap kegiatan Bank, sedikitnya ada enam pihak: Pemegang saham, nasabah, karyawan, mitra Bank, pemerintah dan regulator, serta masyarakat umum.

Dari hasil pemetaan para pemangku kepentingan tersebut, Bank menyusun program yang sesuai. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi lebih tepat guna serta memberikan manfaat besar atau maksimal.

ISU-ISU PENTING SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN TERKAIT DAMPAK KEGIATAN BANK

Dalam menetapkan isu penting, antara lain BTPN mengacu pada hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019. Hal itu penting, antara lain agar pemetaan isu yang dibuat oleh Bank sejalan dengan program pemerintah.

Hasil survei yang diacu tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Angka tersebut meningkat dibanding hasil survei 2016, yang masing-masing 29,7% dan 67,8%.

Untuk literasi keuangan, survei 2019 ini menggunakan indikator yang terdiri dari parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku. Sedangkan indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (*usage*) terhadap instrumen dan lembaga keuangan.

Kendati persentase masyarakat yang memahami dan memiliki akses terhadap layanan keuangan terus meningkat setiap tahun, namun upaya tersebut tidak boleh berhenti. Karena itulah, bagi BTPN, dua isu tersebut: literasi dan inklusi keuangan merupakan bagian dari isu penting.

Selain itu, dalam industri keuangan, isu terjadinya *fraud* atau kejahatan juga merupakan isu yang sangat penting. Dampak dari *fraud* bukan hanya kepada internal Bank, namun dapat berimplikasi pada perekonomian secara umum serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan.

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 juga menjadi isu penting. Kejadian tersebut telah memberikan dampak luar biasa bagi kegiatan Bank, termasuk para pemangku kepentingan.








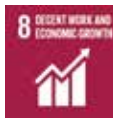


LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, BAIK YANG MERUPAKAN KEWAJIBAN MAUPUN YANG MELEBIHI KEWAJIBAN SERTA PROGRAM YANG MELEBIHI TANGGUNG JAWAB MINIMAL DAN RELEVAN DENGAN BISNIS BANK

Ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan, antara lain terkait dengan perlindungan terhadap nasabah, kepatuhan kepada regulator, serta masyarakat dan lingkungan yang diatur dalam regulasi keuangan berkelanjutan. Terhadap lingkup tersebut, BTPN telah mengimplementasikan sejumlah program secara berkesinambungan setiap tahun.

Selain itu, BTPN juga ikut mendukung dan berpartisipasi dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs), baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pelaksanaan aktivitas dan program-program tanggung jawab sosial perusahaan. Di antaranya adalah melalui program produk ramah lingkungan, operasional ramah lingkungan, kesehatan, dan upaya mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat yang masuk dalam 17 tujuan program SDGs.



DUKUNGAN PROGRAM CSR DALAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

No.	Nama Program/Kegiatan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
1	Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bisnis untuk nasabah dan masyarakat	   TUJUAN 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun TUJUAN 8 Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua TUJUAN 10 Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara
2	Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi di berbagai bidang untuk nasabah dan masyarakat	   TUJUAN 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun TUJUAN 8 Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua TUJUAN 10 Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara
3	Pelatihan untuk pengelolaan keuangan bagi nasabah dan masyarakat	   TUJUAN 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun TUJUAN 8 Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua TUJUAN 10 Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara
4	Kegiatan dalam bidang kesehatan untuk nasabah dan masyarakat	 TUJUAN 3 Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia

Informasi lebih lengkap tersedia dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2020 BTPN

STRATEGI DAN PROGRAM KERJA BANK BTPN DALAM MENANGANI ISU-ISU SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN SERTA DALAM UPAYA STAKEHOLDER ENGAGEMENT DAN MENINGKATKAN NILAI BAGI STAKEHOLDER DAN PEMEGANG SAHAM

BTPN memiliki program CSR yang sejalan dengan prinsip 3P (*People, Profit, Planet*), yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan manfaat bagi pemangku kepentingan melalui penerapan kebijakan alokasi anggaran CSR yang memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.

Program CSR BTPN juga berorientasi pada penciptaan nilai tambah kepada pemangku kepentingan maupun komunitas sekitar, serta mendukung program tujuan pembangunan berkelanjutan. Tak kalah pentingnya, program tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan oleh Daya lebih berkembang dengan prinsip *corporate share value*.

Berdasarkan prinsip tersebut, BTPN menurunkannya menjadi beragam program CSR, yang pada intinya adalah redistribusi nilai yang diperoleh Bank BTPN kepada para pemangku kepentingan. Salah satu program CSR yang dilakukan oleh BTPN untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan maupun komunitas adalah kolaborasi dengan beberapa lembaga perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan generasi yang akan datang.

PEMBIAYAAN DAN ANGGARAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Sepanjang tahun 2020, total anggaran yang direalisasikan untuk kegiatan CSR mencapai Rp2,96 miliar. Dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp9,1 miliar, menurun 68%.

Dana tersebut diperuntukkan bagi kegiatan di bidang pengembangan kapasitas diri, literasi keuangan, peningkatan kapasitas usaha dan kehidupan yang berkelanjutan.

(Rp Juta)

Kegiatan	2020	2019	2018
Pengembangan kapasitas diri	739	814	26
Literasi keuangan	218	1.575	875
Peningkatan kapasitas usaha	575	1.340	1.580
Kehidupan yang berkelanjutan	1.427	5.389	8.098
Total	2.958	9.119	10.580

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

346

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

BTPN memiliki komitmen untuk menghormati hak dasar yang berhak dimiliki semua orang sebagai manusia, antara lain mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya. Di lingkungan BTPN, seluruh aspek tersebut telah terpenuhi melalui beragam kebijakan dalam organisasi perusahaan.

Kebijakan BTPN terkait dengan aspek hak asasi manusia bersandar pada Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya mencakup:

- Hak untuk hidup
- Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
- Hak Mengembangkan Diri
- Hak Memperoleh Keadilan
- Hak atas Kebebasan Pribadi
- Hak atas Rasa Aman
- Hak atas Kesejahteraan
- Hak Turut Serta dalam Pemerintahan
- Hak Wanita/Kesamaan Gender
- Hak Anak

RUMUSAN CSR BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Dalam memberikan rumusan tanggung jawab terhadap aspek terkait HAM, BTPN melakukan identifikasi pengaruh kegiatan usaha yang berpotensi melakukan pelanggaran terhadap HAM. Karena itu, BTPN menyiapkan *contact center* sebagai pusat pengaduan bagi pemangku kepentingan terkait dengan dampak kegiatan usaha BTPN.

Mekanisme pengaduan juga dapat menggunakan *Whistle Blowing System (WBS)* yang sudah ada di Bank BTPN, sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Pengaduan yang diakomodir oleh BTPN tidak hanya dari pemangku kepentingan luar, tetapi juga pemangku kepentingan internal seperti karyawan.

Selain itu, dalam memberikan program pemberdayaan kepada nasabah dan masyarakat, BTPN tidak memihak kepada gender tertentu dalam menawarkan programnya bagi setiap segmen nasabah yang dilayani. Pada intinya, Bank BTPN memberikan kesempatan dan layanan yang sama bagi seluruh nasabah.



RENCANA KEGIATAN DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Selama tahun 2020, BTPN tetap fokus kepada hak nasabah dan masyarakat hingga karyawan dalam mengembangkan diri, melalui berbagai informasi, pelatihan dan seminar yang diberikan secara gratis. Hal itu dilakukan melalui *platform* digital www.Daya.id, serta aplikasi tatap muka daring yang dilakukan secara rutin.

Selain implementasi hak atas pengembangan diri, BTPN juga menyiapkan program berkenaan dengan implementasi atas prinsip lain yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia. Misalnya, terkait dengan hak atas kesejahteraan dan hak untuk hidup.

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN INISIATIF DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Implementasi kegiatan CSR di bidang hak asasi manusia telah sejalan dengan yang direncanakan. Pada program pengembangan diri, total jumlah partisipan yang telah mendapatkan informasi melalui *platform* digital www.Daya.id sepanjang tahun 2020 adalah sebanyak 833.926 partisipan. Sedangkan yang telah mengikuti pelatihan dan seminar *online* dari Daya adalah sebanyak 7.179 orang.

Selain kepada nasabah dan masyarakat, selama pandemi BTPN tetap memberikan berbagai pelatihan dan seminar melalui media daring, guna meningkatkan kapasitas karyawannya. Sepanjang tahun 2020, telah dilakukan kegiatan pelatihan dengan 87.970 peserta (karyawan).

BTPN juga telah memberikan pelatihan lainnya. Di antaranya, tentang komunikasi anak bagi nasabah Sinaya, pemberdayaan melalui media informasi daring kepada agen BTPN WOW! sebagai garda terdepan agar mereka bisa lebih mengembangkan diri.

Selain itu, dalam menghadapi pandemi COVID-19 BTPN telah menyalurkan donasi guna membantu tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam menghadapi pandemi. Sedangkan kepada anak-anak pedalaman, terkait dengan dukungan sinyal kuat agar mereka dapat belajar daring.

CAPAIAN DAN PENGHARGAAN BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Upaya BTPN telah memperluas jangkauan pemberdayaan melalui www.Daya.id guna memenuhi hak nasabah dan masyarakat dalam mengembangkan diri. Pada tahun 2020 BTPN memperoleh pengakuan dari pihak eksternal, berupa:

- Penghargaan utama kategori “Sustainability” atas Inovasi www.Daya.id dalam ajang “IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2020 (ICAI)” yang diselenggarakan oleh IDX Channel.
- Penghargaan HR Asia: “Best Companies to Work for in Asia 2020” yang diselenggarakan oleh HR Asia Award. Penghargaan tersebut diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang dianggap memiliki dan menjalankan kepemimpinan yang baik, komitmen tinggi terhadap pendidikan dan kesejahteraan karyawan melalui berbagai inisiatif serta inovasi tim *human resources* yang disampaikan melalui cara yang unik dan menarik kepada seluruh karyawan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi yang Adil

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG OPERASI YANG ADIL

Komitmen BTPN terkait dengan aspek tanggung jawab sosial bidang operasi yang adil, antara lain mengacu pada sejumlah regulasi yang ada. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain itu, pelaksanaan komitmen tersebut juga mengacu pada norma penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan BTPN. BTPN juga memiliki komitmen dalam kepatuhan terhadap seluruh regulasi, baik terkait dengan perbankan maupun pengelolaan perusahaan serta regulasi lain yang relevan dengan kegiatan bisnis BTPN.

RUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG OPERASI YANG ADIL

BTPN telah memiliki rumusan yang diuraikan dari beragam norma, baik dalam bentuk regulasi maupun praktik bisnis terbaik yang berlaku di industri. Di antaranya, terkait dengan:

1. Transparansi dan praktik jujur dalam transaksi bisnis

Rumusan terkait dengan praktik jujur, antara lain dilakukan melalui publikasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) secara berkala. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/1/DPNP tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Kredit yang dikeluarkan pada 15 Januari 2013.

Sedangkan terkait hubungan dengan mitra bisnis, BTPN senantiasa melakukan lelang terbuka dalam pengadaan yang disampaikan secara transparan. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan kesempatan dan perlakuan yang adil terhadap seluruh mitra.

2. Membangun relasi jangka panjang dan berkesinambungan untuk menghasilkan *outcome* yang positif

Meneruskan apa yang telah dijalankan sejak tahun 2019 setelah penggabungan usaha antara BTPN dengan SMBCI, program Daya telah dikembangkan melalui kolaborasi dengan para nasabah dari semua segmen, mulai dari mikro hingga korporasi. Dalam pengembangan dan pelaksanaan program, Daya mengajak nasabah mikro hingga korporasi dari berbagai kelompok usia dan gender untuk saling memberdayakan diri, keluarga dan masyarakat di lingkungan masing-masing.

RENCANA KEGIATAN DI BIDANG OPERASI YANG ADIL

Untuk memenuhi prinsip keadilan, BTPN akan terus berupaya menjalankan program pemberdayaan bagi semua segmen nasabah, kelompok umur dan gender. Selain itu, program tersebut dijalankan tanpa biaya, karena semua ditanggung oleh BTPN.

Rencana program tersebut, terutama mengacu pada prinsip “Membangun relasi jangka panjang dan berkesinambungan untuk menghasilkan *outcome* yang positif”. Melalui kolaborasi dan kesetaraan kesempatan itu, BTPN meyakini akan tercipta hubungan yang harmonis dan berkesinambungan dalam jangka panjang.

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN INISIATIF DI BIDANG OPERASI YANG ADIL

Pengembangan program Daya untuk nasabah korporasi dijalankan berdasarkan kebutuhan nasabah. Untuk menjawab hal tersebut, BTPN mengembangkan sumber daya manusia di internal perusahaan dan melakukan kolaborasi pelaksanaan program CSR dengan nasabah korporasi agar memenuhi ekspektasi nasabah tersebut.

Pengembangan program tersebut tetap mengacu kepada 4 (empat) Pilar Daya:

1. Pengembangan kapasitas diri,
2. Literasi keuangan,
3. Peningkatan kapasitas usaha,
4. Kehidupan yang berkelanjutan.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup

Berbagai rencana program yang dijalankan melalui unit kerja Daya selama pandemi COVID-19 tetap dapat dijalankan melalui media daring kepada berbagai segmen nasabah. Seminar dan pelatihan seperti finansial literasi untuk nasabah Jenius, pemeriksaan kesehatan untuk nasabah Purnabakti, seminar pemasaran digital untuk nasabah pengusaha, hingga pelatihan komunikasi anak dan *parenting* untuk nasabah Sinaya, tetap bisa dijalankan selama pandemi.

Kegiatan tersebut semuanya tanpa biaya. Tujuannya adalah dalam rangka menjaga hubungan bisnis jangka panjang guna memberikan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat untuk menghasilkan dampak positif dari hubungan bisnis.

CAPAIAN DAN PENGHARGAAN DI BIDANG OPERASI YANG ADIL

Kondisi pandemi COVID-19 membuat akses komunikasi dan interaksi langsung dengan nasabah dan masyarakat menjadi terbatas. Untuk itu, Bank berupaya mengoptimalkan *platform* digital www.Daya.id guna menawarkan solusi dan layanan keuangan yang lengkap ke berbagai segmen dan memperluas jangkauan pemberdayaan agar hubungan bisnis jangka panjang dengan mereka tetap terjaga.

Di tahun 2020, BTPN memperoleh penghargaan utama untuk kategori “Sustainability” atas inovasi www.Daya.id dalam ajang IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2020 (ICAI). Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh IDX Channel.

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Kegiatan usaha BTPN tidak bersentuhan secara langsung dengan lingkungan hidup. Kendati demikian, kondisi lingkungan hidup menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dan turut mempengaruhi kegiatan operasional BTPN.

Untuk itulah, BTPN berkomitmen penuh untuk memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan dan inisiatif yang memiliki wawasan lingkungan hidup, seperti mengurangi penggunaan listrik dan kertas dalam kegiatan operasional Bank.

TARGET DAN RENCANA KEGIATAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan penebangan pohon guna pembuatan kertas tanpa memperhitungkan keberlanjutannya, dan pemanfaatan energi fosil untuk pembangkit listrik juga tanpa memperhitungkan keberlanjutannya, akan membuat kedua sumber daya alam tersebut akan habis lebih cepat. Kondisi ini akan membuat keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup terganggu.

Dalam menghadapi risiko yang mungkin timbul akibat menipisnya kedua sumber daya yang dibutuhkan untuk operasional BTPN, maka dibuat peraturan dan kebijakan penggunaan kertas, BBM dan listrik dalam operasional Bank sehari-hari. Pada hal itulah rencana kegiatan BTPN di bidang lingkungan hidup dirumuskan.

Melalui rencana tersebut, diharapkan target untuk mendukung dan terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan dapat tercapai. Hal ini sekaligus menunjukkan kepedulian BTPN terhadap kondisi lingkungan hidup yang lebih baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN INISIATIF DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Melanjutkan kegiatan yang telah dijalankan pada tahun 2019, BTPN berupaya berpartisipasi untuk mengelola emisi CO₂ (Karbon dioksida) atau Gas Rumah Kaca (GRK) yang berasal dari pembakaran langsung bahan bakar fosil untuk pembangkitan energi listrik dan BBM transportasi. BTPN juga berupaya mengelola emisi GRK dengan memonitor, mencatat dan mengelola frekuensi perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka *project visit* maupun keperluan dinas lainnya.

Berdasarkan data pengelolaan atau konsumsi energi tersebut di atas dan kompilasi perjalanan dinas yang dilakukan, Perseroan menghitung besaran emisi CO₂ yang dihasilkan.

Melalui program Sahabat Daya, Bank mengizinkan karyawan untuk mengikuti kegiatan kerelawanan yang terkait dengan lingkungan. Mulai dari seminar lingkungan, hingga melakukan kegiatan menanam pohon di rumah masing-masing selama pandemi.

Selain itu, setiap tahun, BTPN melaksanakan kegiatan CSR di bidang lingkungan hidup melalui berbagai kegiatan, antara lain:

EFISIENSI PENGGUNAAN ENERGI

Untuk meminimalisir penggunaan energi, Menara BTPN memanfaatkan lampu LED untuk mengurangi konsumsi listrik serta sensor gerak dalam pengelolaan aktivitas pencahayaan. Selain itu, untuk mengoptimalkan pencahayaan alami, Gedung Menara BTPN tidak dilengkapi *window blinders* serta meminimalisasi penggunaan partisi *blocking*.

EFISIENSI PENGGUNAAN AIR

Untuk mengurangi konsumsi air dan mendukung pelestarian lingkungan, BTPN memanfaatkan teknologi *reverse osmosis* untuk memproduksi pasokan air minum.

EFISIENSI PENGGUNAAN KERTAS

BTPN mendorong pemanfaatan komunikasi elektronik untuk mengurangi penggunaan kertas. Untuk itu, sejak tahun 2018, Bank BTPN memperkenalkan *Front End System (FES)* di seluruh jaringan cabang sebagai *platform* yang lebih ramah lingkungan dengan mengurangi pemrosesan berbasis kertas.

Selain itu, BTPN juga mengembangkan dua *platform* digital, BTPN Wow! dan Jenius yang memanfaatkan teknologi perangkat seluler. Kedua platform tersebut mampu mengurangi kebutuhan nasabah untuk mengunjungi kantor cabang, sehingga mampu meminimalisasi konsumsi kertas untuk kebutuhan transaksi.

MEKANISME PENGADUAN MASALAH LINGKUNGAN

Mekanisme penyampaian pengaduan terkait masalah lingkungan tidak dikelola melalui saluran pengaduan khusus, namun terintegrasi melalui saluran pengaduan yang telah disediakan oleh BTPN saat ini, seperti melalui Layanan BTPN Care untuk nasabah maupun masyarakat.

SERTIFIKASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Sampai dengan saat ini BTPN belum memiliki sertifikasi di bidang lingkungan.



Tanggung Jawab Sosial di Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

BTPN meyakini bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan aset Bank yang sangat berharga dalam mencapai keberhasilan dan menentukan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, BTPN berkomitmen untuk mengelola SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dengan memberikan remunerasi yang kompetitif, kesempatan untuk pengembangan pribadi dan karier, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan serta meminimalisasi potensi terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat aktivitas kerja.

Dalam merealisasikan program pengelolaan SDM, BTPN mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain:

- UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi

TARGET DAN RENCANA KEGIATAN

BTPN akan selalu berupaya menciptakan program kegiatan terkait dengan sumber daya manusia (SDM) yang terstruktur dan berkesinambungan. Karena itu, memberikan kesempatan pengembangan kompetensi yang

merata kepada SDM di lingkungan BTPN dilakukan secara berkala dengan materi yang selalu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

Melalui kebijakan tersebut, upaya mencapai target terjadinya sinkronisasi antara kompetensi SDM dengan kebutuhan pencapaian kegiatan usaha Bank selalu beriringan. Dengan demikian, program-program pelatihan dan lainnya yang diberikan oleh BTPN memberikan nilai tambah yang besar bagi pemangku kepentingan internal.

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN INISIATIF BIDANG KETENAGAKERJAAN

Hingga tahun 2020, BTPN telah melaksanakan kegiatan CSR terkait ketenagakerjaan sebagai berikut:

• Perlakuan Adil

Memberikan kesempatan dan perlakuan yang adil bagi seluruh karyawan: tetap dan kontrak. Hal itu terkait dengan: promosi, mutasi, pengembangan kompetensi, fasilitas, remunerasi.

Serikat Karyawan: salah satu bentuk pengakuan perusahaan terhadap komitmen di bidang ketenagakerjaan. Sebab karyawan bukan komoditas, karena itu butuh perlindungan.

BTPN juga membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa melakukan praktik kerja atau magang di BTPN. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa kelak, di saat memasuki dunia kerja.

• Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Proses rekrutmen dan pengembangan karier SDM telah dilakukan secara adil dengan memberikan kesempatan kerja yang sama bagi semua kandidat, baik pria maupun wanita tanpa memandang suku, agama, ras, golongan politik maupun tingkatan sosial maupun hal-hal lain yang bersifat diskriminatif.

Pada tahun 2020, karyawan BTPN berjumlah 7.482 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.090 orang atau 41,3% merupakan karyawan perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa BTPN menjunjung tinggi asas kesetaraan dan kesempatan kerja dengan tidak membedakan antara pria dan wanita.

Dalam melakukan rekrutmen, BTPN juga mengutamakan tenaga kerja lokal (dalam negeri) sebagai bentuk pemberian kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, ketika BTPN membutuhkan keahlian tertentu yang tidak atau jarang ditemukan pada tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja asing yang direkrut bertujuan melakukan transfer pengetahuan kepada tenaga kerja lokal.

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN GENDER

Gender	2020	2019	2018
Laki-laki	4.392	4.584	4.751
Perempuan	3.090	3.156	3.051
Total	7.482	7.740	7.802

• Pelatihan dan Pengembangan Karier

BTPN memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh karyawan dalam mengikuti program pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi dan membantu mereka dalam pengembangan karier.

Sepanjang tahun 2020, BTPN merealisasikan investasi Rp60,4 miliar untuk kegiatan pelatihan dan pengembangan.

RINGKASAN PELAKSANAAN PELATIHAN

Description	Satuan	2020	2019	2018
Jumlah Program Pelatihan	Satuan penuh	281	279	207
Jumlah Peserta	Orang	87.970	77.743	26.263
Total Man-Days	Hari	30.038	28.267	18.734
Total Jam Pelatihan	Jam	240.305	226.137	221.655

• Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Lingkungan kerja yang aman dan sehat merupakan prioritas utama bagi BTPN. Hal ini diimplementasikan melalui pengembangan kebijakan formal tentang manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, yang terintegrasi dengan kebijakan pengelolaan lingkungan sejak tahun 2017. Bank BTPN juga memiliki komitmen mematuhi seluruh peraturan K3 yang berlaku serta standar-standar yang relevan.

• Hubungan Industrial

BTPN berkomitmen untuk menciptakan hubungan yang harmonis, selaras dan berkeadilan dengan seluruh karyawan. BTPN juga menghormati hak karyawan untuk membentuk dan berpartisipasi dalam serikat pekerja.

Oleh Karena itu, BTPN memfasilitasi pembentukan Serikat Pekerja BTPN Tbk yang dibentuk sejak 27 September 2007 dan terdaftar dengan nomor registrasi 256/DPP.SP.BTPN-CTT.22-DISNAKER/2007 di Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BTPN senantiasa berupaya membina hubungan saling mendukung dengan Serikat Pekerja melalui konsep kemitraan dan dialog. Untuk memastikan bahwa karyawan memahami hak dan tanggung jawab, BTPN secara rutin menyebarluaskan informasi tentang peraturan dan ketentuan ketenagakerjaan kepada seluruh karyawan.

• Program Pensiun

Bagi karyawan yang memasuki masa pensiun, BTPN menawarkan berbagai program pendukung guna mempersiapkan mereka dengan hidup setelah masa kerja profesional. Karyawan dapat berpartisipasi dalam berbagai pilihan program pelatihan di bidang kewirausahaan, pengelolaan keuangan, dan persiapan mental sebelum masa pensiun.

• Tingkat Turnover Karyawan

BTPN menciptakan lingkungan kerja yang aman, harmonis dan kondusif dengan salah satu tujuan untuk meningkatkan loyalitas dan menekan tingkat *turnover* karyawan. Pada tahun 2020, tingkat *turnover* karyawan tercatat sebesar 7,4%, menurun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 11,1%.

• Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Karyawan BTPN bebas untuk mendiskusikan tantangan yang dihadapi dengan atasan (termasuk dengan atasan dari atasan langsung) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama PT Bank BTPN, Tbk (penyelesaian secara internal).

Seandainya Dalam hal diskusi dengan atasan dan atasan langsung dirasa belum dapat menyelesaikan permasalahan, maka karyawan dapat didampingi oleh Serikat Pekerja untuk menindaklanjuti penyelesaiannya. Dan untuk proses selanjutnya diselesaikan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan (penyelesaian secara eksternal).



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Nasabah

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

BTPN senantiasa berupaya memberikan layanan terbaik kepada nasabah. Pelayanan tersebut meliputi penyediaan produk-produk terbaik serta pelayanan yang konsisten, terpercaya, aman, menyeluruh, dan penuh perhatian kepada nasabah.

BTPN juga senantiasa memberi prioritas pada perlindungan nasabah. Untuk tujuan tersebut, BTPN mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi, kerahasiaan dan keamanan data/informasi nasabah, serta penanganan keluhan nasabah yang cepat dan mudah.

Dalam memberikan layanan yang baik, BTPN mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Selain itu, Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya mematuhi ketentuan dari regulator, setiap tahun BTPN selalu melaporkan Rencana Bisnis Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pengembangan produk dan layanan yang akan dilakukan pada tahun berikut.

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN DAMPAK KEGIATAN

Seluruh rangkaian kegiatan tanggung jawab sosial terhadap nasabah dilaksanakan melalui seminar dan pelatihan *online* serta *platform* www.Daya.id.

INFORMASI PRODUK

BTPN memberikan informasi tentang produk dan jasa secara terbuka yang mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Selain melalui kantor cabang yang ada, publik dan nasabah dapat menelusuri situs <http://www.btpn.com>.

Seluruh produk yang dikeluarkan oleh BTPN dipastikan telah memenuhi unsur kepatuhan terhadap regulator. Sedangkan dari sisi internal, BTPN juga telah melakukan uji terhadap potensi risiko dari setiap produk, sehingga setiap produk dan jasa yang dikeluarkan oleh BTPN bersifat aman bagi nasabah.

SARANA, JUMLAH DAN PENANGGULANGAN PENGADUAN NASABAH

BTPN menangani setiap keluhan nasabah yang dilakukan secara khusus oleh *Customer Care* dalam Divisi Customer Experience Center. Setiap pengaduan yang diterima akan diselesaikan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja. Dalam hal BTPN belum dapat menyelesaikan pengaduan nasabah sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan/*service level agreement* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BTPN akan menyampaikan surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan.

Sepanjang tahun 2020, jumlah pengaduan yang diterima dan ditangani adalah sebagai berikut:

No.	Jenis	Selesai		Dalam Proses		Tidak Selesai		Jumlah Pengaduan
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
1	ATM	39.166	98%	741	2%	-	-	39.907
2	Bancassurance	2	100%	-	0%	-	-	2
3	BTPN Wow!	1.505	97%	40	3%	-	-	1.545
4	BTPN Wow! Low	1	100%	-	0%	-	-	1
5	Dana Pihak Ketiga	304	97%	9	3%	-	-	313
6	E-Statement	11	100%	-	0%	-	-	11
7	Flexi Cash	1.314	97%	44	3%	-	-	1.358
8	Internet Banking	70	99%	1	1%	-	-	71
9	ISME	4	100%	-	0%	-	-	4
10	Jenius	84.737	99%	632	1%	-	-	85.369
11	Join Finance	1.714	97%	58	3%	-	-	1.772
12	Kredit Pensiun	217	89%	27	11%	-	-	244
13	Kredit UMK	42	89%	5	11%	-	-	47
14	Mobile Banking	142	99%	2	1%	-	-	144
15	Modal Kerja	-	0%	-	0%	-	-	0
16	Reksadana	3	100%	-	0%	-	-	3
17	Remittance	-	0%	-	0%	-	-	0
18	RTGS SKN	47	98%	1	2%	-	-	48
19	Standing Instruction	2	100%	-	0%	-	-	5
20	Wow! Link	5	100%	-	0%	-	-	5
21	Lainnya	-	0%	-	0%	-	-	0
Total		129.286	99%	1.560	1%	-	-	130.846

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Bidang Pengembangan Sosial

Kemasyarakatan

KOMITMEN DAN TANGGUNG JAWAB

Komitmen BTPN dalam pengembangan sosial kemasyarakatan, antara lain mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.

INFORMASI TENTANG ISU-ISU SOSIAL YANG RELEVAN

Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menjadi salah satu acuan BTPN dalam merumuskan isu yang relevan terkait dengan isu sosial terkait BTPN. Hal itu penting, antara lain agar pemetaan isu yang dibuat oleh BTPN sejalan dengan program pemerintah.

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Angka tersebut meningkat dibanding hasil survei 2016, yang masing-masing 29,7% dan 67,8%.

Sebagai wujud dukungan terhadap kebijakan tersebut, BTPN mengembangkan program-program literasi dan inklusi keuangan. Baik melalui produk, layanan maupun aktivitas BTPN yang dikhususkan kepada literasi dan inklusi keuangan.

INFORMASI TENTANG RISIKO SOSIAL YANG DIKELOLA

Rendahnya literasi dan inklusi keuangan di masyarakat dapat berdampak terhadap rendahnya pemahaman terhadap produk dan layanan perbankan yang aman. Salah satu bentuk dampak nyatanya adalah banyak masyarakat yang sudah terkena dampak dari investasi ilegal yang tidak dapat dipercaya.

Selain itu, ada beberapa risiko lain terkait dengan dampak rendahnya literasi dan inklusi keuangan. Misalnya, masyarakat tidak mengetahui cara mengelola keuangan yang baik, tidak memiliki tujuan dari pengelolaan keuangan, melakukan penempatan instrumen investasi di tempat yang tidak sesuai dan akhirnya merugikan.

BIAYA YANG DIKELUARKAN

Total donasi yang telah dikeluarkan untuk kegiatan terkait pengembangan sosial kemasyarakatan sepanjang tahun 2020 adalah sebesar Rp2.96 miliar.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Selama tahun 2020, BTPN telah ikut serta dalam membantu berbagai pihak yang terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19 melalui berbagai donasi. Di antaranya, donasi tersebut diberikan untuk tenaga kesehatan.

Selain itu, BTPN juga mendukung kegiatan belajar bagi anak-anak pedalaman yang membutuhkan sinyal kuat agar mereka dapat belajar daring.

DAMPAK KEGIATAN

Dampak dari kegiatan dapat dilihat dari keterlibatan nasabah dan masyarakat dalam kegiatan literasi keuangan yang diselenggarakan oleh BTPN. Terkait dengan hal itu, total jumlah peserta yang telah mengikuti kegiatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan khusus untuk pemenuhan kewajiban BTPN selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) selama tahun 2020 adalah sebanyak 14.976 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari nasabah, hingga non nasabah.



LAPORAN KEUANGAN 2020



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019/
*YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019***

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
PT BANK BTPN TBK DAN ENTITAS ANAK**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENTS
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED
31 DECEMBER 2020 AND 2019
PT BANK BTPN TBK AND SUBSIDIARY**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

- Nama** : Ongki Wanadjati Dana
Alamat Kantor : Menara BTPN
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5 - 5.6
Jakarta 12950
Alamat Rumah : Jl. Bungur Besar No.97
RT/RW 010/001, Kel. Kemayoran
Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat
Nomor Telepon : (021) 30026200
Jabatan : Direktur Utama
- Nama** : Hanna Tantani
Alamat Kantor : Menara BTPN
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5 - 5.6
Jakarta 12950
Alamat Rumah : Jl. Pegangsaan Indah Barat A1/40
Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading
Jakarta Utara
Nomor Telepon : (021) 30026200
Jabatan : Direktur Keuangan

- Name** : Ongki Wanadjati Dana
Office address : Menara BTPN
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5 - 5.6
Jakarta 12950
Residential address : Jl. Bungur Besar No.97
RT/RW 010/001, Kel. Kemayoran
Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat
Telephone : (021) 30026200
Title : President Director
- Name** : Hanna Tantani
Office address : Menara BTPN
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5 - 5.6
Jakarta 12950
Residential address : Jl. Pegangsaan Indah Barat A1/40
Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading
Jakarta Utara
Telephone : (021) 30026200
Title : Finance Director

Menyatakan bahwa:

Declare that:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bank BTPN Tbk dan Entitas Anak;
- Laporan keuangan konsolidasian PT Bank BTPN Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bank BTPN Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - Laporan keuangan konsolidasian PT Bank BTPN Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank BTPN Tbk dan Entitas Anak.

- We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Bank BTPN Tbk and Subsidiary;
- The consolidated financial statements of PT Bank BTPN Tbk and Subsidiary have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
- All information in the consolidated financial statements of PT Bank BTPN Tbk and Subsidiary has been disclosed in a complete and truthful manner;
 - The consolidated financial statements of PT Bank BTPN Tbk and Subsidiary do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;
- We are responsible for PT Bank BTPN Tbk and Subsidiary's internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus this statement is made truthfully.

JAKARTA,
26 Februari/February 2021

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/For and on behalf of the Board of Directors

Ongki Wanadjati Dana
Direktur Utama/
President Director

Hanna Tantani
Direktur Keuangan/
Finance Director



Siddharta Widjaja & Rekan Registered Public Accountants

33rd Floor Wisma GKBI
28, Jl. Jend. Sudirman
Jakarta 10210
Indonesia
+62 (0) 21 574 2333 / 574 2888

Laporan Auditor Independen

No.: 00034/2.1005/AU.1/07/0851-2/1/II/2021

Para Pemegang Saham,
Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank BTPN Tbk:

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bank BTPN Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan, yang berisi suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

No.: 00034/2.1005/AU.1/07/0851-2/1/II/2021

The Shareholders,
The Board of Commissioners and Board of Directors
PT Bank BTPN Tbk:

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Bank BTPN Tbk and its subsidiary, which comprise the consolidated statement of financial position as of 31 December 2020, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and notes, comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free of material misstatement.



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan kami, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, kami mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank BTPN Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on our judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, we consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Bank BTPN Tbk and its subsidiary as of 31 December 2020, and their consolidated financial performance and their consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



Hal lain

Audit kami dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi tambahan dalam Lampiran 1 sampai dengan 4, yang terdiri dari laporan posisi keuangan PT Bank BTPN Tbk (entitas induk saja) tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi tersebut telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian dan menurut opini kami disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Other matter

Our audit was performed for the purpose of forming an opinion on the consolidated financial statements as a whole. The supplementary information included in Appendix 1 to 4, which comprises the statement of financial position of PT Bank BTPN Tbk (parent entity only) as of 31 December 2020, and the related statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, is presented for the purpose of additional analysis and is not a required part of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. The information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the consolidated financial statements and in our opinion is fairly stated, in all material respects, in relation to the consolidated financial statements as a whole.

Kantor Akuntan Publik/Registered Public Accountants
Siddharta Widjaja & Rekan

Liana Lim, S.E., CPA

Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP. 0851

26 Februari 2021

26 February 2021





**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December		
		2020	2019	
ASET				ASSETS
Kas	2h, 4	2,433,196	2,299,062	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2h, 2j, 5	5,616,968	8,987,079	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank-bank lain:				Current accounts with other banks
- Pihak ketiga		526,017	331,454	Third parties -
- Pihak berelasi	2g, 37	370,551	725,450	Related parties -
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	2i	(497)	-	Less: Allowance for impairment losses
	2h, 2j, 6	<u>896,071</u>	<u>1,056,904</u>	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain		16,954,868	8,839,876	Placements with Bank Indonesia and other banks
Pendapatan bunga yang masih akan diterima		49,471	74,228	Accrued interest income
	2h, 2k, 7	<u>17,004,339</u>	<u>8,914,104</u>	
Efek-efek				Securities
- Pihak ketiga		14,672,468	10,568,519	Third parties -
- Pihak berelasi	2g, 37	132,188	86,105	Related parties -
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima		215,898	48,233	Accrued interest/margin income
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	2i	(291)	(6)	Less: Allowance for impairment losses
	2h, 2l, 8	<u>15,020,263</u>	<u>10,702,851</u>	
Tagihan derivatif				Derivative receivables
- Pihak ketiga		867,154	778,690	Third parties -
- Pihak berelasi	2g,37	49,928	61,682	Related parties -
	2h, 2m, 9	<u>917,082</u>	<u>840,372</u>	
Tagihan akseptasi				Acceptance receivables
- Pihak ketiga		1,490,634	1,692,460	Third parties -
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	2i	(5,694)	(69)	Less: Allowance for impairment losses
	2h, 2n, 10	<u>1,484,940</u>	<u>1,692,391</u>	
Pinjaman yang diberikan:				Loans:
- Pihak ketiga		125,482,985	130,627,900	Third parties -
- Pihak berelasi	2g, 37	1,206,768	2,132,709	Related parties -
Pembiayaan/piutang syariah:				Sharia financing/receivables:
- Pihak ketiga		9,522,866	8,999,574	Third parties -
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima		679,556	827,359	Accrued interest/margin income
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	2i	(3,422,325)	(1,467,199)	Less: Allowance for impairment losses
	2h, 2o, 11	<u>133,469,850</u>	<u>141,120,343</u>	
Penyertaan saham				Investment in shares
- Pihak ketiga		22	22	Third parties -
- Pihak berelasi	2g	22,500	22,500	Related parties -
	2h, 2p	<u>22,522</u>	<u>22,522</u>	
Beban dibayar dimuka	2q, 2ai, 12	1,881,912	2,234,521	Prepayments
Klaim pengembalian pajak	2ac, 13a	209,055	321,312	Claims for tax refund
Aset pajak tangguhan	2ac, 13f	467,885	144,874	Deferred tax assets
Aset tetap		4,883,148	3,751,845	Fixed assets
Dikurangi: Akumulasi penyusutan		(2,525,161)	(1,858,099)	Less: Accumulated depreciation
	2r, 2ai, 14	<u>2,357,987</u>	<u>1,893,746</u>	
Pindahan		181,782,070	180,230,081	Carried forward

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December		
		2020	2019	
ASET (lanjutan)				ASSETS (continued)
Pindahan		181,782,070	180,230,081	Carried forward
Aset takberwujud		2,528,427	2,197,397	Intangible assets
Dikurangi: Akumulasi amortisasi		(1,487,828)	(1,128,855)	Less: Accumulated amortization
	2s, 15	<u>1,040,599</u>	<u>1,068,542</u>	
Aset lain-lain		343,479	332,931	Other assets
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(170)	(169)	Less: Allowance for impairment losses
	2i	<u>(170)</u>	<u>(169)</u>	
	2h, 2t, 16	<u>343,309</u>	<u>332,762</u>	
JUMLAH ASET		<u>183,165,978</u>	<u>181,631,385</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segera	2h, 17	59,404	18,268	Obligations due immediately
Bagi hasil yang belum dibagikan	2z	18,666	21,861	Undistributed revenue sharing
Simpanan nasabah				Deposits from customers
- Pihak ketiga		88,425,046	78,849,654	Third parties -
- Pihak berelasi	2g, 37	4,440,494	539,161	Related parties -
Beban bunga yang masih harus dibayar		268,383	210,601	Accrued interest expenses
	2h, 2u, 18	<u>93,133,923</u>	<u>79,599,416</u>	
Simpanan dari bank-bank lain				Deposits from other banks
- Pihak ketiga		644,908	4,342,049	Third parties -
- Pihak berelasi	2g, 37	5,904,428	7,291,425	Related parties -
Beban bunga yang masih harus dibayar		370	57,081	Accrued interest expenses
	2h, 2u, 19	<u>6,549,706</u>	<u>11,690,555</u>	
Liabilitas derivatif				Derivative payables
- Pihak ketiga		784,385	840,876	Third parties -
- Pihak berelasi	2g, 37	102,772	54,071	Related parties -
	2h, 2m, 9	<u>887,157</u>	<u>894,947</u>	
Liabilitas akseptasi				Acceptance payables
- Pihak ketiga		605,597	730,936	Third parties -
- Pihak berelasi	2g, 37	161,685	157,523	Related parties -
	2h, 2n, 10	<u>767,282</u>	<u>888,459</u>	
Utang pajak:				Taxes payables:
- Pajak penghasilan badan		287,928	119,060	Corporate income tax -
- Pajak lain-lain		175,075	117,833	Other taxes -
	2ac, 13b	<u>463,003</u>	<u>236,893</u>	
Efek-efek yang diterbitkan:				Securities issued:
- Surat utang jangka menengah	20a	-	1,301,409	Medium term notes -
- Utang obligasi	20b	993,045	1,889,219	Bonds payable -
Beban bunga yang masih harus dibayar		7,379	26,286	Accrued interest expenses
	1d, 2h, 2v	<u>1,000,424</u>	<u>3,216,914</u>	
Pindahan		102,879,565	96,567,313	Carried forward

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December		
		2020	2019	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY (continued)
LIABILITAS (lanjutan)				LIABILITIES (continued)
Pindahan		102,879,565	96,567,313	Carried forward
Pinjaman yang diterima:				Borrowings:
- Pihak ketiga		8,233,408	6,868,795	Third parties -
- Pihak berelasi	2g, 37	22,852,789	31,193,978	Related parties -
Biaya transaksi yang belum diamortisasi		(21,908)	(15,318)	Unamortised transaction costs
Beban bunga yang masih harus dibayar		119,055	141,471	Accrued interest expenses
	2h, 2w, 21	<u>31,183,344</u>	<u>38,188,926</u>	
Akrual	2h, 22	347,446	451,386	Accruals
Liabilitas imbalan kerja karyawan:				Employee benefits liabilities:
- Imbalan kerja jangka pendek		376,891	560,620	Short-term employee benefits -
- Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya		160,042	37,458	Post-employment benefits and other long-term employee benefits
	2x, 23	<u>536,933</u>	<u>598,078</u>	
Liabilitas pajak tangguhan	2ac, 13f	-	53,052	Deferred tax liabilities
Liabilitas sewa	2ai	589,736	-	Lease liabilities
Liabilitas lain-lain	2h, 2i, 25	624,855	704,845	Other liabilities
Pinjaman subordinasi		6,111,750	6,038,888	Subordinated loans
Beban bunga yang masih harus dibayar		4,230	6,305	Accrued interest expenses
	2g, 2h, 2y, 24, 37	<u>6,115,980</u>	<u>6,045,193</u>	
JUMLAH LIABILITAS		142,277,859	142,608,793	TOTAL LIABILITIES
DANA SYIRKAH TEMPORER				TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Bukan bank				Non-bank
- Pihak ketiga				Third parties -
Tabungan mudharabah		167,171	104,628	Mudharabah savings
Deposito mudharabah		7,717,545	7,428,302	Mudharabah time deposits
- Pihak berelasi	2g, 37			Related parties -
Tabungan mudharabah		112	250	Mudharabah savings
Deposito mudharabah		38,538	17,484	Mudharabah time deposits
		<u>7,923,366</u>	<u>7,550,664</u>	
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	2z, 26	7,923,366	7,550,664	TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December		
		2020	2019	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY (continued)
EKUITAS				SHAREHOLDERS' EQUITY
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas induk				Equity attributable to owners of the parent
Modal saham:				Share capital:
Modal dasar Rp 300.000 terdiri dari: 15.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 20 (nilai penuh) per saham				Authorised capital of Rp 300,000 consists of: 15,000,000,000 shares with par value of Rp 20 (full amount) per share
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 8.148.931.869 saham (31 Desember 2019: 8.148.928.869 saham)	2aa, 27	162,979	162,979	Issued and fully paid-up capital of 8,148,931,869 shares (31 December 2019: 8,148,928,869 shares)
Tambahan modal disetor	1b	11,158,710	11,158,702	Additional paid-in capital
Cadangan revaluasi aset tetap	2r	801,553	801,553	Reserve on revaluation of fixed assets
Cadangan pembayaran berbasis saham	2ab, 28	-	244,012	Share-based payment reserve
Cadangan nilai wajar - bersih	2l	101,255	12,176	Fair value reserve - net
Transaksi dengan kepentingan non-pengendali	1f	(24,267)	(24,267)	Transaction with non-controlling interest
Saldo laba				Retained earnings
- Dicadangkan		67,596	44,361	Appropriated -
- Belum dicadangkan		18,949,493	17,730,931	Unappropriated -
		<u>31,217,319</u>	<u>30,130,447</u>	
Komponen ekuitas lainnya	2ab, 28	260,801	-	Other equity components
Saham tresuri	1c, 2aa	(262,404)	(262,404)	Treasury shares
		<u>31,215,716</u>	<u>29,868,043</u>	
Kepentingan non-pengendali		<u>1,749,037</u>	<u>1,603,885</u>	Non-controlling interest
JUMLAH EKUITAS		<u>32,964,753</u>	<u>31,471,928</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS		<u>183,165,978</u>	<u>181,631,385</u>	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS, AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019***
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	2019 ^{a)}	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				OPERATING INCOME AND EXPENSES
Pendapatan bunga	48	12,366,009	14,223,627	<i>Interest income</i>
Pendapatan syariah		4,037,474	4,457,352	<i>Sharia income</i>
	2g, 2ad, 30, 37	16,403,483	18,680,979	
Beban bunga	48	(5,281,544)	(7,165,697)	<i>Interest expenses</i>
Hak pihak ketiga atas hasil dana syirkah temporer		(497,511)	(523,587)	<i>Third parties' shares on return of temporary syirkah funds</i>
	2g, 2ad, 31, 37	(5,779,055)	(7,689,284)	
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH BERSIH		10,624,428	10,991,695	NET INTEREST AND SHARIA INCOME
Pendapatan operasional lainnya:				Other operating income:
Pendapatan operasional lainnya	2ae, 2af, 32, 48	959,885	1,032,034	<i>Other operating income</i>
Keuntungan dari selisih kurs dan transaksi derivatif bersih	2e, 2m, 48	728,952	584,544	<i>Net gain on foreign exchange and derivative transactions</i>
		1,688,837	1,616,578	
Beban operasional lainnya:				Other operating expenses:
Beban kepegawaian	2g, 2x, 2ab, 2af, 33, 37, 48	(3,211,395)	(3,338,585)	<i>Personnel expenses</i>
Beban umum dan administrasi	2af, 34, 48	(3,062,933)	(3,155,976)	<i>General and administrative expenses</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	2i, 35	(2,799,638)	(1,445,882)	<i>Provision for impairment losses</i>
Beban operasional lainnya	2af, 36, 48	(608,785)	(635,311)	<i>Other operating expenses</i>
		(9,682,751)	(8,575,754)	
PENDAPATAN OPERASIONAL BERSIH		2,630,514	4,032,519	NET OPERATING INCOME
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL				NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)
Pendapatan non-operasional		10,750	5,068	<i>Non-operating income</i>
Beban non-operasional		(8,188)	(18,665)	<i>Non-operating expenses</i>
		2,562	(13,597)	
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		2,633,076	4,018,922	PROFIT BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2ac, 13c	(627,399)	(1,026,504)	INCOME TAX EXPENSE
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		2,005,677	2,992,418	NET PROFIT FOR THE YEAR

*Setelah reklasifikasi (Catatan 48)

^{a)}After r

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	2019 ^{a)}	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				OTHER COMPREHENSIVE INCOME:
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	2x, 23	(89,257)	(30,767)	Remeasurements of employee benefits liabilities
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	13f	24,400	7,692	Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss
		<u>(64,857)</u>	<u>(23,075)</u>	
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will be reclassified to profit or loss
Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2l	113,547	11,306	Unrealised gain on fair value changes of available for sale and measured at fair value through other comprehensive income securities
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	13f	(24,492)	(2,827)	Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss
		<u>89,055</u>	<u>8,479</u>	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF INCOME TAX
		<u>24,198</u>	<u>(14,596)</u>	
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF INCOME TAX
		<u>2,029,875</u>	<u>2,977,822</u>	
LABA BERSIH YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		1,749,293	2,572,528	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali		256,384	419,890	Non-controlling interest
		<u>2,005,677</u>	<u>2,992,418</u>	
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		1,776,256	2,555,357	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali		253,619	422,465	Non-controlling interest
		<u>2,029,875</u>	<u>2,977,822</u>	
LABA BERSIH PER SAHAM (NILAI PENUH)				EARNINGS PER SHARE (FULL AMOUNT)
Dasar	2ag, 40	<u>217</u>	<u>327</u>	Basic
Dilusian		<u>217</u>	<u>324</u>	Diluted

^{a)}Setelah reklasifikasi (Catatan 48)

^{a)}After r

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan/ Notes	Modal ditempaikan dan disetor penuh/ Issued and fully paid-up share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Cadangan revaluasi aset tetap/ Reserve on revaluation of fixed assets	Cadangan pembayaran berbasis saham/ Share-based payment reserve	Cadangan nilai wajar - bersih/ Fair value reserve - net	Transaksi dengan kepentingan non-pengendali/ Transaction with non-controlling interest	Saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya/ Appropriated retained earnings	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated retained earnings	Saham treasury shares	Jumlah/ Total	Kepentingan non- pengendali/ Non- controlling interest	Jumlah ekuitas/ Total equity	Balance as of 1 January 2019	
													Net profit for the year	Changes in fair value of available for sale and measured at fair value through other comprehensive income financial assets Remeasurements of employee benefits liabilities Related tax effect
	117.033	1.458.886	801.553	281.748	3.527	(24.267)	30.361	15.198.223	(262.404)	17.604.660	1.181.670	18.786.330		
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	2.572.528	-	2.572.528	419.890	2.992.418		
Penghasilan komprehensif lainnya:														
Perubahan nilai wajar atas aset finansial yang diukur pada nilai wajar diklasifikasikan sebagai keuntungan dan kerugian lainnya					11.533	-	-	-	-	11.533	(227)	11.306		
Penghasilan komprehensif lain	2i	-	-	-	-	-	-	(34.427)	-	(34.427)	3.660	(30.767)		
Penilaian kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	2k	-	-	-	(2.884)	-	-	8.607	-	(2.884)	(858)	4.865		
Efek pajak terkait		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jumlah laba komprehensif selama tahun berjalan		-	-	-	8.649	-	-	2.546.708	-	2.555.357	422.465	2.977.822		
Cadangan umum Entitas Anak		-	-	-	-	-	14.000	(14.000)	-	-	-	-		
Transaksi dengan kepentingan non- pengendali		-	(9.513)	-	-	-	-	-	-	(9.513)	(250)	(9.763)		
Efek dari penggabungan usaha	1b	45.937	9.708.197	-	-	-	-	-	-	9.754.134	-	9.754.134		
Opsis saham:														
Penerimaan dari penerbitan saham	1c	9	1.132	-	-	-	-	-	-	1.141	-	1.141		
Cadangan pembayaran berbasis saham	2ab, 2b	-	-	(37.736)	-	-	-	-	-	(37.736)	-	(37.736)		
Saldo tanggal 31 Desember 2019		162.979	11.158.702	801.553	244.012	(24.267)	44.361	17.730.931	(262.404)	29.868.043	1.603.885	31.471.928		

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga		12,369,052	14,287,000	<i>Receipt from interest</i>
Penerimaan dari pendapatan syariah		4,039,326	4,449,890	<i>Receipt from sharia income</i>
Pembayaran beban bunga		(5,320,011)	(7,340,094)	<i>Payments of interest expense</i>
Pembayaran hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer		(500,706)	(518,761)	<i>Payments of third parties' shares on return of temporary syirkah funds</i>
Penerimaan pendapatan operasional lainnya		1,772,261	1,612,454	<i>Receipts from other operating income</i>
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan		99,759	113,243	<i>Recovery from written-off loans</i>
Pembayaran beban kepegawaian		(3,345,008)	(3,313,759)	<i>Payments of personnel expenses</i>
Pembayaran beban operasional lainnya		(2,793,844)	(2,822,148)	<i>Payments of other operating expenses</i>
Pembayaran lain-lain		(4,285)	(10,072)	<i>Other payments</i>
Pembayaran pajak penghasilan badan		(458,531)	(1,262,205)	<i>Payments of corporate income tax</i>
Arus kas sebelum perubahan dalam aset operasi, liabilitas operasi dan dana syirkah temporer		5,858,013	5,195,548	Cash flows before changes in operating assets, operating liabilities and temporary syirkah funds
Perubahan dalam aset operasi, liabilitas operasi, dan dana syirkah temporer :				<i>Changes in operating assets, operating liabilities, and temporary syirkah funds :</i>
(Kenaikan) penurunan aset operasi :				<i>(Increase) decrease in operating assets :</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jatuh tempo lebih dari 3 bulan		(192,551)	(2,280,000)	<i>Placements with Bank Indonesia and other banks - with maturity more than 3 months</i>
Efek-efek yang dibeli dengan janji jual kembali		-	1,591,672	<i>Securities purchased under resale agreement</i>
Tagihan derivatif		(76,710)	(53,974)	<i>Derivative receivables</i>
Tagihan akseptasi		207,451	966,125	<i>Acceptance receivables</i>
Pinjaman yang diberikan		5,010,224	(4,980,410)	<i>Loans</i>
Pembiayaan/piutang syariah		(820,064)	(1,959,320)	<i>Sharia financing/receivables</i>
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				<i>Increase (decrease) in operating liabilities:</i>
Liabilitas segera		41,136	2,945	<i>Obligations due immediately</i>
Simpanan nasabah		13,476,725	(15,527,695)	<i>Deposits from customers</i>
Simpanan dari bank-bank lain		(5,084,138)	4,825,097	<i>Deposits from other banks</i>
Liabilitas derivatif		(7,790)	(222,689)	<i>Derivative payables</i>
Liabilitas akseptasi		(121,177)	(1,086,023)	<i>Acceptance payables</i>
Kenaikan dana syirkah temporer		372,702	1,557,804	<i>Increase in temporary syirkah funds</i>
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		18,663,821	(11,970,920)	Net cash flows provided from (used in) operating activities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

an integral part of these consolidated financial statements

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian efek-efek		(96,000,594)	(49,875,535)	Purchases of securities
Penerimaan dari pelepasan efek-efek		92,799,958	50,586,393	Proceeds from disposal of securities
Perolehan aset tetap		(194,377)	(324,700)	Purchases of fixed assets
Perolehan aset hak guna		(22,332)	-	Purchases of right-of-use assets
Perolehan aset takberwujud	15	(396,680)	(380,234)	Purchases of intangible assets
Pengalihan kas dan setara kas sehubungan dengan penggabungan usaha		-	11,289,137	Cash and cash equivalents transfer due to merger
Hasil dari penjualan aset tetap		8,792	6,026	Proceeds from sale of fixed assets
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi		(3,805,233)	11,301,087	Net cash flows (used in) provided from investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran efek-efek yang diterbitkan		(2,197,583)	(300,000)	Payments of securities issued
Penerimaan dari efek-efek yang diterbitkan		-	1,000,000	Proceeds from securities issued
Penerimaan dari pinjaman yang diterima		29,153,346	172,265,489	Proceeds from borrowings
Pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman yang diterima		(36,129,922)	(172,817,491)	Installment payments and settlement of borrowings
Pembayaran beban emisi obligasi		-	(9,992)	Payments of bonds issuance cost
Pembayaran biaya transaksi atas pinjaman yang diterima		(10,450)	(7,077)	Payments of borrowing transaction costs
Pembayaran dividen	1f	(103,887)	-	Payments of dividend
Hasil penerbitan saham		8	1,141	Proceed from shares issued
Pembayaran pokok liabilitas sewa		(173,566)	-	Payments of principal lease liabilities
Imbalan yang dibayarkan kepada non-pengendali		-	(9,763)	Consideration paid to non-controlling interest
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan		(9,462,054)	122,307	Net cash flows (used in) provided from financing activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		5,396,534	(547,526)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
DAMPAK PERUBAHAN SELISIH KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS		(10,562)	(35,026)	EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		19,841,659	20,424,211	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		25,227,631	19,841,659	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR
Kas dan setara kas terdiri dari:				Cash and cash equivalents consist of:
Kas	4	2,433,196	2,299,062	Cash
Giro pada Bank Indonesia	5	5,616,968	8,987,079	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank-bank lain	6	896,071	1,056,904	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	7	14,482,317	6,559,876	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	8	1,799,079	938,738	Securities
		25,227,631	19,841,659	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

an integral part of these consolidated financial statements



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	2019	
INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS				SUPPLEMENTAL CASH FLOWS INFORMATION
AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS				ACTIVITIES NOT AFFECTING CASH FLOWS
Penerbitan modal saham sehubungan dengan penggabungan usaha	1b	-	9,754,134	<i>Issuance of shares in relation with merger</i>
Cadangan pembayaran berbasis saham	2ab, 28	16,789	37,736	<i>Share-based payment reserve</i>
Pembelian aset tetap yang masih terutang		(287)	(1,402)	<i>Acquisition of fixed assets still payable</i>

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Bank BTPN Tbk ("BTPN" atau "Bank") yang berdomisili di Jakarta Selatan sebelumnya bernama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional berdasarkan akta notaris No. 31 tanggal 16 Februari 1985 dari Notaris Komar Andasasmita, S.H. Akta ini telah diubah dengan akta notaris No. 12 tanggal 13 Juli 1985 dari Notaris Dedeh Ramdah Sukarna, S.H. Anggaran Dasar telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat No. C2-4583HT01.01TH.85 tanggal 25 Juli 1985, dan diumumkan dalam Tambahan No. 1148 Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 1985.

Bank diberikan izin untuk melanjutkan usaha bank sebagai kelanjutan usaha dari Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer ("BAPEMIL") yang telah beroperasi secara komersial pada tanggal 16 Februari 1959. Bank memperoleh izin usaha sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-955/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993 dan surat Bank Indonesia No. 26/5/UPBD/PBD2/Bd tanggal 22 April 1993. Bank juga memperoleh izin untuk menjalankan Unit Usaha Syariah melalui surat Bank Indonesia No. 10/2/DPIP/Prz/Bd tanggal 17 Januari 2008 yang telah dipindahkan ke PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (anak perusahaan Bank) setelah pemisahan pada tanggal 14 Juli 2014.

Bank memperoleh izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing berdasarkan surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 382/PB.12/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang pemberian izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Bank mulai melakukan kegiatan usaha sebagai bank devisa pada tanggal 16 Februari 2016.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar secara lengkap dituangkan dalam Akta Nomor 22 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0006169.AH.01.10.Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019, di mana Bank resmi mengubah namanya menjadi PT Bank BTPN Tbk.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and general information

PT Bank BTPN Tbk ("BTPN" or the "Bank") domiciled in South Jakarta formerly under the name of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional based on notarial deed No. 31 dated 16 February 1985 of Notary Komar Andasasmita, S.H. The deed was amended by notarial deed No. 12 dated 13 July 1985 of Notary Dedeh Ramdah Sukarna, S.H. The Articles of Association was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C2-4583HT01.01TH.85 dated 25 July 1985 and published in Supplement No. 1148 to State Gazette No. 76 dated 20 September 1985.

The Bank was given permission to carry on the bank business as a continuity from Association of Bank Pegawai Pensiunan Militer ("BAPEMIL") which commenced its commercial operations on 16 February 1959. The Bank obtained license to operate as commercial bank based on Decree of Ministry of Finance of the Republic Indonesia No. Kep-955/KM.17/1993 dated 22 March 1993 and the letter of Bank Indonesia No. 26/5/UPBD/PBD2/Bd dated 22 April 1993. The Bank also obtained a license to operate its Sharia Business Unit by the letter of Bank Indonesia No. 10/2/DPIP/Prz/Bd dated 17 January 2008 which has been transferred to PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (the Bank's subsidiary) after a spin-off on 14 July 2014.

The Bank obtained license to conduct foreign exchange activities based on Decree of Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 382/PB.12/2015 dated 22 December 2015 regarding approval in conducting foreign exchange activities. The Bank started to operate as a foreign exchange bank on 16 February 2016.

The Bank's Articles of Association have been amended several times. The complete amendment as specified into the Deed Number 22 dated 21 January 2019 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree Letter Number AHU-0006169.AH.01.10.Tahun 2019 dated 22 January 2019, where the Bank formally changed its name to PT Bank BTPN Tbk.



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Perubahan Anggaran Dasar terakhir Bank dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 31 tanggal 18 November 2020 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0410879 tanggal 23 November 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank BTPN Tbk.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir Bank sebagaimana dituangkan ke dalam Akta Nomor 32 tanggal 18 November 2020 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0411071 tanggal 24 November 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank BTPN Tbk.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, maksud dan tujuan serta kegiatan Bank adalah melakukan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang termasuk melakukan penyertaan modal pada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pemegang saham terakhir (*ultimate shareholders*) dari Bank adalah Sumitomo Mitsui Financial Group.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Establishment and general information (continued)

The latest amendment of Articles of Association was made in order of adjustment with the OJK Regulation Number 14/POJK.04/2019 regarding the Amendments to the OJK Regulation Number 32/POJK.04/2015 regarding Increase Capital of Public Listed Companies by Granting Pre-emptive Rights, OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Conducting a General Meeting of Shareholders of Public Listed Companies, and OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 regarding Conducting General Meeting of Shareholders of Public Listed Companies electronically, as specified in the Deed Number 31 dated 18 November 2020 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0410879 dated 23 November 2020 regarding Acceptance of Notification of Amendment of Articles of Association of PT Bank BTPN Tbk.

The latest composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Bank as specified in the Deed Number 32 dated 18 November 2020 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0411071 dated 24 November 2020 regarding Acceptance of Notification of the Company's Data Changes of PT Bank BTPN Tbk.

In accordance with Article 3 of the Bank's Articles of Association, the Bank's scope of activities is to engage in general banking services including capital investment in bank conducting business based on sharia principles, in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia.

The ultimate shareholders of the Bank is Sumitomo Mitsui Financial Group.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Kantor pusat Bank berlokasi di Menara BTPN, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6, Jakarta Selatan 12950.

Jaringan distribusi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2020
Kantor Cabang	84
Kantor Cabang Pembantu	266
ATM dan TCR	227
Payment Points	141
Kantor Fungsional	45
	763

Jumlah karyawan PT Bank BTPN Tbk dan Entitas Anak ("Bank dan Entitas Anak") pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing adalah 19.370 dan 19.235 karyawan (tidak diaudit).

b. Penggabungan usaha dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 5 Oktober 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 09 tertanggal 5 Oktober 2018 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah disetujui Rencana Penggabungan Usaha PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("SMBCI") dengan Bank, dimana SMBCI bertindak sebagai bank yang menggabungkan diri dan Bank bertindak sebagai bank penerima penggabungan, yang berlaku sejak seluruh persetujuan yang disyaratkan diperoleh ("Tanggal Efektif Penggabungan").

Penggabungan menjadi efektif pada tanggal 1 Februari 2019, setelah diperolehnya persetujuan dari (i) OJK melalui surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 35/KDK.03/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) SMBCI ke dalam Bank; (ii) Japan Financial Services Agency (JFSA) melalui surat Pengawas Perbankan No. 1788 dan No. 1789 tertanggal 18 Januari 2019 perihal Persetujuan *Subsidiarization*; dan (iii) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui surat tertanggal 22 Januari 2019 Nomor AHU-0006169.AH.01.10. Tahun 2019 mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank BTPN Tbk dan surat tertanggal 22 Januari 2019 Nomor AHU-AH.01.10-0006176 mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank BTPN Tbk dan surat tertanggal 22 Januari 2019 Nomor AHU-AH.01.10-0006176 mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank BTPN Tbk.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Establishment and general information (continued)

The Bank's head office is located at Menara BTPN, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6, Jakarta Selatan 12950.

Distribution network as of 31 December 2020 and 2019 (unaudited) was as follows:

	31 Desember/ December 2019	
	84	Branches
	285	Sub-Branches
	226	ATM and TCR
	164	Payments Points
	46	Functional Branches
	805	

As of 31 December 2020 and 2019 PT Bank BTPN Tbk and Subsidiary ("Bank and Subsidiary") had 19,370 and 19,235 employees, respectively (unaudited).

b. Merger with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

Based on the resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 5 October 2018 as stipulated in the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 09 dated 5 October 2018 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta, it has approved the Proposed Merger of PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("SMBCI") and the Bank whereby SMBCI acted as the Merging Bank and the Bank acted as the Merger-Recipient Bank or surviving bank, effective as of all the required approval being obtained ("Effective Merger Date").

The Merger became effective on 1 February 2019, after obtaining the approval from (i) OJK through Decree of Board of Commissioners of OJK Number 35/KDK.03/2018 dated 20 December 2018 regarding the Merger Approval of SMBCI into the Bank; (ii) Japan Financial Services Agency (JFSA) through the Banking Supervisory letter No. 1788 and No. 1789 dated 18 January 2019 regarding the approval of *Subsidiarization*; and (iii) Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Directorate of Administration of General Law by letter dated 22 January 2019 Number AHU-0006169.AH.01.10. Year 2019 regarding the Approval of Amendment of Articles of Association of Limited Liability Company PT Bank BTPN Tbk and letter dated 22 January 2019 Number AHU-AH.01.10-0044411 regarding the Acceptance of Notification of Company Data Submission of PT Bank BTPN Tbk as well as letter dated 22 January 2019 Number AHU-AH.01.10-0006176 regarding Acceptance on Notification of Merger of PT Bank BTPN Tbk.



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Penggabungan usaha dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (lanjutan)

Sehubungan dengan penggabungan usaha antara PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN") dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("SMBCI"), penggabungan usaha dilakukan melalui penerbitan instrumen ekuitas BTPN kepada Sumitomo Mitsui Banking Corporation (pemegang saham BTPN dan SMBCI) sebesar 2.296.846.112 lembar saham biasa disetor penuh dengan nilai nominal sebesar Rp 20 (nilai penuh) per saham.

Nilai wajar saham BTPN pada tanggal 1 Februari 2019 adalah Rp 4.282 (nilai penuh) per lembar saham. Rasio konversi atas konversi saham SMBCI menjadi saham BTPN adalah sebesar 799,1971.

Penggabungan usaha antara BTPN dan SMBCI merupakan transaksi penggabungan usaha entitas sepengendali. Pada tanggal efektif merger, baik BTPN dan SMBCI merupakan entitas sepengendalian dan hubungan sepengendalian tersebut tidak bersifat sementara. Transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok yang sama dan bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi. Oleh karena itu, transaksi ini diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*).

Selisih nilai transfer entitas sepengendali di atas dicatat sebagai tambahan modal disetor. Atas transaksi ini, Bank mencatat tambahan modal disetor dan agio saham masing-masing sebesar Rp 45.937 dan Rp 9.708.197.

Tabel berikut ini merangkum jumlah aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal penggabungan usaha:

	1 Februari/ February 2019
ASET	
Kas	23,195
Giro pada Bank Indonesia	6,793,162
Giro pada bank-bank lain	4,472,780
Efek-efek - bersih	4,390,582
Tagihan derivatif	786,398
Pinjaman yang diberikan - bersih	68,375,817
Tagihan akseptasi	2,658,516
Penyertaan saham	22,500
	87,950,823

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Merger with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (continued)

In relation with merger between PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN") and PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("SMBCI"), the merger was conducted through the issuance of equity instrument of BTPN to Sumitomo Mitsui Banking Corporation (the shareholder of both BTPN and SMBCI) of 2,296,846,112 fully paid ordinary shares of BTPN with nominal value amounting to Rp 20 (full amount) per share.

The fair value of BTPN's shares as of 1 February 2019 was Rp 4,282 (full amount) per share. Conversion ratio of the conversion of SMBCI's share into BTPN's share was 799.1971.

The merger between BTPN and SMBCI is a business combination under common control transaction. As at the effective date of merger, both BTPN and SMBCI are entites under common control and the common control relationship is not transitory. Business combination transaction between entites under common control is done in the event of reorganisation of entities under the same group which does not constitute change in ownership by economic substance. Therefore, the transaction is recognised at carrying amount under pooling of interest method.

Net transfer under common control entites above was recorded as additional paid-in capital. As a result of this transaction, the Bank recorded additional share capital and paid-in capital amounting to Rp 45,937 and Rp 9,708,197, respectively.

The following table summarized the amounts of the assets acquired and liabilities assumed on merger date:

ASSETS
Cash
Current accounts with Bank Indonesia
Current accounts with other banks
Securities - net
Derivative receivables
Loans - net
Acceptance receivables
Investment in shares

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Penggabungan usaha dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (lanjutan)

b. Merger with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (continued)

LIABILITAS

Simpanan nasabah	30,136,739
Simpanan dari bank lain	6,871,941
Liabilitas akseptasi	1,974,482
Liabilitas derivatif	1,001,115
Utang pajak	111,343
Efek-efek yang diterbitkan	1,314,228
Pinjaman yang diterima	30,221,176
Akrual	30,860
Liabilitas imbalan kerja karyawan	-
Liabilitas pajak tangguhan	174,014
Pinjaman subordinasi	6,108,270
Liabilitas lain-lain	252,521
Jumlah liabilitas	78,196,689
Jumlah aset bersih teridentifikasi	9,754,134

LIABILITIES

Deposits from customers
Deposits from other banks
Acceptance payables
Derivative payables
Taxes payable
Securities issued
Borrowings
Accruals
Employee benefits liabilities
Deferred tax liabilities
Subordinated loans
Other liabilities
Total liabilities
Total identifiable net assets

c. Perubahan Modal Karena Aksi Korporasi

c. Changes in Capital Due to Corporate Action

Penawaran Umum Perdana Saham

Initial Public Offering (IPO)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 8 Juni 2007, para pemegang saham menyetujui rencana Penawaran Umum Saham Perdana Biasa kepada masyarakat melalui pasar modal serta melakukan pencatatan saham Bank di Bursa Efek Indonesia.

Based on Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated 8 June 2007, the shareholders approved the Initial Public Offering of Ordinary Shares plan to public through capital market and listing of the Bank's shares at Indonesia Stock Exchange.

Bank melakukan penawaran umum perdana atas 267.960.220 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100 (nilai penuh) setiap saham dengan harga penawaran setiap saham sebesar Rp 2.850 (nilai penuh) kepada masyarakat di Indonesia. Saham tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Maret 2008.

The Bank undertook an initial public offering of 267,960,220 shares with a nominal value of Rp 100 (full amount) per share with offering price of Rp 2,850 (full amount) per share to the public in Indonesia. The shares was listed at Indonesia Stock Exchange on 12 March 2008.

Penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD")

Increase of Capital through Pre-Emptive Right ("HMETD")

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") tanggal 25 November 2010, para pemegang saham menyetujui rencana Bank untuk menambah modal sahamnya melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("HMETD I"), dengan cara mengeluarkan saham dari portepel Bank.

Based on Extraordinary General Shareholders Meeting ("EGSM") dated 25 November 2010, the shareholders approved the Bank's plan to increase the Bank's share capital through the issuance of Pre-Emptive Right I ("HMETD I"), by issuing shares from the Bank's unissued shares.



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

**c. Perubahan Modal Karena Aksi Korporasi
(lanjutan)**

**Penambahan modal melalui Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) (Lanjutan)**

Pada tanggal 10 Desember 2010 telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sebanyak 188.787.238 saham baru atas nama dengan nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham sehingga jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh yang semula sebesar 943.936.190 saham menjadi sejumlah 1.132.723.428 saham.

Bank mendapatkan tambahan modal disetor sebesar Rp 18.878 dan agio saham sebesar Rp 1.293.458.

Pemecahan saham

Berdasarkan RUPSLB tanggal 25 Februari 2011, para pemegang saham menyetujui rencana Bank untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp 100 (nilai penuh) per saham menjadi Rp 20 (nilai penuh) per saham, sehingga jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh yang semula sebesar 1.132.723.428 saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham akan menjadi sejumlah 5.663.617.140 saham dengan nilai nominal Rp 20 (nilai penuh) per saham.

Pada tanggal 28 Maret 2011 saham Bank telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sebanyak 5.606.980.970 saham dengan nilai nominal Rp 20 (nilai penuh) per saham.

**Peningkatan modal melalui Convertible
Loan**

Pada tanggal 14 Maret 2012, Bank telah mendapatkan persetujuan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor dengan mengeluarkan 176.670.117 saham baru dari portepel kepada International Finance Corporation (“IFC”) sesuai dengan syarat dan ketentuan *Convertible Loan Agreement*. Setelah itu, saham tersebut telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Total modal disetor dan ditempatkan Bank setelah Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu menjadi 5.840.287.257 saham.

Bank mendapatkan tambahan modal disetor sebesar Rp 3.533 dan agio saham sebesar Rp 135.927.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

**c. Changes in Capital Due to Corporate Action
(continued)**

**Increase of Capital through Pre-Emptive
Right (“HMETD”) (Continued)**

On 10 December 2010, the Bank’s shares were listed at the Indonesia Stock Exchange with 188,787,238 new registered shares with value of Rp 100 (full amount) per share; accordingly, the number of shares issued and fully paid changed from 943,936,190 shares to 1,132,723,428 shares.

The Bank obtained Rp 18,878 additional share capital and Rp 1,293,458 additional paid-in capital.

Stock split

Based on EGSM dated 25 February 2011, the shareholders approved the Bank’s plan to split share from nominal value of Rp 100 (full amount) per share to Rp 20 (full amount) per share; accordingly, it changed the number of shares issued and fully paid from 1,132,723,428 shares with nominal value of Rp 100 (full amount) per share to 5,663,617,140 shares with nominal value of Rp 20 (full amount) per share.

On 28 March 2011, the Bank’s shares were listed at the Indonesia Stock Exchange for 5,606,980,970 shares with nominal value of Rp 20 (full amount) per share.

Capital increase through Convertible Loan

*On 14 March 2012, the Bank obtained an approval to increase issued and paid-up capital by issuing 176,670,117 shares from the Bank’s unissued shares to International Finance Corporation (“IFC”) in accordance with terms and condition in the *Convertible Loan Agreement*. Afterwards, those Bank’s shares were listed at Indonesia Stock Exchange. Total issued and paid-up capital of the Bank after the Capital Increases without Pre-Emptive Rights was 5,840,287,257 shares.*

The Bank obtained Rp 3,533 additional share capital and Rp 135,927 additional paid-in capital.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

**c. Perubahan Modal Karena Aksi Korporasi
(lanjutan)**

Pembelian kembali saham

Melalui surat OJK No. S-20/PB.31/2016 tanggal 18 Februari 2016, Bank telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan pembelian kembali (*buyback*) saham. Dalam pelaksanaan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Bank, jumlah alokasi dana tidak melebihi Rp 535.500 untuk membeli sebanyak-banyaknya 150.000.000 saham atau 2,57% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Bank, yang akan dilakukan dalam periode dari tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan 23 Mei 2016. Sampai dengan tanggal 23 Mei 2016, Bank telah membeli kembali saham Bank sebanyak 95.198.900 lembar saham (nilai penuh) dengan total dana pembelian sebesar Rp 262.874.

Tujuan dari pembelian kembali saham adalah untuk memberikan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang efisien dan memungkinkan untuk menurunkan keseluruhan biaya modal, meningkatkan laba per saham (*EPS*), serta *Return on Equity (ROE)* secara berkelanjutan.

Pelaksanaan opsi saham

Seperti yang dijelaskan di Catatan 28, Bank memberikan program pembayaran berbasis saham untuk personel manajemen dan karyawan tertentu ("Program MESOP 2015-2020" dan "Program ESOP 2016-2021").

Sehubungan dengan Periode Pelaksanaan Program MESOP 2015-2020, terdapat 2 periode pelaksanaan yang berlangsung selama tahun 2019, yang setiap periodenya dimulai sejak tanggal 6 Mei 2019 (Periode V) dan 2 Desember 2019 (Periode VI), masing-masing selama 30 hari bursa.

Sehubungan dengan Periode Pelaksanaan Program ESOP 2016-2021, terdapat 2 periode pelaksanaan yang berlangsung selama tahun 2020, yang setiap periodenya dimulai sejak tanggal 1 Juni 2020 (Periode V) dan 17 Desember 2020 (Periode VI), masing-masing selama 30 hari bursa.

Sehubungan dengan Periode Pelaksanaan Program ESOP 2016-2021, terdapat 3 periode pelaksanaan yang berlangsung selama tahun 2019, yang setiap periodenya dimulai sejak tanggal 17 Desember 2018 (Periode II), 28 Mei 2019 (Periode III) dan 19 Desember 2019 (Periode IV), masing-masing selama 30 hari bursa.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

**c. Changes in Capital Due to Corporate Action
(continued)**

Shares buyback

The Bank was approved by OJK to conduct shares buyback through its letter No. S-20/PB.31/2016 dated 18 February 2016. In the implementation of shares buyback by the Bank, the allocated fund up to Rp 535,500 to buy up to 150,000,000 shares or 2.57% of the Bank's issued and fully paid-up capital shall be done between 23 February 2016 and 23 May 2016. Up to 23 May 2016, the Bank had repurchased 95,198,900 (full amount) shares using total purchasing fund amounting to Rp 262,874.

The objective of conducting shares buyback is to provide flexibility to achieve an efficient capital structure and enable the Bank to lower the overall cost of capital, increasing the Earnings per Share (EPS) and Return on Equity (ROE) on an on-going basis.

Share option execution

As explained in Note 28, the Bank provides share-based payment program to certain management personnel and employees ("MESOP 2015-2020 Program" and "ESOP 2016-2021 Program").

In relation to the Exercise Period of MESOP 2015-2020 Program, there were 2 exercise periods during 2019, in which each period commenced from 6 May 2019 (Period V) as well as 2 December 2019 (Period VI), for 30 trading days each.

In relation to the Exercise Period of ESOP 2016-2021 Program, there were 2 exercise periods during 2020, in which each period commenced from 1 June 2020 (Period V) and 17 December 2020 (Period VI), for 30 trading days each.

In relation to the Exercise Period of ESOP 2016-2021 Program, there were 3 exercise periods during 2019, in which each period commenced from 17 December 2018 (Period II), 28 May 2019 (Period III) as well as 19 December 2019 (Period IV), for 30 trading days each.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

**c. Perubahan Modal Karena Aksi Korporasi
(lanjutan)
Pelaksanaan opsi saham (lanjutan)**

Total opsi saham yang dieksekusi selama tahun 2020 adalah 3.000 lembar saham. Total opsi saham yang dieksekusi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 atas Program ESOP 2016-2021 adalah 11.795.500 lembar saham yang diterbitkan pada harga sebesar Rp 20 per lembarnya. Harga saham pada saat eksekusi adalah sebesar Rp 2.617 per lembar.

Perubahan modal disetor terkait periode pelaksanaan Program MESOP 2015-2020 dan ESOP 2016-2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana disebut di paragraf sebelumnya telah dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Dewan Komisaris PT Bank BTPN Tbk No. 29 tanggal 12 Agustus 2019, yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0318547 tanggal 23 Agustus 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Bank mendapatkan tambahan modal disetor sebesar Rp 236 dan agio saham sebesar Rp 30.633.

**d. Efek-efek yang diterbitkan
Surat utang jangka menengah**

Nama/Name	Pernyataan efektif/ Effective notification	Persetujuan/ Approval	Jumlah pokok/ Nominal value	Jangka waktu/ Tenor	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga/ Interest rate
Medium Term Notes ("MTN") II Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	14 Juni/June 2017	Dinyatakan efektif oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Jumbo MTN No. SMBC-I/02/MF3/0617/Became effective by the Indonesia Central Securities Depository as stated in Sertifikat Jumbo MTN No. SMBC-I/02/MF3/0617	1,302,000	3 tahun/years	14 Juni/June 2020	8.25%

MTN tersebut diterbitkan oleh PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia sebelum dilakukan penggabungan usaha dengan Bank.

PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai Wali Amanat atas seluruh MTN yang diterbitkan Bank.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

**c. Changes in Capital Due to Corporate Action
(continued)
Share option execution (continued)**

Total options exercised during 2020 were 3,000 shares. Options exercised up to 31 December 2019 from ESOP Program 2016-2021 were 11,795,500 shares being issued at price of Rp 20 per share. The share price at execution date amounted to Rp 2,617 per share.

The changes of paid-up capital in connection to exercise period of MESOP Program 2015-2020 and ESOP Program 2016-2021 up to 31 December 2019 as mentioned in the previous paragraph had been stipulated in the Deed of Circular Resolutions of the Board of Commissioners of PT Bank BTPN Tbk No. 29 dated 12 August 2019, made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Administrative City of South Jakarta and had been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Minister of Law and Human right of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0318547 dated 23 August 2019 regarding Acceptance of Notification of Amendment of Articles of Association.

Up to 31 December 2020 and 2019, the Bank obtained Rp 236 additional share capital and Rp 30,633 additional paid-in capital.

**d. Securities issued
Medium term notes**

This MTN was issued by PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia before merger with the Bank.

PT Bank Mega Tbk acts as the Trustee for all MTN issued by the Bank.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**1. GENERAL INFORMATION (continued)****d. Efek-efek yang diterbitkan (lanjutan)****d. Securities issued (continued)****Utang obligasi****Bonds payable**

Nama/Name	Pernyataan efektif/ Effective registration	Persetujuan/ Approval	Jumlah pokok/ Nominal value	Jangka waktu/ Tenor	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga setahun/ Interest rate per annum
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016 Dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap I")/ Bank BTPN Continuing Bonds III Phase I Year 2016 with a fixed interest rate ("Continuing Bonds III Phase I")	27 Juni/June 2016	Dinyatakan efektif oleh OJK, melalui suratnya No.S-325/D.04/2016/OJK tanggal 27 Juni 2016/ Became effective by OJK by its letter No. S-325/D.04/2016 dated 27 June 2016	Seri/Series B: 300,000	Seri/Series B: 3 tahun/years	1 Juli/July 2019	8.00%
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap II Tahun 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap II")/ Bank BTPN Continuing Bonds III Phase II Year 2017 with a fixed interest rate ("Continuing Bonds III Phase II")	27 Juni/June 2016	Dinyatakan efektif oleh OJK bersamaan dengan surat efektif Obligasi Berkelanjutan III Tahap I/ Became effective by the OJK in conjunctoin with effective letter of Continuance Bonds III Phase I	Seri/ Series A: 600,000	Seri/Series A: 370 hari/days	27 Oktober/ October 2018	6.60%
			Seri/Series B: 900,000	Seri/Series B: 3 tahun/years	17 Oktober/ October 2020	7.50%
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 Dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I")/ Bank BTPN Continuing Bonds IV Phase I Year 2019 with a fixed interest rate ("Continuing Bonds IV Phase I")	26 November/ November 2019	Dinyatakan efektif oleh OJK, melalui suratnya No. S-168/D.04/2019 tanggal 15 November 2019/ Became effective by OJK by its letter No. S-168/D.04/2019 dated 15 November 2019	Seri/Series A: 799.000	Seri/Series A: 3 tahun/years	26 November/ November 2022	7.55%
			Seri/Series B: 201.000	Seri/Series B: 5 tahun/years	26 November/ November 2024	7.75%

Seluruh utang obligasi yang diterbitkan Bank dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan dananya dipergunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

All bonds payable issued by the Bank were listed at the Indonesia Stock Exchange and the funds are used for business growth in form of credit expansion.

PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai Wali Amanat atas Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I.

PT Bank Permata Tbk acts as the Trustee for Continuing Bonds III Phase I and continuing Bonds III Phase II, and PT Bank Mega Tbk acts as the Trustee for Continuing Bonds IV Phase I.



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

e. Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Kerja Audit Internal

e. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Internal Audit Unit

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2020 and 2019 the composition of Board of Commissioners and Board of Directors was as follows:

	<u>31 Desember/ December 2020</u>	<u>31 Desember/ December 2019</u>	
Dewan Komisaris			Board of Commissioners
Komisaris Utama ¹⁾	Chow Ying Hoong	Mari Elka Pangestu	President Commissioner
Wakil Komisaris Utama ²⁾	-	Chow Ying Hoong	Vice President Commissioner ²⁾
Komisaris (Independen)	Takeshi Kimoto	Takeshi Kimoto	Commissioner (Independent)
Komisaris (Independen)	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Commissioner (Independent)
Komisaris (Independen)	Irwan Mahjudin Habsjah	Irwan Mahjudin Habsjah	Commissioner (Independent)
Komisaris (Independen)	Edmund Tondobala ³⁾	-	Commissioner (Independent)
Direksi			Board of Directors
Direktur Utama	Ongki Wanadjati Dana	Ongki Wanadjati Dana	President Director
Wakil Direktur Utama	Kaoru Furuya ⁴⁾	Kazuhisa Miyagawa	Deputy President Director
Wakil Direktur Utama	Darmadi Sutanto ⁵⁾	-	Deputy President Director
Direktur Kepatuhan	Dini Herdini	Dini Herdini	Compliance Director
Direktur	Yasuhiro Daikoku	Yasuhiro Daikoku	Director
Direktur	Henoch Munandar	Henoch Munandar	Director
Direktur	Adrianus Dani Prabawa	Adrianus Dani Prabawa	Director
Direktur	Hirofumi Kubo	Hirofumi Kubo	Director
Direktur	Merisa Darwis	Merisa Darwis	Director
Direktur	Hanna Tantani	Hanna Tantani	Director
<p>Chow Ying Hoong semula menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama, kemudian diangkat sebagai Komisaris Utama Bank dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada dan efektif menjabat pada tanggal 18 November 2020. Dengan demikian, jabatan Komisaris Utama tidak lagi dipegang oleh komisaris independen.</p> <p>Sesuai perubahan Anggaran Dasar yang disetujui RUPSLB pada tanggal 18 November 2020, jabatan Wakil Komisaris Utama ditiadakan.</p>		<p>Chow Ying Hoong who was officiated as Vice President Commissioner, appointed as the President Commissioner by Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on and effective as of 18 November 2020. Therefore, the position of President Commissioner is no longer carried by an independent commissioner.</p> <p>According to the amendment of the Articles of Association as approved by EGMS on 18 November 2020, the position of Vice President Commissioner was removed.</p>	
<p>³⁾ Edmund Tondobala diangkat sebagai Komisaris Independen Bank dengan RUPSLB pada dan efektif menjabat pada tanggal 18 November 2020.</p>		<p>³⁾ Edmund Tondobala was appointed as the Independent Commissioner of the Bank by EGMS on and effective as of 18 November 2020.</p>	
<p>⁴⁾ Kaoru Furuya diangkat sebagai Wakil Direktur Utama Bank dengan RUPSLB pada tanggal 18 November 2020 dan akan efektif menjabat setelah memperoleh ijin kerja dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.</p>		<p>⁴⁾ Kaoru Furuya was appointed as Deputy President Director of the Bank by EGMS on 18 November 2020 and will be effective upon obtaining working permit from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia.</p>	
<p>⁵⁾ Darmadi Sutanto diangkat sebagai Wakil Direktur Utama Bank dengan RUPSLB pada tanggal 23 April 2020 dan efektif menjabat pada tanggal 14 Mei 2020.</p>		<p>⁵⁾ Darmadi Sutanto was appointed as Deputy President Director of the Bank by EGMS on 23 April 2020 and effective as of 14 May 2020.</p>	

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

The composition of the Audit Committee as of 31 December 2020 and 2019 was as follows:

	<u>31 Desember/ December 2020</u>	<u>31 Desember/ December 2019</u>	
Ketua	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Chairman
Anggota	Edmund Tondobala	-	Member
Anggota	Kanaka Puradiredja	Kanaka Puradiredja	Member
Anggota	Ivan Purnama Sanoesi	Ivan Purnama Sanoesi	Member

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

e. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Kerja Audit Internal (lanjutan)

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Eneng Yulie Andriani dan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah Dini Herdini.

Satuan Kerja Audit Internal

Kepala Satuan Kerja Audit Internal pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Noerhajati Soerjo Hadi.

f. Entitas Anak

Bank mempunyai kepemilikan langsung pada Entitas Anak sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

e. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Internal Audit Unit (continued)

Corporate Secretary

The Corporate Secretary as of 31 December 2020 was Eneng Yulie Andriani and as of 31 December 2019 was Dini Herdini.

Internal Audit Unit

Head of Internal Audit as of 31 December 2020 and 2019 was Noerhajati Soerjo Hadi.

f. Subsidiary

The Bank has direct ownership in the following Subsidiary:

Entitas Anak/ Subsidiary	Domisili/ Domicile	Bidang usaha/ Business activities	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Tahun mulai operasi komersial/ year of starting commercial operations	Jumlah aset/ Total assets	
			31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019		31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019
PT Bank BTPN Syariah Tbk (dahulu/formerly PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk)	Jakarta	Perbankan/ Banking	70%	70%	2014	16,435,005	15,383,038

Entitas Anak berkantor pusat di Menara BTPN, lantai 12, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6, Jakarta Selatan 12950.

Pada tanggal 19 Juli 2013, Bank Indonesia menyetujui rencana Bank untuk melakukan akuisisi sebesar 70% saham PT Bank Sahabat Purba Danarta ("BSPD") melalui suratnya No. 15/10/DPBI/PBI-5/Rahasia dengan syarat dilakukan perubahan atas kegiatan usaha dari BSPD yang semula merupakan bank konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan Akta Notaris No. 26 dan No. 27 tanggal 30 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Hadijah S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, Bank telah melakukan akuisisi atas Entitas Anak dan menjadi pemegang saham mayoritas. Hal ini telah diketahui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.01-04338 tertanggal 12 Februari 2014.

The head office of Subsidiary is located at Menara BTPN 12th floor, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6, Jakarta Selatan 12950.

On 19 July 2013, Bank Indonesia approved the Bank's plan to acquire 70% shares of PT Bank Sahabat Purba Danarta ("BSPD") through its letter No. 15/10/DPBI/PBI-5/rahasia which is subject to the change of BSPD's business activities from a conventional bank into a commercial bank under sharia principles.

Based on Notarial Deed No. 26 and No. 27 dated 30 January 2014 before Hadijah S.H., M.Kn., notary in Jakarta, the Bank has acquired the Subsidiary and has become the majority shareholder. It was acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of Republic Indonesia through its letter No. AHU-AH.01.10-04338 dated 12 February 2014.



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

Pemisahan Unit Usaha Syariah

Pada tanggal 20 Januari 2014, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 8 tanggal 4 Juli 2014 di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah menyetujui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("UUS BTPN") dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN"). Pemisahan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 yang telah diubah dengan PBI No. 15/14/PBI/2013 tentang Unit Usaha Syariah. Pendirian tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui dua tahap, yaitu persetujuan izin konversi dan izin pemisahan.

Proses Konversi Ijin Usaha

Pada tanggal 22 Mei 2014, Bank telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk melaksanakan konversi BSPD berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.Kep-49/D-03/2014. Izin tersebut mengubah kegiatan usaha Entitas Anak dari bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pada tanggal 23 Juni 2014, Entitas Anak memperoleh izin pemisahan dari OJK berdasarkan Surat No: S-17/PB.1/2014. Pemisahan UUS BTPN dilakukan dengan Akta Pemisahan No. 8 tanggal 4 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Selanjutnya, pemisahan terjadi secara efektif pada tanggal 14 Juli 2014 dan Entitas Anak memulai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana yang dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan surat No. S.031/DIR/LG/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal Laporan Pelaksanaan Pembukaan Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan.

Perubahan Nama Entitas Anak

Berdasarkan Akta Notaris No. 25 tanggal 27 Agustus 2013 juncto Akta Notaris No. 30 tanggal 25 September 2013 keduanya dibuat di hadapan Notaris Hadijah, S.H., M.Kn., BSPD mengubah namanya menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Perubahan di atas telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-50529.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2013, tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 124084 tanggal 22 November 2013.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

f. Subsidiary (continued)

The Spin off of Sharia Business Unit

On 20 January 2014, the Bank's Extraordinary General Meeting of Shareholders which was notarised by Notarial Deed No. 8 dated 4 July 2014 before Hadijah, S.H., M.Kn., notary in Jakarta approved the spin-off of the sharia business unit of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("UUS BTPN") from PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN"). The spin-off was made with reference to Bank Indonesia Regulation No.11/10/PBI/2009 which has been amended by PBI No. 15/14/PBI/2013 regarding Sharia Business Unit. The establishment has been approved by Bank Indonesia in two stages, i.e. the approval of the conversion permit and spin-off permit.

The Conversion of the license of business

On 22 May 2014, the Subsidiary received its permit from Bank Indonesia regarding conversion of BSPD based on the Decision Letter of Board of Commissioner of Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.Kep-49/D-03/2014. The permit changed the Subsidiary's business activities from conventional commercial bank to commercial bank which conducts business activities based on sharia principles.

On 23 June 2014, the Subsidiary received its spin-off permit from OJK based on the Letter No: S-17/PB.1/2014. The spin-off of UUS BTPN was made under Spin-off Deed No. 8 dated 4 July 2014 and was notarised by Hadijah, S.H., M.Kn., notary in Jakarta. Furthermore, the spin-off became effective on 14 July 2014 and the Subsidiary started its operational activity based on sharia principles, as reported to Bank Indonesia through its letter No. S.031/DIR/LG/VII/2014 dated 17 July 2014 regarding the Report on the Implementation of the Opening of Sharia Commercial Bank Resulting from the Spin-Off.

The Change of name of the Subsidiary

Pursuant to the Notarial Deed No. 25 dated 27 August 2013 juncto Notarial Deed No. 30 dated 25 September 2013 before Hadijah, S.H., M.Kn., BSPD changed its name to PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. The above change was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-50529.AH.01.02 Year 2013 dated 1 October 2013 and has been published in State Gazette No.94 year 2013, in supplement of the State Gazette No. 124084 dated 22 November 2013.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

Perubahan Nama Entitas Anak (lanjutan)

Entitas Anak mengubah kembali namanya menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk sebagaimana didasarkan pada Akta No. 26 tanggal 16 April 2020, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-0034666.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 8 Mei 2020, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0214020 tanggal 8 Mei 2020, dan telah mendapatkan persetujuan Perubahan Nama ini berdasarkan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor S-66/PB.101/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Permohonan Penetapan Penggunaan Izin Usaha karena Perubahan Nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk dan Salinan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I OJK Nomor KEP-99/PB.1/2020 tanggal 4 Juli 2020.

Anggaran Dasar

Setelah menjadi Bank Umum Syariah, Entitas Anak telah melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 26 tanggal 16 April 2020, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0034666.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0214020 tanggal 8 Mei 2020.

Susunan Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Susunan Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah terakhir Entitas anak sebagaimana dituangkan ke dalam Akta Nomor 03 tanggal 4 Juni 2020 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor No. AHU-AH.01.03-0236605 tanggal 5 Juni 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank BTPN Syariah Tbk.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

f. Subsidiary (continued)

The Change of name of the Subsidiary (continued)

The Subsidiary further changed its name to PT Bank BTPN Syariah Tbk pursuant to the Notarial Deed No. 26 dated 16 April 2020, before Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU- 0034666.AH.01.02.TAHUN 2020 dated 8 May 2020 and the Letter of Acceptance of the amendment to the Articles of Association No. No. AHU-AH.01.03-0214020 dated 8 May 2020, The change of name of the BTPNS has been approved based on the letter from the Financial Services Authority (OJK) number S-66/PB.101/2020 dated 4 June 2020 concerning the determination of the use of Business Licence on behalf PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk into PT Bank BTPN Syariah Tbk and the Copy of Approval of Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I OJK Number KEP-99/PB.1/2020 dated 4 July 2020.

The Articles of Association

The Subsidiary's Articles of Association have been amended several times, upon became Sharia Commercial Bank. The latest amendment of the Articles of Association of the Bank was stated in deed No. 26 dated 16 April 2020, which was notarised by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta. The deed was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its letter No AHU-0034666.AH.01.02. Year 2020 dated 8 May 2020 and the Letter of Acceptance of the amendment to Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0214020 dated 8 May 2020.

The Composition of The Directors, The Board of Commissioners and The Sharia Supervisory Board

The latest composition of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board of the Subsidiary as specified in the Deed Number 03 dated 4 June 2020 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number No. AHU-AH.01.03-0236605 dated 5 June 2020 regarding Acceptance of Notification of the Company's Data Changes of PT Bank BTPN Syariah Tbk.



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Entitas Anak, maksud dan tujuan serta kegiatan Entitas Anak adalah melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Entitas Anak yang dilakukan melalui surat edaran resolusi pemegang saham pada tanggal 16 November 2017, para pemegang saham menyetujui rencana Penawaran Umum Saham Perdana Biasa kepada masyarakat melalui pasar modal serta melakukan pencatatan saham Bank di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 25 April 2018, Entitas Anak memperoleh pernyataan efektif dari OJK dengan surat No. S-36/D-04/2018 untuk penawaran umum saham perdana tersebut.

Entitas Anak melakukan penawaran umum perdana atas 770.370.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100 (nilai penuh) setiap saham dengan harga penawaran setiap saham sebesar Rp 975 (nilai penuh) kepada masyarakat di Indonesia. Saham tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Mei 2018. Dana yang diterima oleh Entitas Anak atas penawaran umum perdana adalah sebesar Rp 735.020 (setelah biaya emisi dan pajak).

Atas tambahan saham yang diterbitkan sehubungan dengan penawaran umum perdana Entitas Anak kepada publik, jumlah kepemilikan Bank atas Entitas Anak menurun dari 70% menjadi 63%.

Akuisisi dari kepentingan non-pengendali pada Entitas Anak

Pada tanggal 11 Mei 2018, Bank mengakuisisi 7% saham atas Entitas Anak dengan imbalan pembelian sebesar Rp 550.045. Kepentingan non-pengendali Entitas Anak pada tanggal akuisisi adalah Rp 525.778. Dengan demikian, kepemilikan Bank atas Entitas Anak kembali menjadi 70%. Dampak perubahan atas kepemilikan saham Entitas Anak adalah sebagai berikut:

	2018	
Kepentingan non-pengendali yang diakuisisi	525,778	<i>Non-controlling interest acquired</i>
Imbalan yang dibayarkan kepada kepentingan non-pengendali	(550,045)	<i>Consideration paid to non-controlling interest</i>
Selisih lebih imbalan uang dibayarkan yang diakui pada ekuitas Bank	(24,267)	<i>Excess of consideration paid as recorded in the Bank's equity</i>

1. GENERAL INFORMATION (continued)

f. Subsidiary (continued)

The Objectives and Scope of Activities

In accordance with article 3 of the Subsidiary's Article of Association, the Subsidiary's objective and scope of activities is to engage in banking industry based on sharia principles.

Initial Public Offering

Pursuant to the Subsidiary's Circular Resolution of the Shareholders in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated 16 November 2017, the shareholders approved the plan to conduct Initial Public Offering of Ordinary Shares to public through capital market and listing of the Subsidiary's shares at the Indonesia Stock Exchange. On 25 April 2018, the Subsidiary obtained the effective notification from OJK through letter No. S-36/D-04/2018 for this initial public offering.

The Subsidiary undertook an initial public offering of 770,370,000 shares with a nominal value of Rp 100 (full amount) per share with offering price of Rp 975 (full amount) per share to the public in Indonesia. The shares were listed at the Indonesia Stock Exchange on 8 May 2018. The funds received by the Subsidiary from the initial public offering amounting to Rp 735,020 (net of issuance costs and tax).

In relation to the additional shares issued in connection with the initial public offering of the Subsidiary to the public, the Bank's ownership in the Subsidiary decreased from 70% to 63%.

Acquisition of non-controlling interest of Subsidiary

On 11 May 2018, the Bank acquired 7% shares of Subsidiary for a purchase consideration of Rp 550,045. The non-controlling interest in Subsidiary on the date of acquisition was Rp 525,778. Therefore, the Bank's ownership in the Subsidiary became 70%. The effect of changes in the ownership interest of Subsidiary was as follows:

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

Akuisisi dari kepentingan non-pengendali pada Entitas Anak (lanjutan)

Dampak transaksi dengan kepentingan non-pengendali pada ekuitas adalah sebagai berikut:

	2018
Perubahan pada ekuitas:	
- Dampak atas penawaran umum perdana	209,242
- Akuisisi saham tambahan pada Entitas Anak	(24,267)
Dampak bersih pada ekuitas	<u>184,975</u>

Pembagian dividen Entitas Anak

Entitas Anak membagikan dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp 328.337 atau Rp 45 per lembar saham. Dividen tunai yang dibayarkan senilai Rp 346.554 dengan pajak dividen sebesar Rp 18.217. Pada tanggal 20 Mei 2020, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah melakukan distribusi dividen tunai kepada daftar pemegang saham pada tanggal 28 April 2020.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting, yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Bank tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Bank disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK" yang fungsinya dialihkan kepada OJK sejak tanggal 1 Januari 2013) No. VIII.G.7 yang merupakan lampiran keputusan ketua BAPEPAM-LK No. KEP 347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Laporan keuangan konsolidasian ini yang merupakan konsolidasian dari laporan keuangan Bank dan Entitas Anak (secara bersama-sama disebut "Bank dan Entitas Anak" dan Bank secara individu disebut "Bank") telah disetujui untuk diterbitkan oleh direksi pada tanggal 26 Februari 2021.

Laporan keuangan konsolidasi ini disajikan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah dalam Bahasa Indonesia.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

f. Subsidiary (continued)

(ii) Acquisition of non-controlling interest of Subsidiary (continued)

Effects of transactions with non-controlling interests on the equity was as follows:

	2018
Changes in equity:	
Effect on initial public offering - Acquisition of additional interest in - Subsidiary	209,242
	(24,267)
Net effect in equity	<u>184,975</u>

Dividend distribution by Subsidiary

The Subsidiary distributed dividend to shareholders amounting Rp 328,337 or Rp 45 per share. Cash dividend was paid at the amount of Rp 346,554 with tax on dividend amounting to Rp 18,217. On 20 May 2020, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia distributed the Subsidiary's cash dividend to list of shareholders as of 28 April 2020.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting policies, applied in the preparation of the Bank's consolidated financial statements as of and for the years ended 31 December 2020 and 2019, are as follows:

a. Statement of Compliance

The Bank's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK").

These consolidated financial statements have also been prepared and presented in accordance with Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK", whose function has been transferred to OJK starting 1 January 2013) rule No. VIII.G.7, Appendix of the Decree of the Chairman of the BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 dated 25 June 2012 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosure of the Issuer or Public Company".

These consolidated financial statements which represent the consolidation of the financial statements of the Bank and its subsidiary (together referred to as the "Bank and Subsidiary" and the Bank individually as the "Bank"), were authorized for issuance by the Board of Directors on 26 February 2021.

These consolidated financial statements are presented in Indonesian and English languages. Should there be any difference in interpretation due to translation, the Indonesian version shall prevail.



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
Konsolidasian**

**b. Basis for Preparation of Consolidated
Financial Statements**

Laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank. Kecuali dinyatakan secara khusus, informasi keuangan yang disajikan telah dibulatkan menjadi jutaan Rupiah terdekat.

Figures in these consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Bank's functional currency. Unless otherwise stated, financial information presented in Rupiah has been rounded to the nearest million.

Laporan keuangan konsolidasian disusun atas basis akrual dengan menggunakan konsep nilai historis, kecuali jika standar akuntansi mensyaratkan pengukuran nilai wajar.

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept, except where the accounting standards require fair value measurement.

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan perubahan dalam kas dan setara kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas disusun dengan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas meliputi kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank-bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain, dan efek-efek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

The consolidated statements of cash flows present the changes in cash and cash equivalents from operating, investing and financing activities. The statements of cash flows are prepared using the direct method. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, and securities that mature within three months from the date of acquisition, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings nor restricted.

c. Penggunaan pertimbangan dan estimasi

c. Use of judgments and estimates

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dan estimasi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan kegiatan saat ini, hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with SAK requires management to make judgments and estimates that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode-periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the periods in which the estimate is revised and in any future periods affected.

Informasi mengenai hal-hal penting yang terkait dengan ketidakpastian estimasi dan pertimbangan-pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian dijelaskan di Catatan 3.

Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgments in applying accounting policies that have significant effect on the amount recognized in the consolidated financial statements are described in Note 3.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

d. Perubahan kebijakan akuntansi

Berikut ini adalah standar dan interpretasi standar yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2020, memiliki pengaruh atas laporan keuangan konsolidasian Bank, dan mungkin akan membutuhkan penerapan secara retrospektif sebagaimana diatur dalam PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan":

- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 71 "Instrumen Keuangan"
- PSAK No. 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK No. 73 "Sewa"
- Amendemen PSAK No. 1 "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amendemen PSAK No. 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"
- PSAK 102 (Revisi 2019) "Akuntansi Murabahah"
- Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") 101 "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan"
- ISAK 102 "Penurunan Nilai Piutang Murabahah"
- Amendemen PSAK No. 73 "Konsesi Sewa Terkait Covid-19"

Dampak implementasi PSAK 71 dan PSAK 73 terhadap Bank dan Entitas Anak dijelaskan di bawah ini.

Selain PSAK 71 dan PSAK 73, penerapan standar akuntansi yang disebutkan di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

PSAK 71, "Instrumen Keuangan"

PSAK No. 71 menggantikan hampir semua ketentuan di PSAK No. 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Dalam PSAK ini terdapat ketentuan yang direvisi untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan, metode kerugian kredit ekspektasian yang baru untuk menghitung penurunan nilai aset keuangan, persyaratan umum baru untuk akuntansi lindung nilai, dan tambahan pengungkapan. PSAK ini meneruskan ketentuan untuk pengakuan dan penghentian pengakuan instrumen keuangan yang diambil dari PSAK No. 55.

Untuk akuntansi lindung nilai, ketentuan secara umum diterapkan secara prospektif, dengan beberapa pengecualian yang terbatas. Bank tidak menerapkan akuntansi lindung nilai.

PSAK 71 tidak berlaku terhadap Entitas Anak yang merupakan suatu entitas berbasis Syariah.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Changes in accounting policies

The following standards and interpretation of standards became effective on 1 January 2020, have an effect on the future consolidated financial statements, and may require retrospective application under PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors":

- Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") No. 71 "Financial Instruments"
- PSAK No. 72 "Revenue from Contracts with Customers"
- PSAK No. 73 "Leases"
- Amendment to PSAK No. 1 "Presentation of Financial Statements"
- Amendment to PSAK No. 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors"
- PSAK 102 (2019 Revision) "Murabahah Accounting"
- Interpretation of Financial Accounting Standard ("ISAK") 101 "Recognition of Deferred Murabahah Revenue Without Significant Risk on Ownership of Inventory"
- ISAK 102 "Impairment Losses for Murabahah Receivables"
- Amendment PSAK No. 73 "Covid19-related Rent Concessions"

Set out below is the explanation of PSAK 71 and PSAK 73 implementation impacts to the Bank and Subsidiary.

Other than PSAK 71 and PSAK 73, implementation of the above-mentioned accounting standards did not have significant impacts to the consolidated financial statements.

PSAK 71, "Financial Instruments"

PSAK No. 71 replaces most of the existing requirements in PSAK No. 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement". It includes revised guidance on classification and measurement of financial instruments, a new expected credit loss model for calculating impairment on financial assets, new general hedge accounting requirements, and additional disclosures. It also carries forward the requirements on recognition and derecognition of financial instruments from PSAK No. 55.

For hedge accounting, the requirements are generally applied prospectively, with some limited exceptions. The Bank did not apply hedging accounting.

PSAK 71 is not applicable on the Subsidiary which is an entity with sharia principles.



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

d. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

PSAK 71, "Instrumen Keuangan" (lanjutan)

Perubahan utama pada kebijakan akuntansi Bank yang disebabkan oleh penerapan PSAK 71 dirangkum di bawah ini. Seluruh dampak dari penerapan standar akuntansi tersebut diungkapkan pada Catatan 47.

- (i) Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas

PSAK 71 memiliki tiga kategori klasifikasi untuk aset keuangan: diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI") dan nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL"). Klasifikasi PSAK 71 umumnya berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan dikelola dan arus kas kontraktualnya. PSAK 71 mengeliminasi kategori instrumen keuangan PSAK 55 sebelumnya, yakni dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan dan piutang dan tersedia untuk dijual. Untuk penjelasan mengenai bagaimana Bank mengklasifikasikan aset keuangan sesuai PSAK 71 pada saat penerapan awal, lihat Catatan 47.

PSAK 71 mempertahankan hampir semua ketentuan klasifikasi liabilitas keuangan PSAK 55. Untuk penjelasan bagaimana Bank mengklasifikasikan liabilitas keuangan berdasarkan PSAK 71 pada saat penerapan awal, lihat Catatan 47.

Oleh karena penerapan PSAK 71, Bank telah mengubah kebijakan akuntansinya mengenai klasifikasi instrumen keuangan seperti dijelaskan pada Catatan 2h.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Bank tidak memiliki aset keuangan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan diukur pada nilai wajar pada pengakuan awal (opsi nilai wajar).

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Changes in accounting policies (continued)

PSAK 71, "Financial Instruments" (continued)

The key changes to the Bank's accounting policies resulting from its adoption of PSAK 71 are summarized below. The full impact of adopting the standard is set out in Note 47.

- (i) Classification and measurement of financial assets and liabilities

PSAK 71 contains three classification categories for financial assets: measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income ("FVOCI") and fair value through profit or loss ("FVTPL"). PSAK 71 classification is generally based on the business model in which a financial asset is managed and its contractual cash flows. The standard eliminates the previous PSAK 55 categories of held-to-maturity, loans and receivables and available-for-sale. For an explanation of how the Bank classifies financial assets under PSAK 71 at initial implementation, see Note 47.

PSAK 71 largely retains the existing requirements in PSAK 55 for the classification of financial liabilities. For more explanation of how the Bank classifies financial liabilities under PSAK 71 at initial implementation, see Note 47.

As the result of adoption of PSAK 71, the Bank has changed its accounting policy on financial instruments classification as disclosed in Note 2h.

As of 31 December 2020 and 2019, the Bank did not have financial assets and financial liabilities designated at fair value at initial recognition (fair value option).

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

d. Changes in accounting policies (continued)

PSAK 71, "Instrumen Keuangan" (lanjutan)

PSAK 71, "Financial Instruments" (continued)

(ii) Penurunan nilai aset keuangan

(ii) Impairment of financial assets

PSAK 71 menggantikan model *incurred loss* pada PSAK 55 dengan kerugian kredit ekspektasian yang bersifat *forward looking* ("ECL"). Hal ini membutuhkan pertimbangan yang memadai tentang bagaimana perubahan faktor ekonomi mempengaruhi ECL yang akan ditentukan berdasarkan probabilitas tertimbang.

PSAK 71 replaces the "incurred loss" model in PSAK 55 with a forward-looking expected credit losses ("ECL"). This will require considerable judgement over how changes in economic factors affect ECLs, which will be determined on a probability-weighted basis.

Model penurunan nilai yang baru ini diterapkan untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, termasuk komitmen kredit dan kontrak jaminan keuangan yang diterbitkan.

The new impairment model applies to all financial instruments that are not measured at fair value through profit or loss, including loan commitments and financial guarantee contracts issued.

Dalam PSAK 71, tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk instrumen ekuitas.

Under PSAK 71, no impairment loss is recognized on equity investments.

Berdasarkan PSAK 71, kerugian kredit diakui lebih awal dari PSAK 55. Penjelasan bagaimana dampak penerapan awal PSAK 71 terhadap cadangan penurunan nilai aset keuangan, lihat Catatan 47.

Under PSAK 71, credit losses are recognized earlier than under PSAK 55. For an explanation of the impacts to allowance for impairment losses from initial implementation of PSAK 71, see Note 47.

Oleh karena penerapan PSAK 71, Bank telah mengubah kebijakan akuntansinya mengenai penurunan nilai aset keuangan seperti dijelaskan pada Catatan 2i.

As the result of adoption of PSAK 71, the Bank has changed its accounting policy on impairment losses of financial assets as disclosed in Note 2i.

(iii) Transisi

(iii) Transition

Perubahan kebijakan akuntansi sebagai hasil dari penerapan PSAK 71 umumnya akan diterapkan secara retrospektif. Namun, Bank memanfaatkan pengecualian untuk tidak menyajikan kembali informasi komparatif untuk periode sebelumnya. Selisih nilai tercatat atas aset keuangan dan liabilitas keuangan sebagai akibat dari penerapan awal PSAK 71 diakui pada saldo laba tanggal 1 Januari 2020.

Changes in accounting policies resulting from the adoption of PSAK 71 is generally applied retrospectively. However, the Bank applied the exemption allowing it not to restate comparative information for prior period. Differences in the carrying amounts of financial assets and financial liabilities resulting from the initial adoption of PSAK 71 were recognized in retained earnings at 1 January 2020

Dengan demikian, informasi yang disajikan pada tahun 2019 tidak mencerminkan PSAK 71 dan oleh karena itu tidak dapat dibandingkan dengan informasi yang disajikan pada tahun 2020 berdasarkan PSAK 71.

Accordingly, the information presented for 2019 does not reflect the requirements of PSAK 71 and therefore is not comparable to the information presented for 2020 under PSAK 71.



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

d. Changes in accounting policies (continued)

PSAK 73 “Sewa”

PSAK 73 “Leases”

Tanggal penerapan awal PSAK 73 untuk Bank dan Entitas Anak adalah 1 Januari 2020. Sesuai dengan ketentuan transisi PSAK 73, Bank dan Entitas Anak telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi, yaitu dengan mengakui efek kumulatif dari penerapan awal PSAK 73 sebagai penyesuaian atas saldo laba tanggal 1 Januari 2020. Oleh karena itu, informasi komparatif tahun 2019 tidak disajikan kembali, dimana transaksi sewa dilaporkan sesuai dengan PSAK 30, “Sewa”.

The date of initial application of PSAK 73 for the Bank and Subsidiary is 1 January 2020. In accordance with the transitional provisions of PSAK 73, the Bank and Subsidiary have applied PSAK 73 using the modified retrospective approach, i.e. by recognizing the cumulative effect of initially applying PSAK 73 as an adjustment to retained earnings at 1 January 2020. Therefore, the 2019 comparative information has not been restated, for which lease transactions were reported in accordance with PSAK 30 “Leases”.

(i) Definisi sewa

(i) Definition of a lease

PSAK 73 mendefinisikan sewa sebagai kontrak yang memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama jangka waktu tertentu. Menurut standar yang baru ini, kedua model akuntansi terdahulu yang membedakan antara sewa pembiayaan yang dilaporkan di dalam neraca dengan sewa operasi yang ada di luar neraca (rekening administratif), telah dieliminasi.

PSAK 73 defines a lease as a contract that conveys the right to control the use of an asset for a period of time. Under the new standard, the previous dual accounting model for lessees, which distinguished between on-balance sheet finance leases and off-balance sheet operating leases, has been eliminated.

Pada saat transisi, Bank dan Entitas Anak memilih untuk menerapkan panduan praktis PSAK 73 untuk tetap mempertahankan hasil penelaahan sebelumnya apakah suatu transaksi mengandung sewa. Bank dan Entitas Anak hanya menerapkan PSAK 73 atas kontrak yang sebelumnya diidentifikasi sebagai sewa. Kontrak yang sebelumnya tidak diidentifikasi sebagai sewa menurut PSAK 30 dan ISAK 8 tidak ditelaah kembali apakah mengandung sewa. Oleh karena itu, definisi sewa menurut PSAK 73 hanya diterapkan atas kontrak yang terjadi atau dimodifikasi setelah tanggal 1 Januari 2020.

On transition, the Bank and Subsidiary elected to apply the practical expedient in PSAK 73 to grandfather the assessment of which transactions are leases. The Bank and Subsidiary applied PSAK 73 only to contracts that were previously identified as leases. Contracts that previously were not identified as leases under PSAK 30 and ISAK 8 were not reassessed for whether there is a lease. Therefore, the definition of a lease under PSAK 73 was applied only to contracts entered into or changed after 1 January 2020.

Sewa yang dimiliki Bank dan Entitas Anak sebelum tanggal 1 Januari 2020 seluruhnya merupakan sewa operasi menurut PSAK 30.

All of the Bank and Subsidiary’s leases prior to 1 January 2020 were operating leases under PSAK 30.

(ii) Dampak pada akuntansi penyewa

(ii) Impact on lessee accounting

Menerapkan PSAK 73, untuk semua sewa (kecuali yang disebutkan di bawah ini), Bank dan Entitas Anak:

Applying PSAK 73, for all leases (except as noted below), the Bank and Subsidiary:

- mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada laporan posisi keuangan konsolidasian, yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan;

- *recognises right-of-use assets and lease liabilities in the consolidated statement of financial position, initially measured at the present value of the future lease payments;*

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

d. Changes in accounting policies (continued)

PSAK 73 “Sewa” (lanjutan)

PSAK 73 “Leases” (continued)

(ii) Dampak pada akuntansi penyewa (lanjutan)

(ii) Impact on lessee accounting (continued)

- mengakui penyusutan aset hak guna dan bunga atas liabilitas sewa pada laba rugi;
- memisahkan jumlah total pembayaran kas ke bagian pokok (disajikan sebagai aktivitas pendanaan) dan bunga (disajikan sebagai aktivitas operasi) pada laporan arus kas konsolidasian.

- recognises depreciation of right-of-use assets and interest on lease liabilities in profit or loss;
- separates the total amount of cash paid into a principal portion (presented within financing activities) and interest (presented within operating activities) in the consolidated statement of cash flows.

Untuk sewa jangka pendek (masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa atas aset bernilai rendah, Bank dan Entitas Anak telah memilih untuk mengakui beban sewa secara garis lurus sebagaimana diijinkan oleh PSAK 73.

For short-term leases (lease term of 12 months or less) and leases of low-value assets, the Bank and Subsidiary had opted to recognise a lease expense on a straight-line basis as permitted by PSAK 73.

(iii) Dampak pada laporan keuangan

(iii) Impact on financial statements

Pada saat transisi, liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Bank dan Entitas Anak pada tanggal 1 Januari 2020.

On transition, lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the Bank and Subsidiary's incremental borrowing rate at 1 January 2020.

Aset hak-guna terkait sewa gedung diukur pada nilai tercatatnya seolah-olah PSAK 73 telah diterapkan sejak tanggal mulai sewa, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal 1 Januari 2020. Aset hak-guna lainnya diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran dibayar dimuka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2019.

Right-of-use assets related with leases of buildings are measured at their carrying amount as if PSAK 73 has been applied since the lease commencement date, discounted using incremental borrowing rate at 1 January 2020. Other right-of use assets are measured at an amount equal to the lease liabilities, adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments at 31 December 2019.

Pada saat transisi, Bank dan Entitas Anak menerapkan cara praktis berikut yang diperbolehkan oleh standar:

On transition, the Bank and Subsidiary used the following practical expedients permitted by the standard:

- menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa
- sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari tanggal 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek
- pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak guna pada tanggal penerapan awal
- menggunakan tinjauan ke belakang (*hindsight*) dalam menentukan masa sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa

- the use of a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics
- operating leases with a remaining lease term of less than 12 months at 1 January 2020 are treated as short-term lease
- the exclusion of initial direct costs for the measurement of the right-of-use assets at the date of initial application
- the use of hindsight in determining the lease term where the contract contains options to extend or terminate the lease



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

d. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

PSAK 73 “Sewa” (lanjutan)

(iii) Dampak pada laporan keuangan (lanjutan)

- memisahkan komponen nonsewa dari komponen sewa berdasarkan kelas aset pendasar mengandalkan penilaian apakah sewa bersifat memberatkan sesuai PSAK 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi” sebagai alternatif untuk melakukan tinjauan penurunan nilai. Tidak ada kontrak sewa yang bersifat memberatkan padatanggal 1 Januari 2020.

Rata-rata tertimbang suku bunga pinjaman inkremental yang digunakan Bank atas liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar 8,20%. Suku bunga inkremental yang digunakan Entitas Anak pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar 4,48% - 9,75%.

Rekonsiliasi antara komitmen sewa operasi berdasarkan PSAK 30 pada tanggal 31 Desember 2019 dan liabilitas sewa yang diakui berdasarkan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

	Jumlah/ Amount	
Komitmen sewa operasi pada tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan PSAK 30	870,297	<i>Operating lease commitments as of 31 December 2019 under PSAK 30</i>
Didiskontokan dengan menggunakan suku bunga inkremental	(178,273)	<i>Discounted using the incremental borrowing rate</i>
Dikurangi:		<i>Less:</i>
- Sewa jangka pendek yang tidak diakui sebagai liabilitas sewa	(11,325)	<i>Short-term leases not recognized - as lease liabilities</i>
- Sewa bernilai rendah yang tidak diakui sebagai liabilitas sewa	(2,965)	<i>Low-value leases not recognized - as lease liabilities</i>
- Pembayaran angsuran sewa dimuka dari sewa liabilitas	(19,335)	<i>Upfront installment payments - of lease liabilities</i>
Liabilitas sewa yang diakui pada tanggal 1 Januari 2020	658,399	<i>Lease liabilities recognised at 1 January 2020</i>

Pada saat transisi PSAK 73, Bank dan Entitas Anak mengakui aset hak guna sebesar Rp 774.042 (termasuk reklasifikasi dari beban sewa dibayar dimuka sebesar Rp 213.327 dan setelah dikurangi akumulasi depresiasi sebesar Rp 235.206), sewa liabilitas sebesar Rp 658.399, dan mengakui selisihnya pada saldo laba tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp 77.086 (setelah pajak).

On the transition of PSAK 73, the Bank and Subsidiary recognized right-of-use assets amounting to Rp 774,042 (include of reclassification from rental prepayments amounting to Rp 213,327 and after deduction of accumulated depreciation of Rp 235,206), lease liabilities amounted to Rp 658,399, and adjust the difference to retained earnings at 1 January 2020 amounting to Rp 77,086 (net of tax).

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**e. Penjabaran Transaksi dan Saldo dalam
Valuta Asing**

**e. Foreign Currency Transactions and
Balances Translation**

Transaksi-transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank, dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Transactions in foreign currencies are translated into Rupiah, the Bank and Subsidiary's functional currency, at the exchange rates prevailing at the transaction date.

Saldo akhir tahun aset moneter dan liabilitas moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB.

Year-end balances monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using exchange rate as of the reporting date (closing) as determined by Bank Indonesia, i.e. middle rates which are the average of buying rates and selling rates per Reuters at 16.00 WIB.

Kurs valuta asing utama yang digunakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut (nilai penuh):

The major exchange rates used as of the reporting date were as follows (full amount):

	2020	2019	
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	14,050.00	13,882.50	1 United States Dollar (USD)
1 Dolar Australia (AUD)	10,752.47	9,725.39	1 Australian Dollar (AUD)
1 Dolar Singapura (SGD)	10,606.18	10,315.05	1 Singapore Dollar (SGD)
1 Dolar Hong Kong (HKD)	1,812.30	1,782.75	1 Hong Kong Dollar (HKD)
1 Poundsterling Inggris (GBP)	19,012.46	18,238.14	1 British Poundsterling (GBP)
1 Yen Jepang (JPY)	135.97	127.81	1 Japanese Yen (JPY)
1 Euro (EUR)	17,234.43	15,570.61	1 Euro (EUR)

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam valuta asing dan dari penjabaran aset moneter dan liabilitas moneter dalam valuta asing diakui pada laba rugi.

The exchange gains and losses arising from transactions in foreign currencies and from the translation of monetary assets and monetary liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

Laba atau rugi kurs valuta asing atas aset dan liabilitas moneter merupakan selisih antara biaya perolehan diamortisasi dalam Rupiah pada awal tahun, disesuaikan dengan tingkat suku bunga efektif dan pembayaran selama tahun berjalan, dan biaya perolehan diamortisasi dalam valuta asing yang dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada akhir tahun.

The foreign currency gains or losses on monetary assets and liabilities are the difference between amortised cost in Rupiah at the beginning of the year, adjusted for effective interest rate and payments during the year, and the amortised cost in foreign currency translated into Rupiah using the exchange rate at the end of the year.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

f. Prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Bank dan entitas anak.

Suatu pengendalian atas entitas anak dianggap ada bilamana Bank terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak. Bank akan menilai kembali apakah memiliki kendali jika ada perubahan atas satu atau lebih unsur pengendalian. Ini termasuk situasi dimana hak protektif yang dimiliki (seperti yang dihasilkan dari hubungan pinjaman) menjadi substantif dan mengakibatkan Bank memiliki kekuasaan atas entitas anak.

Laporan keuangan dari entitas anak dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal pengendalian dimulai sampai dengan tanggal pengendalian berakhir.

Ketika Bank kehilangan kendali atas entitas anak, Bank menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak, dan kepentingan non-pengendali terkait dan komponen ekuitas lainnya. Laba atau rugi yang timbul diakui dalam laba rugi. Kepentingan yang dipertahankan di entitas anak sebelumnya diukur sebesar nilai wajar ketika pengendalian hilang.

Seluruh transaksi dan saldo antar perusahaan dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian, sehingga laporan keuangan konsolidasian hanya mencakup transaksi dan saldo dengan pihak lain.

Akuisisi entitas anak oleh Bank dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan akuisisi diukur pada nilai wajar aset yang diberikan, instrumen ekuitas yang diterbitkan, liabilitas yang terjadi atau diambil dan penyesuaian harga beli kontinjensi, jika ada, pada tanggal transaksi. *Goodwill* yang timbul dari akuisisi entitas anak diuji penurunan nilainya minimal secara tahunan. Keuntungan yang dihasilkan atas pembelian dengan diskon diakui langsung pada laba rugi. Biaya-biaya transaksi yang timbul dari akuisisi entitas anak dibebankan langsung pada laba rugi tahun berjalan.

Kepentingan non-pengendali diakui pada tanggal kombinasi bisnis dan selanjutnya disesuaikan dengan proporsi atas perubahan aset bersih teridentifikasi entitas anak.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of the Bank and its subsidiary.

Control over a subsidiary is presumed to exist if the Bank is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the subsidiary and has the ability to affect those returns through its power over the subsidiary. The Bank reassesses whether it has control if there are changes to one or more of the elements of the control. This includes circumstances in which protective rights held (e.g. those resulting from a lending relationship) become substantive and lead to the Bank having power over a subsidiary.

The financial statements of subsidiary are included in the consolidated financial statements from the date on which control commences until the date when control ceases.

When the Bank loses control over a subsidiary, it derecognises the assets and liabilities of the subsidiary, and any related non-controlling interests and other components of equity. Any resulting gain or loss is recognised in profit or loss. Any interest retained in the former subsidiary is measured at fair value when the control is lost.

All inter-company transactions and balances are eliminated in the consolidated financial statements; accordingly, the consolidated financial statements include only transactions and balances with other parties.

The acquisition method is used to account for the acquisition of subsidiary by the Bank. The cost of acquisition is measured at the fair value of the assets given, equity instruments issued, liabilities incurred or assumed and contingent consideration, if any, at the transaction date. Goodwill arising from the acquisition of subsidiary is tested at least annually for impairment. Any gain on bargain purchase is recognised in profit or loss immediately. Transaction costs incurred in the acquisition of subsidiary are directly expensed in the current year profit or loss.

Non-controlling interest is recognised at the date of initial business combination and subsequently adjusted by proportion of change in identifiable net assets of subsidiaries.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

f. Prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Perubahan dalam bagian kepemilikan Bank pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian diperlakukan sebagai transaksi antara pemegang ekuitas dan dicatat sebagai transaksi ekuitas.

Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham non-pengendali atas laba tahun berjalan dan ekuitas entitas anak tersebut berdasarkan persentase kepemilikan pemegang saham non-pengendali pada entitas anak tersebut.

g. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, istilah pihak-pihak berelasi digunakan sesuai dengan PSAK No. 7 mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

h. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan Bank dan Entitas Anak terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank-bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain, efek-efek, tagihan derivatif, tagihan akseptasi, pinjaman yang diberikan, pembiayaan/piutang syariah, penyertaan saham dan tagihan lainnya (yang disajikan sebagai bagian dari aset lain-lain).

Liabilitas keuangan Bank dan Entitas Anak terdiri dari liabilitas segera, simpanan dari nasabah, simpanan dari bank-bank lain, liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, efek-efek yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, akrual, pinjaman subordinasi, dan liabilitas lain-lain.

h.1. Klasifikasi

Aset keuangan

**Kebijakan berlaku mulai tanggal
1 Januari 2020**

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- i. Biaya perolehan diamortisasi;
- ii. Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI");
- iii. Nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL")

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Basis of Consolidation (continued)

Changes in ownership interest in subsidiary that do not result in a loss of control are treated as transaction between equity holders and are accounted for as equity transactions.

Non-controlling interest is presented as part of equity in the consolidated statements of financial position and represents the non-controlling shareholders' proportionate share in the net income for the year and equity of the subsidiary based on the percentage of ownership of the non-controlling shareholders in the subsidiary.

g. Transactions with Related Parties

In these consolidated financial statements, the term related parties is used as defined in PSAK No. 7 regarding "Related Party Disclosures".

h. Financial Assets and Financial Liabilities

The Bank and Subsidiary's financial assets consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, securities, derivative receivables, acceptance receivables, loans, sharia financing/receivables, investment in shares and other receivables (presented as part of other assets).

The Bank and Subsidiary's financial liabilities consist of obligations due immediately, deposits from customers, deposits from other banks, derivative payables, acceptance payables, securities issued, borrowings, accruals, subordinated loans, and other liabilities.

h.1. Classification

Financial assets

Policy applicable from 1 January 2020

The Bank classified its financial assets into the following categories on initial recognition:

- i. At amortised cost;
- ii. Fair value through other comprehensive income ("FVOCI");
- iii. Fair value through profit or loss ("FVTPL")



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**h. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
(lanjutan)**

**h. Financial Assets and Financial Liabilities
(continued)**

h.1. Klasifikasi (lanjutan)

h.1. Classification (continued)

Aset keuangan (lanjutan)

Financial assets (continued)

**Kebijakan berlaku mulai tanggal
1 Januari 2020 (lanjutan)**

**Policy applicable from 1 January 2020
(continued)**

Aset keuangan diklasifikasikan ke dalam salah satu dari kategori ini pada saat pengakuan awal berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki serta karakteristik arus kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Financial asset is classified into one of these categories on initial recognition based on the business model within which it is held, and its contractual cash flow characteristics. The business model reflects how groups of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

Aset keuangan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

A financial asset is measured at amortised cost only if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*hold to collect*); dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata dari jumlah pokok terutang.

- *The financial asset is held within a business model whose objective is to hold the asset to collect contractual cash flows (hold to collect); and*
- *Its contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

Aset keuangan diukur pada FVOCI hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

A financial asset is measured at FVOCI only if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan (*hold to collect and sell*); dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata dari jumlah pokok terutang.

- *The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset (hold to collect and sell); and*
- *Its contractual terms of financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI sebagaimana ketentuan di atas diukur dengan FVTPL.

All financial assets not classified as measured at amortised cost or FVOCI as described above are measured at FVTPL.

Aset keuangan tidak direklasifikasi setelah pengakuan awal, kecuali dalam periode setelah Bank mengubah model bisnis yang mengelola aset keuangan.

Financial assets are not reclassified subsequent to their initial recognition, except in the period after the Bank changes its business model for managing financial assets.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**h. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
(lanjutan)**

**h. Financial Assets and Financial Liabilities
(continued)**

h.1. Klasifikasi (lanjutan)

h.1. Classification (continued)

Aset keuangan (lanjutan)

Financial assets (continued)

**Kebijakan berlaku mulai tanggal
1 Januari 2020 (lanjutan)**

**Policy applicable from 1 January 2020
(continued)**

Penilaian model bisnis

Business model assessment

Model bisnis Bank ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Model bisnis Bank tidak bergantung pada intensi manajemen untuk instrumen individu. Sejalan dengan hal tersebut, kondisi ini bukan merupakan pendekatan instrumen-per-instrumen untuk klasifikasi dan ditentukan pada level agregasi yang lebih tinggi yaitu pada level portfolio.

The Bank's business model is defined at a level that reflects how group of financial assets are managed together to achieve certain business objectives. The Bank's model does not depend on management's intention for individual instruments. Accordingly, this condition is not an instrument-by-instrument approach to classification and is determined at a higher level of aggregation, which is at portfolio level.

Model bisnis Bank mengacu pada pengelolaan aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Penilaian ini tidak dilakukan atas dasar skenario bahwa Bank tidak mengharapkan terjadinya skenario "kondisi terburuk" atau skenario "kondisi stres". Dalam kondisi Bank menjual portfolio aset keuangan tertentu dalam skenario kondisi terburuk, skenario itu tidak akan mempengaruhi penilaian terhadap model bisnis untuk aset tersebut jika Bank secara wajar mengharapkan bahwa skenario seperti itu tidak akan terjadi.

The Bank's business model refers to managing financial assets to generate cash flows. Cash flows will result from obtaining contractual cash flows, selling financial assets or both. This assessment is not made based on a scenario where the Bank does not expect a "worst condition" scenario or a "stress condition" scenario to occur. In a situation where the Bank sells certain portfolios of financial assets in a worst-case scenario, that scenario will not affect the assessment of the business model for that asset if the Bank reasonably expects that such a scenario will not occur.

Akan tetapi, ketika Bank menilai model bisnis untuk aset keuangan yang baru diterbitkan atau baru dibeli, Bank harus mempertimbangkan informasi tentang bagaimana arus kas direalisasikan di masa lalu, bersama dengan semua informasi yang relevan lainnya.

However, when the Bank assesses the business model for newly issued or recently purchased financial assets, it must consider information about how cash flows were realized in the past, along with all other relevant information.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**h. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
(lanjutan)**

**h. Financial Assets and Financial Liabilities
(continued)**

h.1. Klasifikasi (lanjutan)

h.1. Classification (continued)

Aset keuangan (lanjutan)

Financial assets (continued)

**Kebijakan berlaku mulai tanggal
1 Januari 2020 (lanjutan)**

**Policy applicable from 1 January 2020
(continued)**

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Business model assessment (continued)

Model bisnis untuk mengelola aset keuangan adalah kenyataan dan bukan hanya sebuah asersi. Hal ini biasanya diobservasi melalui aktivitas yang dilakukan Bank untuk mencapai tujuan dari model bisnis. Bank mempertimbangkan semua bukti yang relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Bukti yang relevan tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

The business model for managing financial assets is a reality and not just an assertion. This is usually observed through the activities the entity carries out to achieve the objectives of the business model. The Bank considers all relevant evidence available at the valuation date. The relevant evidence includes, but is not limited to:

- Kebijakan dan tujuan yang dinyatakan untuk portofolio dan pengoperasian kebijakan tersebut dalam praktiknya. Secara khusus, apakah strategi manajemen berfokus pada menghasilkan pendapatan bunga kontraktual, mempertahankan profil suku bunga tertentu, mencocokkan durasi aset keuangan dengan durasi liabilitas yang mendanai aset tersebut atau mewujudkan arus kas melalui penjualan aset;
- bagaimana kinerja portofolio dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Bank;
- risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan strategi mengenai bagaimana risiko tersebut dikelola; dan
- bagaimana manajer bisnis dikompensasi (sebagai contoh, apakah kompensasi berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

- *the stated policies and objectives for the portfolio and the operation of those policies in practice. In particular, whether management's strategy focusses on earning contractual interest income, maintaining a particular interest rate profile, matching the duration of the financial assets to the duration of the liabilities that are funding those assets or realising cash flows through sale of the assets;*
- *how the performance of the portfolio is evaluated and reported to key management personnel of the Bank;*
- *the risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and its strategy for how those risks are managed; and*
- *how the business manager is compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of assets under management or the contractual cash flows obtained).*

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

h. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
(lanjutan)

h. Financial Assets and Financial Liabilities
(continued)

h.1. Klasifikasi (lanjutan)

h.1. Classification (continued)

Aset keuangan (lanjutan)

Financial assets (continued)

Kebijakan berlaku mulai tanggal
1 Januari 2020 (lanjutan)

Policy applicable from 1 January 2020
(continued)

Penilaian apakah arus kas kontraktual
hanya merupakan pembayaran pokok dan
bunga semata (SPPI)

Assessment of whether contractual cash
flows are solely payments of principal and
interest (SPPI)

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta margin keuntungan.

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Bank mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Bank mempertimbangkan:

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Bank considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Bank considers:

- Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Ketentuan percepatan pelunasan dan perpanjangan;
- Ketentuan yang membatasi klaim Bank atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *non-recourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

- Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;
- Leverage features;
- Prepayment and extension terms;
- Terms that limit the Bank's claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse loans); and
- Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**h. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
(lanjutan)**

h.1. Klasifikasi (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

**Kebijakan berlaku sebelum tanggal
1 Januari 2020**

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya ke dalam kategori pengukuran sebagai berikut pada saat pengakuan awal berdasarkan sifat dan tujuannya:

- i. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) subklasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- ii. Tersedia untuk dijual;
- iii. Dimiliki hingga jatuh tempo;
- iv. Pinjaman yang diberikan dan piutang.

Instrumen keuangan dengan kategori untuk diperdagangkan adalah instrumen keuangan yang diperoleh atau dimiliki Bank terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga atau suku bunga dalam jangka pendek atau untuk lindung nilai instrumen *trading book* lainnya.

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori aset keuangan lainnya.

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Bank mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, dan yang tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi atau tersedia untuk dijual.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan Bank tidak berniat untuk menjualnya segera atau dalam waktu dekat.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**h. Financial Assets and Financial Liabilities
(continued)**

h.1. Classification (continued)

Financial assets (continued)

Policy applicable before 1 January 2020

The Bank classifies its financial assets into the following measurement categories at initial recognition based on their nature and purpose:

- i. Fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. financial assets designated as such upon initial recognition and financial assets classified as held for trading;*
- ii. Available-for-sale;*
- iii. Held-to-maturity;*
- iv. Loans and receivables.*

Held for trading financial instruments are those financial instruments that the Bank acquires or incurs principally for the purpose of selling or repurchasing with the intention of benefiting from short-term price or interest rate movements or hedging for other trading book instruments.

Available-for-sale financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in one of the other categories of financial assets.

Held-to-maturity investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Bank has the positive intent and ability to hold to maturity, and which are not designated at fair value through profit or loss or available-for-sale.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market and that the Bank does not intend to sell immediately or in the near term.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**h. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
(lanjutan)**

h.1. Klasifikasi (lanjutan)

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori pengukuran sebagai berikut pada saat pengakuan awal berdasarkan sifat dan tujuannya:

- i. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- ii. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit-taking*) yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai instrumen diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas keuangan diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi terdiri dari liabilitas keuangan non-derivatif yang tidak dimiliki Bank untuk diperdagangkan dan tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**h. Financial Assets and Financial Liabilities
(continued)**

h.1. Classification (continued)

Financial liabilities

Financial liabilities are classified into the following measurement categories at initial recognition based on their nature and purpose:

- i. Fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. financial liabilities designated as such upon initial recognition and financial liabilities classified as held for trading;*
- ii. Financial liabilities measured at amortised cost.*

A financial liability is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term or if it is part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit-taking. Derivatives are also categorised as held for trading instrument unless they are designated and effective as hedging instruments.

Gains and losses arising from changes in fair value of financial liabilities are recognised in current year profit or loss.

Financial liabilities measured at amortised cost consist of non-derivative financial liabilities that are not held for trading purpose and not designated at fair value through profit or loss.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**h. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
(lanjutan)**

h.2. Pengakuan

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah/dikurangi (untuk instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada awal pengakuan liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

Bank dan Entitas Anak pada awalnya mengakui pinjaman/pembiayaan yang diberikan dan simpanan pada tanggal perolehan.

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (reguler) diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank dan Entitas Anak memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank dan Entitas Anak menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**h. Financial Assets and Financial Liabilities
(continued)**

h.2. Recognition

A financial asset or financial liability is initially measured at fair value plus/less (for financial instruments not subsequently measured at fair value through profit or loss) transaction costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability. The subsequent measurement of financial assets and financial liabilities depends on their classification.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the instrument had not been acquired or issued. In the case of financial assets, transaction costs are added to the amount recognised initially, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized initially. Such transaction costs are amortised over the terms of the instruments based on the effective interest method and are recorded as part of interest income for transaction costs related to financial assets or interest expense for transaction costs related to financial liabilities.

The Bank and Subsidiary initially recognise loans/financing and deposits on the date of origination.

Regular way purchases and sales of financial assets are recognised on the trade date at which the Bank and Subsidiary commit to purchase or sell those assets.

All other financial assets and liabilities are initially recognised on the trade date at which the Bank and Subsidiary become a party to the contractual provisions of the instrument.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**h. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
(lanjutan)**

**h.3. Biaya perolehan diamortisasi dan nilai
tercatat bruto**

'Biaya perolehan diamortisasi' aset keuangan atau liabilitas keuangan merupakan suatu nilai dimana aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif atas selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan, untuk aset keuangan, disesuaikan dengan cadangan kerugian penurunan nilai. 'Nilai tercatat bruto aset keuangan' merupakan biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

h.4. Penghentian pengakuan

Bank dan Entitas Anak menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau Bank dan Entitas Anak mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Bank dan Entitas Anak secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Bank dan Entitas Anak diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Bank dan Entitas Anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Dalam transaksi dimana Bank dan Entitas Anak secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Bank dan Entitas Anak menghentikan pengakuan aset tersebut jika Bank dan Entitas Anak tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Bank dan Entitas Anak tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Bank dan Entitas Anak dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**h. Financial Assets and Financial Liabilities
(continued)**

**h.3. Amortised cost and gross carrying
amount**

The 'amortised cost' of a financial asset or financial liability is the amount at which the financial asset or financial liability is measured on initial recognition minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortisation using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount and, for financial assets, adjusted for any allowance for impairment losses. The 'gross carrying amount of financial asset' is the amortised cost of a financial asset before adjusting for any allowance for impairment losses.

h.4. Derecognition

The Bank and Subsidiary derecognise a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or when it transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the Bank and Subsidiary is recognised as a separate asset or liability.

The Bank and Subsidiary derecognise a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled or expired.

In transactions in which the Bank and Subsidiary neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Bank and Subsidiary derecognise the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognised separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the Bank and Subsidiary continue to recognise the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**h. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
(lanjutan)**

h.4. Penghentian pengakuan (lanjutan)

Bank dan Entitas Anak menghapusbukkan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Bank dan Entitas Anak menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur kredit yang diberikan.

h.5. Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Bank dan Entitas Anak atau pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**h. Financial Assets and Financial Liabilities
(continued)**

h.4. Derecognition (continued)

The Bank and Subsidiary write off a financial asset and any related allowance for impairment losses, when the Bank and Subsidiary determine that the financial asset is uncollectible. This determination is reached after considering information such as the occurrence of significant changes in the financial position of borrower/financial asset's issuer such that the borrower/financial asset's issuer can no longer pay the obligation, or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the credit exposure.

h.5. Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default insolvency or bankruptcy of the Bank and Subsidiary or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset
keuangan**

**i.1. Aset keuangan yang dicatat pada biaya
perolehan diamortisasi**

**Kebijakan berlaku mulai tanggal
1 Januari 2020**

Dalam mengestimasi cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan, Bank telah menerapkan PSAK 71 sejak tanggal 1 Januari 2020. PSAK 71 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian (ECL 12 bulan) atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (ECL *lifetime*). ECL *lifetime* adalah kerugian ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan ECL 12 bulan adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit (yaitu nilai kini dari seluruh kekurangan kas) selama perkiraan umur instrumen keuangan. Kekurangan kas adalah selisih antara arus kas yang diperkirakan akan diterima entitas. Karena kerugian kredit ekspektasian mempertimbangkan jumlah dan waktu pembayaran, kerugian kredit tetap timbul meskipun entitas mengharapkan untuk dibayar penuh namun setelah jatuh tempo kontraktual.

Kerugian kredit ekspektasian atau *Expected Credit Loss* ("ECL") diakui untuk seluruh instrumen utang keuangan, komitmen pinjaman dan jaminan keuangan yang diklasifikasikan sebagai *hold to collect* atau *hold to collect and sell* dan memiliki arus kas SPPI. ECL tidak diakui untuk instrumen keuangan yang ditetapkan sebagai FVTPL dan instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai FVOCI.

Sesuai dengan siaran pers dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 10 Januari 2018 dan ISAK 102, khusus untuk transaksi berbasis syariah, pengukuran penurunan nilai dari aset keuangan tidak mengadopsi PSAK 71.

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank akan mengukur cadangan kerugian instrumen keuangan sebesar kerugian kredit sepanjang umur (*lifetime*) instrumen keuangan, kecuali dalam kondisi berikut, dimana cadangan kerugian yang akan diakui sebesar ECL 12 bulan:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**i. Allowance for impairment losses of financial
assets**

**i.1. Financial assets carried at amortised
cost**

Policy applicable from 1 January 2020

To estimate impairment loss allowance on financial assets, the Bank has implemented PSAK 71 since 1 January 2020. PSAK 71 requires a loss allowance to be recognized at an amount equal to either 12-month ECL or lifetime ECL. Lifetime ECL is the ECL that results from all possible default events over the expected life of a financial instrument, whereas 12-month ECL is the portion of ECL that results from default events that are possible within the 12-month after reporting date.

Expected credit losses are a probability-weighted estimate of credit losses (i.e the present value of all cash shortfalls) over the expected life of the financial instrument. A cash shortfall is the difference between the cash flows that are due to an entity in accordance with the contract and the cash flows that the entity expects to receive. Because expected credit losses consider the amount and timing of payments, a credit loss arises even if the entity expects to be paid in full but later than when contractually due.

Expected Credit Losses ("ECL") are recognised for all financial debt instruments, loan commitments and financial guarantees that are classified as hold to collect or hold to collect and sell and have SPPI cash flows. ECL is not recognised for financial instruments designated as FVTPL and equity instruments designated as FVOCI.

In accordance to press conference of Indonesian Institute of Accountants on 10 January 2018 and ISAK 102, particularly for sharia-based transactions, the allowance for impairment losses of financial assets does not adopt PSAK 71.

At each reporting date, the Bank shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime credit losses, except in the following condition, for which the amount recognized will be 12-month ECL:



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset
keuangan (lanjutan)**

**i.1. Aset keuangan yang dicatat pada biaya
perolehan diamortisasi (lanjutan)**

**Kebijakan berlaku mulai tanggal
1 Januari 2020 (lanjutan)**

- instrumen keuangan dengan risiko kredit rendah; dan
- instrumen keuangan dengan risiko kredit yang belum meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Estimasi eksposur kredit untuk tujuan manajemen risiko adalah kompleks dan membutuhkan penggunaan model, dikarenakan eksposur yang bervariasi terkait dengan perubahan kondisi pasar, arus kas yang diharapkan dan berjalannya waktu. Penilaian risiko kredit dari portofolio aset memerlukan estimasi lebih lanjut mengenai kemungkinan terjadinya gagal bayar, dari rasio kerugian yang terkait dan korelasi gagal bayar antar pihak. Bank mengukur risiko kredit menggunakan *Probability of Default (PD)*, *Exposure at Default (EAD)*, *Loss Given Default (LGD)* dan variabel makroekonomi untuk estimasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*).

Untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian (ECL), komponen-komponen tersebut akan diperhitungkan bersama-sama dan didiskontokan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif. Dasar input, asumsi dan teknik estimasi diungkapkan di Catatan 3.

Untuk portofolio korporasi, risiko kredit diukur berdasarkan pada pengelompokan tingkat peringkat internal.

Untuk portofolio treasury, risiko kredit diukur berdasarkan pada pengelompokan tingkat peringkat internal. Apabila tidak terdapat informasi peringkat internal untuk pihak lawan, pengelompokan didasarkan pada peringkat kredit dari pihak lawan. Untuk perhitungan PD, Bank menggunakan struktur jangka waktu (*term structure*) PD yang dikeluarkan oleh peringkat eksternal.

Untuk kategori portofolio ritel, risiko kredit diukur berdasarkan pada kelompok hari tunggakan untuk membentuk *term structure* PD yang akan digunakan untuk menghitung perhitungan ECL dengan pendekatan model statistik.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**i. Allowance for impairment losses of financial
assets (continued)**

**i.1. Financial assets carried at amortised cost
(continued)**

**Policy applicable from 1 January 2020
(continued)**

- financial instruments with low credit risk; and
- financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.

The estimation of credit exposure for risk management purpose is complex and requires the use of models, as the exposure varies with changes in market conditions, expected cash flows and the passage of time. The assessment of credit risk of a portfolio of assets entails further estimations as to the likelihood of defaults occurring, of the associated loss ratios and of default correlations between counterparties. The Bank measures credit risk using Probability of Default (PD), Exposure at Default (EAD), Loss Given Default (LGD) and macroeconomic variables for forward looking perspective.

To determine the expected credit loss (ECL), these components are multiplied together and discounted to the reporting date using the effective interest rate. The basis of inputs, assumptions and the estimation technique are disclosed in Note 3.

For corporate portfolio, credit risk is measured based on grouping grade of internal grading.

For the treasury portfolio, credit risk is measured based on grouping grade of internal grading. If there is no information of internal grading for counterparty, the categorizing is based on credit rating from counterparty issuer. For PD calculation, the Bank uses PD term structure issued by external rating.

For retail portfolio category, the credit risk is measured based on days past due buckets to create PD term structure used to compute ECL calculation by statistical model approach.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset
keuangan (lanjutan)**

**i.1. Aset keuangan yang dicatat pada biaya
perolehan diamortisasi (lanjutan)**

**Kebijakan berlaku mulai tanggal
1 Januari 2020 (lanjutan)**

Bank menganggap efek-efek investasi yang diterbitkan oleh pemerintah (seperti obligasi pemerintah) dalam mata uang Rupiah dan dana yang ditempatkan pada Bank Indonesia memiliki risiko kredit yang rendah, karena pokok dan bunga efek-efek pemerintah tersebut dijamin oleh pemerintah dan tidak ada kerugian yang pernah terjadi. Bank tidak menerapkan pengecualian risiko kredit yang rendah atas instrumen keuangan lainnya.

**Pengukuran kerugian kredit
ekspektasian**

Sesuai PSAK 71, Bank menerapkan model "Tiga-Tahap" untuk penurunan nilai berdasarkan perubahan kualitas kredit sejak pengakuan awal seperti dirangkum di bawah ini:

- Instrumen keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai kredit sejak pengakuan awal diklasifikasikan dalam "Tahap 1".
- Jika peningkatan signifikan dalam risiko kredit ("SICR") sejak pengakuan awal diidentifikasi, instrumen keuangan dipindahkan ke "Tahap 2" tetapi belum dianggap mengalami penurunan nilai kredit.
- Jika instrumen keuangan mengalami penurunan nilai kredit, instrumen keuangan kemudian dipindahkan ke "Tahap 3"

Instrumen keuangan - Tahap 1

Kerugian kredit ekspektasian instrumen keuangan Tahap 1 diakui sebesar kekurangan kas yang timbul dari kemungkinan gagal bayar di masa depan dalam kurun waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kerugian kredit ekspektasian terus ditentukan oleh dasar ini sampai terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan pada instrumen tersebut atau instrumen tersebut telah mengalami penurunan nilai kredit dimana kerugian kredit ekspektasian akan dihitung berdasarkan basis *lifetime*. Jika suatu instrumen tidak lagi dianggap menunjukkan peningkatan risiko kredit yang signifikan, maka kerugian kredit ekspektasian dihitung kembali berdasarkan basis 12 bulan.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**i. Allowance for impairment losses of
financial assets (continued)**

**i.1. Financial assets carried at amortised
cost (continued)**

**Policy applicable from 1 January 2020
(continued)**

The Bank considers a Rupiah denominated government investment securities (such as government bonds) and funds placed with Bank Indonesia are having low credit risk, since the principal and interest of government investment securities are guaranteed by the government and there is no historical loss experience. The Bank does not apply the low credit risk exemption to any other financial instruments.

Expected credit loss measurement

In accordance with PSAK 71, the Bank applied "Three-Stage" model for impairment based on changes in credit quality since initial recognition as summarised below:

- A financial instrument that is not credit-impaired since initial recognition is classified in "Stage 1".
- If a significant increase in credit risk ("SICR") since initial recognition is identified, the financial instrument is moved to "Stage 2" but is not yet deemed to be credit-impaired.
- If the financial instrument is credit-impaired, the financial instrument is then moved to "Stage 3"

Financial instruments - Stage 1

Stage 1 expected credit losses are recognized at the amount of cash shortfalls arising from possible default events up to 12 months into the future from the reporting date. Expected credit losses continue to be determined on this basis until there is either a significant increase in the credit risk of an instrument or the instrument becomes credit-impaired where the expected credit losses will be determined based on *lifetime*. If an instrument is no longer considered to exhibit a significant increase in credit risk, expected credit losses will revert to being determined on a 12-month basis.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset
keuangan (lanjutan)**

**i.1. Aset keuangan yang dicatat pada biaya
perolehan diamortisasi (lanjutan)**

**Kebijakan berlaku mulai tanggal
1 Januari 2020 (lanjutan)**

**Pengukuran kerugian kredit
ekspektasian (lanjutan)**

Peningkatan risiko kredit secara signifikan
(SICR) - Tahap 2

Bank menganggap instrumen keuangan telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika kriteria di bawah ini telah dipenuhi:

- Untuk segmen korporasi menggunakan parameter daftar pantauan (*watchlist*) dan perubahan nilai PD 12 bulan sebesar 100% sebagai akibat perpindahan peringkat internal sejak pengakuan awal.
- Untuk instrumen keuangan di treasury menggunakan pergerakan 3 titik (*notch*) dari peringkat pada saat pengakuan awal.
- Untuk segmen ritel menggunakan informasi jumlah hari tunggakan dalam sebulan dalam kelompok tunggakan. SICR terjadi ketika jumlah hari tunggakan mencapai lebih dari 30 hari.

Eksposur yang mengalami penurunan nilai
kredit atau gagal bayar - Tahap 3

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (atau gagal bayar) merupakan aset yang setidaknya telah memiliki tunggakan lebih dari 90 hari atas pokok dan/atau bunga. Aset keuangan juga dianggap mengalami penurunan nilai kredit dimana debitur kemungkinan besar tidak akan membayar dengan terjadinya satu atau lebih kejadian yang teramati yang memiliki dampak menurunkan jumlah estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut.

Pinjaman korporasi

Pinjaman korporasi yang dikategorikan mengalami penurunan nilai adalah pinjaman dari debitur dengan peringkat internal 7R atau lebih rendah.

Pinjaman non-korporasi

Pinjaman non-korporasi yang dikategorikan mengalami penurunan nilai adalah pinjaman yang memenuhi setidaknya satu dari kriteria berikut:

- a. Hari tunggakan lebih dari 90 hari
- b. Kolektibilitas OJK 3, 4 dan 5

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**i. Allowance for impairment losses of
financial assets (continued)**

**i.1. Financial assets carried at amortised
cost (continued)**

**Policy applicable from 1 January 2020
(continued)**

**Expected credit loss measurement
(continued)**

Significant increase in credit risk (SICR) -
Stage 2

The Bank considers a financial instrument to have experienced a significant increase in credit risk when the below criteria have been met:

- For corporate segments use watchlist parameters and 12-month PD change by 100% resulted from internal grading movement from its initial recognition.
- For treasury financial instruments use 3 notch movements from origination rating at its initial recognition.
- For retail segment use days past due information in month in arrears grouping. SICR incurred if the days past due reached more than 30 days.

Credit-impaired (or defaulted) exposures -
Stage 3

Financial assets that are credit impaired (or in default) represent those that are at least 90 days past due in respect of principal and/or interest. Financial assets are also considered to be credit impaired where the debtors are unlikely to pay on the occurrence of one or more observable events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset.

Corporate loans

Corporate loans that are categorised as impaired are loans from debtors with internal grading at 7R or lower.

Non-corporate loans

Non-corporate loans that are categorised as impaired are loans that satisfy at least one of the following criteria:

- a. Days past due over 90 days
- b. OJK Grading 3, 4 and 5

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset
keuangan (lanjutan)**

**i.1. Aset keuangan yang dicatat pada biaya
perolehan diamortisasi (lanjutan)**

**Kebijakan berlaku mulai tanggal
1 Januari 2020 (lanjutan)**

**Pengukuran kerugian kredit
ekspektasian (lanjutan)**

Eksposur yang mengalami penurunan nilai
kredit atau gagal bayar - Tahap 3 (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap aset keuangan yang mengalami penurunan nilai ditentukan berdasarkan penilaian terhadap arus kas yang dapat dipulihkan berdasarkan sejumlah skenario dengan probabilitas tertimbang, termasuk realisasi jaminan yang dimiliki jika memungkinkan. Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang diperkirakan akan dipulihkan, didiskontokan pada suku bunga efektif awal, dan nilai tercatat bruto instrumen sebelum penurunan nilai kredit.

Pengukuran ECL di seluruh tahapan aset diperlukan untuk mencerminkan jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi menggunakan informasi yang wajar dan didukung dengan peristiwa masa lampau, kondisi saat ini, dan proyeksi terkait dengan kondisi ekonomi di masa depan.

Periode yang diperhitungkan ketika mengukur ECL adalah periode yang lebih pendek antara umur ekspektasian dan periode kontrak aset keuangan, Umur ekspektasian dapat dipengaruhi oleh pembayaran dimuka dan periode kontrak maksimum melalui opsi perpanjangan kontrak. Untuk portfolio *revolving* tertentu, umur ekspektasian dinilai sepanjang periode dimana Bank terekspos dengan risiko kredit, bukan sepanjang periode kontrak.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**i. Allowance for impairment losses of
financial assets (continued)**

**i.1. Financial assets carried at amortised
cost (continued)**

**Policy applicable from 1 January 2020
(continued)**

**Expected credit loss measurement
(continued)**

Credit-impaired (or defaulted) exposures -
Stage 3 (continued)

Loss provisions against credit-impaired financial assets are determined based on an assessment of the recoverable cash flows under a range of scenarios with weighted probabilities, including the realisation of any collateral held where appropriate. The loss provisions held represent the difference between the present value of the cash flows expected to be recovered, discounted at the instrument's original effective interest rate, and the gross carrying value of the instrument prior to any credit impairment.

The measurement of ECL across all stages is required to reflect an unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of reasonably possible outcomes using reasonable and supportable information about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.

The period considered when measuring ECL is the shorter of the expected life and the contractual term of the financial asset. The expected life may be impacted by prepayments and the maximum contractual term by extension options. For certain revolving portfolios, the expected life is assessed over the period that the Bank is exposed to credit risk, not the contractual term of contract.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset
keuangan (lanjutan)**

**i. Allowance for impairment losses of
financial assets (continued)**

**i.1. Aset keuangan yang dicatat pada biaya
perolehan diamortisasi (lanjutan)**

**i.1. Financial assets carried at amortised
cost (continued)**

**Kebijakan berlaku mulai tanggal
1 Januari 2020 (lanjutan)**

**Policy applicable from 1 January 2020
(continued)**

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian
(lanjutan)

Expected credit loss measurement
(continued)

ECL atas komitmen pinjaman dan jaminan keuangan diakui pada liabilitas lain-lain. Jika instrumen keuangan mencakup komponen yang telah ditarik dan yang belum ditarik, dan Bank tidak dapat mengidentifikasi ECL pada komponen pinjaman secara terpisah dari komponen yang telah ditarik, Bank menyajikan cadangan kerugian gabungan untuk kedua komponen. Jumlah gabungan cadangan kerugian disajikan sebagai pengurang dari nilai tercatat bruto komponen yang telah ditarik. Kelebihan dari cadangan kerugian atas nilai tercatat komponen yang telah ditarik disajikan sebagai liabilitas lain-lain.

ECL on loan commitments and financial guarantees is recognised as other liabilities. Where a financial instrument includes both a drawn and an undrawn component, and the Bank cannot identify the ECL on the loan commitment component separately from those on the drawn component, the Bank presents a combined loss allowance for both components. The combined amount is presented as a deduction from the gross carrying amount of the drawn component. Any excess of the loss allowance over the gross carrying amount of the drawn component is presented as other liabilities.

Penyajian kerugian kredit ekspektasian

Presentation of expected credit losses

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, saldo di laporan posisi keuangan konsolidasian mencerminkan nilai tercatat bruto dikurangi ECL. Perubahan atas kerugian kredit ekspektasian diakui pada laba rugi tahun berjalan.

For financial assets measured at amortized cost, the balance at consolidated statement of financial position reflects the gross carrying amount less ECL. Changes in expected credit losses are recognised in the current year profit or loss.

**Kebijakan berlaku sebelum tanggal
1 Januari 2020**

Policy applicable before 1 January 2020

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

The Bank assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset
keuangan (lanjutan)**

**i.1. Aset keuangan yang dicatat pada biaya
perolehan diamortisasi (lanjutan)**

**Kebijakan berlaku sebelum tanggal
1 Januari 2020 (lanjutan)**

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- a) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan;
- d) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- f) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang;

Periode yang diestimasi antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi.

Pada awalnya, Bank menentukan apakah terdapat bukti obyektif seperti yang dijelaskan di atas mengenai penurunan nilai atas aset keuangan. Penilaian individual dilakukan atas aset keuangan yang signifikan yang mengalami penurunan nilai. Aset keuangan yang tidak signifikan namun mengalami penurunan nilai atau direstrukturisasi dimasukkan dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko yang serupa dan dilakukan penilaian secara kolektif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**i. Allowance for impairment losses of financial
assets (continued)**

**i.1. Financial assets carried at amortised cost
(continued)**

**Policy applicable before 1 January 2020
(continued)**

The criteria used by the Bank to determine that there is objective evidence of an impairment loss include the followings:

- a) significant financial difficulty of the issuer or obligor;
- b) a breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;
- c) the lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, granting to the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;
- d) it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganisation;
- e) the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
- f) observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows.

The estimated period between a loss occurring and its identification is determined by the management for each identified portfolio.

Initially, the Bank assesses whether objective evidence of impairment for financial asset exists as described above. An individual assessment is performed on the significant impaired or restructured financial asset. The impaired financial assets which are not classified as individually significant are included in a group of financial asset with similar credit risk characteristics and collectively assessed.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset
keuangan (lanjutan)**

**i.1. Aset keuangan yang dicatat pada biaya
perolehan diamortisasi (lanjutan)**

**Kebijakan berlaku sebelum tanggal
1 Januari 2020 (lanjutan)**

Jika Bank menilai bahwa tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka akun atas aset keuangan tersebut akan masuk ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Akun yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (kecuali kerugian yang timbul di masa depan dari pinjaman yang diberikan) yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi kredit dan status tunggakan.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**i. Allowance for impairment losses of financial
assets (continued)**

**i.1. Financial assets carried at amortised
cost (continued)**

**Policy applicable before 1 January 2020
(continued)**

If the Bank assesses that there is no objective evidence of impairment for individually assessed financial asset, both for significant and insignificant amount, hence the account of financial asset will be included in a group of financial asset with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Accounts that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognised are not included in a collective assessment of impairment.

The amount of loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future losses from loans) discounted at the financial asset's original effective interest rate.

The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognised in the profit or loss. If a loan or held to maturity investment has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract.

The calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralised financial asset reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

For the purpose of a collective evaluation of impairment, financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics such as considering credit segmentation and past due status.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset
keuangan (lanjutan)**

**i.1. Aset keuangan yang dicatat pada biaya
perolehan diamortisasi (lanjutan)**

**Kebijakan berlaku sebelum tanggal
1 Januari 2020 (lanjutan)**

Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur atau pihak lawan untuk membayar seluruh saldo terutang sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

Bank menggunakan *statistical model analysis method*, yaitu *roll rates* dan *migration analysis method* untuk penilaian penurunan nilai aset keuangan yang ditinjau secara kolektif.

Pada *migration analysis method*, manajemen menentukan estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian untuk setiap portofolio yang diidentifikasi, yaitu 12 sampai 36 bulan.

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, aset tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Aset tersebut dapat dihapusbuku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi tahun berjalan.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laba rugi tahun berjalan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**i. Allowance for impairment losses of financial
assets (continued)**

**i.1. Financial assets carried at amortised cost
(continued)**

**Policy applicable before 1 January 2020
(continued)**

Those characteristics are relevant to the estimation of future cash flows for groups of such assets which indicate debtors or counterparties' ability to pay all amounts due according to the contractual terms of the assets being evaluated.

The Bank uses statistical model analysis method, namely roll rates and migration analysis methods for financial assets impairment which collectively assessed.

In migration analysis method, management determines 12 to 36 months as the estimated and identification period between a loss occurring for each identified portfolio.

When a loan receivable is uncollectible, the asset is written-off against the related allowance for impairment losses. Such assets are written-off after all necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

The provision expense of impairment losses is recognised in the current year profit or loss.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised (such as an improvement in the debtor's credit rating), the previously recognised impairment loss is reversed by adjusting the allowance account. The amount of the reversal is recognised in the current year profit or loss.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset
keuangan (lanjutan)**

**i.1. Aset keuangan yang dicatat pada biaya
perolehan diamortisasi (lanjutan)**

**Kebijakan berlaku sebelum tanggal
1 Januari 2020 (lanjutan)**

Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan pada akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya.

**i.2. Aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui penghasilan komprehensif
lain dan tersedia untuk dijual**

**Kebijakan berlaku mulai tanggal
1 Januari 2020**

Pengukuran ECL untuk aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) menggunakan pendekatan dan model perhitungan yang sama dengan pengukuran ECL untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Untuk aset keuangan instrumen utang dalam kategori FVOCI, saldo di laporan posisi keuangan konsolidasian mencerminkan nilai wajar instrumen, dengan ECL dibukukan terpisah sebagai cadangan pada penghasilan komprehensif lain. Perubahan atas kerugian kredit ekspektasian diakui pada laba rugi tahun berjalan.

**Kebijakan berlaku sebelum tanggal
1 Januari 2020**

Ketika terdapat bukti objektif adanya penurunan nilai untuk aset yang tersedia untuk dijual, kerugian kumulatif, yang merupakan selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laba rugi, dikeluarkan dari komponen ekuitas dan diakui pada laba rugi tahun berjalan.

Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar dari aset keuangan berupa instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laba rugi tahun berjalan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**i. Allowance for impairment losses of
financial assets (continued)**

**i.1. Financial assets carried at amortised
cost (continued)**

**Policy applicable before 1 January 2020
(continued)**

Subsequent recoveries of loans written off in the current year are credited to the allowance for impairment losses. Subsequent recoveries of loans written off in previous year are recognised as other operating income.

**i.2. Financial assets measured at fair value
through other comprehensive income
and available for sale**

Policy applicable from 1 January 2020

The ECL measurement for debt instrument financial assets measured at fair value through other comprehensive income uses the same approach and calculation model in measuring ECL for financial assets carried at amortised cost. For debt instrument financial assets in FVOCI category, the balance in consolidated statement of financial position reflects the instrument's fair value, with the ECL held as a separate reserve within other comprehensive income. Changes in expected credit losses are recognised in the current year profit or loss.

Policy applicable before 1 January 2020

If there is objective evidence for impairment exists for available for sale financial assets, the cumulative loss, measured as the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognised in profit or loss, is removed from equity component and recognised in the current year profit or loss.

If, in a subsequent period, the fair value of a debt financial asset classified as available for sale increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognised in profit or loss, such impairment loss is reversed through the current year profit or loss.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset
keuangan (lanjutan)**

i.3. Piutang murabahah

Entitas Anak melakukan evaluasi penurunan nilai secara kolektif karena seluruh piutang murabahah memiliki nilai tidak signifikan secara individu.

Untuk penurunan nilai secara kolektif ini, Entitas Anak mengelompokkan portofolio piutang berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit yaitu antara nasabah yang diberikan restrukturisasi dan nasabah yang tidak direstrukturisasi..

Entitas Anak menggunakan model analisa statistik dalam perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif, yaitu metode *migration analysis* dan metode *vintage analysis*.

Metode *migration analysis* digunakan untuk menentukan kerugian penurunan nilai dari nasabah yang tidak direstrukturisasi. Pada metode *migration analysis*, Entitas Anak menentukan tingkat kerugian dari portofolio selama periode antara terjadinya peristiwa gagal bayar dengan saat kerugian teridentifikasi untuk setiap portofolio yang teridentifikasi dalam jangka waktu 12 bulan. Kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah diukur sebesar selisih antara nilai tercatat piutang murabahah dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan tingkat imbal hasil efektif awal dari piutang murabahah tersebut.

Metode *vintage analysis* digunakan untuk menentukan kerugian penurunan nilai dari nasabah yang telah direstrukturisasi. Pada metode *vintage analysis*, Entitas Anak menentukan tingkat kerugian berdasarkan pengalaman Entitas Anak atas nasabah yang direstrukturisasi sebelumnya dari tanggal restrukturisasi sampai dengan piutang pembiayaan tersebut lunas atau dihapusbukukan.

Ketika pembiayaan yang diberikan tidak tertagih, pembiayaan tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pembiayaan tersebut dapat dihapusbuku setelah semua prosedur yang diperlukan telah terpenuhi dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kembali atas pembiayaan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan pada akun pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pembiayaan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasi lainnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**i. Allowance for impairment losses of
financial assets (continued)**

i.3. Murabahah receivables

The Subsidiary performs impairment evaluation collectively as all murabahah receivables have individually insignificant value.

For this collective impairment, the Subsidiary classifies the receivables portfolio based on the similarity of credit risk characteristics, that is between customers who were given restructuring and customers who were not restructured

The Subsidiary uses statistical analysis models in determining the collective impairment loss allowance, that is the migration analysis method and the vintage analysis method

The migration analysis method is used for determining the impairment loss for non-restructuring customers. In the migration analysis method, the Subsidiary determines the loss rate of the portfolio from the period between the occurrence of a default event and the identification of a loss for each identified portfolio within 12 months. Impairment losses on murabahah receivables are measured at the difference between the carrying amount of the murabahah receivables and present value of estimated future cash flows discounted at the murabahah receivables' original effective rate of return.

The vintage analysis method is used to determine the impairment loss of restructured customers. In the vintage analysis method, the Subsidiary uses the loss rate based on the Subsidiary experience of previous restructured customers from the restructuring date until the financing receivables were paid-off or written-off.

When a financing is uncollectible, it is written-off against the related allowance for impairment losses. Such financing is written-off after all necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

Subsequent recoveries of financing written off in the current year are credited to the provision for allowance for impairment losses account. Subsequent recoveries of financing written off in previous year are recognised as other operating income.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Giro pada Bank Indonesia dan bank-bank lain

Setelah pengakuan awal, giro pada Bank Indonesia dan bank-bank lain diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Giro pada Bank Indonesia termasuk giro wadiah Entitas Anak yang disajikan sebesar biaya perolehan. Giro pada bank-bank lain termasuk giro pada bank-bank lain Entitas Anak yang dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

k. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain

Setelah pengakuan awal, penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penempatan pada Bank Indonesia termasuk penanaman dana pada Bank Indonesia berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia ("FASBI"), Sertifikat Bank Indonesia Syariah ("SBIS") dan *call money*. SBIS merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan akad masing-masing adalah jualah. Penempatan pada FASBI, SBIS dan *call money* disajikan sebesar biaya perolehan.

l. Efek-efek

Efek-efek terdiri dari Sertifikat Investasi Mudharabah Antar bank ("SIMA"), Sukuk Bank Indonesia, sukuk korporasi, Surat Berharga Syariah Negara, reksa dana syariah, obligasi pemerintah yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal, dan wesel ekspor.

Efek-efek (selain obligasi syariah-sukuk, SIMA, reksadana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah) pada awalnya dinilai berdasarkan nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan pengukuran selanjutnya tergantung pada klasifikasinya. Lihat Catatan 2h untuk kebijakan akuntansi aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi.

j. Current accounts with Bank Indonesia and other banks

Subsequent to initial recognition, current accounts with Bank Indonesia and other banks are measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Current accounts with Bank Indonesia include the Subsidiary's wadiah current accounts which are stated at acquisition cost. Current accounts with other banks include the Subsidiary's current accounts with other banks which are stated at their outstanding balances, net of allowance for impairment losses.

k. Placements with Bank Indonesia and other banks

Subsequent to initial recognition, placements with Bank Indonesia and other banks are stated at amortised cost using the effective interest rate method.

Placements with Bank Indonesia includes placements of funds with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Deposit Facilities ("FASBI"), Bank Indonesia Sharia Certificates ("SBIS") and call money. SBIS is certificate issued by Bank Indonesia as a proof of short-term fund deposits under jualah agreements. Placements of FASBI, SBIS and call money are stated at acquisition cost.

l. Securities

Securities consist of Certificate of Interbank Mudharabah Investment ("SIMA"), Bank Indonesia Sukuk, corporate sukuk, Sovereign Sharia Securities, sharia mutual funds, government bonds traded in the money market and capital market, and export bills.

Securities (other than sharia bonds-sukuk, SIMA, sharia mutual funds and other securities based on sharia principles) are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs and subsequent measurement will depend on their classification. Refer to Note 2h for the accounting policy of financial assets measured at fair value through profit or loss, fair value through other comprehensive income and amortised cost.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

I. Efek-efek (lanjutan)

Premi dan/atau diskonto diamortisasi dan dilaporkan sebagai pendapatan bunga dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Surat berharga syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (sukuk), SIMA, reksa dana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Bank dan Entitas Anak menentukan klasifikasi investasi pada sukuk dan efek lain berprinsip syariah yang mempunyai karakteristik yang serupa dengan sukuk, sesuai dengan PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- 1) Diukur pada biaya perolehan. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya. Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada biaya perolehan termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan investasi tersebut. Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk dinyatakan sebesar biaya perolehan, ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, jika ada.
- 2) Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada biaya perolehan termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan investasi tersebut. Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk dicatat sebesar nilai wajar. Seluruh perubahan nilai wajar diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dipindahkan ke laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Securities (continued)

Premium and/or discount is amortised and reported as interest income using the effective interest method.

Sharia securities are proof of investments based on sharia principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including sharia bonds (sukuk), SIMA, sharia mutual funds and other securities based on sharia principles.

The Bank and Subsidiary determine the classification of investments in sukuk and other securities under sharia principles which have similar characteristic with sukuk, in accordance with PSAK No. 110 (2015 Revision) regarding "Accounting for Sukuk" as follows:

- 1) Measured at acquisition cost. The investment is held in a business model whereby the primary goal is to collect contractual cash flows and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the margin. At the initial recognition, investments in sukuk are measured at acquisition cost plus directly attributable transaction costs. Subsequent to initial recognition, investments in sukuk are stated at acquisition cost, plus unamortised portion of transaction costs that are amortised using straight-line method, minus allowance for impairment losses, if any.
- 2) Measured at fair value through other comprehensive income. The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and to sell the sukuk, and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and/or the results.

At the initial recognition, investments in sukuk are measured at acquisition cost plus directly attributable transaction costs. Subsequent to initial recognition, investments in sukuk are stated at fair value. All changes in fair value are recognised in other comprehensive income. When sukuk is derecognised, accumulated gain or loss which has previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

I. Efek-efek (lanjutan)

- 3) Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada biaya perolehan tidak termasuk biaya transaksi. Biaya transaksi langsung diakui pada laba rugi. Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk dicatat sebesar nilai wajar. Seluruh perubahan nilai wajar diakui pada laba rugi tahun berjalan.

Investasi dalam unit reksa dana syariah dinyatakan sebesar nilai wajar yang ditentukan berdasarkan nilai aset bersih dari reksa dana pada tanggal pelaporan. Seluruh perubahan nilai aset bersih diakui pada penghasilan komprehensif lain.

m. Tagihan dan liabilitas derivatif

Dalam melakukan usaha bisnisnya, Bank melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti *swap* mata uang asing, *cross currency swap*, dan *swap* suku bunga.

Instrumen keuangan derivatif diakui pada nilai wajar, dengan biaya transaksi yang terjadi diakui langsung pada laba rugi. Derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar pasar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui sebagai laba rugi tahun berjalan.

n. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan akseptasi disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, jika diperlukan.

Liabilitas akseptasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2h untuk kebijakan akuntansi mengenai biaya perolehan diamortisasi.

**o. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/
piutang syariah**

Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan kas, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang berikut bunganya setelah jangka waktu tertentu.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Securities (continued)

- 3) Measured at fair value through profit or loss. At the initial recognition, investments in sukuk are measured at acquisition cost excluding transaction costs. Transaction costs are directly recognised in profit or loss. Subsequent to initial recognition, investments in sukuk are stated at fair value. All changes in fair value are recognised in the current year profit or loss.

Investment in sharia mutual funds are presented at fair value which is measured based on net asset value of mutual funds at reporting date. All changes in net asset value are recognised in other comprehensive income.

m. Derivative receivables and payables

In the normal course of business, the Bank enters into transactions involving derivative financial instruments such as foreign currency swap, cross currency swap, and interest rate swap.

Derivative financial instruments are recognised at their fair value, with transaction costs recognised directly in profit or loss. Derivative are carried as assets when the fair value is positive and as liabilities when the fair value is negative.

Gains or losses as a result of fair value changes are recognised as current year profit or loss.

n. Acceptance receivables and payables

Acceptance receivables are stated at amortised cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses, where appropriate.

Acceptance payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Acceptance receivables are classified as amortised cost. Refer to Note 2h for the accounting policy of amortised cost.

o. Loans and sharia financing/receivables

Loans represent disbursement of cash or cash equivalent based on agreements with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**o. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/
piutang syariah (lanjutan)**

Pembiayaan bersama dicatat sesuai dengan porsi kredit yang risikonya ditanggung oleh Bank, dan dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi.

Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2h untuk kebijakan akuntansi mengenai biaya perolehan diamortisasi.

Termasuk dalam pinjaman yang diberikan adalah pembiayaan/piutang syariah yang terdiri dari piutang murabahah, pembiayaan musyarakah dan pinjaman qardh.

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Entitas Anak, dimana Entitas Anak membiayai kebutuhan barang untuk konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah, yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan margin yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang murabahah pada awalnya diukur pada nilai bersih yang dapat direalisasi ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh piutang murabahah tersebut. Setelah pengakuan awal, piutang murabahah diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode imbal hasil efektif dikurangi pendapatan margin yang ditangguhkan dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah.

Pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai. Entitas Anak menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

Pinjaman qardh adalah penyaluran dana dengan akad qardh.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**o. Loans and sharia financing/receivables
(continued)**

Joint financing is recorded according to the proportion of risks borne by the Bank and stated at amortised cost.

Loans are classified as amortised cost. Refer to Note 2h for the accounting policy of amortised cost.

Included in the loans are sharia financing/receivables which consist of murabahah receivables, musyarakah financing and qardh financing.

Murabahah is a sale and purchase contract between the customer and the Subsidiary, whereby the Subsidiary finances the goods for consumption, investment and working capital needs of the customer, sold with a principle price plus a certain margin that is mutually informed and agreed. Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

Murabahah receivables are initially measured at net realisable value plus directly attributable transaction costs and additional costs to obtain the respective murabahah receivables. Subsequent to the initial recognition, they are measured at amortised cost using the effective rate of return method less deferred margin income and allowance for impairment losses.

Musyarakah financing is an agreement between two or more parties for a particular business, in which each party contributes funds with the terms that profits are shared according to the agreement, while losses are borne by each party proportionate to the amount of fund contributions. The fund consists of cash or non-cash assets allowed by sharia.

Musyarakah financing is stated at outstanding balance, net of allowance for impairment losses. The Subsidiary provides allowance for impairment losses based on the financing quality as determined by a review of each account.

Funds of qardh represent a distribution of funds with qardh agreement.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**o. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/
piutang syariah (lanjutan)**

Pinjaman qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan Entitas Anak yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.

Pinjaman qardh diakui sebesar total dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Entitas Anak dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian. Imbalan tersebut diakui pada saat diterima.

Pinjaman qardh disajikan sebesar saldonya dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Modifikasi pinjaman yang diberikan

Skema modifikasi pinjaman yang diberikan dapat berupa penyesuaian pada suku bunga, pokok bunga dan tunggakan bunga, perpanjangan jangka waktu jatuh tempo, penjadwalan kembali pembayaran angsuran serta modifikasi persyaratan kredit lainnya.

Jika persyaratan perjanjian suatu pinjaman dimodifikasi, maka Bank mengevaluasi apakah arus kas kontraktual dari pinjaman yang termodifikasi berbeda secara signifikan.

Jika arus kas berbeda secara signifikan, maka hak kontraktual atas arus kas dari aset keuangan yang original sebenarnya telah kadaluarsa. Dalam hal ini, aset keuangan yang original dihentikan pengakuannya dan aset keuangan yang baru diakui pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang memenuhi syarat. Imbalan yang diterima sebagai bagian dari modifikasi diperhitungkan sebagai berikut:

- Imbalan yang dipertimbangkan sewaktu menentukan nilai wajar dari aset baru dan imbalan yang merupakan pembayaran kembali (*reimbursement*) dari biaya transaksi yang memenuhi syarat akan dimasukkan sebagai pengakuan awal aset; dan
- imbalan lainnya dimasukkan ke dalam laba rugi sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian dari penghentian pengakuan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**o. Loans and sharia financing/receivables
(continued)**

Funds of qardh represent funds provided or similar claims based on an agreement or contract between the borrower and the Subsidiary, wherein the borrower should repay the loan after a specified period of time.

A funds of qardh is recognised in the amount lent at the transaction date. The Subsidiary may receive a fee, however, this should not be stated in the agreement. The fee is recognised upon receipt.

Funds of qardh is stated at its outstanding balance less allowance for impairment losses.

Modification of loans

Modification schemes for loans can be in the form of adjustment on interest rate, loan principal and past due interest, extension of repayment period, rescheduling of installments and other modification of the terms of the loans.

If the terms of a loan are modified, then the Bank evaluates whether the contractual cash flows of the modified asset are substantially different.

If the cash flows are substantially different, then the contractual rights to cash flows from the original financial asset are deemed to have expired. In this case the original financial asset is derecognized and a new financial asset is recognized at fair value plus any eligible transaction costs. Any fees received as part of the modification are accounted for as follows:

- *fees that are considered in determining that fair value of the new asset and fees represent reimbursement of eligible transaction costs are included in the initial measurement of the asset; and*
- *other fees are included in profit or loss as part of the gain or loss derecognition.*

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/
piutang syariah (lanjutan)

Modifikasi pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Jika modifikasi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset keuangan, maka Bank terlebih dahulu menghitung kembali nilai tercatat bruto aset keuangan menggunakan suku bunga efektif awal aset tersebut dan mengakui selisih penyesuaian sebagai keuntungan atau kerugian modifikasi di dalam laba rugi. Biaya atau imbalan yang terjadi dan imbalan modifikasi yang diterima disesuaikan ke nilai tercatat bruto dan diamortisasi selama sisa jangka waktu aset keuangan yang dimodifikasi.

Jika modifikasi dilakukan karena alasan risiko kredit, maka keuntungan atau kerugian disajikan sebagai kerugian penurunan nilai. Selain karena alasan ini, keuntungan atau kerugian disajikan sebagai pendapatan bunga yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Dalam keadaan yang tidak biasa, setelah perubahan atau modifikasi yang mengakibatkan penghentian pengakuan aset keuangan awal, mungkin terdapat bukti bahwa aset modifikasian memburuk pada pengakuan awal. Dengan demikian, aset keuangan tersebut diakui sebagai aset keuangan yang memburuk pada pengakuan awal.

Perubahan atau modifikasi yang dilakukan karena resiko kredit, dapat dipertimbangkan sebagai indikasi aset keuangan yang berasal dari aset keuangan yang memburuk pada pengakuan awal. Sedangkan perubahan atau modifikasi yang dilakukan dengan dasar pertimbangan bisnis, mungkin tidak diakui sebagai aset keuangan yang memburuk pada pengakuan awal. Namun, penilaian ini perlu dilakukan secara menyeluruh untuk menentukan apakah pengakuan awal aset keuangan telah memburuk pada saat pengakuan awal.

p. Penyertaan saham

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020

Penyertaan saham dengan persentase kepemilikan di bawah 20% dan tidak memiliki pengaruh signifikan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Dividen kas yang diterima dari penyertaan saham diakui sebagai pendapatan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

o. Loans and sharia financing/receivables
(continued)

Modification of loans (continued)

If the modification of a financial asset measured at amortised cost does not result in derecognition of the financial asset, then the Bank first recalculates the gross carrying amount of the financial asset using the original effective interest rate of the asset and recognizes the resulting adjustment as modification gain or loss in profit or loss. Any costs or fees incurred and modification fees received are adjusted to the gross carrying amount of the modified financial asset and are amortised over the remaining term of the modified financial asset.

If a modification is carried out because of credit-risk reason, then the gain or loss is presented together with impairment losses. In other cases, it is presented as interest income calculated using the effective interest rate method.

In some unusual circumstances, after changes or modifications that result in de-recognition of the original financial asset, there may be evidence that the modified asset is credit-impaired at initial recognition. Accordingly, the financial asset should be recognized as an originated credit-impaired financial asset.

Changes or modifications that were made on the basis of credit risk reason can be considered as an indication of originated credit-impaired financial assets. Meanwhile changes or modifications that were made on the basis of business' considerations, may not be recognized as originated credit-impaired financial assets. However, comprehensive valuation should be performed to determine whether initial recognition of financial assets has deteriorated at initial recognition.

p. Investment in shares

Policy applicable from 1 January 2020

Investment in shares with an ownership interest below 20% and have no significant influence is initially recognised at fair value and subsequently measured at fair value through profit or loss.

Cash dividend received from investment in shares is recognised as income.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Penyertaan saham (lanjutan)

p. Investment in shares (continued)

**Kebijakan berlaku sebelum tanggal
1 Januari 2020**

Policy applicable before 1 January 2020

Penyertaan saham merupakan investasi yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual yang pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan karena terdiri dari efek ekuitas tanpa harga kuotasi yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, kecuali untuk penyertaan saham yang memiliki harga kuotasi, maka dicatat sebesar nilai wajar pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, penyertaan yang mempunyai harga kuotasi tersebut diukur pada nilai wajar.

Investment in shares represents investment that is classified as available for sale financial assets which are carried at acquisition cost at initial recognition as it consists of unquoted equity securities which fair value cannot be reliably measured, except for certain investment in shares that has quoted price at initial recognition. Subsequent to initial recognition, investment in shares that have quoted price are measured at fair value.

Dividen kas yang diterima dari penyertaan saham diakui sebagai pendapatan.

Cash dividend received from investment in shares is recognised as income.

q. Beban dibayar dimuka

q. Prepayments

Beban dibayar dimuka adalah beban yang telah dibayarkan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Beban dibayar dimuka akan diakui sebagai beban pada laba rugi pada saat diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya.

Prepayments are expenses which have been paid but not yet recognised as an expense in the related period. Prepayments are recognised as expenses in the profit or loss when it is amortised in accordance with the expected period of benefit.

r. Aset tetap

r. Fixed assets

Tanah disajikan sebesar nilai wajar, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah terdaftar di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala dan apabila terdapat perubahan nilai wajar yang signifikan untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya.

Land are presented at fair value based on valuations performed by certified external independent valuers which are registered with OJK. Valuations are performed on a regular basis and if there is significant change in fair value to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dikreditkan pada "cadangan revaluasi aset tetap" sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya atas aset tetap yang sama dibebankan terhadap "cadangan revaluasi aset tetap" sebagai bagian dari laba komprehensif; penurunan lainnya dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

The increases in the carrying amount arising on revaluation of land is credited to the "reserve on revaluation of fixed asset" as part of other comprehensive income. The decreases that offset the previous increases are debited against "reserve on revaluation of fixed asset" as part of other comprehensive income; all other decreases are charged to the current year profit or loss.

Tanah tidak disusutkan. Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

Land is not depreciated. When revalued assets are sold, the amounts included in equity are transferred to retained earnings.

Aset tetap selain tanah diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Fixed assets other than land are recognised at cost less accumulated depreciation.

Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut.

Acquisition cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the assets.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Aset tetap (lanjutan)

r. Fixed assets (continued)

Aset tetap, selain tanah, disusutkan selama taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan metode garis lurus dan diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Fixed assets, except land, are depreciated over their expected useful lives using straight-line method and are stated at cost less accumulated depreciation.

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap adalah sebagai berikut:

The expected useful lives of fixed assets are as follows:

	<u>Tahun/Years</u>	
Gedung	20	Buildings
Golongan I:		Class I:
Kendaraan bermotor	4	Vehicles
Perlengkapan kantor	3, 4 & 8	Office equipment
Golongan II:		Class II:
Kendaraan bermotor	3 & 5	Vehicles
Perlengkapan kantor	5 & 8	Office equipment
	sesuai masa sewa/according to lease period	
<i>Leasehold improvement</i>		<i>Leasehold improvement</i>

Kendaraan bermotor yang termasuk dalam golongan I adalah sepeda motor sedangkan kendaraan operasional dan kendaraan dinas untuk direktur atau komisaris termasuk dalam golongan II.

Motor vehicles classified in class I are motorcycles whilst operational vehicles and office vehicles for directors or commissioners are classified in class II.

Perlengkapan kantor yang termasuk dalam golongan I adalah mebel dan peralatan dari kayu dan rotan, mesin kantor seperti mesin tik, mesin fotokopi, komputer, laptop, alat komunikasi, alat dapur dan perlengkapan lain seperti CCTV. Sedangkan yang termasuk dalam golongan II adalah mebel dan peralatan dari logam seperti brankas, pendingin ruangan, dan generator listrik.

Office equipment classified as class I are furniture and office equipment made from wood, office machine such as typing machine, photocopy machine, computer, laptop, communication tools, kitchen set and other equipment such as CCTV. Whilst office equipment classified as class II are furniture and office equipment made from metal such as safes, air conditioning and electrical generator.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Bank dan Entitas Anak akan mendapatkan manfaat ekonomis masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Nilai tercatat komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi tahun berjalan.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Bank and Subsidiary and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. Repairs and maintenance costs are charged to the current year profit or loss.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari laporan keuangan konsolidasian. Keuntungan atau kerugian bersih atas pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan hasil yang diterima dengan nilai tercatat dan diakui pada laba rugi tahun berjalan.

When fixed assets are no longer in use or disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are written off in the consolidated financial statements. Net gains or losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are recognised in the current year profit or loss.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

r. Aset tetap (lanjutan)

Akumulasi biaya konstruksi bangunan serta pemasangan peralatan kantor, dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

Nilai tercatat aset segera diturunkan menjadi sebesar jumlah yang dapat dipulihkan ketika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan.

s. Aset takberwujud

Goodwill

Goodwill dinyatakan sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Peninjauan atas penurunan nilai pada *goodwill* dilakukan setahun sekali atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya potensi penurunan nilai.

Piranti lunak

Piranti lunak memiliki masa manfaat yang terbatas dan diakui sebesar harga perolehan, selanjutnya dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan kerugian penurunan nilai.

Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh lisensi piranti lunak dan mempersiapkan piranti lunak tersebut sehingga siap untuk digunakan dikapitalisasi.

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan dalam pembuatan dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Bank dan Entitas Anak diakui sebagai aset takberwujud.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak mencakup beban pekerja pengembang piranti lunak dan bagian *overhead* yang relevan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Fixed assets (continued)

The accumulated costs of the construction of buildings and the installation of office equipment are capitalized as construction in progress. These costs are reclassified to fixed assets accounts when the construction or installation is completed. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use in the manner intended by management.

The asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount when the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

The assets' residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

s. Intangible assets

Goodwill

Goodwill is carried at cost less accumulated impairment losses. Goodwill impairment reviews are undertaken annually or more frequently if events or changes in circumstances indicate a potential impairment.

Software

Software have a finite useful life and recognised at acquisition cost, subsequently carried at cost less accumulated amortisation and accumulated impairment losses.

Acquired computer software licences are capitalized on the basis of the costs incurred to acquire and bring to use the specific software.

Costs associated with maintaining software programs are recognised as expense when incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Bank and Subsidiary are recognised as intangible assets.

Directly attributable costs that are capitalized as part of the software product include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

s. Aset takberwujud (lanjutan)

Piranti lunak (lanjutan)

Pengeluaran pengembangan lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Amortisasi diakui dalam laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa manfaat piranti lunak tersebut, sejak tanggal piranti tersebut siap untuk dipakai. Estimasi masa manfaat dari piranti lunak adalah 4-5 tahun.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya atau dilepas ketika tidak lagi terdapat manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

t. Aset lain-lain

Aset lain-lain sebagian besar terdiri dari transaksi ATM dan transfer, jaminan sewa, aset imbalan kerja, tagihan kepada asuransi, uang muka, persediaan keperluan kantor, dan agunan yang diambil alih.

Bank dan Entitas Anak mengakui kerugian penurunan nilai untuk aset lain-lain apabila taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali dari suatu aset lebih rendah dari nilai tercatatnya. Pada setiap tanggal pelaporan, Bank dan Entitas Anak melakukan penelaahan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Pemulihan penurunan nilai diakui sebagai keuntungan dalam laba rugi pada saat terjadinya.

**u. Simpanan nasabah dan simpanan dari bank-
bank lain**

Simpanan nasabah adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank dan Entitas Anak berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk didalamnya adalah giro, tabungan, deposito berjangka, deposito *on call* dan simpanan nasabah berdasarkan prinsip syariah.

Simpanan nasabah berdasarkan prinsip syariah terdiri dari giro dan tabungan wadiah. Giro wadiah merupakan giro wadiah yadh-dhamanah yakni titipan dana pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan Entitas Anak. Giro wadiah dicatat sebesar saldo titipan pemegang giro wadiah. Tabungan wadiah merupakan simpanan pihak lain yang bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dimana tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian ('Athaya') sukarela dari Entitas Anak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Intangible assets (continued)

Software (continued)

Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as expense when incurred. Development costs previously recognised as expense are not recognised as asset in a subsequent period.

Amortisation is recognised in profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful life of the software, from the date it is ready for use. The estimated useful life of software is 4-5 years.

Intangible assets shall be derecognised or disposal when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

t. Other assets

Other assets mainly ATM transaction and transfer, rental security deposits, employee benefit assets, receivables from insurance company, advance payment, office supplies, and foreclosed collateral.

The Bank and Subsidiary recognise impairment losses of other assets if the recoverable amount of the assets is lower than the carrying value. At each reporting date, the Bank and Subsidiary evaluate the recoverable amount of the assets to determine whether there is an indication of impairment. Reversal of impairment losses is recognised as gain in the profit or loss when incurred.

**u. Deposits from customers and deposits from
other banks**

Deposits from customers are the funds placed by customers to the Bank and Subsidiary based on fund deposits agreements. Included in these accounts are current accounts, saving deposits, time deposits, deposits on call and sharia deposits from customers.

Sharia deposits consist of wadiah demand deposits and saving deposits. Wadiah demand deposits are wadiah yadh-dhamanah demand deposits in which the funds owner will get a bonus based on the Subsidiary's policy. Wadiah demand deposits are stated at the amount entrusted by depositors. Wadiah saving deposits represent third party funds which can be taken at any time (*on call*) or by an agreement which required no reward except in the form of voluntary bonus ('Athaya') on the part of the Subsidiary.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**u. Simpanan nasabah dan simpanan dari bank
lain (lanjutan)**

Simpanan dari bank-bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, dalam bentuk *call money*, giro, *bank acceptance finance*, dan tabungan.

Simpanan nasabah dan simpanan dari bank-bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dan simpanan dari bank-bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan nasabah dan simpanan dari bank-bank lain.

Simpanan dari bank-bank lain disajikan sebesar jumlah liabilitas terhadap bank-bank lain.

v. Efek-efek yang diterbitkan

Efek-efek yang diterbitkan mencakup surat utang jangka menengah dan utang obligasi.

Surat utang jangka menengah yang diterbitkan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

Utang obligasi dicatat sebesar nilai nominal dikurangi dengan biaya emisi yang belum diamortisasi. Biaya emisi adalah biaya yang terjadi sehubungan dengan utang obligasi, diakui sebagai beban yang ditangguhkan dan dikurangkan langsung dari hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu utang obligasi tersebut dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

w. Pinjaman yang diterima

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman yang diterima diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**u. Deposits from customers and deposits from
other banks (continued)**

Deposits from other banks represent liabilities to other domestic banks, in the form of call money, current accounts, bank acceptance finance, and saving deposits.

Deposits from customers and deposits from other banks are classified as financial liabilities measured at amortised cost. Incremental costs directly attributable to the acquisition of deposits from customers and deposits from other banks are deducted from the amount of deposits from customers and deposits from other banks.

Deposits from other banks are stated at the amounts due to other banks.

v. Securities issued

Securities issued includes medium term notes and bonds payable.

Medium term notes issued are initially recognised at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

Bonds payable are stated at nominal value net of unamortised bond issuance cost. Costs incurred in connection with the bonds payable, are recognised as a deferred expense and offset directly from the proceeds derived from such offerings and amortised over the period of the bonds payable using the effective interest rate method.

w. Borrowings

Borrowings are initially recognised at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest rate method.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

w. Pinjaman yang diterima (lanjutan)

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran dimuka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

x. Imbalan kerja karyawan

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Imbalan pascakerja

Liabilitas imbalan pascakerja dihitung sebesar nilai kini dari taksiran jumlah imbalan pascakerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan tersebut pada masa kini dan masa lalu. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan metode *projected-unit-credit*.

Ketika imbalan pasca-kerja berubah, porsi imbalan sehubungan dengan jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa lalu, diakui segera dalam laba rugi. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja (contohnya keuntungan/kerugian aktuarial) diakui segera sebagai penghasilan komprehensif lain.

Imbalan jangka panjang lainnya

Imbalan jangka panjang lainnya berupa cuti berimbalan jangka panjang dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

y. Pinjaman subordinasi

Pinjaman subordinasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

w. Borrowings (continued)

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawdown. In this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawdown, the fee is capitalised as a pre-payment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

x. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognised when they are payable to the employees.

Post-employment benefits

The post-employment benefits liabilities are calculated at present value of estimated future benefits that the employees have earned in return for their services in the current and prior periods. The calculation is performed by an independent actuary using the projected-unit-credit method.

When the benefits of a plan are changed, the portion of the benefits that relate to service by employees is recognised immediately in profit or loss. Remeasurements of the post-employment benefits liabilities (for example actuarial gain/loss) are recognised immediately as other comprehensive income.

Other long-term benefits

Other long-term benefits such as long service leave are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumption are recognised to the current year profit or loss.

y. Subordinated loans

Subordinated loans are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

z. Dana syirkah temporer

Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima oleh Entitas Anak.

Dana syirkah temporer merupakan investasi dengan akad mudharabah mutlaqah, yaitu pemilik dana (shahibul maal) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib/Entitas Anak) dalam pengelolaan investasinya sesuai prinsip syariah dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana syirkah temporer terdiri dari tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Tabungan mudharabah merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja (*on call*) atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan mudharabah dinyatakan sebesar saldo tabungan nasabah di Entitas Anak.

Deposito mudharabah merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito mudharabah dengan Entitas Anak. Deposito mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Entitas Anak.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Entitas Anak tidak berkewajiban untuk menjamin pengembalian jumlah dana awal dari pemilik dana bila Entitas Anak merugi kecuali kerugian akibat kelalaian atau wanprestasi. Di sisi lain, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi.

Pemilik dana syirkah temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang ditetapkan.

aa. Modal saham

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tambahan biaya yang secara langsung terkait dengan penerbitan saham biasa atau opsi baru disajikan pada bagian ekuitas sebagai pengurang, sebesar jumlah yang diterima bersih setelah dikurangi pajak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

z. Temporary syirkah funds

Temporary syirkah funds represent investment received by Subsidiary.

Temporary syirkah funds represent investments from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds (shahibul maal) grant freedom to the fund manager (mudharib/Subsidiary) in the management of their investments according to sharia principle with profit distributed based on the agreement. Temporary syirkah funds consist of mudharabah saving accounts and mudharabah time deposits.

Mudharabah saving accounts represent investment which could be withdrawn anytime (on call) or can be withdrawn based on certain agreed terms. Mudharabah saving deposits are stated based on the customer's savings deposit balance at the Subsidiary.

Mudharabah time deposits represent investment which can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Subsidiary. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Subsidiary.

Temporary syirkah funds cannot be classified as liability, because the Subsidiary does not have any obligation to return the initial funds to the owners if the Subsidiary experiences losses, except for losses caused by the Subsidiary's management negligence or default. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as equity, because of the maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders such as voting rights and the rights of realised gain from current assets and other non-investment accounts.

The owner of temporary syirkah funds receives a return from the profit sharing based on a predetermined ratio.

aa. Share capital

Ordinary shares are classified as equity.

Incremental costs directly attributable to the issuance of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

aa. Modal saham (lanjutan)

Saham tresuri

Ketika Bank membeli modal saham ekuitas (saham tresuri), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas Bank sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan kepada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas Bank.

ab. Pembayaran berbasis saham

Bank dan Entitas Anak menyediakan program imbalan berbasis saham yang diselesaikan dengan ekuitas, dimana Bank dan Entitas Anak memberikan opsi instrumen ekuitas Bank kepada karyawan sebagai imbalan atas jasa mereka. Nilai wajar opsi yang diberikan diakui sebagai beban dan dengan peningkatan pada ekuitas. Jumlah nilai yang harus dibebankan ditentukan dengan mengacu kepada nilai wajar opsi pada tanggal diberikan:

- termasuk kinerja pasar (misalnya: harga saham Bank);
- tidak termasuk dampak dari jasa dan kondisi *vesting* yang tidak dipengaruhi kinerja pasar (misalnya profitabilitas, target pertumbuhan penjualan dan tetap menjadi karyawan Bank atau Entitas Anak selama periode waktu tertentu); dan
- termasuk dampak dari kondisi *non-vesting*.

Syarat jasa dan syarat yang tidak dipengaruhi kinerja pasar dimasukkan di dalam asumsi mengenai jumlah opsi yang diharapkan akan menjadi hak (*vest*). Jumlah beban diakui selama periode *vesting*, yaitu periode dimana seluruh kondisi *vesting* tertentu telah terpenuhi.

Setiap akhir periode pelaporan, Bank dan Entitas Anak merevisi estimasi jumlah opsi yang diharapkan *vest* berdasarkan syarat jasa. Selisih antara estimasi yang direvisi dengan jumlah estimasi sebelumnya, jika ada, diakui dalam laba rugi, dengan penyesuaian pada ekuitas.

Ketika opsi dieksekusi, Bank menerbitkan sejumlah saham baru atau menerbitkan kembali saham tresurinya (jika ada). Nilai kas yang diterima dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan dikreditkan ke modal saham (nilai nominal) dan tambahan modal disetor.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

aa. Share capital (continued)

Treasury shares

When the Bank purchases the equity share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the Bank's equity holders until the shares are cancelled or reissued. Where such ordinary shares are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the Bank's equity holders.

ab. Share-based payments

The Bank and Subsidiary provide equity-settled share-based compensation plans, under which the Bank and Subsidiary give share option of the Bank's shares to employees in return for their services. The fair value of the options is recognised as an expense with a corresponding increase in equity. The total amount to be expensed is determined by reference to the fair value of the options at grant date:

- including any market performance conditions (for example: a Bank's share price);
- excluding the impact of any service and non-market performance vesting conditions (for example: profitability, sale growth targets and remaining an employee of the Bank or Subsidiary over a specified time period); and
- including the impact of any non-vesting conditions.

Service conditions and non-market performance are included in assumptions about the number of options that are expected to vest. The total expense is recognised over the vesting period, which is the period over which all of the specified vesting conditions are to be satisfied.

At the end of each reporting period, the Bank and Subsidiary revise their estimates of the number of options that are expected to vest based on the service conditions. The difference between the revised estimates and original estimates, if any, is recognised in the profit or loss, with a corresponding adjustment to equity.

When the options are executed, the Bank issues new shares or reissue its treasury shares (if any). The proceeds received, net of any directly attributable transaction costs, are credited to share capital (nominal value) and additional paid-in capital.



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

ac. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Beban pajak penghasilan diakui pada laba rugi, kecuali untuk komponen yang diakui secara langsung di ekuitas atau di penghasilan komprehensif lain.

Beban pajak kini merupakan jumlah pajak yang dibayar, atau terutang atas laba atau rugi kena pajak untuk tahun yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Pajak kini juga termasuk penyesuaian yang dibuat untuk penyisihan pajak tahun sebelumnya, baik untuk merekonsiliasi pajak penghasilan dengan pajak yang dilaporkan di surat pemberitahuan tahunan, atau untuk memperhitungkan perbedaan yang muncul dari pemeriksaan pajak.

Beban pajak kini diukur menggunakan estimasi terbaik atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar atau diterima, dengan mempertimbangkan ketidakpastian terkait dengan kompleksitas peraturan pajak.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan nilai yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan untuk ditetapkan atas perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan. Kebijakan akuntansi ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak, seperti rugi fiskal yang belum dikompensasi, yang timbul dari periode berjalan yang diharapkan akan direalisasi pada masa mendatang, apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

Aset pajak tangguhan merupakan saldo bersih atas manfaat pajak tangguhan yang timbul dan dipergunakan sampai dengan tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangkan dengan manfaat pajak sejumlah nilai yang besar kemungkinan yang tidak dapat terealisasi; pengurangan tersebut akan dibalik ketika kemungkinan realisasi melalui laba kena pajak di masa depan meningkat.

Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap tanggal pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk digunakan.

Dalam menentukan jumlah pajak kini dan tangguhan, Bank dan Entitas Anak memperhitungkan dampak atas posisi pajak yang tidak pasti dan tambahan pajak serta penalti.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

ac. Taxation

Income tax expense consists of current and deferred tax. Income tax expense is recognised in profit or loss except to the extent that it relates to items recognised directly in equity or in other comprehensive income.

Current tax expense is the amount of tax paid, or payable on taxable income or loss for the year using tax rates substantively enacted as of the reporting date. Current tax also includes true-up adjustments made to the previous years' tax provisions either to reconcile them with the income tax reported in annual tax returns, or to account for differences arising from tax assessments.

Current tax expense is measured using the best estimate of the amount expected to be paid or received, taking into consideration the uncertainty associated with the complexity of tax regulations.

Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted as of the reporting date. This accounting policy also requires the recognition of tax benefits, such as tax loss carryforwards, which are originated in the current period that are expected to be realized in the future periods, to the extent that realisation of such benefits is probable.

Deferred tax assets represent the net remaining balance of deferred tax benefits that have been originated and utilized through the reporting date. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and are reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realised; such reductions are reversed when the probability of their realisation through future taxable profits improves.

Unrecognised deferred tax assets are reassessed at each reporting date and recognised to the extent that it has become probable that future taxable income will be available against which they can be used.

In determining the amount of current and deferred tax, the Bank and Subsidiary take into account the impact of uncertain tax positions and any additional taxes and penalties.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

ac. Perpajakan (lanjutan)

Koreksi atas kewajiban pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding, maka koreksi diakui pada saat keputusan atas keberatan atau banding itu diterima.

ad. Pendapatan dan beban bunga dan pendapatan syariah dan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer

(i). Pendapatan dan beban bunga

**Kebijakan berlaku mulai tanggal
1 Januari 2020**

Pendapatan bunga atas aset keuangan baik yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau biaya perolehan diamortisasi, dan beban bunga atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan sepanjang umur yang diperkirakan atas instrumen keuangan, pada nilai tercatat bruto dari aset keuangan atau pada biaya perolehan diamortisasi untuk liabilitas keuangan. Saat menghitung suku bunga efektif instrumen keuangan selain aset yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, Bank melakukan estimasi arus kas masa depan dengan mempertimbangkan seluruh perjanjian kontraktual atas instrumen keuangan tapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit ekspektasian. Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit dihitung dengan menggunakan estimasi arus kas masa depan termasuk kerugian kredit ekspektasian. Perhitungan suku bunga efektif termasuk biaya transaksi dan imbalan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

ac. Taxation (continued)

Amendments to tax obligations are recognised when an assessment is received, or if objection and or appeal is applied, when the results of the objection or the appeal are received.

ad. Interest income and expense and sharia income and third parties' shares on return of temporary syirkah funds

(i). Interest income and expense

Policy applicable from 1 January 2020

Interest income on financial assets held at either fair value through other comprehensive income or amortised cost, and interest expense on financial liabilities held at amortised cost are recognised in profit or loss using the effective interest method.

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial asset or liability and of allocating the interest income or expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument, to the gross carrying amount of the financial asset or to the amortised cost of the financial liability. When calculating the effective interest rate for financial instruments other than purchased or originated credit-impaired assets, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not expected credit losses. For purchased or originated credit-impaired financial assets, a credit-adjusted effective interest rate is calculated using estimated future cash flows including expected credit losses. The calculation of the effective interest rate includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**ad. Pendapatan dan beban bunga dan
pendapatan syariah dan hak pihak ketiga
atas bagi hasil dana syirkah temporer
(lanjutan)**

- (i). Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

**Kebijakan berlaku mulai tanggal
1 Januari 2020 (lanjutan)**

Suku bunga efektif aset atau liabilitas keuangan dihitung pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas keuangan tersebut. Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, suku bunga efektif diterapkan atas nilai tercatat bruto aset keuangan (ketika aset tidak mengalami penurunan nilai) atau atas biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan. Suku bunga efektif direvisi sebagai hasil dari perhitungan ulang estimasi arus kas dari instrumen dengan suku bunga mengambang secara berkala untuk merefleksikan perubahan suku bunga pasar. Untuk aset keuangan yang telah mengalami penurunan nilai setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi mengalami penurunan nilai, maka perhitungan pendapatan bunga kembali menggunakan nilai tercatat bruto.

**Kebijakan berlaku sebelum tanggal
1 Januari 2020**

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan dengan *interest-bearing* dicatat sebagai "pendapatan bunga" dan "beban bunga" di dalam laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset atau liabilitas keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**ad. Interest income and expense and sharia
income and third parties' shares on return
of temporary syirkah funds (continued)**

- (i). Interest income and expense (continued)

**Policy applicable from 1 January 2020
(continued)**

The effective interest rate of a financial asset or financial liability is calculated on initial recognition of a financial asset or financial liability. In calculating interest income and expense, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of the asset (when the asset is not credit-impaired) or to the amortised cost of the financial liability. The effective interest rate is revised as a result of periodic re-estimation of cash flows of floating-rate instruments to reflect movements in market rates of interest. For financial assets that have become credit-impaired subsequent to initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortised cost of the financial asset. If the asset is no longer credit-impaired, then the calculation of interest income reverts to the gross carrying amount.

**Policy applicable before 1 January
2020**

Interest income and expense for all interest-bearing financial instruments are recognised as "interest income" and "interest expense" in profit or loss using the effective interest rate method.

The effective interest rate method is a method of calculating the amortised cost of a financial asset or liability and of allocating the interest income or expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

ad. Pendapatan dan beban bunga dan
pendapatan syariah dan hak pihak ketiga
atas bagi hasil dana syirkah temporer
(lanjutan)

ad. Interest income and expense and sharia
income and third parties' shares on return
of temporary syirkah funds (continued)

(i). Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

(i). Interest income and expense (continued)

**Kebijakan berlaku sebelum tanggal
1 Januari 2020** (lanjutan)

**Policy applicable before 1 January
2020** (continued)

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai.

Interest on impaired financial assets continues to be recognised using the rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment losses.

(ii). Pendapatan syariah

(ii). Sharia income

Pendapatan pengelolaan dana oleh Entitas Anak sebagai mudharib terdiri atas pendapatan dari jual beli-margin murabahah, pendapatan bagi hasil-pembiayaan musyarakah, dan pendapatan usaha utama lainnya.

Income from fund management by Subsidiary as mudharib consist of income from sales and purchases-murabahah margin, income from profit sharing-musyarakah financing and other main operating income.

Pengakuan pendapatan atas piutang murabahah yang tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan diakui pada laba rugi dengan menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif.

The revenue recognition of murabahah receivables, which do not have significant risk in relation with the ownership of inventory, are recognised in profit or loss using the effective rate of return method.

Tingkat imbal hasil efektif merupakan metode alokasi pengakuan pendapatan dan merupakan tingkat imbal hasil yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari piutang murabahah untuk memperoleh nilai tercatat piutang murabahah. Pada saat menghitung tingkat imbal hasil efektif, Entitas Anak mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam piutang murabahah tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam akad yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tingkat imbal hasil efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Effective rate of return is an allocation method of revenue recognition and the rate which exactly discounts the estimated future cash receipts through the expected life of the murabahah receivables to obtain the carrying amount of murabahah receivables. When calculating the effective rate of return, the Subsidiary estimates future cash flows by considering all contractual terms of the murabahah receivables, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provisions and other forms received by the parties in a contract which are an integral part of the effective rate of return, transaction costs and all other premiums or discounts.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

ad. Pendapatan dan beban bunga dan pendapatan syariah dan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer (lanjutan)

(ii). Pendapatan syariah (lanjutan)

Untuk pengakuan pendapatan atas piutang murabahah yang telah direstrukturisasi dengan *payment holiday* atau skema penundaan pembayaran cicilan, Bank hanya mengakui pendapatan marjin apabila Bank cukup yakin bahwa pembayaran angsuran akan diterima sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah.

Pendapatan bagi hasil - pembiayaan musyarakah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

(iii). Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip mudharabah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Entitas Anak. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima (*cash basis*).

Pendapatan marjin atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya (penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain dan investasi pada surat berharga) akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana dan Entitas Anak sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, pendapatan marjin yang tersedia tersebut kemudian didistribusikan ke nasabah pemilik dana sebagai shahibul maal dan Entitas Anak sebagai mudharib sesuai porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Pendapatan marjin dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Entitas Anak, seluruhnya menjadi milik Entitas Anak, termasuk pendapatan dari transaksi Entitas Anak berbasis imbalan.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

ad. Interest income and expense and sharia income and third parties' shares on return of temporary syirkah funds (continued)

(ii). Sharia income (continued)

For the recognition of income on restructured murabahah receivables with payment holidays or scheme to postpone installment payments, the Bank will only recognise margin income if the bank has a reasonable certainty that an installment payment will be received in accordance with the agreement with the customers.

Income from profit sharing - musyarakah financing is recognised during the period of profit sharing in accordance with the pre-determined ratio.

(iii). Third parties' shares on return of temporary syirkah funds

Third parties' share on returns of temporary syirkah funds represents customer's share on the Subsidiary's income derived from the management of their funds by the Subsidiary under mudharabah principles. Distributable income will be distributed from the cash received (*cash basis*).

Margin income on financing facilities and other earning assets (placements with Bank Indonesia, placements with other banks and investments in securities) are distributed to fund owners and the Subsidiary based on proportion of funds used in the financing and other earning assets. Likewise, the available margin income is then distributed to fund owners as shahibul maal and the Subsidiary as mudharib based on a pre-determined ratio (*nisbah*).

Margin income from financing facilities and other earning assets using the Subsidiary's funds, are entirely shared for the Subsidiary, including income from the Subsidiary's fee-based transactions.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

ae. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada aktivitas peminjaman diakui sebagai pengurang biaya pinjaman dan nilai tercatat atas pinjaman tersebut akan diamortisasi sebagai pendapatan bunga dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada umumnya pendapatan provisi dan komisi diakui menggunakan basis akrual pada saat jasa telah diberikan. Pendapatan provisi atas komitmen memberikan pinjaman yang kemungkinan besar akan dicairkan (bersama-sama dengan biaya transaksi lain yang terkait langsung) diakui sebagai penyesuaian atas suku bunga efektif atas pinjaman yang diberikan.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan diklasifikasikan sebagai pendapatan operasional lainnya.

af. Pendapatan dan beban operasional lainnya

Pendapatan operasional lainnya sebagian besar terdiri dari administrasi dana pihak ketiga, komisi atas pinjaman yang diberikan, penerimaan kembali kredit yang dihapusbuku, penjualan produk investasi, dan denda pelunasan dipercepat dan keterlambatan.

Pendapatan dari komisi asuransi merupakan pendapatan yang diperoleh Bank berdasarkan persentasi tertentu dari total premi yang dibayarkan oleh Bank kepada perusahaan asuransi atas nama nasabah.

Beban umum dan administrasi merupakan beban yang timbul sehubungan dengan aktivitas kantor dan operasional Bank dan Entitas Anak, yang terdiri dari jasa pihak ketiga dan perlengkapan kantor, beban asuransi, sewa, amortisasi piranti lunak, penyusutan aset tetap, penyusutan aset hak guna, dan promosi dan iklan. Beban tenaga kerja meliputi beban berupa gaji karyawan, bonus, lembur, tunjangan dan pelatihan.

Seluruh penghasilan dan beban yang terjadi dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian pada saat terjadi.

ae. Fee and commission income

Fees and commissions income directly attributable to lending activity are recognised as a deduction of lending cost and will be recognised as interest income by amortising the carrying value of loan using effective interest rate method.

Fees and commissions income are generally recognised on an accrual basis when the service has been provided. Loan commitment fees for loans that are likely to be drawn down are (together with related direct costs) recognised as an adjustment to the effective interest rate on the loan.

Fees and commissions income which are not related to lending activities are recognised as revenue on the transaction date and classified under other operating income.

af. Other operating income and expenses

Other operating income mainly consists of third party fund administration income, loan commission income, recovery of loans written-off, sale of investment product and early termination penalty and late penalty.

Insurance commission income represents the Bank's income based on certain percentage of insurance premium paid by the Bank to insurance company on behalf of customers.

General and administrative expenses represent expenses related to the Bank and Subsidiary's office and operational activities which mainly consist of service from third parties and office supplies, insurance expense, rent, amortisation of software, depreciation of fixed assets, depreciation of right-of-use assets, and promotion and advertising. Personnel expenses include salaries for employees, bonuses, overtime, allowances and training.

All of these income and expenses are recorded in the consolidated statement of profit or loss when incurred.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

ag. Laba bersih per saham

Labanya bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode berjalan.

Labanya bersih per saham dilusi dihitung dengan membagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki Bank, yaitu opsi saham.

Ketika opsi dieksekusi, Bank menerbitkan sejumlah saham baru atau menerbitkan kembali saham treasurinya (jika ada). Nilai kas yang diterima, dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan, dikreditkan ke modal saham (nilai nominal) dan agio saham.

ah. Segmen operasi

Segmen operasi adalah komponen dari Bank dan Entitas Anak yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain Bank dan Entitas Anak, dimana hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan mengenai sumber daya yang akan dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, serta tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Hasil segmen yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional meliputi komponen-komponen yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen, dan komponen-komponen yang dapat dialokasikan dengan dasar yang wajar.

ai. Transaksi Sewa

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020

Bank dan Entitas Anak telah melakukan penerapan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau berubah, pada atau, setelah tanggal 1 Januari 2020.

Bank dan Entitas Anak sebagai penyewa

Pada tanggal inisiasi suatu kontrak, Bank dan Entitas Anak menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa dengan mempertimbangkan apakah kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

ag. Earning per share

Basic earnings per share are computed by dividing net profit with the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

Diluted earnings per share is calculated by dividing the weighted average number of ordinary shares outstanding plus the assumed conversion of all dilutive potential ordinary shares owned by Bank, which is stock option.

When the options are exercised, the Bank issues new shares or reissues its treasury shares (if any). The proceeds received, net of any directly attributable transaction costs, are credited to share capital (nominal value) and share premium.

ah. Operating segment

An operating segment is a component of the Bank and Subsidiary that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses that relate to transactions with any of the Bank and Subsidiary's other components, whose operating results are reviewed regularly by the operating decision makers to make decisions about resources allocated to the segment and assess its performance, and for which discrete financial information is available. Segment results that are reported to the operating decision makers include items directly attributable to a segment, as well as those that can be allocated on a reasonable basis.

ai. Lease Transaction

Policy applicable from 1 January 2020

The Bank and Subsidiary have applied PSAK 73, which set the requirement of recognition a right-of-use asset and a lease liability in relation to leases which had previously classified as 'operating lease'. This policy is applied to contracts entered into or changed, on or, after 1 January 2020.

The Bank and Subsidiary as a lessee

At inception of a contract, the Bank and Subsidiary determine if a contract is, or contains, a lease by considering whether the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for a consideration.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

ai. Transaksi Sewa (lanjutan)

ai. Lease Transaction (continued)

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Policy applicable from 1 January 2020 (continued)

Bank dan Entitas Anak sebagai penyewa (lanjutan)

The Bank and Subsidiary as a lessee (continued)

Suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian jika semua kondisi di bawah dipenuhi:

A contract conveys the right to control the use of an identified asset if all of the following conditions are met:

- kontrak tersebut melibatkan penggunaan secara substansial seluruh kapasitas dari aset identifikasian yang secara fisik berbeda (sebagaimana ditentukan secara eksplisit atau implisit dalam kontrak). Jika pemasok memiliki hak substitusi yang substantif, maka aset tersebut tidak dapat dianggap dapat diidentifikasi;
- Bank dan Entitas Anak memiliki hak untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- Bank memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset: yaitu memiliki hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan.

- the contract involves the use of substantially all of the capacity of an identified asset that is physically distinct (as specified explicitly or implicitly in the contract). If the supplier has a substantive substitution right, then the asset cannot be considered as identifiable;
- the Bank and Subsidiary have the right to obtain substantially all of the economic benefits from the use of the asset throughout the period of use; and
- the Bank and Subsidiary have the right to direct the use of the asset: i.e. they have decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used.

Pada saat inepsi atau penilaian kembali sebuah kontrak yang berisi komponen sewa, Bank dan Entitas Anak mengalokasikan imbalan dalam kontrak tersebut kepada setiap komponen sewa atas dasar harga relatif yang berdiri sendiri.

At inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Bank and Subsidiary allocate the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

Bank dan Entitas Anak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

The Bank and Subsidiary recognize a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

Setelah tanggal permulaan, aset hak guna diukur dengan model biaya. Aset hak guna selanjutnya disusutkan dengan menggunakan metode garis-lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir masa manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa. Selain itu, aset hak guna secara berkala dikurangi dengan kerugian penurunan nilai, jika ada, dan disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa.

After commencement date, right-of-use asset is measured using cost model. The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. In addition, the right-of-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain remeasurements of the lease liability.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

ai. Transaksi Sewa (lanjutan)

ai. Lease Transaction (continued)

**Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari
2020 (lanjutan)**

**Policy applicable from 1 January 2020
(continued)**

**Bank dan Entitas Anak sebagai penyewa
(lanjutan)**

**The Bank and Subsidiary as a lessee
(continued)**

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Bank dan Entitas Anak. Pada umumnya, Bank dan Entitas Anak menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using the Bank and Subsidiary's incremental borrowing rate. Generally, the Bank and Subsidiary use their incremental borrowing rate as the discount rate.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri dari:

Lease payments included in the measurement of the lease liability consist of:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara-substansi, dikurangi insentif sewa yang belum diterima;
- pembayaran sewa secara variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, yang pada awalnya diukur menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan berdasarkan jaminan nilai residual; dan
- harga eksekusi opsi beli jika Bank dan Entitas Anak cukup pasti untuk mengeksekusi opsi, pembayaran sewa dalam opsi periode perpanjangan jika Bank dan Entitas Anak cukup pasti untuk melaksanakan opsi perpanjangan, dan denda untuk penghentian sewa lebih awal kecuali Bank dan Entitas Anak yakin tidak menghentikan lebih awal.

- *fixed payments, including in-substance fixed payments, less lease incentives receivable;*
- *variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable under a residual value guarantee; and*
- *the exercise price under a purchase option that the Bank and Subsidiary are reasonably certain to exercise, lease payments in an option renewal period if the Bank and Subsidiary are reasonably certain to exercise an extension option, and penalties for early termination of a lease unless the Bank and Subsidiary are reasonably certain not to terminate early.*

Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Bank dan Entitas Anak atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Bank mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

The lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Bank and Subsidiary's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Bank changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak guna telah berkurang menjadi nol.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

ai. Transaksi Sewa (lanjutan)

ai. Lease Transaction (continued)

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Policy applicable from 1 January 2020 (continued)

Bank dan Entitas Anak sebagai penyewa (lanjutan)

The Bank and Subsidiary as a lessee (continued)

Bank dan Entitas Anak menyajikan aset hak guna dalam aset tetap.

The Bank and Subsidiary present right-of-use assets in fixed assets.

Bank menyewa bangunan untuk ruang kantor. Sewa ruang kantor secara umum berlaku untuk periode 3 - 10 tahun. Beberapa sewa termasuk opsi untuk memperbaharui periode sewa dengan tambahan durasi yang sama setelah kontrak berakhir. Bank juga menyewa kendaraan dan peralatan dengan periode kontrak 2 - 5 tahun, apartemen dan rumah dinas dengan periode kontrak 2 tahun, dan peralatan IT dan mesin dengan periode kontrak 3 - 5 tahun.

The Bank leases buildings for its office. The leases of office space typically run for a period of 3 - 10 years. Some leases include an option to renew the lease for an additional period of the same duration after the end of the contract term. The Bank also leases vehicles and equipment with contract terms of 2 - 5 years, apartments and employee residences with contract terms of 2 years and IT equipment and machinery with contract terms of 3 - 5 years.

Entitas Anak menyewa bangunan untuk ruang kantor. Sewa ruang kantor secara umum berlaku untuk periode 3 - 10 tahun. Beberapa sewa termasuk opsi untuk memperbaharui periode sewa dengan tambahan durasi yang sama setelah kontrak berakhir. Entitas Anak juga menyewa kendaraan dan peralatan dengan periode kontrak 3 - 5 tahun dan peralatan IT dan mesin dengan periode kontrak 3 - 5 tahun.

The Subsidiary leases buildings for its office. The leases of office space typically run for a period of 3 - 10 years. Some leases include an option to renew the lease for an additional period of the same duration after the end of the contract term. The Subsidiary also leases vehicles and equipment with contract terms of 3 - 5 years and IT equipment and machinery with contract terms of 3 - 5 years.

Bank dan Entitas Anak memilih untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai rendah. Bank dan Entitas Anak mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Nilai tercatat aset hak guna segera diturunkan menjadi sebesar jumlah yang dapat dipulihkan ketika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

The Bank and Subsidiary have elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Bank and Subsidiary recognize the leases payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term. The right-of-use's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount when the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

Modifikasi sewa

Lease modification

Bank dan Entitas Anak mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

The Bank and Subsidiary account for a lease modification as a separate lease if both:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

- the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and
- the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

ai. Transaksi Sewa (lanjutan)

ai. Lease Transaction (continued)

**Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari
2020 (lanjutan)**

**Policy applicable from 1 January 2020
(continued)**

**Bank dan Entitas Anak sebagai penyewa
(lanjutan)**

**The Bank and Subsidiary as a lessee
(continued)**

Modifikasi sewa (lanjutan)

Lease modification (continued)

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Bank dan Entitas Anak:

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Bank and Subsidiary:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Bank dan Entitas Anak pada tanggal efektif modifikasian;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau seluruh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Bank dan Entitas Anak mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau seluruh sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

- *remeasure and allocate the consideration in the modified contract;*
- *determine the lease term of the modified lease;*
- *remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Bank and Subsidiary's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;*
- *decrease the carrying amount of the right of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Bank and Subsidiary recognize in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and*
- *make a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*

**Kebijakan berlaku sebelum tanggal
1 Januari 2020**

Policy applicable before 1 January 2020

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian pada tanggal insepisi. Perjanjian tersebut ditelaah apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan suatu aset atau aset-aset tertentu dan apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk menggunakan aset tersebut.

The determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is based on the substance of the arrangement at the inception date. The arrangement is assessed whether fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset or assets.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

ai. Transaksi Sewa (lanjutan)

**Kebijakan berlaku sebelum tanggal 1
Januari 2020 (lanjutan)**

Transaksi sewa yang dilakukan Bank dan Entitas Anak diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika tidak terdapat pengalihan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Pembayaran sewa diakui sebagai beban dengan garis lurus selama masa sewa. Seluruh insentif untuk perjanjian sewa operasi baru atau yang diperbarui diakui sebagai bagian tidak terpisahkan dari imbalan neto yang disepakati untuk menggunakan aset sewaan, terlepas dari sifat atau bentuk insentif atau waktu pembayaran. Bank dan Entitas Anak mengakui manfaat agregat dari insentif sebagai pengurang beban sewa selama masa sewa dengan dasar garis lurus.

aj. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Bank dan Entitas Anak memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Bank dan Entitas Anak mengukur nilai wajar di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Bank dan Entitas Anak menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

ai. Lease Transaction (continued)

**Policy applicable before 1 January 2020
(continued)**

The lease transaction entered into by the Bank and Subsidiary was classified as an operating lease it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership. Lease payment is recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term. All incentives for the agreement of a new or renewal operating lease are recognized as an integral part of the net consideration agreed for the use of the leased asset, irrespective of the incentive's nature or form or the timing of payments. The Bank and Subsidiary recognize the aggregate benefit of incentives as a reduction of rental expense over the lease term, on a straight-line basis.

aj. Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Bank and Subsidiary have access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Bank and Subsidiary measure the fair value in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

If there is no quoted price in an active market, then the Bank and Subsidiary use valuation techniques that maximise the use of relevant observable inputs and minimise the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

aj. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

aj. Fair value measurement (continued)

Bukti terbaik atas nilai wajar pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Bank dan Entitas Anak menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasi di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggulangi perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

The best evidence of the fair value at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Bank and Subsidiary determine that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognised in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Bank dan Entitas Anak mengukur aset dan posisi *long* berdasarkan harga permintaan dan mengukur liabilitas dan posisi *short* berdasarkan harga penawaran.

If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Bank and Subsidiary measure assets and long positions at a ask price and liabilities and short positions at a bid price.

Kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, yang terekspos risiko pasar dan risiko kredit yang dikelola oleh Bank dan Entitas Anak berdasarkan eksposur netonya baik terhadap risiko pasar ataupun risiko kredit, diukur berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual posisi *net long* (atau dibayar untuk mengalihkan posisi *net short*) untuk eksposur risiko tertentu. Penyesuaian pada level kelompok tersebut dialokasikan pada aset dan liabilitas individual berdasarkan penyesuaian risiko relatif dari masing-masing instrumen individual di dalam kelompok.

Portfolios of financial assets and financial liabilities measured at fair value, that are exposed to market risk and credit risk that are managed by the Bank and Subsidiary on the basis of the net exposure to either market or credit risk, are measured on the basis of a price that would be received to sell a net long position (or paid to transfer a net short position) for a particular risk exposure. Those portfolio-level adjustments are allocated to the individual assets and liabilities on the basis of the relative risk adjustment of each of the individual instruments in the portfolio.

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING**

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS**

Sumber utama ketidakpastian estimasi

Key sources of estimation uncertainty

Informasi mengenai asumsi dan ketidakpastian estimasi dijelaskan di bawah ini dan pada catatan-catatan di bawah ini:

Information about the assumptions and estimation uncertainties is set out below and in the following notes:

- Catatan 23 – pengukuran liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya: asumsi-asumsi aktuarial.

- *Note 23 – measurement of post-employment benefits liabilities and other long term benefits: actuarial assumptions.*

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Key sources of estimation uncertainty
(continued)

- Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

- Allowance for impairment losses of financial assets

Bank dan Entitas Anak melakukan peninjauan kembali atas aset keuangan pada setiap tanggal pelaporan untuk melakukan penilaian atas cadangan penurunan nilai yang telah dicatat. Pertimbangan manajemen diperlukan dalam menentukan tingkat cadangan yang dibutuhkan.

The Bank and Subsidiary review their financial assets at reporting date to evaluate the allowance for impairment losses. Management's judgement is applied in the estimation when determining the level of allowance required.

Bank

Bank

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020

Policy applicable from 1 January 2020

Sesuai dengan PSAK 71, Bank mengestimasi kerugian kredit ekspektasi ("ECL") atas pinjaman yang diberikan. Estimasi ECL melibatkan penggunaan model dan asumsi yang merupakan sumber utama ketidakpastian dalam estimasi.

In accordance with PSAK 71, the Bank estimated the expected credit losses ("ECL") on loans. The ECL estimation involves use of models and assumptions which are the key sources of estimation uncertainty.

Penilaian risiko kredit dari portofolio aset memerlukan estimasi mengenai kemungkinan terjadinya gagal bayar, dari rasio kerugian yang terkait dan korelasi gagal bayar antar pihak. Bank mengukur menggunakan model yang kompleks yang menggunakan matriks *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD) dan *Exposure at Default* (EAD), dan variable makroekonomi untuk estimasi yang bersifat perkiraan masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

The assessment of credit risk of an asset portfolio entails further estimations as to the likelihood of defaults occurring, of the associated loss ratios and of default correlations between counterparties. The Bank primarily uses sophisticated models that utilize the *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD) and *Exposure at Default* (EAD), and macroeconomic variables for forward looking perspective, which are discounted using the effective interest rate, as described as follows:

- PD merupakan kemungkinan pada suatu waktu (*point in time*) dimana debitur mengalami gagal bayar, dikalibrasikan sampai dengan periode 12 bulan dari tanggal pelaporan (Tahap 1) atau sepanjang umur aset (Tahap 2) dan memperhitungkan dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki dampak terhadap risiko kredit. PD diestimasi pada suatu waktu berarti PD akan berfluktuasi sejalan dengan siklus ekonomi.
- LGD merupakan kerugian yang diperkirakan akan timbul dari debitur yang gagal bayar dengan memperhitungkan dampak dari asumsi ekonomi masa depan yang relevan, yaitu perbedaan antara arus kas kontraktual yang seharusnya diterima dengan arus kas yang diharapkan Bank untuk diterima. Bank mengestimasi LGD berdasarkan data historis tingkat pemulihan dan memperhitungkan pemulihan yang berasal dari jaminan yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari pinjaman yang diberikan dengan mempertimbangkan asumsi ekonomi di masa depan yang relevan.

- PD represents the probability at a point in time that debtor will default, calibrated over up to 12 months from the reporting date (Stage 1) or over the lifetime of the asset (Stage 2) and incorporating the impact of forward looking economic assumptions that have an effect on credit risk. PD is estimated at point in time that means it will fluctuate in line with the economic cycle.
- LGD represents the loss that is expected to arise on default, incorporating the impact of forward looking economic assumptions where relevant, which represents the difference between the contractual cash flows due and those that the Bank expects to receive. The Bank estimates LGD based on the history of recovery rates and considers the recovery of any collateral that is integral to the loans, taking into account forward looking economic assumptions where relevant.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

- Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Bank (lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

- EAD merupakan perkiraan nilai eksposur pada saat gagal bayar dengan mempertimbangkan perubahan eksposur yang diharapkan selama masa eksposur. EAD memperhitungkan dampak penarikan fasilitas kredit (*committed*) yang dilakukan, pembayaran pokok dan bunga, amortisasi dan pembayaran dimuka, serta dampak dari asumsi ekonomi di masa depan yang relevan, yang dipilih berdasarkan pengumpulan data makroekonomi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti, namun tidak terbatas pada, regulator, pemerintah serta organisasi penelitian independen.

Variabel makroekonomi yang digunakan terdiri dari: Pendapatan Bruto Nasional (PDB), tingkat inflasi, nilai valuta asing, tingkat bunga antar bank dan tingkat pengangguran. Untuk perhitungan ECL pada tanggal 31 Desember 2020, Bank menggunakan variabel makroekonomi sebagai berikut:

Skenario/ Scenario	PDB per tahun/ GDP per annum	Tingkat inflasi per tahun/ Inflation rate per annum	Tingkat bunga antarbanc per tahun/ Interbank rate per annum	Kurs Rupiah per 1 USD/ Exchange rate of Rupiah per 1 USD	Tingkat pengangguran/ Unemployment rate
Terbaik/Best	3.0%	2.6%	4.2%	13,639	5.7%
Dasar/Base	2.9%	2.8%	4.0%	14,357	6.0%
Terburuk/Worst	2.7%	2.9%	3.8%	15,075	6.3%

Dalam menentukan probabilitas tertimbang dari skenario yang akan terjadi di masa depan, Bank telah melakukan analisis berdasarkan informasi historis PDB yang meliputi insiden besar yang terjadi pada rentang waktu 36 tahun terakhir.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

**Key sources of estimation uncertainty
(continued)**

- Allowance for impairment losses of financial assets (continued)

Bank (continued)

**Policy applicable from 1 January 2020
(continued)**

- EAD represents the expected exposure at the time of default, taking into account that expected change in exposure over the lifetime of the exposure. This incorporates the impact of drawdowns of committed facilities, repayments of principals and interest, amortisation and prepayments, together with the impact of forward looking economic assumptions where relevant, which are chosen based on the collation of macroeconomics data obtained from various sources such as, but not limited to, regulators, government as well as independent research organisation.

The macroeconomic variables used, among others, consisted of Gross Domestic Products (GDP), inflation rate, foreign exchange rates, inter-bank rates, and unemployment rate. In determination of ECL as of 31 December 2020, the Bank used macroeconomic variables as follows:

In determining the probability weighted of each scenario that will occur in the future, the Bank has conducted an analysis based on historical GDP information which includes the major incident that happened in the last 36 years.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Key sources of estimation uncertainty
(continued)

- Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

- Allowance for impairment losses of financial assets (continued)

Bank (lanjutan)

Bank (continued)

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Policy applicable from 1 January 2020
(continued)

Bank menerapkan tiga skenario makroekonomi berikut untuk mencerminkan jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi dalam mengestimasi ECL:

The Bank applied the following three macroeconomic scenarios to reflect an unbiased probability-weighted range of possible future outcomes in estimating ECL:

- Skenario Dasar: Skenario ini mencerminkan bahwa kondisi makroekonomi saat ini terus berlanjut; dan
- Skenario Terbaik dan Terburuk: Skenario ini ditetapkan relative terhadap skenario dasar; mencerminkan kondisi makroekonomi terbaik dan terburuk berdasarkan kombinasi pendekatan statistik dan penilaian dari *subject matter expert* berdasarkan kondisi ekonomi saat ini.

- Base scenario: This scenario reflects that current macroeconomic conditions continue to prevail; and
- Best and Worst scenarios: These scenarios are set relative to the base scenario; reflecting best and worstcase macroeconomic conditions based on combination of statistical approach and subject matter expert's assessment from current economic conditions.

Perhitungan ECL dilakukan dengan mengelompokkan portofolio kredit ke dalam 8 kategori untuk pinjaman ritel dan 1 kategori untuk pinjaman korporasi.

The ECL calculation is done by segmenting the credit portfolio into 8 categories for retail loans and 1 category for corporate loans.

Asumsi yang mendasari perhitungan ECL akan dipantau dan ditinjau setiap tahun. Tidak ada perubahan signifikan dalam teknik estimasi yang dibuat selama periode pelaporan. Dalam menanggapi dampak pandemi COVID-19, Bank telah memperbarui variabel makroekonomi seperti dijelaskan dalam Catatan 42.

The assumptions underlying the ECL calculation are monitored and reviewed on annual basis. There have been no significant changes on estimation techniques made during the reporting period. In response to the COVID-19 pandemic, the Bank has updated the macroeconomic variables as described in Note 42.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

**Key sources of estimation uncertainty
(continued)**

- Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

- Allowance for impairment losses of financial assets (continued)

Bank (lanjutan)

Bank (continued)

**Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari
2020 (lanjutan)**

**Policy applicable from 1 January 2020
(continued)**

Khusus untuk pinjaman korporasi dan SME tertentu yang material, ketika pinjaman yang diberikan mengalami penurunan nilai, cadangan kerugian kredit dihitung secara individu. Dalam penilaian individu, kondisi spesifik debitur dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Evaluasi penilaian individu atas arus kas yang diharapkan akan diterima ditentukan berdasarkan probabilitas tertimbang beberapa skenario.

Specifically for corporate and certain material SME loans, when the loans have been impaired, the allowance for credit losses is calculated individually. In individual assessment, the specific debtors' conditions are evaluated individually based on management's best estimate of the present value of the cash flows that are expected to be received. Evaluation over the individual assessment is determined based on probability weighted of multiple scenarios.

Estimasi probabilitas tertimbang dilakukan dengan memperhitungkan pembobotan masing-masing skenario dan menggunakan minimum 2 (dua) skenario untuk mencerminkan setidaknya skenario normal dan skenario buruk. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan mengenai situasi keuangan debitur dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan yang ada. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan keadaan dan strategi penyelesaian masing-masing. Estimasi arus kas ekspektasian dari skenario-skenario estimasi disetujui secara independen oleh *Business Risk* masing-masing segmen bisnis.

Probability-weighted estimation is performed by taking into account weighting for each scenario and uses minimum of 2 (two) scenarios to reflect at least normal scenario and worst scenario. In estimating these cash flows, management makes judgments about the debtors' financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits and the workout strategy. The estimated expected cash flows from estimation scenarios are independently approved by the Business Risk from each business segment.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

- Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Bank (lanjutan)

**Kebijakan berlaku sebelum tanggal
1 Januari 2020**

Untuk penilaian secara individu, kondisi spesifik penurunan nilai debitur dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan debitur dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima disetujui secara independen oleh *Business Risk* masing-masing segmen bisnis.

Bank juga membentuk cadangan kerugian penurunan nilai kolektif atas eksposur piutang yang diberikan, dimana evaluasi dilakukan berdasarkan data kerugian historis.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama dan aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini.

Keakuratan cadangan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan penyisihan kolektif.

Entitas Anak

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio piutang murabahah Entitas Anak. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan penurunan nilai kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas pembiayaan, karakteristik produk dan apakah pembiayaan tersebut telah direstrukturisasi.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

**Key sources of estimation uncertainty
(continued)**

- Allowance for impairment losses of financial assets (continued)

Bank (continued)

Policy applicable before 1 January 2020

For individual assessment, the specific debtors' conditions in determining allowance for impairment amount of the financial assets is evaluated individually and is based upon management's best estimate of the present value of the cash flows that are expected to be received. In estimating these cash flows, management makes judgments about the debtors' financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable are independently approved by the Business Risk from each business segment.

The Bank also estimates the collective impairment allowance for its receivables portfolio, where evaluation is performed based on historical data.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of financial assets with similar economic characteristics and financial assets that are individually insignificant. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions.

The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

Subsidiary

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of the Subsidiary's murabahah receivables. In assessing the need for collective impairment allowances, management considers factors such as financing quality, characteristic of products and whether the financing has been restructured.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

**Key sources of estimation uncertainty
(continued)**

- Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

- Allowance for impairment losses of financial assets (continued)

Entitas Anak (lanjutan)

Subsidiary (continued)

Dalam mengestimasi cadangan yang diperlukan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian bawaan dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan kondisi ekonomi saat ini. Ketepatan dari cadangan yang dihitung ini tergantung pada seberapa tepat estimasi dan asumsi pada model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modeled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances calculated depends on how well the estimates and assumptions on the model and parameters used in determining collective allowances.

Basis evaluasi atas cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan piutang murabahah dijelaskan pada Catatan 2i.

Basis of evaluation of impairment for financial assets and murabahah receivables is described in Note 2i.

- Penentuan nilai wajar

- Determining fair values

Dalam menentukan nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan dimana tidak terdapat harga pasar yang dapat diobservasi, Bank dan Entitas Anak harus menggunakan teknik penilaian seperti dijelaskan pada Catatan 2aj. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan tidak memiliki harga yang transparan, nilai wajarnya menjadi kurang obyektif dan karenanya, membutuhkan tingkat pertimbangan yang beragam, tergantung pada likuiditas, konsentrasi, ketidakpastian faktor pasar, asumsi penentuan harga, dan risiko lainnya yang mempengaruhi instrumen tersebut.

The determination of fair value for financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Bank and Subsidiary have to use valuation techniques as described in Note 2aj. For financial instruments that trade infrequently and have little price transparency, fair value is less objective, and therefore, requires varying degrees of judgment depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

Kebijakan akuntansi pengukuran nilai wajar Bank dan Entitas Anak dibahas pada Catatan 2aj.

The Bank and Subsidiary's accounting policy on fair value measurement is discussed in Note 2aj.

Pertimbangan akuntansi yang penting dalam menerapkan kebijakan akuntansi Bank dan Entitas Anak

Critical accounting judgments in applying the Bank and Subsidiary's accounting policies

- Nilai wajar atas instrumen keuangan

- Fair value of financial instruments

Kebijakan akuntansi Bank dan Entitas Anak untuk pengukuran nilai wajar dibahas di Catatan 2aj.

The Bank and Subsidiary's accounting policy on fair value measurements is discussed in Note 2aj.

Informasi mengenai penentuan nilai wajar dari instrumen keuangan diungkapkan pada Catatan 42.

Information about the determination of fair value of financial instruments is disclosed in Note 42.

- Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan serta efek-efek syariah

- Financial assets and liabilities as well as sharia securities classification

Kebijakan akuntansi Bank dan Entitas Anak memberikan pilihan untuk mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangan ke dalam berbagai kategori pada saat pengakuan awal berdasarkan kondisi tertentu yang membutuhkan pertimbangan manajemen.

The Bank and Subsidiary's accounting policies provide choices to classify financial assets and liabilities into different categories at initial recognition based on certain circumstances requiring management's judgement.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Pertimbangan akuntansi yang penting dalam menerapkan kebijakan akuntansi Bank dan Entitas Anak (lanjutan)

- Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan serta efek-efek syariah (lanjutan)

Dalam menentukan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan, Bank telah menetapkan bahwa aset dan liabilitas keuangan telah memenuhi persyaratan klasifikasi sebagaimana dijabarkan dalam Catatan 2h.

Dalam mengklasifikasikan investasi pada efek-efek syariah sebagai "diukur pada biaya perolehan" dan "diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain", Entitas Anak telah menetapkan bahwa investasi tersebut telah memenuhi persyaratan klasifikasi sebagaimana dijabarkan dalam Catatan 2l.

- Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Karena Bank dan Entitas Anak tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Bank dan Entitas Anak sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Bank dan Entitas Anak mempertimbangkan faktor-faktor utama sebagai berikut; risiko kredit Bank dan Entitas Anak, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

Critical accounting judgments in applying the Bank and Subsidiary's accounting policies (continued)

- Financial assets and liabilities as well as sharia securities classification (continued)

In determining the classification of financial assets and liabilities, the Bank has determined that financial assets and liabilities have already met the requirements of such classification as set out in Note 2h.

In classifying investment in sharia securities as "measured at acquisition cost" and "measured at fair value through other comprehensive income", the Subsidiary has determined that the investment in sharia securities have already met the requirements of such classification as set out in Note 2l.

- Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

Since the Bank and Subsidiary could not readily determine the implicit rate, management uses the Bank and Subsidiary's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number of factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates.

In determining incremental borrowing rate, the Bank and Subsidiary consider the following main factors; the Bank and Subsidiary's credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Pertimbangan akuntansi yang penting dalam menerapkan kebijakan akuntansi Bank dan Entitas Anak (lanjutan)

- Sewa (lanjutan)

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Bank dan Entitas Anak mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya dimasukkan dalam jangka waktu sewa jika sewa cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

4. KAS

	31 Desember/December	
	2020	2019
Rupiah	2,399,483	2,270,444
Dolar Amerika Serikat	31,151	26,954
Yen Jepang	2,562	1,664
	<u>2,433,196</u>	<u>2,299,062</u>

Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 60.950 dan Rp 55.866.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA

	31 Desember/December	
	2020	2019
Rupiah	3,851,297	5,344,026
Dolar Amerika Serikat	1,765,671	3,643,053
	<u>5,616,968</u>	<u>8,987,079</u>

Termasuk dalam saldo giro pada Bank Indonesia adalah giro berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah masing-masing sebesar Rp 378.471 dan Rp 458.402 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)

Critical accounting judgments in applying the Bank and Subsidiary's accounting policies (continued)

- Leases (continued)

In determining the lease term, the Bank and Subsidiary consider all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

4. CASH

The Rupiah balance includes cash in ATMs (Automatic Teller Machines) as of 31 December 2020 and 2019 amounting to Rp 60,950 and Rp 55,866, respectively.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

Included in the balance of current accounts with Bank Indonesia are current accounts based on sharia principle under wadiah contract amounting to Rp 378,471 and Rp 458,402 as of 31 December 2020 and 2019, respectively.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Giro Wajib Minimum (GWM) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

As of 31 December 2020 and 2019, the statutory reserves were as follows:

	31 Desember/December		
	2020	2019	
<u>Bank</u>			<u>Bank</u>
Rupiah			Rupiah
- GWM (Bank Konvensional)	3.19%	6.17%	Statutory Reserves (Conventional Bank) -
- GWM Penyangga Likuiditas Makroprudensial ("PLM")	11.70%	9.53%	Statutory Reserve Macroprudential - Liquidity Buffer ("PLM")
- GWM Rasio Intermediasi Makroprudensial ("RIM")*	-	-	Statutory Reserve Macroprudential - Intermediation Ratio ("RIM")*
Mata uang asing			Foreign currencies
- GWM mata uang asing	4.02%	8.02%	Foreign currencies reserve -
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiary</u>
Rupiah			Rupiah
- GWM (Bank Syariah)	3.80%	4.91%	Statutory Reserves (Sharia Bank) -

*) Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 rasio RIM Bank berada di atas batas yang ditentukan. Walaupun demikian, Bank tidak dikenakan GWM RIM dikarenakan rasio KPMM Bank berada di atas 14%.

*) On 31 December 2020 and 2019, the Bank's RIM ratio is above the specified limit. Nevertheless the Bank is not subject to the GWM RIM as the Bank's CAR is above 14%.

Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan No. 20/30/PADG/2018 tanggal 30 November 2018, pemenuhan GWM Primer Rupiah rata-rata adalah sebesar 6,5% dengan pemenuhan harian sebesar 3,5% dan pemenuhan secara rata rata 3%. Peraturan ini telah berlaku sejak tanggal 1 Desember 2018.

Based on Board Members Regulation No. 20/30/PADG/2018 dated 30 November 2018, the required average of Rupiah Primary Statutory Reserves is 6.5% with daily fulfillment is 3.5% and average fulfillment is 3%. This regulation has been effective since 1 December 2018.

Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan No. 21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019, tentang perubahan kedua atas Peraturan Anggota Dewan No. 20/30/PADG/2018, pemenuhan GWM Primer Rupiah rata-rata adalah sebesar 6% dengan pemenuhan harian sebesar 3% dan pemenuhan secara rata rata 3%. Peraturan ini telah berlaku sejak tanggal 1 Juli 2019.

Based on Board Members Regulation No. 21/14/PADG/2019 dated 26 June 2019, the second amendment of the Board Members Regulation No. 20/30/PADG/2018, the required average of Rupiah Primary Statutory Reserves is 6% with daily fulfillment is 3% and average fulfillment is 3%. This regulation has been effective since 1 July 2019.

Penyangga likuiditas makroprudensial adalah cadangan likuiditas minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang jumlahnya ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Macroprudential liquidity buffer is minimum liquidity reserves that must be maintained by the Bank in the form of securities that meet certain requirements, which the amount is determined by Bank Indonesia.

Rasio Intermediasi Makroprudensial adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia, jika rasio hasil perbandingan antara: kredit yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing dan surat berharga korporasi dalam Rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang dimiliki Bank terhadap DPK Bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank dan surat berharga dalam Rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh Bank untuk memperoleh sumber pendanaan, di bawah minimum target Bank Indonesia atau jika di atas maksimum target Bank Indonesia, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM") Bank lebih kecil dari KPMM Insentif Bank Indonesia sebesar 14%.

Macroprudential Intermediation Ratio is the additional reserve that should be maintained by the Bank in the form of current accounts with Bank Indonesia, if the ratio of the comparison between: loans in Rupiah and foreign currencies and corporate securities in Rupiah and foreign currencies that meet certain requirements, which are owned by the Bank, against Bank's third party funds in the form of current accounts, savings deposits and time deposits in Rupiah and foreign currencies, excluding interbank funds and securities in Rupiah and foreign currencies that meet certain requirements issued by the Bank to obtain funding sources, is below the minimum target of Bank Indonesia or if above the maximum target of Bank Indonesia, the Capital Adequacy Ratio ("CAR") is below Bank Indonesia's requirement of 14%.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan No. 21/5/PADG/2019 tanggal 29 Maret 2019, minimum target Bank Indonesia adalah 84% (berubah dari sebelumnya 80%) dan maksimum target Bank Indonesia adalah 94% (berubah dari sebelumnya 92%). Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2019.

Sesuai PBI No.22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana Untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona (COVID-19), terdapat insentif GWM dalam mata uang rupiah sebesar 0,5% jika memenuhi persyaratan.

Sesuai dengan peraturan BI mengenai giro wajib minimum ("GWM") bagi bank umum syariah yang berlaku, setiap bank diwajibkan memelihara GWM dalam Rupiah secara harian sebesar 1,5%, secara rata-rata sebesar 3% dan total kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah sebesar 4,5% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah.

Bank dan Entitas Anak memenuhi ketentuan BI yang berlaku tentang Giro Wajib Minimum pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

**5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA
(continued)**

Based on Board Members Regulation No. 21/5/PADG/2019 dated 29 March 2019, minimum target of Bank Indonesia is 84% (changed from previously 80%) and maximum target of Bank Indonesia is 94% (changed from previously 92%). This regulation has been effective since 1 July 2019.

As per PBI No.22/4/PBI/2020 regarding Incentives for Banks that Provide Funds for Certain Economic Activities to Support the Handling of Economic Impacts due to Corona Virus (COVID-19) Outbreak, there is a GWM incentive in Rupiah currency of 0.5% if requirements are met.

In accordance with the prevailing BI regulations regarding minimum reserve requirements ("GWM") for sharia commercial banks, each bank is required to maintain GWM in Rupiah on daily basis of 1.5%, with an average of 3% and total obligation of GWM Rupiah of 4.5% from third party funds.

The Bank and Subsidiary fulfilled BI's regulations regarding Statutory Reserve Requirements as of 31 December 2020 and 2019.

6. GIRO PADA BANK-BANK LAIN

a. Berdasarkan mata uang

	31 Desember/December	
	2020	2019
Rupiah	402,271	212,823
Mata uang asing		
Yen Jepang	184,496	575,604
Dolar Amerika Serikat	163,516	158,708
Euro Eropa	82,967	35,410
Dolar Singapura	32,465	46,378
Dolar Australia	15,636	3,173
Poundsterling Inggris	10,421	7,257
Baht Thailand	3,024	15,955
Mata uang asing lainnya	1,772	1,596
	<u>494,297</u>	<u>844,081</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(497)	-
	<u>896,071</u>	<u>1,056,904</u>

Rupiah
Foreign currencies
Japanese Yen
United States Dollar
European Euro
Singapore Dollar
Australian Dollar
Great Britain Poundsterling
Thailand Baht
Other foreign currencies

Allowance for impairment losses

b. Berdasarkan hubungan dengan pihak lawan

	31 Desember/December	
	2020	2019
Pihak ketiga		
Rupiah	402,271	212,823
Mata uang asing	123,746	118,631
	<u>526,017</u>	<u>331,454</u>
Pihak berelasi		
Mata uang asing	370,551	725,450
Cadangan kerugian penurunan nilai	(497)	-
	<u>896,071</u>	<u>1,056,904</u>

Third parties
Rupiah
Foreign currencies

Related party
Foreign currencies

Allowance for impairment losses

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. GIRO PADA BANK-BANK LAIN (lanjutan)

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

c. Berdasarkan pihak lawan

c. By counterparties

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Central Asia Tbk	375,163	166,790	PT Bank Central Asia Tbk
Wells Fargo Bank NA, New York	70,411	46,598	Wells Fargo Bank NA, New York
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	28,533	88,832	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	27,047	14,738	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
National Australia Bank	15,636	3,173	National Australia Bank
Citibank N.A., New York	7,069	8,657	Citibank N.A., New York
Lain-lain	2,158	2,666	Others
	<u>526,017</u>	<u>331,454</u>	
Pihak berelasi			Related party
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	370,551	725,450	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Cadangan kerugian penurunan nilai	(497)	-	Allowance for impairment losses
	<u>896,071</u>	<u>1,056,904</u>	

Giro pada bank-bank lain pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 diklasifikasikan lancar berdasarkan kolektibilitas OJK. Tidak terdapat saldo giro pada bank-bank lain yang diblokir atau digunakan sebagai agunan pada tanggal-tanggal tersebut.

As of 31 December 2020 and 2019, current accounts with other banks were classified as current based on OJK collectibility. There were no current accounts with other banks which were blocked or used as collateral as of those dates.

Tingkat suku bunga rata-rata giro pada bank-bank lain per tahun untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah 0,81% dan 0,87%.

The average interest rates per annum of current accounts with other banks for the years ended 31 December 2020 and 2019 were 0.81% and 0.87%, respectively.

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for impairment losses was as follows:

	31 Desember/ 31 December		
	2020	2019	
Saldo awal	-	-	Beginning balance
Dampak penerapan awal PSAK 71 (Catatan 47)	(95)	-	Effect of initial implementation of PSAK 71 (Note 47)
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 35)	(397)	-	Provision during the year (Note 35)
Lainnya	(5)	-	Others
	<u>(497)</u>	<u>-</u>	
Saldo akhir			Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai atas giro pada bank-bank lain pada tanggal 31 Desember 2020.

Management believes that the allowance for impairment losses was adequate to cover impairment losses for current accounts with other banks as of 31 December 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2019 tidak terdapat giro pada bank-bank lain yang mengalami penurunan nilai. Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan kerugian penurunan nilai.

As of 31 December 2019, there was no impairment on current accounts with other banks. Management believes that no allowance for impairment losses was necessary.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN
BANK-BANK LAIN**

**7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND
OTHER BANKS**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain ditempatkan pada pihak ketiga.

As of 31 December 2020 and 2019, all placements with Bank Indonesia and other banks were placed at third parties.

a. Berdasarkan mata uang

a. By currency

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Rupiah	15,254,818	4,355,828	Rupiah
Mata uang asing			Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	1,700,050	4,484,048	United States Dollar
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	49,471	74,228	Accrued interest income
	<u>17,004,339</u>	<u>8,914,104</u>	

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain yang digolongkan sebagai setara kas adalah masing-masing sebesar Rp 14.482.317 dan Rp 6.559.876.

As of 31 December 2020 and 2019, total placements with Bank Indonesia and other banks that were classified as cash equivalents amounted to Rp 14,482,317 and Rp 6,559,876, respectively.

b. Berdasarkan jenis

b. By type

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Deposito berjangka	13,793,157	4,484,048	Time deposits
Sertifikat Bank Indonesia Syariah ("SBIS")	2,472,551	2,280,000	Certificate of Bank Indonesia Sharia ("SBIS")
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia ("FASBI") bersih setelah dikurangi dengan diskonto yang belum diamortisasi	689,160	1,825,828	Bank Indonesia's Deposit Facilities ("FASBI") net of unamortized discount
Call money	-	250,000	Call money
	<u>16,954,868</u>	<u>8,839,876</u>	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	49,471	74,228	Accrued interest income
	<u>17,004,339</u>	<u>8,914,104</u>	

c. Berdasarkan pihak lawan

c. By counterparties

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Deposito berjangka: Bank Indonesia	13,793,157	4,484,048	Time deposits: Bank Indonesia
Call money: PT Bank Bukopin Tbk	-	250,000	Call money: PT Bank Bukopin Tbk
Penempatan lain: Bank Indonesia - bersih setelah dikurangi dengan diskonto yang belum diamortisasi	3,161,711	4,105,828	Other placements: Bank Indonesia - net of unamortized discount
	<u>16,954,868</u>	<u>8,839,876</u>	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	49,471	74,228	Accrued interest income
	<u>17,004,339</u>	<u>8,914,104</u>	

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN
BANK-BANK LAIN (lanjutan)

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND
OTHER BANKS (continued)

d. Berdasarkan jangka waktu

d. By time period

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Hingga 1 bulan	14,482,317	6,559,876	Up to 1 month
Lebih dari 1 - 3 bulan	-	150,000	More than 1 - 3 months
Lebih dari 3 - 12 bulan	2,472,551	2,130,000	More than 3 - 12 months
	<u>16,954,868</u>	<u>8,839,876</u>	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	49,471	74,228	Accrued interest income
	<u>17,004,339</u>	<u>8,914,104</u>	

e. Berdasarkan sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo

e. By remaining period to maturity date

Informasi mengenai sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 42.

Information regarding remaining period to maturity date was disclosed in Note 42.

f. Tingkat suku bunga

f. Interest rate

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun atas penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The average interest rates per annum of placements with Bank Indonesia and other banks for the years ended 31 December 2020 and 2019 were as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2020	2019	
Rupiah	3.76%	5.20%	Rupiah
Mata uang asing	0.11%	2.16%	Foreign currencies

g. Cadangan kerugian penurunan nilai

g. Allowance for impairment losses

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 diklasifikasikan lancar berdasarkan kolektibilitas OJK. Tidak terdapat saldo penempatan di Bank Indonesia dan bank-bank lain yang diblokir atau digunakan sebagai agunan pada tanggal-tanggal tersebut.

Placements with Bank Indonesia and other banks as of 31 December 2020 and 2019 was classified as current based on OJK collectibility. There were no placements with Bank Indonesia and other banks which were blocked or used as collateral as of those dates.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain yang mengalami penurunan nilai. Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan kerugian penurunan nilai.

As of 31 December 2020 and 2019, there was no impairment on placement with Bank Indonesia and other banks. Management believes that no allowance for impairment losses was necessary.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK

8. SECURITIES

a. Berdasarkan jenis mata uang dan penerbit

a. By currency and issuer

31 Desember/December 2020

	Nilai nominal/ Nominal value	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealised gain (loss)	Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortised premium (discount)	Nilai tercatat/ Carrying amount
Rupiah				
<i>Diukur pada biaya perolehan/ Measured at acquisition cost</i>				
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)/Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)	79,000	-	-	79,000
Sukuk Bank Indonesia/Bank Indonesia sukuk	966,417	-	-	966,417
Sukuk korporasi/Corporation sukuk	138,000	-	3,339	141,339
Surat Berharga Syariah Negara/Sovereign Sharia Securities	1,430,274	-	8,530	1,438,804
Reksa dana syariah/Sharia mutual funds	92,600	-	-	92,600
Obligasi pemerintah/Government bonds	975,000	-	(307)	974,693
Wesel ekspor/Export bills	101,625	-	(301)	101,324
	<u>3,782,916</u>	<u>-</u>	<u>11,261</u>	<u>3,794,177</u>
<i>Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Measured at fair value through other comprehensive income</i>				
Obligasi pemerintah/Government bonds	9,399,683	-	346,838	9,746,521
Reksa dana syariah/Sharia mutual funds	85,000	79	-	85,079
	<u>9,484,683</u>	<u>79</u>	<u>346,838</u>	<u>9,831,600</u>
Mata uang asing/Foreign currency				
<i>Diukur pada biaya perolehan/ Measured at acquisition cost</i>				
Wesel ekspor/Export bills	1,184,393	-	(5,514)	1,178,879
	<u>1,184,393</u>	<u>-</u>	<u>(5,514)</u>	<u>1,178,879</u>
Jumlah/Total				14,804,656
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima/Accrued interest/margin income				215,898
Cadangan kerugian penurunan nilai/Allowance for impairment losses				(291)
Jumlah/Total				<u>15,020,263</u>

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)**8. SECURITIES (continued)****a. Berdasarkan jenis mata uang dan penerbit
(lanjutan)****a. By currency and issuer (continued)**

	31 Desember/December 2019			
	Nilai nominal/ Nominal value	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealised gain (loss)	Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortised premium (discount)	Nilai tercatat/ Carrying amount
Rupiah				
<u>Tersedia untuk dijual/Available for sale</u> Sertifikat Bank Indonesia/Certificate of Bank Indonesia	5,647,029	14,367	(61,820)	5,599,576
	<u>5,647,029</u>	<u>14,367</u>	<u>(61,820)</u>	<u>5,599,576</u>
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo/Held to maturity</u> Obligasi pemerintah/Government bonds	1,780,000	-	11,330	1,791,330
	<u>1,780,000</u>	<u>-</u>	<u>11,330</u>	<u>1,791,330</u>
<u>Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/Measured at fair value through other comprehensive income</u> Reksa dana syariah/Sharia mutual funds	80,000	185	-	80,185
	<u>80,000</u>	<u>185</u>	<u>-</u>	<u>80,185</u>
<u>Diukur pada biaya perolehan/ Measured at acquisition cost</u> Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)/Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA) Sukuk Bank Indonesia/Bank Indonesia sukuk Sukuk korporasi/Corporation sukuk Surat Berharga Syariah Negara/Sovereign Sharia Securities Reksa dana syariah/Sharia mutual funds	79,000	-	-	79,000
	1,005,926	-	-	1,005,926
	50,000	-	-	50,000
	816,481	-	(2,439)	814,042
	42,600	-	-	42,600
	<u>1,994,007</u>	<u>-</u>	<u>(2,439)</u>	<u>1,991,568</u>
<u>Pinjaman dan piutang/Loans and receivables</u> Wesel ekspor/Export bills	423,437	-	(1,136)	422,301
	<u>423,437</u>	<u>-</u>	<u>(1,136)</u>	<u>422,301</u>
Mata uang asing/Foreign currency				
<u>Pinjaman dan piutang/Loans and receivables</u> Wesel ekspor/Export bills	774,640	-	(4,976)	769,664
	<u>774,640</u>	<u>-</u>	<u>(4,976)</u>	<u>769,664</u>
Jumlah/Total				10,654,624
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima/Accrued interest/margin income				48,233
Cadangan kerugian penurunan nilai/Allowance for impairment losses				(6)
Jumlah/Total				<u>10,702,851</u>



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

b. Berdasarkan akad

b. By contract

Termasuk di dalam efek-efek adalah efek-efek dengan akad syariah:

Included in securities are securities under sharia contracts:

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Mudharabah	220,339	129,000	<i>Mudharabah</i>
Ijarah	966,417	814,042	<i>Ijarah</i>
Wakalah	177,679	122,785	<i>Wakalah</i>
Musarakah muntahiyah bittamlik	1,438,804	1,005,926	<i>Musarakah muntahiyah bittamlik</i>
	2,803,239	2,071,753	
Pendapatan yang masih akan diterima	23,553	14,836	<i>Accrued income</i>
	2,826,792	2,086,589	

c. Berdasarkan hubungan lawan

c. By relationship

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Pihak ketiga	14,672,468	10,568,519	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	132,188	86,105	<i>Related parties</i>
	14,804,656	10,654,624	
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	215,898	48,233	<i>Accrued interest/margin income</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(291)	(6)	<i>Allowance for impairment losses</i>
	15,020,263	10,702,851	

d. Berdasarkan jangka waktu

d. By time period

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Sampai dengan 1 bulan	779,437	327,884	<i>Up to 1 month</i>
Lebih dari 1 - 3 bulan	1,019,642	610,854	<i>More than 1 - 3 months</i>
Lebih dari 3 - 6 bulan	622,947	1,136,222	<i>More than 3 - 6 months</i>
Lebih dari 6 - 9 bulan	2,574	44,918	<i>More than 6 - 9 months</i>
Lebih dari 9 - 12 bulan	227,562	5,848,064	<i>More than 9 - 12 months</i>
Lebih dari 12 bulan	12,152,494	2,686,682	<i>More than 12 months</i>
	14,804,656	10,654,624	
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	215,898	48,233	<i>Accrued interest/margin income</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(291)	(6)	<i>Allowance for impairment losses</i>
	15,020,263	10,702,851	

e. Berdasarkan sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo

e. By remaining period of maturity date

Informasi mengenai sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 42.

Information regarding remaining period to maturity date was disclosed in Note 42.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)**8. SECURITIES (continued)****f. Tingkat suku bunga/margin rata-rata per tahun****f. Average interest rate/margin per annum**

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Sertifikat Bank Indonesia	-	6.44%	Certificate of Bank Indonesia
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	-	5.75%	Certificate Deposit of Bank Indonesia
Obligasi korporasi	-	6.07%	Corporate bonds
Obligasi pemerintah	5.47%	6.84%	Government bonds
Surat Berharga Syariah Negara	6.47%	6.81%	Sovereign Sharia Securities
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)	4.23%	5.12%	Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)
Reksa dana syariah	7.23%	7.79%	Sharia mutual funds
Sukuk korporasi	6.57%	7.00%	Corporate Sukuk
Sukuk Bank Indonesia	4.29%	5.54%	Sukuk Bank Indonesia

g. Berdasarkan peringkat**g. By rating**

Peringkat penerbit sukuk korporasi adalah sebagai berikut:

Rating of issuers of corporate sukuk was as follows:

	31 Desember/December 2020		
	Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Nilai tercatat/ Carrying amount
Sukuk korporasi/Corporate sukuk			
PT Bank CIMB Niaga Tbk			
Unit Usaha Syariah	Pefindo	id AAA	80,912
PT Bank Mandiri Syariah	Pefindo	id AA+	11,734
PT Bank BRI Syariah Tbk	Pefindo	id AA+	43,676
PT Bank BPD Sumatera Barat Tbk			
Unit Usaha Syariah	Pefindo	id A	5,017

	31 Desember/December 2019		
	Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Nilai tercatat/ Carrying amount
Sukuk korporasi/Corporate sukuk			
PT Bank CIMB Niaga Tbk			
Unit Usaha Syariah	Pefindo	id AAA	50,000

Pada 31 Desember 2020 dan 2019, peringkat atas seluruh efek yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia adalah BBB berdasarkan pemeringkat Fitch Ratings Indonesia.

As of 31 December 2020 and 2019, the rating of all securities issued by Republic of Indonesia was BBB based on Fitch Ratings Indonesia agency.

h. Cadangan kerugian penurunan nilai**h. Allowance for impairment losses**

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai atas efek-efek pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Management believes that the allowance for losses was adequate to cover impairment losses for securities as of 31 December 2020 and 2019.

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for impairment losses for securities was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2020	2019	
Saldo awal tahun	(6)	-	Balance at beginning of year
Dampak penerapan awal PSAK 71 (Catatan 47)	(452)	-	Effect of initial implementation of PSAK 71 (Note 47)
Pemulihan selama tahun berjalan (Catatan 35)	177	44	Reversal during the year (Note 35)
Pengalihan cadangan kerugian penurunan nilai akibat penggabungan usaha	-	(50)	Transfer allowance for impairment losses due to merger
Lainnya	(10)	-	Others
Saldo akhir tahun	(291)	(6)	Balance at end of year

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan hubungan (lanjutan)

Bank menyediakan produk derivatif untuk nasabahnya seperti kontrak pembelian atau penjualan berjangka mata uang asing, perjanjian swap mata uang asing dan perjanjian *swap/cap* tingkat suku bunga yang memungkinkan nasabahnya untuk memindahkan, memodifikasi atau mengurangi risiko atas kurs nilai tukar dan/atau risiko tingkat suku bunga. Sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko, Bank melindungi sebagian besar transaksi derivatif dengan nasabahnya dengan membuat transaksi derivatif timbal balik dengan jumlah dan waktu jatuh tempo yang sama dengan perusahaan afiliasi di luar negeri dan bank lain. Bank juga menggunakan instrumen derivatif sebagai sarana sehubungan dengan kegiatan manajemen risiko. Derivatif digunakan oleh Bank terutama untuk mengatasi risiko kurs nilai tukar atas aset dan liabilitas dalam mata uang asing, dan untuk mengatasi risiko tingkat suku bunga yang berhubungan dengan aset dan liabilitas tertentu di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

b. Berdasarkan kolektibilitas

Tagihan derivatif pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tidak mengalami penurunan nilai, dan diklasifikasikan sebagai lancar berdasarkan kolektibilitas OJK.

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan kerugian penurunan nilai pada tagihan derivatif.

c. Berdasarkan sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo

Informasi mengenai sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 42.

10. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI

Tagihan akseptasi

Semua tagihan akseptasi adalah transaksi dengan pihak ketiga.

a. Berdasarkan mata uang

	31 Desember/December	
	2020	2019
Rupiah	542,053	847,922
Mata uang asing	948,581	844,538
	<u>1,490,634</u>	<u>1,692,460</u>
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(5,694)	(69)
	<u>1,484,940</u>	<u>1,692,391</u>

9. DERIVATIVE RECEIVABLES AND PAYABLES (continued)

a. By type and relationship (continued)

The Bank provides derivative products to its customers such as forward exchange contracts, cross-currency swap agreements and interest rate swap/cap agreements to enable its customers to transfer, modify or reduce their foreign exchange and/or interest rate risks. As part of its risk management policy, the Bank covers most of these derivative contracts with customers with back-to-back derivative contracts with the same notional amount and maturity with its foreign affiliates and other banks. Also, the Bank uses derivative instruments as an end-user in connection with its risk management activities. Derivatives are used by the Bank mainly to manage foreign exchange risk on its foreign currency denominated assets and liabilities and to manage interest rate risk relating to specific groups of assets and liabilities in the consolidated statement of financial position.

b. By collectibility

Derivative receivables as of 31 December 2020 and 2019 were not impaired and were all classified as current based on OJK grading.

Management believes that no allowance for impairment losses was necessary on derivative receivables.

c. By remaining period to maturity date

Information regarding remaining period to maturity date was disclosed in Note 42.

10. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND PAYABLES

Acceptance receivables

All acceptance receivables transactions were with third parties.

a. By currency

Rupiah
Foreign currency

Less: Allowance for impairment losses



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)

10. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND PAYABLES (continued)

Tagihan akseptasi (lanjutan)

Acceptance receivables (continued)

b. Berdasarkan jangka waktu

b. By time period

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Rupiah			Rupiah
Lebih dari 1 - 3 bulan	-	24,046	More than 1 - 3 months
Lebih dari 3 - 6 bulan	144,510	56,061	More than 3 - 6 months
Lebih dari 6 bulan	397,543	767,815	More than 6 months
	<u>542,053</u>	<u>847,922</u>	
Mata uang asing			Foreign currencies
Hingga 1 bulan	2,092	3,079	Up to 1 month
Lebih dari 1 - 3 bulan	91,854	106,249	More than 1 - 3 months
Lebih dari 3 - 6 bulan	759,141	632,400	More than 3 - 6 months
Lebih dari 6 bulan	95,494	102,810	More than 6 months
	<u>948,581</u>	<u>844,538</u>	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(5,694)	(69)	Less: Allowance for impairment losses
	<u>1,484,940</u>	<u>1,692,391</u>	

c. Berdasarkan kolektabilitas

c. By collectability

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Lancar	1,488,700	1,688,749	Current
Dalam perhatian khusus	1,934	3,711	Special mention
	<u>1,490,634</u>	<u>1,692,460</u>	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(5,694)	(69)	Less: Allowance for impairment losses
	<u>1,484,940</u>	<u>1,692,391</u>	

d. Cadangan kerugian penurunan nilai

d. Allowance for impairment losses

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai tagihan akseptasi adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for impairment losses for acceptance receivables was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2020	2019	
Saldo awal tahun	(69)	-	Balance at beginning of year
Dampak penerapan awal PSAK 71 (Catatan 47)	(2,611)	-	Effect of initial implementation of PSAK 71 (Note 47)
(Penyisihan) pemulihan cadangan selama tahun berjalan (Catatan 35)	(3,146)	7	(Provision) reversal of allowance during the year (Note 35)
Pengalihan cadangan kerugian penurunan nilai akibat penggabungan usaha	-	(76)	Transfer allowance for impairment losses due to merger
Lainnya	132	-	Others
Saldo akhir tahun	<u>(5,694)</u>	<u>(69)</u>	Balance at end of year

Manajemen berpendapat bahwa cadangan yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai tagihan akseptasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Management believes that the allowance for losses was adequate to cover impairment losses on acceptance receivables as of 31 December 2020 and 2019.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)**10. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND PAYABLES (continued)****Liabilitas akseptasi****Acceptance payables****a. Berdasarkan hubungan dengan pihak lawan dan mata uang****a. By relationship with counterparties and currency**

	31 Desember/ December		
	2020	2019	
Rupiah			Rupiah
- Pihak ketiga	278,193	557,430	Third parties -
Mata uang asing			Foreign Currency
- Pihak ketiga	327,404	173,506	Third parties -
- Pihak berelasi	161,685	157,523	Related parties -
	<u>489,089</u>	<u>331,029</u>	
	<u>767,282</u>	<u>888,459</u>	

b. Berdasarkan jangka waktu**b. By time period**

	31 Desember/ December		
	2020	2019	
Rupiah			Rupiah
Lebih dari 1 - 3 bulan	-	21,568	More than 1 - 3 months
Lebih dari 3 - 6 bulan	144,510	56,060	More than 3 - 6 months
Lebih dari 6 bulan	133,683	479,802	More than 6 months
	<u>278,193</u>	<u>557,430</u>	
Mata uang asing			Foreign currency
Hingga 1 bulan	2,092	3,079	Up to 1 month
Lebih dari 1 - 3 bulan	91,854	106,249	More than 1 - 3 months
Lebih dari 3 - 6 bulan	299,649	118,891	More than 3 - 6 months
Lebih dari 6 bulan	95,494	102,810	More than 6 months
	<u>489,089</u>	<u>331,029</u>	
	<u>767,282</u>	<u>888,459</u>	

c. Berdasarkan sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo**c. By remaining period to maturity date**

Informasi mengenai sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 42.

Information regarding remaining period to maturity date was disclosed in Note 42.

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES**

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Pinjaman yang diberikan:			Loans:
Pihak ketiga			Third parties
- Rupiah	85,652,174	94,923,456	Rupiah -
- Dolar Amerika Serikat	38,698,999	34,762,076	United States Dollar -
- Yen Jepang	950,477	942,368	Japanese Yen -
- Euro Eropa	181,335	-	European Euro -
Pihak berelasi			Related parties
- Rupiah	90,163	98,492	Rupiah -
- Dolar Amerika Serikat	1,115,891	2,032,884	United States Dollar -
- Yen Jepang	714	1,333	Japanese Yen -
Pembiayaan/piutang syariah:			Sharia financing/receivables:
Pihak ketiga			Third parties
- Rupiah	9,522,866	8,999,574	Rupiah -
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima			Accrued interest/margin income
- Rupiah	613,802	673,920	Rupiah -
- Dolar Amerika Serikat	65,248	153,093	United States Dollar -
- Yen Jepang	370	346	Japanese Yen -
- Euro Eropa	136	-	European Euro -
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(3,422,325)</u>	<u>(1,467,199)</u>	Less: Allowance for impairment losses
	<u>133,469,850</u>	<u>141,120,343</u>	



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

a. Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas

a. Based on type, currency and collectability

31 Desember/December 2020							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Rupiah							Rupiah
Korporasi	36,305,844	925,486	463,916	-	-	37,695,246	Corporates
Pensiunan	30,595,606	527,468	34,575	39,794	126,295	31,323,738	Pensioners
Usaha Kecil Menengah	12,025,199	17,821	1,300	6,920	493,930	12,545,170	Small Medium Enterprises
Usaha Mikro Kecil	855,798	33,707	12,707	1,795	1,455	905,462	Micro business
Pembiayaan/piutang syariah	9,258,466	82,315	53,063	5,988	123,034	9,522,866	Sharia financing/ receivables
Pegawai instansi lain	710,196	44,954	6,163	5,415	17,408	784,136	Other institutions' employees
Keperluan rumah tangga	468,533	93,903	22,681	49,869	15,299	650,285	Household goods
Karyawan	152,861	5	5	17	1,112	154,000	Employee loans
Umum	1,321,210	232,232	11,352	11,895	14,969	1,591,658	General purpose
Kredit kepemilikan mobil	58,506	25,893	2,925	2,708	2,608	92,640	Car Loans
	<u>91,752,219</u>	<u>1,983,784</u>	<u>608,687</u>	<u>124,401</u>	<u>796,110</u>	<u>95,265,201</u>	
Mata uang asing							Foreign currencies
Korporasi	38,267,439	2,566,977	91,325	14,050	7,627	40,947,418	Corporates
	<u>130,019,658</u>	<u>4,550,761</u>	<u>700,012</u>	<u>138,451</u>	<u>803,737</u>	<u>136,212,619</u>	
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	641,138	38,418	-	-	-	679,556	Accrued interest/ margin income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2,120,681)	(336,439)	(370,133)	(82,477)	(512,595)	(3,422,325)	Allowance for impairment losses
	<u>128,540,115</u>	<u>4,252,740</u>	<u>329,879</u>	<u>55,974</u>	<u>291,142</u>	<u>133,469,850</u>	
31 Desember/December 2019							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Rupiah							Rupiah
Korporasi	37,178,116	782,332	14,750	-	-	37,975,198	Corporates
Pensiunan	33,249,734	696,810	53,791	50,180	119,767	34,170,282	Pensioners
Usaha Kecil Menengah	13,218,680	206,224	20,154	90,853	348,069	13,883,980	Small Medium Enterprises
Usaha Mikro Kecil	1,399,899	165,758	18,818	19,281	7,393	1,611,149	Micro business
Pembiayaan/piutang syariah	8,749,269	127,635	71,504	25,102	26,064	8,999,574	Sharia financing/ receivables
Pegawai instansi lain	1,306,174	99,226	5,540	10,826	19,218	1,440,984	Other institutions' employees
Keperluan rumah tangga	2,132,674	207,335	38,782	67,025	13,074	2,458,890	Household goods
Karyawan	178,308	372	237	85	300	179,302	Employee loans
Umum	2,986,003	122,555	11,019	2,508	3,024	3,125,109	General purpose
Kredit kepemilikan mobil	149,531	23,936	2,082	798	706	177,053	Car loans
	<u>100,548,388</u>	<u>2,432,183</u>	<u>236,677</u>	<u>266,658</u>	<u>537,615</u>	<u>104,021,521</u>	
Mata uang asing							Foreign currencies
Korporasi	35,616,340	2,010,667	90,236	13,883	7,536	37,738,662	Corporates
	<u>136,164,728</u>	<u>4,442,850</u>	<u>326,913</u>	<u>280,541</u>	<u>545,151</u>	<u>141,760,183</u>	
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	773,975	53,384	-	-	-	827,359	Accrued interest/ margin income
Cadangan kerugian penurunan nilai							impairment losses
	<u>136,430,948</u>	<u>4,073,378</u>	<u>222,717</u>	<u>154,997</u>	<u>238,303</u>	<u>141,120,343</u>	

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**a. Berdasarkan jenis, mata uang dan
kolektibilitas OJK (lanjutan)**

Pembiayaan/piutang syariah terdiri atas piutang murabahah, pembiayaan musyarakah, dan pinjaman qardh masing-masing sebesar Rp 9.514.196, Rp 8.315, dan Rp 355 pada tanggal 31 Desember 2020 dan masing-masing sebesar Rp 8.969.565, Rp 29.129, dan Rp 880 pada tanggal 31 Desember 2019.

Rasio pinjaman yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ("UMKM") terhadap jumlah pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 12,12% dan 12,27%. Rasio tersebut dihitung sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

**a. Based on type, currency and OJK grading
(continued)**

Sharia financing/receivables consists of murabahah receivables, musyarakah financing, and funds of qardh amounted to Rp 9,514,196, Rp 8,315, and Rp 355, respectively, as of 31 December 2020 and Rp 8,969,565, Rp 29,129, and Rp 880, respectively, as of 31 December 2019.

Ratios of loans extended to Micro, Small and Medium Enterprises ("UMKM") to total loans as of 31 December 2020 and 2019 were 12.12% and 12.27%, respectively. These ratios were calculated based on the prevailing Bank Indonesia regulations.

b. Berdasarkan sektor ekonomi

b. By economic sector

31 Desember/December 2020							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Rupiah							Rupiah
Rumah tangga	32,133,642	743,980	75,505	106,202	174,320	33,233,649	Household
Perdagangan	20,251,127	460,005	314,424	10,494	369,679	21,405,729	Trading
Perindustrian	15,139,336	483,360	3,093	2,000	166,146	15,793,935	Manufacturing
Jasa lainnya	4,771,802	33,155	210,890	4,573	17,339	5,037,759	Other services
Pertanian	2,414,580	7,462	3,702	967	7,082	2,433,793	Agriculture
Jasa akomodasi	204,419	2,737	837	124	93	208,210	Accommodation services
Konstruksi	5,939,815	2,308	-	-	31,937	5,974,060	Construction
Transportasi & komunikasi	10,654,146	250,362	83	27	29,070	10,933,688	Transportation & communication
Pertambangan	59,209	126	12	2	46	59,395	Mining
Lainnya	184,143	289	141	12	398	184,983	Others
	<u>91,752,219</u>	<u>1,983,784</u>	<u>608,687</u>	<u>124,401</u>	<u>796,110</u>	<u>95,265,201</u>	
Dolar Amerika Serikat							United States Dollar
Perdagangan	1,991,362	-	-	-	-	1,991,362	Trading
Perindustrian	9,144,320	2,122,014	91,325	14,050	7,627	11,379,336	Manufacturing
Jasa lainnya	486,852	-	-	-	-	486,852	Other services
Pertanian	2,497,184	-	-	-	-	2,497,184	Agriculture
Konstruksi	163,149	-	-	-	-	163,149	Construction
Transportasi & komunikasi	15,457,392	98,140	-	-	-	15,555,532	Transportation & communication
Pertambangan	1,846,834	-	-	-	-	1,846,834	Mining
Lainnya	5,894,643	-	-	-	-	5,894,643	Others
	<u>37,481,736</u>	<u>2,220,154</u>	<u>91,325</u>	<u>14,050</u>	<u>7,627</u>	<u>39,814,892</u>	
Yen Jepang							Japanese Yen
Perindustrian	545,462	346,823	-	-	-	892,285	Manufacturing
Jasa lainnya	58,906	-	-	-	-	58,906	Other services
	<u>604,368</u>	<u>346,823</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>951,191</u>	
Euro Eropa							European Euro
	181,335	-	-	-	-	181,335	Trading
	<u>181,335</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>181,335</u>	
	<u>130,019,658</u>	<u>4,550,761</u>	<u>700,012</u>	<u>138,451</u>	<u>803,737</u>	<u>136,212,619</u>	
bunga/margin yang masih akan diterima	641,138	38,418	-	-	-	679,556	Accrued interest/margin income
penurunan nilai	(2,120,681)	(336,439)	(370,133)	(82,477)	-	(3,910,730)	impairment losses
	<u>128,540,115</u>	<u>4,252,740</u>	<u>329,879</u>	<u>55,974</u>	<u>291,142</u>	<u>133,469,850</u>	



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

b. Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

b. By economic sector (continued)

31 Desember/December 2019							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Rupiah							Rupiah
Rumah tangga	37,511,417	1,139,395	112,704	132,562	156,107	39,052,185	Household
Perdagangan	18,499,411	346,132	72,195	78,456	214,812	19,211,006	Trading
Perindustrian	18,288,234	545,075	14,548	41,345	84,562	18,973,764	Manufacturing
Jasa lainnya	11,348,037	343,960	12,158	4,551	3,325	11,712,031	Other services
Pertanian	1,886,553	12,534	4,551	1,534	1,506	1,906,678	Agriculture
Jasa akomodasi	238,745	14,914	1,167	742	12,017	267,585	Accommodation services
Konstruksi	6,116,404	21,504	14,750	3,060	36,759	6,192,477	Construction
Transportasi & komunikasi	6,258,173	7,929	4,343	4,337	28,466	6,303,248	Transportation & communication
Pertambangan	233,648	252	16	3	-	233,919	Mining
Lainnya	167,766	488	245	68	62	168,629	Others
	<u>100,548,388</u>	<u>2,432,183</u>	<u>236,677</u>	<u>266,658</u>	<u>537,616</u>	<u>104,021,522</u>	
Dolar Amerika Serikat							United States Dollar
Perdagangan	2,563,857	-	-	-	-	2,563,857	Trading
Perindustrian	8,800,555	1,792,162	90,236	13,882	7,536	10,704,371	Manufacturing
Jasa lainnya	13,801,425	-	-	-	-	13,801,425	Other services
Pertanian	1,784,640	-	-	-	-	1,784,640	Agriculture
Konstruksi	195,576	-	-	-	-	195,576	Construction
Transportasi & komunikasi	1,636,441	-	-	-	-	1,636,441	Transportation & communication
Pertambangan	1,835,920	-	-	-	-	1,835,920	Mining
Lainnya	4,272,730	-	-	-	-	4,272,730	Others
	<u>34,891,144</u>	<u>1,792,162</u>	<u>90,236</u>	<u>13,882</u>	<u>7,536</u>	<u>36,794,960</u>	
Yen Jepang							Japanese Yen
Perdagangan	23,006	-	-	-	-	23,006	Trading
Perindustrian	600,087	218,505	-	-	-	818,592	Manufacturing
Jasa lainnya	102,103	-	-	-	-	102,103	Other services
	<u>725,196</u>	<u>218,505</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>943,701</u>	
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	773,975	53,384	-	-	-	827,359	Accrued interest/ margin income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(507,755)	(422,856)	(104,196)	(125,544)	(306,848)	(1,467,199)	Allowance for impairment losses
	<u>136,430,948</u>	<u>4,073,378</u>	<u>222,717</u>	<u>154,996</u>	<u>238,304</u>	<u>141,120,343</u>	

c. Berdasarkan jangka waktu

c. By time period

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Hingga 1 tahun	18,001,012	19,250,098	Up to 1 year
Lebih dari 1 - 2 tahun	36,789,382	33,033,629	More than 1 - 2 years
Lebih dari 2 - 3 tahun	8,262,828	9,753,606	More than 2 - 3 years
Lebih dari 3 - 4 tahun	9,148,596	8,147,728	More than 3 - 4 years
Lebih dari 4 - 5 tahun	23,699,316	26,202,246	More than 4 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	40,311,485	45,372,876	More than 5 years
	<u>136,212,619</u>	<u>141,760,183</u>	
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	679,556	827,359	Accrued interest/margin income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3,422,325)	(1,467,199)	Allowance for impairment losses
	<u>133,469,850</u>	<u>141,120,343</u>	



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

**g. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**

**g. Allowance for impairment losses
(continued)**

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The movement of the allowance for impairment losses for loans and sharia financing/receivables was as follows: (continued)

**Tahun berakhir 31 Desember 2019/
Year ended 31 December 2019**

	Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total	
Saldo awal tahun	(85,456)	(1,048,609)	(1,134,065)	Balance at beginning of year
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 35)	(268,164)	(1,177,769)	(1,445,933)	Provision during the year (Note 35)
Penerimaan kembali	-	(113,243)	(113,243)	Recovery
Penghapusbukuan	124,192	1,369,039	1,493,231	Write-off
Pengalihan cadangan kerugian penurunan nilai akibat penggabungan usaha	(92,610)	(7,641)	(100,251)	Transfer allowance for impairment losses due to merger
Lain-lain	-	(166,938)	(166,938)	Others
Saldo akhir tahun	(322,038)	(1,145,161)	(1,467,199)	Balance at end of year

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan Bank berdasarkan Tahap (Stage) adalah sebagai berikut:

The movement of the Bank's allowance for impairment losses for loans based on Stages was as follows:

**Tahun berakhir 31 Desember 2020/
Year ended 31 December 2020**

	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Saldo awal tanggal 1 Januari 2020, setelah penerapan awal PSAK 71	(705,738)	(299,069)	(630,487)	(1,635,294)	Beginning balance at 1 January 2020, after PSAK 71 initial implementation
Transfer ke Tahap 1	(318,782)	271,869	46,913	-	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	758,147	(908,339)	150,192	-	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	35,806	1,202,810	(1,238,616)	-	Transfer to Stage 3
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	(240,417)	(1,169,163)	(725,759)	(2,135,339)	Net change in exposures and remeasurements
Aset keuangan yang baru diperoleh	(279,051)	(88,677)	(171,766)	(539,494)	New originated financial assets
Penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbukuan	-	-	(95,800)	(95,800)	Recoveries from loans written-off
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	-	1,205,497	1,205,497	Write-offs during the year
Aset keuangan yang telah dilunasi	242,149	237,186	521,111	1,000,446	Financial assets which have been repaid
Perubahan parameter model	(132,113)	(81,352)	(48,732)	(262,197)	Changes in model parameter
Lain-lain	-	-	(110,654)	(110,654)	Others
Saldo akhir tahun kerugian – kredit ekspektasian Bank	(639,999)	(834,735)	(1,098,101)	(2,572,835)	Balance at end of year - expected credit losses Bank
Cadangan kerugian penurunan nilai – pembiayaan/piutang syariah	-	-	-	(849,490)	Allowance for impairment losses - sharia financing/receivables
Saldo akhir tahun	-	-	-	(3,422,325)	Balance at end of year

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**g. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**

Peningkatan cadangan kerugian nilai Bank dari Rp 1.635.294 menjadi Rp 2.572.835 adalah sebagai dampak dari beberapa kejadian berikut ini:

- Pengkinian parameter model sebagai bagian dari proses kaji ulang tahunan untuk mengakomodasi kondisi makroekonomi terkini.
- Sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak bulan Maret 2020, Bank telah merestrukturisasi pinjaman yang diberikan dengan jumlah Rp 5.712.090 pada tanggal 31 Desember 2020. Pinjaman yang diberikan yang telah direstrukturisasi tersebut telah menyebabkan kenaikan cadangan penurunan nilai pada Tahap 1, 2 dan 3, masing-masing sebesar Rp 83.080, Rp 294.734 and Rp 176.510.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

h. Pembiayaan bersama

Bank mengadakan perjanjian pembiayaan bersama, antara lain dengan PT Home Credit Indonesia (HCI) dan PT Finansia Multi Finance (Catatan 41).

i. Jasa pemasaran dan administrasi

Bank mengadakan perjanjian kerjasama jasa pemasaran dan administrasi dengan PT Oto Multiartha (OMA) dan PT Summit Oto Finance (SOF) (Catatan 41).

**j. Batas Maksimum Pemberian Kredit
("BMPK")**

Berdasarkan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank dan Entitas Anak yang disampaikan kepada OJK, pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tidak terdapat pelanggaran ataupun pelampauan BMPK kepada pihak ketiga dan pihak berelasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan OJK.

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

**g. Allowance for impairment losses
(continued)**

Increase in the Bank's allowance for impairment losses from Rp 1,635,294 to Rp 2,572,835 was due to the impact of few events as follows:

- Updates in model parameter as part of annual review process to accommodate the latest macroeconomic condition.
- As impact of COVID-19 pandemic which has been spread to Indonesia since March 2020, the Bank has restructured loans amounted to Rp 5,712,090 as of 31 December 2020. The restructured loans has increased the allowance for impairment losses in Stage 1, 2 and 3 by Rp 83,080, Rp 294,734, and Rp 176,510, respectively.

Management believes that the allowance for losses was adequate to cover impairment losses on loans and sharia financing/receivables as of 31 December 2020 and 2019.

h. Joint financing

The Bank has entered into joint financing agreements, among others with PT Home Credit Indonesia (HCI), and PT Finansia Multi Finance (Note 41).

i. Marketing and administration services

The Bank has entered into marketing and administration services agreement with PT Oto Multiartha (OMA) and PT Summit Oto Finance (SOF) (Note 41).

j. Legal Lending Limit ("LLL")

Based on the the Bank and Subsidiary's Legal Lending Limit (LLL) report to OJK, as of 31 December 2020 and 2019 there was no violation or excess of LLL to both third parties and related parties in compliance with OJK's regulation.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

**k. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/
piutang syariah bermasalah**

**k. Non-performing loans and sharia
financing/receivables**

Berdasarkan peraturan OJK yang berlaku, rasio bruto pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah bermasalah setinggi-tingginya adalah 5% dari jumlah pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah. Rasio kredit bermasalah bruto dan bersih Bank dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Based on prevailing OJK regulations, the maximum gross non-performing loans and sharia financing/receivables ratio for a bank is 5% from total loans and sharia financing/receivables given. The gross and net non-performing loan ratios of the Bank and Subsidiary were as follows:

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Kurang lancar	700,012	326,913	Substandard Doubtful Loss
Diragukan	138,451	280,541	
Macet	803,737	545,151	
Jumlah pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah bermasalah - kotor	1,642,200	1,152,605	<i>Total non-performing loans and sharia financing/receivables - gross</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(965,205)	(536,588)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Jumlah pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah bermasalah - bersih	676,995	616,017	<i>Total non-performing loans and sharia financing/receivables - net</i>
Jumlah pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang diberikan	136,212,619	141,760,183	<i>Total loans and sharia financing/receivables</i>
Rasio pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah bermasalah - kotor	1.21%	0.81%	<i>Non-performing loans and sharia financing/receivables ratio - gross</i>
Rasio pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah bermasalah - bersih	0.50%	0.43%	<i>Non-performing loans and sharia financing/receivables ratio - net</i>

Rasio pemenuhan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan Bank (persentase cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan yang telah dibentuk terhadap jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan sesuai ketentuan Bank Indonesia) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 138,40% dan 63,45%.

The Bank's ratio of allowance for impairment losses on financial assets (percentage of allowance for impairment losses on financial assets recorded by the Bank to the minimum allowance for impairment losses on financial assets as required by Bank Indonesia) as of 31 December 2020 and 2019 were 138.40% and 63.45%, respectively.

Pinjaman yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hipotik, hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lainnya.

Loans are generally collateralised by registered mortgages, mortgages or powers of attorney to sell and other guarantees.

Pada tanggal 31 Desember 2020, pinjaman yang diberikan yang dijamin dengan jaminan uang tunai adalah Rp 17.781.276 (31 Desember 2019: Rp 13.940.291).

As of 31 December 2020, loans secured by cash collateral were Rp 17,781,276 (31 December 2019: Rp 13,940,291).

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

I. Kredit penerusan

Bank juga menyalurkan fasilitas kredit yang dananya bersumber dari Pemerintah Indonesia atau Bank Indonesia melalui kredit penerusan (*channeling loan*) dalam bentuk Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Pengusaha Kecil Menengah (KPKM).

Saldo dari kredit penerusan tidak diakui pada laporan keuangan konsolidasian. Rincian saldo kredit penerusan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Kredit Penerusan KUT	24,687	24,687	<i>KUT Channeling Loans</i>
Kredit Penerusan KPKM	9,788	9,788	<i>KPKM Channeling Loans</i>
	<u>34,475</u>	<u>34,475</u>	

I. Channeling loans

The Bank also provides loan facilities funded by the Government of Indonesia or Bank Indonesia through channeling loans in the form of Kredit Usaha Tani (KUT) and Kredit Pengusaha Kecil Menengah (KPKM).

These channelling loans are not recognised in the consolidated financial statements. The balances were as follows:

m. Kredit sindikasi

Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama (sindikasi) dengan bank-bank lain dan umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi. Dalam kredit sindikasi, Bank dapat bertindak sebagai anggota dan/atau *arranger* dan/atau *security agency*. Sindikasi dilakukan dengan bank-bank di Indonesia dan luar negeri. Keikutsertaan Bank sebagai anggota dan/atau *arranger* dalam kredit sindikasi berkisar antara 5% sampai dengan 60% dari fasilitas kredit sindikasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

m. Syndicated loans

Syndicated loans represent loans provided to customers under syndication agreements with other banks and are generally used to support the working capital needs and investment. In syndicated loans, the Bank may act as a member and/or arranger and/or security agency. Syndication is done with several banks in Indonesia and offshore. Total participation of the Bank in syndicated loans, in which the Bank acted as a member and/or arranger, ranged from 5% up to 60%, of syndicated loan facility as of 31 December 2020 and 2019.

n. Perjanjian dengan perusahaan asuransi

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Pada tanggal 26 November 2008, Bank melakukan perjanjian ("PKS") dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz"), pihak ketiga, untuk melindungi Bank dari risiko kerugian tidak tertagihnya kredit pensiunan dan mikro dengan asuransi jiwa. Perjanjian Kerjasama ini mencakup 3 bagian (asuransi untuk debitur Kredit Pensiun sebelum tanggal 1 Desember 2008, asuransi untuk debitur Kredit Pensiun sejak tanggal 1 Desember 2008, dan asuransi untuk debitur kredit mikro) dan berlaku hingga 5 (lima) tahun sejak tanggal perjanjian, dan kemudian dengan sendirinya diperbaharui untuk jangka waktu berikutnya masing-masing 5 (lima) tahun atau sebagaimana disepakati bersama oleh para pihak.

n. Agreements with insurance companies

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

On 26 November 2008, the Bank entered into an agreement ("PKS") with PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz"), a third party, to cover the Bank from the risk of uncollectible pension and micro loans with life insurance. The insurance agreement consists of 3 sections (insurance for pension loan debtors before 1 December 2008, insurance for pension loan debtors since 1 December 2008 onwards, and insurance for micro loan debtors) and is effective for 5 (five) years since the date of the agreement, and shall then be automatically renewed for further successive periods of each of 5 (five) years or as mutually agreed by both parties.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

**n. Perjanjian dengan perusahaan asuransi
(lanjutan)**

**n. Agreements with insurance companies
(continued)**

PT Asuransi Allianz Life Indonesia (lanjutan)

**PT Asuransi Allianz Life Indonesia
(continued)**

Untuk produk Kredit Pegawai premi asuransi akan ditanggung sendiri oleh nasabah. Sebesar 20% dari premi yang dibayarkan oleh debitur yang diterima oleh Allianz, akan dikembalikan kepada Bank sebagai komisi.

For Active Employee Loan, insurance premium is solely borne by debtors. 20% of the premiums paid by debtors, which is received by Allianz, will be returned to the Bank as commission.

Sedangkan untuk debitur mikro, premi asuransi akan ditanggung oleh Bank.

Meanwhile for micro debtors, the insurance premium is borne by Bank.

Jumlah premi yang dibayarkan oleh debitur melalui Bank dan komisi yang diterima dari Allianz untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Total premium paid by debtors through the Bank and commission fees received from Allianz for the years ended 31 December 2020 and 2019 were as follows:

**Tahun berakhir 31 Desember/
Year ended 31 December**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Premi yang dibayarkan oleh debitur melalui Bank ke Allianz	256,604	353,707	<i>Premium paid by debtors through the Bank to Allianz</i>
Penerimaan komisi dari Allianz	19,623	34,090	<i>Commissions received from Allianz</i>

PT Avrist Assurance

PT Avrist Assurance

Pada tanggal 23 Juni 2011, Bank melakukan perjanjian dengan PT Avrist Assurance ("Avrist"), pihak ketiga, untuk melindungi Bank dari risiko kerugian tidak tertagihnya kredit pensiunan. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama satu tahun dan kemudian dengan sendirinya diperbaharui untuk jangka waktu berikutnya masing-masing satu tahun atau sebagaimana disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

On 23 June 2011, the Bank entered an agreement with PT Avrist Assurance ("Avrist"), a third party, to cover the Bank from the risk of uncollectible pensioners loan. The agreement is effective for one year and shall then be automatically renewed for further successive periods of each of one year or as mutually agreed by both parties.

Premi asuransi akan ditanggung bersama-sama oleh debitur dan Bank. Sebesar 11% dari premi yang dibayarkan oleh debitur yang diterima oleh Avrist, akan dikembalikan kepada Bank sebagai komisi.

The insurance premium is borne by both debtors and the Bank. 11% of the premiums paid by debtors which is received by Avrist will be returned to the Bank as commission.

Jumlah premi yang dibayarkan oleh debitur melalui Bank dan komisi yang diterima dari Avrist untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Total premiums paid by debtors through the Bank and commission fees received from Avrist for the years ended 31 December 2020 and 2019 were as follows:

**Tahun berakhir 31 Desember/
Year ended 31 December**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Premi yang dibayarkan oleh debitur melalui Bank ke Avrist	101,990	130,219	<i>Premium paid by debtors through the Bank to Avrist</i>
Penerimaan komisi dari Avrist	7,592	12,945	<i>Commissions received from Avrist</i>

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

**n. Perjanjian dengan perusahaan asuransi
(lanjutan)**

**n. Agreements with insurance companies
(continued)**

PT Asuransi Jiwa Generali

PT Asuransi Jiwa Generali

Pada tanggal 22 Juni 2011, Bank telah melakukan perjanjian dengan PT Asuransi Jiwa Generali ("Generali"), pihak ketiga, untuk melindungi Bank dari risiko kerugian tidak tertagihnya kredit pensiunan. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama satu tahun dan kemudian dengan sendirinya diperbaharui untuk jangka waktu berikutnya masing-masing satu tahun atau sebagaimana disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

On 22 June 2011, the Bank entered into an agreement with PT Asuransi Jiwa Generali ("Generali"), a third party, to cover the Bank from the risk of uncollectible pension loans. The agreement is effective for one year and shall then be automatically renewed for further successive periods of each of one year or as mutually agreed by both parties.

Premi asuransi akan ditanggung bersama-sama oleh debitur dan Bank. Sebesar 11% dari premi yang dibayarkan oleh debitur, yang diterima oleh Generali, akan dikembalikan kepada Bank sebagai komisi.

The insurance premium is borne by both debtors and the Bank. 11% of the premiums paid by debtors which is received by Generali will be returned to the Bank as commission.

Pada tanggal 9 Oktober 2015, Bank juga melakukan perjanjian dengan PT Asuransi Jiwa Generali ("Generali"), pihak ketiga, untuk melindungi Bank dari risiko kredit dari pinjaman pegawai aktif. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama lima tahun dan kemudian secara otomatis akan diperpanjang untuk 5 tahun berikutnya atau dapat dihentikan lebih awal sebagaimana disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Per 31 Desember 2020, perjanjian kerjasama ini terakhir kali secara otomatis diperpanjang pada 9 Oktober 2020 untuk 5 tahun berikutnya sampai 9 Oktober 2025.

On 9 October 2015, the Bank also entered into an agreement with PT Asuransi Jiwa Generali ("Generali"), a third party, to cover the Bank from the credit risk of active employee loans. The agreement is effective for five years and will be automatically extended for the next five years or may be terminated earlier as agreed by both parties. As of 31 December 2020, the agreement has been last automatically extended at 9 October 2020 for the next five years until 9 October 2025.

Premi asuransi ditanggung sendiri oleh debitur. Sebesar 20% dari premi yang dibayarkan oleh debitur, yang diterima oleh Generali, akan dikembalikan kepada Bank sebagai komisi.

The insurance premium is borne solely by debtors. 20% of the premiums paid by debtors which is received by Generali will be returned to the Bank as commission.

Jumlah premi yang dibayarkan oleh debitur melalui Bank dan komisi yang diterima dari Generali untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Total premium paid by debtors through the Bank and commission fees received from Generali for the years ended 31 December 2020 and 2019 were as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December	
	2020	2019
Premi yang dibayarkan oleh debitur melalui Bank ke Generali	128,906	149,996
Penerimaan komisi dari Generali	9,388	15,051

*Premium paid by debtors through the Bank to Generali
Commissions received from Generali*



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

**n. Perjanjian dengan perusahaan asuransi
(lanjutan)**

**n. Agreements with insurance companies
(continued)**

PT FWD Life Indonesia

PT FWD Life Indonesia

Pada tanggal 13 Desember 2016, Bank juga melakukan implementasi kerjasama dengan PT FWD Life Indonesia ("FWD"), pihak ketiga, untuk melindungi Bank dari risiko kerugian tidak tertagihnya kredit pegawai. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama lima tahun dan kemudian dengan sendirinya diperbaharui untuk jangka waktu berikutnya selama lima tahun atau sebagaimana disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

On 13 December 2016, the Bank signed an agreement with PT FWD Life Indonesia ("FWD"), a third party, to cover the Bank from the risk of uncollectible active employee loans. The agreement is effective for five years and shall then be automatically renewed for further five years or as mutually agreed by both parties.

Premi asuransi akan ditanggung oleh debitur. Sebesar 20% dari seluruh premi yang dibayarkan oleh debitur, yang diterima oleh FWD, akan dibayarkan kepada Bank sebagai komisi.

The insurance premium is borne by debtors. 20% of all premiums paid by debtors which is received by FWD, will be paid to the Bank as commission.

Jumlah premi yang dibayarkan oleh debitur melalui Bank dan komisi yang diterima dari FWD untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Total premium paid by the debtors through the Bank and commission fees received from FWD for the years ended 31 December 2020 and 2019 were as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2020	2019	
Premi yang dibayarkan oleh debitur melalui Bank ke FWD	1	58	Premium paid by debtors through the Bank to FWD
Penerimaan komisi dari FWD	-	30	Commissions received from FWD

PT Proteksi Antar Nusa

PT Proteksi Antar Nusa

Pada tanggal 1 Maret 2017, Bank telah melakukan perjanjian dengan PT Proteksi Antar Nusa ("PAN"), pihak ketiga, untuk melindungi Bank dari risiko kerugian tidak tertagihnya kredit pensiunan. Perjanjian Kerjasama ini telah diperpanjang pada 17 Mei 2020 selama tiga tahun dan dapat diperpanjang sebagaimana disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

On 1 March 2017, the Bank entered an agreement with PT Proteksi Antar Nusa ("PAN"), a third party, to cover the Bank from the risk of uncollectible pensioners loan. The agreement has been extended on 17 May 2020 for another three years and can be extended as mutually agreed by both parties.

Premi asuransi akan ditanggung oleh debitur. Sebesar 10,5% dari seluruh premi yang dibayarkan oleh debitur yang diterima oleh PAN akan dibayarkan kepada Bank sebagai komisi.

The insurance premium is borne by debtors. 10.5% of all premiums paid by debtors which is received by PAN will be paid to the Bank as commission.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

**n. Perjanjian dengan perusahaan asuransi
(lanjutan)**

**n. Agreements with insurance companies
(continued)**

PT Proteksi Antar Nusa (lanjutan)

PT Proteksi Antar Nusa (continued)

Jumlah premi yang dibayarkan oleh debitur melalui Bank dan komisi yang diterima dari PAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The total premium paid by the debtors through the Bank and commission fees received from PAN for the years ended 31 December 2020 and 2019 were as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2020	2019	
Premi yang dibayarkan oleh debitur melalui Bank ke PAN	4,952	7,930	Premium paid by debtors through the Bank to PAN
Penerimaan komisi dari PAN	348	222	Commissions received from PAN

PT Adonai Pialang Asuransi

PT Adonai Pialang Asuransi

Pada tanggal 14 September 2018, Bank telah melakukan perjanjian dengan PT Adonai Pialang Asuransi ("APA"), pihak ketiga, untuk melindungi Bank dari risiko kerugian tidak tertagihnya kredit pensiunan. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang sebagaimana disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

On 14 September 2018, the Bank has entered an agreement with PT Adonai Pialang Asuransi ("APA"), a non-related party, to cover the Bank from the risk of uncollectible pensioners loan. The agreement is effective for three years and can be extended as mutually agreed by both parties.

Premi asuransi akan ditanggung oleh debitur. Sebesar 20% dari seluruh premi yang dibayarkan oleh debitur, yang diterima oleh APA akan dibayarkan kepada Bank sebagai komisi.

The insurance premium is borne by debtors. 20% of all premiums paid by debtors which is received by APA will be paid to the Bank as commission.

Pada tanggal 22 Agustus 2019, Bank juga telah melakukan perjanjian dengan APA untuk melindungi penutupan asuransi produk kredit KPR Bank.

On 22 August 2019, the Bank also entered into an agreement with APA to protect the closure of the Bank's mortgage loan insurance.

Komisi yang akan diterima Bank terkait produk KPR Bank adalah 10% dari premi asuransi jiwa kredit, dan 5% dari premi asuransi harta benda.

The Bank will receive commission in relation to the Bank's mortgage products amounted to 10% of the credit life insurance premium and 5% of the property insurance premium.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES
(continued)**

**n. Perjanjian dengan perusahaan asuransi
(lanjutan)**

**n. Agreements with insurance companies
(continued)**

PT Adonai Pialang Asuransi (lanjutan)

PT Adonai Pialang Asuransi (continued)

Jumlah premi yang dibayarkan oleh debitur melalui Bank dan komisi yang diterima dari APA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The total premium paid by the debtors through the Bank and commission fees received from APA for the years ended 31 December 2020 and 2019 were as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2020	2019	
Premi yang dibayarkan oleh debitur melalui Bank ke APA	96	24	Premium paid by debtors through the Bank to APA
Penerimaan komisi dari APA	22	8	Commissions received from APA

o. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang direstrukturisasi

o. Restructured loans and sharia financing/receivables

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang telah direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas OJK adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2020 and 2019, total restructured loans and sharia financing/receivables based on OJK grading was as follows:

	31 Desember/December 2020						
	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Korporasi	1,140,771	2,073	463,916	-	-	1,606,760	Corporates
Pensiunan	339	-	-	-	-	339	Pensioners
Kredit keperluan rumah tangga	23,220	-	-	-	-	23,220	Household goods
Kredit kepemilikan mobil Umum	15,779	-	-	-	-	15,779	Car loans
	504,653	9	-	-	-	504,662	General purpose
Usaha kecil menengah	3,292,127	2,308	-	5,420	67,205	3,367,060	Small medium enterprises
Usaha mikro kecil	591,132	22,647	12,403	891	935	628,008	Micro business
Pembiayaan/piutang syariah	2,865,772	3,880	44,008	3,712	121,258	3,038,630	Sharia financing/receivables
	<u>8,433,793</u>	<u>30,917</u>	<u>520,327</u>	<u>10,023</u>	<u>189,398</u>	<u>9,184,458</u>	
	31 Desember/December 2019						
	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Korporasi	4,781	209,109	-	-	-	213,890	
Pensiunan	475	-	-	-	-	475	
Usaha kecil menengah	251,168	44,175	10,753	12,561	54,630	373,287	Small medium enterprises
Usaha mikro kecil	226,497	74,942	9,349	6,564	3,277	320,629	
Pembiayaan/piutang syariah	47,400	2,229	968	572	384	51,553	Sharia financing/receivables
	<u>530,321</u>	<u>330,455</u>	<u>21,070</u>	<u>19,697</u>	<u>58,291</u>	<u>959,834</u>	

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**o. Pinjaman yang diberikan dan
pembiayaan/piutang syariah yang
direstrukturisasi (lanjutan)**

Sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak bulan Maret 2020, sejumlah pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah telah direstrukturisasi berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/ 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Jumlah pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang telah direstrukturisasi karena dampak pandemi COVID-19 selama tahun 2020 adalah sebesar Rp 6.073.752 untuk saldo pinjaman yang diberikan Bank dan Rp 7.129.869 untuk pembiayaan/piutang syariah Entitas Anak pada saat direstrukturisasi. Bank dan Entitas Anak melakukan restrukturisasi dengan skema penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga, perubahan jangka waktu pembiayaan dan/atau perubahan suku bunga. Saldo pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang telah direstrukturisasi karena dampak pandemi COVID-19 pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 5.712.091 dan Rp 3.038.628.

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

**o. Restructured loans and sharia
financing/receivables (continued)**

As the impacts of the COVID-19 pandemic which has been spread to Indonesia since March 2020, certain amount of loans and sharia financing/receivables have been restructured based on OJK Regulation No. 11/POJK.03/ 2020 dated 16 March 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impacts of the Spread of Corona Virus Disease 2019. The amount of loans and sharia financing/receivables which have been restructured due to impacts of COVID-19 pandemic during 2020 was Rp 6,073,752 for the Bank's balance of loans and Rp 7,129,869 for Subsidiary's sharia financing/ receivables at restructuring date. The Bank and Subsidiary provided restructuring under a scheme of principal and/or interest payments delays, change of financing period, or change of interest rate. The outstanding balance of loans and sharia financing/receivables which have been restructured due to impacts of COVID-19 pandemic as of 31 December 2020 was Rp 5,712,091 and Rp 3,038,628, respectively.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

12. PREPAYMENTS

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Asuransi kredit	1,710,521	1,860,240	<i>Loans insurance</i>
Pemeliharaan dan pembaharuan IT	101,425	86,400	<i>IT maintenance and renewal</i>
Sewa bangunan	17,665	235,564	<i>Building rental</i>
Tunjangan perumahan	6,729	18,686	<i>Housing allowance</i>
Jasa profesional	3,958	8,672	<i>Professional service</i>
Promosi	3,178	19	<i>Promotion</i>
Lainnya	38,436	24,940	<i>Others</i>
	<u>1,881,912</u>	<u>2,234,521</u>	

Beban dibayar dimuka lainnya termasuk beban dibayar dimuka untuk asuransi jiwa, asuransi uang tunai dan asuransi gedung.

Other prepayments primarily includes prepayments for life, cash and building insurance.

13. PERPAJAKAN

13. TAXATION

a. Klaim pengembalian pajak

a. Claims for tax refund

Bank memiliki klaim pengembalian pajak terkait:

The Bank has claims for tax refund related to:

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Pajak penghasilan badan - 2010	803	803	<i>Corporate income tax - 2010</i>
Pajak penghasilan badan - 2014	-	48,167	<i>Corporate income tax - 2014</i>
Pajak penghasilan badan - 2015	-	31,929	<i>Corporate income tax - 2015</i>
Pajak penghasilan badan - 2019	-	29,256	<i>Corporate income tax - 2019</i>
Kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan - 2017	5,017	5,067	<i>Corporate income tax overpayment - 2017</i>
Kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan - 2019	197,290	197,290	<i>Corporate income tax overpayment - 2019</i>
Pajak lainnya - 2017	5,945	8,800	<i>Other taxes - 2017</i>
	<u>209,055</u>	<u>321,312</u>	

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Pajak penghasilan badan:			<i>Corporate income taxes:</i>
<u>Bank</u>			<u>Bank</u>
- Pasal 29	180,663	-	<i>Article 29 -</i>
- Pasal 25	-	60,894	<i>Article 25 -</i>
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiary</u>
- Pasal 25	36,018	45,980	<i>Article 25 -</i>
- Pasal 29	71,247	12,186	<i>Article 29 -</i>
	<u>287,928</u>	<u>119,060</u>	
Pajak lainnya:			<i>Other taxes:</i>
<u>Bank</u>			<u>Bank</u>
- Pasal 23, 26 dan 4(2)	118,730	62,269	<i>Article 23,26 and 4(2) -</i>
- Pasal 21	41,703	36,018	<i>Article 21 -</i>
- Pajak pertambahan nilai	3,654	3,129	<i>Value added tax -</i>
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiary</u>
- Pasal 23, 26 dan 4(2)	5,227	9,701	<i>Article 23,26 and 4(2) -</i>
- Pasal 21	5,748	6,716	<i>Article 21 -</i>
- Pajak pertambahan nilai	13	-	<i>Value added tax -</i>
	<u>175,075</u>	<u>117,833</u>	
	<u>463,003</u>	<u>236,893</u>	

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expense

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Pajak penghasilan:			Income taxes:
- Kini			Current -
Bank	541,834	545,060	Bank
Entitas anak	316,829	526,767	Subsidiary
- Tanggihan			Deferred -
Bank	(184,117)	2,828	Bank
Entitas anak	(47,147)	(48,151)	Subsidiary
Jumlah beban pajak penghasilan	627,399	1,026,504	Total income tax expenses

Rekonsiliasi antara laba akuntansi konsolidasian sebelum pajak penghasilan dikali tarif pajak yang berlaku dengan beban pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation between consolidated accounting profit before income tax multiplied by the prevailing tax rate and consolidated income tax expense was:

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Laba akuntansi konsolidasian sebelum pajak penghasilan	2,633,076	4,018,922	Consolidated accounting profit before income tax
Ditambah:			Add:
Pendapatan dividen entitas anak	242,667	-	Dividend income for subsidiary
	2,875,743	4,018,922	
Tarif pajak	22%	25%	Tax rate
Pajak dihitung dengan tarif pajak	632,664	1,004,730	Tax calculated at tax rate
Perbedaan permanen dengan tarif pajak			Permanent differences at tax rate:
- Bank	(42,420)	12,721	Bank -
- Entitas anak	3,497	9,053	Subsidiary -
Efek perubahan pajak	33,658	-	Effect of tax changes
Beban pajak penghasilan konsolidasian	627,399	1,026,504	Consolidated income tax expense

Rekonsiliasi antara laba akuntansi konsolidasian sebelum pajak penghasilan dan penghasilan kena pajak Bank adalah sebagai berikut:

The reconciliation between consolidated accounting profit before income tax and taxable income of the Bank was as follows:

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Laba akuntansi konsolidasian sebelum pajak penghasilan	2,633,076	4,018,922	Consolidated accounting profit before income tax
Ditambah (dikurangi):			Add (less):
Pendapatan dividen dari entitas anak	242,667	-	Dividend income for subsidiary
Laba Entitas Anak sebelum pajak penghasilan	(1,124,296)	(1,878,249)	Subsidiary's profit before income tax
Laba akuntansi sebelum pajak penghasilan (Bank saja)	1,751,447	2,140,673	Accounting profit before income tax (Bank only)
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Penyisihan kerugian aset produktif - pinjaman yang diberikan	849,218	14,632	Allowance for impairment losses on earning assets - loans
Beban penyusutan	29,791	(51,247)	Depreciation expenses
Bonus direksi	5,266	(55,752)	Bonus for directors
Beban atas imbalan pascakerja	75,251	59,962	Post-employment benefit expenses
Akrual, bonus, tantiem dan lain-lain	(55,278)	21,090	Accruals, bonus, tantiem and others
Jumlah perbedaan temporer	904,248	(11,315)	Total temporary differences
Perbedaan permanen:			Permanent differences:
Beban yang tidak dapat dikurangkan	(192,816)	50,884	Non-deductible expenses
Penghasilan kena pajak Bank	2,462,879	2,180,242	Taxable income of the Bank



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAXATION (continued)

d. Perhitungan beban pajak kini dan kekurangan (kelebihan) pembayaran pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

d. The computation of current tax expense and corporate income tax underpayment (overpayment) was as follows:

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Penghasilan kena pajak:			Taxable income:
Bank	2,462,879	2,180,242	Bank
Entitas anak	1,440,130	2,107,068	Subsidiary
	<u>3,903,009</u>	<u>4,287,310</u>	
Beban pajak kini:			Current tax expense:
Bank	541,834	545,060	Bank
Entitas anak	316,829	526,767	Subsidiary
	<u>858,663</u>	<u>1,071,827</u>	
Dikurangi:			Less:
Pajak dibayar dimuka:			Prepaid taxes:
Bank	(361,171)	(742,350)	Bank
Entitas anak	(245,582)	(514,581)	Subsidiary
	<u>(606,753)</u>	<u>(1,256,931)</u>	
Kekurangan (kelebihan) pembayaran pajak penghasilan badan:			Corporate income tax underpayment (overpayment):
Bank	180,663	(197,290)	Bank
Entitas anak	71,247	12,186	Subsidiary
	<u>251,910</u>	<u>(185,104)</u>	

e. Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Bank dan Entitas Anak menghitung dan melaporkan/menyetorkan pajak untuk setiap perusahaan sebagai suatu badan hukum yang terpisah (pelaporan pajak penghasilan konsolidasian tidak diperbolehkan) berdasarkan sistem *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan/mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

e. Under the taxation laws of Indonesia, the Bank and its Subsidiary calculate and submit individual company tax returns (submission of consolidated income tax computation is not allowed) on a self-assessment basis. The tax authorities may assess/amend taxes within the statute of limitations under prevailing regulations.

Manajemen mempertahankan posisi perpajakan Bank dan Entitas Anak yang diyakini berdasarkan pada teknik dasar yang kuat, sesuai dengan peraturan perpajakan dan upaya manajemen dalam mengantisipasi kemungkinan risiko timbulnya pajak di masa depan.

Management vigorously defends the Bank and Subsidiary's tax positions which are believed to be grounded on sound technical basis, in compliance with the tax regulations and management efforts to anticipate possible future tax exposure.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 di atas adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Bank menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunannya.

The above calculation of income tax for the year ended 31 December 2020 was a preliminary estimate made for accounting purposes and is subject to change at the time Bank submits its annual tax return (SPT).

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Perpu No.1/2020 ("Peraturan"), tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan telah ditetapkan melalui Undang-Undang No.2 Tahun 2020 yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 16 Mei 2020 dan berlaku sejak tanggal 18 Mei 2020. Salah satu klausa dalam peraturan ini adalah pengurangan tarif pajak, yaitu 22% untuk tahun 2020 - 2021 dan 20% untuk tahun 2022 dan seterusnya.

On 31 March 2020, the Government issued Perpu No.1/2020 ("the Regulations"), on State Financial Policies and Financial System Stability for Handling the COVID-19 Pandemic and/or In the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability and has been determined through Law No.2 of 2020 which was authorized by the House of Representative on 16 May 2020 and effective since 18 May 2020. One of the clauses in this regulation is a reduction in tax rates, which is 22% for 2020-2021 and 20% for 2022 onwards.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)**13. TAXATION (continued)****f. Aset (liabilitas) pajak tangguhan****f. Deferred tax assets (liabilities)**

Rincian dari aset (liabilitas) pajak tangguhan Bank dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Details of deferred tax assets (liabilities) of the Bank and Subsidiary were as follows:

Bank**Bank**

		31 Desember/December 2020					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penyesuaian saldo awal/ Adjustment beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	Saldo akhir/ Ending balance		
Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan	(108,528)	124,291	184,936	-	200,699	Allowance for impairment losses on loans	
Imbalan kerja jangka pendek	83,102	-	(24,975)	-	58,127	Short-term employee benefits	
Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang	(7,263)	-	14,433	19,964	27,134	Post-employment benefits and other long-term employee benefits	
Keuntungan/kerugian yang belum direalisasi dari efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(4,026)	-	-	(24,520)	(28,546)	Unrealized (gain) loss on securities measured at fair value through other comprehensive income	
Aset tetap	(17,836)	20,598	9,945	-	12,707	Fixed assets	
Lain-lain	1,499	-	(222)	-	1,277	Others	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - bersih	(53,052)	144,889	184,117	(4,556)	271,398	Deferred tax assets (liabilities) - net	

31 Desember/December 2019

	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Transfer dari SMBCI terkait dengan merger/ Transfer from SMBCI related to merger	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	Saldo akhir/ Ending balance	
Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan	66,492	3,658	(178,678)	-	(108,528)	Allowance for impairment losses on loans
Imbalan kerja jangka pendek	82,246	(2,944)	3,800	-	83,102	Short-term employee benefits
Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang	(33,906)	15,901	-	10,742	(7,263)	Post-employment benefits and other long-term employee benefits
Keuntungan/kerugian yang belum direalisasi dari efek-efek tersedia untuk dijual dan diukur pada nilai wajar pada penghasilan komprehensif lain	(1,010)	-	86	(3,102)	(4,026)	Unrealized (gain) loss on available for sale and measured at fair value through other comprehensive income securities
Aset tetap	690	(12,812)	(5,714)	-	(17,836)	Fixed assets
Lain-lain	1,638	(6,631)	6,492	-	1,499	Others
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - bersih	116,150	(2,828)	(174,014)	7,640	(53,052)	Deferred tax assets (liabilities) - net



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAXATION (continued)

f. Aset (liabilitas) pajak tangguhan (lanjutan)

f. Deferred tax assets (liabilities) (continued)

Entitas Anak

Subsidiary

	31 Desember/December 2020				
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	Saldo akhir/ Ending balance	
Imbalan kerja jangka pendek Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya	49,422 (216)	(26,208) 4,259	- 4,436	23,214 8,479	Short-term employee benefits Post-employment benefits and other long-term employee benefits
Aset tetap	18,781	(12,177)	-	6,604	Fixed assets
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah	37,226	98,912	-	136,138	Allowance for impairment losses on murabahah receivables
Keuntungan/kerugian yang belum direalisasi dari efek	(46)	-	29	(17)	Unrealized gain (loss) from marketable securities
Lainnya	39,708	(17,639)	-	22,069	Others
Aset pajak tangguhan - bersih	144,875	47,147	4,465	196,487	Deferred tax assets - net

	31 Desember/December 2019				
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	Saldo akhir/ Ending balance	
Imbalan kerja jangka pendek Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya	34,021 (433)	15,401 3,267	- (3,050)	49,422 (216)	Short-term employee benefits Post-employment benefits and other long-term employee benefits
Aset tetap	11,424	7,357	-	18,781	Fixed assets
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah	26,425	10,801	-	37,226	Allowance for impairment losses on murabahah receivables
Keuntungan/kerugian yang belum direalisasi dari efek	(235)	-	189	(46)	Unrealized gain (loss) from marketable securities
Lainnya	28,382	11,325	-	39,707	Others
Aset pajak tangguhan - bersih	99,584	48,151	(2,861)	144,874	Deferred tax assets - net

g. Surat ketetapan pajak

g. Tax assessment letters

Sebelum penggabungan usaha (Catatan 1.b), SMBCI memiliki surat ketetapan pajak sebagai berikut:

Before the merger (Note 1.b), SMBCI had the following tax assessments:

Tahun pajak 2002

Fiscal year 2002

Pada tahun 2005, Direktur Jendral Pajak ("DJP") menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas pemeriksaan hasil pajak untuk tahun pajak 2002. Pada tahun 2016, SMBCI mengajukan surat keberatan ke DJP. DJP menolak keberatan Bank tersebut.

In 2005, Director of General Taxation ("DGT") issued the Tax Underpayment Letter ("SKPKB") for fiscal year 2002. In 2016, SMBCI filed an objection letter to DGT. DGT rejected SMBCI's objection.

SMBCI mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Juni 2007 setelah membayar semua denda dan bunga. Di bulan Desember 2010, Pengadilan Pajak mengabulkan gugatan SMBCI tersebut dan SMBCI menerima semua kelebihan pengembalian pajak.

SMBCI filed an appeal to the Tax Court on 22 June 2007 after paying all penalty and interest. In December 2010, the Tax Court approved SMBCI's appeal and SMBCI received all tax refund.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAXATION (continued)

g. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

g. Tax assessments letters (continued)

Sebelum penggabungan usaha (Catatan 1.b), SMBCI memiliki surat ketetapan pajak sebagai berikut (lanjutan):

Before the merger (Note 1.b), SMBCI had the following tax assessments (continued):

Tahun pajak 2002 (lanjutan)

Fiscal year 2002 (continued)

Atas putusan Pengadilan Pajak yang menyetujui banding SMBCI, DJP mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung di bulan Februari 2011 untuk membatalkan keputusan dari Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, permohonan kasasi tersebut masih dalam proses.

Based on the Tax Court's decision which approved the SMBCI's appeal, DGT filed a judicial review to the Supreme Court in February 2011 to revoke the decision of the Tax Court. Up to the date of consolidated financial statements, the judicial review was still in process.

Untuk kompensasi bunga, pada bulan Februari 2011, SMBCI mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Pajak untuk memperoleh kompensasi bunga terkait pemeriksaan pajak tahun 2002. Pada tanggal 22 September 2011, SMBCI memenangkan gugatan ke Pengadilan Pajak tersebut.

For the interest compensation, in February 2011, SMBCI filed a new appeal to the Tax Court to get interest compensation related with 2002 tax assessment. On 22 September 2011, SMBCI won its appeal to the Tax Court.

Pada bulan Januari 2012, DJP mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan dari Pengadilan Pajak atas imbalan bunga tersebut. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, belum ada hasil atas permohonan kasasi yang diajukan oleh DJP ke Mahkamah Agung.

In January 2012, DGT filed a judicial review to the Supreme Court to revoke the decision of the Tax Court for interest compensation. Up to 31 December 2020, the outcome of the judicial review filed by the DGT to Supreme Court has not been determined yet.

Tahun pajak 2010

Fiscal year 2010

Pada tanggal 18 Desember 2015, SMBCI menerima SKPKB sejumlah Rp 817. SMBCI melunasi seluruh SKPKB (termasuk denda) sebesar Rp 817 pada tanggal 14 Januari 2016.

On 18 December 2015, SMBCI received SKPKB amounting to Rp 817. SMBCI paid all taxes underpayment (including penalties) amounting to Rp 817 on 14 January 2016.

Pada tanggal 14 Maret 2016, SMBCI mengajukan keberatan ke Kantor Pajak.

On 14 March 2016, SMBCI filed an objection to Tax Office.

Pada tanggal 20 Januari 2017, Kantor Pajak telah mengeluarkan Surat Keputusan atas Keberatan Wajib Pajak yang menyetujui keberatan SMBCI sebesar Rp 14. SMBCI mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut.

On 20 January 2017, the Tax Office issued Decision Letter on Taxpayer Objection which approved SMBCI's objection amounting to Rp 14. SMBCI filed an appeal against the decision.

Pada bulan Februari 2020, Bank menerima Putusan Pengadilan yang menolak permohonan banding Bank. Atas hasil Putusan Pengadilan tersebut, Bank mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung pada tanggal 7 Agustus 2020. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, belum ada hasil atas peninjauan kembali tersebut.

In February 2020, the Bank received the decision letter from Tax Court which rejected the Bank's appeal request. Based on the decision letter, the Bank filed an appeal for Judicial Review to the Supreme Court on 7 August 2020. Up to 31 December 2020, the outcome of the appeal has not been determined yet.

Tahun pajak 2015

Fiscal year 2015

Pada tahun 2016, sehubungan dengan kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan tahun 2015 sebesar Rp 36.179, kewajiban perpajakan SMBCI tahun 2015 diperiksa oleh Kantor Pajak.

In 2016, in relation with the overpayment income tax for year 2015 of Rp 36,179, SMBCI's 2015 taxes were being audited by the Tax Office.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Sebelum penggabungan usaha (Catatan 1.b), SMBCI memiliki surat ketetapan pajak sebagai berikut (lanjutan):

Tahun pajak 2015 (lanjutan)

Pada tanggal 26 April 2017, SMBCI menerima surat ketetapan bahwa Kantor Pajak hanya menyetujui klaim pengembalian pajak SMBCI sebesar Rp 4.249 dari Rp 36.179. SMBCI mengajukan surat keberatan sejumlah Rp 31.930, yang dicatat sebagai klaim pengembalian pajak.

Pada tanggal 12 Juli 2018, SMBCI menerima surat penolakan dari kantor pajak atas keberatan yang diajukan sebelumnya.

Pada tanggal 9 Oktober 2018, SMBCI mengajukan surat banding atas surat penolakan kantor pajak.

Pada tanggal 1 November 2019, SMBCI menerima putusan Pengadilan Pajak dimana dalam putusan disebutkan bahwa permohonan banding SMBCI dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Pajak.

Pada bulan Januari 2020, Bank menerima pengembalian pajak sebesar Rp 31.930. Pada bulan Februari 2020, Bank menerima pemberitahuan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh DJP. Bank telah menyampaikan Surat Kontra Memorandum kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Maret 2020. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, belum ada hasil atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh DJP ke Mahkamah Agung.

Tahun pajak 2014

Pada tanggal 19 Februari 2019, SMBCI menerima beberapa SKPKB sehubungan dengan tahun pajak 2014 dengan total sebesar Rp 48.227 (termasuk denda). Sesuai dengan peraturan yang berlaku, SMBCI telah melunasi SKPKB (termasuk denda) tersebut pada tanggal 27 Februari 2019. Pada tanggal 26 April 2019, SMBCI mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Badan dan PPN.

Pada tanggal 19 Maret 2020, DJP menolak keberatan Bank atas permohonan keberatan PPN. Sementara untuk keberatan atas PPh Badan, DJP mengabulkan sebagian permohonan Bank sebesar Rp 46.604. Pengembalian pajak telah diterima pada tanggal 20 Mei 2020. Bank tidak ada rencana untuk melakukan banding atas PPN.

Tahun pajak 2016

Pada tanggal 5 Desember 2018, BTPN menerima surat pemberitahuan pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2016. Pada tanggal 18 Desember 2020, DJP menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa temuan pemeriksaan perpajakan yang mengakibatkan kurang bayar beban pajak penghasilan.

13. TAXATION (continued)

g. Tax assessments letters (continued)

Before the merger (Note 1.b), SMBCI had the following tax assessments (continued):

Fiscal year 2015 (continued)

On 26 April 2017, SMBCI received a decision letter that the Tax Office only approved SMBCI's claim for tax refund amounting to Rp 4,249 out of Rp 36,179. SMBCI filed an objection letter amounted to Rp 31,930, which was recorded as claim for tax refund.

On 12 July 2018, SMBCI received rejection letter from the tax office for the objection letter submitted earlier.

On 9 October 2018, SMBCI filed an appeal letter for the rejection letter sent by the tax office.

On 1 November 2019, SMBCI received Tax Court decision which stated that SMBCI's appeal request has been wholly granted by the Tax Court.

In January 2020, the Bank received the tax refund amounted to Rp 31,930. In February 2020, the Bank received notification of Judicial Review filed by DGT. On 5 March 2020, the Bank submitted the letter of Counter Memorandum to the Supreme Court through the Tax Court. Up to 31 December 2020, the outcome of the judicial review filed by the DGT to Supreme Court has not been determined yet.

Fiscal year 2014

On 19 February 2019, SMBCI received assessment letters of SKPKB relating to fiscal year 2014 totaling to Rp 48,227 (including penalties). Based on the prevailing tax regulation, SMBCI fully paid the SKPKB (including penalties) on 27 February 2019. On 26 April 2019, SMBCI filed an objection letter toward SKPKB for corporate income tax and VAT.

On 19 March 2020, DGT rejected Bank's Objection towards the VAT Objection request. While towards the Corporate Income Tax Objection, DGT granted partially Bank's request amounting to Rp 46,604. The tax refund was received on 20 May 2020. Bank has no plan to appeal for the VAT.

Fiscal year 2016

On 5 December 2018, BTPN received tax audit notice for fiscal year 2016. On 18 December 2020, DGT issued the notification of tax examination result (SPHP) which stated that there are several tax audit findings resulting to the underpayment of income tax expenses.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Sebelum penggabungan usaha (Catatan 1.b), BTPN memiliki surat ketetapan pajak sebagai berikut: (lanjutan)

Tahun pajak 2016 (lanjutan)

Pada tanggal 7 Januari 2021, Bank telah menyampaikan tanggapan yang menolak semua temuan pemeriksaan pajak dan memberikan justifikasinya. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, belum ada tanggapan lebih lanjut dari DJP.

Tahun pajak 2017

Pada tanggal 29 April 2019, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") sebesar Rp 48.017 dari total lebih bayar menurut SPT Tahunan PPh Badan sebesar Rp 53.308. Atas selisih Rp 5.237, BTPN mengajukan keberatan dengan surat pengajuan tanggal 23 Juli 2019.

Pada bulan Juni 2020, Bank menerima surat keputusan keberatan dari DJP yang menerima sebagian permintaan keberatan Bank. Pada tanggal 11 September 2020, Bank telah mengajukan permohonan banding sebesar Rp 5.017 ke Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, proses banding masih dalam proses.

Atas pajak lainnya senilai Rp 5.945, Bank mengajukan permohonan pengembalian kepada DJP. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, proses pengembalian masih dalam proses.

Tahun pajak 2019

Pada tanggal 19 Desember 2019, Bank menerima surat pemberitahuan pemeriksaan pajak untuk PPh Pasal 23/26 masa pajak Januari 2019. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, proses pemeriksaan masih berlangsung.

Pada tanggal 8 Juli 2020, Bank menerima surat pemberitahuan pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2019. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, proses pemeriksaan masih berlangsung.

h. Persetujuan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha

Pada tanggal 28 Mei 2019, sesuai dengan surat No. S.022/DIRUT/FINCP/V/2019, Bank telah mengajukan permohonan izin untuk dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha antara BTPN dengan SMBCI.

Pada tanggal 2 Agustus 2019, Bank telah menerima surat keputusan dari DGT No. KEP-196/WPJ.19/2019 tertanggal 30 Juli 2019 mengenai persetujuan penggunaan nilai buku menurut pajak atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha.

13. TAXATION (continued)

g. Tax assessments letters (continued)

Before the merger (Note 1.b), BTPN had the following tax assessments (continued)

Fiscal year 2016 (continued)

On 7 January 2021, the Bank has submitted the response which rejected all of the tax audit findings and provided its justification. Up to 31 December 2020, there has been no further response from DGT.

Fiscal year 2017

On 29 April 2019, the Bank received Tax Overpayment Letter ("SKPLB") amounting to Rp 48,017 from the total overpayment in annual tax return amounting to Rp 53,308. BTPN filed an objection letter on 23 July 2019 for the difference of Rp 5,237.

In June 2020, the Bank received an objection decision letter from DGT which partially accepted the Bank's objection request. On 11 September 2020, the Bank submitted a request for appeal amounting to Rp 5,017 to the tax court. Up to 31 December 2020, the appeal was still in process.

For other taxes of Rp 5,945, the Bank submits a refund request to the DGT. Up to 31 December 2020, the return process is still in process.

Fiscal year 2019

On 19 December 2019, the Bank received a tax audit notification letter for income tax article 23/26 for the January 2019 tax period. Up to 31 December 2020, the tax audit was still on going.

On 8 July 2020, the Bank received a tax audit notification for Fiscal Year 2019. As of 31 December 2020, the audit process is still on going.

h. Approval of the use of book value towards the transfer asset in regards of merger

On 28 May 2019, in accordance with Letter No. S.022/DIRUT/FINCP/V/2019, the Bank submitted a request for permission to use the book value towards the transfer assets in regards of merger between BTPN and SMBCI.

On 2 August 2019, the Bank received decision letter from DGT No. KEP-196/WPJ.19/2019 dated 30 July 2019 regarding approval to use tax book value towards the transfer assets in regards of merger.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET TETAP

14. FIXED ASSETS

Aset tetap terdiri dari:

Fixed assets consist of the following:

31 Desember/December 2020						
	Saldo awal/ Beginning balance	Dampak penerapan awal PSAK 73/ Impact of the initial implementation of PSAK 73	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance
Model revaluasi						
Kepemilikan langsung						
Tanah	908,804	-	-	-	-	908,804
Model biaya						
Kepemilikan langsung						
Gedung	410,054	-	1,754	(18)	968	412,758
Kendaraan bermotor	207,868	-	16,697	(40,142)	11,577	196,000
Perlengkapan kantor	1,418,212	-	80,393	(99,440)	6,209	1,405,374
Leasehold improvement	772,663	-	18,077	(1,451)	5,755	795,044
Aset dalam penyelesaian	34,244	-	76,342	(115)	(71,093)	39,378
	<u>3,751,845</u>	<u>-</u>	<u>193,263</u>	<u>(141,166)</u>	<u>(46,584)</u>	<u>3,757,358</u>
Aset hak guna	-	1,009,248	128,120	(11,578)	-	1,125,790
	<u>3,751,845</u>	<u>1,009,248</u>	<u>321,383</u>	<u>(152,744)</u>	<u>(46,584)</u>	<u>4,883,148</u>
Akumulasi penyusutan						
Gedung	(255,455)	-	(48,368)	14	-	(303,809)
Kendaraan bermotor	(104,447)	-	(41,828)	38,219	4	(108,052)
Perlengkapan kantor	(972,363)	-	(213,027)	96,098	(4)	(1,089,296)
Leasehold improvement	(525,834)	-	(51,945)	1,428	-	(576,351)
	<u>(1,858,099)</u>	<u>-</u>	<u>(355,168)</u>	<u>135,760</u>	<u>-</u>	<u>(2,077,508)</u>
Aset hak guna	-	(235,206)	(223,563)	11,116	-	(447,653)
Nilai buku bersih	<u>1,893,746</u>					<u>2,357,987</u>
31 Desember/December 2019						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan dari penggabungan usaha/ Additions from merger	Penambahan/ Additions	Pengurangan / Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance
Model revaluasi						
Kepemilikan langsung						
Tanah	908,804	-	-	-	-	908,804
Model biaya						
Kepemilikan langsung						
Gedung	394,886	-	1,613	-	13,555	410,054
Kendaraan bermotor	152,354	-	73,943	(24,265)	5,836	207,868
Perlengkapan kantor	1,226,677	154,952	48,251	(174,113)	162,445	1,418,212
Leasehold improvement	670,356	105,429	24,206	(40,989)	13,661	772,663
Aset dalam penyelesaian	35,339	-	176,110	(1,667)	(175,538)	34,244
	<u>3,388,416</u>	<u>260,381</u>	<u>324,123</u>	<u>(241,034)</u>	<u>19,959</u>	<u>3,751,845</u>
Akumulasi penyusutan						
Gedung	(210,527)	-	(45,086)	154	4	(255,455)
Kendaraan bermotor	(88,358)	-	(32,453)	16,364	-	(104,447)
Perlengkapan kantor	(847,709)	(75,760)	(215,249)	166,358	(3)	(972,363)
Leasehold improvement	(455,095)	(39,565)	(65,476)	34,303	(1)	(525,834)
	<u>(1,601,689)</u>	<u>(115,325)</u>	<u>(358,264)</u>	<u>217,179</u>	<u>-</u>	<u>(1,858,099)</u>
Aset hak guna	-					
Nilai buku bersih	<u>1,786,727</u>					<u>1,893,746</u>

Rincian keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

Detail of the gain (loss) on disposal of fixed assets was as follows:

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Hasil atas penjualan aset tetap	8,792	6,026	Proceeds from sale of fixed assets
Nilai buku bersih	(1,945)	(9,551)	Net book value
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap	<u>6,847</u>	<u>(3,525)</u>	Gain (loss) on sale of fixed assets

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET TETAP (lanjutan)

Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 39.378 dan Rp 34.244 merupakan gedung yang disewa dari pihak ketiga dan masih dalam tahap renovasi dan perlengkapan kantor yang masih dalam tahap konstruksi. Konstruksi tersebut diperkirakan akan selesai pada tahun 2021 dengan persentase penyelesaian adalah antara 5% - 95% pada tanggal 31 Desember 2020 (31 Desember 2019: 5% - 95%).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan kepada perusahaan asuransi pihak ketiga:

	31 Desember/December	
	2020	2019
PT Asuransi MSIG Indonesia	1,301,943	1,165,071
PT Asuransi Adira Dinamika Syariah	193,975	142,288
PT Asuransi Adira Dinamika	-	11,130
Jumlah	<u>1,495,918</u>	<u>1,318,489</u>

Bank dan Entitas Anak berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari aset tetap tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Bank dan Entitas Anak melakukan peninjauan kembali atas masa manfaat, metode penyusutan dan nilai residu aset tetap dan menyimpulkan bahwa tidak diperlukan perubahan atas metode dan asumsi tersebut.

Penyusutan aset tetap untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 355.168 dan Rp 358.264 dibebankan pada beban umum dan administrasi (Catatan 34).

Penyusutan aset hak guna untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 223.563 dibebankan pada beban umum dan administrasi (Catatan 34).

Pada tanggal 31 Desember 2020, aset tetap yang sudah disusutkan penuh namun masih digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Bank adalah sebesar Rp 887.663 (31 Desember 2019: Rp 712.998).

Manajemen Bank dan Entitas Anak berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat aset tetap yang digunakan sebagai jaminan dan semua aset tetap tidak dibatasi kepemilikannya.

14. FIXED ASSETS (continued)

Assets under construction as of 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp 39,378 and Rp 34,244, respectively, related to buildings that were rented from third parties but was still in the renovation progress and office equipments that were still under construction. Those constructions are estimated to be completed in 2021 with current percentages of completion between 5% - 95% as of 31 December 2020 (31 December 2019: 5% - 95%).

As of 31 December 2020 and 2019, fixed assets, except for land, have been insured by the third party insurance companies:

PT Asuransi MSIG Indonesia	1,301,943
PT Asuransi Adira Dinamika Syariah	193,975
PT Asuransi Adira Dinamika	-
Total	<u>1,495,918</u>

The Bank and Subsidiary believe that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from the fixed assets.

As of 31 December 2020 and 2019, the Bank and Subsidiary performed a review on useful life, depreciation method and residual value of fixed assets and concluded that no change in these method and assumptions was necessary.

The depreciation of fixed assets for the years ended 31 December 2020 and 2019 amounting to Rp 355,168 and Rp 358,264, respectively, was charged to general and administrative expenses (Note 34).

The depreciation of right-of-use asset for the year ended 31 December 2020 amounting to Rp 223,563 was charged to general and administrative expenses (Note 34).

As of 31 December 2020, fixed assets that have been fully depreciated but were still in use to support the Bank's operation activities amounted to Rp 887,663 (31 December 2019: Rp 712,998).

The Bank and Subsidiary's management believe that there was no indication of impairment in the value of fixed assets as of 31 December 2020 and 2019.

As of 31 December 2020 and 2019 there was no fixed asset pledged as collateral and no limitation of ownership of the fixed assets.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET TETAP (lanjutan)

14. FIXED ASSETS (continued)

Revaluasi tanah

Revaluation of land

Berdasarkan kajian manajemen pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat kenaikan yang signifikan atas nilai tanah sehingga manajemen memutuskan untuk tidak membukukan nilai kenaikan tanah tersebut.

Based on assessment performed by management as of 31 December 2020 and 2019, there was no significant increase on the value of land. Therefore, management decided not to book the increment of fair value.

15. ASET TAKBERWUJUD

15. INTANGIBLE ASSETS

31 Desember/December 2020						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Cost
Piranti lunak	1,892,162	47,505	(39,578)	303,033	2,203,122	Software
Pengembangan piranti lunak	244,119	349,175	(20,097)	(309,008)	264,189	Software development
Goodwill	61,116	-	-	-	61,116	Goodwill
	<u>2,197,397</u>	<u>396,680</u>	<u>(59,675)</u>	<u>(5,975)</u>	<u>2,528,427</u>	
Akumulasi amortisasi						Accumulated amortisation
Piranti lunak	(1,128,855)	(364,272)	5,299	-	(1,487,828)	Software
Nilai buku bersih	<u>1,068,542</u>				<u>1,040,599</u>	Net book value

31 Desember/December 2019							
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan dari penggabungan usaha/ Additions from merger	Penambahan/ Additions	Pengurangan / Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Cost	
Piranti lunak	1,236,783	199,330	13,622	(6,144)	448,571	1,892,162	Software
Pengembangan piranti lunak	365,786	-	366,612	(19,749)	(468,530)	244,119	Software development
Goodwill	61,116	-	-	-	-	61,116	Goodwill
	<u>1,663,685</u>	<u>199,330</u>	<u>380,234</u>	<u>(25,893)</u>	<u>(19,959)</u>	<u>2,197,397</u>	
Akumulasi amortisasi						Accumulated amortisation	
Piranti lunak	(722,855)	(93,063)	(318,284)	5,347	-	(1,128,855)	Software
Nilai buku bersih	<u>940,830</u>					<u>1,068,542</u>	Net book value

Sisa periode amortisasi untuk piranti lunak adalah 1 sampai dengan 4 tahun.

Remaining amortisation period of software is 1 to 4 years.

Goodwill merupakan selisih antara nilai perolehan dengan nilai wajar dari aset Entitas Anak yang diakuisisi pada tahun 2014 dimana Bank mengakuisisi 70% saham PT Bank Sahabat Purba Danarta (sekarang PT Bank BTPN Syariah Tbk).

Goodwill arises from the difference between the cost of acquisition with the fair value of Subsidiary's assets acquired in 2014 where the Bank acquired 70% of PT Bank Sahabat Purba Danarta's shares (now PT Bank BTPN Syariah Tbk).

Manajemen Bank dan Entitas Anak berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai aset takberwujud pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Bank and Subsidiary's management believe that there is no impairment in the value of intangible assets as of 31 December 2020 and 2019.

Amortisasi aset takberwujud untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 364.272 dan Rp 318.284 dan dibebankan sebagai beban umum dan administrasi (Catatan 34).

The amortisation of intangible assets for the years ended 31 December 2020 dan 2019 amounted to Rp 364,272 and Rp 318,284, respectively, and was changed to general and administrative expenses (Note 34).

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. ASET LAIN-LAIN – BERSIH**16. OTHER ASSETS – NET**

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Transaksi ATM dan transfer	190,386	89,998	<i>ATM transaction and transfer</i>
Jaminan sewa	55,291	69,177	<i>Rental security deposits</i>
Agunan yang diambil alih	19,359	169	<i>Foreclosed collateral</i>
Tagihan kepada asuransi	13,508	23,232	<i>Receivables from insurance company</i>
Uang muka	10,078	32,945	<i>Advance payment</i>
Persediaan keperluan kantor	9,572	14,290	<i>Office supplies</i>
Aset imbalan kerja (Catatan 23)	-	69,202	<i>Employee benefits assets (Note 23)</i>
Lain-lain	45,285	33,918	<i>Others</i>
	<u>343,479</u>	<u>332,931</u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(170)	(169)	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<u>343,309</u>	<u>332,762</u>	

Transaksi ATM dan transfer terdiri dari piutang atas transaksi ATM dan transfer antar bank yang akan diselesaikan pada hari kerja berikutnya.

ATM transaction and transfer consists of receivables from ATM transaction and transfer from other banks that will be settled on the following working day.

Jaminan sewa merupakan pembayaran atas uang jaminan sewa gedung.

Rental security deposits represent security deposits payment on building rent.

Aset imbalan kerja merupakan kelebihan pendanaan pada aset program dimana terdapat manfaat ekonomi masa depan untuk Bank.

Employee benefit assets derived from overfunding in plan asset program which provide future economic benefit to the Bank.

Uang muka merupakan uang muka pembelian inventaris, beban perjalanan dinas dan uang muka operasional lainnya.

Advance payment consists of advances for purchase on office supplies, business trip allowances and other operational advances.

Tagihan kepada asuransi adalah klaim kepada pihak asuransi atas uang pesangon karyawan dan klaim pengembalian premi nasabah kredit pensiun.

Receivables from insurance company are the claim to the insurance companies on employees' severance pay and premium refund claim for pension loan's debtors.

Persediaan keperluan kantor merupakan persediaan atas formulir aplikasi, materai, kartu ATM dan cek.

Office supplies represent supply of application forms, stamps, ATM cards and cheques.

Lain-lain terdiri dari berbagai macam tagihan dari transaksi kepada pihak ketiga.

Others mainly consist of various receivables from transaction with third parties.

Cadangan kerugian penurunan nilai aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 169, dibentuk sebagian besar untuk agunan yang diambil alih Entitas Anak. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai.

Allowance for impairment losses for other assets as of 31 December 2020 and 2019 amounted Rp 169, respectively, were mainly made for foreclosed collaterals of Subsidiary. Management believes that the allowance for impairment losses is sufficient.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. LIABILITAS SEGERA

Seluruh liabilitas segera adalah dalam mata uang Rupiah dan dengan pihak ketiga.

17. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY

All obligations due immediately were denominated in Rupiah and to third parties.

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Titipan pencairan deposito	38,412	-	<i>Unsettled time deposits</i>
Titipan bagi hasil deposito	5,688	4,307	<i>Unsettled profit-sharing of time deposits</i>
Kiriman uang yang belum diselesaikan	3,526	423	<i>Unsettled remittance transactions</i>
Titipan uang pensiun	2,761	4,304	<i>Unsettled pension funds</i>
Titipan asuransi pensiun	2,615	473	<i>Unsettled pension insurance funds</i>
Lain-lain	6,402	8,761	<i>Others</i>
	<u>59,404</u>	<u>18,268</u>	

Titipan pencairan deposito merupakan tampungan uang deposito yang telah cair dan belum diambil nasabah.

Unsettled time deposits represent the customer's time deposits which have been due but have not been taken by the customers.

Titipan uang pensiun merupakan tampungan uang pembayaran pensiun nasabah yang akan dibayarkan ke rekening nasabah.

Unsettled pension funds represent the customer's retirement payments that will be paid to the customer's bank account.

18. SIMPANAN NASABAH

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Pihak ketiga:			<i>Third parties:</i>
- Giro	15,709,092	14,315,643	<i>Current accounts -</i>
- Tabungan	11,747,597	9,944,811	<i>Savings deposits -</i>
- Deposito berjangka	59,882,737	51,619,381	<i>Time deposit -</i>
- Deposito <i>on call</i>	1,085,620	2,969,819	<i>Deposits on call -</i>
	<u>88,425,046</u>	<u>78,849,654</u>	
Pihak berelasi:			<i>Related parties:</i>
- Giro	51,616	58,583	<i>Current accounts -</i>
- Tabungan	14,418	10,894	<i>Savings deposits -</i>
- Deposito berjangka	4,374,460	469,684	<i>Time deposits -</i>
	<u>4,440,494</u>	<u>539,161</u>	
	<u>92,865,540</u>	<u>79,388,815</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	268,383	210,601	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>93,133,923</u>	<u>79,599,416</u>	

Berdasarkan mata uang:

By currency:

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Simpanan nasabah:			<i>Deposits from customers:</i>
Rupiah	82,507,247	67,317,139	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	9,458,570	10,893,144	<i>United States Dollar</i>
Yen Jepang	839,340	1,103,663	<i>Japanese Yen</i>
Mata uang asing lainnya	60,383	74,869	<i>Other foreign currency</i>
	<u>92,865,540</u>	<u>79,388,815</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	268,383	210,601	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>93,133,923</u>	<u>79,599,416</u>	

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

a. Giro

a. Current accounts

Berdasarkan mata uang:

By currency:

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Rupiah	7,459,811	5,431,023	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	7,530,996	7,866,301	United States Dollar
Yen Jepang	708,484	1,036,827	Japanese Yen
Mata uang asing lainnya	61,417	40,075	Other foreign currencies
	15,760,708	14,374,226	
Beban bunga yang masih harus dibayar	1,264	731	Accrued interest expenses
	15,761,972	14,374,957	

Giro Wadiah yang dikelola oleh anak perusahaan, masing-masing sebesar Rp 50.954 dan Rp 25.248 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Wadiah current account managed by Bank's subsidiary, amounted to Rp 50,954 and Rp 25,248 as of 31 December 2020 and 2019, respectively.

Tingkat suku bunga rata-rata giro per tahun:

The average interest rate per annum for current accounts:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended December		
	2020	2019	
Rupiah	1.12%	1.43%	Rupiah
Mata uang asing	0.05%	0.15%	Foreign currencies

Saldo giro yang diblokir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 249 dan Rp 163.395.

Total current accounts which were blocked as of 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp 249 and Rp 163,395, respectively.

b. Tabungan

b. Saving deposits

Berdasarkan jenis:

By type:

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Tabungan "Jenius"	5,631,446	3,141,319	"Jenius" Savings
Tabungan "Citra Pensiun"	2,390,046	2,501,285	"Citra Pensiun" Savings
Tabungan "Wadiah TUR Prospera"	1,749,250	1,813,317	"Wadiah TUR Prospera" Savings
Tabungan "Se To"	1,568,579	2,094,713	"Se To" Savings
Tabungan "Pasti"	184,809	175,326	"Pasti" Savings
Tabungan "Tepat Tabungan"	37,344	38,003	"Tepat Tabungan" Savings
Tabungan "Wadiah WOW iB"	14,737	15,205	"Wadiah WOW iB" Savings
Lain-lain	185,804	176,537	Others
	11,762,015	9,955,705	
Beban bunga yang masih harus dibayar	2,414	3,066	Accrued interest expenses
	11,764,429	9,958,771	



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

b. Tabungan (lanjutan)

b. Saving deposits (continued)

Berdasarkan mata uang:

By currency:

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Simpanan nasabah			<i>Deposits from customers</i>
Rupiah	11,396,888	9,807,345	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerikat Serikat	284,829	95,712	<i>United States Dollar</i>
Yen Jepang	19,915	17,854	<i>Japanese Yen</i>
Mata uang asing lainnya	60,383	34,794	<i>Other foreign currencies</i>
	<u>11,762,015</u>	<u>9,955,705</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	2,414	3,066	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>11,764,429</u>	<u>9,958,771</u>	

Tingkat suku bunga rata-rata tabungan per tahun:

Average interest rate per annum for saving deposits:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2020	2019	
Rupiah	2.14%	2.5%	<i>Rupiah</i>
Mata uang asing	0.04%	0.31%	<i>Foreign currencies</i>

Saldo tabungan yang diblokir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 13.849 dan Rp 5.072.

Total saving deposits which were blocked as of 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp 13,849 and Rp 5,072, respectively.

c. Deposito berjangka

c. Time deposits

Berdasarkan mata uang:

By currency:

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Deposito berjangka			<i>Time Deposits</i>
Rupiah	62,564,928	49,751,557	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	1,642,745	2,298,367	<i>United States Dollar</i>
Yen Jepang	49,524	39,141	<i>Japanese Yen</i>
	<u>64,257,197</u>	<u>52,089,065</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	263,931	204,823	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>64,521,128</u>	<u>52,293,888</u>	

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

c. Deposito berjangka (lanjutan)

c. Time deposits (continued)

Berdasarkan jangka waktu:

By time period:

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Hingga 1 bulan	32,237,533	28,516,430	Up to 1 month
Lebih dari 1 - 3 bulan	17,024,450	16,018,424	More than 1 - 3 months
Lebih dari 3 - 6 bulan	11,989,208	4,996,149	More than 3 - 6 months
Lebih dari 6 - 12 bulan	2,967,886	2,521,906	More than 6 - 12 months
Lebih dari 1 tahun	38,120	36,156	More than 1 year
	<u>64,257,197</u>	<u>52,089,065</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	263,931	204,823	Accrued interest expenses
	<u>64,521,128</u>	<u>52,293,888</u>	

Berdasarkan tingkat suku bunga:

By interest rate:

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Hingga 7%	64,247,558	44,590,172	Up to 7%
7% - 8%	8,601	7,236,869	7% - 8%
8% - 9%	1,038	262,024	8% - 9%
	<u>64,257,197</u>	<u>52,089,065</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	263,931	204,823	Accrued interest expenses
	<u>64,521,128</u>	<u>52,293,888</u>	

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk deposito:

Average interest rate per annum for time deposits:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended December		
	2020	2019	
Rupiah	5.60%	7.41%	Rupiah
Mata uang asing	0.81%	2.21%	Foreign currencies

Saldo deposito berjangka yang diblokir atau dijadikan jaminan kredit pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing adalah sebesar Rp 303.364 dan Rp 235.095.

Total time deposits blocked or pledged for collaterals of loans as of 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp 303,364 and Rp 235,095, respectively.

Informasi mengenai sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 42.

Information regarding remaining period to maturity date was disclosed in Note 42.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

d. Deposito on call

d. Deposits on call

Berdasarkan mata uang:

By currency:

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Deposito on call			<i>Deposits on call</i>
- Rupiah	1,085,620	2,327,214	<i>Rupiah -</i>
- Dolar Amerika Serikat	-	632,764	<i>United States Dollar -</i>
- Yen Jepang	-	9,841	<i>Japanese Yen -</i>
	<u>1,085,620</u>	<u>2,969,819</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	774	1,981	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>1,086,394</u>	<u>2,971,800</u>	

Rata-rata suku bunga deposito on call per tahun untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing adalah 4,56% dan 6,66%.

Average interest rates on deposits on call per annum for the years ended 31 December 2020 and 2019 were 4.56% and 6.66%, respectively.

19. SIMPANAN DARI BANK-BANK LAIN

19. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Pihak ketiga	644,908	4,342,049	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	5,904,428	7,291,425	<i>Related parties</i>
	<u>6,549,336</u>	<u>11,633,474</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	370	57,081	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>6,549,706</u>	<u>11,690,555</u>	

a. Berdasarkan jenis:

a. By type:

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Call money	6,533,250	11,568,219	<i>Call money</i>
Giro	16,086	15,234	<i>Current accounts</i>
Bank acceptance finance	-	50,000	<i>Bank acceptance finance</i>
Tabungan	-	21	<i>Savings deposits</i>
	<u>6,549,336</u>	<u>11,633,474</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	370	57,081	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>6,549,706</u>	<u>11,690,555</u>	

Tidak ada saldo simpanan dari bank-bank lain yang diblokir atau dijadikan jaminan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

There were no deposits from other banks which were blocked or pledged as of 31 December 2020 and 2019.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. SIMPANAN DARI BANK-BANK LAIN (lanjutan)

19. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)

b. Berdasarkan mata uang:

b. By currency:

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Rupiah	16,086	4,345,162	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	6,533,250	7,288,312	United States Dollar
	6,549,336	11,633,474	
Beban bunga yang masih harus dibayar	370	57,081	Accrued interest expenses
	6,549,706	11,690,555	

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

c. Average interest rate per annum:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended December		
	2020	2019	
Rupiah			Rupiah
Call money	5.20%	6.81%	Call money
Bank acceptance finance	5.86%	7.5%	Bank acceptance finance
Tabungan	-	1.5%	Savings deposits
Giro	0.23%	0.03%	Current accounts
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
Call money	0.87%	2.94%	Call money

d. Jangka waktu:

d. Time period:

Jangka waktu simpanan dari bank-bank lain pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah kurang dari 1 tahun.

The time period of deposits from other banks as of 31 December 2020 and 2019 was less than 1 year.

Informasi mengenai sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 42.

Information regarding remaining period to maturity date was disclosed in Note 42.

20. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN

20. SECURITIES ISSUED

a. Surat utang jangka menengah

a. Medium term notes

	Peringkat/ Rating*)	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Nilai nominal: Medium term notes II SMBCI	idAAA	-	1,302,000	Nominal value: Medium term notes II SMBCI
Dikurangi: Biaya transaksi yang belum diamortisasi		-	(591)	Less: Unamortised transaction costs
		-	1,301,409	
Ditambah: Beban bunga yang masih harus dibayar		-	5,032	Add: Accrued interest expenses
		-	1,306,441	
Surat utang jangka menengah sesuai dengan jangka waktunya: 1 - 3 tahun		-	1,302,000	Medium term notes based on time period: 1 - 3 years
		-	1,302,000	

*) Berdasarkan peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia

*) Based on rating by PT Pemeringkat Efek Indonesia



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

20. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

20. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Surat utang jangka menengah (lanjutan)

a. Medium term notes (continued)

Pembayaran bunga surat utang jangka menengah dilakukan setiap 3 bulan dan pembayaran pokok dilakukan pada saat jatuh tempo. Bank telah melakukan pembayaran bunga sesuai dengan jadwal. Pada tanggal 14 Juni 2020, Bank melakukan pelunasan atas surat utang jangka menengah.

Interest on medium term notes are paid every 3 months and the principal are paid on maturity date. The Bank has paid the interest based on the schedule. On 14 June 2020, the Bank fully repaid the medium term notes.

Dalam perjanjian perwaliamanatan, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi, antara lain untuk mempertahankan tingkat kesehatan Bank minimal berada dalam peringkat komposit 3 yang tergolong "Cukup Baik" sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan Bank Indonesia atau penilaian dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga otoritas keuangan lainnya. Bank telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

The trustee agreements provide several negative covenants, among others, maintain the Bank's health level at least in composite rating 3, which is classified as "Fair" according to internal rating Bank Indonesia or by Financial Service Authority or other financial institutions authority. The Bank has complied with the covenants on the trustee agreement.

Beban bunga atas surat utang jangka menengah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 49.266 dan Rp 99.628 (Catatan 31).

The interest expenses of medium term notes for the years ended 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp 49,266 and Rp 99,628, respectively (Note 31).

b. Utang obligasi

b. Bonds payable

	Peringkat/ Rating*)	31 Desember/December		
		2020	2019	
Nilai nominal:				Nominal value:
- Obligasi Berkelanjutan III Tahap II	AAA(idn)	-	900,000	Continuing Bonds III - Phase II
- Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I	AAA(idn)	1,000,000	1,000,000	Continuing Bonds IV - Phase I
		<u>1,000,000</u>	<u>1,900,000</u>	
Dikurangi:				Less:
Biaya emisi yang belum diamortisasi		(6,955)	(10,781)	Unamortised bonds issuance costs
		<u>993,045</u>	<u>1,889,219</u>	
Ditambah:				Add:
Beban bunga yang masih harus dibayar		7,379	21,254	Accrued interest expenses
		<u>1,000,424</u>	<u>1,910,473</u>	
Utang obligasi sesuai dengan jangka waktunya:				Bonds payable based on time period:
Hingga 1 tahun		-	-	Up to 1 year
Lebih dari 1-3 tahun		799,000	-	More than 1-3 years
Lebih dari 3 tahun		201,000	1,900,000	More than 3 years
		<u>1,000,000</u>	<u>1,900,000</u>	

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

20. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

20. SECURITIES ISSUED (continued)

b. Utang obligasi (lanjutan)

b. Bonds payable (continued)

Informasi lain mengenai utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Other information relating to bonds payable as of 31 December 2020 and 2019 was as follows:

Seri/ Series	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Tanggal penerbitan/ Date of issuance	Jatuh tempo/ Due date	Cicilan pokok obligasi/ Bonds principal installment
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II/Continuing Bonds III Phase II:					
Seri/ Series A	900,000	7.50%	18 Oktober/ October 2017	17 Oktober/ October 2020	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I/Continuing Bonds IV Phase I:					
Seri/ Series A	799,000	7.55%	27 November/ November 2019	26 November/ November 2022	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
Seri/ Series B	201,000	7.75%	27 November/ November 2019	26 November/ November 2024	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 bulan dan pembayaran pokok dilakukan pada saat jatuh tempo. Bank telah melakukan pembayaran pokok dan bunga obligasi sesuai dengan jadwal.

Bonds interests are paid every 3 months and bonds principals are paid on the maturity date. Bank has paid the bonds principal and interest based on the schedule.

Perjanjian perwalianamanatan mengatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank, antara lain tidak menerbitkan obligasi lain atau instrumen utang lain yang sejenis yang mempunyai hak tagih yang lebih tinggi dari Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I serta yang dijamin dengan aset, kecuali pinjaman dan fasilitas dari pinjaman bilateral interbank dan fasilitas bilateral dengan Bank Indonesia yang dijamin dengan aset dalam jumlah 20% dari aset yang dihitung dari laporan keuangan yang terakhir yang telah diaudit.

The trustee agreements provide several negative covenants to the Bank, among others, not issuing another bonds or other similar debt instrument with higher collecting right compares to Continuing Bond III Phase II and Continuing Bonds IV Phase I and collateralised with asset, except loans and facilities from bilateral interbank loan and bilateral facilities from Bank Indonesia which are secured with assets in the amount of 20% from assets which are calculated from the last audited financial statements.

Bank berkewajiban menjaga jumlah aset yang tidak diagunkan secara khusus minimal sebesar 125% dari total obligasi yang diterbitkan termasuk pokok obligasi. Bank telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

The Bank should keep the total assets that have not been specifically pledged at the minimum 125% from total issued bonds including bonds principal. The Bank has complied with the covenants on the trustee agreement.

Beban bunga atas utang obligasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 133.354 dan Rp 88.648 (Catatan 31).

The interest expenses of bonds payable for the years ended 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp 133,354 and Rp 88,648, respectively (Note 31).



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman yang diterima terdiri dari pinjaman bank dan pinjaman bukan bank yang dilakukan dengan pihak berelasi dan pihak ketiga.

21. BORROWINGS

Borrowings consists of bank borrowings and non-bank borrowings with related parties and third parties.

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Pihak ketiga			Third parties:
Pinjaman bank:			Bank borrowings:
PT Bank Central Asia Tbk	5,500,000	5,500,000	PT Bank Central Asia Tbk
Lainnya	32	-	Others
	<u>5,500,032</u>	<u>5,500,000</u>	
Pinjaman bukan bank:			Non-bank borrowings:
International Finance Corporation	2,733,100	1,368,500	International Finance Corporation
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Pemerintah	276	295	Government Housing Financing Liquidity Facility
	<u>2,733,376</u>	<u>1,368,795</u>	
Pihak berelasi			Related party:
Pinjaman bank:			Bank borrowings:
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	22,852,789	31,193,978	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
	<u>31,086,197</u>	<u>38,062,773</u>	
Dikurangi:			Less:
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(21,908)	(15,318)	Unamortised transaction costs
Ditambah:			Add:
Beban bunga yang masih harus dibayar	119,055	141,471	Accrued interest expenses
	<u>31,183,344</u>	<u>38,188,926</u>	

a. Pinjaman bank

Angsuran pokok pinjaman berdasarkan tanggal jatuh temponya:

a. Bank borrowings

Installments of borrowing principals based on maturity date:

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Hingga 1 tahun	4,500,032	-	Up to 1 year
Lebih dari 1 - 2 tahun	1,000,000	5,500,000	More than 1 - 2 years
Lebih dari 2 - 3 tahun	4,215,000	-	More than 2 - 3 years
Lebih dari 3 tahun	18,637,789	31,193,978	More than 3 years
	<u>28,352,821</u>	<u>36,693,978</u>	
Dikurangi:			Less:
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	-	(939)	Unamortised transaction costs
	<u>28,352,821</u>	<u>36,693,039</u>	
Ditambah:			Add:
Beban bunga yang masih harus dibayar	52,891	118,650	Accrued interest expenses
	<u>52,891</u>	<u>118,650</u>	
	<u>28,405,712</u>	<u>36,811,689</u>	

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

21. BORROWINGS (continued)

a. Pinjaman bank (lanjutan)

a. Bank borrowings (continued)

Pinjaman Bilateral PT Bank Central Asia Tbk

Bilateral Borrowing with PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 4 Mei 2018, Bank telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit *non-revolving term loan* sebesar Rp 1.400.000 dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagai kreditur. Tujuan pinjaman adalah untuk modal kerja Bank.

On 4 May 2018, the Bank signed non-revolving term loan facility agreement amounting to Rp 1,400,000 with PT Bank Central Asia Tbk as the creditor. The purpose of the borrowing is for the Bank's working capital.

Pada tanggal 31 Juli 2018, Bank telah menandatangani Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit yaitu penambahan pokok fasilitas *non-revolving term loan* sebesar Rp 1.100.000, sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 2.500.000.

On 31 July 2018 the Bank signed first amendment of the borrowing agreement that increase the principal amount of non-revolving term loan facility by Rp 1,100,000, resulting in total facility of Rp 2,500,000.

Berdasarkan perjanjian fasilitas, batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 6 (enam) bulan dari tanggal perjanjian kredit.

Based on the facility agreement, the availability period will be ended on the 6 (sixth) month from the date of agreement.

Fasilitas kredit harus ditarik sepenuhnya dalam batas waktu penarikan dengan ketentuan jumlah minimum penarikan adalah Rp 500.000 atau sebesar jumlah fasilitas kredit yang belum ditarik.

The facility should be fully drawdown within the availability period with minimum drawdown amount is Rp 500,000 or any remaining undrawn amount.

Pinjaman harus dibayar kembali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal perjanjian pinjaman. Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan berdasarkan suku bunga JIBOR, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo.

The borrowing should be repaid within 2 (two) years after the date of borrowings agreement. Interest period is 3 (three) or 6 (six) months based on JIBOR interest rate and the payment of interest execute every due date.

Penarikan pertama dilakukan pada tanggal 23 Mei 2018 sebesar Rp 700.000 dengan suku bunga 7,78% (6 bulan JIBOR + 1,35%), jatuh tempo tanggal 4 Mei 2020. Suku bunga disesuaikan setiap 6 (enam) bulan. Pembayaran bunga dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada tanggal 23 November dan 23 Mei, yang dimulai pada tanggal 23 November 2018 dan berakhir pada tanggal 4 Mei 2020. Pada tanggal 23 November 2018, suku bunga telah disesuaikan menjadi 9,165%.

The first drawdown was on 23 May 2018, amounting to Rp 700,000 with interest rate 7.78% (JIBOR 6 months + 1.35%), due date on 4 May 2020. Interest rate will be repriced on semi-annual basis. Interest will be paid every 6 (six) months, which is on 23 November and 23 May, started on 23 November 2018 and will be ended on 4 May 2020. On 23 November 2018 the interest rate was repriced to 9.165%.

Penarikan kedua dilakukan pada tanggal 5 Juni 2018 sebesar Rp 700.000 dengan suku bunga 7,815% (6 bulan JIBOR + 1,35%), jatuh tempo pada tanggal 4 Mei 2020. Suku bunga disesuaikan setiap 6 (enam) bulan. Pembayaran bunga dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada tanggal 5 Desember dan 5 Juni, yang dimulai pada tanggal 5 Desember 2018 dan berakhir pada tanggal 4 Mei 2020. Pada tanggal 5 Desember 2018, suku bunga telah disesuaikan menjadi 9,165%.

The second drawdown was on 5 June 2018, amounting to Rp 700,000 with interest rate 7.815% (JIBOR 6 months + 1.35%), due date on 4 May 2020. Interest rate will be repriced on semi-annual basis. Interest will be paid every 6 (six) months, which is on 5 December and 5 June, started on 5 December 2018 and will be ended on 4 May 2020. On 5 December 2018, the interest rate was repriced to 9.165%.



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

21. BORROWINGS (continued)

a. Pinjaman bank (lanjutan)

a. Bank borrowings (continued)

Pinjaman Bilateral PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

Bilateral Borrowing with PT Bank Central Asia Tbk (continued)

Penarikan ketiga dilakukan pada tanggal 12 September 2018 sebesar Rp 1.100.000 dengan suku bunga 8,69% (6 bulan JIBOR + 1,35%), jatuh tempo pada tanggal 4 Mei 2020. Suku bunga disesuaikan setiap 6 (enam) bulan. Pembayaran bunga dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada tanggal 12 Maret dan 12 September yang dimulai pada tanggal 12 Maret 2019 dan berakhir pada tanggal 4 Mei 2020.

The third drawdown was on 12 September 2018, amounting to Rp 1,100,000 with interest rate 8.69% (JIBOR 6 months + 1.35%), due date on 4 May 2020. Interest rate will be repriced on semi-annual basis. Interest will be paid every 6 (six) months, which is on 12 March and 12 September, started on 12 March 2019 and will be ended on 4 May 2020.

Sebelum penggabungan, SMBCI memiliki 5 fasilitas Pinjaman Bilateral dari PT Bank Central Asia Tbk yang ditandatangani pada rentang waktu tahun 2009 hingga 2017. Pada tanggal 31 Desember 2019, terdapat 4 (empat) fasilitas yang masih berlaku, dengan total fasilitas adalah sebesar Rp 3.500.000 dengan detail sebagai berikut:

Before the merger, SMBCI had 5 Bilateral Borrowing facilities from PT Bank Central Asia which were signed during 2009 to 2017. As of 31 December 2019, there were 4 (four) outstanding facilities, with total facilities amounting to Rp 3,500,000 with details as follows:

- a) Perjanjian pinjaman *revolving Term Loan I* sebesar Rp 500.000 yang ditandatangani pada tanggal 15 Mei 2009 dan telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir kali ditandatangani pada tanggal 12 November 2020.

- a) The facility Agreement of revolving Term Loan I amounting to Rp 500,000 was signed on 15 May 2009 and had been extended several times with the latest extension signed on 12 November 2020.

Berdasarkan perjanjian fasilitas, batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dari tanggal perjanjian kredit.

Based on the facility agreement, the availability period will be ended within 18 (eighteen) months from the date of agreement.

Fasilitas harus ditarik dalam 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal perjanjian kredit. Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan suku bunga JIBOR, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo. Suku bunga terhadap pinjaman ini adalah JIBOR + 0,60% untuk rentang waktu 2009 sampai dengan November 2020.

The facility should be fully drawdown within 18 (eighteen) months from the date of agreement. The interest period is 3 (three) months based on JIBOR interest rate and the interest will be paid every due date. The interest rate for this facility is JIBOR + 0.60% during 2009 up to November 2020.

Pada November 2020, periode bunga adalah minimal 1 (satu) bulan berdasarkan jumlah penarikan dengan suku bunga tetap, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo. Suku bunga terhadap pinjaman ini adalah 4,975%

As of November 2020, the interest period is minimum 1 (one) month based on drawdown amount. The interest rate for this borrowing is 4,975%.

- b) Perjanjian pinjaman *Revolving Term Loan III* sebesar Rp 1.000.000 yang ditandatangani pada tanggal 1 April 2015 dan telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir kali ditandatangani pada tanggal 30 September 2020.

- b) The facility agreement of Revolving Term I Loan III amounting to Rp 1,000,000 was signed on 1 April 2015 and had been extended several times with the latest extension signed on 30 September 2020.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

21. BORROWINGS (continued)

a. Pinjaman bank (lanjutan)

a. Bank borrowings (continued)

**Pinjaman Bilateral PT Bank Central Asia Tbk
(lanjutan)**

**Bilateral Borrowing with PT Bank Central
Asia Tbk (continued)**

Berdasarkan perjanjian fasilitas, batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 1 (satu) bulan dari tanggal perjanjian kredit.

Based on the facility agreement, the availability period will be ended within 1 (one) month of the date of agreement.

Jangka waktu pinjaman adalah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit. Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan suku bunga JIBOR, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo. Suku bunga terhadap pinjaman ini adalah JIBOR + 0,60%. Untuk rentang waktu 2015 sampai dengan September 2020. Pada September 2020, suku bunga terhadap pinjaman ini adalah 4,975%.

The facility should be fully drawdown within 18 (eighteen) months from the date of agreement. The interest period is 3 (three) months based on JIBOR interest rate and the interest will be paid of every due date. The interest rate for this facility is JIBOR + 0.60%. During 2015 up to September 2020. As of 30 September 2020, the interest rate for this facility is 4.975%.

- c) Perjanjian pinjaman *Non-revolving Term Loan IV* sebesar Rp 1.000.000 ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2015 dan telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir kali ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2019.

- c) *The facility agreement of Non-revolving Term Loan IV amounting Rp 1,000,000 was signed on 10 June 2015 and had been extended several times with the latest extension signed on 10 June 2019.*

Berdasarkan perjanjian fasilitas, batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 2 (dua) bulan dari tanggal perjanjian kredit.

Based on the facility agreement, the availability period will be ended in 2 (two) months from the date of agreement.

Fasilitas harus ditarik dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal perjanjian kredit. Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo. Suku bunga terhadap pinjaman ini adalah 4,75%.

The facility should be fully drawdown within 12 (twelve) months from the date of agreement. The interest period is 3 (three) months, which will be paid every due date. The interest rate for this facility is 4.75%.

- d) Perjanjian pinjaman *non-revolving Term Loan V* sebesar Rp 1.000.000 ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2017 dan telah diperpanjang dengan perpanjangan terakhir kali ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2019.

- d) *The facility Agreement of non-revolving Term Loan V amounting Rp 1,000,000 signed on 16 August 2017 has amended with the latest amendment signed on 15 August 2019.*

Berdasarkan perjanjian batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 2 (dua) bulan dari tanggal penandatanganan perjanjian kredit

Based on the facility agreement, the availability period will be ended within 2 (two) months from the date of agreement.



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Pinjaman bank (lanjutan)

**Pinjaman Bilateral PT Bank Central Asia Tbk
(lanjutan)**

Jangka waktu pinjaman adalah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit. Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan suku bunga JIBOR, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo. Suku bunga terhadap pinjaman ini adalah JIBOR + 0,60%.

Setelah penggabungan, fasilitas tersebut digabung menjadi 1 (satu) fasilitas Pinjaman Bilateral dari PT Bank Central Asia Tbk yang ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2020. Perjanjian pinjaman *Revolving Term* ini sebesar Rp 2,500,000 yang merupakan perpanjangan dan perubahan dari perjanjian pinjaman 31 Juli 2018.

Setelah penggabungan, fasilitas tersebut digabung menjadi 1 (satu) fasilitas Pinjaman Bilateral dari PT Bank Central Asia Tbk yang ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2020.

Berdasarkan perjanjian fasilitas, batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 6 (enam) bulan dari tanggal perjanjian kredit.

Fasilitas harus ditarik dalam 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal perjanjian kredit. Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo. Suku bunga terhadap pinjaman ini adalah suku bunga tetap 6,15%.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 total fasilitas PT Bank Central Asia Tbk yang belum digunakan adalah sebesar Rp 500.000.

21. BORROWINGS (continued)

a. Bank borrowings (continued)

***Bilateral Borrowing with PT Bank Central
Asia Tbk (continued)***

The facility should be fully drawdown within 18 (eighteen) months from the date of agreement. The interest period is 3 (three) months based on JIBOR interest rate and the interest will be paid every due date. The interest rate for this facility is JIBOR + 0,60%.

After the merger, the above facilities are combined into 1 (one) Bilateral Borrowing facility from PT Bank Central Asia which was signed on 4 May 2020. The facility of Revolving Term Loan amounting Rp 2,500,000 which the renewal and amendment from agreement dated 31 July 2018.

After the merger, the above facilities are combined into 1 (one) Bilateral Borrowing facility from PT Bank Central Asia which was signed on 4 May 2020.

Based on the facility agreement, the availability period will be ended within 6 (six) months from the date of agreement.

The facility should be fully drawdown within 18 (eighteen) months from the date of agreement. The interest period is 3 (three) months and the interest will be paid every due date. The interest rate for this facility is fixed rate 6.15%.

As of December 2020 and 31 December 2019, total unused facility from PT Bank Central Asia Tbk amounted to Rp 500.000.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)**a. Pinjaman bank (lanjutan)****Pinjaman Bilateral PT Bank OCBC NISP**

Sebelum penggabungan usaha, SMBCI memiliki fasilitas Pinjaman Bilateral dari PT Bank OCBC NISP yang ditandatangani di tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp 500.000.

Fasilitas ini bersifat stand by dan belum ditarik pada tanggal 31 Desember 2019. Pinjaman ini telah kadaluwarsa pada tanggal 15 Januari 2020.

Pinjaman Bilateral Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Cabang Singapura

Pinjaman ini merupakan pinjaman jangka panjang dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Cabang Singapura sejumlah USD 1.602.000.000 dan EUR 20.000.000 (nilai penuh). Pinjaman ini akan jatuh tempo berkisar antara tanggal 21 Januari 2022 sampai 23 Desember 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2020, total fasilitas pinjaman jangka panjang dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Cabang Singapura berjumlah USD 3.625.000.000 (nilai penuh). (31 Desember 2019: USD 2.825.000.000, nilai penuh)

Tingkat suku bunga kontraktual setahun atas pinjaman jangka panjang ini adalah *cost of fund* ditambah margin tertentu. Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020, margin yang diterapkan adalah 0,50%. (31 Desember 2019: 0,50%)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat pembatasan-pembatasan tertentu yang disyaratkan dalam pinjaman jangka panjang ini.

b. Pinjaman bukan bank

Angsuran pokok pinjaman berdasarkan jangka waktu:

	31 Desember/December	
	2020	2019
Lebih dari 3 tahun	2,733,376	1,368,795
Dikurangi: Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(21,908)	(14,380)
Ditambah: Beban bunga yang masih harus dibayar	66,164	22,821
	<u>2,777,632</u>	<u>1,377,236</u>

Pembayaran bunga pinjaman telah dibayarkan oleh Bank sesuai dengan jadwal.

21. BORROWINGS (continued)**a. Bank borrowings (continued)****Bilateral Borrowing with PT Bank OCBC NISP**

Before the merger, SMBCI had Bilateral Borrowing facility from PT Bank OCBC NISP which was signed on 15 January 2019 amounting Rp 500,000.

The facility was on a standby basis and has not been utilized as of 31 December 2019. The borrowing has expired on 15 January 2020.

Bilateral Borrowing with Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Singapore Branch

This borrowing represents long-term borrowings from Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Singapore Branch amounting to USD 1,602,000,000 and EUR 20,000,000 (full amount). This borrowing will mature ranging from 21 January 2022 until 23 December 2022.

As of 31 December 2020, total amount of long-term borrowing facilities from Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Singapore Branch was USD 3,625,000,000 (full amount). (31 December 2019: USD 2,825,000,000, full amount)

Contractual interest rate per annum on long-term borrowings is cost of fund plus certain margin. For position as of 31 December 2020, the applied margin was 0.50%. (31 December 2019: 0.50%)

As of 31 December 2020 and 2019, there was no certain covenant which was required to be maintained in terms of long-term borrowings.

b. Non-bank borrowings

Installments of borrowing principals based on time period:

More than 3 years

Less:
Unamortised transaction costs

Add:

Accrued interest expenses

Payments of interest on borrowings had been paid by the Bank in accordance with the schedule.



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

21. BORROWINGS (continued)

b. Pinjaman bukan bank (lanjutan)

b. Non-Bank borrowings (continued)

Pinjaman bukan bank adalah fasilitas pinjaman dengan International Finance Corporation (IFC) dan Pemerintah, bukan pihak berelasi yang terdiri dari beberapa perjanjian sebagai berikut:

Non-bank borrowings are borrowing facilities from International Finance Corporation (IFC) and Government, non-related party, consist of some agreements as follows:

(i) Perjanjian Pinjaman 2012

(i) Borrowing Agreement 2012

Pada tanggal 8 Juni 2017 telah dilakukan penandatanganan atas amandemen perjanjian sebesar USD 100.000.000 (nilai penuh) yang dapat dicairkan dalam Dollar Amerika Serikat atau Rupiah.

Amendment Agreement was signed on 8 June 2017, amounting to USD 100,000,000 (full amount) which can be drawdown in United States Dollar or Rupiah.

Bank dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini (*revolving loan*) atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi sebelum atau pada tanggal 8 Juni 2020.

The Bank could re-drawdown this loan facility (revolving loan) amounting to portion that already repaid prior to or on 8 June 2020.

Tujuan pinjaman tersebut adalah untuk mendanai pembiayaan kredit mikro dan UKM.

The purpose of this borrowing was to finance the growth of the Bank's micro and SME loan portfolio.

Pada tanggal 5 Desember 2017, Bank melakukan penarikan sebesar Rp 676.250, ekuivalen USD 50.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 7,59% dan jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2019. Pembayaran bunga dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yaitu tanggal 15 Januari dan 15 Juli yang dimulai pada tanggal 15 Januari 2018 dan akan berakhir pada tanggal 5 Juni 2019. Pada tanggal 10 Juni 2019 (hari kerja berikutnya), Bank telah melakukan pembayaran penuh pokok dan bunga.

On 5 December 2017, loan was drawdown at amount of Rp 676,250, equivalent to USD 50,000,000 (full amount) with interest rate 7.59% and maturity date on 5 June 2019. Interest payment will be paid every 6 (six) months, which is on 15 January and 15 July, started on 15 January 2018 and will be ended on 5 June 2019. On 10 June 2019 (the next business day), the Bank has fully paid the principal and interest.

Pada tanggal 2 Februari 2018, Bank melakukan penarikan kembali sebesar Rp 669.250, ekuivalen USD 50.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 7,50% dan jatuh tempo pada tanggal 2 Februari 2021. Pembayaran bunga dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yaitu tanggal 15 Januari dan 15 Juli yang dimulai pada tanggal 16 Juli 2018 dan akan berakhir pada tanggal 2 Februari 2021.

On 2 February 2018, loan was drawdown at amount of Rp 669,250, equivalent to USD 50,000,000 (full amount) with interest rate 7.50% and maturity date on 2 February 2021. Interest will be paid every 6 (six) months, which is on 15 January and 15 July, started on 16 July 2018 and will be ended on 2 February 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Bank telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman yang ada.

As of 31 December 2019, the Bank has utilized all borrowing facility.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank antara lain:

The borrowing agreements provide several covenants required from the Bank, such as:

- tidak diperkenankan melakukan perubahan bisnis secara substansial tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman;
- tidak melakukan penggabungan usaha, *demerger*, restrukturisasi Bank, yang dapat memberikan dampak merugikan yang signifikan;

- *no substantial change is made to the general nature of its business without prior written consent of the lender;*
- *not undertake or permit any merger, demerger, corporate restructuring, which has or could reasonably be expected to have material adverse effect;*

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

21. BORROWINGS (continued)

b. Pinjaman bukan bank (lanjutan)

b. Non-bank borrowings (continued)

(i) Perjanjian Pinjaman 2012 (lanjutan)

(i) Borrowing Agreement 2012 (continued)

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank antara lain: (lanjutan)

The borrowing agreements provide several covenants required from the Bank, such as: (continued)

- tidak menerbitkan saham tambahan dan tidak akan melakukan transfer saham, penjualan, perjanjian yang akan mengubah SMBC menjadi pemegang saham non-pengendali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perbankan atau Keuangan di Indonesia;
- selain itu, Bank diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan tertentu dan liabilitas penyampaian laporan lainnya seperti: Bank harus selalu memantau rasio eksposur kredit tidak lebih dari 25%, rasio kecukupan modal tidak kurang dari 8% dan rasio likuiditas aset tidak kurang dari 20%.

- *not issue any additional shares and shall not have its existing shares transferred, sold, pledged or otherwise encumbered such that action would make the SMBC to become non-controlling shareholder under the Indonesia's Banking or Financial Regulations;*
- *moreover, Bank is obliged to comply with reporting obligations and certain financial covenants such as: Bank shall at all times maintain an open credit exposures ratio of no more than 25%, capital adequacy ratio of no less than 8% and liquidity asset ratio of no less than 20%.*

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Bank telah memenuhi seluruh rasio yang dipersyaratkan.

As of 31 December 2020 and 2019, the Bank had fulfilled all the required ratios.

(ii) Perjanjian Pinjaman 2019

(ii) Borrowing Agreement 2019

Tujuan pinjaman tersebut adalah untuk mendanai pembiayaan kredit mikro, usaha kecil menengah yang dimiliki perempuan, *green loans*, pinjaman SCF. Bank akan melakukan upaya terbaiknya untuk memastikan bahwa jumlah agregat dari pencairan yang diberikan untuk setiap pinjaman setidaknya sama dengan 25% dari jumlah maksimum pinjaman.

The purpose of borrowing was to finance the Women-Owned Micro, Small Medium Enterprise (MSME) loans, Green loans and SCF loans. The Bank will use its best efforts to ensure that the aggregated amount of the disbursements made to each loans was at least equal to 25% of the maximum loan amount.

Pada tanggal 30 Desember 2019, Bank melakukan penarikan sebesar Rp 699.250, ekuivalen USD 50.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 7,75% dan jatuh tempo pada 3 Desember 2024. Pembayaran bunga dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yang dimulai pada tanggal 30 Juni 2020 dan akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2024.

On 30 December 2019, loan was drawdown amounting to Rp 699,250, equivalent to USD 50,000,000 (full amount) with interest rate 7.75% and maturity date on 3 December 2024. Interest payment will be paid every 6 (six) months, which is started on 30 June 2020 and will be ended on 30 December 2024.

Pada tanggal 28 Januari 2020, Bank melakukan penarikan sebesar Rp 1.364.600, ekuivalen USD 100.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 7,30% dan jatuh tempo pada 28 Januari 2025. Pembayaran bunga dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yang dimulai pada tanggal 28 Juli 2020 dan akan berakhir pada tanggal 28 Januari 2025.

On 28 January 2020, loan was drawdown amounting to Rp 1,364,600, equivalent to USD 100,000,000 (full amount) with interest rate 7.30% and maturity date on 28 January 2025. Interest payment will be paid every 6 (six) months, which is started on 28 July and will be ended on 28 January 2025.



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

21. BORROWINGS (continued)

b. Pinjaman bukan bank (lanjutan)

b. Non-bank borrowings (continued)

(ii) Perjanjian Pinjaman 2019 (lanjutan)

(ii) Borrowing Agreement 2019 (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2019, total fasilitas yang belum dipergunakan sebesar USD 100.000.000 (nilai penuh).

As of 31 December 2019, the unused facility was amounting to USD 100,000,000 (full amount).

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank antara lain:

The borrowing agreements provide several covenants required from the Bank, such as:

- tidak diperkenankan melakukan perubahan bisnis secara substansial tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman;
- tidak melakukan penggabungan usaha, demerger, restrukturisasi korporasi, yang dapat memberikan dampak merugikan yang signifikan;
- tidak menerbitkan saham tambahan dan tidak akan melakukan transfer saham, penjualan, perjanjian yang akan mengubah SMBC menjadi pemegang saham non-pengendali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perbankan atau Keuangan di Indonesia;
- selain itu, Bank diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan tertentu dan liabilitas penyampaian laporan lainnya seperti: Bank harus selalu memantau rasio eksposur kredit tidak lebih dari 25%, rasio kecukupan modal tidak kurang dari 8% dan rasio likuiditas aset tidak kurang dari 20%.

- no substantial change is made to the general nature of its business without prior written consent of the lender;

- not undertake or permit any merger, demerger, corporate restructuring, which has or could reasonably be expected to have material adverse effect;

- not issue any additional shares and shall not have its existing shares transferred, sold, pledged or otherwise encumbered such that action would make the SMBC to become non-controlling shareholder under the Indonesia's Banking or Financial Regulations;

- moreover, the Bank is obliged to comply with reporting obligations and certain financial covenants such as: Bank shall at all times maintain an open credit exposures ratio of no more than 25%, capital adequacy ratio of no less than 8% and liquidity asset ratio of no less than 20%.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Bank telah memenuhi seluruh rasio yang dipersyaratkan.

As of 31 December 2020 and 2019, the Bank had fulfilled all the required ratios.

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Pemerintah

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Pemerintah

Pada tanggal 18 Desember 2017, Bank telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal perjanjian sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

On 18 December 2017, the Bank signed an Operational Agreement with Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) under the Public Works and Public Housing Ministry regarding Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). The agreement was valid from the date of the agreement until 31 December 2018.

Pinjaman tersebut digunakan untuk penyaluran Pembiayaan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Program Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi Pemerintah). Bank bertindak sebagai Bank Pelaksana Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera.

The borrowing is used to distribute Prosperous Home Financing for Low-Income Communities (Government Subsidized Housing Ownership Credit Program). Bank acted as an executing bank of Prosperous Home Ownership Loans.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)**b. Pinjaman bukan bank** (lanjutan)**Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Pemerintah** (lanjutan)

Besarnya dana yang disalurkan oleh PPDPP adalah 90% dari nilai pinjaman untuk periode pencairan sebelum Agustus 2018. Sedangkan untuk pencairan yang dilakukan setelah periode tersebut, dana yang disalurkan oleh PPDPP adalah 75% dari nilai pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Bank telah menyalurkan dana FLPP kepada 3 (tiga) debitur dengan jangka waktu pinjaman 120-180 bulan dengan nilai pokok Rp 300. Bank memiliki kewajiban untuk membayar bunga kepada PPDPP sebesar 0,5% per tahun.

21. BORROWINGS (continued)**b. Non-bank borrowings** (continued)**Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Pemerintah** (continued)

The amount that was distributed by PPDPP is 90% from loan value for the loan that was disbursed before August 2018. However for loan that was disbursed after that period, the amount that is distributed by PPDPP is 75% from loan amount.

As of 31 December 2020 and 2019, the Bank has disbursed FLPP fund for 3 (three) debtors with tenor of 120-180 months and principal amount of Rp 300. The Bank was obliged to pay at 0.5% per annum.

22. AKRUAL**22. ACCRUALS**

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Akrual beban operasional	266,696	347,631	Accrued operational expenses
Akrual jasa profesional	45,186	48,191	Accrued professional fees
Akrual beban promosi	35,564	55,564	Accrued promotion expenses
	<u>347,446</u>	<u>451,386</u>	

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN**23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES**

Liabilitas imbalan kerja karyawan terdiri dari:

Employee benefits liabilities consist of:

	31 Desember/December		
	2020	2019	
<u>Imbalan kerja jangka pendek</u>			<u>Short-term employee benefits</u>
Akrual bonus karyawan, THR, tantiem, dan liabilitas jangka pendek pembayaran Program ESOP 2016-2021			Accrual of employee bonus, THR, tantiem, and short-term liabilities related with ESOP 2016-2021
- Bank	271,523	360,987	Program settlement
- Entitas Anak	105,368	199,633	Bank -
	<u>376,891</u>	<u>560,620</u>	Subsidiary -
<u>Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya</u>			<u>Post-employment benefits and other long-term employee benefits</u>
- Bank	123,338	26,436	Bank -
- Entitas Anak	36,704	11,022	Subsidiary -
	<u>160,042</u>	<u>37,458</u>	
	<u>536,933</u>	<u>598,078</u>	

Bank dan Entitas Anak menerapkan kebijakan program manfaat imbalan pascakerja sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja ("UUTK") No. 13 Tahun 2003 dan Perjanjian Kerjasama yang berlaku di Bank. Dasar perhitungan manfaat UUTK No. 13 ini menggunakan gaji pokok terkini. Program pensiun manfaat pasti ini dikelola oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

The Bank and Subsidiary implement post-employment benefits policy based on Labor Law ("UUTK") No. 13 Year 2003 and Collective Labor Agreement applied in Bank. The calculation basis of this UUTK No. 13 benefit is the current basic salary. The Bank's defined benefit pension plan is managed by PT Asuransi Allianz Life Indonesia.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)**

Program tersebut memberikan manfaat pensiun yang akan dibayarkan kepada karyawan yang berhak pada saat karyawan pensiun atau pada saat karyawan tersebut berhenti sesuai dengan peraturan UUTK. Pendanaan program pensiun ini dilakukan oleh Bank dan Entitas Anak dengan membayar iuran tahunan yang setidaknya memenuhi jumlah minimum seperti yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah karyawan Bank yang memiliki hak atas manfaat ini adalah 6.806 karyawan (31 Desember 2019: 6.750 karyawan) (tidak diaudit).

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah karyawan Entitas Anak yang memiliki hak atas imbalan ini adalah sebanyak 4.954 karyawan (31 Desember 2019: 5.111 karyawan) (tidak diaudit).

Pada tahun 2019, Bank dan Entitas Anak berinisiatif memberikan program *cash retention* kepada karyawan yang memiliki hak opsi saham dari "Program ESOP 2016-2021", di mana pemegang hak opsi saham tersebut sepakat untuk menyerahkan terlebih dahulu hak opsi saham mereka kepada Bank dan Entitas Anak. Oleh karena itu, cadangan atas Program ESOP 2016-2021 pada tanggal 31 Desember 2019 telah dicatat sebagai liabilitas sesuai dengan kebijakan akuntansi imbalan kerja jangka pendek (Catatan 2x). Pada tanggal 31 Desember 2020, Program ESOP 2016-2021 telah selesai dibayarkan sehingga liabilitas imbalan kerja jangka pendek dicatat sebesar nihil.

Selain memberikan manfaat yang disebutkan di atas, Bank juga memberikan manfaat cuti panjang kepada karyawannya.

Imbalan pascakerja

Bank

Perhitungan aktuarial atas liabilitas imbalan kerja karyawan Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dilakukan oleh PT Sentra Jasa Aktuarial, aktuaris independen, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" berdasarkan laporannya masing-masing tertanggal 3 Februari 2021 dan 28 Februari 2020.

Perhitungan aktuarial tersebut menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember/December	
	2020	2019
Asumsi ekonomi:		
Tingkat diskonto per tahun	3.64% - 7.83%	5.42% - 8.15%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7%	7%
Asumsi lainnya:		
Usia pensiun normal	55	55
	<i>Mortality table Indonesia 2019 (TMI 2019)</i>	<i>Mortality table Indonesia 2011 (TMI 11)</i>
Tingkat kematian	10% TMI 2019	10% TMI 11
Tingkat cacat		

Economic assumptions:
Interest discount rate per annum
Salary increment rate per annum

Other assumptions:
Normal pension age

**Mortality rate
Disability rate**

23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

The program calls for benefits to be paid to eligible employees at retirement or when the employees resign according to the UUTK. The funding of the pension plan is conducted by the Bank and Subsidiary through payments of annual contributions which are sufficient to meet the minimum requirements set forth in applicable laws.

As of 31 December 2020, the total number of the Bank's employees eligible for this benefit are 6,806 employees (31 December 2019: 6,750 employees) (unaudited).

As of 31 December 2020, the total number of the Subsidiary's employees eligible for this benefit was 4,954 employees (31 December 2019: 5,111 employees) (unaudited).

In 2019, the Bank and Subsidiary initiatively provided a cash retention program to employees who owned share option rights from "ESOP 2016-2021 Program", of which the share option holders agree to first surrender their share option rights to the Bank and the Subsidiary. As a result, the reserve for ESOP 2016-2021 Program as of 31 December 2019 has been recorded as liabilities in accordance with the accounting policy for short-term employee benefits (Note 2x). As of 31 December 2020, ESOP 2016-2021 Program has been paid, hence short-term employee benefits was recorded as nil.

In addition to the benefits mentioned above, the Bank also provides its employees with long leave benefits.

Post-employment benefits

Bank

The actuarial calculation for the Bank's employee benefit liabilities as of 31 December 2020 and 2019 was performed by PT Sentra Jasa Aktuarial, an independent actuary, using the "Projected Unit Credit" method based on its reports dated 3 February 2021 and 28 February 2020, respectively.

The actuarial valuations were carried out using the following assumptions:

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)

23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Bank (lanjutan)

Bank (continued)

Status pendanaan atas program pensiun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan laporan aktuarial adalah sebagai berikut:

The funding status of the pension plan as of 31 December 2020 and 2019 based on the actuarial reports was as follows:

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti	640,803	540,349	Present value of defined benefits liabilities
Nilai wajar aset program	(545,350)	(595,828)	Fair value of plan assets
Kekurangan (kelebihan) pendanaan	<u>95,453</u>	<u>(55,479)</u>	Funding deficit (surplus)

Perubahan liabilitas imbalan manfaat pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the defined benefits liabilities during the year was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2020	2019	
Perubahan nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti:			Movement in present value of defined benefits liabilities:
Nilai kini kewajiban imbalan manfaat pasti, awal tahun	540,349	477,067	Present value of defined benefits liabilities, beginning of the year
Termasuk dalam laba rugi			Included in profit or loss
Beban jasa kini	80,989	72,761	Current service cost
Beban bunga	37,806	38,547	Interest expense
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain			Included in other comprehensive income
Kerugian/keuntungan aktuarial yang timbul dari:			Actuarial losses/gains arising from:
- Asumsi demografi	1,537	-	Demography assumption -
- Asumsi keuangan	36,067	15,997	Financial assumption -
- Penyesuaian pengalaman	18,604	9,886	Experience adjustment -
Lain-lain			Others
Imbalan yang dibayarkan oleh aset program selama tahun berjalan	<u>(74,549)</u>	<u>(73,909)</u>	Benefits paid by the plan assets during the year
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti, akhir tahun	<u>640,803</u>	<u>540,349</u>	Present value of net defined benefits liabilities, end of year

Perubahan nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement of fair value of plan assets during the year was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2020	2019	
Perubahan nilai wajar aset program:			Movement in the fair value of plan assets:
Nilai wajar aset program, awal tahun	595,828	635,475	Fair value of plan assets, beginning of year
Termasuk dalam laba rugi			Included in profit or loss
Pendapatan bunga atas aset program	43,544	51,347	Interest income on plan assets
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain			Included in other comprehensive income
Imbal hasil atas aset program di luar pendapatan bunga	(19,473)	(17,085)	Return on plan assets excluding interest income
Lain-lain			Others
Kontribusi yang dibayarkan kepada program	-	-	Contributions paid into the plan
Imbalan yang dibayarkan oleh program	<u>(74,549)</u>	<u>(73,909)</u>	Benefits paid by the plan
Nilai wajar aset program, akhir tahun	<u>545,350</u>	<u>595,828</u>	Fair value of plan assets, end of year



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)

23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Bank (lanjutan)

Bank (continued)

Seluruh aset program pensiun ditempatkan pada kas di Bank Kustodian dan deposito berjangka di Bank.

All of the pension plan assets are placed on cash with the Custodian Bank and time deposits with the Bank.

Bank terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pasti. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

The Bank is exposed to a number of risks through its defined benefit pension plans. The most significant risks are as follows:

Volatilitas aset

Asset volatility

Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah, jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to government bond yields, if plan assets underperform this yield, this will create a deficit.

Perubahan imbal hasil obligasi

Changes in bond yields

Penurunan imbal hasil obligasi korporasi akan meningkatkan liabilitas program, walaupun hal ini akan saling hapus dengan kenaikan dari nilai obligasi program yang dimiliki.

A decrease in corporate bond yields will increase plan liabilities, although this will be partially offset by an increase in the value of the plans' bond holdings.

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan dengan mempertimbangkan imbal hasil yang diharapkan atas aset dengan mengacu pada kebijakan investasi. Hasil investasi bunga tetap didasarkan pada hasil pengembalian bruto pada tanggal pelaporan.

The expected return on plan assets is determined by considering the expected returns available on the assets underlying the current investment policy. Expected yields on fixed interest investments are based on gross redemption yields as of the reporting date.

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja, nilai wajar aset program, defisit/surplus pada program dan penyesuaian pada liabilitas program dan aset program untuk 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Present value of post-employment benefits liabilities, fair value of plan assets, deficit/surplus of program and adjustment on plan liabilities and plan assets for the last 5 years were as follows:

	31 Desember/December					
	2020	2019	2018	2017	2016	
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti	640,803	540,349	477,067	603,599	827,306	Present value of defined benefits liabilities
Nilai wajar aset program	(545,350)	(595,828)	(635,475)	(603,774)	(825,087)	Fair value of plan assets
Dampak batas atas aset	-	-	-	175	-	The effect of the asset ceiling
Defisit (surplus)	<u>95,453</u>	<u>(55,479)</u>	<u>(158,408)</u>	<u>-</u>	<u>2,219</u>	Deficit (surplus)
Penyesuaian pada liabilitas program	<u>56,028</u>	<u>25,883</u>	<u>(187,441)</u>	<u>14,554</u>	<u>5,496</u>	Adjustments on plan liabilities
Penyesuaian pada aset program	<u>19,473</u>	<u>17,085</u>	<u>10,850</u>	<u>(4,279)</u>	<u>9,601</u>	Adjustments on plan assets

Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi liabilitas atas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah memenuhi persyaratan minimum UUTK No. 13.

Management believes that the estimated post-employment benefit liabilities as of 31 December 2020 and 2019 have fulfilled the minimum requirements of UUTK No. 13.

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program pensiun imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah 12 tahun dan 7 tahun.

The weighted average duration of the defined benefit pension obligation as of 31 December 2020 and 2019 was 12 years and 7 years, respectively.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)**

23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Bank (lanjutan)

Bank (continued)

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits are as follows:

	31 Desember/ December		
	2020	2019	
Hingga 1 tahun	48,387	35,553	Up to 1 year
Lebih dari 1 - 2 tahun	46,622	44,932	More than 1 - 2 years
Lebih dari 2 - 5 tahun	238,323	186,109	More than 2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	3,336,316	2,666,202	More than 5 years

Sensitivitas liabilitas imbalan pascakerja untuk perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the post-employment benefits liabilities to changes in the key actuarial assumptions was as follows:

	2020			
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Increase (decrease) in present value of benefit obligation	Kenaikan (penurunan) beban jasa kini/ Increase (decrease) in current service cost	
Tingkat diskonto	Kenaikan/Increase 1%	(44,663)	(6,698)	Discount rate
	Penurunan/Decrease 1%	50,777	7,720	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/Increase 1%	52,516	7,947	Salary increase rate
	Penurunan/Decrease 1%	(46,813)	(6,995)	

	2019			
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Increase (decrease) in present value of benefit obligation	Kenaikan (penurunan) beban jasa kini/ Increase (decrease) in current service cost	
Tingkat diskonto	Kenaikan/Increase 1%	(36,273)	(5,724)	Discount rate
	Penurunan/Decrease 1%	41,123	6,581	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/Increase 1%	42,914	6,831	Salary increase rate
	Penurunan/Decrease 1%	(38,329)	(6,022)	

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pascakerja atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode pelaporan) telah diterapkan seperti dalam penghitungan liabilitas imbalan pascakerja.

The sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the post-employment benefits liabilities to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefits liabilities calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the post-employment benefits liabilities.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)**

23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Entitas Anak

Subsidiary

Perhitungan aktuarial pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dilakukan oleh PT Sentra Jasa Aktuarial, aktuaris independen, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" sebagaimana yang tercantum dalam laporan pada tanggal 18 Januari 2021 dan 10 Januari 2020 dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The actuarial calculation as of 31 December 2020 and 2019 was performed by PT Sentra Jasa Aktuarial, independent actuary, using the "Projected Unit Credit" method as stated in its reports dated 18 January 2021 and 10 January 2020 with the following assumptions:

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Tingkat diskonto per tahun	3.26% - 7.80%	5.53% - 8.29%	Annual discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	9%	9%	Annual salary increase rate
Tabel mortalitas	Tabel mortalitas/ Mortality table Indonesia 2019	Tabel mortalitas/ Mortality table Indonesia 2011	Mortality table
Usia pensiun normal	55 tahun/years	55 tahun/years	Normal pension age

Status pendanaan atas program pensiun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan laporan aktuarial adalah sebagai berikut:

The funding status of the pension plan as of 31 December 2020 and 2019 was based on the actuarial reports as follows:

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	217,467	175,160	Present value of defined benefits liabilities
Nilai wajar aset program	(193,363)	(188,883)	Fair value of plan assets
Kekurangan (kelebihan) pendanaan	24,104	(13,723)	Funding deficit (surplus)

Perubahan liabilitas imbalan manfaat pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement of defined benefits liabilities during the year was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2020	2019	
Perubahan nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti:			Movement in present value of defined benefits liabilities:
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti, awal tahun	175,160	154,699	Present value of defined benefits liabilities, beginning of year
Termasuk dalam laba rugi			Included in profit or loss
Beban jasa kini	33,354	28,498	Current service cost
Beban bunga	12,792	12,438	Interest expense
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain			Included in other comprehensive income
Kerugian/keuntungan aktuarial yang timbul dari:			Actuarial losses/gains arising from:
- Asumsi demografi	449	-	Demographic assumption -
- Asumsi keuangan	10,030	(15,187)	Financial assumption -
- Penyesuaian pengalaman	(2,873)	(1,066)	Experience adjustment -
Lain-lain			Others
Imbalan yang dibayar	(11,445)	(4,222)	Benefits paid
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti, akhir tahun	217,467	175,160	Present value of defined benefits liabilities, end of year

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)

23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Entitas Anak (lanjutan)

Subsidiary (continued)

Perubahan nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement of fair value of plan assets during the year was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2020	2019	
Saldo, awal tahun	188,883	168,602	Balance, beginning of year
Hasil yang diharapkan dari aset program	14,394	13,555	Expected return on plan assets
Kontribusi pemberi kerja	7,500	15,000	Employer's contribution
Imbalan yang dibayar	(11,445)	(4,222)	Benefits paid
Kerugian aktuarial - bersih	(5,969)	(4,052)	Actuarial losses - net
Saldo, akhir tahun	<u>193,363</u>	<u>188,883</u>	Balance, end of year

Seluruh aset program pensiun ditempatkan pada Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz dengan deposito berjangka sebagai aset yang mendasari. Nilai wajar atas deposito berjangka tersebut pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 193.363 dan Rp 188.883.

All of the pension plan assets are placed on Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz with time deposits as underlying assets. The fair value of time deposits as of 31 December 2020 and 2019 was Rp 193,363 and Rp 188,883, respectively.

Entitas Anak terekspos dengan risiko volatilitas aset melalui program imbalan pasti. Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah, jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Subsidiary is exposed to asset volatility risks through its defined benefit pension plans. The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to government bond yields, if plan assets underperform this yield, this will create a deficit.

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja, nilai wajar aset program, defisit/surplus pada program dan penyesuaian pada liabilitas program dan aset program untuk 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Present value of post-employment benefits liabilities, fair value of plan assets, deficit/surplus of program and adjustment on plan liabilities and plan assets for the last 5 years were as follows:

	31 Desember/December					
	2020	2019	2018	2017	2016	
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti	217,467	175,160	154,699	178,167	122,058	Present value of defined benefits liabilities
Nilai wajar aset program	(193,363)	(188,883)	(168,602)	(170,795)	(148,488)	Fair value of plan asset
Defisit (surplus)	24,104	(13,723)	(13,903)	7,372	(26,430)	Deficit (surplus)
Penyesuaian pada liabilitas program	7,606	(16,253)	(52,716)	(15,626)	(7,261)	Adjustments on plan liabilities
Penyesuaian pada aset program	5,969	4,052	2,410	3,411	943	Adjustments on plan assets

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pensiun yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits was as follow:

	2020	2019	
Hingga 1 tahun	13,397	8,115	Up to 1 years
Lebih dari 1 - 2 tahun	17,758	13,295	More than 1 - 2 years
Lebih dari 2 - 5 tahun	47,114	36,980	More than 2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	2,371,204	1,892,882	More than 5 years



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)**

23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Entitas Anak (lanjutan)

Subsidiary (continued)

Sensitivitas kewajiban imbalan pascakerja untuk perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the post-employment benefit obligation to change in the key actuarial assumption was as follow:

		2020		
	<u>Perubahan asumsi/ Change in assumption</u>	<u>Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Increase (decrease) in present value of benefit obligation</u>	<u>Kenaikan (penurunan) beban jasa kini/ Increase (decrease) in current service cost</u>	
Tingkat diskonto	Kenaikan/Increase 1% Penurunan/Decrease 1%	(21,524) 25,616	(3,391) 4,044	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/Increase 1% Penurunan/Decrease 1%	25,969 (22,215)	4,093 (3,494)	Salary increase rate
		2019		
	<u>Perubahan asumsi/ Change in assumption</u>	<u>Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Increase (decrease) in present value of benefit obligation</u>	<u>Kenaikan (penurunan) beban jasa kini/ Increase (decrease) in current service cost</u>	
Tingkat diskonto	Kenaikan/Increase 1% Penurunan/Decrease 1%	(16,894) 20,095	(2,854) 3,410	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/Increase 1% Penurunan/Decrease 1%	20,466 (17,505)	3,470 (2,955)	Salary increase rate

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas liabilitas imbalan pascakerja atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini liabilitas imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode pelaporan) telah diterapkan seperti dalam penghitungan liabilitas imbalan pascakerja.

The sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the post-employment benefits liabilities to key actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefits liabilities calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the post-employment benefits liabilities.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Other long-term employee benefits

Bank

Bank

Bank juga memberikan manfaat cuti panjang kepada karyawannya.

The Bank also provides its employees with long leave benefit.

Perubahan liabilitas yang timbul dari imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

The movement in the Bank's liabilities arising from other long-term employee benefits was as follows:

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)

23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Other long term employee benefits (continued)

Bank (lanjutan)

Bank (continued)

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2020	2019	
Perubahan nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti:			Movement in present value of defined benefits liabilities:
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti, awal tahun	26,436	22,791	<i>Present value of defined liabilities, beginning of the year</i>
Termasuk dalam laba rugi			Included in profit or loss
Beban jasa kini	5,306	5,081	<i>Current service cost</i>
Beban bunga	1,702	1,842	<i>Interest expense</i>
Pengukuran kembali:			<i>Remeasurement:</i>
- Penyesuaian asumsi demografi	(2)	-	<i>Changes in demography assumptions -</i>
- Penyesuaian asumsi keuangan	918	643	<i>Changes in financial assumptions -</i>
- Penyesuaian pengalaman	713	442	<i>Experience adjustment -</i>
Lain-lain			Others
Imbalan yang dibayarkan dari pemberi kerja selama tahun berjalan	(7,188)	(4,363)	<i>Benefits paid by the employer during year</i>
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti, akhir tahun	27,885	26,436	Present value of net defined benefits liabilities, end of year

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan jangka panjang lainnya tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted other long-term employee benefits was as follows:

	31 Desember/ December		
	2020	2019	
Hingga 1 tahun	5,822	5,880	<i>Up to 1 year</i>
Lebih dari 1 - 2 tahun	4,762	5,904	<i>More than 1 - 2 years</i>
Lebih dari 2 - 5 tahun	16,578	12,752	<i>More than 2 - 5 years</i>
Lebih dari 5 tahun	62,452	62,787	<i>More than 5 years</i>

Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang lainnya terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the other long term employee benefit obligation to changes in the principal actuarial assumptions was as follows:

	2020			
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ increase (decrease) in present value of benefit obligation	Kenaikan (penurunan) beban jasa kini/ Increase (decrease) in current service cost	
Tingkat diskonto	Kenaikan/Increase 1% Penurunan/Decrease 1%	(1,098) 1,205	(228) 249	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/Increase 1% Penurunan/Decrease 1%	1,184 (1,099)	245 (228)	<i>Salary increase rate</i>
	2019			
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ increase (decrease) in present value of benefit obligation	Kenaikan (penurunan) beban jasa kini/ Increase (decrease) in current service cost	
Tingkat diskonto	Kenaikan/Increase 1% Penurunan/Decrease 1%	(926) 1,013	(203) 222	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/Increase 1% Penurunan/Decrease 1%	1,005 (935)	221 (205)	<i>Salary increase rate</i>



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)**

23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Other long term employee benefits (continued)

Entitas Anak

Subsidiary

Perubahan liabilitas yang timbul dari imbalan kerja jangka panjang lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the liabilities arising from other long-term employee benefits over the year was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2020	2019	
Perubahan nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti:			Movement in present value of defined benefits liabilities:
Nilai kini liabilitas imbalan pasti, awal tahun	11,022	10,335	<i>Present value of the defined benefits liabilities, beginning of year</i>
Termasuk dalam laba rugi			Included in profit or loss
Beban jasa kini	2,134	2,016	<i>Current service cost</i>
Beban bunga	737	831	<i>Interest expense</i>
Pengukuran kembali:			<i>Remeasurement:</i>
- Penyesuaian asumsi demografi	(3)	-	<i>Changes in demographic -</i>
- Penyesuaian asumsi keuangan	387	(228)	<i>Changes in financial assumptions -</i>
- Penyesuaian pengalaman	309	(127)	<i>Experience adjustment -</i>
Lain-lain			Others
Imbalan yang dibayar	(1,986)	(1,805)	<i>Benefit paid</i>
Nilai kini liabilitas imbalan pasti, akhir tahun	12,600	11,022	Present value of defined benefits liabilities, end of year

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan jangka panjang lainnya tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted other long-term employee benefits was as follow:

	2020	2019	
Hingga 1 tahun	2,023	1,917	<i>Up to 1 year</i>
Lebih dari 1-2 tahun	1,360	1,956	<i>More than 1-2 years</i>
Lebih dari 2-5 tahun	6,383	4,961	<i>More than 2-5 years</i>
Lebih dari 5 tahun	44,162	42,828	<i>More than 5 years</i>

Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang lainnya terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the other long term employee benefit obligation to changes in the principal actuarial assumptions was as follows:

	2020		
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ increase (decrease) in present value of benefit obligation	
Tingkat diskonto	Kenaikan/Increase 1%	(669)	(110)
	Penurunan/Decrease 1%	753	124
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/Increase 1%	730	120
	Penurunan/Decrease 1%	(662)	(109)
			<i>Discount rate</i>
			<i>Salary increase rate</i>
	2019		
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ increase (decrease) in present value of benefit obligation	
Tingkat diskonto	Kenaikan/Increase 1%	(552)	(99)
	Penurunan/Decrease 1%	620	111
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/Increase 1%	605	109
	Penurunan/Decrease 1%	(549)	(99)
			<i>Discount rate</i>
			<i>Salary increase rate</i>

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. PINJAMAN SUBORDINASI

Pinjaman subordinasi merupakan pinjaman dari SMBC Cabang Singapura sejumlah USD 435.000.000 (nilai penuh), ekuivalen dengan Rp 6.111.750 dan Rp 6.038.888 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Pinjaman subordinasi di atas terdiri dari pinjaman subordinasi sejumlah USD 100.000.000, USD 100.000.000, USD 150.000.000, USD 35.000.000 dan USD 50.000.000 (nilai penuh), masing-masing diperoleh pada tanggal 23 November 2018, 26 September 2018, 24 Desember 2013, 5 September 2008 dan 27 Maret 2003. Pinjaman subordinasi USD 150.000.000, USD 35.000.000 dan USD 50.000.000 telah diperbaharui dengan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman Subordinasi pada tanggal 27 Maret 2018. Pinjaman subordinasi USD 100.000.000 dan USD 100.000.000 masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 21 November 2025 dan 26 September 2025, sedangkan pinjaman subordinasi USD 150.000.000, USD 35.000.000 dan USD 50.000.000 akan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2025. Pinjaman subordinasi memiliki opsi pembayaran lebih awal dengan pemberitahuan 20 hari sebelumnya dan dengan persetujuan dari kreditur.

Kisaran tingkat suku bunga pinjaman subordinasi adalah 1,54% - 1,55% per tahun.

Pinjaman subordinasi digunakan untuk memperkuat struktur modal Debitur sebagai Modal pelengkap (Tier 2).

Sesuai Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.03/2016 tentang Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau *Write Down* terhadap instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap, Kreditur dan Debitur memahami bahwa terdapat kondisi yang menyebabkan (*trigger events*) pinjaman yang diberikan sesuai dengan Perjanjian ini harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down*, yaitu dalam hal kelangsungan usaha debitur berpotensi terganggu (*point of non viability*) sehingga mempengaruhi kewajiban debitur kepada kreditur, yaitu dapat berupa:

- (i) rasio Modal Inti Utama (*Common Equity Tier 1/CET 1*) lebih rendah atau sama dengan 5,125% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) baik secara individu maupun konsolidasi dengan Entitas Anak; dan/atau
- (ii) terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Debitur yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan
- (iii) terdapat perintah dari OJK untuk melakukan konversi menjadi saham biasa dan/atau *write down*.

24. SUBORDINATED LOANS

The outstanding subordinated loans represent loans obtained from SMBC Singapore Branch amounted to USD 435,000,000 (full amount), equivalent to Rp 6,111,750 and Rp 6,038,888 as of 31 December 2020 and 2019, respectively.

The above subordinated loans consist of subordinated loan amounting to USD 100,000,000, USD 100,000,000, USD 150,000,000, USD 35,000,000 and USD 50,000,000 (full amount), which were obtained on 23 November 2018, 26 September 2018, 24 December 2013, 5 September 2008 and 27 March 2003, respectively. Subordinated loan of USD 150,000,000, USD 35,000,000 and USD 50,000,000 have been renewed by Amendment and Restatement of Subordinated Loan Agreement on 27 March 2018. Subordinated loan of USD 100,000,000 and USD 100,000,000 will mature on 21 November 2025 and 26 September 2025, respectively, while Subordinated loan of USD 150,000,000, USD 35,000,000 and USD 50,000,000 will mature on 27 March 2025. These subordinated loans have early repayment option by 20 days notification in advance with lender's approval.

Range of interest rate for subordinated loans per year was 1.54% - 1.55%.

Subordinated loans are used to strengthen the Borrower's capital structure as the supplementary Capital (Tier 2).

In accordance with the Regulation of OJK Number 11/POJK.03/2016 and Circular Letter of OJK Number 20/SEOJK.03/2016 regarding Feature of Conversion to Common Stock or Write Down The Instruments of Additional Tier 1 and Tier 2, Lender and Borrower acknowledge the trigger events that will cause the loan provided under this Agreement to be converted to common stock or written down, particularly in the event when the business continuity of the debtor is potentially disrupted (point of non viability) and therefore affecting the liabilities of borrower to the lender, in the term of:

- (i) *Common Equity Tier 1 (CET 1) is lower than or equal to 5.125% of Risk-Weighted Assets (RWA), both individually and consolidated with its Subsidiaries; and/or*
- (ii) *there is a plan of the competent authority to make capital injection to the Borrower which continuity of its business is evaluated to have the potential to be disrupted; and*
- (iii) *There is an order from OJK to convert into common stock and/or write-down.*



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. PINJAMAN SUBORDINASI (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Bank memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian pinjaman subordinasi.

24. SUBORDINATED LOANS (continued)

As of 31 December 2020 and 2019, the Bank complied with all the requirements mentioned in the subordinated loan agreements.

25. LIABILITAS LAIN-LAIN

25. OTHER LIABILITIES

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Transaksi ATM, transfer dan tagihan <i>merchant</i>	241,226	102,110	<i>ATM transaction, transfer and merchant bills</i>
Komisi asuransi diterima dimuka	71,667	91,667	<i>Up-front insurance commission</i>
Beban <i>Standby Letter of Credit</i> yang masih harus dibayarkan	52,002	58,246	<i>Accrued Standby Letter of Credit fee</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai - Komitmen pinjaman yang diberikan	38,031	-	<i>Allowance for impairment losses - Loan commitments issued</i>
Pendapatan ditangguhkan	32,356	38,251	<i>Unearned income</i>
Utang premi asuransi kredit	27,927	47,730	<i>Loan insurance premium payable</i>
Utang premi asuransi lainnya	18,361	18,742	<i>Other insurance premium payable</i>
Klaim asuransi	14,328	10,811	<i>Insurance claim</i>
Utang kepada pihak ketiga	10,572	200,157	<i>Payable to third parties</i>
Lainnya	118,385	137,131	<i>Others</i>
	624,855	704,845	

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. LIABILITAS LAIN-LAIN (lanjutan)

Transaksi ATM, transfer dan tagihan *merchant* merupakan hutang atas transaksi ATM dan transfer antar bank yang akan diselesaikan pada hari kerja berikutnya, serta transaksi dengan *merchant* melalui gerbang pembayaran.

Komisi asuransi diterima dimuka merupakan komisi yang diterima dari Allianz atas penjualan produk-produk asuransi kepada nasabah Bank melalui seluruh saluran distribusi Bank.

Utang premi asuransi lainnya merupakan premi terutang atas asuransi karyawan Bank dan Entitas Anak.

Beban *standby letters of credit* yang masih harus dibayarkan merupakan beban biaya yang masih harus dibayar atas *standby letter of credit* terkait dengan pinjaman yang diberikan.

Pendapatan ditangguhkan terdiri atas pendapatan dari pembelian wesel ekspor yang ditangguhkan.

Utang premi asuransi kredit terdiri dari pembayaran premi asuransi yang telah diterima dari debitur namun belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi.

Utang kepada pihak ketiga sebagian besar merupakan utang terkait informasi dan teknologi (IT) dan utang kepada ASABRI.

Klaim asuransi terdiri dari dana yang diterima dari hasil klaim asuransi atas nasabah kredit pensiun yang meninggal dunia dan pencatatan sementara penerimaan kembali premi asuransi Bank. Dana yang diterima akan berada dalam akun ini sampai Bank dapat mengidentifikasi kontrak terkait.

Lainnya terutama terdiri dari akun tampungan untuk penerimaan cicilan kredit yang diberikan. Dana yang diterima akan berada dalam akun ini sampai Bank dapat mengidentifikasi kontrak terkait.

26. DANA SYIRKAH TEMPORER

Bank menyajikan dana syirkah temporer sehubungan dengan kepemilikan Bank atas Entitas Anak yang bergerak di bidang perbankan syariah.

25. OTHER LIABILITIES (continued)

ATM transaction, transfer and merchant bills consist of payables from Bank ATM transaction and transfer to other banks that will be settled on the next working day and transactions with merchants via payment gateway.

Up-front insurance commission represents commission received from Allianz for the sales of insurance products to the Bank's customers through all Bank's distribution channel.

Other insurance premium payables are employees insurance premium payables of the Bank and Subsidiary.

Accrued standby letters of credit fees are expense for standby letters of credit related to loans that has not been paid.

Unearned income consists of deferred income from export bills purchase.

Loan insurance premium payable consists of insurance premium payment from debtors not yet paid to the insurance company.

Payables to third parties mainly represent payable related to information and technology (IT) and payable to ASABRI.

Insurance claim represents funds received from insurance claim on pensioner debtors who passed away and a temporary record of refund of Bank's insurance premium. The received fund would be in this account until the Bank can identify the specific contract.

Others mainly consist of escrow account for loan installments received. The received fund would be in this account until the Bank can identify the specific contract.

26. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

The Bank presented temporary syirkah funds in relation to the Bank's ownership in the Subsidiary which engages in sharia banking industry.

	31 Desember/ December	
	2020	2019
Simpanan nasabah:		
Tabungan mudharabah	167,283	104,878
Deposito mudharabah	7,756,083	7,445,786
	<u>7,923,366</u>	<u>7,550,664</u>

*Deposits from customer:
Mudharabah saving deposits
Mudharabah time deposits*



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan)

26. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (continued)

a. Tabungan mudharabah

a. Mudharabah savings deposits

Berdasarkan hubungan dengan pihak lawan:

By relationship with counterparties:

	31 Desember/ December		
	2020	2019	
Pihak ketiga	167,171	104,628	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	112	250	<i>Related parties</i>
	<u>167,283</u>	<u>104,878</u>	

Berdasarkan jenis produk:

By product type:

	31 Desember/ December		
	2020	2019	
Tabungan Taseto Premium iB	167,283	104,878	<i>Taseto Premium iB Savings</i>
	<u>167,283</u>	<u>104,878</u>	

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk tabungan mudharabah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The average of pre-determined ratio and profit sharing rate for mudharabah savings deposits for the years ended 31 December 2020 and 2019 were as follows:

	2020		
	<i>Nisbah (%)/ Pre-determined ratio (%)</i>	<i>Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)</i>	
Tabungan mudharabah	4.10%	4.85%	<i>Mudharabah savings deposits</i>

	2019		
	<i>Nisbah (%)/ Pre-determined ratio (%)</i>	<i>Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)</i>	
Tabungan mudharabah	3.45%	4.56%	<i>Mudharabah savings deposits</i>

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak ada saldo tabungan mudharabah yang diblokir atau dijadikan jaminan pembiayaan.

As of 31 December 2020 and 2019, there were no mudharabah saving deposits which were blocked or pledged for financing.

b. Deposito mudharabah

b. Mudharabah time deposits

Berdasarkan hubungan dengan pihak lain:

By relationship with counterparties:

	31 Desember/ December		
	2020	2019	
Pihak ketiga	7,717,545	7,428,302	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	38,538	17,484	<i>Related parties</i>
	<u>7,756,083</u>	<u>7,445,786</u>	

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan)**26. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (continued)****c. Berdasarkan jangka waktu****c. By time period**

	2020	2019	
<u>Bukan Bank</u>			<u>Non-Bank</u>
Lebih dari 1 - 3 bulan	3,659,074	6,917,619	More than 1 - 3 months
Lebih dari 3 - 6 bulan	4,041,280	399,197	More than 3 - 6 months
Lebih dari 6 - 9 bulan	2,600	25,510	More than 6 - 9 months
Lebih dari 9 - 12 bulan	53,109	103,450	More than 9 - 12 months
Lebih dari 12 bulan	20	10	More than 12 months
	<u>7,756,083</u>	<u>7,445,786</u>	

d. Berdasarkan sisa umur sampai jatuh tempo**d. By remaining period to maturity date**

	2020	2019	
<u>Bukan Bank</u>			<u>Non-Bank</u>
Hingga 1 bulan	4,902,135	5,298,489	Up to 1 month
Lebih dari 1 - 3 bulan	2,357,681	1,847,295	More than 1 - 3 months
Lebih dari 3 - 6 bulan	427,765	256,445	More than 3 - 6 months
Lebih dari 6 - 9 bulan	63,028	32,041	More than 6 - 9 months
Lebih dari 9 - 12 bulan	5,454	11,506	More than 9 - 12 months
Lebih dari 12 bulan	20	10	More than 12 months
	<u>7,756,083</u>	<u>7,445,786</u>	

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak ada saldo deposito mudharabah yang diblokir atau dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan.

As of 31 December 2020 and 2019, there were no mudharabah time deposits which were blocked or pledged for financing.

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk deposito mudharabah pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The average of pre-determined ratio (nisbah) and profit sharing rate for mudharabah time deposits as of 31 December 2020 and 2019 were as follows:

	2020		
	Nisbah (%)/ Pre-determined Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)	
1 bulan	11.89%	6.37%	1 month
3 bulan	12.18%	6.50%	3 month
6 bulan	12.36%	6.57%	6 month
12 bulan	12.75%	7.01%	12 month
	2019		
	Nisbah (%)/ Pre-determined Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)	
1 bulan	13.95%	7.76%	1 month
3 bulan	14.20%	7.82%	3 month
6 bulan	13.90%	7.87%	6 month
12 bulan	13.48%	7.83%	12 month

27. MODAL SAHAM**27. SHARE CAPITAL**

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan catatan yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

Based on the share registrant record from Biro Administrasi Efek, the composition of the Bank's shareholders composition as of 31 December 2020 and 2019 was as follows:

Pemegang saham	31 Desember/ December 2020			Shareholder
	Lembar saham/ Number of shares	Persentase/ Percentage	Jumlah/Total	
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	7,532,311,297	92.43%	150,647	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
PT Bank Central Asia Tbk	83,052,408	1.02%	1,661	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12,007,137	0.15%	240	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Publik	426,362,127	5.23%	8,527	Public
	<u>8,053,732,969</u>	<u>98.83%</u>	<u>161,075</u>	
Saham tresuri	95,198,900	1.17%	1,904	Treasury shares
	<u>8,148,931,869</u>	<u>100%</u>	<u>162,979</u>	



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. MODAL SAHAM (lanjutan)

27. SHARE CAPITAL (continued)

31 Desember/ December 2019				
Pemegang saham	Lembar saham/ Number of shares	Persentase/ Percentage	Jumlah/Total	Shareholder
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	7,532,311,297	92.43%	150,647	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
PT Bank Central Asia Tbk	83,052,408	1.02%	1,661	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12,007,137	0.15%	240	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Publik	426,359,127	5.23%	8,527	Public
	8,053,729,969	98.83%	161,075	
Saham tresuri	95,198,900	1.17%	1,904	Treasury shares
	8,148,928,869	100%	162,979	

Pemegang saham publik terdiri dari pemegang saham yang memiliki kurang dari 5% jumlah saham beredar. Seluruh saham yang beredar adalah saham biasa.

Public shareholders consist of shareholders whose ownership are less than 5% of outstanding shares. All the outstanding shares are ordinary shares.

Perubahan komposisi kepemilikan saham

Changes in share ownership composition

Pada tanggal 1 Februari 2019, Bank melakukan aksi korporasi berupa *Cash Offer* dan Konversi Saham karena penggabungan usaha dengan SMBCI, sehingga terdapat perubahan kepemilikan saham dan penambahan sejumlah 2.296.846.112 saham.

On 1 February 2019, The Bank carried out corporate action namely cash offer and Share Conversion due to the merger with SMBCI, resulting in changes in share ownership and an additional 2,296,846,112 shares.

Dengan aksi korporasi tersebut, maka kepemilikan SMBC di Bank mengalami peningkatan menjadi 7.932.311.297 lembar saham atau 97,34%.

After this corporate action, SMBC ownership in the Bank's increased to 7,932,311,297 shares of equivalent to 97.34%.

Sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia, jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama adalah minimum sebesar 7,5% dari jumlah saham yang diterbitkan oleh Bank (Saham *Free float*). Oleh karenanya, SMBC telah menjual 400 juta lembar sahamnya pada tanggal 26 Agustus 2019 dengan harga jual Rp 3.600 (Rupiah penuh) per lembar saham, sehingga pemenuhan ketentuan Saham *Free Float* ini telah menyebabkan kepemilikan SMBC berubah dari 97,34% ke 92,43%.

In accordance with the Indonesia Stock Exchange Regulation, The number of shares owned by the non controlling shareholders and non majority shareholders is at the minimum of 7.5% of total issued shares of the Bank (Free Float Shares). Therefore, SMBC sold 400 million of its shares in 26 August 2019 with the selling price of Rp 3,600 (full amount Rupiah) per share. The compliance with Free Float Shares requirement has changed the SMBC's ownership from 97.34% to 92.43%.

28. CADANGAN PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM

28. SHARE-BASED PAYMENT RESERVE

Pada tanggal 31 Desember 2019, Bank dan Entitas Anak memiliki cadangan pembayaran berbasis saham sebesar Rp 244.012. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo cadangan pembayaran berbasis saham direklasifikasi ke komponen ekuitas lainnya.

As of 31 December 2019, the Bank and Subsidiary had share-based payments reserve amounting to Rp 244,012. As of 31 December 2020, the balance of share-based payments reserve have been reclassified to other equity components.

Program MESOP 2015-2020

MESOP 2015-2020 Program

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 26 Maret 2015 sebagaimana dituangkan kedalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 50 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn, para pemegang saham menyetujui rencana Bank untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Bank dengan jumlah tidak melebihi Rp 4.672, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Bank menjadi tidak melebihi Rp 121.478.

Based on Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) dated 26 March 2015 as notarised on Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 50 dated 26 March 2015 made before Hadijah, S.H., M.Kn, the shareholders approved the Bank's plan to increase the issued and paid-in capital of the Bank by a number not exceeding Rp 4,672 which resulted in the issued and paid-up capital of the Bank not exceeding Rp 121,478.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**28. CADANGAN PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM
(lanjutan)**

Program MESOP 2015-2020 (lanjutan)

Hal ini dilakukan dengan cara mengeluarkan hak opsi atas saham-saham baru masing-masing bernilai nominal Rp 20 (nilai penuh) dengan jumlah tidak melebihi 233.611.491 saham.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Resolusi Direksi No. PS/BOD/004/IV/2015, pada tanggal 15 April 2015, Bank memberikan hak opsi sebesar 141.575.000 saham. Hak opsi tersebut diberikan kepada para anggota Direksi dan para karyawan jenjang tertentu dari Bank dan Entitas Anak yang ditentukan oleh Dewan Komisaris atau oleh Direksi Bank berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Dewan Komisaris, selama jangka waktu yang ditentukan oleh Dewan Komisaris.

Para anggota Direksi dan karyawan pada jenjang tertentu dapat mengeksekusi opsi saham yang diberikan selama mereka tetap memberikan jasa selama periode opsi saham.

Pelaksanaan atas hak opsi atas saham-saham baru tersebut harus sesuai dengan harga pelaksanaan, syarat dan ketentuan yang telah diumumkan dalam "Keterbukaan Informasi" yang diumumkan melalui *website* Bank dan *website* Bursa Efek Indonesia tanggal 17 Februari 2015.

Periode pelaksanaan eksekusi opsi saham atas Program MESOP 2015-2020 terdiri dari: (1) Maksimum 30% pada bulan Mei 2017, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada tanggal 1 Mei 2017; (2) Maksimum 30% pada bulan November 2017, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada tanggal 6 November 2017; (3) Maksimum 60% pada bulan Mei 2018, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada tanggal 7 Mei 2018; (4) Maksimum 60% pada bulan November 2018, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada tanggal 5 November 2018; (5) Maksimum 100% pada bulan Mei 2019, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada tanggal 6 Mei 2019; (6) Maksimum 100% pada bulan Desember 2019, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada tanggal 2 Desember 2019. Sisa hak opsi yang belum dieksekusi secara penuh sampai dengan 100% selama periode eksekusi sebelumnya dapat dilaksanakan pada periode pelaksanaan eksekusi terakhir.

Nilai wajar rata-rata tertimbang opsi Program MESOP 2015-2020 yang diberikan selama tahun berjalan yang ditentukan dengan menggunakan Binomial Model Parameter adalah sebesar Rp 1.144,16; Rp 1.388,54; dan Rp 1.622,72 (nilai penuh) per opsi untuk masing-masing periode vesting. Input model yang signifikan adalah harga saham rata-rata tertimbang sebesar Rp 4.030 pada tanggal pemberian, harga eksekusi seperti ditunjukkan di bawah, volatilitas sebesar 29,37%, hasil dividen 0%, usia opsi yang diharapkan selama lima tahun dan tingkat bunga bebas risiko tahunan sebesar 7,5%.

28. SHARE-BASED PAYMENT RESERVE (continued)

MESOP 2015-2020 Program (continued)

This is done by issuing option rights on new shares with a par value of Rp 20 (full amount) by a number not exceeding 233,611,491 shares.

Based on Circular Resolution of Directors No. PS/BOD/004/IV/2015, dated 15 April 2015, the Bank granted 141,575,000 share options. Share options granted to the Bank's and the Subsidiary's members of the Board of Directors and the employees on a certain level are determined by the Board of Commissioners or by the Board of Directors of the Bank under authority granted by the Board of Commissioners, during a certain period determined by the Board of Commissioners.

Board of Directors and the employees at certain levels are able to execute share options that have been granted to them under the condition that the respected party continues to provide service during the share options period.

Implementation of the right options on new shares shall be in accordance with the exercise price, the terms and conditions that have been published in the "Disclosure of Information" published in Bank's and Indonesia Stock Exchange's website on 17 February 2015.

The exercise period of MESOP 2015-2020 Program will be conducted on (1) Maximum 30% in May 2017, with the implementation period of 30 trading days starting on 1 May 2017; (2) Maximum 30% in November 2017, with the implementation period of 30 trading days starting on 6 November 2017; (3) Maximum 60% in May 2018, with the implementation period of 30 trading days starting on 7 May 2018; (4) Maximum 60% in November 2018, with the implementation period of 30 trading days starting on 5 November 2018; (5) Maximum 100% on May 2019, with the implementation period of 30 trading days starting on 6 May 2019; (6) Maximum 100% on December 2019, with the implementation period of 30 trading days starting on 2 December 2019. The remaining option rights which have not yet been fully exercised up to prior exercise period can be implemented in the last exercise period of implementation.

The weighted average fair value of options granted during the year for MESOP 2015-2020 Program was determined using the Binomial Model Parameter amounted to Rp 1,144.16; Rp 1,388.54; and Rp 1,622.72 (full amount) per option for each vesting period. The significant inputs into the model were weighted average share price of Rp 4,030 on the grant date, exercise price shown below, volatility of 29.37%, dividend yield of 0%, an expected option life of five years, and an annual risk-free interest rate of 7.5%.



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. CADANGAN PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM
(lanjutan)

Program MESOP 2015-2020 (lanjutan)

Volatilitas yang diukur dengan standar deviasi atas imbal hasil saham yang terus dimajemukkan berdasarkan analisis stastisik atas harga saham harian sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai tanggal pemberian.

Tingkat suku bunga bebas risiko sesuai dengan pengembalian keuntungan atas obligasi pemerintah dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pemberian.

Program ESOP 2016-2021

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 April 2016 sebagaimana dituangkan kedalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 60 tanggal 29 April 2016 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn, para pemegang saham menyetujui rencana Bank untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Bank dengan jumlah tidak melebihi Rp 2.336.

Hal ini dilakukan dengan cara mengeluarkan hak opsi atas saham-saham baru masing-masing bernilai nominal Rp 20 (nilai penuh) dengan jumlah tidak melebihi 116.805.746 saham.

Para karyawan pada jenjang tertentu dapat mengeksekusi opsi saham yang diberikan selama mereka tetap menyediakan jasa selama periode opsi saham.

Pelaksanaan atas hak opsi atas saham-saham baru tersebut harus sesuai dengan harga pelaksanaan, syarat dan ketentuan yang telah diumumkan dalam "Keterbukaan Informasi" yang diumumkan melalui situs Bank dan situs Bursa Efek Indonesia tanggal 8 Maret 2016 dan 27 April 2016.

Periode waktu pelaksanaan eksekusi opsi saham atas Program ESOP 2016-2021 terdiri dari: (1) Maksimum 30% pada bulan Mei 2018, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada 28 Mei 2018; (2) Maksimum 30% pada bulan Desember 2018, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada tanggal 17 Desember 2018; (3) Maksimum 60% pada bulan Mei 2019, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada tanggal 28 Mei 2019; (4) Maksimum 60% pada bulan Desember 2019, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada tanggal 19 Desember 2019; (5) Maksimum 100% pada bulan Juni 2020, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada tanggal 1 Juni 2020; (6) Maksimum 100% pada bulan Desember 2020, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada tanggal 17 Desember 2020. Sisa hak opsi yang belum dieksekusi secara penuh sampai dengan 100% selama periode eksekusi sebelumnya dapat dilaksanakan pada periode pelaksanaan eksekusi terakhir.

28. SHARE-BASED PAYMENT RESERVE (continued)

MESOP 2015-2020 Program (continued)

The volatility measured at the standard deviation of continuously compounded share returns is based on statistical analysis of daily share prices starting from 3 January 2011 until grant date.

The risk free interest rate corresponds to market yields on government bonds of 5 years from grant date.

ESOP 2016-2021 Program

Based on Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) dated 29 April 2016 which was notarised on Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 60 dated 29 April 2016 made before Hadijah, S.H., M.Kn, the shareholders approved the Bank's plan to increase the issued and paid-in capital of the Bank by an amounts not exceeding Rp 2,336.

This is done by issuing option rights on new shares with a par value of Rp 20 (full amount) by a number not exceeding 116,805,746 shares.

Employees at certain levels are able to execute share options that have been granted to them under the condition that the respected party continues to provide services during the share options period.

Implementation of the right options on new shares shall be in accordance with the exercise price, the terms and conditions that have been published in the "Disclosure of Information" published at the Bank's website and Indonesia Stock Exchange's website on 8 March 2016 and 27 April 2016.

The exercise period of ESOP 2016-2021 Program is divided into the following: (1) Maximum 30% in May 2018, with the implementation period of 30 trading days starting on 28 May 2018; (2) Maximum 30% in December 2018, with the implementation period of 30 trading days starting on 17 December 2018; (3) Maximum 60% in May 2019, with the implementation period of 30 trading days starting on 28 May 2019; (4) Maximum 60% in December 2019, with the implementation period of 30 trading days starting on 19 December 2019; (5) Maximum 100% in June 2020, with the implementation period of 30 trading days starting on 1 June 2020; (6) Maximum 100% in December 2020, with the implementation period of 30 trading days starting on 17 December 2020. The remaining option rights which have not yet been fully exercised up to prior exercise period can be implemented in the last exercise period of implementation.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**28. CADANGAN PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM
(lanjutan)**

Program ESOP 2016-2021 (lanjutan)

Nilai wajar rata-rata tertimbang opsi Program ESOP 2016-2021 yang diberikan selama tahun berjalan yang ditentukan dengan menggunakan *Binomial Model Parameter* adalah Rp 546,50, Rp 709,55, dan Rp 839,99 (nilai penuh) per opsi untuk masing-masing periode *vesting*. Input model yang signifikan adalah harga saham rata-rata tertimbang sebesar Rp 2.480 pada tanggal pemberian, harga eksekusi seperti ditunjukkan di bawah, volatilitas per masing-masing periode *vesting* sebesar 28,92%, 29,60%, dan 29,10%, hasil dividen 0%, usia opsi yang diharapkan selama lima tahun dari tanggal pemberian, dan tingkat bunga bebas risiko tahunan masing-masing periode *vesting* sebesar 6,52%, 6,60% dan 6,71%.

Volatilitas diukur dengan standar deviasi atas imbal hasil saham yang terus dimajemukkan berdasarkan analisis statistik atas harga saham harian sejak 15 Mei 2014 sampai tanggal pemberian untuk periode *vesting* pertama, sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai tanggal pemberian untuk periode *vesting* kedua dan sejak 14 Mei 2012 sampai tanggal pemberian untuk periode *vesting* ketiga.

Tingkat suku bunga bebas risiko sesuai dengan pengembalian keuntungan atas obligasi pemerintah pada saat tanggal pemberian dengan jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Pada tahun 2019, Bank dan Entitas Anak berinisiatif memberikan program *cash retention* kepada karyawan yang memiliki hak opsi saham dari "Program ESOP 2016-2021", dimana sebagian besar pemegang hak opsi saham tersebut sepakat untuk menyerahkan terlebih dahulu hak opsi saham mereka kepada Bank dan Entitas Anak. Oleh karena itu, cadangan atas Program ESOP 2016-2021 tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 kini dicatat sebagai liabilitas sesuai dengan kebijakan akuntansi imbalan kerja jangka pendek (Catatan 2x dan 23).

28. SHARE-BASED PAYMENT RESERVE (continued)

ESOP 2016-2021 Program (continued)

The weighted average fair value of options granted during the year for ESOP 2016-2021 Program was determined using Binomial Model Parameter amounted to Rp 546.50, Rp 709.55, and Rp 839.99 (full amount) per option for each vesting period. The significant inputs into the model were weighted average share price of Rp 2,480 on the grant date, exercise price as shown below, volatility of 28.92%, 29.60%, and 29.10%, respectively for each vesting period, dividend yield of 0%, expected life of five years from grant date, and annual risk-free interest rate of 6.52%, 6.60% and 6.71%, respectively.

The volatility measured at the standard deviation of continuously compounded share returns, which is based on statistical analysis of daily share prices starting from 15 May 2014 until the grant date for the first vesting period, starting from 13 May 2013 until the grant date for the second vesting period and starting from 14 May 2012 for the third vesting period.

The risk free interest rate corresponds to market yields on government bonds at grant date with duration ranging from 1 to 5 years.

In 2019, the Bank and Subsidiary initiatively provided a cash retention program to employees who own share option rights from "ESOP 2016-2021 Program", of which most of the share option holders agreed to first surrender their share option rights to the Bank and the Subsidiary. As a result, the reserve for ESOP 2016-2021 Program as of 31 December 2020 and 2019 is now recorded as liabilities in accordance with short-term employee benefits accounting policy (Note 2x and 23).



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. CADANGAN PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM
(lanjutan)

28. SHARE-BASED PAYMENT RESERVE (continued)

Program ESOP 2016-2021 (lanjutan)

ESOP 2016-2021 Program (continued)

Perubahan jumlah opsi saham adalah sebagai berikut:

Movements in the number of share options were as follows:

31 Desember/December 2020			
Harga eksekusi per lembar dalam Rupiah (nilai penuh)/ Exercise price per share in Rupiah (full amount)	Opsis Saham/ Share Option		
<u>Pada awal tahun</u>			<u>At beginning of year</u>
- Program MESOP 2015-2020	4,000	90,910,000	MESOP 2015-2020 Program -
- Program ESOP 2016-2021	2,617	198,000	ESOP 2016-2021 Program -
		91,108,000	
<u>Dieksekusi</u>			<u>Executed</u>
- Program MESOP 2015-2020	4,000	-	MESOP 2015-2020 Program -
- Program ESOP 2016-2021	2,617	(3,000)	ESOP 2016-2021 Program -
		(3,000)	
<u>Kadaluwarsa</u>			<u>Forfeited</u>
- Program MESOP 2015-2020	4,000	(90,910,000)	MESOP 2015-2020 Program -
- Program ESOP 2016-2021	2,617	-	ESOP 2016-2021 Program -
		(90,910,000)	
<u>Pada akhir tahun</u>			<u>At end of year</u>
- Program MESOP 2015-2020	4,000	-	MESOP 2015-2020 Program -
- Program ESOP 2016-2021	2,617	195,000	ESOP 2016-2021 Program -
		195,000	
31 Desember/December 2019			
Harga eksekusi per lembar dalam Rupiah (nilai penuh)/ Exercise price per share in Rupiah (full amount)	Opsis Saham/ Share Option		
<u>Pada awal tahun</u>			<u>At beginning of year</u>
- Program MESOP 2015-2020	4,000	108,140,000	MESOP 2015-2020 Program -
- Program ESOP 2016-2021	2,617	38,383,500	ESOP 2016-2021 Program -
		146,523,500	
<u>Dieksekusi</u>			<u>Executed</u>
- Program MESOP 2015-2020	4,000	-	MESOP 2015-2020 Program -
- Program ESOP 2016-2021	2,617	(436,000)	ESOP 2016-2021 Program -
		(436,000)	
<u>Kadaluwarsa</u>			<u>Forfeited</u>
- Program MESOP 2015-2020	4,000	(17,230,000)	MESOP 2015-2020 Program -
- Program ESOP 2016-2021	2,617	(63,000)	ESOP 2016-2021 Program -
		(17,293,000)	
<u>Konversi tunai ke imbalan kerja jangka pendek</u>			<u>Cas conversion to short-term employee benefits</u>
- Program MESOP 2015-2020	4,000	-	MESOP 2015-2020 Program -
- Program ESOP 2016-2021	2,617	(37,686,500)	ESOP 2016-2021 Program -
		(37,686,500)	
<u>Pada akhir tahun</u>			<u>At end of year</u>
- Program MESOP 2015-2020	4,000	90,910,000	MESOP 2015-2020 Program -
- Program ESOP 2016-2021	2,617	198,000	ESOP 2016-2021 Program -
		91,108,000	

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**28. CADANGAN PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM
(lanjutan)**

Opsi saham atas Program MESOP 2015-2020 yang masih ada pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 memiliki tanggal kadaluwarsa dan harga eksekusi berikut ini:

Tanggal Pemberian/ Grant date	Tanggal kadaluwarsa/ Expiry date	Harga eksekusi per lembar (nilai penuh)/ Exercise price per share (full amount)	Opsi Saham/Share Option	
			31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019
15 April/April 2015	Januari/January 2020	4,000	-	81,310,000
10 Juli/July 2015	Januari/January 2020	4,000	-	-
9 Oktober/October 2015	Januari/January 2020	4,000	-	-
8 Januari/January 2016	Januari/January 2020	4,000	-	-
11 April/April 2016	Januari/January 2020	4,000	-	-
11 Juli/July 2016	Januari/January 2020	4,000	-	-
10 Oktober/October 2016	Januari/January 2020	4,000	-	9,600,000
			-	90,910,000

28. SHARE-BASED PAYMENT RESERVE (continued)

Share options of MESOP 2015-2020 Program outstanding as of 31 December 2020 and 2019 have the following expiry dates and exercise prices:

Opsi saham atas Program ESOP 2016-2021 yang masih ada pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 memiliki tanggal kadaluwarsa dan harga eksekusi berikut ini:

Tanggal Pemberian/ Grant date	Tanggal kadaluwarsa/ Expiry date	Harga eksekusi per lembar (nilai penuh)/ Exercise price per share (full amount)	Opsi Saham/Share Option	
			31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019
21 September/September 2016	Januari/January 2021	2,617	195,000	198,000
9 Desember/December 2016	Januari/January 2021	2,617	-	-
10 Maret/March 2017	Januari/January 2021	2,617	-	-
12 Juni/June 2017	Januari/January 2021	2,617	-	-
11 September/September 2017	Januari/January 2021	2,617	-	-
11 Desember/December 2017	Januari/January 2021	2,617	-	-
			195,000	198,000

Share options of ESOP 2016-2021 Program outstanding as of 31 December 2020 and 2019 have the following expiry dates and exercise prices:

Opsi saham atas Program ESOP 2016-2021 yang masih ada pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah kadaluwarsa di bulan Januari 2021.

Share options of ESOP 2016-2021 Program outstanding as of 31 December 2020 and 2019 have expired in January 2021.

29. PENGGUNAAN LABA BERSIH

Para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut: (1) Bank membukukan saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya sebesar Rp 9.235 dan (2) sisa dari total laba bersih yang diperoleh Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dinyatakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

29. APPROPRIATION OF NET INCOME

The shareholders approved the appropriation of net income for the year ended 31 December 2019 as follows: (1) the Bank booked appropriated retained earnings amounting to Rp 9,235 and (2) the remaining balance of the net income acquired by the Bank in book year ended on 31 December 2019 shall be declared as unappropriated retained earnings.

Para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

The shareholders approved the appropriation of net income for the year ended 31 December 2018 as unappropriated retained earnings.



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN SYARIAH

30. INTEREST INCOME AND SHARIA INCOME

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2020	2019^{*)}	
Pihak ketiga:			Third parties:
Pinjaman yang diberikan	11,559,679	13,166,022	Loans
Efek-efek	440,121	652,078	Securities
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	305,653	242,273	Current accounts and placements with Bank Indonesia
Giro dan penempatan pada bank-bank lain	13,015	37,276	Current accounts and placements with other banks
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	19,871	Securities purchased under resale agreements
Lain-lain	4,523	8,509	Others
	<u>12,322,991</u>	<u>14,126,029</u>	
Pihak berelasi:			Related parties:
Pinjaman yang diberikan	41,299	92,956	Loans
Giro dan penempatan pada bank-bank lain	-	2,468	Current accounts and placements with other banks
Efek-efek	1,719	2,174	Securities
	<u>43,018</u>	<u>97,598</u>	
	<u>12,366,009</u>	<u>14,223,627</u>	
Pendapatan syariah			Sharia income
Pihak ketiga:			Third parties:
Pendapatan dari jual beli - marjin murabahah	3,767,696	4,203,294	Income from sales and purchases - murabahah margin
Pendapatan dari bagi hasil - pembiayaan musyarakah	2,246	1,045	Revenue from profit sharing - musyarakah financing
Pendapatan usaha utama lainnya	267,532	253,013	Other main operating income
	<u>4,037,474</u>	<u>4,457,352</u>	
	<u>16,403,483</u>	<u>18,680,979</u>	

^{*)} Setelah reklasifikasi (Catatan 48)

^{*)} After reclassification (Note 48)

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. BEBAN BUNGA DAN HAK PIHAK KETIGA ATAS
BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER

31. INTEREST EXPENSE AND THIRD PARTIES'
SHARES ON RETURN OF TEMPORARY
SYIRKAH FUNDS

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2020	2019 ^{*)}	
<u>Beban bunga</u>			<u>Interest expense</u>
<u>Pihak ketiga:</u>			<u>Third parties:</u>
Simpanan nasabah			<i>Customer deposits</i>
Deposito berjangka	3,386,057	4,667,302	<i>Time deposits</i>
Tabungan	172,827	141,034	<i>Saving deposits</i>
Giro	86,642	90,105	<i>Current accounts</i>
Deposito on call	30,264	36,153	<i>Deposits on call</i>
	<u>3,675,790</u>	<u>4,934,594</u>	
Pinjaman yang diterima	533,060	636,998	<i>Borrowings</i>
Utang obligasi	133,354	88,648	<i>Bonds payables</i>
Surat utang jangka menengah	49,266	99,628	<i>Medium Term Notes</i>
Simpanan dari bank-bank lain	45,993	215,188	<i>Deposits from other banks</i>
Liabilitas sewa	41,712	-	<i>Lease liabilities</i>
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	21	<i>Securities sold under repurchase Agreements</i>
	<u>4,479,175</u>	<u>5,975,077</u>	
<u>Pihak berelasi:</u>			<u>Related parties:</u>
Simpanan nasabah			<i>Customer deposits</i>
Deposito berjangka	178,010	46,438	<i>Time deposits</i>
Tabungan	1,792	14,429	<i>Saving deposits</i>
Giro	433	10,133	<i>Current accounts</i>
	<u>180,235</u>	<u>71,000</u>	
Pinjaman yang diterima	431,850	794,945	<i>Borrowings</i>
Pinjaman subordinasi	160,995	236,426	<i>Subordinated loans</i>
Simpanan dari bank-bank lain	29,289	88,249	<i>Deposits from other banks</i>
	<u>802,369</u>	<u>1,190,620</u>	
	<u>5,281,544</u>	<u>7,165,697</u>	
<u>Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer</u>			<u>Third parties' shares on return of temporary syirkah funds</u>
Pihak ketiga	496,852	522,771	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	659	816	<i>Related parties</i>
	<u>497,511</u>	<u>523,587</u>	
	<u>5,779,055</u>	<u>7,689,284</u>	

^{*)} Setelah reklasifikasi (Catatan 48)

^{*)} After reclassification (Note 48)



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

32. OTHER OPERATING INCOME

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2020	2019 ^{*)}	
Pendapatan administrasi dana pihak ketiga	232,881	133,474	<i>Third party fund administration income</i>
Pendapatan komisi atas pinjaman yang diberikan	175,150	279,675	<i>Loan commission income</i>
Pendapatan dari penerimaan kembali kredit yang dihapusbuku	164,925	197,900	<i>Income from recovery of loans written-off</i>
Pendapatan dari penjualan produk investasi	92,407	108,158	<i>Income from sale of investment products</i>
Denda pelunasan dipercepat dan keterlambatan	84,319	126,586	<i>Early termination penalty and late penalty income</i>
Pendapatan dari komisi asuransi	41,036	66,836	<i>Insurance commission income</i>
Jasa penerbitan garansi	36,828	42,156	<i>Guarantee fees</i>
Pendapatan komisi lainnya	25,226	15,617	<i>Others commission income</i>
Penerimaan kembali dari kerugian operasional	21,460	5,353	<i>Operational loss recovery</i>
Jasa kliring dan transfer	16,156	15,987	<i>Clearing and transfer fees</i>
Lain-lain	69,497	40,292	<i>Others</i>
	<u>959,885</u>	<u>1,032,034</u>	

^{*)} Setelah reklasifikasi (Catatan 48)

^{*)} After reclassification (Note 48)

Pendapatan komisi atas pinjaman yang diberikan adalah pendapatan administrasi yang diperoleh dari pinjaman bank.

Loan commission income are administration income received from bank's loan.

Pendapatan dari penjualan produk investasi adalah pendapatan komisi dari pihak ketiga atas produk investasi yang dijual melalui Bank.

Income from sale of investment products are commission income received from third party related with investment product that are sold through the Bank.

Pendapatan dari komisi asuransi adalah pendapatan atas komisi penjualan *unit link* dan komisi yang diterima oleh Bank berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dengan perusahaan asuransi: Allianz, Avrist, Generali, FWD, Proteksi Antar Nusa dan Adonai Pialang Asuransi (Catatan 11n).

Insurance commission income are income from unit link sales commission and commission received by the Bank based on agreements with insurance companies: Allianz, Avrist, Generali, FWD, Proteksi Antar Nusa and Adonai Pialang Asuransi (Note 11n).

Lain-lain termasuk jasa *cash handling*, jasa *payment point* dan pendapatan dividen.

Others consist of cash handling services, payment point service, and dividend income.

33. BEBAN KEPEGAWAIAN

33. PERSONNEL EXPENSES

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2020	2019 ^{*)}	
Gaji, upah, bonus, tantiem dan imbalan kerja karyawan	1,984,834	2,016,558	<i>Salaries, wages, bonus, tantiem and employee benefits</i>
Tunjangan hari raya	364,486	414,784	<i>Holiday allowances</i>
Tunjangan kesehatan	195,765	185,553	<i>Medical benefit</i>
Tunjangan pajak	190,665	173,624	<i>Tax allowances</i>
Tunjangan representasi	112,219	125,493	<i>Representation allowance</i>
Jamsostek	85,727	82,663	<i>Jamsostek</i>
Pendidikan dan latihan	68,057	138,688	<i>Training and education</i>
Tunjangan program kepemilikan kendaraan	56,184	56,054	<i>Car ownership program allowance</i>
Tunjangan telepon	30,404	24,828	<i>Telephone allowance</i>
Tunjangan perumahan	21,349	22,012	<i>Housing allowance</i>
Lain-lain	101,705	98,328	<i>Others</i>
	<u>3,211,395</u>	<u>3,338,585</u>	

^{*)} Setelah reklasifikasi (Catatan 48)

^{*)} After reclassification (Note 48)

Termasuk dalam beban kepegawaian adalah gaji, opsi saham dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Included under personnel expenses are salaries, share options and other compensations paid to the Board of Directors, Board of Commissioners and Audit Committee.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**34. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES**

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2020	2019 ^{*)}	
Jasa dari pihak ketiga dan perlengkapan kantor	883,125	974,085	Services from third parties and office supplies
Beban asuransi	416,540	445,471	Insurance expense
Sewa	412,743	620,873	Rent
Amortisasi piranti lunak (Catatan 15)	364,272	318,284	Amortisation of software (Note 15)
Penyusutan aset tetap (Catatan 14)	355,168	358,264	Depreciation of fixed assets (Note 14)
			Depreciation of right-of-use assets (Note 14)
Penyusutan aset hak guna (Catatan 14)	223,563	-	
Promosi dan iklan	157,063	216,201	Promotion and advertising
Jasa profesional	116,151	109,641	Professional fees
Pemeliharaan dan perbaikan	83,631	78,712	Repairs and maintenance
Lain-lain	50,677	34,445	Others
	<u>3,062,933</u>	<u>3,155,976</u>	

^{*)} Setelah reklasifikasi (Catatan 48)

^{*)} After reclassification (Note 48)

Jasa dari pihak ketiga dan perlengkapan kantor terdiri dari beban honorarium, perjalanan dinas, tagihan kantor pos, beban listrik, air dan telepon, komunikasi data, peralatan kantor dan jasa pengiriman.

Services from third parties and office supplies consist of expenses from honorarium, business travelling, post office billing, utilities, data communication, office supplies, and delivery services.

Lain-lain termasuk pajak reklame, pajak kendaraan, pajak daftar perusahaan, dan beban lain-lain Entitas Anak.

Others consist of advertisement tax, vehicle tax, company registration tax and Subsidiary's miscellaneous expenses.

35. CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI**35. PROVISION FOR IMPAIRMENT LOSSES**

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2020	2019	
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (Catatan 11g)	2,786,768	1,445,933	Loans and sharia financing/receivables (Note 11g)
Komitmen pinjaman yang diberikan	9,912	-	Loan commitments issued
Tagihan akseptasi (Catatan 10d)	3,146	(7)	Acceptance receivables (Note 10d)
			Current accounts with other Banks (Note 6)
Giro pada bank-bank lain (Catatan 6)	397	-	Placement with Bank Indonesia and other Banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	(409)	-	
Efek-efek (Catatan 8h)	(177)	(44)	Securities (Note 8h)
Lain-lain	1	-	Other assets
	<u>2,799,638</u>	<u>1,445,882</u>	

36. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA**36. OTHER OPERATING EXPENSES**

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2020	2019 ^{*)}	
Beban komisi dan administrasi luran tahunan OJK	437,140	377,883	Commissions and administrative fees
	81,192	79,152	OJK annual fee
Kerugian terkait risiko operasional	24,201	35,020	Loss of operational risk
Beban rumah tangga	23,977	24,104	Household expenses
Beban pengembangan komunitas	6,603	43,982	Community development expenses
Beban retribusi	3,074	3,216	Retribution expenses
Beban pengurusan klaim asuransi	2,956	3,117	Insurance claim expenses
Rekrutmen	1,679	1,822	Recruitment
Lain-lain	27,963	67,015	Others
	<u>608,785</u>	<u>635,311</u>	

Lain-lain termasuk beban jamuan, beban keanggotaan dan beban penyelesaian kredit.

Others consist of entertainment expenses, membership fees and credit settlement charges.

^{*)} Setelah reklasifikasi (Catatan 48)

^{*)} After reclassification (Note 48)



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Bank dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, terutama meliputi transaksi-transaksi keuangan.

Di bawah ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Bank dan Entitas Anak, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya:

37. RELATED PARTY INFORMATION

In the normal course of business, the Bank and Subsidiary engage in transactions with related parties, primarily consisting of financial transactions.

The following is a summary of related parties who have transactions with the Bank and Subsidiary, including the nature of the relationships and transactions:

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationships	Sifat transaksi/ Nature of transactions
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo	Pemegang saham pengendali/ <i>Controlling shareholders</i>	Giro pada bank lain; simpanan dari bank lain; transaksi derivatif/ <i>Current accounts with other banks; deposits from other banks; derivative transactions</i>
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore	Perusahaan afiliasi/ <i>affiliated company</i>	Giro pada bank lain; simpanan dari bank lain; kewajiban akseptasi; pinjaman yang diterima; pinjaman subordinasi; transaksi derivatif/ <i>Current accounts with other banks; deposits from other banks; acceptance payables; borrowings; subordinated loans; derivative transactions</i>
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Hongkong Branch	Perusahaan afiliasi/ <i>affiliated company</i>	Giro pada bank lain; simpanan dari bank lain; transaksi derivatif/ <i>Current accounts with other banks; deposits from other banks; derivative transactions</i>
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Europe Limited	Perusahaan afiliasi/ <i>affiliated company</i>	Giro pada bank lain/ <i>Current accounts with other banks</i>
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Dusseldorf Branch	Perusahaan afiliasi/ <i>affiliated company</i>	Giro pada bank lain/ <i>Current accounts with other banks</i>
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Malaysia Berhad	Perusahaan afiliasi/ <i>affiliated company</i>	Simpanan dari bank lain; transaksi derivatif/ <i>Deposits from other banks; derivative transactions</i>
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bangkok	Perusahaan afiliasi/ <i>affiliated company</i>	Giro pada bank lain; simpanan dari bank lain/ <i>Current accounts with other banks; deposits from other banks</i>
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Seoul	Perusahaan afiliasi/ <i>affiliated company</i>	Efek-efek; kewajiban akseptasi/ <i>Securities; acceptance payables</i>
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, New York	Perusahaan afiliasi/ <i>affiliated company</i>	Giro pada bank lain/ <i>Current accounts with other banks</i>
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, New Delhi	Perusahaan afiliasi/ <i>affiliated company</i>	Giro pada bank lain/ <i>Current accounts with other banks</i>
PT SMFL Leasing Indonesia	Perusahaan afiliasi/ <i>affiliated company</i>	Simpanan nasabah; pinjaman yang diberikan; transaksi derivatif/ <i>Deposits from customers; loans; derivative transactions</i>
PT Oto Multi Artha	Perusahaan afiliasi/ <i>affiliated company</i>	Simpanan nasabah; pinjaman yang diberikan; transaksi derivatif/ <i>Deposits from customers; loans; derivative transactions</i>
PT Summit Oto Finance	Perusahaan afiliasi/ <i>affiliated company</i>	Simpanan nasabah; pinjaman yang diberikan; transaksi derivatif/ <i>Deposits from customers; loans; derivative transactions</i>
PT Nikko Securities Indonesia	Perusahaan afiliasi/ <i>affiliated company</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
PT SBCS Indonesia	Perusahaan afiliasi/ <i>affiliated company</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
Personil manajemen kunci/ <i>Key Management Personnel</i>	Direktur, Komisaris dan pejabat eksekutif/ <i>Directors, Commissioners and executive employees</i>	Pinjaman yang diberikan, simpanan nasabah, pembayaran kompensasi dan remunerasi, imbalan pascakerja/ <i>Loans, deposits from customers, payments of compensation and remuneration, post-employment benefits</i>

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

37. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi

Transactions with related parties

Saldo dan rincian transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The outstanding balances and detail transactions with related parties were as follows:

(a) Giro pada bank-bank lain

(a) Current accounts with other banks

	31 Desember/31 December		
	2020	2019	
Giro pada bank-bank lain			Current accounts with other banks
Pihak berelasi	370,551	725,450	Related party
Persentase terhadap jumlah aset	0.20%	0.40%	Percentage to total assets

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2020	2019	
Pendapatan bunga	-	2,468	Interest income
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga	-	0.02%	Percentage to total interest income

(b) Efek-efek

(b) Securities

	31 Desember/31 December		
	2020	2019	
Efek-efek	132,188	86,105	Securities
Persentase terhadap jumlah aset	0.07%	0.05%	Percentage to total assets

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2020	2019	
Pendapatan bunga	1,719	2,174	Interest income
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga	0.01%	0.01%	Percentage to total interest income

(c) Tagihan derivatif

(c) Derivative receivables

	31 Desember/31 December		
	2020	2019	
Tagihan derivatif			Derivative receivables
Pihak berelasi	49,928	61,682	Related parties
Persentase terhadap jumlah aset	0.03%	0.03%	Percentage to total assets

(d) Pinjaman yang diberikan

(d) Loans

	31 Desember/31 December		
	2020	2019	
Pinjaman yang diberikan			Loans
Personil manajemen kunci	7,090	8,714	Key management personnel
Pihak berelasi	1,199,678	2,123,995	Related parties
	1,206,768	2,132,709	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	2,372	12,538	Accrued interest income
	1,209,140	2,145,247	
Persentase terhadap jumlah aset	0.66%	1.18%	Percentage to total assets



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

37. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

(d) Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

(d) Loans (continued)

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2020	2019	
Pendapatan bunga:			<i>Interest income:</i>
Personil manajemen kunci	170	300	<i>Key management personnel</i>
Pihak berelasi	41,129	92,656	<i>Related parties</i>
	<u>41,299</u>	<u>92,956</u>	
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga	<u>0.33%</u>	<u>0.64%</u>	<i>Percentage to total interest income</i>
Suku bunga atas pinjaman yang diberikan kepada personil manajemen kunci adalah sebesar 5% sampai dengan 8% per tahun dengan jangka waktu pinjaman antara 1 sampai dengan 20 tahun. Pinjaman tersebut diberikan tanpa adanya jaminan tertentu.			<i>Interest rate charged on loan to key management personnel amounting 5% to 8% per annum with term between 1 to 20 years. Such loan is given without any specific collateral.</i>
Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tidak terdapat penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan kepada personil manajemen kunci.			<i>There was no impairment on the loan to key management personnel as of 31 December 2020 and 2019.</i>

(e) Simpanan nasabah

(e) Deposits from customers

	31 Desember/31 December		
	2020	2019	
Dana pihak ketiga			<i>Third party funds</i>
Personil manajemen kunci:			<i>Key management personnel:</i>
Giro	7,297	8,631	<i>Current accounts</i>
Tabungan	14,418	10,894	<i>Savings deposits</i>
Deposito berjangka dan deposito on call	76,565	82,128	<i>Time deposits and deposits on call</i>
	<u>98,280</u>	<u>101,653</u>	
Pihak berelasi:			<i>Related parties:</i>
Giro	44,318	49,952	<i>Current accounts</i>
Tabungan	-	-	<i>Savings deposits</i>
Deposito berjangka	4,297,896	387,556	<i>Time deposits</i>
	<u>4,342,214</u>	<u>437,508</u>	
	4,440,494	539,161	
Beban bunga yang masih harus dibayarkan	44,294	4,033	<i>Accrued interest expense</i>
	<u>4,484,788</u>	<u>543,194</u>	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>3.20%</u>	<u>0.38%</u>	<i>Percentage to total liabilities</i>
	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2020	2019	
Beban bunga	180,235	71,000	<i>Interest expense</i>
Persentase terhadap jumlah beban bunga	<u>3.67%</u>	<u>0.95%</u>	<i>Percentage to total interest expenses</i>

Dana pihak ketiga ditempatkan dalam giro, tabungan maupun deposito berjangka. Tingkat suku bunga yang diberikan oleh Bank adalah sebesar 0,00% - 7,50%. Untuk deposito berjangka tergantung tenor dan jumlah pokok deposito.

Third party funds are placed on current account, saving accounts and time deposits. Interest rate given by the Bank for the placement amounting to 0.00% - 7.50%. For time deposit depends on tenor and principal amount.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

37. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

(f) Simpanan dari bank-bank lain

(f) Deposits from other banks

	31 Desember/31 December		
	2020	2019	
Simpanan dari bank-bank lain	5,904,428	7,291,425	Deposits from other banks
Beban bunga yang masih harus dibayar	322	26,784	Accrued interest expenses
	5,904,750	7,318,209	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	4.15%	5.13%	Percentage to total liabilities

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2020	2019	
Beban bunga	29,289	88,249	Interest expense
Persentase terhadap jumlah beban bunga	0.55%	1.17%	Percentage to total interest expenses

(g) Liabilitas derivatif

(g) Derivative liabilities

	31 Desember/31 December		
	2020	2019	
Liabilitas derivatif			Derivative liabilities
Pihak berelasi	102,772	54,071	Related parties
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0.07%	0.04%	Percentage to total liabilities

(h) Pinjaman yang diterima

(h) Borrowings

	31 Desember/31 December		
	2020	2019	
Pinjaman yang diterima	22,852,789	31,193,978	Borrowings
Beban bunga yang masih harus dibayar	4,153	59,954	Accrued interest expenses
	22,856,942	31,253,932	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	16.05%	21.92%	Percentage to total liabilities

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2020	2019	
Beban bunga			Interest expense
Pihak berelasi	431,850	794,945	Related party
Persentase terhadap jumlah beban bunga	8.18%	10.58%	Percentage to total interest expenses

(i) Liabilitas akseptasi

(i) Acceptance payables

	31 Desember/31 December		
	2020	2019	
Liabilitas akseptasi			Acceptance payables
Pihak berelasi	161,685	157,523	Related party
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0.11%	0.11%	Percentage to total liabilities

(j) Pinjaman subordinasi

(j) Subordinated loans

	31 Desember/31 December		
	2020	2019	
Pinjaman subordinasi	6,111,750	6,038,888	Subordinated loans
Beban bunga yang masih harus dibayar	4,230	6,305	Accrued interest expenses
	6,115,980	6,045,193	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	4.29%	4.24%	Percentage to total liabilities



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**37. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

37. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

(j) Pinjaman subordinasi (lanjutan)

(j) Subordinated loans (continued)

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2020	2019	
Beban bunga:			<i>Interest expense:</i>
Pihak berelasi	160,995	236,426	<i>Related party</i>
Persentase terhadap jumlah beban bunga	3.05%	3.15%	<i>Percentage to total interest expenses</i>

(k) Dana syirkah temporer

(k) Temporary syirkah funds

	31 Desember/31 December		
	2020	2019	
Simpanan nasabah			<i>Deposits from customers</i>
Personil manajemen kunci:			<i>Key management personnel:</i>
Tabungan mudharabah	112	250	<i>Mudharabah saving deposits</i>
Deposito mudharabah	38,538	17,484	<i>Mudharabah time deposits</i>
	38,650	17,734	
Persentase terhadap jumlah hak pihak ketiga atas bagi hasil syirkah temporer	0.49%	0.24%	<i>Percentage to total third parties' shares on return of temporary syirkah funds</i>

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2020	2019	
Hak atas bagi hasil dana syirkah temporer	659	816	<i>Shares on return of temporary syirkah funds</i>
Persentase terhadap beban bagi hasil	0.13%	0.16%	<i>Percentage to total profit-sharing</i>

(l) Kompensasi dan remunerasi personil manajemen kunci

(l) Compensation and remuneration of key management personnel

Kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci atas jasa kepegawaian adalah sebagai berikut:

The compensation paid or payable to key management for employee services is shown below:

	31 Desember/December 2020						
	Direksi/Board of Directors		Dewan Komisaris/Board of Commissioners		Personil manajemen kunci lainnya/Other key management personnel		
	%*	Rp	%*	Rp	%*	Rp	
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	5.08%	163,541	0.84%	27,042	10.79%	346,915	<i>Salaries and other short-term employee benefits</i>
Imbalan pascakerja	-	-	-	-	0.40%	12,852	<i>Post-employment benefits</i>
Imbalan jangka panjang lainnya	-	-	-	-	0.02%	578	<i>Other long-term benefits</i>
Jumlah	5.08%	163,541	0.84%	27,042	10.79%	346,915	<i>Total</i>
	31 Desember/December 2019						
	Direksi/Board of Directors		Dewan Komisaris/Board of Commissioners		Personil manajemen kunci lainnya/Other key management personnel		
	%*	Rp	%*	Rp	%*	Rp	
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	6.06%	202,589	0.62%	20,709	10.09%	337,368	<i>Salaries and other short-term employee benefits</i>
Imbalan pascakerja	-	-	-	-	0.39%	12,915	<i>Post-employment benefits</i>
Imbalan jangka panjang lainnya	-	-	-	-	0.02%	637	<i>Other long-term benefit</i>
Jumlah	6.06%	202,589	0.62%	20,709	10.50%	350,920	<i>Total</i>

*% terhadap umlah beban kepegawaian

*% to total personnel expense

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**37. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

37. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

(m) Pembayaran berbasis saham

(m) Share-based payments

Pembayaran berbasis saham yang diberikan kepada personil manajemen kunci adalah sebagai berikut:

Share-based payments given to the key management personnel are as follows:

	Program ESOP 2016-2021*				
	Bank		Entitas Anak		
	Harga eksekusi opsi/ Option exercise price	Opsi saham/ Share option	Harga eksekusi opsi (sebelum modifikasi**/ Option exercise price (before modification**	Opsi saham/ Share option	
Manajemen kunci lainnya	2,617	52,865,000	2,617	3,780,000	Other key management

*) dalam nilai penuh

**) terdapat modifikasi yang mengubah skema pembayaran Program ESOP 2016-2021 (Catatan 28).

*) in full amount

**) there was modification on the payment scheme for ESOP 2016-2021 Program (Note 28)

	Program MESOP 2015-2020*				
	Bank		Entitas Anak		
	Harga eksekusi opsi/ Option exercise price	Opsi saham/ Share option	Harga eksekusi opsi/ Option exercise price	Opsi saham/ Share option	
Direksi	4,000	36,700,000	4,000	9,400,000	Board of Directors
Manajemen kunci lainnya	4,000	96,215,000	4,000	9,760,000	Other key management
		132,915,000		19,160,000	

*) dalam nilai penuh

*) in full amount

(n) Komitmen dan Kontinjensi

(n) Commitment and contingencies

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2020	2019	
Liabilitas komitmen			Committed liabilities
Fasilitas kredit yang belum digunakan	1,881,149	1,794,185	Unused credit facilities



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

38. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Seluruh komitmen dan kontinjensi adalah dengan pihak ketiga, kecuali aset komitmen.

All commitments and contingencies are with the third parties, except committed assets.

a. Berdasarkan jenis

a. By type

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Aset komitmen			Committed assets
Fasilitas pinjaman yang belum ditarik			Unused borrowing facilities
- Pihak ketiga	26,730,611	1,329,838	Third parties -
- Pihak berelasi	1,881,149	1,794,185	Related parties -
	<u>28,611,760</u>	<u>3,124,023</u>	
Aset kontinjensi			Contingent assets
Pendapatan bunga pinjaman yang diberikan yang bermasalah	137,487	97,680	Interest receivable on non-performing loans
Garansi yang diterima	22,688,905	19,839,026	Guarantees received
	<u>22,826,392</u>	<u>19,936,706</u>	
Liabilitas komitmen			Committed liabilities
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan - <i>committed</i>	14,012,398	8,433,080	Unused credit facilities to customers - committed
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan - <i>uncommitted</i>	85,424,033	73,413,906	Unused credit facilities to customers - uncommitted
Fasilitas kredit kepada bank yang belum digunakan - <i>uncommitted</i>	34,982	63,163	Unused credit facilities to banks - uncommitted
Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan	616,302	925,174	Irrevocable letters of credit
	<u>100,087,715</u>	<u>82,835,323</u>	
Liabilitas kontinjensi			Contingent liabilities
Garansi yang diberikan	7,421,593	8,924,578	Guarantees provided

b. Berdasarkan kolektibilitas

b. By collectability

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Lancar	104,366,182	90,359,090	Current
Dalam perhatian khusus	3,143,126	1,350,086	Special mention
Kurang lancar	-	50,725	Substandard
	<u>107,509,308</u>	<u>91,759,901</u>	

c. Kasus hukum

Bank menghadapi beberapa tuntutan hukum, pengurusan administrasi dan klaim yang belum terselesaikan, yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank. Adalah tidak mungkin untuk memastikan apakah Bank akan memenangkan masalah atau tuntutan hukum tersebut, atau dampaknya jika Bank kalah. Namun demikian, manajemen Bank yakin bahwa hasil keputusan masalah atau tuntutan hukum tersebut tidak akan membawa dampak yang signifikan pada hasil usaha, posisi keuangan atau likuiditas Bank.

c. Litigation cases

The Bank is a party to various unresolved legal actions, administrative proceedings, and claims in the ordinary course of its business. It is not possible to predict with certainty whether or not the Bank will ultimately be successful in any of these legal matters or, if not, what the impact might be. However, the Bank's management does not expect that the results in any of these proceedings will have a material adverse effect on the Bank's results of operations, financial position or liquidity.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

39. SEGMENT OPERASI

Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan laporan internal yang disiapkan untuk Direksi, yang bertindak sebagai pengambil keputusan operasi, yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya ke segmen dan melakukan penilaian atas performanya. Seluruh segmen operasi yang digunakan oleh Bank dan Entitas Anak telah memenuhi kriteria pelaporan berdasarkan PSAK 5, "Segmen Operasi".

Bank dan Entitas Anak memiliki 5 (lima) pelaporan segmen, berdasarkan produk usaha, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Ritel

Terdiri dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah pensiunan dan nasabah individual lainnya.

Kredit Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM)

Terdiri dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah usaha mikro, kecil dan menengah yang digunakan untuk kegiatan usaha.

Penghimpunan dana dan treasury

Terdiri dari aktivitas penghimpunan dana dari pihak ketiga dan bank lain, serta aktivitas treasury termasuk pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan. Penghimpunan dana treasury berada di bawah direktorat yang sama.

Korporasi

Terdiri dari pinjaman dan layanan yang diberikan dari nasabah korporasi yang digunakan untuk kegiatan usaha.

Syariah

Merupakan lini segmen operasi atas Entitas Anak yang dimulai dari tanggal efektif beroperasi sebagai bank umum syariah.

Terdiri dari pembiayaan syariah dan dana pihak ketiga dari nasabah syariah yang digunakan untuk kegiatan usaha.

Dalam mengalokasikan beban operasional, manajemen mengatribusikan beberapa pos beban operasional sesuai dengan kebijakan pelaporan internal Bank dan Entitas Anak.

39. OPERATING SEGMENT

Operating segments are reported in accordance with the internal reporting provided to the Directors, as the chief operating decision maker, who are responsible for allocating resources to the reportable segments and assesses its performance. All operating segments used by the Bank and Subsidiary meet the definition of a reportable segment under PSAK 5, "Operating Segment".

The Bank and Subsidiary have 5 (five) reportable segments, in accordance with the business product, as set out in the table below.

Retail

Consists of loans to pensioners and other individual customers.

Micro, Small & Medium Enterprises (MSME)

Consists of loans to micro, small & medium enterprise customers for commercial purpose.

Funding and treasury

Consists of funding business activity in raising funds from third party and other banks, and centralised treasury operations including borrowings and securities issued. Funding and treasury are under the same directorate.

Corporate

Consists of loans and services from corporate customers which related to commercial purpose.

Sharia

Represents a line of operating segments of Subsidiary which started from the effective date to operate as a sharia commercial bank.

Consists of sharia financing and third party fund from sharia customers which related to commercial purpose.

In allocating operating expenses, management attributed some of its expenses based on Bank and Subsidiary's internal reporting policy.



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

39. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

39. OPERATING SEGMENT (continued)

Informasi pelaporan segmen adalah sebagai berikut:

The reportable segment information was as follows:

Tahun berakhir 31 Desember/Year ended 31 December 2020								
	Ritel/ Retail	UMKM/ MSME	Penghimpunan dana dan tresuri/ Funding and Treasury	Korporasi/ Corporate	Syariah/ Sharia	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination	Konsolidasian/ Consolidated	
Pendapatan dan beban operasional								Operating income and expenses
Pendapatan bunga dan syariah dari pihak eksternal	6,320,994	1,439,754	703,255	3,902,006	4,037,474	-	16,403,483	External interest and sharia income
Pendapatan bunga antar segmen	(3,393,407)	(734,778)	6,537,193	(2,409,008)	-	-	-	Inter-segment interest income
Beban bunga antar segmen	112,552	34,482	(2,936,182)	2,789,148	-	-	-	Inter-segment interest expense
Beban bunga dan bagi hasil syariah	(15,898)	(22,816)	(2,932,562)	(2,310,268)	(497,511)	-	(5,779,055)	Interest expense and sharia profit sharing
Pendapatan bunga dan syariah segmen dilaporkan-bersih	3,024,241	716,642	1,371,704	1,971,878	3,539,963	-	10,624,428	Net reportable segment interest and sharia income
Pendapatan operasional lainnya:								Other operating income:
Pendapatan operasional lainnya	191,230	184,367	582,837	222,225	21,893	(242,667)	959,885	Other operating income
Keuntungan dari selisih kurs dan transaksi derivatif - bersih	-	364	216,203	512,385	-	-	728,952	Net gain on foreign exchange and derivative transactions
Pendapatan operasional lainnya	191,230	184,731	799,040	734,610	21,893	(242,667)	1,688,837	Other operating income
Beban operasional lainnya								Other operating expenses
Beban operasional lainnya	(1,664,679)	(1,014,018)	(1,872,546)	(739,838)	(1,592,032)	-	(6,883,113)	Other operating expenses
Cadangan kerugian penurunan nilai	(546,463)	(949,610)	(32,166)	(421,215)	(850,184)	-	(2,799,638)	Allowance for impairment losses
Beban operasional lainnya	(2,211,142)	(1,963,628)	(1,904,712)	(1,161,053)	(2,442,216)	-	(9,682,751)	Other operating expenses
Pendapatan operasional lainnya - bersih	(2,019,912)	(1,778,897)	(1,105,672)	(426,443)	(2,420,323)	(242,667)	(7,993,914)	Net reportable operational segment income
Pendapatan (beban) non-operasional	196	1,613	(3,827)	(76)	4,656	-	2,562	Non-operating income (expenses)
Laba (rugi) segmen sebelum pajak penghasilan	1,004,524	(1,060,641)	262,205	1,545,359	1,124,296	(242,667)	2,633,076	Segment income (loss) before income tax
Beban pajak penghasilan	(205,164)	216,626	(53,553)	(315,626)	(269,682)	-	(627,399)	Income tax expense
Laba (rugi) bersih	799,360	(844,015)	208,652	1,229,733	854,614	(242,667)	2,005,677	Net profit (loss)

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

39. SEGMENT OPERASI (lanjutan)**39. OPERATING SEGMENT (continued)**

31 Desember/December 2020								
Ritel/ Retail	UMKM/ MSME	Penghimpunan dana dan tresuri/ Funding and Treasury	Korporasi/ Corporate	Syariah/ Sharia	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination	Konsolidasian/ Consolidated		
Aset							Assets	
Pinjaman/pembiayaan yang diberikan-bersih	33,873,551	12,161,412	-	78,081,955	8,673,376	-	132,790,294	Net loans/financing
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima dari pinjaman/pembiayaan yang diberikan	311,486	48,049	-	232,272	87,749	-	679,556	Accrued interest/margin income from loans/financing
Aset lain-lain	-	-	34,010,438	-	6,920,254	(225,225)	40,705,467	Other assets
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	-	195,394	-	69,975	-	265,369	Accrued interest income
Jumlah aset yang dialokasikan	34,185,037	12,209,461	34,205,832	78,314,227	15,751,354	(225,225)	174,440,686	Total allocated assets
Aset yang tidak dialokasikan*							8,725,292	Unallocated assets*
Jumlah aset							183,165,978	Total assets
Liabilitas							Liabilities	
Simpanan nasabah	2,390,046	597,899	30,831,811	57,188,668	1,857,115	-	92,865,539	Customer deposits
Beban bunga/bagi hasil yang masih harus dibayar	-	-	268,384	-	18,665	-	287,049	Undistributed revenue sharing
Liabilitas lain-lain	-	-	44,744,358	-	200,001	(225,938)	44,718,421	Other liabilities
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	-	131,034	-	-	-	131,034	Accrued interest expenses
Jumlah liabilitas yang dialokasikan	2,390,046	597,899	75,975,587	57,188,668	2,075,781	(225,938)	138,002,043	Total allocated liabilities
Liabilitas yang tidak dialokasikan*							4,275,816	Unallocated liabilities*
Jumlah liabilitas							142,277,859	Total liabilities
Dana syirkah temporer	-	-	-	-	7,923,366	-	7,923,366	Temporary syirkah fund

*) Komponen yang tidak dapat dialokasikan terutama terdiri dari aset dan liabilitas pajak penghasilan, termasuk pajak kini dan pajak tangguhan, aset dan liabilitas derivatif, aset tetap, aset takberwujud, liabilitas lainnya dan akrual

*) Unallocated items mainly comprise of income tax assets and liabilities, including current and deferred taxes, derivative assets and liabilities, fixed assets, intangible assets, other liabilities and accruals



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

39. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

39. OPERATING SEGMENT (continued)

Tahun berakhir 31 Desember/Year ended 31 December 2019								
	Ritel/ Retail	UMKM/ MSME	Penghimpunan dana dan tresuri/ Funding and Treasury	Korporasi/ Corporate	Syariah/ Sharia	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination	Konsolidasian/ Consolidated	
Pendapatan dan beban operasional								Operating income and expenses
Pendapatan bunga dan syariah dari pihak eksternal	7,403,734	1,881,192	863,148	4,075,553	4,457,352	-	18,680,979	External interest and sharia income
Pendapatan bunga antar segmen	(4,122,229)	(1,116,614)	8,265,398	(3,026,555)	-	-	-	Inter-segment interest income
Beban bunga antar segmen	127,688	37,365	(3,811,466)	3,646,413	-	-	-	Inter-segment interest expense
Beban bunga dan bagi hasil syariah	(18,430)	(16,034)	(3,955,028)	(3,176,205)	(523,587)	-	(7,689,284)	Interest expense and sharia profit sharing
Pendapatan bunga dan syariah segmen dilaporkan-bersih	3,390,763	785,909	1,362,052	1,519,206	3,933,765	-	10,991,695	Net reportable segment interest and sharia income
Pendapatan operasional lainnya:								Other operating income:
Pendapatan operasional lainnya	273,739	272,816	222,683	246,114	17,742	(1,060)	1,032,034	Other operating income
Keuntungan dari selisih kurs dan transaksi derivatif - bersih	-	-	85,314	499,230	-	-	584,544	Net gain on foreign exchange and derivative transactions
Pendapatan operasional lainnya	273,739	272,816	307,997	745,344	17,742	(1,060)	1,616,578	Other operating income
Beban operasional lainnya								Other operating expenses
Beban operasional lainnya	(1,829,251)	(1,011,711)	(1,827,378)	(701,551)	(1,761,041)	1,060	(7,129,872)	Other operating expense
Cadangan kerugian penurunan nilai	(483,712)	(564,473)	(6,537)	(81,758)	(309,402)	-	(1,445,882)	Allowance for impairment losses
Beban operasional lainnya	(2,312,963)	(1,576,184)	(1,833,915)	(783,309)	(2,070,443)	1,060	(8,575,754)	Other operating expenses
Beban non-operasional - bersih	(6,055)	(97)	(4,630)	-	(2,815)	-	(13,597)	Non-operating expenses
Laba segmen sebelum pajak penghasilan	1,345,484	(517,556)	(168,496)	1,481,241	1,878,249	-	4,018,922	Segment income (loss) before income tax
Beban pajak penghasilan	(344,366)	132,464	43,126	(379,112)	(478,616)	-	(1,026,504)	Income tax expense
Laba (rugi) bersih	1,001,118	(385,092)	(125,370)	1,102,129	1,399,633	-	2,992,418	Net profit (loss)
31 Desember/December 2019								
	Ritel/ Retail	UMKM/ MSME	Penghimpunan dana dan tresuri/ Funding and Treasury	Korporasi/ Corporate	Syariah/ Sharia	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination	Konsolidasian/ Consolidated	
Aset								Assets
Pinjaman/pembiayaan yang diberikan-bersih	41,051,406	15,019,353	-	75,514,770	8,707,455	-	140,292,984	Net loans/financing
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima dari pinjaman/pembiayaan yang diberikan	373,606	68,661	-	295,491	89,601	-	827,359	Accrued interest/margin income from loans/financing
Aset lain-lain	-	-	25,932,578	-	5,929,356	1,244,387	30,617,547	Other assets
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	-	33,615	-	88,846	-	122,461	ccrued interest income
Jumlah aset yang dialokasikan	41,425,012	15,088,014	25,966,193	75,810,261	14,815,258	(1,244,387)	171,860,351	Total allocate assets
Aset yang tidak dialokasikan*							9,771,034	Unallocated assets
Jumlah aset							181,631,385	Total assets

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

39. SEGMENT OPERASI (lanjutan)**39. OPERATING SEGMENT (continued)**

31 Desember/December 2019								
Ritel/ Retail	UMKM/ MSME	Penghimpunan dana dan treasuri/ Funding and Treasury	Korporasi/ Corporate	Syariah/ Sharia	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination	Konsolidasian/ Consolidated		
Liabilitas							Liabilities	
Simpanan nasabah	2,501,285	625,497	27,612,593	46,753,556	1,895,885	-	79,388,816	Customer deposits
Beban bunga/bagi hasil yang masih harus dibayar	-	-	210,601	-	21,861	-	232,462	Undistributed revenue sharing
Liabilitas lain-lain	-	-	58,936,647	-	-	(26,202)	58,910,445	Others liabilities
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	-	231,143	-	-	-	231,143	Accrued interest expenses
Jumlah liabilitas yang dialokasikan	2,501,285	625,497	86,990,984	46,753,556	1,917,746	(26,202)	138,762,866	Total allocated liabilities
Liabilitas yang tidak dialokasikan *							3,845,927	Unallocated liabilities*
Jumlah liabilitas							142,608,793	Total liabilities
Dana syirkah temporer	-	-	-	-	7,550,664	-	7,550,664	Temporary syirkah fund

*) Komponen yang tidak dapat dialokasikan terutama terdiri dari aset dan liabilitas pajak penghasilan, termasuk pajak kini dan pajak tangguhan, aset dan liabilitas derivatif, aset tetap, aset takberwujud, liabilitas lainnya dan akrual

*) Unallocated items mainly comprise of income tax assets and liabilities, including current and deferred taxes, derivative assets and liabilities, fixed assets, intangible assets, other liabilities and accruals

Berdasarkan informasi geografis

Pada tanggal 31 Desember 2020, segmen berdasarkan geografis terdiri dari 84 cabang (tidak diaudit) yang terbagi menjadi 4 area yaitu Jawa, Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara, serta, Kalimantan dan Sulawesi (2019: 84 cabang) (tidak diaudit).

Segmen informasi berdasarkan geografis adalah sebagai berikut:

Geographical information

As of 31 December 2020, geographical segment consists of 84 branches (unaudited) that are located into 4 areas, which are Java, Sumatera, Bali and Nusa Tenggara, also Kalimantan and Sulawesi (2019: 84 branches) (unaudited).

Information concerning geographical segments is as follows:

	Jawa/ Java	Sumatera	Bali dan/ and Nusa Tenggara	Kalimantan dan/ and Sulawesi	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination	Konsolidasian/ Consolidated	
31 Desember 2020							31 December 2020
Pendapatan bunga	11,982,391	2,321,780	521,456	1,577,856	-	16,403,483	Interest income
Jumlah aset	161,025,536	11,339,864	2,854,985	9,392,664	(1,447,071)	183,165,978	Total assets
31 Desember 2019							31 December 2019
Pendapatan bunga	13,836,605	2,578,295	559,429	1,706,650	-	18,680,979	Interest income
Jumlah aset	161,187,248	9,015,603	2,751,014	9,921,907	(1,244,387)	181,631,385	Total assets



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

40. LABA BERSIH PER SAHAM

40. EARNINGS PER SHARE

a. Laba per saham dasar

a. Basic earnings per share

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Jumlah laba per saham dasar yang tersedia bagi pemegang saham biasa Bank	217	327	Total basic earnings per share attributable to the ordinary equity holders of the Bank

b. Laba per saham dilusian

b. Diluted earnings per share

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Jumlah laba per saham dilusian yang tersedia bagi pemegang saham biasa Bank	217	324	Total diluted earnings per share attributable to the ordinary equity holders of the Bank

c. Laba yang digunakan dalam perhitungan laba per saham

c. Earnings used in calculating earnings per share

	31 Desember/December		
	2020	2019	
<u>Laba per saham dasar</u>			<u>Basic earnings per share</u>
Laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa Bank yang digunakan dalam perhitungan laba per saham dasar	1,749,293	2,572,528	Profit attributable to the ordinary equity holders of the Bank used in calculating basic earnings per share
<u>Laba per saham dilusian</u>			<u>Diluted earnings per share</u>
Laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa Bank yang digunakan dalam perhitungan laba per saham dilusian	1,749,293	2,572,528	Profit attributable to the ordinary equity holders of the Bank used in calculating diluted earnings per share

d. Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan sebagai penyebut

d. Weighted average number of shares used as the denominator

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan sebagai penyebut dalam perhitungan laba per saham dasar	8,053,732,969	7,858,627,916	Weighted average number of ordinary shares used as the denominator in calculating basic earnings per share
Penyesuaian untuk perhitungan laba per saham dilusian:			Adjustments for calculation of diluted earnings per share:
- Opsi saham (Catatan 28)	-	90,910,000	Share options (Note 28) -
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan sebagai penyebut dalam perhitungan laba per saham dilusian	8,053,732,969	7,949,537,916	Weighted average number of ordinary shares used as the denominator in calculating diluted earnings per share

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**41. PERJANJIAN KERJASAMA, KONTRAK DAN
KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN**

a. PT Taspen (Persero)

Sejak tahun 2007, Bank telah bekerja sama dengan PT Taspen (Persero) dimana Bank menjadi salah satu mitra untuk penanganan pembayaran uang pensiun kepada para pensiunan pegawai Pemerintah.

b. PT Pos Indonesia (Persero)

Sejak bulan Maret 2012 Bank telah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) dimana PT Pos Indonesia (Persero) membantu Bank dalam melakukan pemotongan uang pensiun para pegawai Pemerintah untuk angsuran kredit pensiun dan memasarkan produk kredit pensiunan Bank.

Perjanjian kerjasama Bank dengan PT Pos Indonesia (Persero) diperbaharui secara berkala dan berdasarkan perjanjian terakhir kerjasama ini akan terus berlangsung sampai dengan bulan Juli 2022. Pada tahun 2020 dan 2019, Bank membayarkan komisi kepada PT Pos Indonesia (Persero) masing-masing sebesar Rp 90.807 dan Rp 97.613, terkait dengan kerjasama ini.

c. Perjanjian pembiayaan bersama

PT Home Credit Indonesia

Pada bulan Juni 2014, Bank melakukan kerjasama pembiayaan bersama (tanpa tanggung renteng) dengan PT Home Credit Indonesia ("HCI"). Berdasarkan perjanjian kerjasama ini, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk debitur adalah maksimum 90% dari Bank dan minimum 10% dari pihak HCI.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Bank menyediakan fasilitas pembiayaan bersama sebesar Rp 4.200.000.

PT Finansia Multi Finance

Pada bulan Desember 2018, Bank melakukan kerjasama pembiayaan bersama (tanpa tanggung renteng) dengan PT Finansia Multi Finance ("Finansia"). Dalam kerjasama ini, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan adalah maksimum 90% dari Bank dan minimum 10% dari pihak Finansia. Fasilitas maksimum pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 500.000. Jangka waktu perjanjian adalah untuk 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 13 Desember 2018 hingga 13 Desember 2021.

**41. SIGNIFICANT AGREEMENTS, CONTRACTS AND
COMMITMENTS**

a. PT Taspen (Persero)

Since 2007, the Bank has been cooperating with PT Taspen (Persero) in which the Bank become one of the partners for handling the payments of pension to retired government employees.

b. PT Pos Indonesia (Persero)

Since March 2012 the Bank has been cooperating with PT Pos Indonesia (Persero) in which PT Pos Indonesia (Persero) assists the Bank in deducting the pension benefits of retired government employees for pension loan installments and marketing the Bank's pension loan products.

The Bank's cooperation agreement with PT Pos Indonesia (Persero) is renewed regularly and based on the latest agreement, the cooperation will be continuing until July 2022. In 2020 and 2019, the Bank paid commissions to PT Pos Indonesia (Persero) amounting to Rp 90,807 and Rp 97,613, respectively, in regards for this cooperation.

c. Joint financing agreements

PT Home Credit Indonesia

In June 2014, the Bank entered into a joint financing arrangement (without recourse) with PT Home Credit Indonesia ("HCI"). Based on the agreement, the amount of funds to be financed by each party will be a maximum of 90% from the Bank and a minimum of 10% from HCI.

As of 31 December 2020 and 2019, the Bank provided joint financing facilities of Rp 4,200,000.

PT Finansia Multi Finance

In December 2018, the Bank entered into a joint financing arrangement (without recourse) with PT Finansia Multi Finance ("Finansia"). Based on the agreement, the amount of funds to be financed by each party will be a maximum of 90% from the Bank and minimum of 10% from Finansia. The maximum joint financing facility is amounted to Rp 500,000. The term of the agreement is for 3 (three) years, from 13 December 2018 to 13 December 2021.



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**41. PERJANJIAN KERJASAMA, KONTRAK DAN
KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**41. SIGNIFICANT AGREEMENTS, CONTRACTS AND
COMMITMENTS** (continued)

**d. Perjanjian Kerjasama Jasa Pemasaran dan
Administrasi Produk BTPN**

**d. Marketing and Administration Services for
BTPN Product Agreement**

PT Oto Multiartha

PT Oto Multiartha

Pada bulan Agustus 2015, Bank melakukan kerjasama dengan PT Oto Multiartha ("OMA"). Dalam kerjasama ini, OMA akan membantu memasarkan dan mengadministrasi produk pinjaman Bank. Seluruh sumber dana pinjaman berasal dari Bank. Perjanjian akan direviu setiap tahun, terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2015.

In August 2015, the Bank entered into agreement with PT Oto Multiartha ("OMA"). Based on the agreement, OMA would assist to market and administer the Bank's loan product. All source of funds for the loans will come from the Bank. Agreement will be reviewed every year, starting from 31 August 2015.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, imbalan yang dibayarkan kepada OMA masing-masing sebesar Rp 14.494 dan Rp 20.617.

For the years ended 31 December 2020 and 2019, the fees that were paid to OMA were Rp 14,494 and Rp 20,617, respectively.

PT Summit Oto Finance

PT Summit Oto Finance

Pada bulan Agustus 2015, Bank melakukan kerjasama dengan PT Summit Oto Finance ("SOF"). Dalam kerjasama ini, SOF akan membantu memasarkan dan mengadministrasi produk pinjaman Bank. Seluruh sumber dana pinjaman berasal dari Bank. Perjanjian akan direviu setiap 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 4 Mei 2018.

In August 2015, the Bank entered into agreement with PT Summit Oto Finance ("SOF"). Based on the agreement, SOF would assist to market and administer the Bank's loan product. All source of funds for the loans will come from the Bank. Agreement will be reviewed every 3 (three) years, starting from 4 May 2018.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, imbalan yang dibayarkan kepada SOF masing-masing sebesar Rp 10.439 dan Rp 8.908.

For the years ended 31 December 2020 and 2019, the fees that were paid to SOF were Rp 10,439 and Rp 8,908, respectively.

e. Perjanjian Kerjasama Bancassurance

e. Bancassurance Agreement

Pada bulan Agustus 2014, Bank melakukan kerjasama bancassurance dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz"). Bank akan mendistribusikan produk-produk asuransi jiwa dari Allianz kepada nasabah Bank melalui seluruh jalur distribusi Bank. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun.

In August 2014, the Bank entered into a bancassurance agreement with PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz"). The Bank will distribute life insurance products of Allianz to its customers through the Bank's distribution channels. The agreement is effective for 10 years.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**41. PERJANJIAN KERJASAMA, KONTRAK DAN
KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**41. SIGNIFICANT AGREEMENTS, CONTRACTS AND
COMMITMENTS (continued)**

f. Komitmen signifikan lainnya

f. Other significant commitment

Bank menyewa kantor dengan perjanjian sewa yang tidak dapat dibatalkan. Masa sewa antara lima dan sebelas tahun dengan mayoritas perjanjian jasa dapat diperbarui pada akhir periode dengan harga pasar. Bank diharuskan memberitahukan enam bulan lebih awal apabila berniat mengakhiri perjanjian sewa. Beban terkait transaksi sewa yang dibebankan pada laba rugi selama tahun berjalan diungkapkan dalam Catatan 34.

The Bank leases offices under non-cancellable lease agreements. The lease terms are between five and eleven years, and the majority of lease agreements are renewable at the end of the lease period at the market rate. The Bank is required to give a six-month notice for the termination of these agreements. The expenses related with lease transactions charged to the profit or loss during the year was disclosed in Note 34.

Berikut ini adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sewa dengan Bank:

The following are counterparties of the Bank's lease commitments:

<u>Pihak dalam perjanjian/ Counterparties</u>	<u>Item yang disewa/ Leased items</u>	<u>Periode perjanjian/ Period of agreement</u>
PT Wiratara Prima	Ruang Kantor/Office Space	8 Juni/June 2020 – 7 Desember/December 2021
PT Bumi Serpong Damai	Ruang Kantor/Office Space	1 Februari/February 2020 – 1 September/September 2023
PT Bahana Semesta Citra Nusantara	Ruang Kantor/Office Space	5 Oktober/October 2015 – 14 Maret/March 2027

Jumlah pembayaran sewa minimum di masa depan dalam perjanjian sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

The future aggregate minimum lease payments under non-cancellable operating leases were as follows:

	<u>31 Desember/December</u>		
	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Hingga 1 tahun	32,500	121,876	Up to 1 year
Lebih dari 1 - 5 tahun	155,213	148,770	More than 1 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	<u>410,280</u>	<u>396,986</u>	More than 5 years
	<u>597,993</u>	<u>667,632</u>	

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Kerangka manajemen risiko

Risk management framework

Bank mengutamakan penerapan manajemen risiko baik pada Bank dan Entitas Anak. Bank memiliki segmen yang lengkap mulai dari segmen pinjaman dengan plafond kecil di BTPN Syariah (Entitas Anak), Pensiun, MUR (mikro), SME, Komersial sampai dengan Korporasi. Dalam hal konsentrasi portofolio, segmen Korporasi menjadi portofolio terbesar yaitu di kisaran 58% pada posisi 31 Desember 2020 diikuti oleh segmen Pensiunan di kisaran 23%.

The Bank focuses on the risk management implementation for the Bank and Subsidiary. The Bank has complete segments starting from loans with small limit at BTPN Syariah (Subsidiary), Pension, MUR (micro), SME, Commercial up to Corporate segment. In term of portfolio concentration, Corporate segment is the largest portfolio at around 58% as of 31 December 2020 followed by Pensioners segment at around 23%.

Pengembangan manajemen risiko keuangan di Bank dan Entitas Anak berpedoman pada peraturan OJK yang mengatur penerapan manajemen risiko bagi bank umum serta dokumentasi *Basel Accord II* yang diterbitkan oleh *Basel Committee of Banking Supervision*.

Financial risk management development in the Bank and Subsidiary is guided by OJK regulations which govern risk management implementation by commercial banks operating in Indonesia, as well as *Basel Accord II* documentation issued by the *Basel Committee of Banking Supervision*.



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Risk management framework (continued)

Kerangka manajemen risiko Bank dan Entitas Anak diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan, toleransi risiko serta perangkat manajemen risiko. Bank dan Entitas Anak melakukan pengembangan manajemen risiko secara berkesinambungan sesuai dengan meningkatnya kompleksitas bisnis dan perkembangan organisasi, strategi dan manajemen sistem informasi.

The Bank and Subsidiary's risk management framework is implemented through policies, procedures, transactions and authorisation limits, risk tolerance as well as risk management tools. The Bank and Subsidiary carry out continuous risk management development in line with the increasing business complexity and the development organisation, strategies and management information systems.

Penerapan manajemen risiko mencakup:

Implementation of risk management covers:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- Pengendalian internal yang menyeluruh

- *Active supervision from Board of Commissioners and Board of Directors*
- *Sufficient policies, procedures and limit sets*
- *Sufficient process of identification, measurement, risk oversight and control and risk management information*
- *Overall internal control system*

Organisasi manajemen risiko Bank dan Entitas Anak melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Bank dan Entitas Anak telah membentuk Komite Pemantauan Risiko sebagai pengawas tertinggi di tingkat komisaris dan Komite Manajemen Risiko di tingkat direktur yang merupakan bagian yang sangat penting dalam pengendalian risiko, sebagai unit kontrol yang memantau seluruh risiko yang terdapat pada kegiatan operasional Bank dan Entitas Anak.

The risk management organisation of the Bank and Subsidiary involves the oversight from the Board of Commissioners and Board of Directors. The Bank and Subsidiary have established Risk Monitoring Committee as the highest risk authority in the commissioner level and Risk Management Committee at the director level, which constitutes a crucial element in risk control, as a control unit to monitor all of the risks in the Bank and Subsidiary's operating activities.

Sejalan dengan ketentuan OJK terkait dengan manajemen risiko terintegrasi, setelah proses penggabungan, Bank ditunjuk oleh pemegang saham mayoritas sebagai Entitas Utama Konglomerasi Keuangan SMBC dengan Entitas Anak sebagai anggota dalam melakukan penerapan manajemen risiko terintegrasi. Dengan menjadi Entitas Utama, maka Direktur Manajemen Risiko Bank menjadi Pimpinan dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

In line with the prevailing OJK regulation regarding integrated risk management, after the merger, the Bank is appointed by majority shareholders as the Primary Entity of SMBC Financial Conglomerate and Subsidiary as a member in conducting integrated risk management. As the Primary Entity, Bank's Risk Management Director became the leader of the Integrated Risk Management Committee.

Komite Audit Bank memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank. Dalam menjalankan fungsinya ini, Komite Audit dibantu oleh Divisi Internal Audit.

The Bank's Audit Committee is responsible for monitoring compliance with risk management policies and procedures and for reviewing the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by the Bank. In performing the role, the Audit Committee is assisted by Internal Audit Division.

Risiko yang timbul dari instrumen keuangan Bank dan Entitas Anak adalah risiko keuangan, termasuk diantaranya adalah risiko kredit dan pembiayaan, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional.

The risks arising from the Bank and Subsidiary's financial instruments are financial risks, which include credit and financing risk, liquidity risk, market risk and operational risk.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Risk management framework (continued)

Entitas Anak telah menerapkan manajemen risiko, antara lain dengan membentuk unit risiko pada Entitas Anak. Manajemen risiko pada Entitas Anak secara operasional dilakukan terpisah dari unit bisnis dan menjalankan fungsinya secara independen. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko, pada struktur organisasi Entitas Anak juga dibentuk Komite Audit yang memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko secara berkala, dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Entitas Anak.

Subsidiary has implemented risk management, among others by establishing a risk unit in Subsidiary. Risk management in Subsidiary is operating separately from the business unit and conducting its function independently. To support the implementation of risk management, the Subsidiary has established Audit Committee in their organisational structure, which has responsibility to monitor the compliance of risk management policies and procedures on a regular basis, and to analyse the adequacy of risk management framework which related to the risks faced by the Subsidiary.

Disamping itu, Dewan Komisaris dan Direksi pada Entitas Anak secara aktif juga melakukan pemantauan, dan evaluasi terhadap pengendalian internal melalui laporan-laporan untuk digunakan sebagai dasar untuk merumuskan dan mengembangkan kebijakan yang tepat pada Entitas Anak.

In addition, the Subsidiary's Board of Commissioners and Board of Directors actively monitor and evaluate the internal controls, through the reports, as a basis in formulating and developing appropriate policies for the Subsidiary.

Bank selaku Entitas Induk telah menerapkan manajemen risiko konsolidasian sesuai ketentuan OJK. Penerapan manajemen risiko konsolidasian antara lain mencakup laporan perhitungan Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) konsolidasian, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) konsolidasian, laporan Profil Risiko konsolidasian, Tingkat Kesehatan Bank (*Risk-Based Bank Rating*) konsolidasian dan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) konsolidasian.

As the Parent Entity, the Bank has implemented consolidated risk management in accordance with OJK regulation. The Implementation of consolidated risk management among others include report of consolidated minimum Capital Adequacy Ratio (CAR), Legal Lending Limit (LLL), risk profile, Risk-Based Bank Rating and Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).

Risiko kredit

Credit risk

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika nasabah, klien atau rekanan Bank dan Entitas Anak gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Bank dan Entitas Anak. Risiko kredit terutama berasal dari pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah.

Credit risk is the risk of financial loss, should any of the Bank and Subsidiary customers, clients or counterparties fail to fulfill their contractual obligations to the Bank and Subsidiary. Credit risk arises mainly from loans and sharia financing/receivables.

Bank juga terekspos risiko kredit yang muncul dari investasi pada surat berharga utang (efek-efek).

The Bank is also exposed to credit risks arising from investment in debt securities (securities).



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

(i) Manajemen risiko kredit

(i) Credit risk management

Bank melakukan kaji ulang atas kebijakan kredit secara periodik terutama jika terdapat perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan dan/atau pendekatan bisnis.

The Bank reviews the credit policies periodically, especially if there are any changes in market conditions, changes in regulations and/or business approach.

Batas pemberian kredit ditetapkan dan ditelaah mengikuti perubahan pada kondisi pasar dan ekonomi. Penelaahan kredit secara periodik dan penilaian atas kemungkinan wanprestasi juga dilakukan. Proses persetujuan kredit dilakukan melalui komite kredit dan kewenangan kredit sebagaimana ditetapkan.

Lending limits are set and reviewed in the light of changing market and economic conditions. Periodic credit reviews and assessments of probability of default are also conducted. Credit approval is processed by credit committee and credit authority as determined.

Bank dan Entitas Anak mengelola dan mengawasi secara aktif kualitas portofolio pinjaman yang diberikan dengan cara meningkatkan kebijakan manajemen risiko kredit dan pembiayaan secara efektif, penyempurnaan prosedur dan pengembangan sistem.

The Bank and Subsidiary actively manage and monitor the loan portfolio quality by improving credit and financing risk management policies effectively, improving procedures and systems development.

Sistem Informasi Manajemen telah tersedia dan akan terus dikembangkan serta telah mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap perkembangan yang kurang baik sedini mungkin sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan yang tepat waktu untuk mengatasi kemungkinan penurunan kualitas kredit atau untuk meminimalisasi kerugian kredit.

Management Information Systems (MIS) are in place and continuously developed and have covered sufficient level of detail to detect any adverse development at an early stage, allowing timely measurement to be taken to counteract any possible deterioration in credit quality or to minimise credit losses.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

(i) Manajemen risiko kredit (lanjutan)

(i) Credit risk management (continued)

Manajemen risiko kredit atas pandemi COVID-19

Credit risk management in COVID-19 pandemic

Merebaknya pandemi COVID-19 berdampak pada kemampuan membayar kembali oleh debitur. Dampak keuangan langsung dari wabah tersebut bagi industri perbankan adalah peningkatan ECL, yang disebabkan oleh peningkatan risiko kredit dan penurunan kualitas pinjaman.

The outbreak of the COVID-19 pandemic has had an impact on the ability to repay debtors. Immediate financial impact of the outbreak on the banking industry is an increase in ECL, driven by increase in credit risk of the customers and deterioration of loan quality.

Bank telah melakukan upaya penanganan dalam menjaga stabilitas dan mitigasi dampak dari pandemi tersebut antara lain:

The Bank has made an effort to handle this issue to maintain stability and to mitigate impact of pandemic as follows:

1. Bank telah membuat kebijakan dalam penerapan restrukturisasi untuk debitur-debitur yang terdampak COVID-19 sesuai dengan ketentuan OJK.
2. Bank memberikan relaksasi atau restrukturisasi kredit di seluruh segmen terhadap debitur-debitur yang mengalami dampak penyebaran COVID-19 sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Catatan 11o).
3. Bank juga fokus pada kualitas portofolio melalui pemilihan pencairan yang hati-hati dan aktivitas pemeliharaan hubungan pelanggan yang aktif.
4. Bank telah membuat kebijakan dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dirilis oleh Pemerintah melalui program penjaminan kredit dan subsidi bunga kepada debitur usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM) sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah. Bank telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo); namun pada tanggal 31 Desember 2020 Bank belum mendaftarkan pinjaman untuk diasuransikan pada Jamkrindo.

1. *The Bank has prepared the policy in implementing restructuring for debtors who affected by COVID-19 in accordance with OJK regulations.*
2. *The Bank provides relaxation or credit restructuring for debtors in all segments who have experienced the impact of the spread of COVID-19 in accordance with POJK No. 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Corona Virus Disease 2019 Spread (Note 11o).*
3. *The Bank also focuses on portfolio quality through prudent selection of disbursement and actively maintaining the relationship with customers.*
4. *The Bank has made policies to support the National Economic Recovery program released by the Government through a credit guarantee program and interest subsidies for micro, small and medium enterprise (MSME) borrowers according to the criteria set by the government. The Bank has signed an Collective Agreement with PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo); however, as of 31 December 2020 the Bank has not registered any loans for the insurance with Jamkrindo.*



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

(i) Manajemen risiko kredit (lanjutan)

(i) Credit risk management (continued)

Manajemen risiko kredit atas pandemi COVID-19 (lanjutan)

Credit risk management in COVID-19 pandemic (continued)

Bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan yang lebih tinggi karena meningkatnya risiko kredit karena pandemi COVID-19 (Catatan 11g). Selain itu, sebagai respon terhadap ketidakpastian keadaan ekonomi dan usaha, Bank melakukan pengkinian data variabel makroekonomi (model parameter) yang digunakan dalam model *forward-looking*, yang menjadi memburuk dari sebelumnya, dan menyebabkan kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan sebesar Rp 262.197 (Catatan 11g).

The Bank recognised higher allowance for impairment losses on loans due to increase in credit risk following COVID-19 pandemic (Note 11g). Moreover, in respond to uncertain economic and business conditions, the Bank has updated its macroeconomic variable projections data (model parameter) used in the forward looking model, which becoming worse than before, and increased the allowance for impairment losses of loans by Rp 262,197 (Notes 11g).

Demikian halnya dengan Entitas Anak, dalam masa pandemi, Entitas Anak membantu nasabah yang usahanya terdampak pandemi COVID-19, melalui program relaksasi sesuai POJK No. 11/POJK.03/2020. Entitas Anak juga berpartisipasi dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk membantu segmen usaha mikro yang terdampak.

As well as with the Subsidiary, during the pandemic period, Subsidiary supports customers whose business impacted by the COVID-19 pandemic with relaxation program, in accordance to POJK No. 11//POJK.03/2020. The Subsidiary also participates in National Economic Recovery program as imposed by the government to support micro business segment impacted by the pandemic.

Entitas Anak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah yang lebih tinggi karena meningkatnya risiko kredit atas piutang murabahah tersebut. Entitas Anak menggunakan metode vintage analysis untuk menentukan cadangan kerugian penurunan nilai dari nasabah yang telah direstrukturisasi.

The Subsidiary recognised higher allowance for impairment losses on the murabahah receivables due to increase in credit risk of the murabahah receivables. The Subsidiary used vintage analysis method to determine the allowance for impairment losses on restructured murabahah receivables.

Dalam rangka implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 71/PMK.08/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Entitas Anak telah berpartisipasi dengan menjadi peserta penjaminan. Pada tanggal 31 Desember 2020, piutang murabahah sebesar Rp 2.649.104 telah dijamin oleh Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk yaitu PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dan PT Jaminan Pembiayaan Askriindo Syariah.

In conjunction with the implementation of National Economic Recovery Program (PEN) in accordance with the Minister of Finance of Republic of Indonesia Regulation (PMK) No. 71/PMK.08/2020 dated 23 June 2020 concerning Government Guarantee Procedures through Designated Guarantee Company in conjunction with the Implementation of National Economic Recovery Program, the Subsidiary has participated as guarantee participant. As of 31 December 2020, murabahah receivables amounting to Rp 2,649,104 were guaranteed by the designated Guarantee Company which are PT Penjaminan Jamkrindo Syariah and PT Jaminan Pembiayaan Askriindo Syariah.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(i) Manajemen risiko kredit (lanjutan)

Agunan

Bank menerapkan berbagai kebijakan dan praktik untuk memitigasi risiko kredit, Bank menerapkan berbagai panduan atas jenis-jenis agunan yang dapat diterima dalam rangka memitigasi risiko kredit. Jenis-jenis agunan atas pinjaman yang diberikan antara lain adalah:

- Kas/Deposito
- Tanah dan/atau Bangunan
- Kendaraan
- Mesin
- Persediaan
- Piutang

Untuk kredit korporasi, Bank mendapatkan jaminan dalam bentuk *standby letters of credit* dari bank afiliasi untuk membatasi risiko kredit bank. Bank juga menyediakan bank garansi kepada nasabahnya yang mengharuskan Bank melakukan pembayaran untuk kepentingan mereka. Hal ini menyebabkan Bank menghadapi risiko yang sama dengan kredit yang diberikan dan risiko tersebut juga dimitigasi dengan prosedur dan kebijakan yang sama.

Selain agunan yang disebutkan di atas, agunan yang diterima untuk kredit korporasi terutama terdiri dari jaminan yang diterima dari perusahaan induk debitur, penjaminan kredit korporasi dan entitas publik lainnya, lembaga keuangan dan perusahaan lain serta jaminan berupa efek-efek.

Porsi kredit yang diberikan yang mendapatkan manfaat dari agunan, baik sebagian maupun penuh, sebagai mitigasi dari risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 46,57% dan 41,02% dari jumlah kredit yang diberikan.

(ii) Eksposur maksimum risiko kredit (tanpa memperhitungkan agunan dan perlindungan kredit lainnya)

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatatnya. Untuk bank garansi dan *irrevocable L/C* yang diterbitkan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai yang harus dibayarkan oleh Bank jika kewajiban atas bank garansi dan *irrevocable L/C* yang diterbitkan terjadi. Untuk komitmen kredit, eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah komitmen fasilitas kredit (*committed*) yang belum digunakan oleh nasabah.

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

(i) Credit risk management (continued)

Collaterals

The Bank employs a range of policies and practices to mitigate credit risk. The Bank implements guidelines on the acceptability of specific classes of collateral to mitigate credit risk. The collateral types for loans are as follows:

- Cash/Time deposits
- Land and/or Building
- Vehicles
- Machine
- Inventory
- Account receivables

For corporate loans, the Bank received collateral in the form of *standby letters of credit* from controlling banks to restrict Bank's credit risk. The Bank also provides bank guarantee to its customers which requires the Bank to make payments for their interests. This causes the Bank to face the same risks as the loans granted and these risks are also mitigated by the same procedures and policies.

In addition to the collateral mentioned above, collaterals for corporate loans mainly consists of guarantees received from the parent company of the debtor, corporate credit guarantees and other public entities, financial institutions and other companies as well as collateral in the form of securities.

The portion of loans that benefit from such partial or full collateralisation as credit risk mitigation as of 31 December 2020 and 2019 were 46.57% and 41.02% of total outstanding loans, respectively.

(ii) Maximum exposure to credit risk (without taking into account collateral held or other credit enhancements)

For financial assets recognised in the consolidated statement of financial position, the maximum exposure to credit risk is equal to its carrying value. For bank guarantees and *irrevocable L/C* issued, maximum exposure to credit risk is the value that must be paid by the Bank if the liabilities on the bank guarantee and *irrevocable L/C* issued has been occurred. For credit commitments, the maximum exposure to credit risk is equal to the amount of committed credit facilities that have not been used by customers.



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

- (ii) Eksposur maksimum risiko kredit (tanpa memperhitungkan agunan dan perlindungan kredit lainnya) (lanjutan)

- (ii) Maximum exposure to credit risk (without taking into account collateral held or other credit enhancements) (continued)

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum Bank dan Entitas Anak terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan rekening administratif, tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya:

The following table presents the Bank and Subsidiary's maximum exposure to credit risk of financial instruments in the consolidated statement of financial position and off-balance sheet accounts, without taking into account any collateral held or other credit enhancements:

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Giro pada Bank Indonesia	5,616,968	8,987,079	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank-bank lain	896,071	1,056,904	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	17,004,339	8,914,104	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	15,020,263	10,702,851	Securities
Tagihan derivatif	917,082	840,372	Derivative receivables
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - bersih			Loans and sharia financing/receivables - net
- Korporasi	77,979,291	75,516,713	Corporates -
- Pensiunan	31,096,292	33,906,446	Pensioners -
- Usaha Mikro Kecil dan Menengah ("UMKM")	12,161,412	14,993,462	Micro Small and Medium Enterprises ("MSME")
- Pembiayaan/piutang syariah	8,673,375	8,707,455	Sharia financing/receivables -
- Lainnya	2,879,924	7,168,908	Others -
- Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	679,556	827,359	Accrued interest/margin income -
Tagihan akseptasi	1,484,940	1,692,391	Acceptance receivables
Penyertaan saham	22,522	22,522	Investment in shares
Aset lain-lain	267,874	177,188	Other assets
	174,699,909	173,513,754	
Komitmen dan kontinjensi dengan risiko kredit:			Commitments and contingencies with credit risk:
Garansi yang diberikan	7,421,593	8,924,578	Guarantees provided
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan - committed	14,012,398	8,433,080	Unused credit facilities to customers - committed
Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan	616,302	925,174	Irrevocable letters of credit

- (iii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit

- (iii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure

Bank dan Entitas Anak mengelola dan mengendalikan konsentrasi risiko kredit dimanapun risiko tersebut teridentifikasi - secara khusus, terhadap debitur individu dan kelompok, dan industri serta sektor geografis.

The Bank and Subsidiary manage and control concentrations of credit risk wherever they are identified - in particular, to individual and group counterparties, and to industries and geographical sectors.

Bank dan Entitas Anak menentukan tingkat risiko kredit dan pembiayaan yang dimiliki dengan menetapkan batas jumlah risiko yang bisa diterima yang terkait dengan satu debitur atau kelompok debitur.

The Bank and Subsidiary structure the levels of credit and financing risk it undertakes by placing limits on the amount of risk accepted in relation to one or group borrowers.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)****Risiko kredit (lanjutan)****Credit risk (continued)**

(iii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

(iii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan sektor geografis adalah sebagai berikut:

Credit risk concentration by geographical sectors was as follows:

	31 Desember/December 2020					
	Jawa*	Sumatera	Bali dan/and Nusa Tenggara	Kalimantan dan/and Sulawesi	Jumlah/ Total	
Giro pada Bank Indonesia	5,616,968	-	-	-	5,616,968	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank-bank lain	894,168	1,023	720	160	896,071	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	17,004,339	-	-	-	17,004,339	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	15,020,263	-	-	-	15,020,263	Securities
Tagihan derivatif	917,082	-	-	-	917,082	Derivative receivables
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - bersih	111,231,337	10,562,621	2,729,575	8,946,317	133,469,850	Loans and sharia financing/receivables - net
Tagihan akseptasi	1,484,940	-	-	-	1,484,940	Acceptance receivables
Penyertaan saham	22,500	14	-	8	22,522	Investment in shares
Aset lain-lain	266,992	396	59	427	267,874	Other assets
	<u>152,458,589</u>	<u>10,564,054</u>	<u>2,730,354</u>	<u>8,946,912</u>	<u>174,699,909</u>	
Komitmen dan kontinjensi dengan risiko kredit:						Commitments and contingencies with credit risk:
Garansi yang diterbitkan	7,421,593	-	-	-	7,421,593	Guarantees issued
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan - <i>committed Letters of credit</i> yang tidak dapat dibatalkan	14,012,398	-	-	-	14,012,398	Unused credit facilities to customers - committed
	616,302	-	-	-	616,302	Irrevocable letters of credit

*) Termasuk Kantor Pusat

*) Including Head Office.

	31 Desember/December 2019					
	Jawa*	Sumatera	Bali dan/and Nusa Tenggara	Kalimantan dan/and Sulawesi	Jumlah/ Total	
Giro pada Bank Indonesia	8,987,079	-	-	-	8,987,079	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank-bank lain	1,055,377	1,214	100	213	1,056,904	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	8,914,104	-	-	-	8,914,104	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	10,702,851	-	-	-	10,702,851	Securities
Tagihan derivatif	840,372	-	-	-	840,372	Derivative receivables
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - bersih	116,335,218	11,981,511	2,947,684	9,855,930	141,120,343	Loans and sharia financing/receivables - net
Tagihan akseptasi	1,692,391	-	-	-	1,692,391	Acceptance receivables
Penyertaan saham	22,500	14	-	8	22,522	Investment in shares
Aset lain-lain	165,540	3,566	1,833	6,249	177,188	Other assets
	<u>148,715,432</u>	<u>11,986,305</u>	<u>2,949,617</u>	<u>9,862,400</u>	<u>173,513,754</u>	
Komitmen dan kontinjensi dengan risiko kredit:						with credit risk:
Garansi yang diterbitkan	8,924,578	-	-	-	8,924,578	Guarantees issued
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan - <i>committed Letters of credit</i> yang tidak dapat dibatalkan	8,433,080	-	-	-	8,433,080	Unused credit facilities to customers - committed
	925,174	-	-	-	925,174	Irrevocable letters of credit

*) Termasuk Kantor Pusat

*) Including Head Office.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

(iv) Kualitas kredit aset keuangan

(iv) Credit quality of financial assets

Proses penentuan kualitas kredit Bank mengacu pada kolektibilitas sesuai peraturan OJK.

Process of determining the Bank's credit quality refers to collectibility in accordance with the OJK regulations.

Segmen korporasi

Corporate segment

Untuk segmen korporasi, kualitas kredit dikelola oleh Bank dengan menggunakan peringkat kredit internal. Bank menentukan peringkat suatu debitur dengan terlebih dahulu menetapkan peringkat keuangan (financial grade) dengan menggunakan model peringkat dari aspek keuangan dan data yang diperoleh dari laporan keuangan debitur, termasuk kekayaan bersih dan arus kas. Peringkat keuangan ini kemudian disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi dari posisi keuangan debitur dan faktor kualitatif untuk menentukan peringkat debitur.

For corporate segment, the quality of credit is managed by the Bank using internal credit ratings. The Bank determines the rating of a debtor by first determining the financial grade using a rating model from financial aspects and data obtained from the debtor's financial statements, including net worth and cash flows. This financial grade is then adjusted by considering the conditions of the debtor's financial position and qualitative factors to determine the grade of the debtor.

Faktor kualitatif terutama mencakup arus kas masa depan yang diharapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti informasi kerugian historis, kesesuaian rencana bisnis debitur atau rencana perbaikan operasional, status perkembangan rencana bisnis dan dukungan menyeluruh dari lembaga keuangan.

Qualitative factors mainly cover expected future cash flows with considering some factors such as historical loss information, conformity of the debtor's business plan or operational improvement plan, status of developments in the business plan and overall support from financial institutions.

Selain prosedur peringkat di atas, dalam hal debitur dianggap sebagai anak perusahaan yang dikonsolidasi oleh induk perusahaan di luar negeri, peringkat debitur bisa ditentukan dengan mengadopsi peringkat obligor berdasarkan kualitas kredit induk perusahaan atau peringkat kredit yang diberikan induk perusahaan Bank terhadap induk perusahaan tersebut. Peringkat debitur dan peringkat fasilitas ditelaah paling sedikit setahun sekali, atau bila diperlukan, ketika ada perubahan kredit.

In addition of grading procedure above, in the event that the debtor is considered as a subsidiary that is consolidated by a parent company abroad, the debtor's grading can be determined by adopting an obligor grading based on the quality of the parent loan or credit grading provided by the Bank's parent company. Debtor grading and facility grading are reviewed at least once a year, or if needed, when there are changes in credit.

Peringkat internal untuk segmen korporasi digolongkan sebagai berikut:

Internal grading for corporate segment is categorized as follows:

- Debitur *Grading* 1-3 memiliki kemampuan membayar kewajiban yang tinggi,
- Debitur *Grading* 4-6 tidak mengalami kesulitan pembayaran kewajiban, namun terdapat faktor bisnis atau ekonomi yang dapat menyebabkan masalah dalam pembayaran kewajiban,
- Debitur *Grading* 7A dan 7B memerlukan pemantauan khusus karena bisnis yang lesu/tidak stabil, atau masalah keuangan.
- Debitur *Grading* 7R atau lebih rendah merupakan debitur yang telah mengalami penurunan nilai (*default*).

- *Grading* 1-3 debtors have very strong ability to pay their obligations,
- *Grading* 4-6 debtors do not experience difficulties to pay their obligations; however, there are business or economy factors that may cause difficulties to pay the obligations,
- *Grading* 7A and 7B debtors need special observation as they experience sluggish/unstable business, or financial issues.
- *Grading* 7R or lower debtors represent debtors which are credit-impaired (*default*).



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

(iv) Kualitas kredit aset keuangan (lanjutan)

(iv) Credit quality of financial assets (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, nilai tercatat aset keuangan berdasarkan kualitas kredit adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2020 and 2019, the carrying amount of financial assets based on credit quality was as follows:

	31 Desember/December 2020					
	Tahap 1/ Stage 1*	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total	
Giro pada Bank Indonesia						Current account with Bank Indonesia
Tanpa peringkat	5,616,968	-	-	-	5,616,968	Non-graded
Giro pada bank-bank lain						Current accounts with other banks
Grade 1-3	523,521	-	-	-	523,521	Grade 1-3
Tanpa peringkat	373,047	-	-	-	373,047	Non-graded
	896,568	-	-	-	896,568	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain						Placement with Bank Indonesia and other banks
Tanpa peringkat	17,004,339	-	-	-	17,004,339	Non-graded
Efek-efek						Securities
Grade 1-3	1,034,384	-	-	-	1,034,384	Grade 1-3
Grade 4-6	55,839	-	-	-	55,839	Grade 4-6
Tanpa peringkat	13,930,331	-	-	-	13,930,331	Non-graded
	15,020,554	-	-	-	15,020,554	
Tagihan derivatif						Derivative receivables
Belum jatuh tempo	917,082	-	-	-	917,082	Not yet overdue
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah:						Loans and sharia financing/receivables:
Korporasi						Corporates
Grade 1-3	60,384,710	1,499,055	-	-	61,883,765	Grade 1-3
Grade 4-6	10,067,330	2,851,649	-	-	12,918,979	Grade 4-6
Grade 7A-7B	-	2,919,936	-	-	2,919,936	Grade 7A-7B
Default	-	-	919,984	-	919,984	Default
	70,452,040	7,270,640	919,984	-	78,642,664	
Non-korporasi						Non-corporates
Belum jatuh tempo	44,406,233	1,234,049	209,372	-	45,849,654	Not yet overdue
Telah jatuh tempo sampai dengan 90 hari	573,420	369,540	53,120	-	996,080	Past due up to 90 days
Telah jatuh tempo 91-120 hari	5,588	77,951	131,517	-	215,056	Past due for 91-120 days
Telah jatuh tempo 121-180 hari	-	-	158,235	-	158,235	Past due for 121-180 days
Telah jatuh tempo lebih dari 180 hari	-	-	828,064	-	828,064	Past due more than 180 days
	44,985,241	1,681,540	1,380,308	-	48,047,089	
Dipindahkan	115,437,281	8,952,180	2,300,292	-	126,689,753	Carry forward

*) Termasuk aset keuangan syariah dengan kualitas kredit lancar

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)****Risiko kredit** (lanjutan)**Credit risk** (continued)

(iv) Kualitas kredit aset keuangan (lanjutan)

(iv) Credit quality of financial assets (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, nilai tercatat aset keuangan berdasarkan kualitas kredit adalah sebagai berikut: (lanjutan)

As of 31 December 2020 and 2019, the carrying amount of financial assets based on credit quality was as follows: (continued)

	31 Desember/December 2020					
	Tahap 1/ Stage 1*	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total	
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (lanjutan):						Loans and sharia financing/receivables (continued):
Dipindahkan	115,437,281	8,952,180	2,300,292	-	126,689,753	Carry forward
Syariah						Sharia
Belum jatuh tempo	-	-	-	9,258,466	9,258,466	Not yet overdue
Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai 1-30 hari	-	-	-	44,428	44,428	Past due but not impaired for 1-30 days
Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai 31-60 hari	-	-	-	23,973	23,973	Past due but not impaired for 31-60days
Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai 61-90 hari	-	-	-	13,914	13,914	Past due but not impaired for 61-90 days
Mengalami penurunan nilai	-	-	-	182,085	182,085	Impaired
	-	-	-	9,522,866	9,522,866	
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	542,651	45,982	3,175	87,748	679,556	Accrued interest/ margin income
	115,979,932	8,998,162	2,303,467	9,610,614	136,892,175	
Tagihan akseptasi						Acceptance receivables
Grade 1-3	835,697	-	-	-	835,697	Grade 1-3
Grade 4-6	298,023	356,914	-	-	654,937	Grade 4-6
	1,133,720	356,914	-	-	1,490,634	
Penyertaan saham						Investment in shares
Tanpa peringkat	22,522	-	-	-	22,522	Non-graded
Aset lain-lain						Other assets
Tanpa peringkat	267,874	-	-	-	267,874	Non-graded
	156,859,559	9,355,076	2,303,467	9,610,614	178,128,716	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(643,157)	(838,059)	(1,098,101)	(849,490)	(3,428,807)	Allowance for impairment losses
	156,216,402	8,517,017	1,205,366	8,761,124	174,699,909	

*) Termasuk aset keuangan syariah dengan kualitas kredit lancar

Include sharia financial assets with current credit quality *)

Penjelasan mengenai Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3 dapat dilihat pada Catatan 2i.

The explanation of Stage 1, Stage 2 and Stage 3 can be referred to Note 2i.



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

(iv) Kualitas kredit aset keuangan (lanjutan)

(iv) Credit quality of financial assets (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, nilai tercatat aset keuangan berdasarkan kualitas kredit adalah sebagai berikut: (lanjutan)

As of 31 December 2020 and 2019, the carrying amount of financial assets based on credit quality was as follows: (continued)

31 Desember/December 2019					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Giro pada Bank Indonesia	8,987,079	-	-	8,987,079	<i>Current accounts with Bank Indonesia</i>
Giro pada bank-bank lain	1,056,904	-	-	1,056,904	<i>Current accounts with other banks</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	8,914,104	-	-	8,914,104	<i>Placements with Bank Indonesia and other banks</i>
Efek-efek	10,702,851	-	-	10,702,851	<i>Securities</i>
Tagihan derivatif	840,372	-	-	840,372	<i>Derivative receivables</i>
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - bersih:					<i>Loans and sharia financing/receivables - net:</i>
- Pihak ketiga					<i>Third parties -</i>
Korporasi	73,650,198	-	40,900	73,691,098	<i>Corporates</i>
Non-korporasi	62,962,709	1,349,981	971,747	65,284,437	<i>Non-corporates</i>
- Pihak berelasi					<i>Related parties -</i>
Korporasi	2,136,091	-	-	2,136,091	<i>Corporates</i>
Non-korporasi	8,717	-	-	8,717	<i>Non-corporates</i>
Tagihan akseptasi	1,688,680	3,711	-	1,692,391	<i>Acceptance receivables</i>
Penyertaan saham	22,522	-	-	22,522	<i>Investment in shares</i>
Aset lain-lain	177,188	-	-	177,188	<i>Other assets</i>
	<u>171,147,415</u>	<u>1,353,692</u>	<u>1,012,647</u>	<u>173,513,754</u>	

Kualitas kredit dengan kategori "mengalami penurunan nilai" adalah sebagai berikut:

Credit quality in "impaired" category is as follows:

- Pinjaman/pembiayaan non-korporasi

- Non-corporate loans/financing

Kategori pinjaman/pembiayaan yang mengalami penurunan nilai adalah kredit yang minimum memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

Loans/financing that are categorised as impaired are loans that satisfy at least one of the following criteria:

- a. Menunggak di atas 90 hari
- b. Kolektibilitas OJK 3, 4 dan 5.

- a. Days past due over 90 days
- b. OJK grading 3, 4 and 5.

- Pinjaman korporasi

- Corporate loans

Kategori pinjaman yang mengalami penurunan nilai adalah kredit yang diberikan kepada debitur yang peringkat internal pinjamannya adalah sama dengan 7R atau lebih rendah.

Loans that are categorised as impaired are loans from debtors with internal grading at 7R or lower.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

(iv) Kualitas kredit aset keuangan (lanjutan)

(iv) Credit quality of financial assets (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2019, rincian kualitas kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diberikan yang "belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai berdasarkan ketentuan internal Bank adalah sebagai berikut:

The detail of credit quality of loans and sharia financing/receivables that were "neither past due nor impaired" as of 31 December 2019 based on the Bank's internal policy was as follows:

	31 Desember/December 2019			
	Lancar/ Current	Pernah mengalami keterlambatan pembayaran/ Has an overdue experience	Jumlah/ Total	
Kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diberikan:				Loans and sharia financing/receivables:
Pensiunan	24,167,980	9,081,820	33,249,800	Pensioners
UMKM	11,736,023	2,404,909	14,140,932	MSME
Korporasi	75,499,669	-	75,499,669	Corporates
Syariah	8,713,045	36,224	8,749,269	Sharia
Lainnya	3,470,353	3,281,779	6,752,132	Others
	<u>123,587,070</u>	<u>14,804,732</u>	<u>138,391,802</u>	
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	661,355	112,406	773,761	Accrued interest/margin income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(321,561)	(86,287)	(407,848)	Allowance for impairment losses
	<u>123,926,864</u>	<u>14,830,851</u>	<u>138,757,715</u>	

Kualitas kredit dengan kategori "belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai" adalah sebagai berikut:

Credit quality in "neither past due nor impaired" category is as follows:

- Lancar

- Current

Pinjaman dalam kategori ini memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk membayar bunga dan pokok pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah oleh Bank dan Entitas Anak, yang terdiri dari:

Loans in this category are considered to have very strong capacity to pay interest and principal of loans, and sharia financing by the Bank and Subsidiary, which consists of:

- o Pinjaman non-korporasi
Pinjaman dengan kondisi kolektibilitas "lancar" pada tanggal pelaporan.

- o Non-corporate loans
Loans with "current" grading at the reporting date.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(iv) Kualitas kredit aset keuangan (lanjutan)

- o Pinjaman korporasi
Pinjaman berdasarkan peringkat internal sebagai berikut:
 - Debitur *Grading* 1-3
 - Debitur *Grading* 4-6
 - Debitur *Grading* 7A dan 7B

- Pernah mengalami keterlambatan pembayaran

Pinjaman dalam kategori ini dianggap memiliki kapasitas memadai untuk membayar bunga dan pokoknya walaupun pernah mengalami keterlambatan pembayaran pada saat jatuh tempo.

Rincian kualitas kredit yang "telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai" berdasarkan umur tagihan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 2019					
Pensiunan/ <i>Pensioners</i>	UMKM/ <i>MSME</i>	Syariah/ <i>Sharia</i>	Lainnya/ <i>Others</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Tunggakan					<i>Days past due:</i>
1 - 30 hari	441,993	118,774	63,165	280,286	904,218
31 - 60 hari	159,879	113,461	34,685	110,292	418,317
61 - 90 hari	94,985	139,747	29,785	63,180	327,697
	<u>696,857</u>	<u>371,982</u>	<u>127,635</u>	<u>453,758</u>	<u>1,650,232</u>
Pendapatan bunga/ margin yang masih akan diterima	18,384	8,783	7,605	15,795	50,567
Cadangan kerugian penurunan nilai	(52,795)	(76,095)	(60,176)	(67,501)	(256,567)
	<u>662,446</u>	<u>304,670</u>	<u>75,064</u>	<u>402,052</u>	<u>1,444,232</u>

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi jika Bank dan Entitas Anak tidak dapat memenuhi pembayaran kewajiban pada saat jatuh tempo, termasuk pencairan simpanan nasabah. Salah satu parameter yang digunakan adalah dengan menganalisa profil jatuh tempo dari sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan sebagian besar aset yang disalurkan dalam bentuk kredit dengan jangka waktu yang pada umumnya berjangka panjang. Terjadinya kesenjangan yang cukup besar akan dapat meningkatkan risiko likuiditas.

Dalam mengantisipasi potensi tekanan likuiditas karena pandemi COVID-19 yang berlangsung cukup lama, Bank dan Entitas Anak telah mempersiapkan strategi pendanaan dan cadangan likuiditas yang memadai yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan profil likuiditas agar selalu memenuhi regulasi terkait.

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

(iv) Credit quality of financial assets (continued)

- o Corporate loans
Loans categorised by internal grading as follows:
 - Grading 1-3 debtors
 - Grading 4-6 debtors
 - Grading 7A and 7B debtors

- Has an overdue experience

Loans in this category are considered to have adequate capacity to pay interest and principal although they have overdue experience in making payments when due.

The detail of credit quality that is "past due but not impaired" as of 31 December 2019 based on aging of receivables was as follows:

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Bank and Subsidiary are unable to meet their payment obligations as they fall due, including withdrawal of customer deposits. One of the parameters used is by analysing the maturity profile from the funding sources, which are usually short term, while most of the assets which were distributed in the form of loans, are usually long-term. A relatively wide gap can increase liquidity risk.

In anticipating potential liquidity pressures due to the COVID-19 pandemic which has lasted quite a long time, the Bank and Subsidiary have prepared the funding strategy and adequate liquidity reserves which are adjusted to the operational needs and the Bank's liquidity profile in order to always comply with the relevant regulations.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)****Risiko likuiditas (lanjutan)****Liquidity risk (continued)**

Profil jatuh tempo diproyeksikan atas jangka waktu yang tersisa berdasarkan tanggal kontraktual aset dan liabilitas tertentu. Secara historis, sebagian besar dari simpanan diperpanjang pada saat jatuh tempo yang dipengaruhi oleh perilaku nasabah dan tingkat kepercayaan terhadap Bank dan Entitas Anak. Untuk mengelola risiko likuiditas atas kondisi tersebut, maka Bank dan Entitas Anak menetapkan strategi yang sesuai dan jumlah kas dan aset likuid yang perlu dimiliki, yang dapat dicairkan atau dijadikan jaminan jika ada kebutuhan likuiditas yang mendesak.

This maturity profile is projected based on the remaining period to the contractual maturity date of assets and liabilities. Historically, a significant portion of deposits are rolled-over on the maturity date which is affected by customer behaviour and confidence level to the Bank and Subsidiary. To manage the liquidity risk of this condition, the Bank and Subsidiary establish appropriate strategies and sufficient amount of cash and liquid assets that can be liquidated or used as collateral should there be an urgent need for liquidity.

Tabel berikut ini menyajikan rincian sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo aset keuangan (sebelum cadangan kerugian penurunan nilai) dan liabilitas keuangan.

The following tables provide detail of remaining period to maturity date of financial assets (before allowance for impairment losses) and financial liabilities.

		31 Desember/December 2020						
		Sesuai	≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	> 1-3 bulan/ > 1-3 months	> 3-6 bulan/ > 3-6 months	> 6-12 bulan/ > 6-12 months	> 12 bulan/ > 12 months	
Aset	Jumlah/ Total	permintaan/ On demand						Assets
Kas	2,433,196	2,433,196	-	-	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	5,616,968	5,616,968	-	-	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank-bank lain	896,568	896,568	-	-	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	17,004,339	-	14,946,788	176,883	959,240	921,428	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	15,020,554	-	1,595,300	823,837	538,248	3,208,561	8,854,608	Securities
Tagihan derivatif	917,082	-	917,082	-	-	-	-	Derivative receivables
Tagihan akseptasi	1,490,634	-	235,500	590,564	467,682	196,888	-	Acceptance receivables
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	136,892,175	-	24,588,343	15,895,653	8,109,292	12,599,049	75,699,838	Loans and sharia financing/receivables
Penyertaan saham	22,522	22,522	-	-	-	-	-	Investment in shares
Aset lain-lain	267,874	3,106	258,852	-	-	-	5,916	Other assets
Jumlah aset	180,561,912	8,972,360	42,541,865	17,486,937	10,074,462	16,925,926	84,560,362	Total assets

		31 Desember/December 2020						
		Sesuai	≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	> 1-3 bulan/ > 1-3 months	> 3-6 bulan/ > 3-6 months	> 6-12 bulan/ > 6-12 months	> 12 bulan/ > 12 months	
Liabilitas	Jumlah/ Total	permintaan/ On demand						Liabilities
Liabilitas segera	(59,404)	-	(59,404)	-	-	-	-	Obligations due immediately
Bagi hasil yang belum dibagikan	(18,666)	-	(18,666)	-	-	-	-	Undistributed revenue sharing
Giro	(15,761,972)	(15,760,708)	(1,264)	-	-	-	-	Current accounts
Tabungan	(11,764,429)	(11,762,015)	(2,414)	-	-	-	-	Saving deposits
Deposito berjangka dan deposito on call	(65,607,522)	-	(45,790,994)	(15,721,013)	(3,201,647)	(869,897)	(23,971)	Time deposits and deposits on call
Simpanan dari bank-bank lain	(6,549,706)	(6,549,706)	-	-	-	-	-	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	(887,157)	-	(887,157)	-	-	-	-	Derivative payables
Liabilitas akseptasi	(767,282)	-	(140,661)	(346,736)	(271,309)	(8,576)	-	Acceptance payables
Utang obligasi	(1,000,424)	-	(7,379)	-	-	-	(993,045)	Bonds payable
Pinjaman yang diterima	(31,183,344)	-	(119,087)	(5,164,868)	(1,000,000)	-	(24,899,389)	Borrowings
Pinjaman subordinasi	(6,115,980)	(4,230)	-	-	-	-	(6,111,750)	Subordinated loans
Liabilitas lain-lain	(401,099)	(20,948)	(374,120)	(4,661)	(1,314)	(56)	-	Other liabilities
Jumlah liabilitas	(140,116,985)	(34,097,607)	(47,401,146)	(21,237,278)	(4,474,270)	(878,529)	(32,028,155)	Total liabilities
Aset (liabilitas) bersih	40,444,927	(25,125,247)	(4,859,281)	(3,750,341)	5,600,192	16,047,397	52,532,207	Net assets (liabilities)



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

31 Desember/December 2019							
	Jumlah/ Total	Sesuai permintaan/ On demand	≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	> 1-3 bulan/ > 1-3 months	> 3-6 bulan/ > 3-6 months	> 6-12 bulan/ > 6-12 months	> 12 bulan/ > 12 months
Aset							
Kas	2,299,062	2,299,062	-	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	8,987,079	8,987,079	-	-	-	-	-
Giro pada bank-bank lain	1,056,904	1,056,904	-	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	8,914,104	-	7,254,104	485,000	370,000	805,000	-
Efek-efek	10,702,857	-	1,302,594	6,949,639	209,282	512,240	1,729,102
Tagihan derivatif	840,372	-	840,372	-	-	-	-
Tagihan akseptasi Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	1,692,460	-	662,819	446,301	418,076	165,264	-
Penyertaan saham	142,587,542	-	31,307,032	10,493,102	7,246,115	13,747,925	79,793,368
Aset lain-lain	22,522	22,522	-	-	-	-	-
Jumlah aset	177,280,090	12,385,528	41,486,071	18,375,630	8,245,264	15,231,506	81,556,091
Liabilitas							
Liabilitas segera	(18,268)	-	(18,268)	-	-	-	-
Bagi hasil yang belum dibagikan	(21,861)	-	(14,473)	(6,294)	(991)	(103)	-
Giro	(14,374,956)	(14,374,226)	(730)	-	-	-	-
Tabungan	(9,958,771)	(9,955,705)	(3,066)	-	-	-	-
Deposito berjangka dan deposito on call	(55,265,689)	-	(38,521,768)	(13,792,455)	(1,906,146)	(1,028,813)	(16,507)
Simpanan dari bank-bank lain	(11,690,555)	(11,690,555)	-	-	-	-	-
Liabilitas derivatif	(894,947)	-	(894,947)	-	-	-	-
Liabilitas akseptasi Surat utang jangka menengah	(888,459)	-	(519,441)	(225,754)	(116,395)	(26,869)	-
Utang obligasi	(1,306,441)	-	(5,032)	-	(1,301,409)	-	-
Pinjaman yang diterima	(1,910,473)	-	(21,254)	-	-	(898,987)	(990,232)
Pinjaman subordinasi	(38,188,926)	-	(141,472)	-	(2,499,061)	(1,000,000)	(34,548,393)
Liabilitas lain-lain	(6,045,193)	(6,305)	-	-	-	-	(6,038,888)
Jumlah liabilitas	(582,809)	(582,809)	-	-	-	-	-
Aset (liabilitas) bersih	(141,147,348)	(36,609,600)	(40,140,451)	(14,024,503)	(5,824,002)	(2,954,772)	(41,594,020)
	36,132,742	(24,224,072)	1,345,620	4,351,127	2,421,262	12,276,734	39,962,071

Tabel berikut ini menunjukkan arus kas kontraktual yang tidak didiskonto dari liabilitas keuangan dan rekening administratif Bank berdasarkan periode tersisa sampai dengan jatuh tempo kontraktual:

The following table shows the contractual undiscounted cash flows of the Bank's financial liabilities and administrative accounts based on the remaining period to contractual maturity:

31 Desember/December 2020							
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai nominal bruto arus kas masuk (keluar)/Gross nominal inflow (outflow)	Hingga 1 bulan/ Up to 1 month	> 1 - 3 bulan/ months	> 3 - 12 bulan/ months	> 1 - 2 tahun/ years	> 2 tahun/ years
Liabilitas non-derivatif							
Liabilitas segera	(59,404)	(59,404)	(59,404)	-	-	-	-
Bagi hasil yang belum dibagikan	(18,666)	(18,666)	(18,666)	-	-	-	-
Giro	(15,760,708)	(15,768,518)	(15,768,518)	-	-	-	-
Tabungan	(11,762,015)	(11,777,110)	(11,772,684)	(1,124)	(2,748)	(554)	-
Deposito berjangka dan deposito on call	(65,342,817)	(66,883,993)	(46,846,868)	(15,871,688)	(4,140,653)	(24,784)	-
Simpanan dari bank-bank lain	(6,549,706)	(6,575,654)	(6,575,654)	-	-	-	-
Liabilitas akseptasi	(767,282)	(767,282)	(140,661)	(346,736)	(279,885)	-	-
Utang obligasi	(1,000,424)	(1,177,507)	-	(19,131)	(57,394)	(875,526)	(225,456)
Pinjaman yang diterima	(31,183,344)	(32,115,761)	(77,913)	(5,263,665)	(1,253,732)	(23,097,152)	(2,423,299)
Pinjaman subordinasi	(6,115,980)	(6,539,403)	(401,099)	(23,473)	(70,420)	(93,893)	(6,351,617)
Liabilitas lain-lain	(401,099)	(401,099)	-	-	-	-	-
	(138,961,445)	(142,084,397)	(81,661,467)	(21,525,817)	(5,804,832)	(24,091,909)	(9,000,372)
Liabilitas derivatif	(887,157)	-	-	-	-	-	-
Arus kas masuk	-	6,087,810	2,793,956	1,324,661	424,365	1,114,975	429,853
Arus kas keluar	-	(14,809,729)	(2,745,449)	(1,522,091)	(3,371,279)	(4,246,334)	(2,924,576)
	(887,157)	(8,721,919)	48,507	(197,430)	(2,946,914)	(3,131,359)	(2,494,723)
L/C yang tidak dapat dibatalkan	-	(616,302)	(304,359)	(198,938)	(113,005)	-	-
Fasilitas kredit yang belum digunakan - committed	-	(14,012,398)	-	(550,000)	(4,333,663)	(3,115,836)	(6,012,899)
Garansi yang diterbitkan	-	(7,421,592)	(2,656,988)	(1,656,180)	(1,301,286)	(1,807,138)	-
	-	(22,050,292)	(2,961,347)	(2,405,118)	(5,747,954)	(4,922,974)	(6,012,899)
Jumlah	(139,848,602)	(172,856,608)	(84,574,307)	(24,128,365)	(14,499,700)	(32,146,242)	(17,507,994)

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)****Risiko likuiditas (lanjutan)****Liquidity risk (continued)**

31 Desember/December 2019							
Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai nominal bruto arus kas masuk (keluar)/Gross nominal inflow (outflow)	Hingga 1 bulan/ Up to 1 month	>1 - 3 bulan/ months	>3 - 12 bulan/ months	>1 - 2 tahun/ years	>2 tahun/ years	
Liabilitas non-derivatif							
Liabilitas segera	(18,268)	(18,268)	(18,268)	-	-	-	-
Bagi hasil yang belum dibagikan	(21,861)	(21,861)	(14,473)	(6,294)	(1,094)	-	-
Giro	(14,374,956)	(14,682,160)	(14,682,160)	-	-	-	-
Tabungan	(9,958,771)	(10,227,599)	(10,223,874)	(783)	(2,435)	(507)	-
Deposito berjangka dan deposito <i>on call</i>	(55,265,689)	(56,223,259)	(39,236,841)	(13,969,593)	(2,999,417)	(17,408)	-
Simpanan dari bank-bank lain	(11,690,555)	(11,716,794)	(8,849,763)	(2,867,031)	-	-	-
Liabilitas akseptasi Surat utang jangka menengah	(888,459)	(888,459)	(537,764)	(207,431)	(143,264)	-	-
Utang obligasi	(1,306,441)	(1,328,263)	-	-	(1,328,263)	-	-
Pinjaman yang diterima	(1,910,473)	(2,218,261)	(17,014)	(19,131)	(1,008,435)	(76,526)	(1,097,15)
Pinjaman subordinasi	(38,188,926)	(39,793,169)	(77,513)	(207,486)	(5,197,113)	(33,292,842)	(1,018,21)
Liabilitas lain-lain	(6,045,193)	(7,144,075)	-	(49,727)	(149,181)	(198,908)	(6,746,25)
	(582,809)	(582,809)	(582,809)	-	-	-	-
	(140,252,401)	(144,844,977)	(74,240,479)	(17,327,476)	(10,829,202)	(33,586,191)	(8,861,62)
Liabilitas derivative							
Arus kas masuk	(894,947)	-	51,045,474	8,457,855	10,571,427	3,790,550	3,310,133
Arus kas keluar	-	(53,075,857)	(8,574,916)	(10,851,750)	(4,175,379)	(3,752,219)	(25,721,56)
	(894,947)	(2,030,383)	(117,061)	(280,323)	(384,829)	(442,086)	(806,06)
L/C yang tidak dapat dibatalkan	-	(925,174)	(520,395)	(351,771)	(53,008)	-	-
Fasilitas kredit yang belum digunakan - <i>committed</i>	-	(8,433,080)	(10,000)	(550,000)	(3,653,169)	(198,321)	(4,021,56)
Garansi yang diterbitkan	-	(8,924,578)	(790,130)	(1,637,789)	(3,121,094)	(540,937)	(2,834,62)
	-	(18,282,832)	(1,320,525)	(2,539,560)	(6,827,271)	(739,258)	(6,856,21)
Jumlah	(141,147,348)	(165,158,192)	(75,678,065)	(20,147,359)	(18,041,302)	(34,767,535)	(16,523,93)

Tabel sebelumnya menyajikan arus kas yang tidak didiskontokan dari liabilitas keuangan Bank dan Entitas Anak berdasarkan periode jatuh tempo kontraktual yang paling dekat. Arus kas yang diharapkan atas instrumen keuangan Bank dan Entitas Anak mungkin berbeda dengan analisis ini. Sebagai contoh, simpanan diharapkan memiliki saldo yang stabil atau meningkat atau fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan (*committed*) tidak seluruhnya diharapkan untuk segera digunakan.

Nilai nominal arus kas masuk/(keluar) yang diungkapkan pada tabel di atas menyajikan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan terkait dengan nilai pokok dan bunga dari liabilitas keuangan. Pengungkapan instrumen derivatif menunjukkan nilai bersih derivatif yang dapat diselesaikan secara neto, juga nilai bruto arus kas masuk dan keluar untuk derivatif yang diselesaikan secara bruto. Arus kas liabilitas derivatif seperti yang ditunjukkan di tabel di atas merupakan arus kas berdasarkan jatuh tempo kontraktual yang menurut Bank dan Entitas Anak adalah penting untuk memahami jadwal dari arus kas.

The previous table shows the undiscounted cash flows on the Bank and Subsidiary financial liabilities on the basis of their earliest possible contractual maturity. The Bank and Subsidiary expected cash flows on these instruments may vary from this analysis. For example, deposits are expected to maintain a stable or increasing balance or unused credit facilities to customer-committed are not all expected to be drawn down immediately.

The nominal inflow/(outflow) disclosed in the above tables represents the contractual undiscounted cash flows relating to the principal and interest on the financial liabilities. The disclosure for derivatives shows the net amount of derivatives that are net settled, and a gross inflow and outflow amount for derivatives that have simultaneous gross settlement. The cash flows of derivatives liabilities in the table represent the cash flows based on contractual maturities which the Bank and Subsidiary believes is essential for an understanding of the timing of the cash flows.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

Kebijakan yang dijalankan Bank dan Entitas Anak dalam mengendalikan risiko likuiditas adalah:

Policies adopted by the Bank and Subsidiary in managing its liquidity risk include:

- Menetapkan kebijakan pengendalian risiko likuiditas yang telah disesuaikan dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, sumber daya manusia dan *risk appetite* Bank dan Entitas Anak.
- Menetapkan kebijakan dan prosedur penetapan limit risiko likuiditas secara tertulis, lengkap, memadai dan cukup mudah ditelusuri.
- Menjaga cadangan likuiditas agar sesuai dengan rekomendasi ALCO.
- Mengelola portofolio pendanaan untuk menghindari risiko konsentrasi dan ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu. Hal ini dimonitor secara bulanan oleh ALCO dan *Risk Management Committee* (RMC).
- Fungsi pengawasan yang independen dari satuan kerja manajemen risiko.

- *Application of a liquidity risk control policy that is suited to the mission, business strategy, capital adequacy, human resources and appetite for risk of the Bank and Subsidiary.*
- *Application of a liquidity risk limit policies and procedures that are written, complete, adequate and easy to follow.*
- *Maintain liquidity reserves to match the ALCO's recommendation.*
- *Managing it's funding portfolio to avoid concentration risk and dependence on single source of funding. It's monitored by ALCO and Risk Management Committee (RMC).*
- *The independent monitoring function of the risk management working unit.*

Untuk menjaga ketahanan likuiditas, Bank melakukan pemantauan terhadap rasio kecukupan likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio/LCR*) dan rasio pendanaan stabil bersih (*Net Stable Funding Ratio/NSFR*). Selain sebagai bagian dari ketentuan yang wajib dipatuhi, juga secara internal rasio-rasio tersebut ditetapkan sebagai bagian dari indikator peringatan dini (*early warning indicators*) dan indikator rencana pemulihan (*recovery plan*) yang dimonitor secara harian.

To maintain its liquidity resilience, the Bank monitor the Liquidity Coverage Ratio (LCR) and a Net Stable Funding Ratio (NSFR). Apart of being the requirements that must be complied with, internally Bank also set those ratios as part of the early warning indicator and the recovery plan indicators which are monitored on a daily basis.

LCR dikelola dengan memelihara asset likuid yang berkualitas tinggi (*High Quality Liquid Assets/HQLA*) untuk dapat memenuhi potensi dana keluar bersih dalam 30 hari kedepan sesuai dengan skenario yang ditetapkan berdasarkan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedang NSFR bertujuan untuk memelihara profil pendanaan stabil yang disesuaikan dengan komposisi aset dan transaksi rekening administratif Bank sesuai dengan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

LCR is managed by maintaining high quality liquid assets (HQLA) which enable Bank to cover the potential net outflows within the next 30 days in accordance with the scenario determined based on regulations from Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meanwhile, the NSFR aims to maintain a stable funding profile that is adjusted to the composition of assets and administrative account transactions of the Bank in accordance with regulations from Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan LCR dan NSFR disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dipublikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LCR and NSFR reports are submitted periodically to Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and published in accordance with applicable regulations.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko pasar

Market risk

Risiko pasar adalah potensi timbulnya kerugian dalam nilai buku atau fluktuasi arus kas di masa mendatang yang diakibatkan oleh perubahan suku bunga atau nilai tukar.

Market risk is the potential loss in book value or future cash flows fluctuation due to changes in interest rates or exchange rates.

Dalam mengantisipasi adanya gejolak atas nilai tukar dan suku bunga akibat adanya kemungkinan memburuknya perekonomian paska kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan menurunnya transaksi perekonomian secara nasional dan internasional karena adanya pandemi COVID-19, Bank secara internal berupaya memastikan eksposur, transaksi dan ekspansi dalam valuta asing dan berdasarkan suku bunga yang dilakukan bisnis telah sesuai dengan limit dan *risk appetite* Bank.

In anticipating fluctuations in exchange rates and interest rates due to the possibility of a deterioration in the economy after the Large Scale Social Restrictions ("PSBB") policy and a decline in national and international economic transactions due to the COVID-19 pandemic, the Bank internally seeks to ensure exposures, as well as foreign exchange and interest rates based transactions and expansion. the business undertaken is in accordance with the Bank's limits and risk appetite.

Secara keseluruhan, risiko pasar dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

In overall, market risk is divided into two following risks:

(i) Risiko mata uang asing

(i) *Foreign currency risk*

Risiko mata uang asing timbul dari adanya posisi neraca dan komitmen dan kontinjensi (*off-balance sheet*) baik di sisi aset maupun liabilitas yang timbul melalui transaksi mata uang asing.

Foreign exchange risk arises from on and off-balance sheet positions both on the asset and liability sides through transactions in foreign currencies.

Bank mengukur risiko nilai tukar untuk melihat dampak perubahan nilai tukar pada pendapatan dan modal Bank. Untuk mengelola dan memitigasi risiko nilai tukar, pembatasan posisi secara internal ditetapkan jauh di bawah limit posisi devisa neto yang ditetapkan regulator. Bank juga memonitor *stop loss limit* untuk menjaga tingkat kerugian karena pergerakan nilai pasar tidak melebihi kisaran yang telah ditetapkan.

The Bank measures the foreign exchange risk to understand the impact of the exchange rate movement on the Bank's revenue and capital. In order to manage and mitigate the foreign exchange risk, predefined internal limits are set below net open position limit that is defined by regulator. The Bank also monitors stop loss limit to maintain the loss rate caused by movement of market value do not exceed the specified range.

Entitas Anak tidak memiliki aset maupun liabilitas keuangan dalam mata uang asing, maupun posisi untuk diperdagangkan, sehingga Entitas Anak tidak memiliki risiko mata uang asing.

The Subsidiary does not have any assets or liabilities which are denominated in foreign currencies, or held for trading, thus the Subsidiary does not have foreign currency risk.

Posisi Devisa Neto

Net Open Position

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai posisi devisa neto yang berlaku, maksimum posisi devisa neto adalah 20% dari modal.

Based on the prevailing Bank Indonesia Regulation relating with net open position, the maximum net open position is at 20% of capital.

Posisi devisa neto adalah jumlah dari nilai absolut selisih bersih aktiva dan pasiva dalam laporan posisi keuangan untuk setiap valuta asing dan selisih bersih tagihan dan kewajiban komitmen dan kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

NOP is the sum of the absolute values of the net difference between assets and liabilities in the statement of financial position for each foreign currency and the net difference of receivables and commitments and contingent liabilities in the administrative accounts for each foreign currency, which are all stated in Rupiah.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko pasar (lanjutan)

Market risk (continued)

(i) Risiko mata uang asing (lanjutan)

(i) Foreign currency risk (continued)

Posisi Devisa Neto (lanjutan)

Net Open Position (continued)

Berikut adalah Posisi Devisa Neto Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dalam mata uang (ekuivalen Rupiah). Nilai ini adalah yang dilaporkan kepada Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan sebagai bagian dari laporan harian.

Below is the Net Open Position of Bank as of 31 December 2020 and 2019 in currency (Rupiah equivalent). These amounts are reported to Bank Indonesia on the statement of financial position's date as part of daily reporting.

Mata Uang	31 Desember/December 2020			Currencies
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position	
Laporan posisi keuangan dan rekening administratif				
Dolar Amerika Serikat	69,349,187	69,432,694	83,507	United States Dollar
Yen Jepang	1,832,521	1,843,460	10,939	Japanese Yen
Dolar Singapura	61,102	58,095	3,007	Singapore Dollar
Euro Eropa	395,115	387,931	7,184	European Euro
Baht Thailand	44,217	44,442	225	Thailand Baht
Poundsterling Inggris	10,421	8,760	1,661	Great Britain Poundsterling
Dolar Australia	15,634	10,729	4,905	Australian Dollar
Yuan China	6,035	5,714	321	China Yuan
Dolar Hong Kong	949	1,013	64	Hong Kong Dollar
Franc Swiss	143	-	143	Swiss Franc
Rupiah India	38	-	38	Indian Rupee
Jumlah			111,994	Total
Jumlah Modal Tier I dan II			32,451,223	Total Tier I and II Capital
Rasio PDN			0.35%	NOP Ratio

Mata Uang	31 Desember/December 2019			Currencies
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position	
Laporan posisi keuangan dan rekening administratif				
Dolar Amerika Serikat	84,803,983	84,816,091	12,108	United States Dollar
Yen Jepang	1,989,928	1,985,170	4,758	Japanese Yen
Dolar Singapura	56,694	49,033	7,661	Singapore Dollar
Euro Eropa	49,431	46,435	2,996	European Euro
Baht Thailand	15,955	14,275	1,680	Thailand Baht
Poundsterling Inggris	7,257	3,504	3,753	Great Britain Poundsterling
Dolar Australia	3,173	648	2,525	Australian Dollar
Yuan China	788	110	678	China Yuan
Dolar Hong Kong	449	266	183	Hong Kong Dollar
Franc Swiss	289	-	289	Swiss Franc
Rupiah India	70	-	70	Indian Rupee
Jumlah			36,701	Total
Jumlah Modal Tier I dan II			30,948,624	Total Tier I and II Capital
Rasio PDN			0.12%	NOP Ratio

Sensitivitas Bank terhadap mata uang asing diperhitungkan dengan menggunakan informasi selisih bersih aktiva dan pasiva dalam laporan posisi keuangan untuk setiap valuta asing dan selisih bersih tagihan dan kewajiban komitmen dan kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing.

The Bank's sensitivity to foreign currency is calculated using net difference between assets and liabilities in the statement of financial position for each foreign currency and the net difference of receivables and commitments and contingent liabilities in the off-balance sheet accounts for each foreign currency information.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas laba bersih Bank (linier) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 atas perubahan nilai tukar mata uang asing yaitu:

The table below shows the sensitivity of the Bank's net profit (linear) to movement of foreign exchange rates as of 31 December 2020 and 2019 :

	Menambah (mengurangi) laba bersih/Increase (decrease) net profit		
	2020	2019	
IDR melemah 1%	(775)	125	IDR weakening by 1%
IDR menguat 1%	775	(125)	IDR strengthening by 1%

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)

(i) Risiko mata uang asing (lanjutan)

Posisi Devisa Neto (lanjutan)

Proyeksi di atas mengasumsikan bahwa perubahan nilai tukar mata uang asing bergerak pada jumlah yang sama sehingga tidak mencerminkan perubahan potensial kepada laba atas perubahan beberapa nilai tukar mata uang asing sementara lainnya tidak berubah. Proyeksi juga mengasumsikan bahwa seluruh variabel lainnya adalah konstan dan berdasarkan tanggal pelaporan yang konstan serta seluruh posisi berjalan hingga jatuh tempo.

(ii) Risiko suku bunga

Pendapatan Bank yang berasal dari kegiatan konvensional merupakan selisih antara bunga yang dihasilkan dari sisi aset dengan bunga yang dibayarkan kepada dana pihak ketiga. Perubahan tingkat bunga jika tidak diantisipasi dapat menyebabkan penurunan pendapatan Bank.

Risiko suku bunga berdampak pada fluktuasi arus kas di masa mendatang baik pada aset maupun liabilitas. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan bunga Bank maupun nilai wajar dari instrumen keuangan yang dimiliki Bank.

Bisnis utama Entitas Anak adalah memberikan pembiayaan dengan akad murabahah. Pendapatan marjin murabahah dipengaruhi oleh harga pembiayaan atau suku bunga di pasar konvensional.

Manajemen risiko suku bunga

Kebijakan yang dijalankan Bank dan Entitas Anak dalam pengendalian terhadap risiko suku bunga:

- Melakukan pemantauan limit risiko suku bunga.
- Melakukan pengelolaan risiko suku bunga sesuai regulasi terkait dan kebijakan internal Bank.
- Melakukan simulasi perhitungan pendapatan marjin bersih terhadap semua kemungkinan perubahan tingkat suku bunga di pasar.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur instrumen keuangan Bank dan Entitas Anak terhadap risiko tingkat suku bunga.

	≤ 1 bulan/ month	1 - 3 bulan months	> 3 - 6 bulan/ months	> 6 - bulan/ months	≤ 1 bulan/ month	1 - 3 bulan months	> 3 - 6 bulan/ months	> 6 - 12 bulan/ months	months	bunga/ Non- interest bearing	Jumlah/ Total	
Indonesia											Bank Indonesia	
bank lain											other banks	
Bank Indonesia dan bank-bank lain											Placements with Bank Indonesia and other banks	
diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah					2				34,097,38		136,892,17	financing/receivables
Aset lain-lain												Other assets
keuangan, sebelum cadangan kerugian penurunan nilai									42,951,99	6,459,15	180,561,91	Total financial assets before allowance for impairment losses

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Market risk (continued)

(i) Foreign currency risk (continued)

Net Open Position (continued)

The above projection assumes that foreign exchange rates move by the same amount and, therefore, do not reflect the potential impact on profit of some rates changing while others remain unchanged. The projections also assume that all other variables are held constant and are based on a constant reporting date position and that all positions run to maturity.

(ii) Interest rate risk

The Bank's income from conventional activities are derived from the difference between the interest generated on the asset side and the interest paid to third party funds. If not anticipated, changes in interest rates can result in a decrease in the Bank's income.

Interest rate risk has an effect to future cash flows fluctuation of both assets and liabilities. It can affect the Bank's interest income and fair value of the financial instruments.

The Subsidiary's main business is to provide financing with murabahah contracts. The murabahah margin income is affected by the financing price or interest rate in the conventional market.

Interest rate risk management

Policies adopted by the Bank and Subsidiary in managing its interest rate risk include:

- Monitoring of interest rate risk limit.
- Managing interest rate risk in accordance with relevant regulations and Bank's internal policies.
- Conduct simulation of net margin income calculation toward all possible market interest rate changes.

The tables below summarise the exposures of financial instruments of the Bank and Subsidiary to interest rate risks.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko pasar (lanjutan)

Market risk (continued)

(ii) Risiko tingkat bunga (lanjutan)

(ii) Interest rate risk (continued)

Manajemen risiko tingkat bunga (lanjutan)

Interest rate risk management (continued)

31 Desember/December 2020												
Suku bunga mengambang/Floating rate instrument				Bunga tetap/Fixed rate					Tidak dikenakan bunga/Non-interest bearing	Jumlah/Total		
≤ 1 bulan/month	1 - 3 bulan/months	> 3 - 6 bulan/months	> 6 - 12 bulan/months	≤ 1 bulan/month	1 - 3 bulan/months	> 3 - 6 bulan/months	> 6 - 12 bulan/months	> 12 bulan/months				
Liabilitas												
Liabilitas segera	-	-	-	-	-	-	-	-	(59,404)	(59,404)	<i>Obligations immediately</i>	
Simpanan dari nasabah	-	-	-	(73,049,011)	(15,721,013)	(3,201,647)	(869,897)	(23,972)	(268,383)	(93,133,923)	<i>customers</i>	
Simpanan dari bank-bank lain	-	-	-	(6,549,336)	-	-	-	-	(370)	(6,549,706)	<i>banks</i>	
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	-	-	-	-	(887,157)	(887,157)	<i>Derivative payables</i>	
Utang obligasi	-	-	-	-	-	-	-	-	(767,282)	(767,282)	<i>Acceptance payables</i>	
Pinjaman yang diterima	(22,852,789)	(1,000,000)	-	(1,353,258)	(4,164,868)	(1,693,374)	-	-	(7,379)	(1,000,424)	<i>Bonds payable</i>	
Pinjaman subordinasi	-	(6,111,750)	-	-	-	-	-	-	(119,055)	(31)	<i>Borrowings</i>	
Liabilitas lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,230)	(6,115,980)	<i>Subordinated loans</i>	
Jumlah liabilitas keuangan	(22,852,789)	(7,111,750)	-	(80,951,605)	(19,885,881)	(4,895,021)	(869,897)	(1,017,017)	(401,099)	(140,098,319)	<i>Total financial liabilities</i>	
Jumlah gap repricing suku bunga	4,112,228	9,920,932	1,828,792	-	(31,213,297)	(7,986,995)	2,509,338	15,412,827	41,934,373	3,944,795	40,463,593	<i>gap</i>
31 Desember/December 2019												
Suku bunga mengambang/Floating rate instrument				Bunga tetap/Fixed rate					Tidak dikenakan bunga/Non-interest bearing	Jumlah/Total		
≤ 1 bulan/month	1 - 3 bulan/months	> 3 - 6 bulan/months	> 6 - 12 bulan/months	≤ 1 bulan/month	1 - 3 bulan/months	> 3 - 6 bulan/months	> 6 - 12 bulan/months	> 12 bulan/months				
Aset												
Kas	-	-	-	-	-	-	-	-	2,299,062	2		
Giro pada Bank Indonesia	-	-	-	8,987,079	-	-	-	-	-	8	<i>Bank Indonesia</i>	
Giro pada bank-bank lain	-	-	-	1,056,904	-	-	-	-	-	1	<i>other banks</i>	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	-	-	-	7,254,104	485,000	370,000	805,000	-	-	8	<i>Placements with Bank Indonesia and other banks</i>	
Efek-efek	-	-	-	1,410,377	6,841,856	209,282	512,240	1,729,102	-	10		
Tagihan derivatif	-	-	-	-	-	-	-	-	840,372	-		
Tagihan akseptasi diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	1,692,460	1	<i>receivables</i>	
Aset lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>Other assets</i>	
keuangan, sebelum cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	5	-	7,327	10,801,86	45,174	-	-	<i>Total financial assets before allowance for impairment losses</i>	
Liabilitas												
Liabilitas segera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18,268)	<i>immediately</i>	
Simpanan dari nasabah	-	-	-	(62,855,495)	(13,792,455)	(1,906,146)	(1,028,813)	(16,507)	-	-	<i>customers</i>	
Simpanan dari bank-bank lain	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-	(<i>banks</i>	
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(<i>Derivative payables</i>	
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(<i>Acceptance payables</i>	
Surat utang jangka menengah	-	-	-	-	-	(1,301,409)	-	-	-	(<i>Medium term notes</i>	
Utang obligasi	-	-	-	-	-	-	(898,98)	(990,232)	-	(<i>Bonds payable</i>	
Pinjaman yang diterima	(25,293)	(8,983,721)	-	-	-	(2)	-	-	-	(<i>Borrowings</i>	
Pinjaman subordinasi	-	(6,045,193)	-	-	-	-	-	-	-	(<i>Subordinated loans</i>	
Liabilitas lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(<i>Other liabilities</i>	
Jumlah liabilitas keuangan	(25,293,593)	(15,028,914)	(727,186)	(71,740)	(16,634)	(5)	(1,927)	(1,668,982)	(2,3)	(141,125)	<i>Total financial liabilities</i>	
Jumlah gap repricing suku bunga	(896,550)	(1,762,350)	(608,832)	(20,658,787)	(340,721)	1,597,903	8,874,066	43,505,726	2,656,745	36,154,903	<i>gap</i>	

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko pasar (lanjutan)

Market risk (continued)

(ii) Risiko tingkat bunga (lanjutan)

(ii) Interest rate risk (continued)

Manajemen risiko tingkat bunga (lanjutan)

Interest rate risk management (continued)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas laba bersih Bank selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 atas kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga pasar, dengan asumsi bahwa tidak ada pergerakan asimetris di kurva imbal hasil:

The table below shows the sensitivity of the Bank's net profit during the years ended 31 December 2020 and 2019 due to an increase or decrease in market interest rates, assuming no asymmetrical movement in yield curves:

	(Penurunan) peningkatan laba bersih/ (Decrease) increase net profit		
	2020	2019	
Peningkatan 100 bps	8	(129)	Increased by 100 bps
Penurunan 100 bps	(21)	111	Decreased by 100 bps

Manajemen Risiko Permodalan

Capital Risk Management

Modal regulasi

Regulatory capital

Tujuan manajemen permodalan Bank dan Entitas Anak adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Bank dan Entitas Anak mempertimbangkan faktor-faktor seperti: pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan *gearing ratio* serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

The Bank and Subsidiary capital management objectives is to maintain a strong capital position to support business growth and to sustain investors, depositors, customers and market confidence. In managing its capital, the Bank and Subsidiary consider factors such as: providing optimal capital rate of return to shareholders and maintaining a balance between high return *gearing ratio* and safety provided by a sound capital position.

Sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) No. 11/POJK.03/2016 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan SEOJK No. 26/SEOJK.03/2016 tentang KPMM sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Adequacy Maintained Assets (CEMA)*, Bank wajib melakukan perhitungan KPMM minimum berdasarkan profil risiko dan melakukan *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)*. Peraturan ini juga mengatur tentang pemenuhan rasio modal inti (*Tier 1*) paling rendah sebesar 6% dan rasio modal inti utama (*Common Equity Tier 1*) paling rendah sebesar 4,5%, efektif sejak tanggal 1 Januari 2014.

According to OJK Regulation No. 11/POJK.03/2016 dated 12 December 2013 regarding *Capital Adequacy Ratio (CAR)* for Commercial Bank and SEOJK No. 26/SEOJK.03/2016 regarding *Capital Adequacy Ratio* based on Risk Profile and Fullfillment of *Capital Adequacy Maintained Assets (CEMA)*, the Bank is required to calculate minimum CAR in accordance to its risk profile and to perform *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)*. This regulation also stipulates minimum *Tier 1 ratio* at the minimum of 6% and common equity *Tier 1 ratio* at the minimum of 4.5%, effective on 1 January 2014.

Bank dan Entitas Anak telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan sepanjang tahun.

The Bank and Subsidiary have complied with all externally imposed capital requirements throughout the year.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Manajemen Risiko Permodalan (lanjutan)

Capital Risk Management (continued)

Modal regulasi (lanjutan)

Regulatory capital (continued)

Posisi permodalan Bank dan Entitas Anak berdasarkan peraturan OJK yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The Bank and Subsidiary's regulatory capital position under the prevailing OJK regulation as of 31 December 2020 and 2019 were as follows:

	31 Desember/December		
	2020	2019	
KONSOLIDASI			CONSOLIDATED
Aset tertimbang menurut risiko			Risk weighted assets
- Dengan memperhitungkan risiko kredit	118,425,350	124,368,632	With credit risk charge -
- Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	141,752,434	142,780,626	With credit, operational risk -
- Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	142,253,917	143,582,952	charge With credit, operational and market -
			risk charge
Modal			Capital
- Modal inti	29,426,916	27,259,773	Core capital -
- Modal pelengkap	6,920,396	7,543,294	Supplementary capital -
	<u>36,347,312</u>	<u>34,803,067</u>	
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum			Capital adequacy ratio
- Dengan memperhitungkan risiko kredit	30.69%	27.98%	With credit risk charge -
- Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	25.64%	24.38%	With credit, operational risk -
- Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	25.55%	24.24%	charge With credit, operational and market -
			risk charge
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia	9% sampai dengan kurang dari 10%/9% to less than 10%	9% sampai dengan kurang dari 10%/9% to less than 10%	Minimum capital adequacy ratio required by Bank Indonesia
- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	25.55%	24.24%	Capital Adequacy Ratio -
- Rasio CET 1	20.69%	18.99%	CET 1 ratio -
- Rasio tier 1	20.69%	18.99%	Tier 1 ratio -
- Rasio tier 2	4.86%	5.25%	Tier 2 ratio -
BANK			BANK
Aset tertimbang menurut risiko			Risk weighted assets
- Dengan memperhitungkan risiko kredit	112,502,125	117,335,520	With credit risk charge -
- Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	128,348,112	131,011,596	With credit, operational risk -
- Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	128,849,595	131,813,922	charge With credit, operational and market -
			risk charge
Modal			Capital
- Modal inti	25,588,377	23,521,707	Core capital -
- Modal pelengkap	6,862,846	7,465,961	Supplementary capital -
	<u>32,451,223</u>	<u>30,987,668</u>	
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum			Capital adequacy ratio
- Dengan memperhitungkan risiko kredit	28.84%	26.41%	With credit risk charge -
- Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	25.28%	23.65%	With credit, operational risk -
- Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	25.19%	23.51%	charge With credit, operational and market -
			risk charge
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia	9% sampai dengan kurang dari 10%/9% to less than 10%	9% sampai dengan kurang dari 10%/9% to less than 10%	Minimum capital adequacy ratio required by Bank Indonesia
- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	25.19%	23.51%	Capital Adequacy Ratio -
- Rasio CET 1	19.86%	17.84%	CET 1 ratio -
- Rasio tier 1	19.86%	17.84%	Tier 1 ratio -
- Rasio tier 2	5.33%	5.66%	Tier 2 ratio -

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Manajemen Risiko Permodalan (lanjutan)

Capital Risk Management (continued)

Modal regulasi (lanjutan)

Regulatory capital (continued)

	31 Desember/December		
	2020	2019	
ENTITAS ANAK			SUBSIDIARY
Modal inti	5,544,726	5,138,209	Core capital
Modal pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)	74,040	87,914	Supplementary capital (maximum at 100% from core capital)
Jumlah modal	5,618,766	5,226,123	Total capital
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)			Risk Weighted Assets (RWA)
Risiko Kredit	5,370,131	6,988,540	Credit Risk
Risiko Operasional	5,995,479	4,737,446	Operational Risk
Rasio total	49.44%	44.57%	Total ratio
Rasio KPMM yang diwajibkan	9% - 10%	9% - 10%	Minimum CAR

Manajemen menggunakan peraturan rasio permodalan untuk memantau kecukupan modal, sesuai dengan standar industri. Pendekatan Bank Indonesia untuk pengukuran modal tersebut terutama didasarkan pada pemantauan kebutuhan modal yang diwajibkan terhadap modal yang tersedia.

Management uses regulatory capital ratios in order to monitor its capital base and these capital ratios remain the industry standards for measuring capital adequacy. BI's approach to such measurement is primarily based on monitoring the relationship of the capital resources requirement to available capital resources.

Estimasi nilai wajar instrumen keuangan

Fair value estimation of financial instruments

Untuk aset dan liabilitas keuangan yang diukur menggunakan nilai wajar, berikut ini adalah hirarki nilai wajar:

For financial assets and liabilities measured at fair value, the following is the hierarchy of the fair values:

- Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya turunan harga); dan
- Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

- Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2
Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (that is as prices) or indirectly (that is derived from prices); and
- Level 3
Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Bank dan Entitas Anak yang diukur sebesar nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

The tables below show the Bank and Subsidiary's financial assets and liabilities that were measured at fair value as of 31 December 2020 and 2019:

	2020	2019	
Penyertaan saham			Investment in shares
Liabilitas derivatif			Derivative payables



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Estimasi nilai wajar instrumen keuangan
(lanjutan)

Fair value estimation of financial instruments
(continued)

31 Desember/December 2019					
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Nilai wajar/ Fair value
Aset					
Efek-efek	5,679,762	-	5,679,762	-	5,679,762
Tagihan derivatif	840,372	-	840,372	-	840,372
Penyertaan saham	22,522	-	-	22,522	22,522
	<u>6,542,656</u>	<u>-</u>	<u>6,520,134</u>	<u>22,522</u>	<u>6,542,656</u>
Liabilitas					
Liabilitas derivatif	894,947	-	894,947	-	894,947

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya:

The table below summarises the carrying amounts and fair values of those financial instruments not stated at their fair values:

	31 Desember/December 2020		31 Desember/December 2019		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset					Assets
Giro pada Bank Indonesia	5,616,968	5,616,968	8,987,079	8,987,079	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank-bank lain	896,071	896,071	1,056,904	1,056,904	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	17,004,339	17,004,339	8,914,104	8,914,104	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	5,188,663	5,294,549	10,702,851	10,657,240	Securities
Tagihan akseptasi	1,484,939	1,484,939	1,692,391	1,692,391	Acceptance receivables
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	133,469,850	135,506,563	141,120,343	143,364,681	Loans and sharia financing/receivables
Aset lain-lain	267,874	267,874	177,188	177,188	Other assets
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas segera	59,404	59,404	18,268	18,268	Obligation due immediately
Bagi hasil yang belum dibagikan	18,666	18,665	21,861	21,861	Undistributed revenue sharing
Simpanan nasabah	93,133,923	93,133,923	79,599,416	79,599,416	Deposits from customers
Simpanan dari bank-bank lain	6,549,706	6,549,706	11,690,555	11,690,555	Deposits from other banks
Liabilitas akseptasi	767,282	767,282	888,459	888,459	Acceptance payables
Surat utang jangka menengah	-	-	1,306,441	1,323,732	Medium term notes
Utang obligasi	1,000,424	1,024,774	1,910,473	1,921,161	Bonds payable
Pinjaman yang diterima	31,183,344	35,060,282	38,188,926	38,218,199	Borrowings
Liabilitas lain-lain	401,099	401,099	582,809	582,809	Other liabilities

Nilai wajar dari efek-efek yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun diestimasi menggunakan nilai kuotasi pasar terakhir (level 2 - hirarki nilai wajar).

The fair value for securities, which maturity date is more than 1 year, are estimated using the last quoted market price (level 2 - fair value hierarchy).

Estimasi nilai wajar dari pinjaman yang diberikan mencerminkan jumlah diskonto dari estimasi kini dari arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima. Arus kas masa depan yang diharapkan didiskontokan pada tingkat suku bunga pasar terkini untuk menentukan nilai wajar (level 3 - hirarki nilai wajar).

The estimated fair value of loans represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received. Estimated cash flows are discounted at current market rates to determine fair value (level 3 - fair value hierarchy).

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Estimasi nilai wajar instrumen keuangan
(lanjutan)

Fair value estimation of financial instruments
(continued)

Nilai tercatat dari pembiayaan syariah merupakan perkiraan yang layak atas nilai wajar dikarenakan pinjaman tersebut memiliki tenor jangka pendek.

Carrying value of sharia financing approximates the estimates fair value since sharia financing have short-term tenure.

Nilai wajar surat utang jangka menengah dihitung menggunakan teknik penilaian berdasarkan model internal Bank yaitu model penilaian diskonto arus kas. Input dalam teknik penilaian termasuk arus kas yang akan diterima di masa datang dan suku bunga pasar (level 2 - hirarki nilai wajar).

The fair value of medium term notes was calculated using valuation technique based on the Bank's internal model which is discounted cash flow valuation model. Inputs into the valuation technique include expected future cash flows and interest rates (level 2 - fair value hierarchy).

Nilai wajar utang obligasi diestimasi menggunakan nilai kuotasi pasar terakhir (level 2 - hirarki nilai wajar).

The fair value of bonds payable is estimated by using the last quoted market price (level 2 - fair value hierarchy).

Nilai wajar dari pinjaman yang diterima dinilai dengan menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga efektif yang dikenakan pada pinjaman terakhir yang digunakan (level 2 - hirarki nilai wajar).

The fair value of borrowings is estimated by using discounted cash flows applying the effective interest rate charged by the lender for the last utilization of borrowings (level 2 - fair value hierarchy).

Nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya mendekati nilai wajarnya karena instrumen keuangan bersifat jangka pendek atau yang ditinjau ulang menggunakan harga pasar secara berkala.

The carrying amount of remaining financial assets and financial liabilities are reasonable approximation of fair value because they are short term in nature or re-price to current market rates frequently.

Perhitungan nilai wajar dilakukan hanya untuk kepentingan pengungkapan dan tidak berdampak pada pelaporan posisi atau kinerja keuangan Bank dan Entitas Anak. Nilai wajar yang dihitung oleh Bank dan Entitas Anak mungkin berbeda dengan jumlah aktual yang akan diterima/dibayar pada saat penyelesaian atau jatuh tempo instrumen keuangan. Mengingat kategori tertentu instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan, maka terdapat pertimbangan manajemen dalam perhitungan nilai wajar.

The fair values calculated are for disclosure purposes only and do not have any impact on the Bank and Subsidiary's reported financial performance or position. The fair values calculated by the Bank and Subsidiary may be different from the actual amount that will be received/paid on the settlement or maturity of the financial instrument. As certain categories of financial instruments are not traded, there is management judgment involved in calculating the fair values.

Risiko operasional

Operational risk

Risiko operasional adalah risiko kerugian akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Operational risk is defined as the risks of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people, systems failure and/or external events that impacted to the bank's operational activities.



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko operasional (lanjutan)

Operational risk (continued)

Tata Kelola Pengelolaan Risiko Operasional

Operational Risk Management Governance

Risiko operasional dikelola melalui kerangka kerja, kebijakan dan prosedur dengan struktur tata kelola Manajemen Risiko Operasional menggunakan model *Three Lines of Defence* atau pertahanan tiga Lapis. Pada lapis pertahanan pertama, seluruh unit kerja selaku *Risk Taking Unit* (RTU) adalah sebagai pemilik risiko (*risk owner*) yang bertanggung jawab secara langsung untuk mengelola dan mengontrol risiko operasional di proses dan aktivitasnya masing-masing. RTU bertanggungjawab untuk melaksanakan perangkat kerja dan program Manajemen Risiko Operasional sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku, Bank juga telah membentuk fungsi ICR (*Internal Control & Risk*) yang berperan dalam membantu *Risk Taking Unit* (RTU) dalam sistem pengendalian internal dari setiap proses atau aktivitas sehari-hari.

Operational risk are managed through framework, policies and procedures with the Operational Risk Management governance structure using the Three Lines of Defense model. In the first line of defense, all work units as Risk Taking Units (RTU) are the risk owner who are directly responsible for managing and controlling operational risk in their respective processes and activities. The RTU is responsible for implementing Operational Risk Management work tools and programs in accordance with applicable policies and procedures, the Bank has also established an ICR (Internal Control & Risk) function which plays a role in assisting the Risk Taking Unit (RTU) in the internal control system of each process or activity daily.

Pada lapis pertahanan kedua, Divisi ORM (*Operational Risk Management*) membuat kerangka kerja, kebijakan dan prosedur serta mengembangkan metodologi, perangkat kerja dan inisiatif lainnya untuk meningkatkan pengelolaan risiko operasional Bank. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko Operasional dikaji ulang secara reguler untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi Bank. Divisi ORM secara periodik melaporkan risiko operasional kepada Direksi dan BoM (*Board of Management*) melalui Komite Manajemen Risiko.

At the second line of defense, the ORM (Operational Risk Management) Division develops frameworks, policies and procedures as well as develops methodologies, work tools and other initiatives to improve the Bank's operational risk management. Operational Risk Management policies and procedures are reviewed regularly to ensure conformity with Bank conditions. The ORM Division periodically reports operational risks to the Board of Directors and BoM (Board of Management) through the Risk Management Committee.

Pada lapis pertahanan ketiga, Internal Audit melakukan pelaksanaan kaji ulang independen atas manajemen risiko operasional secara periodik kepada RTU dan Divisi ORM untuk menilai dan memberikan rekomendasi perbaikan.

At the third line of defense, Internal Audit conducts periodic independent reviews of operational risk management to the RTU and ORM Division to assess and provide recommendations for improvements.

Koordinasi diantara pihak-pihak yang terkait tersebut diatas di dalam manajemen risiko operasional juga dilakukan melalui forum-forum maupun rapat secara periodik.

Coordination among the related parties mentioned above in operational risk management is also carried out through forums and periodic meetings.

Manajemen Risiko Operasional

Operational Risk Management

Bank dan Entitas Anak memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Operasional untuk memastikan proses manajemen risiko operasional yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko berjalan secara terstruktur dan konsisten. Proses Manajemen Risiko Operasional diterapkan berdasarkan praktik terbaik yang efektif untuk Bank yang juga mencakup *Business Continuity Management* dan *Information Security Risk*.

The Bank and Subsidiaries have an Operational Risk Management Policy to ensure that the operational risk management process which includes identification, measurement, monitoring and risk control runs in a structured and consistent manner. The Operational Risk Management process is implemented based on effective best practices for the Bank which also includes Business Continuity Management and Information Security Risk.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko operasional (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)

Tahapan proses Manajemen Risiko Operasional yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian atas risiko operasional adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko Operasional dilakukan melalui Kajian Risiko Operasional atas setiap produk atau proses atau layanan baik yang baru atau yang dimodifikasi. Risiko-risiko operasional yang teridentifikasi dari setiap proses disusun ke dalam tabel PRC (*Process Risk Control*) dan tingkat risiko diukur dengan menggunakan RGM (*Risk Grading Matrix*). Beberapa risiko utama yang diidentifikasi pada PRC akan menjadi indikator yang akan dimonitor secara berkala sebagai *Key Operational Risk Indicator (KORI)*. Laporan *Risk Acceptance* digunakan untuk mengidentifikasi risiko-risiko residual atau yang masih ada akibat adanya ketidakcukupan sistem pengendalian.
2. Pengukuran Risiko Operasional dilakukan dengan melalui pencatatan dan/atau pembukuan atas kejadian risiko operasional, indikator dan limit risiko operasional yang telah ditetapkan sebagai *Operational Risk Appetite*, pelaksanaan KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) dan KCSA (*Key Control Self Assessment*), pelaporan KORI (*Key Operational Risk Indicator*) dan Perhitungan Beban Modal untuk Risiko Operasional.
3. Pemantauan Risiko Operasional dilakukan dengan analisa pada berbagai macam laporan seperti Laporan *Risk/Loss Event*, Laporan KORI, Laporan SINP (*Significant Incident Notification Protocol*), Laporan Pelaksanaan KCSA (*Key Control Self Assessment*), Laporan Profil Risiko dan laporan hasil ICR serta parameter yang sudah ditentukan oleh regulator di dalam Profil Risiko Operasional.
4. Pengendalian risiko operasional dilakukan melalui berbagai rencana tindakan dimana salah satunya adalah transfer risiko dengan perlindungan asuransi. Bank juga menerapkan kerangka kerja *Business Continuity Management (BCM)* sebagai bentuk pengendalian risiko operasional. Pelatihan (training) secara regular dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran RTU terhadap manajemen risiko operasional.

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Operational risk (continued)

Operational Risk Management (continued)

The stages of the Operational Risk Management process which include identification, measurement, monitoring and control of operational risk are as follows:

1. *Operational Risk identification is carried out through an Operational Risk Assessment of each product or process or service, whether new or modified. The operational risks identified from each process are compiled into a PRC (Process Risk Control) table and the level of risk is measured using the RGM (Risk Grading Matrix). Some of the main risks identified in the PRC will be indicators that will be monitored periodically as Key Operational Risk Indicators (KORI). The Risk Acceptance Report is used to identify residual or remaining risks due to an inadequate control system.*
2. *Measurement of Operational Risk is carried out by recording and / or accounting for operational risk events, indicators and operational risk limits that have been determined as Operational Risk Appetite, implementation of KKP (Examination Working Paper) and KCSA (Key Control Self Assessment), KORI (Key Operational Risk Indicator) and Calculation of Capital Expenses for Operational Risk.*
3. *Operational Risk monitoring is carried out by analyzing various reports such as Risk / Loss Event Reports, KORI Reports, SINP Reports (Significant Incident Notification Protocol), KCSA Implementation Reports (Key Control Self Assessment), Risk Profile Reports and ICR results reports and parameters that have been determined by the regulator in the Operational Risk Profile.*
4. *Operational risk control is carried out through various action plans, one of which is risk transfer with insurance protection. The Bank also implements a Business Continuity Management (BCM) framework as a form of operational risk control. Regular training is conducted to increase RTU's understanding and awareness of operational risk management.*



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko operasional (lanjutan)

Operational risk (continued)

Pengelolaan Risiko Operasional (lanjutan)

Operational Risk Management (continued)

Proses pengelolaan risiko operasional sehari-hari baik di Bank maupun Entitas Anak dilakukan melalui ORMS (Operational Risk Management System) yang merupakan aplikasi online real-time untuk memudahkan pencatatan, analisis, dan pelaporan dari data risiko operasional, dengan kemampuan melakukan identifikasi risiko, penilaian/pengukuran, pemantauan dan pengendalian/mitigasi yang dilaksanakan secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dari pengelolaan risiko operasional.

The daily operational risk management process at both the Bank and Subsidiary are carried out through an ORMS (Operational Risk Management System) which is a real-time online application to facilitate recording, analysis and reporting of operational risk data, with the ability to carry out risk identification, assessment/measurement, monitoring and control / mitigation which are carried out in an integrated manner, so as to increase the effectiveness of operational risk management.

Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk risiko operasional yang dilakukan oleh Bank dan Entitas Anak saat ini menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*). Selanjutnya KPMM dengan Pendekatan Standar (*Standardized Approach*) akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

The calculation of the Capital Adequacy Ratio (KPMM) for operational risk is currently carried out by the Bank and Subsidiary using the Basic Indicator Approach. Furthermore, KPMM with the Standardized Approach will be carried out according to the schedule set by the Financial Services Authority.

Bank dan Entitas Anak telah memiliki pedoman bagi Pengelolaan Kelangsungan Usaha yang komprehensif dan mengacu kepada standard industri ISO 22301, dengan tujuan untuk mengantisipasi risiko operasional yang dapat terjadi dari situasi ekstrim/kritikal karena bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan juga faktor lainnya seperti kebakaran, gangguan sistem pasokan listrik, hingga situasi bisnis yang kurang menguntungkan. Hal ini untuk memastikan kelangsungan layanan kepada nasabah tetap terjamin.

The Bank and Subsidiary have guidelines for comprehensive Business Continuity Management and refer to the ISO 22301 industry standard, with the aim of anticipating operational risks that can occur from extreme / critical situations due to natural disasters such as floods, earthquakes and other factors such as fire, power supply system disruption, to an unfavorable business situation. This is to ensure continuity of service to customers is guaranteed.

Sejak awal penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, Bank senantiasa berusaha untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 di lingkungan kantor dengan membentuk suatu satuan gugus tugas yang dikepalai langsung oleh Direktur Utama. Adapun tujuan utama satuan gugus tugas Bank ini yaitu membuat dan melakukan langkah-langkah antisipasi yang juga menyelaraskan dengan program pemerintah guna memastikan kegiatan operasional Bank tetap dapat berjalan tanpa gangguan yang berarti.

Since the beginning of COVID-19 virus outbreak in Indonesia, the Bank continuously makes an effort to minimize the outbreak of COVID-19 virus at the office environment by establishing a Task Force which is directly led by the President Director. The Task Force's main purpose is to establish and implement anticipative approaches which are aligned with the government program to ensure that the Bank can still operate its operational activities with minimum disruption.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING

43. ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES

Saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut :

The balances of monetary assets and liabilities in foreign currencies are as follows :

ASET	2020	2019	ASSETS
Kas			Cash
Dolar Amerika Serikat	31,151	26,954	United States Dollar
Yen Jepang	2,562	1,664	Japanese Yen
	<u>33,713</u>	<u>28,618</u>	
Giro pada Bank Indonesia			Current accounts with Bank Indonesia
Dolar Amerika Serikat	1,765,671	3,643,053	United States Dollar
Giro pada bank-bank lain			Current accounts with other banks
Yen Jepang	184,496	575,604	Japanese Yen
Dolar Amerika Serikat	163,516	158,708	United States Dollar
Dolar Singapura	32,465	46,378	Singapore Dollar
Euro Eropa	82,967	35,410	European Euro
Baht Thailand	3,024	15,955	Thailand Baht
Poundsterling Inggris	10,421	7,257	Great Britain Poundsterling
Dolar Australia	15,636	3,173	Australian Dollar
Lain-lain	1,772	1,596	Others
	<u>494,297</u>	<u>844,081</u>	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain			Placements with Bank Indonesia and other banks
Dolar Amerika Serikat	1,700,050	4,484,048	United States Dollar
Efek-efek			Securities
Dolar Amerika Serikat	1,178,879	769,663	United States Dollar
Tagihan derivatif			Derivative receivables
Dolar Amerika Serikat	112,749	61,947	United States Dollar
Tagihan akseptasi			Acceptance receivables
Dolar Amerika Serikat	948,581	830,727	United States Dollar
Euro Eropa	-	13,811	European Euro
	<u>948,581</u>	<u>844,538</u>	
Pinjaman yang diberikan			Loans
Dolar Amerika Serikat	39,814,890	36,794,960	United States Dollar
Yen Jepang	951,191	943,701	Japanese Yen
Euro Eropa	181,335	-	European Euro
	<u>40,947,416</u>	<u>37,738,661</u>	
Aset lain-lain			Other assets
Dolar Amerika Serikat	21,304	11,917	United States Dollar
Euro Eropa	233	210	European Euro
	<u>21,537</u>	<u>12,127</u>	
Jumlah aset	<u>47,202,893</u>	<u>48,426,736</u>	Total assets



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG
ASING (lanjutan)

43. ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN
CURRENCIES (continued)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
LIABILITAS			LIABILITIES
Giro			<i>Current accounts</i>
Dolar Amerika Serikat	7,530,996	7,866,301	<i>United States Dollar</i>
Yen Jepang	708,484	1,036,827	<i>Japanese Yen</i>
Lain-lain	61,417	40,075	<i>Others</i>
	<u>8,300,897</u>	<u>8,943,203</u>	
Tabungan			<i>Savings deposits</i>
Dolar Amerika Serikat	284,829	95,712	<i>United States Dollar</i>
Dolar Singapura	27,912	34,794	<i>Singapore Dollar</i>
Yen Jepang	19,915	17,854	<i>Japanese Yen</i>
Lain-lain	32,472	-	<i>Others</i>
	<u>365,128</u>	<u>148,360</u>	
Deposito berjangka dan deposito <i>on call</i>			<i>Time deposits and deposits on call</i>
Dolar Amerika Serikat	1,642,745	2,931,131	<i>United States Dollar</i>
Yen Jepang	49,524	48,982	<i>Japanese Yen</i>
	<u>1,692,269</u>	<u>2,980,113</u>	
Simpanan dari bank-bank lain			<i>Deposits from other banks</i>
Dolar Amerika Serikat	6,533,250	7,288,212	<i>United States Dollar</i>
Liabilitas derivatif			<i>Derivative payables</i>
Dolar Amerika Serikat	102,634	54,728	<i>United States Dollar</i>
Liabilitas akseptasi			<i>Acceptance payables</i>
Dolar Amerika Serikat	489,089	317,218	<i>United States Dollar</i>
Euro Eropa	-	13,811	<i>European Euro</i>
	<u>489,089</u>	<u>331,029</u>	
Pinjaman yang diterima			<i>Borrowings</i>
Dolar Amerika Serikat	22,508,100	31,193,978	<i>United States Dollar</i>
Euro Eropa	344,689	-	<i>European Euro</i>
	<u>22,852,789</u>	<u>31,193,978</u>	
Pinjaman subordinasi			<i>Subordinated loans</i>
Dolar Amerika Serikat	6,111,750	6,038,888	<i>United States Dollar</i>
Liabilitas lain-lain			<i>Other liabilities</i>
Dolar Amerika Serikat	75,452	158,696	<i>United States Dollar</i>
Yen Jepang	4,672	3,050	<i>Japanese yen</i>
	<u>80,124</u>	<u>161,746</u>	
Jumlah liabilitas	<u>46,527,930</u>	<u>57,140,257</u>	Total liabilities
Aset (liabilitas) bersih	<u>674,963</u>	<u>(8,713,521)</u>	Net assets (liabilities)

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**44. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS
PEMBAYARAN BANK UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008, dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), maka pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp 2.000 untuk per nasabah per bank.

Berdasarkan Siaran Pers No. 26/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020, simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau di bawah 5,25% untuk simpanan dalam Rupiah dan 1,50% untuk simpanan dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2020 (31 Desember 2019: masing-masing 6,50% dan 2,00%).

Berdasarkan Siaran Pers No. PRESS-38/SEKL/2020 tanggal 24 November 2020, tingkat bunga penjaminan LPS mengalami penurunan menjadi 4,50% untuk simpanan dalam Rupiah dan 1,00% untuk simpanan dalam mata uang asing.

Bank dan Entitas Anak adalah peserta dari program penjaminan tersebut. Premi yang telah dibayarkan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah Rp 187.955 dan Rp 189.114.

**44. GOVERNMENT GUARANTEE ON OBLIGATIONS
OF COMMERCIAL BANKS**

Based on Law No. 24 dated 22 September 2004, effective on 22 September 2005, which was amended by the Government Regulation as Substitution of Law No. 7 Year 2009 dated 13 January 2009 regarding with the Determination of Government Regulation as Substitution of Law No. 3 Year 2008, Deposit Insurance Agency ("LPS") was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, which the amount of guarantee can be amended if the situation complies with the valid particular criterias.

Based on Government Regulation No. 66 year 2008 dated 13 October 2008 regarding The Amount of Deposit Guaranteed by Indonesia Deposit Insurance Agency (LPS), the amount of deposits covered by LPS is customer deposits up to Rp 2,000 per depositor per bank as of 31 December 2020 and 2019.

Based on Press Release No. 26/VII/2020 dated 29 July 2020, customer deposits are only covered if the rate of interest is equal to or below 5.25% for deposits denominated in Rupiah and 1.50% for deposits denominated in foreign currency as of 31 December 2020 (31 December 2019: 6.50% and 2.00%, respectively).

Based on Press Release No. PRESS-39/SEKL/2020 dated 24 November 2020, the guaranteed interest rate by LPS has decreased to 4.50% for deposits denominated in Rupiah and 1.00% for deposit denominated in foreign currency.

The Bank and Subsidiary both are participants of the guarantee program. Premium paid for the years ended 31 December 2020 and 2019 was Rp 187,955 and Rp 189,114, respectively.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**45. STANDAR AKUNTANSI YANG DITERBITKAN
NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) relevan yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

PSAK yang akan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021:

- PSAK No. 112 "Akuntansi Wakaf",
- Amandemen PSAK No. 22 (Amandemen 2019), "Kombinasi Bisnis: Definisi Bisnis",
- Amendemen PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan",
- Amendemen PSAK No 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran",
- Amendemen PSAK No. 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan",
- Amendemen PSAK No. 73 "Sewa"
- Penyesuaian PSAK No. 110, "Akuntansi Sukuk"
- Penyesuaian PSAK No. 111, "Akuntansi Wa'd"

PSAK yang akan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022:

- Amandemen PSAK No. 22 "Kombinasi Bisnis: Referensi ke Kerangka Konseptual",
- Amandemen PSAK No. 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak",
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan",
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73 "Sewa"

PSAK yang akan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023:

- Amandemen PSAK No. 1 "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang"

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Bank dan Entitas Anak masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru tersebut serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan konsolidasian.

**45. ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE ACCOUNTING
STANDARDS**

The relevant Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards (DSAK) but not yet effective for the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2020 are as follows:

PSAK that will become effective on 1 January 2021:

- *PSAK No. 112 "Accounting for Endowments",*
- *Amendments to PSAK No. 22 (2019 Amendment), "Business Combinations: Definition of Business)"*
- *Amendments to PSAK No. 71, "Financial Instruments",*
- *Amendments to PSAK No. 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement",*
- *Amendments to PSAK No. 60 "Financial Instruments: Disclosures",*
- *Amendments to PSAK No. 73 "Leases"*
- *Improvements to PSAK No. 110, "Sukuk Accounting"*
- *Improvements to PSAK No. 110, "Wa'd Accounting"*

PSAK that will become effective on 1 January 2022:

- *Amendments to PSAK No. 22 "Business Combination Reference to Conceptual Framework",*
- *Amendments to PSAK No. 57 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts - Cost of Fulfilling a Contract",*
- *Annual improvements to PSAK No. 71 "Financial Instruments",*
- *Annual improvements to PSAK No. 73 "Leases"*

PSAK that will become effective on 1 January 2023:

- *Amendments to PSAK No. 1 "Presentation of Financial Statements: Classification of Liabilities as Current or Non-current"*

As at the authorization date of these consolidated financial statements, the Bank and Subsidiary are still evaluating the potential impact of the new standard to the consolidated financial statements.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. REKONSILIASI UTANG BERSIH**46. NET DEBT RECONCILIATION**

	Pinjaman yang diterima/ <i>Borrowings</i>	Utang obligasi/ <i>Bonds payable</i>	Surat utang jangka menengah/ <i>Medium term notes</i>	Pinjaman subordinasi/ <i>Subordinated loans</i>	Liabilitas sewa/ <i>Lease liabilities</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Utang bersih tanggal 1 Januari 2019	8,556,874	1,217,317	-	-	-	9,774,191	<i>Net debt as of 1 January 2019</i>
Efek dari penggabungan usaha	30,221,176	-	1,314,228	6,108,270	-	37,643,674	<i>Effect of merger Cash flows</i>
Arus kas	(559,079)	690,008	-	-	-	130,929	<i>Cash flows</i>
Perubahan lain*)	(30,045)	(13,074)	8,435	(63,077)	-	(97,761)	<i>Other changes *)</i>
Utang bersih tanggal 31 Desember 2019	38,188,926	1,894,251	1,322,663	6,045,193	-	47,451,033	<i>Net debt as of 31 December 2019</i>
Dampak penerapan awal PSAK 73 (Catatan 2d)	-	-	-	-	658,399	658,399	<i>Effect of initial implementation of PSAK 73 (Notes 2d)</i>
Arus kas	(6,987,026)	(874,920)	(1,322,663)	-	(173,566)	(9,358,175)	<i>Cash flows</i>
Perubahan lain*)	(18,556)	(18,906)	-	70,787	104,903	138,228	<i>Other changes *)</i>
Utang bersih tanggal 31 Desember 2020	31,183,344	1,000,425	-	6,115,980	589,736	38,889,485	<i>Net debt as of 31 December 2020</i>

*) Perubahan lain termasuk pergerakan non-kas yang merupakan dampak perubahan selisih kurs, amortisasi biaya transaksi, dan akrual beban bunga

*) Other changes include non-cash movements which are effect of exchange rate, amortisation of transaction cost, and accrued interest expenses

47. DAMPAK PENERAPAN AWAL PSAK 71**47. IMPACT OF INITIAL IMPLEMENTATION OF PSAK 71**

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2d, Bank menerapkan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020.

As described in Note 2d, the Bank adopted PSAK 71 as of 1 January 2020.

Tabel berikut menunjukkan kategori klasifikasi awal sesuai dengan PSAK 55 dan kategori klasifikasi baru berdasarkan PSAK 71 untuk aset keuangan pada tanggal 1 Januari 2020.

The following table shows the original classification categories in accordance with PSAK 55 and the new classification categories under PSAK 71 for financial assets as of 1 January 2020.

Karena PSAK 71 mempertahankan hampir semua ketentuan klasifikasi liabilitas keuangan PSAK 55, tidak ada perubahan dalam klasifikasi liabilitas keuangan Bank sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71.

Since PSAK 71 largely retains the requirement in PSAK 55 for the classification of financial liabilities, there are no changes in the classification of the Bank's financial liabilities before and after the adoption of PSAK 71.

Cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dihitung kembali sesuai dengan ketentuan transisi PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020 dan perbedaan yang dihasilkan menyebabkan kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai dari 31 Desember 2019 sebesar Rp 497.165, didebitkan ke saldo laba tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp 372.874 setelah pajak.

The allowance for impairment loss for financial instruments was recalculated in accordance with transitional provisions of PSAK 71 as of 1 January 2020 and the resulting difference created an increase from allowance for impairment loss for financial instruments as of 31 December 2019 by Rp 497,165, debited to retained earnings at 1 January 2020 amounting to Rp 372,874, net of tax.



PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

47. DAMPAK PENERAPAN AWAL PSAK 71 (lanjutan)

Tabel berikut ini menunjukkan akun-akun dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang terdampak oleh transisi PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020:

47. IMPACT OF INITIAL IMPLEMENTATION OF PSAK 71 (continued)

The following table reflects accounts in the consolidated statement of financial position which were affected by the transition of PSAK 71 as of 1 January 2020:

	Kategori yang didefinisikan oleh/ Category as defined by:		Dampak penerapan awal PSAK 71/ Impact of initial implementation of PSAK 71			
	PSAK 55	PSAK 71	PSAK 55 31 Desember/ December 2019	PSAK 71 1 Januari/ January 2020		
Aset Keuangan						Financial Assets
Giro pada Bank Indonesia	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	8,987,079	-	8,987,079	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank-bank lain	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	1,056,904	-	1,056,904	Current accounts with other banks
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai			-	(95)	(95)	Less: Allowance for impairment losses
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	8,914,104	-	8,914,104	Placements with Bank Indonesia and other banks
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai			-	(409)	(409)	Less: Allowance for impairment losses
Efek-efek (di luar efek syariah dan pendapatan bunga yang masih akan diterima	Dimiliki hingga jatuh tempo/Held-to-maturity	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	1,791,330	-	1,791,330	Securities (exclude sharia securities and accrued interest income)
	Tersedia untuk dijual/ Available-for-sale	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Fair value through other comprehensive income	5,599,577	-	5,599,577	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	1,191,965	-	1,191,965	
			(6)	(452)	(458)	Less: Allowance for impairment losses
Tagihan derivatif	Nilai wajar melalui laba rugi/ Fair value through profit or loss	Nilai wajar melalui laba rugi/ Fair value through profit or loss	840,372	-	840,372	Derivative receivables
Tagihan akseptasi	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	1,692,460	-	1,692,460	Acceptance receivables
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai			(69)	(2,611)	(2,680)	Less: Allowance for impairment losses
Pinjaman yang diberikan dan p	Pinjaman yang ...		133,498,367	-	133,498,367	Loans
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai			(1,175,080)	(460,214)	(1,635,294)	Less: Allowance for impairment losses
Penyertaan saham	dijual/ Available-for-	laba rugi/ through	22,522	-	22,522	Investment in shares
Aset lain-lain dan p			177,188	-	177,188	Other assets
Pindahan				(463,781)		Carry forward

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

47. DAMPAK PENERAPAN AWAL PSAK 71
(lanjutan)

47. IMPACT OF INITIAL IMPLEMENTATION OF
PSAK 71 (continued)

	Kategori yang didefinisikan oleh: Category as defined by:		PSAK 55 31 Desember/ December 2019	Dampak penerapan awal PSAK 71/ Impact of initial implementation of PSAK 71	PSAK 71 1 Januari/ January 2020	
	PSAK 55	PSAK 71				
Pindahan				(463,781)		Carry forward
Liabilitas keuangan						Financial Liabilities
Liabilitas segera	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	(18,268)	-	(18,268)	Obligation due immediately
Simpanan nasabah	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	(79,599,416)	-	(79,599,416)	Deposits from customers
Simpanan dari bank-bank lain	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	(11,690,555)	-	(11,690,555)	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	(894,947)	-	(894,947)	Derivative payables
Liabilitas akseptasi	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	(888,459)	-	(888,459)	Acceptance payables
Efek-efek yang diterbitkan	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	(3,216,914)	-	(3,216,914)	Securities issued
Pinjaman yang diterima	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	(38,188,926)	-	(38,188,926)	Borrowings
Akrua	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	(451,386)	-	(266,545)	Accruals
Liabilitas lain-lain	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	(582,809)	(33,384)	(616,193)	Other liabilities
Pinjaman subordinasi	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	(6,045,193)	-	(6,045,193)	Subordinated loans
			Jumlah	(497,165)	Total	
			Efek pajak (Catatan 13f)	124,291	Tax effect (Note 13f)	
			Jumlah setelah pajak	(372,874)	Total net of tax	

48. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam informasi komparatif telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

48. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Certain accounts in the comparative information have been reclassified to conform with the presentation of the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31 December 2020.



**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

48. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan)

48. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS (continued)

	Tahun berakhir 31 Desember 2019/ Year ended 31 December 2019			
	Sebelum reklasifikasi/ Before <i>reclassifications</i>	Reklasifikasi/ Reclassifications	Setelah reklasifikasi/ After <i>reclassifications</i>	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian				Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
<u>Pendapatan dan beban operasional</u>				<u>Operating income and expense</u>
Pendapatan bunga	14,627,058	(403,431)	14,223,627	Interest income
Beban bunga	(7,513,059)	347,362	(7,165,697)	Interest expenses
<u>Pendapatan operasional lainnya</u>				<u>Other operating income</u>
Pendapatan operasional lainnya	973,750	58,284	1,032,034	Other operating income
Keuntungan dari selisih kurs dan transaksi derivatif bersih	586,759	(2,215)	584,544	Net gain on foreign exchange derivative transactions
<u>Beban operasional lainnya</u>				<u>Other operating expense</u>
Beban kepegawaian	(3,329,635)	(8,950)	(3,338,585)	Personnel expense
Beban umum dan administrasi	(3,262,539)	106,563	(3,155,976)	General and administrative expenses
Beban operasional lainnya	(537,698)	(97,613)	(635,311)	Other operating expenses

49. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

Bank menerbitkan laporan keuangan konsolidasian yang merupakan laporan keuangan utama. Informasi keuangan tambahan PT Bank BTPN Tbk (Entitas Induk) ini, dimana investasi pada Entitas Anak dicatat dengan metode harga perolehan, disajikan untuk dapat menganalisis hasil usaha entitas induk saja. Informasi keuangan tambahan PT Bank BTPN Tbk (Entitas Induk) (halaman 228-236) berikut ini harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian PT Bank BTPN Tbk dan Entitas Anak.

49. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

The Bank issued the consolidated financial statements as its primary financial statements. The supplementary financial information of PT Bank BTPN Tbk (Parent Entity) which account for investments in Subsidiary using the cost method, have been prepared in order that the parent entity's results of operations can be analysed. The following supplementary financial information of PT Bank BTPN Tbk (Parent Entity) (pages 228-236) should be read in conjunction with the consolidated financial statements of PT Bank BTPN Tbk and Subsidiary.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

LAMPIRAN 1.1

APPENDIX 1.1

PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITYLAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/December		
	2020	2019	
ASET			ASSETS
Kas	1,323,222	1,587,729	Cash
Giro pada Bank Indonesia	5,238,497	8,528,677	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank-bank lain:			Current accounts with other banks
- Pihak ketiga	523,521	317,982	Third parties -
- Pihak berelasi	370,551	725,450	Related parties -
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(497)	-	Less: allowance for impairment losses
	893,575	1,043,432	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	14,354,017	6,189,876	Placements with Bank Indonesia and other banks
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	3,049	218	Accrued interest income
	14,357,066	6,190,094	
Efek-efek			Securities
- Pihak ketiga	11,869,230	8,496,766	Third parties -
- Pihak berelasi	332,187	86,105	Related parties -
	12,201,417	8,582,871	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	192,345	33,397	Accrued interest income
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(291)	(6)	Less: Allowance for impairment losses
	12,393,471	8,616,262	
Tagihan derivatif			Derivative receivables
- Pihak ketiga	867,154	778,690	Third parties -
- Pihak berelasi	49,928	61,682	Related parties -
	917,082	840,372	
Tagihan akseptasi	1,490,634	1,692,460	Acceptance receivables
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(5,694)	(69)	Less: Allowance for impairment losses
	1,484,940	1,692,391	
Pinjaman yang diberikan:			Loans:
- Pihak ketiga	125,482,985	130,627,900	Third parties -
- Pihak berelasi	1,206,768	2,132,709	Related parties -
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	591,807	737,758	Accrued interest income
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(2,572,835)	(1,175,080)	Less: Allowance for impairment losses
	124,708,725	132,323,287	
Penyertaan saham	1,305,484	1,303,643	Investment in shares
Beban dibayar dimuka	1,847,003	2,140,893	Prepayments
Pajak dibayar dimuka			Prepaid taxes:
- Pajak penghasilan	209,055	321,312	Corporate income tax -
Aset pajak tangguhan	271,398	-	Deferred tax assets
Aset tetap	4,068,493	3,201,234	Fixed assets
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(2,042,622)	(1,517,038)	Less: Accumulated depreciation
	2,025,871	1,684,196	
Aset takberwujud	2,281,920	2,009,007	Intangible assets
Dikurangi: Akumulasi amortisasi	(1,404,745)	(1,068,375)	Less: Accumulated amortisation
	877,175	940,632	
Aset lain-lain	325,480	279,814	Other assets
JUMLAH ASET	168,178,044	167,492,734	TOTAL ASSETS



INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

LAMPIRAN 1.2

APPENDIX 1.2

**PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/December		
	2020	2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
Liabilitas segera	11,898	8,644	Liabilities due immediately
Simpanan nasabah			Deposits from customers
- Pihak ketiga	86,568,314	76,954,291	Third parties -
- Pihak berelasi	4,440,111	538,639	Related parties -
Beban bunga yang masih harus dibayar	268,383	210,601	Accrued interest expenses
	<u>91,276,808</u>	<u>77,703,531</u>	
Simpanan dari bank-bank lain			Deposits from other banks
- Pihak ketiga	670,846	4,368,251	Third parties -
- Pihak berelasi	5,904,428	7,291,425	Relate parties -
Beban bunga yang masih harus dibayar	370	57,081	Accrued interest expenses
	<u>6,575,644</u>	<u>11,716,757</u>	
Liabilitas derivatif	887,157	894,947	Derivative payables
Liabilitas akseptasi	767,282	888,459	Acceptance payables
Utang pajak:			Taxes payable:
- Pajak penghasilan	180,663	60,894	Income taxes -
- Pajak lain-lain	164,087	101,416	Other taxes -
	<u>344,750</u>	<u>162,310</u>	
Efek-efek yang diterbitkan:			Securities issued:
- Surat utang jangka menengah	-	1,301,409	Medium term notes -
- Utang obligasi	993,045	1,889,219	Bonds payable -
Beban bunga yang masih harus dibayar	7,379	26,286	Accrued interest expenses
	<u>1,000,424</u>	<u>3,216,914</u>	
Pinjaman yang diterima			Borrowings
- Pihak ketiga	8,233,408	6,868,795	Third parties -
- Pihak berelasi	22,852,789	31,193,978	Related parties -
Beban transaksi yang belum diamortisasi	(21,908)	(15,318)	Unamortised transaction costs
Beban bunga yang masih harus dibayar	119,055	141,471	Accrued interest expenses
	<u>31,183,344</u>	<u>38,188,926</u>	
Akrual	225,436	266,545	Accruals
Liabilitas imbalan kerja karyawan:			Employee benefits liabilities:
- Imbalan kerja jangka pendek	271,523	360,987	Short-term employee benefits -
- Imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya	123,338	26,436	Post-employment and other long-term - employees benefits
	<u>394,861</u>	<u>387,423</u>	
Liabilitas pajak tangguhan	-	53,052	Deferred tax liability
Liabilitas sewa	496,797	-	Leases
Liabilitas lain-lain	589,812	661,432	Other liabilities
Pinjaman subordinasi	6,111,750	6,038,888	Subordinated loans
Beban bunga yang masih harus dibayar	4,230	6,305	Accrued interest expenses
	<u>6,115,980</u>	<u>6,045,193</u>	
JUMLAH LIABILITAS	<u>139,870,193</u>	<u>140,194,133</u>	TOTAL LIABILITIES

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

LAMPIRAN 1.3

APPENDIX 1.3

**PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/December		
	2020	2019	
EKUITAS			SHAREHOLDERS' EQUITY
Modal saham			Share capital
Modal dasar Rp 300.000 terdiri dari:			Authorised capital of Rp 300,000 consists of:
15.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 20 (nilai penuh) per saham			15,000,000,000 shares with par value of Rp 20 (full amount) per share
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 8.148.931.869 saham (31 Desember 2019: 8.148.928.869 saham)	162,979	162,979	Issued and fully paid-up capital is 8,148,931,869 shares (31 December 2019: 8,148,928,869 shares)
Tambahan modal disetor	11,168,223	11,168,215	Additional paid-in capital
Cadangan revaluasi aset tetap	797,886	797,886	Reserve on revaluation of fixed assets
Cadangan pembayaran berbasis saham	-	244,012	Share-based payment reserve
Cadangan nilai wajar - bersih	101,211	12,079	Fair value reserve - net
Saldo laba			Retained earnings
- Dicadangkan	32,596	23,361	Appropriated -
- Belum dicadangkan	16,046,559	15,152,473	Unappropriated -
	<u>28,309,454</u>	<u>27,561,005</u>	
Komponen ekuitas lainnya	260,801	-	Other equity components
Saham tresuri	(262,404)	(262,404)	Treasury shares
JUMLAH EKUITAS	<u>28,307,851</u>	<u>27,298,601</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>168,178,044</u>	<u>167,492,734</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY



INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

LAMPIRAN 2.1

APPENDIX 2.1

**PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	2019	
PENDAPATAN (BEBAN) BUNGA			INTEREST INCOME (EXPENSES)
Pendapatan bunga	12,366,009	14,223,627	Interest income
Beban bunga	(5,281,544)	(7,165,697)	Interest expense
PENDAPATAN BUNGA BERSIH	7,084,465	7,057,930	NET INTEREST INCOME
Pendapatan operasional lainnya:			Other operating income:
Pendapatan komisi asuransi dan lain-lain	1,180,659	1,015,352	Insurance commission income and others
Keuntungan dari selisih kurs dan transaksi derivatif bersih	728,952	584,544	Net gain on foreign exchange and derivative transactions
	1,909,611	1,599,896	
Beban operasional lainnya:			Other operating expenses:
Beban kepegawaian	(2,161,292)	(2,239,560)	Personnel expenses
Beban umum dan administrasi	(2,562,967)	(2,595,608)	General and administrative expenses
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,949,454)	(1,136,480)	Provision for impairment losses
Beban operasional lain-lain	(566,822)	(534,723)	Other operating expenses
	(7,240,535)	(6,506,371)	
PENDAPATAN OPERASIONAL BERSIH	1,753,541	2,151,455	NET OPERATING INCOME
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL			NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)
Pendapatan non-operasional	4,231	3,084	Non-operating income
Beban non-operasional	(6,325)	(13,866)	Non-operating expenses
	(2,094)	(10,782)	
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1,751,447	2,140,673	PROFIT BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(357,717)	(547,889)	INCOME TAX EXPENSE
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	1,393,730	1,592,784	NET PROFIT FOR THE YEAR

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

LAMPIRAN 2.2

APPENDIX 2.2

PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITYLAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	2019	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:			OTHER COMPREHENSIVE INCOME:
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			Items that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	(75,682)	(42,969)	Remeasurements from employee benefits liabilities
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	19,964	10,742	Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss
	<u>(55,718)</u>	<u>(32,227)</u>	
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			Items that will be reclassified to profit or loss
Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	113,653	12,062	Unrealised gain on fair value changes of available for sale and measured at fair value through comprehensive income securities
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi	(24,521)	(3,016)	Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss
	<u>89,132</u>	<u>9,046</u>	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN	<u>33,414</u>	<u>(23,181)</u>	OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF INCOME TAX
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN	<u>1,427,144</u>	<u>1,569,603</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF INCOME TAX
LABA BERSIH PER SAHAM (NILAI PENUH)			EARNINGS PER SHARE (FULL AMOUNT)
Dasar	<u>173</u>	<u>203</u>	Basic
Dilusian	<u>173</u>	<u>200</u>	Diluted

PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY

LAMPIRAN 3.1

APPENDIX 3.1

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid-up share capital	Tambahan modal disetor/ Additional capital	Cadangan revaluasi aset tetap/ Reserve on revaluation of fixed assets	Pembayaran berbasis saham/ Share-based payment reserve	Cadangan nilai wajar - bersih/ Fair value reserve - net	Saldo laba yang digunakan/ Appropriated earnings	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated retained earnings	Saham treasury/ Treasury shares	Komponen ekuitas lainnya/ Other equity components	Jumlah ekuitas/ Total equity
Saldo tanggal 1 Januari 2020	162,979	11,168,215	797,886	244,012	12,079	23,361	15,152,473	(262,404)	-	27,298,601
Dampak penerapan awal PSAK 71 dan 73, bersih	-	-	-	-	-	-	(434,691)	-	-	(434,691)
Saldo per 1 Januari 2020 setelah penerapan PSAK 71 dan 73	162,979	11,168,215	797,886	244,012	12,079	23,361	14,717,782	(262,404)	-	26,863,910
Laba bersih periode berjalan	-	-	-	-	-	-	1,393,730	-	-	1,393,730
Penghasilan komprehensif lainnya: Perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	113,653	-	-	-	-	113,653
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	-	-	-	-	-	-	(75,682)	-	-	(75,682)
Efek pajak terkait	-	-	-	-	(24,521)	-	19,964	-	-	(4,557)
Jumlah laba komprehensif selama tahun berjalan	-	-	-	-	89,132	-	1,338,012	-	-	1,427,144
Penambahan cadangan wajib	-	-	-	-	-	9,235	(9,235)	-	-	-
Opsi saham: Penamaan dari penerbitan saham	-	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Cadangan pembayaran berbasis saham	-	-	-	16,789	-	-	-	-	-	16,789
Reklasifikasi ke komponen ekuitas lainnya	-	-	-	(260,801)	-	-	-	-	260,801	-
Saldo tanggal 31 Desember 2020	162,979	11,168,223	797,886	-	101,211	32,596	16,046,559	(262,404)	260,801	28,307,851

Effect of initial implementation of PSAK 71 and 73, net

Balance as of 1 January 2020, after effect of initial implementation of PSAK 71 and 73

Net profit of the year

Other comprehensive income: Changes in fair value of financial assets measured at fair value through comprehensive income

Remeasurements of employee benefits liabilities
Related tax effect

Total comprehensive income during the year

Appropriation for legal reserve

Share option: Proceed from shares issued
Share-based payment reserve
Reclassification to other equity components

Balance as of 31 December 2020



LAMPIRAN 3.2

APPENDIX 3.2

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid-up share capital	Tambahan modal disetor/ Additional capital paid in	Cadangan revaluasi aset tetap/ Reserve on revaluation of fixed assets	Pembayaran berbasis saham/ Share-based payment reserve	Cadangan nilai wajar - bersih/ Fair value reserve - net	Saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya/ Appropriated retained earnings	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated retained earnings	Saham treasury/ Treasury shares	Jumlah ekuitas/ Total equity
Saldo tanggal 1 Januari 2019	117,033	1,458,886	797,886	281,748	3,033	23,361	13,591,916	(262,404)	16,011,459
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	1,592,784	-	1,592,784
Penghasilan komprehensif lainnya: Perubahan nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	-	-	12,061	-	-	-	12,061
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	-	-	-	-	-	-	(42,969)	-	(42,969)
Efek pajak terkait	-	-	-	-	(3,015)	-	10,742	-	7,727
Jumlah laba komprehensif selama tahun berjalan	-	-	-	-	9,046	-	1,560,557	-	1,569,603
Efek dari penggabungan usaha Opsi saham:	45,937	9,708,197	-	-	-	-	-	-	9,754,134
Penerimaan dari penerbitan saham	9	1,132	-	-	-	-	-	-	1,141
Pembayaran berbasis saham	-	-	-	(37,736)	-	-	-	-	(37,736)
Saldo tanggal 31 Desember 2019	162,979	11,168,215	797,886	244,012	12,079	23,361	15,152,473	(262,404)	27,298,601

Balance as of 1 January 2019

Net profit for the year

Other comprehensive income:
Changes in fair value of
available for sale financial assetsRemeasurements of employee benefits
Liabilities

Related tax effect

Total comprehensive income during
the yearImpact of merger
Share option:Proceed from shares issued
Share-based payments

Balance as of 31 December 2019



INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

LAMPIRAN 4.1

APPENDIX 4.1

**PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY**

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019***

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan pendapatan bunga	12,350,181	14,340,047	Receipts from interest
Pembayaran beban bunga	(5,320,011)	(7,340,094)	Payments of interest expense
Penerimaan pendapatan operasional lainnya	1,993,035	1,595,772	Receipts from other operating income
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	95,800	109,567	Recovery from written-off loans
Pembayaran beban kepegawaian	(2,212,747)	(2,291,167)	Payments of personnel expenses
Pembayaran beban operasional lainnya	(2,132,992)	(2,260,201)	Payments of other operating expenses
Pembayaran lain-lain	(2,766)	(6,631)	Other payments
Pembayaran pajak penghasilan badan	(237,948)	(747,635)	Payments of corporate income tax
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	4,532,552	3,399,658	Cash flows before changes in operating assets and liabilities
(Kenaikan) penurunan aset operasi:			(Increase) decrease in operating assets:
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	1,591,672	Securities purchased under resale agreement
Pinjaman yang diberikan	5,010,224	(4,980,410)	Loans
Tagihan derivatif	(76,710)	(53,974)	Derivative receivables
Tagihan akseptasi	207,451	966,125	Acceptance receivables
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:			Increase (decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera	3,254	(3,004)	Obligation due immediately
Simpanan nasabah	13,515,495	(15,804,325)	Deposits from customers
Simpanan dari bank-bank lain	(5,084,402)	4,822,718	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	(7,790)	(222,689)	Derivative payables
Liabilitas akseptasi	(121,177)	(1,086,023)	Acceptance receivables
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	17,978,897	(11,370,252)	Net cash flows provided from (used in) operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian efek-efek	(66,769,061)	(28,997,061)	Purchases of securities
Penerimaan dari pelepasan efek-efek	63,217,538	31,122,898	Proceeds from disposal of securities
Pembelian aset tetap	(126,928)	(204,941)	Purchases of fixed assets
Perolehan aset hak guna	(22,332)	-	Purchases of right-of-use assets
Perolehan aset takberwujud	(515,570)	(359,041)	Purchases of intangible assets
Hasil dari penjualan aset tetap	2,588	3,864	Proceeds from sale of fixed assets
Pengalihan kas dan setara kas sehubungan dengan penggabungan usaha	-	11,289,137	Cash and cash equivalents transfer due to merger
Penambahan penyertaan saham	-	2,049	Additional investment in shares
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi	(4,213,765)	12,856,905	Net cash flows (used in) provided from investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran efek-efek yang diterbitkan	(2,197,583)	(300,000)	Payments of securities issued
Penerimaan dari efek-efek yang diterbitkan	-	1,000,000	Proceeds from issuance of bonds
Pembayaran beban emisi obligasi	-	(9,992)	Payments bonds issuance cost
Pembayaran biaya transaksi atas pinjaman yang diterima	(10,450)	(7,077)	Payments of borrowing transaction cost
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	29,153,346	172,265,489	Proceeds from borrowings
Pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman yang diterima	(36,129,922)	(172,817,491)	Installment payments and settlement of borrowings
Hasil penerbitan saham	8	1,141	Proceeds from shares issued
Pembayaran pokok liabilitas sewa	(132,481)	-	Payment of principal lease liabilities
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	(9,317,082)	132,070	Net cash flows (used in) provided from financing activities

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

LAMPIRAN 4.2APPENDIX 4.2PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITYLAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2020 AND 2019*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

	2020	2019	
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	4,448,050	1,618,723	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
DAMPAK PERUBAHAN SELISIH KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS	(10,562)	(35,026)	EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	17,886,451	16,302,754	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	22,323,939	17,886,451	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR

Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:

Kas	1,323,222	1,587,729
Giro pada Bank Indonesia	5,238,497	8,528,677
Giro pada bank-bank lain	893,575	1,043,432
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	14,354,017	6,189,876
Efek-efek	514,628	536,737
	<u>22,323,939</u>	<u>17,886,451</u>

Cash and cash equivalents at end of year consists of:

Cash
Current accounts with Bank Indonesia
Current accounts with other banks
Placements with Bank Indonesia and other banks
Securities

INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS:

AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI
ARUS KAS

Penerbitan modal saham sehubungan dengan penggabungan usaha	-	9,754,134
Cadangan pembayaran berbasis saham	16,789	37,736
Pembelian aset tetap yang masih terhutang	(287)	(1,402)

SUPPLEMENTAL CASH FLOWS
INFORMATION:ACTIVITIES NOT AFFECTING
CASH FLOWS

Issuance of shares in relation with merger
Share-based payment reserves
Acquisition of fixed assets still unpaid



Lampiran

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 9/SEOJK.03/2020 TENTANG TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK UMUM KONVENSIONAL

Keterangan	Halaman
1. Informasi Umum	
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan paling kurang 2 (dua) tahun buku atau sejak memulai usaha jika Bank tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 2 (dua) tahun, paling sedikit memuat:	14-15
1) Pendapatan bunga bersih;	14
2) Laba operasional;	14
3) Laba sebelum pajak;	14
4) Laba bersih;	14
5) Total laba (rugi) komprehensif;	14
6) Laba bersih per saham;	14
7) Jumlah aset;	14
8) Jumlah liabilitas;	14
9) Jumlah ekuitas;	14
10) Aset produktif;	14
11) Dana pihak ketiga;	14
12) Pinjaman yang diterima;	14
13) Rasio KPMM;	15
14) Return on Asset (ROA);	15
15) Return on Equity (ROE);	15
16) Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan;	-
17) Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO);	15
18) Cost to Income Ratio (CIR);	-
19) Persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);	15
20) Rasio Giro Wajib Minimum (GWM);	15
21) Rasio Posisi Devisa Neto (PDN); dan	15
22) Informasi dan rasio keuangan lain yang relevan dengan industri perbankan.	15
b. Profil Bank	56
Profil Bank paling sedikit memuat:	
1) Nama Bank, termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	56
2) Akses terhadap Bank, termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	56
a) Alamat;	56
b) Nomor telepon;	56
c) Alamat surat elektronik; dan	56
d) Alamat situs web;	56
3) Riwayat singkat Bank;	57
4) Visi dan misi Bank;	64
5) Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	60-61
6) Struktur organisasi Bank paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah direksi, disertai dengan nama dan jabatan;	62-63

Keterangan	Halaman
7) Susunan dan komposisi pemegang saham, yaitu nama pemegang saham dan persentase kepemilikan, termasuk:	99-101
a) Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Bank;	100
b) Anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang memiliki saham Bank;	101
c) Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Bank;	99
d) Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Bank, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	99
8) Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana bank memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Bank (jika ada);	102
9) Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak;	102
10) Profil direksi dan dewan komisaris, paling sedikit, memuat:	
a) Susunan direksi, dewan komisaris beserta jabatan, dan ringkasan riwayat hidupnya;	66-80
b) Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;	66-80
c) Foto terbaru;	66-80
d) Usia;	66-80
e) Kewarganegaraan;	66-80
f) Riwayat pendidikan;	66-80
g) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	66-80
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota direksi dan dewan komisaris pada Bank yang bersangkutan;	66-80
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lain (jika ada); dan	66-80
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Bank;	66-80
h) Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota direksi dan dewan komisaris dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada); dan	66-80
i) Hubungan afiliasi dengan anggota direksi lain, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi.	66-80
11) Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, maka susunan yang dicantumkan dalam laporan tahunan yaitu susunan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang sebelum dan setelah perubahan;	-
12) Profil singkat pejabat eksekutif, termasuk susunan pejabat eksekutif beserta jabatan dan ringkasan riwayat hidup.	88-90
13) Jumlah karyawan dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia karyawan dalam tahun buku; dan	91-92
14) Penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima Bank baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada), yang memuat:	24-25
a) Nama penghargaan dan/atau sertifikasi;	24-25
b) Badan atau lembaga yang memberikan; dan	24-25
c) Masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (jika ada);	24-25
2. Informasi Kinerja Keuangan	
a. Laporan direksi	36-45
Uraian singkat mengenai kinerja Bank, yang paling sedikit meliputi:	
1) Strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen Bank, termasuk untuk UUS apabila Bank memiliki UUS;	39-41
2) Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan;	40
3) Kendala yang dihadapi Bank;	38
4) Gambaran tentang prospek usaha;	42
5) Penerapan tata kelola Bank;	
6) Perubahan komposisi anggota direksi dan alasan perubahan (jika ada);	44
7) Struktur organisasi;	62-63
8) Aktivitas utama;	60-61
9) Teknologi informasi;	43



Keterangan	Halaman
10) Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah;	61
11) Tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana;	41
12) Perkembangan perekonomian dan target pasar;	38
13) Jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri;	-
14) Jumlah, jenis, dan lokasi kantor;	102
15) Kepemilikan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank;	101
16) Perubahan-perubahan penting yang terjadi pada Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan;	38
17) Hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang; dan	42
18) Sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.	91-92
b. Laporan dewan komisaris	28-33
Laporan dewan komisaris paling sedikit memuat:	
1) Susunan dewan komisaris, beserta jabatan, dan ringkasan riwayat hidup;	66-70
2) Penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan Bank;	29-30
3) Pengawasan terhadap implementasi strategi Bank;	30
4) Pandangan atas prospek usaha Bank yang disusun oleh direksi;	31
5) Pandangan atas penerapan tata kelola Bank;	32
6) Perubahan komposisi anggota dewan komisaris dan alasan perubahan (jika ada); dan	33
7) Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota direksi;	32
c. Analisis dan pembahasan manajemen	
Analisis dan pembahasan manajemen yang memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam Tahun Buku, paling sedikit mengenai:	
1) Tinjauan kinerja per segmen usaha termasuk UUS, paling sedikit mengenai:	110-131
a. Pendapatan; dan	110-130
b. Profitabilitas;	131
2) Tinjauan kinerja keuangan yang mencakup perbandingan kinerja keuangan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, penjelasan mengenai penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, yang paling sedikit mengenai:	132
a. Penanaman dana (investasi dan pemberian kredit/pembiayaan) dan total aset;	134-135
b. Dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain;	136
c. Ekuitas;	137
d. Pendapatan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif;	137-138
e. Arus kas; dan	138-139
f. Suku bunga dasar kredit;	140
3) Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan yang relevan;	134-137
4) Struktur permodalan Bank;	140-141
5) Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); dan	142
6) Aspek pemasaran atas produk Bank, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	151
3. Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan	
Eksposur risiko dan permodalan meliputi laporan eksposur risiko dan permodalan periode tahunan sebagaimana diatur dalam bagian II Laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan.	159-227
4. Informasi Tata Kelola	
Dalam hal Bank menggabungkan laporan pelaksanaan tata kelola dalam Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Tahunan, maka ruang lingkup dan pedoman pengisian mengacu pada POJK mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.	244-339

Keterangan	Halaman
5. Laporan Keberlanjutan	
a. Laporan Keberlanjutan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Dalam hal bank menggabungkan laporan keberlanjutan dalam laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, maka ruang lingkup dan pedoman pengisian laporan mengacu pada POJK dimaksud.	-
b. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.	342-354
1) Informasi mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:	
a) lingkungan hidup;	349-350
b) praktik ketenagakerjaan;	351-352
c) praktik kegiatan institusi yang sehat;	348-349
d) konsumen; dan	353
e) pengembangan masyarakat.	354
2) Dalam hal Bank menyajikan informasi mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada laporan tersendiri seperti laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Bank dikecualikan untuk mengungkapkan informasi mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan.	-
6. Laporan Keuangan Tahunan	
Laporan keuangan tahunan yaitu Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	361-596
7. Informasi terkait dengan Kelompok Usaha Bank	
a. Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, harus menambahkan dengan:	
1) struktur kelompok usaha Bank yang meliputi:	
a) struktur kelompok usaha Bank, antara lain terdiri dari Bank, Entitas Anak, perusahaan terelasi (sister company), Entitas Induk sampai dengan ultimate shareholder;	97
b) struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha Bank; dan	-
c) pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain. Pengertian pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan Bank, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian;	-
2) transaksi antara Bank dengan pihak-pihak berelasi dalam kelompok usaha Bank, memperhatikan:	
a) informasi transaksi dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan Bank maupun yang dilakukan oleh setiap entitas di dalam kelompok usaha Bank yang bergerak di bidang keuangan;	147-148
b) pihak-pihak berelasi yaitu pihak-pihak sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan;	147-148
c) jenis transaksi dengan pihak-pihak berelasi, antara lain:	147-148
(1) kepemilikan silang;	-
(2) transaksi dari suatu kelompok usaha yang bertindak untuk kepentingan kelompok usaha yang lain;	147-148
(3) pengelolaan likuiditas jangka pendek dalam kelompok usaha;	147-148
(4) penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh entitas lain dalam satu kelompok usaha;	147-148
(5) eksposur kepada pemegang saham mayoritas antara lain dalam bentuk pinjaman, komitmen, dan kontinjensi; dan	-
(6) pembelian, penjualan, dan/atau penyewaan aset dengan entitas lain dalam suatu kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan repurchase agreement (repo);	147-148
3) transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan oleh setiap entitas dalam kelompok usaha Bank yang bergerak di bidang keuangan;	147-148
4) penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank kepada debitur dan/atau pihak-pihak yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank; dan	-
5) adanya larangan, batasan, dan/atau hambatan signifikan lain untuk melakukan transfer dana atau dalam rangka pemenuhan modal yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang antara Bank dengan entitas lain dalam satu kelompok usaha.	-
8. Informasi Tambahan bagi Bank yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik	
Bank yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik menambahkan ruang lingkup informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik	√



Referensi SEOJK

NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

Keterangan		Halaman
I. Ketentuan Umum		
1.	Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.	✓
2.	Seiring dengan perkembangan Pasar Modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.	✓
3.	Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.	✓
4.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan.	✓
II. Bentuk Laporan Tahunan		
1.	Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.	✓
2.	Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.	✓
3.	Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format pdf.	✓
III. Isi Laporan Tahunan		
1. Ketentuan Umum		
a.	Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai:	
1)	ikhtisar data keuangan penting;	14-15
2)	informasi saham (jika ada);	18-19
3)	laporan Direksi;	36-45
4)	laporan Dewan Komisaris;	28-33
5)	profil Emiten atau Perusahaan Publik;	56-106
6)	analisis dan pembahasan manajemen;	110-151
7)	tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	244-339
8)	tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;	342-354
9)	laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	361-596
10)	surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan;	52-53
b.	Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami;	✓
2. Uraian Isi Laporan Tahunan		
a.	Ikhtisar Data Keuangan Penting	14-15
	Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	14-15
1)	pendapatan/penjualan;	14
2)	laba bruto;	14
3)	laba (rugi);	14
4)	jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	14
5)	total laba (rugi) komprehensif;	14
6)	jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	14
7)	laba (rugi) per saham;	14
8)	jumlah aset;	14
9)	jumlah liabilitas;	14
10)	jumlah ekuitas;	14
11)	rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	15
12)	rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	15
13)	rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan;	15
14)	rasio lancar;	15
15)	rasio liabilitas terhadap ekuitas;	15
16)	rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	15
17)	informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya;	15

Keterangan		Halaman
b.	Informasi Saham	
	Informasi Saham (jika ada) paling sedikit memuat:	18-19
1)	saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	18-19
	a) jumlah saham yang beredar;	18
	b) kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	19
	c) harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	19
	d) volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	18
	Informasi pada huruf a) diungkap oleh Emiten yang merupakan Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek;	√
	Informasi pada huruf b), c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika Emiten merupakan Perusahaan Terbuka dan sahamnya tercatat di Bursa Efek;	√
2)	dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	19
	a) tanggal pelaksanaan aksi korporasi;	-
	b) rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham	-
	c) jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan	-
	d) harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	-
3)	dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension), dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan	-
4)	dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) sebagaimana dimaksud pada angka 3) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut;	-
c.	Laporan Direksi	36-45
	Laporan Direksi paling sedikit memuat:	
1)	uraian singkat mengenai kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit meliputi:	38-41
	a) strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	39
	b) perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan	40
	c) kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	38
2)	gambaran tentang prospek usaha;	42
3)	penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; dan	43
4)	perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada);	44
d.	Laporan Dewan Komisaris	28-33
	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat:	
1)	penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik;	29-30
2)	pengawasan terhadap implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	30-31
3)	pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi;	31-32
4)	pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	32
5)	perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan	33
6)	frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi;	32
e.	Profil Emiten atau Perusahaan Publik	56-106
	Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat:	
1)	nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	56
2)	akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	56
	a) alamat;	56
	b) nomor telepon;	56
	c) nomor faksimile;	56
	d) alamat surat elektronik; dan	56
	e) alamat Situs Web;	56
3)	riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	57-59
4)	visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik;	64-65
5)	kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	60-61
6)	struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan;	62-63
7)	profil Direksi, paling sedikit memuat:	
	a) nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;	71-80
	b) foto terbaru;	71-80
	c) usia;	71-80



Keterangan		Halaman
d)	kewarganegaraan;	71-80
e)	riwayat pendidikan;	71-80
f)	riwayat jabatan, meliputi informasi:	71-80
1)	dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	71-80
2)	rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	71-80
3)	pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	71-80
g)	pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Direksi dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada); dan	71-80
h)	hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi;	71-80
8)	profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	66-70
a)	nama;	66-70
b)	foto terbaru;	66-70
c)	usia;	66-70
d)	kewarganegaraan;	66-70
e)	riwayat pendidikan;	66-70
f)	riwayat jabatan, meliputi informasi:	
(1)	dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	66-70
(2)	dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	66-70
(3)	rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	66-70
(4)	pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	66-70
g)	pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Dewan Komisaris dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada);	66-70
h)	hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi; dan	66-70
i)	pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada);	66-70
g)	dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	-
10)	jumlah karyawan dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia karyawan dalam tahun buku;	91-92
11)	nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari:	
a)	pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;	100
b)	anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan	101
c)	kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik;	100
12)	jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	100
a)	kepemilikan institusi lokal;	-
b)	kepemilikan institusi asing;	-
c)	kepemilikan individu lokal; dan	-
d)	kepemilikan individu asing;	-
13)	informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	99
14)	nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (jika ada);	102
	Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut;	102
15)	kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan (jika ada);	103
16)	kronologi pencatatan Efek lainnya selain Efek sebagaimana dimaksud pada angka 15), yang paling sedikit memuat nama Efek, tahun penerbitan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat Efek (jika ada);	104
17)	nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal;	105
18)	dalam hal terdapat profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada Emiten atau Perusahaan Publik, diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi (fee), dan periode penugasan; dan	105
19)	penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima Emiten atau Perusahaan Publik baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada), yang memuat:	24-25
a)	nama penghargaan dan/atau sertifikasi;	24-25
b)	badan atau lembaga yang memberikan; dan	24-25
c)	masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (kalau ada);	24-25

Keterangan		Halaman
f.	Analisis dan Pembahasan Manajemen	
	Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	110-151
1)	tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	114-130
	a) produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	114-130
	b) pendapatan/penjualan; dan	114-130
	c) profitabilitas;	131
2)	kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	132-
	a) aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	134-135
	b) liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;	136
	c) ekuitas;	137
	d) pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan	137-138
	e) arus kas	138-139
3)	kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	139
4)	tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	139-140
5)	struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	140-141
6)	bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:	141
	a) tujuan dari ikatan tersebut;	-
	b) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;	-
	c) mata uang yang menjadi denominasi; dan	-
	d) langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	-
7)	bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	141-142
	a) jenis investasi barang modal;	141-142
	b) tujuan investasi barang modal; dan	141-142
	c) nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	141-142
8)	informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	142
9)	prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	143
10)	perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	142
	a) pendapatan/penjualan;	142
	b) laba (rugi);	142
	c) struktur modal (capital structure);	142
	d) kebijakan dividen; atau	142
	e) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	142
11)	target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	142
	a) pendapatan/penjualan;	142
	b) laba (rugi);	142
	c) struktur modal (capital structure);	142
	d) kebijakan dividen; atau	142
	e) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	142
12)	aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	151
13)	uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit:	143
	a) kebijakan dividen;	143
	b) tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;	-
	c) jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan	-
	d) jumlah dividen per tahun yang dibayar;	-
14)	realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:	146-147
	a) dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan	146-147
	b) dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	146-147



Keterangan		Halaman
15)	informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi Afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:	147-149
	a) tanggal, nilai, dan objek transaksi;	147-149
	b) nama pihak yang melakukan transaksi;	147-149
	c) sifat hubungan Afiliasi (jika ada);	147-149
	d) penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan	147-149
	e) pemenuhan ketentuan terkait;	147-149
16)	perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	149
17)	perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);	149
g.	Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik	244-339
	Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	
1)	Direksi, mencakup antara lain:	
	a) tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	277-278
	b) pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi;	
	c) prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;	312-314
	d) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut;	281-286
	e) informasi mengenai keputusan RUPS 1 (satu) tahun sebelumnya, meliputi:	261-268
	(1) keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan	261-268
	(2) alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan;	261-268
	f) informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku, meliputi:	255--261
	(1) keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan	261-268
	(2) alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan; dan	261-268
	g) penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi;	279
2)	Dewan Komisaris, mencakup antara lain:	
	a) tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	270-272
	b) pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris;	270
	c) prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris;	312-314
	d) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut;	281
	e) kebijakan Emiten atau Perusahaan Publik tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit meliputi:	250-252
	(1) prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;	250-252
	(2) kriteria yang digunakan; dan	250-252
	(3) pihak yang melakukan penilaian;	250-252
	f) penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; dan	273
	g) dalam hal Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, dimuat informasi paling sedikit mengenai:	291-293
	(1) alasan tidak dibentuknya komite; dan	
	(2) prosedur nominasi dan remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku;	
3)	Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	-
	a) nama;	-
	b) tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; dan	-
	c) frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	-
4)	Komite Audit, mencakup antara lain:	
	a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	81-82
	b) usia;	81-82
	c) kewarganegaraan;	81-82
	d) riwayat pendidikan;	81-82
	e) riwayat jabatan, meliputi informasi:	81-82
	(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	81-82
	(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	81-82
	(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	81-82
	f) periode dan masa jabatan anggota Komite Audit;	289

Keterangan		Halaman
	g) pernyataan independensi Komite Audit;	
	h) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut;	289
	i) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	290
	j) pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) Komite Audit;	289-290
5)	komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti Komite Nominasi dan Remunerasi, mencakup antara lain:	
	a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	83-87
	b) usia;	83-87
	c) kewarganegaraan;	83-87
	d) riwayat pendidikan;	83-87
	e) riwayat jabatan, meliputi informasi:	
	(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	83-87
	(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	83-87
	(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	83-87
	f) periode dan masa jabatan anggota komite;	291-298
	g) uraian tugas dan tanggung jawab;	291-298
	h) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite;	291-298
	i) pernyataan independensi komite;	291-298
	j) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;	291-298
	k) uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;	291-298
	l) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	291-298
6)	Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain:	
	a) nama;	316
	b) domisili;	316
	c) riwayat jabatan, meliputi informasi:	316
	(1) dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan	316
	(2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	316
	d) riwayat pendidikan;	316
	e) pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; dan	318-320
	f) uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku;	316-318
7)	Unit Audit Internal, mencakup antara lain:	
	a) nama kepala Unit Audit Internal;	329
	b) riwayat jabatan, meliputi informasi:	
	(1) dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan	329
	(2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	329
	c) kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	332-333
	d) pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku;	334
	e) struktur dan kedudukan Unit Audit Internal;	330
	f) uraian tugas dan tanggung jawab;	330-331
	g) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Unit Audit Internal; dan	331
	h) uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku;	333-334
8)	uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	
	a) pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan	
	b) tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal;	



Keterangan		Halaman
9)	sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	154-173
a)	gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	154-159
b)	jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan	159-227
c)	tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	158
10)	perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi:	336
a)	pokok perkara/gugatan;	-
b)	status penyelesaian perkara/gugatan; dan	-
c)	pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	-
11)	informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	336
12)	informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	336-337
a)	pokok-pokok kode etik;	337
b)	bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan	337
c)	pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	337
13)	informasi mengenai budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan (jika ada);	65
14)	uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain mengenai:	143-146
a)	jumlah saham dan/atau opsi;	144-146
b)	jangka waktu pelaksanaan;	144-146
c)	persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	144-146
d)	harga pelaksanaan;	144-146
15)	uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi:	
a)	cara penyampaian laporan pelanggaran;	338
b)	perlindungan bagi pelapor;	339
c)	penanganan pengaduan;	339
d)	pihak yang mengelola pengaduan; dan	339
e)	hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi:	339
(1)	jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan	339
(2)	tindak lanjut pengaduan;	339
16)	penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	247-249
a)	pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	247-249
b)	penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada);	247-249
h.	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik	
1)	Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:	342-354
a)	lingkungan hidup, antara lain:	349-350
(1)	penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang;	350
(2)	sistem pengolahan limbah Emiten atau Perusahaan Publik;	-
(3)	mekanisme pengaduan masalah lingkungan; dan	350
(4)	sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki;	350
b)	praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, antara lain:	351-352
(1)	kesetaraan gender dan kesempatan kerja;	351
(2)	sarana dan keselamatan kerja;	352
(3)	tingkat perpindahan (<i>turnover</i>) karyawan;	352
(4)	tingkat kecelakaan kerja;	352
(5)	pendidikan dan/atau pelatihan;	352
(6)	remunerasi; dan	352
(7)	mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan;	352

Keterangan		Halaman
c)	pengembangan sosial dan kemasyarakatan, antara lain:	354
(1)	penggunaan tenaga kerja lokal;	354
(2)	pemberdayaan masyarakat sekitar Emiten atau Perusahaan Publik antara lain melalui penggunaan bahan baku yang dihasilkan oleh masyarakat atau pemberian edukasi;	354
(3)	perbaikan sarana dan prasarana sosial;	354
(4)	bentuk donasi lainnya; dan	354
(5)	komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di Emiten atau Perusahaan Publik, serta pelatihan mengenai anti korupsi (jika ada);	354
d)	tanggung jawab barang dan/atau jasa, antara lain:	
(1)	kesehatan dan keselamatan konsumen;	353
(2)	informasi barang dan/atau jasa; dan	353
(3)	sarana, jumlah, dan penanggulangan atas pengaduan konsumen.	353
2)	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada laporan tersendiri seperti laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau laporan keberlanjutan (sustainability report), Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Tahunan; dan	-
3)	Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan;	√
i	Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit	361-587
	Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perusahaan Efek dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek; dan	
j	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan	52-53
	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	52-53

20

NAVIGATING THROUGH

**THE CHALLENGE
OF GROWTH**

20

Laporan Tahunan

bank
btpn

 **SMBC** A MEMBER OF
SMBC Group

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 – 5.6
Jakarta 12950

Tel. : +62 21 300 26 200
Faks. : +62 21 300 26 309

btpn.com

